



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024
DI PALANGKA RAYA**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

Nomor : 43.A/LHP/XIX.PAL/06/2025

Tanggal : 20 JUNI 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
DI PALANGKA RAYA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	iii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	5
NERACA.....	6
LAPORAN OPERASIONAL	8
LAPORAN ARUS KAS	11
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	13
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	14
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Palangka Raya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Palangka Raya. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi

akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 43.B/LHP/XIX.PAL/06/2025 tanggal 20 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Dodik Achmad Akbar

Register Negara Akuntan No. 12707

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Palangka Raya yang memiliki 33 SKPD dan dua BLUD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Neraca tanggal 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;

- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajiban penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 50 hari yang terbagi dalam dua tahap, yaitu:

- a. Pemeriksaan Interim dilakukan selama 25 hari, dari tanggal 14 Februari s.d. 14 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 40/ST/XIX.PAL/02/2025 tanggal 18 Februari 2025; dan
- b. Pemeriksaan Terinci selama 25 hari, dari tanggal 25 April s.d. 27 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 96/ST/XIX.PAL/04/2025 tanggal 25 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
PENDAPATAN	5.1.1.	1.464.011.748.708,00	1.417.903.755.850,09	96,85	1.259.296.045.300,85
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.	233.763.792.010,00	199.606.408.643,09	85,39	188.380.645.282,85
Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	164.415.266.411,00	162.297.437.983,74	98,71	150.594.656.898,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	20.839.724.550,00	18.278.383.635,00	87,71	13.933.973.543,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	2.049.777.516,00	2.597.478.582,50	126,72	81.147.428,96
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	46.459.023.533,00	16.433.108.441,85	35,37	23.770.867.412,87
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1.	233.763.792.010,00	199.606.408.643,09	85,39	188.380.645.282,85
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	1.218.863.288.858,00	1.205.220.225.806,00	98,88	1.059.402.458.308,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.	1.100.907.459.416,00	1.087.216.394.103,00	98,76	907.090.158.377,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.	286.915.807.070,00	289.596.261.149,00	100,93	142.989.011.494,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.	653.373.519.000,00	658.988.233.482,00	100,86	615.517.742.730,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.	28.827.376.000,00	27.974.653.026,00	97,04	36.180.579.044,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.	131.790.757.346,00	110.657.246.446,00	83,96	112.402.825.109,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.	1.100.907.459.416,00	1.087.216.394.103,00	98,76	907.090.158.377,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2.	5.933.778.000,00	5.933.778.000,00	100,00	6.598.785.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.	0,00	0,00	0,00	6.598.785.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.	5.933.778.000,00	5.933.778.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	5.1.1.2.2.	5.933.778.000,00	5.933.778.000,00	100,00	6.598.785.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3.	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	100,04	145.713.514.931,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	100,04	145.713.514.931,00

URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3.	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	100,04	145.713.514.931,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	1.218.863.288.858,00	1.205.220.225.806,00	98,88	1.059.402.458.308,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.	11.384.667.840,00	13.077.121.401,00	114,87	11.512.941.710,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	375.000.000,00	2.754.227.295,00	734,46	1.752.906.664,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2.	11.009.667.840,00	10.322.894.106,00	93,76	9.760.035.046,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.	11.384.667.840,00	13.077.121.401,00	114,87	11.512.941.710,00
JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1.	1.464.011.748.708,00	1.417.903.755.850,09	96,85	1.259.296.045.300,85
BELANJA	5.1.2.	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	93,94	1.326.550.654.745,85
BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.098,22	93,42	1.044.031.428.999,85
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	609.021.000.651,00	584.810.451.366,00	96,02	520.443.307.879,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	522.915.095.415,00	475.404.126.994,33	90,91	475.137.420.309,85
Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	2.915.029.008,00	2.529.454.558,89	86,77	5.649.396.698,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	68.566.771.687,00	61.498.073.179,00	89,69	41.261.099.863,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	1.732.500.000,00	1.595.534.000,00	92,09	1.540.204.250,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.098,22	93,42	1.044.031.428.999,85
BELANJA MODAL	5.1.2.2.	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	95,97	281.343.767.566,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	2.738.505.000,00	2.620.818.000,00	95,70	4.003.383.082,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	56.662.824.505,00	48.825.356.209,00	86,17	84.884.254.418,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	124.551.650.370,00	121.569.959.253,32	97,61	111.616.449.607,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	157.411.660.842,00	154.589.854.012,13	98,21	78.792.977.882,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	255.200.000,00	252.895.000,00	99,10	1.992.109.257,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	150.000.000,00	138.500.000,00	92,33	54.593.320,00
JUMLAH BELANJA MODAL	5.1.2.2.	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	95,97	281.343.767.566,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	71,89	930.458.180,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	71,89	930.458.180,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	71,89	930.458.180,00

URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32	245.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32	245.000.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32	245.000.000,00
JUMLAH BELANJA	5.1.2.	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	93,94	1.326.550.654.745,85
SURPLUS/DEFISIT		-85.929.003.767,00	-38.170.353.022,58	44,42	-67.254.609.445,00
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3.	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14	106,14	225.040.324.552,80
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	100,00	291.625.078.331,80
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	100,00	291.625.078.331,80
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	100,00	291.625.078.331,80
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66	92,66	66.584.753.779,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1.	15.777.500.000,00	10.507.500.000,00	66,60	10.507.500.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2.	56.079.211.341,00	56.077.238.450,66	100,00	56.077.253.779,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.1.3.2.2.	1.385.000.000,00	1.383.423.066,66	99,89	1.383.423.067,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.3.2.2.	54.694.211.341,00	54.693.815.384,00	100,00	54.693.830.712,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66	92,66	66.584.753.779,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14	106,14	225.040.324.552,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.4.	0,00	53.030.623.634,56	0,00	157.785.715.107,80

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAHID NAPARIN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.	157.785.715.107,80	291.635.828.331,80
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5.2.	157.785.715.107,80	291.625.078.331,80
SUBTOTAL (1-2)	5.2.	0,00	10.750.000,00
SiLPA/(SiKPA)	5.2.	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80
SUBTOTAL (3+4)	5.2.	53.030.623.634,56	157.796.465.107,80
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.	0,00	-10.750.000,00
LAIN-LAIN	5.2.	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.2.	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	2024	2023
ASET	5.3.1.	4.343.188.026.066,94	4.370.090.643.175,89
ASET LANCAR	5.3.1.1.	208.429.986.148,53	279.917.025.982,16
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1.	40.115.276.893,75	109.093.416.112,78
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2.	13.743.035,76	15.682.278,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3.	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4.	10.181.678.669,09	43.582.817.213,14
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5.	0,00	981.786.363,10
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6.	192.969.847,86	564.433.524,78
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7.	702.011,00	3.547.579.616,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.8.	1.199.719.970,10	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.9.	1.326.533.207,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.1.10.	129.309.499.816,37	118.634.035.987,84
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.1.11.	2.160.623.438,00	2.285.182.734,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.1.12.	3.780.124.093,00	4.135.514.216,82
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.1.13.	29.995.578.751,00	14.971.812.545,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.1.15.	-101.887.412.388,42	-75.038.978.120,00
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.1.16.	224.397.000,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.14.1.	1.716.620.737,79	155.750.000,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.14.2.	60.220.000,00	93.659.819,00
Persediaan	5.3.1.1.1.17.	90.039.711.066,23	56.894.333.691,70
JUMLAH ASET LANCAR	5.3.1.1.	208.429.986.148,53	279.917.025.982,16
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	99.755.448.451,41	89.247.948.451,41
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.	99.755.448.451,41	89.247.948.451,41
Penyertaan Modal	5.3.1.2.	99.755.448.451,41	89.247.948.451,41
JUMLAH INVESTASI PERMANEN	5.3.1.2.	99.755.448.451,41	89.247.948.451,41
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	99.755.448.451,41	89.247.948.451,41
ASET TETAP	5.3.1.3.	3.883.766.735.504,45	3.729.474.872.381,85
Tanah	5.3.1.3.1.	1.421.928.550.636,08	1.416.757.739.636,08
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	659.319.613.060,36	617.257.645.621,25
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	1.155.603.427.487,98	1.059.715.646.932,70
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4.	2.083.501.149.985,42	1.930.307.138.639,71
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	159.821.641.252,22	150.465.159.196,22
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	332.650.346.276,70	325.429.839.534,50
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	-1.929.057.993.194,31	-1.770.458.297.178,61
JUMLAH ASET TETAP	5.3.1.3.	3.883.766.735.504,45	3.729.474.872.381,85
ASET LAINNYA	5.3.1.4.	151.235.855.962,55	271.450.796.360,47
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1.	162.356.112,00	162.356.112,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.2.	18.534.922.434,75	18.539.400.144,75
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3.	8.574.580.000,00	8.574.580.000,00

URAIAN	REF	2024	2023
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4.	9.700.723.151,00	9.460.473.151,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.5.	72.204.716.222,35	60.562.445.859,72
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.6.	-7.262.449.903,00	-6.325.138.906,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.7.	-10.124.144.984,55	-501.722.001,00
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.3.1.4.8.	59.445.152.930,00	180.978.402.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	5.3.1.4.	151.235.855.962,55	271.450.796.360,47
JUMLAH ASET	5.3.1.	4.343.188.026.066,94	4.370.090.643.175,89
KEWAJIBAN	5.3.2.	7.498.421.031,82	62.816.461.165,93
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.	3.348.151.831,74	2.588.953.515,19
Utang Bunga	5.3.2.1.1.	691.296.506,42	460.562.674,53
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2.	1.383.423.066,66	1.383.423.066,66
Utang Belanja	5.3.2.1.3.	1.273.432.258,66	744.967.774,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.	3.348.151.831,74	2.588.953.515,19
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.	4.150.269.200,08	60.227.507.650,74
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.3.2.2.	0,00	54.693.815.384,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.	4.150.269.200,08	5.533.692.266,74
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2.	4.150.269.200,08	60.227.507.650,74
JUMLAH KEWAJIBAN		7.498.421.031,82	62.816.461.165,93
EKUITAS	5.3.3.	4.335.689.605.035,12	4.307.274.182.009,96
EKUITAS	5.3.3.	4.335.689.605.035,12	4.307.274.182.009,96
JUMLAH EKUITAS	5.3.3.	4.335.689.605.035,12	4.307.274.182.009,96
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.343.188.026.066,94	4.370.090.643.175,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
LAPORAN OPERASIONAL (*AUDITED*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
PENDAPATAN	5.4.1.	1.336.833.711.402,98	1.454.151.309.258,86	-117.317.597.855,88	-8,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.4.1.1.	209.818.980.622,62	205.669.700.391,59	4.149.280.231,03	2,02
Pajak Daerah	5.4.1.1.1.	172.972.901.812,27	165.400.226.024,10	7.572.675.788,17	4,58
Retribusi Daerah	5.4.1.1.2.	18.259.458.984,00	13.821.534.233,02	4.437.924.750,98	32,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3.	2.597.478.582,50	81.147.428,96	2.516.331.153,54	3.100,94
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4.	15.989.141.243,85	26.366.792.705,51	-10.377.651.461,66	-39,36
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.4.1.1.	209.818.980.622,62	205.669.700.391,59	4.149.280.231,03	2,02
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2.	1.098.710.742.942,00	1.216.750.238.017,97	-118.039.495.075,97	-9,70
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1.	965.683.145.033,00	1.078.869.380.691,00	-113.186.235.658,00	-10,49
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	5.4.1.2.1.	27.771.086.000,00	33.751.617.200,00	-5.980.531.200,00	-17,72
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.	140.291.926.079,00	281.016.616.608,00	-140.724.690.529,00	-50,08
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.1.	658.988.233.482,00	615.517.742.730,00	43.470.490.752,00	7,06
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.4.1.2.1.	138.631.899.472,00	148.583.404.153,00	-9.951.504.681,00	-6,70
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1.	965.683.145.033,00	1.078.869.380.691,00	-113.186.235.658,00	-10,49
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.1.	5.933.778.000,00	6.598.785.000,00	-665.007.000,00	-10,08
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.1.	0,00	6.598.785.000,00	-6.598.785.000,00	-100,00
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1.	5.933.778.000,00	0,00	5.933.778.000,00	100,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.1.	5.933.778.000,00	6.598.785.000,00	-665.007.000,00	-10,08
TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.2.	127.093.819.909,00	131.282.072.326,97	-4.188.252.417,97	-3,19

URAIAN	REF	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.2.	127.093.819.909,00	131.282.072.326,97	-4.188.252.417,97	-3,19
JUMLAH TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.2.	127.093.819.909,00	131.282.072.326,97	-4.188.252.417,97	-3,19
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2.	1.098.710.742.942,00	1.216.750.238.017,97	-118.039.495.075,97	-9,70
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3.	28.303.987.838,36	31.731.370.849,30	-3.427.383.010,94	-10,80
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.	17.981.093.732,36	21.971.335.803,30	-3.990.242.070,94	-18,16
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.	10.322.894.106,00	9.760.035.046,00	562.859.060,00	5,77
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3.	28.303.987.838,36	31.731.370.849,30	-3.427.383.010,94	-10,80
JUMLAH PENDAPATAN	5.4.1.	1.336.833.711.402,98	1.454.151.309.258,86	-117.317.597.855,88	-8,07
BEBAN	5.4.2.	1.309.493.877.927,40	1.204.287.634.557,01	105.206.243.370,39	8,74
BEBAN OPERASI	5.4.2.	1.307.254.791.627,40	1.203.250.523.557,01	104.004.268.070,39	8,64
Beban Pegawai	5.4.2.1.	585.168.149.695,00	520.465.573.159,00	64.702.576.536,00	12,43
Beban Barang	5.4.2.2.1.	116.507.994.709,49	101.058.255.915,48	15.449.738.794,01	15,29
Beban Jasa	5.4.2.2.2.	166.503.783.841,90	159.224.931.551,70	7.278.852.290,20	4,57
Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.3.	24.193.752.012,00	17.056.472.029,21	7.137.279.982,79	41,84
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.4.	80.225.426.719,25	73.545.812.141,00	6.679.614.578,25	9,08
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.2.5.	29.597.413.037,84	23.830.030.473,00	5.767.382.564,84	24,20
Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.2.2.6.	14.103.926.206,00	24.267.526.803,15	-10.163.600.597,15	-41,88
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.2.7.	6.939.071.498,00	0,00	6.939.071.498,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.2.8.	21.465.007.717,90	61.509.805.255,22	-40.044.797.537,32	-65,10
Beban Bunga	5.4.2.3.	2.760.935.823,52	5.264.225.969,20	-2.503.290.145,68	-47,55
Beban Hibah	5.4.2.4.	61.402.016.179,00	46.836.184.648,00	14.565.831.531,00	31,10
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5.	1.693.111.250,00	1.509.203.000,00	183.908.250,00	12,19
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6.	27.537.710.441,25	14.054.688.662,11	13.483.021.779,14	95,93
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7.	169.156.492.496,25	154.627.813.949,94	14.528.678.546,31	9,40
JUMLAH BEBAN OPERASI	5.4.2.	1.307.254.791.627,40	1.203.250.523.557,01	104.004.268.070,39	8,64

URAIAN	REF	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
BEBAN TRANSFER	5.4.2.8.	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.8.	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN TRANSFER	5.4.2.8.	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI DAN TRANSFER	5.4.2.	1.307.499.791.627,40	1.203.495.523.557,01	104.004.268.070,39	8,64
Beban Tidak Terduga	5.4.2.9.	1.994.086.300,00	792.111.000,00	1.201.975.300,00	151,74
JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	5.4.2.9.	1.994.086.300,00	792.111.000,00	1.201.975.300,00	151,74
JUMLAH BEBAN	5.4.2.	1.309.493.877.927,40	1.204.287.634.557,01	105.206.243.370,39	8,74
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		27.339.833.475,58	249.863.674.701,85	-222.523.841.226,27	-89,06
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.	0,00	-12.061.845.764,92	12.061.845.764,92	-100,00
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.	0,00	216.180.000,00	-216.180.000,00	-100,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.	0,00	216.180.000,00	-216.180.000,00	-100,00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.	0,00	216.180.000,00	-216.180.000,00	-100,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.	0,00	12.278.025.764,92	-12.278.025.764,92	-100,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.	0,00	12.278.025.764,92	-12.278.025.764,92	-100,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.	0,00	12.278.025.764,92	-12.278.025.764,92	-100,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.	0,00	-12.061.845.764,92	12.061.845.764,92	-100,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		27.339.833.475,58	237.801.828.936,93	-210.461.995.461,35	-88,50
POS LUAR BIASA	5.4.4.	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.4.	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	5.4.4.	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT		27.339.833.475,58	237.801.828.936,93	-210.461.995.461,35	-88,50

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2025
WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.	162.297.437.983,74	150.594.656.898,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.	18.278.383.635,00	13.933.973.543,02
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.	2.597.478.582,50	81.147.428,96
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.5.1.1.	16.433.108.441,85	23.300.173.772,87
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.	289.596.261.149,00	142.989.011.494,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.	658.988.233.482,00	615.517.742.730,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.	27.974.653.026,00	36.180.579.044,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.	110.657.246.446,00	112.402.825.109,00
Penerimaan Dana Insentif	5.5.1.1.	0,00	6.598.785.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.	5.933.778.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.	112.070.053.703,00	145.713.514.931,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.	2.754.227.295,00	1.752.906.664,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.	10.322.894.106,00	9.760.035.046,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	5.5.1.1.	1.417.903.755.850,09	1.258.825.351.660,85
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.	584.810.451.366,00	520.443.307.879,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.	475.404.126.994,33	475.137.420.309,85
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.	2.529.454.558,89	5.649.396.698,00
Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.	61.498.073.179,00	41.261.099.863,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.	1.595.534.000,00	1.540.204.250,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.	1.994.086.300,00	930.458.180,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.5.1.2.	245.000.000,00	245.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	5.5.1.2.	1.128.076.726.398,22	1.045.206.887.179,85
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1.	289.827.029.451,87	213.618.464.481,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS AKTIFITAS INVESTASI			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.	0,00	216.180.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.	0,00	113.219.924,00
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.	0,00	141.293.716,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	5.5.2.1.	0,00	470.693.640,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI			
Perolehan Tanah	5.5.2.2.	2.620.818.000,00	4.003.383.082,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.	48.825.356.209,00	84.884.254.418,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.	121.569.959.253,32	111.616.449.607,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.2.2.	154.589.854.012,13	78.792.977.882,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.	252.895.000,00	1.992.109.257,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.	138.500.000,00	54.593.320,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.	10.507.500.000,00	10.507.500.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	5.5.2.2.	338.504.882.474,45	291.851.267.566,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2.	-338.504.882.474,45	-291.380.573.926,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	5.5.3.1.	0,00	0,00

URAIAN	REF	2024	2023
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	5.5.3.2.	1.383.423.066,66	1.383.423.067,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2.	54.693.815.384,00	54.693.830.712,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	5.5.3.2.	56.077.238.450,66	56.077.253.779,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.	-56.077.238.450,66	-56.077.253.779,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.	111.868.631.887,00	93.596.579.910,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	5.5.4.1.	111.868.631.887,00	93.596.579.910,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.	111.868.631.887,00	93.619.810.214,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	5.5.4.2.	111.868.631.887,00	93.619.810.214,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.	0,00	-23.230.304,00
Kenaikan/Penurunan Kas		-104.755.091.473,24	-133.862.593.528,00
Saldo Awal Kas	5.5.5.	157.785.715.107,80	291.659.058.635,80
Koreksi SiLPA	5.5.6.	0,00	-10.750.000,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		157.785.715.107,80	291.648.308.635,80
Saldo Akhir Kas	5.5.7.	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80
Kas di Kas Daerah		40.115.276.893,75	109.093.416.112,78
Kas di Bendahara Penerimaan		13.743.035,76	15.682.278,00
Kas di BLUD		10.181.678.669,09	43.582.817.213,14
Kas Dana BOS		0,00	981.786.363,10
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		192.969.847,86	564.433.524,78
Kas Lainnya		702.011,00	3.547.579.616,00
Kas Dana BOSP		1.199.719.970,10	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas		1.326.533.207,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.7.	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.	4.307.274.182.009,96	4.067.612.145.272,43
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	5.6.	27.339.833.475,58	237.801.828.936,93
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.6.	426.087.141,83	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.6.	0,00	0,00
LAIN-LAIN	5.6.	649.502.407,75	1.860.207.800,60
EKUITAS AKHIR	5.6.	4.335.689.605.035,12	4.307.274.182.009,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FATRIID NAPARIN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan yang dimaksud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada dasarnya LKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *Stakeholders* (masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Selama Tahun Anggaran 2024, serta menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar *stakeholders* memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan yang dapat dipergunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Palangka Raya berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk senilai-besarnya kemakmuran rakyat);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 5);



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

22. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);
23. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 5); dan
24. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 35).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari:

- | | | |
|---------|---|---|
| Bab I | : | Pendahuluan |
| Bab II | : | Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD |
| Bab III | : | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| Bab IV | : | Kebijakan Akuntansi |
| Bab V | : | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan |
| Bab VI | : | Penjelasan atas Informasi Non Keuangan |
| Bab VII | : | Penutup |



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro Tahun 2024

Melalui beberapa parameter/indikator makro kondisi ekonomi Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 telah berjalan searah dengan perekonomian nasional. Beberapa capaian indikator ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya daerah (alam dan buatan), sumber daya manusia, modal dan penerapan teknologi. Kota Palangka Raya memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan sumber daya buatan (jaringan jalan, listrik, air, telepon, sarana ekonomi) yang terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk memacu kinerja ekonomi daerah, sebagaimana dalam penjelasan berikut:

2.1.1. Indeks Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tabel 2.1. Garis Kemiskinan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Garis Kemiskinan (rupiah/kapital/bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)
2024	0,42	555.618	3,52	10,70
2023	0,27	530.233	3,44	10,31
2022	0,66	485.800	3,61	10,62
2021	0,40	456.276	3,75	10,86
2020	0,44	485.635	3,44	10,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Tengah	4,82	5,16	5,28	5,11	5,17
Kotawaringin Barat	3,59	3,95	3,93	4,18	4,11
Kotawaringin Timur	5,62	5,91	5,95	5,69	5,66
Kapuas	5,04	5,35	5,52	5,21	5,25
Barito Selatan	4,45	4,62	4,88	4,72	4,83
Barito Utara	5,17	5,61	5,80	5,35	5,67
Sukamara	3,23	3,66	3,72	3,96	4,14
Lamandau	3,09	3,56	3,34	3,12	3,25
Seruyan	6,85	7,22	7,43	7,12	7,08
Katingan	4,79	5,25	5,50	4,99	5,26



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Pulang Pisau	4,09	4,24	4,70	4,58	4,56
Gunung Mas	4,75	5,35	5,64	5,47	5,68
Barito Timur	6,09	6,38	6,59	6,63	6,66
Murung Raya	5,85	6,15	6,40	6,44	6,58
Palangka Raya	3,44	3,75	3,61	3,44	3,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2025

Mayoritas penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Seruyan, Barito Timur, Murung Raya dan Gunung Mas. Dilihat dari persentase kemiskinannya, Kabupaten Seruyan memiliki persentase kemiskinan paling tinggi (7,08%), disusul oleh Kabupaten Barito Timur (6,66%). Sedangkan kabupaten dengan persentase kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Lamandau (3,25%). Kota Palangka Raya memiliki tingkat kemiskinan terendah setelah Kabupaten Lamandau. Dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, pada kota ini akan ditemukan tiga hingga empat orang miskin atau setidaknya satu rumah tangga miskin di setiap kilometer. Indeks Kemiskinan Kota Palangka Raya pada tahun 2024 senilai 3,52%.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah dengan interpretasi tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Adapun konsep tenaga kerja adalah Penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha dan mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Palangka Raya Tahun 2024

Uraian	2023	2024
Angkatan Kerja/Economically Active	148.613	153.885
1. Bekerja	140.989	146.158
2. Pengangguran Terbuka	7.624	7.727
Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	81.767	80.138
1. Sekolah	25.661	26.352
2. Mengurus Rumah Tangga	47.300	44.539
3. Lainnya	8.806	9.247
Jumlah	230.380	234.023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,51	65,76
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,13	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Tengah	4,58	4,53	4,26	4,10	4,01
Kotawaringin Barat	4,76	4,70	4,51	4,45	4,42
Kotawaringin Timur	5,25	5,15	5,00	4,77	4,63
Kapuas	4,98	4,91	3,91	3,66	3,61
Barito Selatan	4,21	4,16	3,53	4,33	4,12
Barito Utara	5,29	5,14	4,82	4,85	4,71
Sukamara	4,70	4,65	6,46	5,23	4,95
Lamandau	2,83	2,30	3,41	3,32	3,17
Seruyan	4,30	4,25	3,96	3,61	3,47
Katingan	5,69	5,50	5,33	4,96	4,88
Pulang Pisau	2,63	2,60	1,96	2,07	1,99
Gunung Mas	2,49	3,11	2,96	3,24	3,12
Barito Timur	2,91	3,22	2,95	3,37	3,26
Murung Raya	3,10	3,03	2,77	2,75	2,90
Palangka Raya	5,95	5,86	5,64	5,13	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palangka Raya relatif lebih besar dari TPT Kalimantan Tengah pada periode 2020 hingga 2024. TPT tertinggi berada di Kota Palangka Raya yaitu sebesar 5,02 yang dipicu oleh statusnya sebagai ibu kota provinsi. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Pulang Pisau senilai 1,99. Palangka Raya menjadi daya tarik bagi para pencari kerja dari luar daerah untuk mengadu nasib. Selain itu, para siswa/mahasiswa yang telah lulus sebagian tidak pulang lagi ke daerah asal, tetapi menetap dan mencari kerja di Palangka Raya. Secara teknis, terjadi perubahan status dari siswa/mahasiswa yang berstatus bukan angkatan kerja, menjadi pencari kerja yang berstatus angkatan kerja (bekerja atau pengangguran).

2.1.3. Gini Ratio

Gini Ratio atau Koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana Kurva Lorenz itu berada.

Tabel 2.5. Indeks Gini

No.	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
1.	Kotawaringin Barat	0,315	0,335	0,303
2.	Kotawaringin Timur	0,292	0,290	0,304
3.	Kapuas	0,303	0,305	0,309
4.	Barito Selatan	0,309	0,289	0,284



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
5.	Barito Utara	0,301	0,323	0,269
6.	Sukamara	0,322	0,287	0,289
7.	Lamandau	0,318	0,333	0,278
8.	Seruyan	0,292	0,261	0,222
9.	Katingan	0,250	0,261	0,253
10.	Pulang Pisau	0,288	0,280	0,255
11.	Gunung Mas	0,262	0,309	0,255
12.	Barito Timur	0,294	0,331	0,299
13.	Murung Raya	0,260	0,261	0,258
14.	Palangka Raya	0,383	0,312	0,309
15.	Provinsi Kalimantan Tengah	0,319	0,317	0,301

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025

Gini rasio merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Koefisien Gini Rasio tertinggi di Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya dengan nilai persentase sama, yakni 0,309. Sedangkan terendah di Kabupaten Seruyan senilai 0,222. Koefisien Gini Rasio Kota Palangka Raya tahun 2024 senilai 0,309 mengalami penurunan dari tahun 2023 senilai 0,312 namun di tahun 2024 berada di posisi pertama bersama Kabupaten Kapuas menjadi daerah yang memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi dibanding Kabupaten dan Provinsi di Kalimantan Tengah.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, Kota Palangka Raya merupakan kota dengan IPM tertinggi senilai 82,53. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Seruyan dengan IPM 70,66.

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kotawaringin Barat	73,95	74,15	74,39	74,92	75,35
Kotawaringin Timur	73,18	73,25	73,45	73,99	74,47
Kapuas	71,18	71,34	71,72	72,40	72,98
Barito Selatan	72,73	73,05	73,45	74,01	74,76
Barito Utara	71,44	71,64	72,16	71,71	73,17
Sukamara	69,04	69,28	69,86	70,35	70,83
Lamandau	72,21	72,28	72,81	73,44	73,95
Seruyan	69,22	69,31	69,81	70,24	70,66
Katingan	72,45	72,66	73,43	73,90	74,37
Pulang Pisau	70,57	70,65	71,05	71,62	72,36
Gunung Mas	72,00	72,22	72,50	73,18	73,88



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Barito Timur	73,09	73,17	73,69	74,21	74,81
Murung Raya	69,54	69,67	70,13	70,91	71,58
Palangka Raya	81,17	81,22	81,47	81,95	82,53
Provinsi Kalimantan Tengah	72,62	72,81	73,17	73,73	74,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025

2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan. Kota Palangka Raya memiliki laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 meningkat senilai 0,05% sedangkan tahun 2023 meningkat senilai 0,32%. Lapangan usaha dengan PDRB terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum senilai 9,70%.

Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	269,8	287,6	292,4	302,3	303,8
B.	Pertambangan dan Penggalian	124,9	132,5	141,0	149,6	152,9
C.	Industri Pengolahan	1.007,3	1.018,0	989,4	1.027,4	1.110,3
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	44,4	45,1	47,3	50,6	52,7
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.	16,5	17,9	18,3	19,3	19,4
F.	Konstruksi	1.018,2	1.124,5	1.229,5	1.325,6	1.365,9
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.077,3	2.162,7	2.321,8	2.474,1	2.621,5
H.	Transportasi dan Pergudangan	814,2	890,3	1.052,6	1.143,6	1.240,6
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	462,1	487,7	569,6	615,9	675,6
J.	Informasi dan Komunikasi	249,9	294,6	303,6	313,6	325,8
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	868,7	925,7	951,5	1.009,3	1.075,1
L.	Real Estate	321,4	341,1	360,9	388,0	409,3



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
M, N	Jasa Perusahaan	7,1	7,3	8,2	9,2	10,0
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.254,2	2.200,0	2.269,6	2.401,8	2.587,6
P.	Jasa Pendidikan	655,0	687,3	717,3	771,1	838,8
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	275,6	295,7	326,6	357,0	385,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	107,9	113,4	120,7	132,4	141,7
PDRB/GDRP		10.574,7	11.031,5	11.720,4	12.490,6	13.316,9

*)Angka Sementara/ Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025

**Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya
atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam Persen)**

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,71	6,59	1,66	3,37	0,52
B.	Pertambangan dan Penggalian	-4,35	6,06	6,40	6,13	2,19
C.	Industri Pengolahan	-2,91	1,06	-2,81	3,84	8,07
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	1,61	4,83	7,00	4,22
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-4,35	8,44	2,26	4,97	0,80
F.	Konstruksi	-8,68	10,44	9,34	7,82	3,04
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,35	4,11	7,36	6,56	5,96
H.	Transportasi dan Pergudangan	-16,17	9,35	18,23	8,64	8,48
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,08	5,53	16,82	8,12	9,70
J.	Informasi dan Komunikasi	12,87	17,89	3,04	3,28	3,90
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	6,55	2,79	6,07	6,52
L.	Real Estat	-7,65	6,12	5,83	7,51	5,47
M,N.	Jasa Perusahaan	-13,81	3,11	12,25	11,97	9,64
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	-1,09	-2,40	3,16	5,82	7,74
P.	Jasa Pendidikan	7,72	4,94	4,36	7,50	8,78
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,32	7,31	10,43	9,29	8,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-20,89	5,08	6,46	9,64	7,06
PDRB/GDRP		-2,85	4,32	6,25	6,57	6,62

*)Angka Sementara/ Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025



2.1.6. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara relatif mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun. Bagi konsumen, inflasi menjadi hal memberatkan karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan riil atau daya beli mereka. Sedangkan dari sisi prosedur, inflasi menjadi insentif untuk terus melakukan aktivitas ekonomi. Laju inflasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu senilai 0,88% lebih rendah dibandingkan kota penting di Kalimantan diantaranya yaitu Kota Banjarmasin yang mengalami inflasi senilai 1,98%.

Adapun upaya penanganan laju inflasi yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya selama tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut.

I. Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berkomitmen dalam pengendalian inflasi dan sebagai fokus utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi secara Nasional. Hal ini didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Pemerintah Kota Palangka Raya merespons dengan langkah proaktif, dan telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/148/2024, tanggal 21 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024, yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengendalikan inflasi di wilayah tersebut. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah menjadi landasan untuk pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keterjangkauan barang dan jasa di tingkat daerah.

Upaya ini semakin diperkuat oleh penetapan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Sasaran inflasi ini menjadi pedoman untuk membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat terkait tingkat inflasi di masa mendatang dan memberikan panduan kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar tentang arah dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga TPID memiliki peran krusial sebagai pelaksana kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024



WALI KOTA PALANGKA RAYA
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/148/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu membentuk Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

KESERBELAS

1. Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, menjabarkan tugas:
a. membantu menyiapkan data/informasi/analisis data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam rangka kelancaran tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
b. menyusun agenda pertemuan kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
c. menyusun risalah rapat dan pendokumentasian rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
d. kajian dan analisis pengendalian inflasi daerah;
e. menyusun laporan upaya penanganan inflasi daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dan laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 secara periodik; dan
f. melaksanakan tugas sekretariat lainnya.

KEDUAHELAS

2. Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, berkedudukan pada Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

KETIGAHELAS

Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPATHELAS

Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Maret 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

Tugas dan fungsi tim tersebut menjadi penting karena berperan dalam menganalisis, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan yang mendukung stabilitas harga-harga di daerah Dengan demikian, TPID Kota Palangka Raya menjadi instrumen penting dalam menjawab tuntutan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan memberikan keyakinan kepada pelaku pasar terkait kondisi ekonomi di Kota Palangka Raya. Sesuai Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/148/2024, tanggal 21 Maret 2024 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 bertugas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat Kota;
- 2) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- 3) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kota;
- 4) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
- 5) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kota.

II. Gambaran Inflasi/Deflasi Kota Palangka Raya Tahun 2024

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dan salah satu kota terluas di Indonesia dengan luas wilayah 285.312,40 hektare yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 302.310 jiwa. Secara geografis posisi Kota Palangka Raya yang berada di tengah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang hanya mengandalkan transportasi darat sangat mempengaruhi dalam pendistribusian barang, tidak kalah pentingnya bila



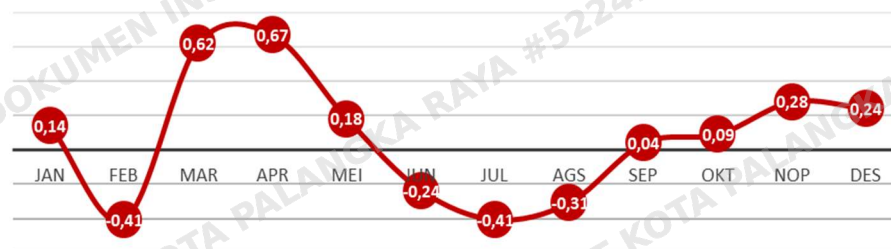
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

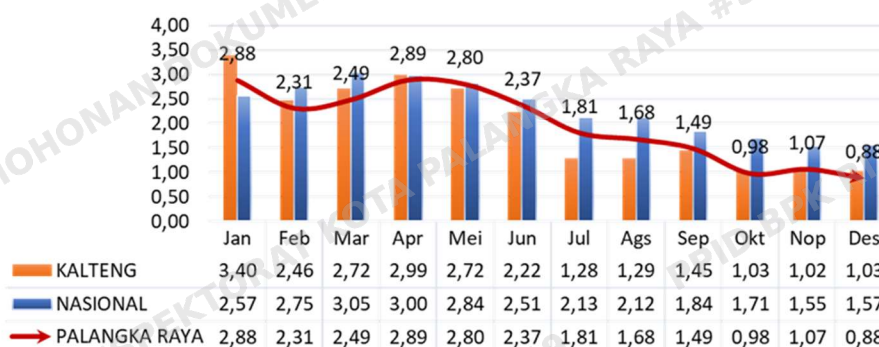
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

dilihat potensi dari hasil produksi pangan sangat kecil sehingga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data inflasi/deflasi Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, pada Grafik Inflasi/ Deflasi Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Bulanan) tercatat mengalami inflasi di atas angka inflasi Nasional terjadi pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Oktober sedangkan untuk bulan September dan November 2024 tercatat angka inflasi lebih rendah dibandingkan angka inflasi Nasional dan pada bulan Februari, Juni, Juli, dan Agustus mengalami deflasi sedalam -0,40% di bulan Februari 2024, -0,24% di bulan Juni 2024, -0,40% di bulan Juli 2024, dan -0,31% di bulan Agustus 2024.



Gambar 2.1. Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2024 (mont to month)



Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2024 (year to year)

Inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024 di Kota Palangka Raya terjadi pada bulan April 2024 sebesar 0,67% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,24 inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran.

Secara umum gambaran inflasi/deflasi Kota Palangka Raya menunjukkan adanya dinamika yang harus dikendalikan setiap waktunya untuk menjaga stabilitas harga barang terutama kebutuhan pokok, sehingga perlu memahami berbagai perilaku aktivitas ekonomi serta tantangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah. Beberapa identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Palangka Raya diantaranya minimnya potensi dari hasil produksi pangan menyebabkan ketergantungan pasokan pada daerah lain, jumlah pasokan dipengaruhi oleh distribusi barang dan tergantung pada kelancaran

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

transportasi darat, perubahan cuaca atau faktor iklim sangat berpengaruh pada produksi pangan, risiko gejolak harga pada hari-hari besar keagamaan maupun event-event besar, harga pupuk yang tidak stabil berpengaruh pada harga pangan dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi.

III. Upaya Penanganan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2024

Dalam upaya menekan inflasi, mempercepat stabilitas harga dan mendukung keberhasilan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka Pemerintah Palangka Raya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya di Tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya penanganan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah sebagai berikut:

1. Menjaga Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menjalin kerjasama dengan Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sejak 2023 untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok. Kerjasama ini mencakup pembukaan beberapa Gerai TPID, dimulai dengan "Eka Pandohop" di Pasar Kahayan, diikuti dengan "Pendawa" di Pasar Kalampangan, dan selanjutnya gerai "Aisyah" di Kecamatan Bukit Batu serta "Hendmart" di Kelurahan Pahandut Seberang pada 2024. Gerai- gerai ini menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, terigu, daging kerbau, dan ayam beku dengan harga yang stabil dan transparan.

Keterlibatan Perum BULOG mendukung stabilitas harga dan ketersediaan barang melalui jaringan dan infrastruktur mereka. Program ini bertujuan untuk memastikan pasokan barang kebutuhan pokok secara berkelanjutan dan berkualitas, dengan pengelolaan stok yang efisien dan pemantauan berkala untuk memenuhi permintaan masyarakat secara optimal.



Gambar 2.3. Pelaksanaan Kerjasama dengan Perum BULOG

2. Berkoordinasi dengan Daerah Penghasil Komoditi untuk Kelancaran Pasokan

Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan langkah strategis dalam pengendalian inflasi melalui pertukaran komoditi hasil pertanian. Mengingat Kabupaten Pulang Pisau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras di Kalimantan Tengah, kerjasama ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan beras di Kota Palangka Raya.

Inisiatif ini tidak hanya mendukung petani di kedua wilayah, tetapi juga mendorong diversifikasi produk pertanian dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Selain itu, kerjasama ini berfungsi untuk mengurangi fluktuasi harga dan memastikan ketersediaan pasokan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua daerah.

Pentingnya koordinasi dalam pemasaran produk pertanian serta sinkronisasi kebijakan dan peraturan antara kedua pemerintah daerah juga menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama di sektor pertanian. Selain itu, terdapat juga Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan komoditi pangan dan pertanian dari Kabupaten Tabalong ke Kota Palangka Raya. Kerjasama ini semakin memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi masyarakat.



Gambar 2.4. Koordinasi dengan Daerah Penghasil Komoditi

3. Pencanaan Gerakan Menanam

Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai upaya menekan laju inflasi dan mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, membantu dalam mengurangi ketergantungan pangan dengan daerah lain dan memperkuat ekonomi lokal. Kegiatan gerakan menanam.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Inisiasi gerakan menanam memperhatikan komoditas cabai rawit dan beras andil dalam inflasi selama tahun 2023 serta adanya potensi terjadi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan Idul fitri 2024. Pelaksanaan gerakan menanam dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024, dengan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Gerakan menanam cabai sebanyak 2.000 polybag dan terong 700 polybag dilaksanakan di Komplek perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 2) Launching Gerakan menanam padi seluas 30 ha di Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang ditandai dengan penanaman padi varietas PB 42 di Kebun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan menggunakan teknologi mekanisasi mesin penanam padi (transplanter);
- 3) Tebar benih ikan lele pada 2 kolam kolam kebun tani sebanyak 1.000 ekor;
- 4) Penyerahan simbolis bibit tanaman cabai dan terong kepada perangkat daerah dan masyarakat;
- 5) Dialog Pj. Wali Kota Palangka Raya dengan Ketua KTNA, Kelompok Tani, Petani millenial, mahasiswa fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya; dan
- 6) Kunjungan ke display aneka olahan produk hasil tanaman Sorgum.



Gambar 2.5. Gerakan Menanam

4. Pelaksanaan Inspeksi Mendadak ke Pasar dan Distributor

Inspeksi mendadak merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas harga, memastikan transparansi pasar, mencegah praktik perdagangan yang tidak adil, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan mendukung kebijakan pangan nasional. Kegiatan inspeksi mendadak dilaksanakan secara berkala oleh



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya. Lokasi pelaksanaan inspeksi ini mencakup pasar-pasar tradisional, distributor, serta agen atau pangkalan LPG.



Gambar 2.6. Inspeksi Mendadak ke Pasar dan Distributor

5. Melaksanakan Operasi Pasar Murah

Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, berupaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga bahan pokok untuk mempertahankan laju inflasi yang



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

rendah, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Langkah ini mencakup pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) yang menyediakan barang kebutuhan pokok bersubsidi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dan masyarakat berpenghasilan rendah. Komoditas yang sering mengalami lonjakan harga, seperti beras, minyak goreng dan daging menjadi fokus pengendalian harga. Program OPM dilakukan dengan kerjasama distributor dan menjual komoditi pangan dengan harga subsidi, diharapkan dapat menstabilkan harga dan meringankan beban hidup masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

NO	TRIWULAN	LOKASI	JUMLAH PAKET	NILAI SUBSIDI/PAKET	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	JUMLAH NILAI SUBSIDI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	I (JAN-MAR)	1. Kel. Habaring Hurung 2. Kel. Kameloh Baru 3. Kel. Bukit Tunggai 4. Kel. Pahandut 5. Kel. Panarung 6. Kel. Langkai 7. Kel. Menteng 8. HUT ke 50 Korem 102/Pjg 9. Kel. Palangka	6.000	55.000,-	6.000	330.000.000,-	DPA-SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/23/2024, tanggal 2 Januari Tahun 2024.	
2	II (APR-JUN)	1. Kel. Sabaru 2. Kel. Kalampangan 3. Kel. Tanjung Pinang 4. Kel. Kereng Bangkirai 5. Kel. Pahandut Seberang 6. Kel. Tumbang Rungan 7. Kel. Bereng Bengkel 8. Kel. Danau Tundai 9. Kec. Bukit Batu 10. Kel. Bukit Tunggai 11. Kel. Palangka 12. Kel. Langkai 13. Kel. Menteng 14. Kel. Pahandut	11.260	55.000,-	11.260	619.300.000,-	DPA-SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/23/2024, tanggal 2 Januari Tahun 2024.	
3	III (JUL-SEP)	Kel. Bukit Tunggai Halaman GOR Indoor Serbaguna	400	55.000,-	400	22.000.000,-	DPA-SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/23/2024, tanggal 2 Januari Tahun 2024.	-
4	IV (OKT-DES)	1. Kel. Palangka 2. Kel. Pahandut 3. Kel. Panarung 4. Kel. Kalampangan 5. Kel. Tanjung Pinang 6. Kel. Bereng Bengkel 7. Kel. Pahandut Seberang 8. Kel. Menteng 9. Kel. Bukit Tunggai 10. Kel. Tumbang Rungan 11. Kel. Sabaru 12. Kel. Petuk Katimpun 13. Kec. Bukit Batu 14. Kel. Kereng Bangkirai 15. Kec. Rakumpit 16. Kel. Danau Tundai	10.850	55.000,-	10.850	596.750.000,-	DPA-SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/23/2024, tanggal 2 Januari Tahun 2024.	
	IV (OKT-DES)	1. Kel. Tangkiling 2. Kel. Sei Gohong 3. Kel. Tumbang Tahai 4. Kel. Banturung	2.000	50.000,-	2.000	100.000.000,-	Dana Insentif Fiskal DPA-SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/23/2024, tanggal 2 Januari Tahun 2024.	-
		1. Kel. Langkai 2. Kel. Palangka 3. Kel. Menteng 4. Kel. Pahandut 5. Kel. Bukit Tunggai 6. Kel. Panarung	4.600	55.000,-	4.600	253.000.000,-	DPA-SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/23/2024, tanggal 2 Januari Tahun 2024.	
TOTAL			35.110		35.110	1.921.050.000,-	DPA-SOPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/23/2024, tanggal 2 Januari Tahun 2024.	



Gambar 2.7. Operasi Pasar Murah

6. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah (GPM) bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama yang rentan, dapat mengakses bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini fokus pada stabilitas harga pangan, termasuk beras, gula, minyak, tepung, dan telur. Melibatkan kolaborasi antara distributor, UMKM, kelompok tani, dan pelaku usaha lainnya, GPM berusaha menciptakan jaringan distribusi yang efisien dan transparan.

Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya, bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan dinas terkait, menyelenggarakan pasar penyeimbang di kawasan Pasar Datah Manuah setiap Rabu dan Sabtu dari pukul 08.00-12.00 WIB. Komoditas yang dijual meliputi beras SPHP, telur, daging ayam segar, frozen food, minyak goreng, dan gula pasir, dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasar tradisional.

Melalui GPM, diharapkan masyarakat dapat menikmati aksesibilitas pangan yang lebih baik, membantu mengurangi dampak inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Program ini berkontribusi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian lokal.

GERAKAN PANGAN MURAH

NO	WAKTU	LOKASI	MITRA	KOMODITAS	BIAYA	SUMBER DANA	KETERANGAN
1.	06 Maret 2024	Kantor Kelurahan Kering Bane Kiral	Perum BULOG Divisi Regional Kalteng, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kios Unggas/KTI	Beras SPHP, Beras Slam Kahayan, Beras Burung Tandang, Minyak Goreng, Gula, Ayam, Tepung, Frozen Food, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, Bawang Putih, Aneka Bumbu, Santan Kari, Mie Instan dan produk-produk lainnya	15.000.000,-	Dana Dekonsentrasi APBN 2024 pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah Dalam Rangka Menjelang HBKN Puasa Dan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 di Kota Palangka Raya
2.	01 April 2024	Kantor Kelurahan Kering Bane Kiral	Perum BULOG Divisi Regional Kalteng, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kios Unggas/KTI	Beras SPHP, Beras Slam Kahayan, Beras Burung Tandang, Minyak Goreng, Gula, Ayam, Tepung, Frozen Food, Telur, Ayam Ras, Bawang Merah, Bawang Putih, Aneka Bumbu, Santan Kari, Mie Instan dan produk-produk lainnya.	15.000.000,-	Dana Dekonsentrasi APBN 2024 pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah Dalam Rangka Menjelang HBKN Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 di Kota Palangka Raya
3.	07 Juni 2024	Halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Palangka Raya	Perum BULOG Divisi Regional Kalteng, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kios Unggas/KTI	Beras SHP, Minyak Goreng, Gula, Ayam, Tepung, Frozen Food, Telur, Aneka Sayuran, Aneka Produk dan Olahan UMKM Omset Total Rp. 34.221.000,-	-	-	Gerakan Pangan Murah Kota Palangka Raya



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

GERAKAN PANGAN MURAH

NO	WAKTU	LOKASI	MITRA	KOMODITAS	BIAYA	SUMBER DANA	KETERANGAN
4.	11 Juli 2024	Pameran Palangka Fair (Gor Indoor Serba Guna)	Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kios Unggas/KTI dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng	Kebutuhan Pangan Pokok dan Cemilan Produk UMKM	21.000.000,-	APBD 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan pangan Murah (SPHP) GPM dalam rangka kegiatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-59 Hari Jadi Kota Palangka Raya ke-67 dan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Badan Pangan Nasional/NFA
5.	8 Agustus 2024	Halaman Kantor Kelurahan Panarung	1. BULOG Divisi Regional Kalteng 2. ID. FOOD / PT Rajawali Nusantara Indonesia; 3. Kios Unggas / KTI; 4. Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalteng; 5. PT. Tutu Chili Borneo; 6. Borneo Mart; 7. Wilmar Group.	Kebutuhan Pangan Pokok, Minyak Goreng, Hasil Pertanian dan Cemilan Produk UMKM	21.000.000,-	APBD 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Gerakan Pangan Murah Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Serta Dalam Rangkaian Kegiatan Mempingati HUT KE-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024

GERAKAN PANGAN MURAH

NO	WAKTU	LOKASI	MITRA	KOMODITAS	BIAYA	SUMBER DANA	KETERANGAN
6.	22 Agustus 2024	Halaman Kantor Kelurahan Tanjung Pinang	Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Kios Unggas/KTI	Beras SPHP, Minyak Goreng Pouch, Gula. Omset Total Rp. 22.140.000,-	-	-	Gerakan Pangan Murah Kota Palangka Raya
7.	26 Agustus 2024	Halaman Kantor Kelurahan Kameloh Baru	Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Kios Unggas/KTI	Beras SPHP, Minyak Goreng Pouch, Gula, Bawang Merah dan Bawang Putih. Omset Total Rp. 19.140.000,-	-	-	Gerakan Pangan Murah Kota Palangka Raya
8.	27 Agustus 2024	Halaman Kantor Kelurahan Tumbang Runan	Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Kios Unggas/KTI	Beras SPHP, Minyak Goreng Pouch, Gula, Bawang Merah dan Bawang Putih. Omset Total Rp. 15.336.000,-	-	-	Gerakan Pangan Murah Kota Palangka Raya

GERAKAN PANGAN MURAH

NO	WAKTU	LOKASI	MITRA	KOMODITAS	BIAYA	SUMBER DANA	KETERANGAN
9.	28 Agustus 2024	Halaman Kantor Kelurahan Petuk Ketimpun	Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Kios Unggas/KTI	Beras SPHP, Minyak Goreng Pouch, Gula, Bawang Merah dan Bawang Putih. Omset Total Rp. 15.769.000,-	-	-	Gerakan Pangan Murah Kota Palangka Raya
10.	10 September 2024	Halaman Kantor Kecamatan Bukit Batu	Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Kios Unggas/KTI	Bawang Merah, Bawang Putih, Gula, Ayam, Bebek, Frozen Food, Telur, Aneka Bumbu, dll Omset Total Rp. 98.722.500,-	-	-	Gerakan Pangan Murah Kota Palangka Raya
11.	14 Oktober 2024	Halaman Kantor Kelurahan Menteng	Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, ID FOOD/PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Kios Unggas/KTI	Beras SHP, Minyak Goreng Pouch, Gula. Omset Total Rp. 19.680.000,-	-	-	Gerakan Pangan Murah Kota Palangka Raya

GERAKAN PANGAN MURAH

NO	WAKTU	LOKASI	MITRA	KOMODITAS	BIAYA	SUMBER DANA	KETERANGAN
12.	22 Oktober 2024	Halaman Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai	1. PERUM BULOG Wilayah Kalimantan 2. ID FOOD Cabang Palangka Raya 3. KIOS UNGGAS 4. BOMART 5. WILMAR GROUP 6. PT. TUTU CHILI BORNEO 7. PT. DEWI ARUM SARI (LPG) 8. WINGS Group	Kebutuhan Bahan Pokok berupa Beras SPHP, Beras Slam Kahayan, Beras Burung Tingang, Minyak Goreng, Gula, Ayam, Tepung, Frozen Food, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, Bawang Putih, Aneka Bumbu, Santan Kari, Mie Instan dan produk-produk lainnya.	204.174.100,-	APBD 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dan Bank Indonesia	Gerakan Pangan Murah (GPM) Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dan Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) KE-44 2024
13.	20 Desember 2024						



Gambar 2.8. Gerakan Pangan Murah (GPM)



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

7. Memberikan Bantuan Transportasi dari APBD

Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) komoditi beras kepada mitra Bulog Kalimantan Tengah di Gudang Perum Bulog jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya, Rabu tanggal 27 Maret 2024, program ini dilaksanakan melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalteng dan distributor beras pasar besar Kota Palangka Raya H. Alfi. Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan subsidi ongkos angkut sebanyak 250 ton beras yang akan didistribusikan untuk gerai-gerai beras di Kota Palangka Raya dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah perekonomian. Program ini merupakan bentuk dukungan kepada Perum Bulog Kalteng dalam mendistribusikan beras ke seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus memberikan subsidi angkutan ini secara berkelanjutan. Subsidi ini diberikan langsung kepada Perum Bulog Kalteng yang memiliki tanggung jawab dalam pendistribusian beras. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan Bulog dapat menekan biaya logistik yang pada akhirnya akan berdampak pada harga jual beras di pasaran sehingga dapat membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

Diharapkan langkah ini dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh warga.

DATA REALISASI DANA BTT MELALUI KEGIATAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT (SOA) TAHUN 2024

PERUM BULOG KANWIL KALTENG

No	Jenis Barang	Banyaknya (Kg)	Subsidi Ongkos Angkut/Kg (Rp)	Jumlah Subsidi Ongkos Angkut (Rp)	Volume (Bulan)	Total Subsidi Ongkos Angkut (Rp)
1	Beras SPHP	160.000	250	40.000.000,-	3	40.000.000,-

UD. ALFI

No	Jenis Barang	Banyaknya (Kg)	Subsidi Ongkos Angkut/Kg (Rp)	Jumlah Subsidi Ongkos Angkut (Rp)	Volume	Total Subsidi Ongkos Angkut (Rp)
1	Beras	66.500	600	39.900.000,-	3	39.900.000,-

UD. ALFI

No	Jenis Barang	Banyaknya (Kg)	Subsidi Ongkos Angkut/Kg (Rp)	Jumlah Subsidi Ongkos Angkut (Rp)	Volume	Total Subsidi Ongkos Angkut (Rp)
1	Beras	66.500	600	39.900.000,-	3	39.900.000,-

UD. ALFI

No	Jenis Barang	Banyaknya (Kg)	Subsidi Ongkos Angkut/Kg (Rp)	Jumlah Subsidi Ongkos Angkut (Rp)	Volume	Total Subsidi Ongkos Angkut (Rp)
1	Beras	66.500	600	39.900.000,-	3	39.900.000,-

PT. KAYAHAN NIAGA UTAMA

No	Jenis Barang	Banyaknya (Kg)	Subsidi Ongkos Angkut/Kg (Rp)	Jumlah Subsidi Ongkos Angkut (Rp)	Volume (Bulan)	Total Subsidi Ongkos Angkut (Rp)
1	Beras	116.500	600	69.900.000,-	4	69.900.000,-



Gambar 2.9. Pemberian Bantuan Subsidi Ongkos Angkut

8. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya, berupa pelaksanaan high level meeting merupakan agenda penting rapat koordinasi tingkat tinggi dalam TPID Kota Palangka Raya khususnya menghadapi hari besar keagamaan nasional, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan Hari Natal Tahun 2024, yang beragendakan langkah-langkah preventif dan proaktif dalam pengendalian inflasi termasuk pengendalian harga-harga barang dan jasa, menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi serta meningkatkan komunikasi efektif khususnya menjelang, selama dan pasca besar keagamaan tahun 2024. Dalam rangka memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya termasuk pengendalian harga-harga kebutuhan pokok dan penting, menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan dan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan menjelang, selama dan pasca besar keagamaan tahun 2024.



Gambar 2.10. Rapat Koordinasi TPID Kota Palangka Raya

9. Rapat Koordinasi dengan Pihak Maskapai Penerbangan merupakan, kegiatan pertemuan dengan pihak PT Angkasa Pura yang berpusat di Jakarta dan seluruh perwakilan maskapai penerbangan, terkait penambahan frekuensi, rencana rute dan maskapai penerbangan baru di Kota Palangka Raya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan dalam upaya memdorong kemajuan dan mempromosikan Kota Palangka Raya serta koordinasi untuk penambahan frekuensi 29 penerbangan dalam rangka Menjelang, Selama dan Pasca Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (1445 Hijriyah) Tahun 2024.



Gambar 2.11. Rapat Koordinasi dengan Pihak Maskapai Penerbangan

10. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu yang kegiatannya dilaksanakan secara virtual dipusatkan pada *Command Center*.



Gambar 2.12. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri

11. Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah

Pertemuan yang diadakan secara rutin oleh pemerintah Kota Palangka Raya bersama berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk mendiskusikan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di daerah ini. Dalam pertemuan tersebut, tim membahas dan menganalisis komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga, mencari penyebabnya, serta merumuskan rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah harga. Rapat teknis ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan gejolak harga yang terjadi berdasarkan pemantauan harga harian yang dilakukan.



Gambar 2.13. Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah

12. Sosialisasi *Stop Panic Buying*

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Palangka Raya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan reklame mengenai upaya pengendalian inflasi, salah satunya adalah kampanye "*Stop Panic Buying*." Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengatasi dan mencegah perilaku membeli barang secara berlebihan, yang sering terjadi dalam situasi krisis atau keadaan darurat.

Dengan adanya kampanye ini, diharapkan dapat membantu pengelolaan persediaan, memberikan dukungan kepada masyarakat yang rentan, mencegah lonjakan harga, serta mengurangi kekhawatiran masyarakat. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat rasa solidaritas di antara warga, memberdayakan konsumen, serta mengurangi pemborosan dan kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat perilaku panic buying.

Gambar 2.14. Kampanye "*Stop Panic Buying*"

13. *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalimantan Tengah

Capacity Building yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 Februari 2024, kegiatan ini fokus pada peningkatan kompetensi anggota TPID serta meningkatkan komitmen dan semangat anggota TPID se-Kalimantan Tengah untuk terus berupaya menjalankan program pengendalian inflasi, dengan menerapkan program pengendalian inflasi di daerah lain yang relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan inflasi.



Gambar 2.15. Kegiatan Capacity Building TPID se-Kalimantan Tengah

14. Operasi Pasar LPG 3 Kg

Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangka Raya melaksanakan kebijakan Stabilisasi Harga melalui Intervensi Pasar dengan menggelar Operasi Pasar LPG 3 Kg. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2024 di 11 Kelurahan wilayah Kota Palangka Raya, bekerja sama dengan PT. Pertamina (Persero). Dalam operasi ini, sebanyak 2.050 tabung LPG 3 Kg didistribusikan kepada masyarakat guna memastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran, membantu masyarakat memperoleh LPG dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta menekan potensi kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran. Operasi Pasar LPG 3 Kg ini menyasar rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang berhak menerima LPG bersubsidi sesuai regulasi.

Pelaksanaannya dilakukan secara terjadwal di lokasi-lokasi yang telah ditentukan dengan melibatkan agen dan pangkalan resmi sebagai penyedia LPG. Diharapkan dengan adanya intervensi pasar ini, stabilitas harga LPG 3 Kg tetap terjaga, distribusi menjadi lebih merata, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi dengan harga yang terjangkau.



Gambar 2.16. Kegiatan Operasi Pasar LPG 3 Kg

15. Pasar Penyeimbang

Sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan kebijakan Stabilisasi Harga melalui Intervensi Pasar dengan mengadakan Pasar Penyeimbang. Kegiatan Pasar Penyeimbang ini dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu setiap hari Rabu dan Sabtu Pukul 08.00 – 14.00 WIB di Pasar Datah Manuah Kota Palangka Raya dengan melibatkan berbagai distributor kebutuhan bahan pokok dan pangan.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang lebih stabil, mengurangi fluktuasi harga di pasar, serta membantu mengendalikan inflasi di daerah. Melalui kehadiran Pasar Penyeimbang, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar pada umumnya.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya membantu menjaga keseimbangan harga tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.



Gambar 2.17. Kegiatan Pasar Penyeimbang

16. Subsidi Harga Ikan

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, khususnya komoditas perikanan, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perikanan melaksanakan kebijakan stabilisasi harga melalui Subsidi dengan mengadakan subsidi harga ikan pada Pasar Penyeimbang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan subsidi penjualan ikan, sehingga masyarakat dapat memperoleh ikan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan pasokan di pasar. Komoditas yang disubsidi dalam program ini adalah ikan nila dengan subsidi sebesar Rp10.000,-/kg dan ikan patin dengan subsidi sebesar Rp7.000,-/kg. Pelaksanaan subsidi harga ikan dilakukan setiap bulan di Pasar Datah Manuah, sebagai bagian dari rangkaian Pasar Penyeimbang yang bertujuan mengendalikan inflasi pangan di Kota Palangka Raya.

Dengan adanya subsidi ini, diharapkan harga ikan tetap stabil, daya beli masyarakat meningkat, serta konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas dapat terus terjaga. Selain itu, program ini juga mendukung nelayan dan pembudidaya ikan lokal dalam menjaga keberlanjutan usahanya.



Gambar 2.18. Pelaksanaan Subsidi Harga Ikan

Dengan adanya berbagai upaya yang telah diimplementasikan dalam penanganan laju inflasi di Kota Palangka Raya, diharapkan bahwa tindakan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. Keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk menjaga inflasi dalam batas yang sehat, menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, dan memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan.

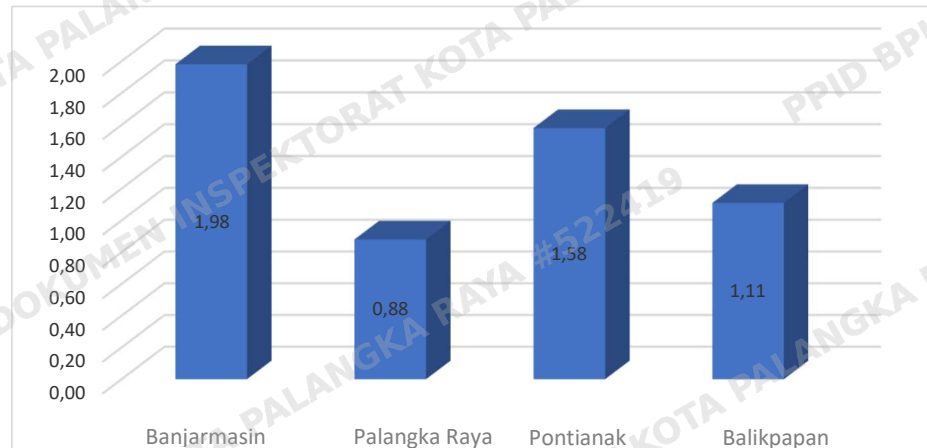
Kelancaran distribusi dan komunikasi efektif perlu dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok strategis masyarakat. Sinergitas program kerja TPID



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

masing-masing anggota atau antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sangat diperlukan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga inflasi dapat ditekan. Demikian laporan singkat upaya penanganan laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2024, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palangka Raya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.19. Laju Inflasi Kota Palangka Raya dan Kota Besar di Kalimantan

Tabel 2.9. Laju Inflasi Tahun 2024 (2020-2024)

Bulan	Palangka Raya	Sampit	Banjarmasin	Tanjung	Pontianak	Singawang
Januari	0,14	0,25	0,36	0,28	0,40	0,33
Februari	-0,41	-0,34	0,22	-0,12	0,03	0,28
Maret	0,62	0,73	0,71	0,45	0,29	0,47
April	0,67	0,80	0,56	0,53	0,88	0,27
Mei	0,18	0,33	0,13	0,08	0,17	0,04
Juni	-0,24	-0,46	-0,46	-0,23	-0,42	-0,12
Juli	-0,41	-0,73	-0,08	-0,19	-0,60	-0,14
Agustus	-0,31	-0,22	-0,19	-0,14	-0,27	-0,05
September	0,04	0,11	-0,15	0,19	0,54	0,07
Oktober	0,09	0,15	0,13	0,98	0,02	-0,10
November	0,28	0,20	0,35	0,23	0,26	0,08
Desember	0,24	0,36	0,38	0,18	0,28	0,44
Laju Inflasi	0,88	1,18	1,98	2,24	1,58	1,57
2023	2,68	2,56	2,28	2,39	2,09	1,74
2022	6,51	5,99	6,98	5,01	6,35	5,96
2021	2,58	4,62	2,54	2,43	1,16	2,55
2020	0,71	1,62	1,67	2,05	2,11	2,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 2.10. Lanjutan Laju Inflasi Tahun 2024 (2020-2024)

Bulan	Samarinda	Balikpapan	Tarakan	Nasional
Januari	0,08	0,10	0,13	0,04
Februari	0,33	0,08	0,53	0,37
Maret	0,29	0,47	0,10	0,52
April	0,78	0,56	0,58	0,25
Mei	0,17	0,21	0,14	-0,03
Juni	-0,12	0,07	0,03	-0,08
Juli	-0,47	-0,09	-0,10	-0,18
Agustus	-0,01	-0,20	-0,31	-0,03
September	0,01	0,10	-0,10	-0,12
Oktober	0,03	-0,61	0,17	0,08
November	0,12	0,10	0,04	0,30
Desember	0,28	0,33	0,39	0,44
Laju Inflasi	1,50	1,11	1,60	1,56
2023	3,37	3,60	2,46	2,58
2022	5,22	5,51	3,93	5,51
2021	2,05	2,28	2,83	1,87
2020	0,86	0,65	1,15	1,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2025

2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian Kota Palangka Raya berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kota Palangka Raya senilai Rp26.236,5 Miliar. Lapangan usaha dengan PDRB terbesar adalah kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib senilai Rp4.957,2 miliar atau 18,89% dan kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor senilai Rp4.647,2 miliar atau 17,71% dari total PDRB Kota Palangka Raya.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	493,5	545,9	581,3	640,8	676,0
B.	Pertambangan dan Penggalian	235,9	259,5	285,6	306,9	317,9
C.	Industri Pengolahan	1.850,6	1.983,1	2.030,5	2.146,0	2.430,9
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	66,0	67,6	71,7	77,4	82,3
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,6	34,8	36,4	38,6	40,8
F.	Konstruksi	1.926,4	2.245,2	2.587,1	2.851,5	2.982,2
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.223,0	3.458,9	3.963,5	4.349,1	4.647,2
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.490,7	1.669,2	2.130,1	2.489,8	2.777,1
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	817,8	884,1	1.083,5	1.197,4	1.342,5
J.	Informasi dan Komunikasi	285,2	342,7	354,2	372,0	386,8
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.348,0	1.524,4	1.680,0	1.818,6	1.977,3



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
L.	Real Estat	550,8	599,9	657,9	727,4	786,9
M,N.	Jasa Perusahaan	11,7	12,4	14,8	17,4	19,6
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.092,1	3.997,1	4.208,8	4.595,0	4.957,2
P.	Jasa Pendidikan	1.156,9	1.233,8	1.361,3	1.522,7	1.685,0
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	514,4	591,9	684,7	775,0	854,5
R,S, T,U.	Jasa Lainnya	183,6	198,9	223,3	249,7	272,3
PDRB/GDRP		18.277,2	19.649,2	21.954,9	24.175,4	26.236,5

*)Angka Sementara/Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025

**Tabel 2.12. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kota Palangka Raya atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam persen)**

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,70	2,78	2,65	2,65	2,58
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,29	1,32	1,30	1,27	1,21
C.	Industri Pengolahan	10,13	10,09	9,25	8,88	9,27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16
F.	Konstruksi	10,54	11,43	11,78	11,80	11,37
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,65	17,60	18,05	17,99	17,71
H.	Transportasi dan Pergudangan	8,19	8,49	9,70	10,30	10,58
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,47	4,50	4,94	4,95	5,12
J.	Informasi dan Komunikasi	1,56	1,74	1,61	1,54	1,47
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,38	7,76	7,65	7,52	7,54
L.	Real Estate	3,01	3,05	3,00	3,01	3,00
M,N.	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,39	20,34	19,17	19,01	18,89
P.	Jasa Pendidikan	6,35	6,28	6,20	6,30	6,42
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,75	3,01	3,12	3,21	3,26
R,S, T,U.	Jasa Lainnya	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04
PDRB/GDRP		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*)Angka Sementara/ Preliminary Figures

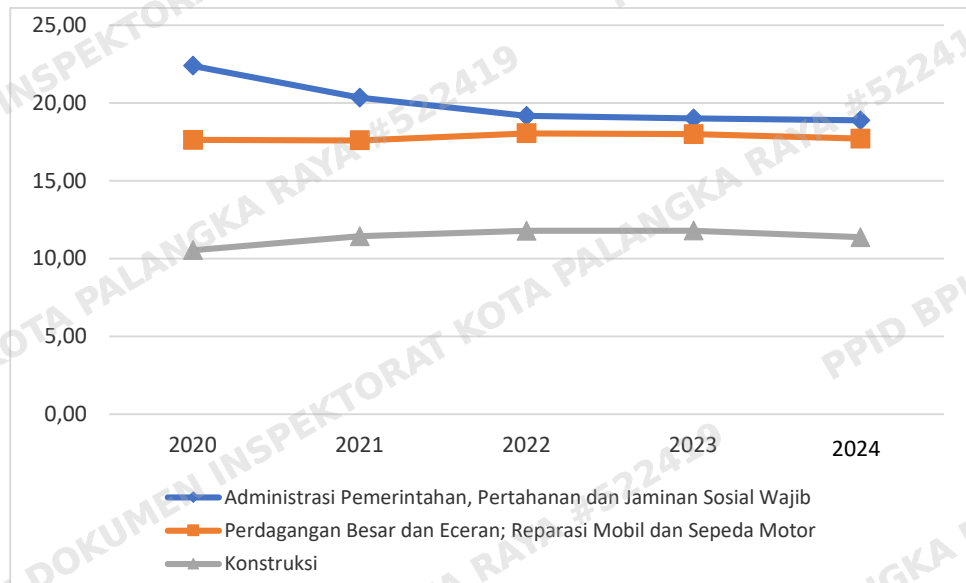
**) Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024



Gambar 2.139. Laju Pertumbuhan PDRB Tiga Lapangan Usaha dengan PDRB terbesar di Kota Palangka Raya Tahun 2020– 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan yaitu Lapangan Usaha dan Pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan potensi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024, maka sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah. Penerimaan pendapatan pada tahun 2024 senilai Rp1.417.903.755.850,09 dan terjadi peningkatan senilai Rp158.607.710.549,24 bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp1.259.296.045.300,85. Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Agar pelayanan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada tahun 2024 dapat lebih optimal, Pj Wali Kota Palangka Raya telah menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan



Denda tunggakan PBBP2 sampai dengan tahun 2022 serta diskon 55% dari NJOP ketetapan PBBP2 Tahun 2024 secara otomatis, sehingga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melakukan pembayaran PBBP2;

2. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Satpol PP Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Forkopimda yaitu Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penertiban objek PBJT Makanan Minuman, Hiburan, Parkir dan Pajak Restoran pada beberapa objek Pajak yang tercatat menunggak/melaporkan Pajak tidak sesuai;
3. Dilakukan sosialisasi bagi Cafe/Tempat Hiburan/Reklame yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah; dan
4. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan Penghargaan kepada Pelaku Usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah di Kota Palangka Raya. Penghargaan yang diberikan untuk Kategori Wajib Pajak pelaku usaha Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah sebagai bentuk apresiasi atas ketaatan dan keaktifan dalam membayar Pajak Daerah di Tahun 2024.

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.549.940.752.475,00 dan terealisasi senilai Rp1.456.074.108.872,67. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi. Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2024.

2.2.3. Pembiayaan

Dalam rangka memenuhi anggaran pembiayaan, Pemerintah Kota Palangka Raya menargetkan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2024 senilai Rp157.785.715.108,00 atau menurun senilai Rp133.850.113.223 jika dibandingkan target tahun 2023 yaitu senilai Rp291.635.828.331. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2024 ditargetkan senilai Rp71.856.711.341,00 atau meningkat senilai Rp5.270.000.000 jika dibandingkan target pada tahun 2023 yaitu senilai Rp66.586.711.341. Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah harus dapat



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

2.2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD.

Berdasarkan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan Urusan, maka Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum. Secara umum capaian pendapatan mencapai 96,85% dari target, belanja daerah mencapai 93,94% dari target yang direncanakan. Rincian target pendapatan, Belanja dan realisasi per urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi per SKPD TA 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	1.464.011.748.708,00	1.417.903.755.850,09	-46.107.992.857,91	96,85
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.205.574.115,00	19.361.278.039,05	-2.844.296.075,95	87,19
4.1.02	BIDANG KESEHATAN	14.153.074.115,00	9.979.277.208,05	-4.173.796.906,95	70,51
	Dinas Kesehatan	14.153.074.115,00	9.979.277.208,05	-4.173.796.906,95	70,51
4.1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.922.500.000,00	9.206.861.226,00	1.284.361.226,00	116,21
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.922.500.000,00	9.206.861.226,00	1.284.361.226,00	116,21
4.1.04	BIDANG PERTANAHAN	100.000.000,00	143.765.105,00	43.765.105,00	143,77
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.000.000,00	143.765.105,00	43.765.105,00	143,77



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(%)
4.1.05	BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.000.000,00	31.374.500,00	1.374.500,00	104,58
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30.000.000,00	31.374.500,00	1.374.500,00	104,58
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11.166.415.550,00	7.361.347.168,00	-3.805.068.382,00	65,92
4.2.09	BIDANG PANGAN	110.000.000,00	127.392.000,00	17.392.000,00	115,81
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	110.000.000,00	127.392.000,00	17.392.000,00	115,81
4.2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.719.500.000,00	2.571.743.794,00	-147.756.206,00	94,57
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2.719.500.000,00	2.571.743.794,00	-147.756.206,00	94,57
4.2.19	BIDANG KEBUDAYAAN	60.000.000,00	646.256.788,00	586.256.788,00	1.077,09
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	60.000.000,00	646.256.788,00	586.256.788,00	1.077,09
4.2.07	BIDANG TENAGA KERJA	95.000.000,00	151.428.028,00	56.428.028,00	159,4
	Dinas Tenaga Kerja	95.000.000,00	151.428.028,00	56.428.028,00	159,4
4.2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.900.000.000,00	1.934.413.666,00	34.413.666,00	101,81
	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000.000,00	1.934.413.666,00	34.413.666,00	101,81
4.2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	6.181.915.550,00	1.930.112.892,00	-4.251.802.658,00	31,22
	Dinas Perhubungan	6.181.915.550,00	1.930.112.892,00	-4.251.802.658,00	31,22
4.2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0
	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	150.000.000,00	150.044.800,00	44.800,00	100,03
4.3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	150.044.800,00	44.800,00	100,03
	Dinas Perikanan	150.000.000,00	150.044.800,00	44.800,00	100,03
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	200.000.000,00	121.900.000,00	-78.100.000,00	60,95
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,00	121.900.000,00	-78.100.000,00	60,95
	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	121.900.000,00	-78.100.000,00	60,95
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.430.289.759.043,00	1.390.909.185.843,04	-39.380.573.199,96	97,25
4.5.02	KEUANGAN	1.430.289.759.043,00	1.390.909.185.843,04	-39.380.573.199,96	97,25
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.244.611.292.632,00	1.227.223.099.276,30	-17.388.193.355,70	98,60



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(%)
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	185.678.466.411,00	163.686.086.566,74	-21.992.379.844,26	88,16
5	BELANJA	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	-93.866.643.602,33	93,94
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	969.288.749.087,00	907.001.334.825,67	-62.287.414.261,33	93,57
5.1.01	BIDANG PENDIDIKAN	409.325.259.260,00	377.488.977.984,00	-31.836.281.276,00	92,22
	Dinas Pendidikan	409.325.259.260,00	377.488.977.984,00	-31.836.281.276,00	92,22
5.1.02	BIDANG KESEHATAN	234.061.784.296,00	212.289.724.988,02	-21.772.059.307,98	90,7
	Dinas Kesehatan	234.061.784.296,00	212.289.724.988,02	-21.772.059.307,98	90,7
5.1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	163.759.167.338,00	157.733.173.234,00	-6.025.994.104,00	96,32
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.759.167.338,00	157.733.173.234,00	-6.025.994.104,00	96,32
5.1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	105.299.657.970,00	104.025.876.938,65	-1.273.781.031,35	98,79
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	105.299.657.970,00	104.025.876.938,65	-1.273.781.031,35	98,79
5.1.05	BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	40.851.855.501,00	39.880.468.319,00	-971.387.182,00	97,62
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.645.474.707,00	10.352.261.106,00	-293.213.601,00	97,25
	Satuan Polisi Pamong Praja	18.502.879.284,00	18.245.759.261,00	-257.120.023,00	98,61
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.703.501.510,00	11.282.447.952,00	-421.053.558,00	96,4
5.1.06	BIDANG SOSIAL	15.991.024.722,00	15.583.113.362,00	-407.911.360,00	97,45
	Dinas Sosial	15.991.024.722,00	15.583.113.362,00	-407.911.360,00	97,45
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	174.956.869.591,00	168.906.203.498,47	-6.050.666.092,53	96,54
5.2.07	BIDANG TENAGA KERJA	9.061.947.085,00	8.609.001.131,00	-452.945.954,00	95
	Dinas Tenaga Kerja	9.061.947.085,00	8.609.001.131,00	-452.945.954,00	95
5.2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.339.048.929,00	7.877.047.493,00	-462.001.436,00	94,46
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	8.339.048.929,00	7.877.047.493,00	-462.001.436,00	94,46
5.2.09	BIDANG PANGAN	1.016.449.600,00	963.391.651,25	-53.057.948,75	94,78
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.016.449.600,00	963.391.651,25	-53.057.948,75	94,78
5.2.10	BIDANG PERTANAHAN	4.302.769.000,00	4.134.363.802,00	-168.405.198,00	96,09



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(%)
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.302.769.000,00	4.134.363.802,00	-168.405.198,00	96,09
5.2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	53.740.163.704,00	52.755.767.789,22	-984.395.914,78	98,17
	Dinas Lingkungan Hidup	53.740.163.704,00	52.755.767.789,22	-984.395.914,78	98,17
5.2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.405.142.701,00	10.059.456.926,00	-345.685.775,00	96,68
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.405.142.701,00	10.059.456.926,00	-345.685.775,00	96,68
5.2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.069.766.998,00	6.001.620.467,00	-68.146.531,00	98,88
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	6.069.766.998,00	6.001.620.467,00	-68.146.531,00	98,88
5.2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.441.424.206,00	4.962.409.909,00	-479.014.297,00	91,2
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	5.441.424.206,00	4.962.409.909,00	-479.014.297,00	91,2
5.2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	17.792.486.613,00	16.838.521.920,00	-953.964.693,00	94,64
	Dinas Perhubungan	17.792.486.613,00	16.838.521.920,00	-953.964.693,00	94,64
5.2.16	BIDANG KOMUNIKASI & INFORMATIKA	18.865.835.323,00	18.297.208.059,00	-568.627.264,00	96,99
	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	18.865.835.323,00	18.297.208.059,00	-568.627.264,00	96,99
5.2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.187.313.087,00	1.135.305.502,00	-52.007.585,00	95,62
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.187.313.087,00	1.135.305.502,00	-52.007.585,00	95,62
5.2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	14.029.084.279,00	13.371.004.651,00	-658.079.628,00	95,31
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.029.084.279,00	13.371.004.651,00	-658.079.628,00	95,31
5.2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.284.180.000,00	9.187.790.662,00	-96.389.338,00	98,96
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.284.180.000,00	9.187.790.662,00	-96.389.338,00	98,96
5.2.20	BIDANG STATISTIK	411.742.250,00	407.662.986,00	-4.079.264,00	99,01
	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	411.742.250,00	407.662.986,00	-4.079.264,00	99,01
5.2.21	BIDANG PERSANDIAN	401.877.525,00	398.573.016,00	-3.304.509,00	99,18
	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	401.877.525,00	398.573.016,00	-3.304.509,00	99,18



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(%)
5.2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	8.005.000.000,00	7.899.166.191,00	-105.833.809,00	98,68
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.005.000.000,00	7.899.166.191,00	-105.833.809,00	98,68
5.2.23	BIADANG PERPUSTAKAAN	6.341.480.491,00	5.747.505.479,00	-593.975.012,00	90,63
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.341.480.491,00	5.747.505.479,00	-593.975.012,00	90,63
5.2.24	BIDANG KEARSIPAN	261.157.800,00	260.405.864,00	-751.936,00	99,71
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	261.157.800,00	260.405.864,00	-751.936,00	99,71
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	68.143.219.823,00	64.263.443.394,64	-3.879.776.428,36	94,31
5.3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.372.579.898,00	10.192.346.095,66	-180.233.802,34	98,26
	Dinas Perikanan	10.372.579.898,00	10.192.346.095,66	-180.233.802,34	98,26
5.3.26	BIDANG PARIWISATA	17.624.814.071,00	17.389.736.795,00	-235.077.276,00	98,67
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	17.624.814.071,00	17.389.736.795,00	-235.077.276,00	98,67
5.3.27	BIDANG PERTANIAN	22.686.332.545,00	19.786.318.058,70	-2.900.014.486,30	87,22
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.686.332.545,00	19.786.318.058,70	-2.900.014.486,30	87,22
5.3.30	BIDANG PERDAGANGAN	16.451.602.509,00	15.925.991.901,28	-525.610.607,72	96,81
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	16.451.602.509,00	15.925.991.901,28	-525.610.607,72	96,81
5.3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	1.007.890.800,00	969.050.544,00	-38.840.256,00	96,15
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.007.890.800,00	969.050.544,00	-38.840.256,00	96,15
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	140.360.731.176,00	130.534.544.049,00	-9.826.187.127,00	93
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	71.051.202.811,00	69.625.351.082,00	-1.425.851.729,00	97,99
	Sekretariat Daerah	71.051.202.811,00	69.625.351.082,00	-1.425.851.729,00	97,99
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	69.309.528.365,00	60.909.192.967,00	-8.400.335.398,00	87,88
	Sekretariat DPRD	69.309.528.365,00	60.909.192.967,00	-8.400.335.398,00	87,88
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	81.274.363.405,00	74.240.689.271,89	-7.033.674.133,11	91,35
5.5.01	PERENCANAAN	18.551.428.555,00	17.510.195.264,00	-1.041.233.291,00	94,39
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18.551.428.555,00	17.510.195.264,00	-1.041.233.291,00	94,39
5.5.02	KEUANGAN	48.305.023.187,00	43.180.797.317,89	-5.124.225.869,11	89,39
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.650.673.872,00	21.916.433.326,89	-3.734.240.545,11	85,44
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	22.654.349.315,00	21.264.363.991,00	-1.389.985.324,00	93,86
5.5.03	KEPEGAWAIAN	11.827.402.663,00	11.100.887.627,00	-726.515.036,00	93,86



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(%)
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.827.402.663,00	11.100.887.627,00	-726.515.036,00	93,86
5.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.647.165.400,00	1.577.320.607,00	-69.844.793,00	95,76
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.647.165.400,00	1.577.320.607,00	-69.844.793,00	95,76
5.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	943.343.600,00	871.488.456,00	-71.855.144,00	92,38
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	943.343.600,00	871.488.456,00	-71.855.144,00	92,38
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.725.236.701,00	19.385.979.792,00	-1.339.256.909,00	93,54
5.6.01	INSPEKTORAT DAERAH	20.725.236.701,00	19.385.979.792,00	-1.339.256.909,00	93,54
	Inspektorat	20.725.236.701,00	19.385.979.792,00	-1.339.256.909,00	93,54
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	56.515.004.316,00	53.739.457.753,00	-2.775.546.563,00	95,09
5.7.01	KECAMATAN	56.515.004.316,00	53.739.457.753,00	-2.775.546.563,00	95,09
	Kecamatan Pahandut	13.654.320.588,00	12.385.889.213,00	-1.268.431.375,00	90,71
	Kecamatan Bukit Batu	9.724.771.504,00	9.092.478.659,00	-632.292.845,00	93,50
	Kecamatan Jekan Raya	11.503.565.507,00	11.152.472.333,00	-351.093.174,00	96,95
	Kecamatan Sabangau	11.212.490.732,00	10.990.067.022,00	-222.423.710,00	98,02
	Kecamatan Rakumpit	10.419.855.985,00	10.118.550.526,00	-301.305.459,00	97,11
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	38.676.578.376,00	38.002.456.288,00	-674.122.088,00	98,26
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	38.676.578.376,00	38.002.456.288,00	-674.122.088,00	98,26
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.676.578.376,00	38.002.456.288,00	-674.122.088,00	98,26
6	PEMBIAYAAN DAERAH NETO	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14	-5.271.972.890,14	106,14



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Tahapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya di tahun 2024, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:
 - a) Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b) Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dilakukan karena terdapat penyesuaian pada:
 - a. belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - b. belanja Perangkat Daerah yang bersifat wajib mengikat dan mendesak.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri dari Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2024 senilai Rp1.464.011.748.708,00. Pendapatan tahun 2024 tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah senilai Rp233.763.792.010,00. Pendapatan Transfer senilai Rp1.218.863.288.858,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp11.384.667.840,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 adalah senilai Rp1.417.903.755.850,09 (tercapai 96,85%) terdapat peningkatan Pendapatan senilai Rp158.607.710.549,24 dibanding tahun 2023 senilai Rp1.259.296.045.300,85. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 tersebut terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah senilai Rp199.606.408.643,09 (tercapai 85,39% dari anggaran senilai Rp233.763.792.010,00). Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 ini meningkat senilai Rp11.225.763.360,24 bila dibandingkan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 yang senilai Rp188.380.645.282,85.

2. Pendapatan Transfer senilai Rp1.205.220.225.806,00 (tercapai 98,88% dari anggaran senilai Rp1.218.863.288.858,00). Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 meningkat senilai Rp145.817.767.498,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer tahun 2023 senilai Rp1.059.402.458.308,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2024 senilai Rp1.087.216.394.103,00 tercapai 98,76% dari anggaran senilai Rp1.100.907.459.416,00. Meningkat sebanyak Rp180.126.235.726,00 dari realisasi tahun 2023 yang senilai Rp907.090.158.377,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2024 senilai Rp5.933.778.000,00 tercapai 100% dari anggaran yang ditetapkan, namun menurun senilai Rp665.007.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp6.598.785.000,00.

Pendapatan Transfer Antar Daerah senilai Rp112.070.053.703,00 tercapai 100,04% dari anggaran senilai Rp112.022.051.442,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2023 ini menurun senilai Rp33.643.461.228,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2023 yang senilai Rp145.713.514.931,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp13.077.121.401,00 tercapai 114,87% dari anggaran senilai Rp11.384.667.840,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 ini meningkat senilai Rp1.564.179.691,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang senilai Rp11.512.941.710,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

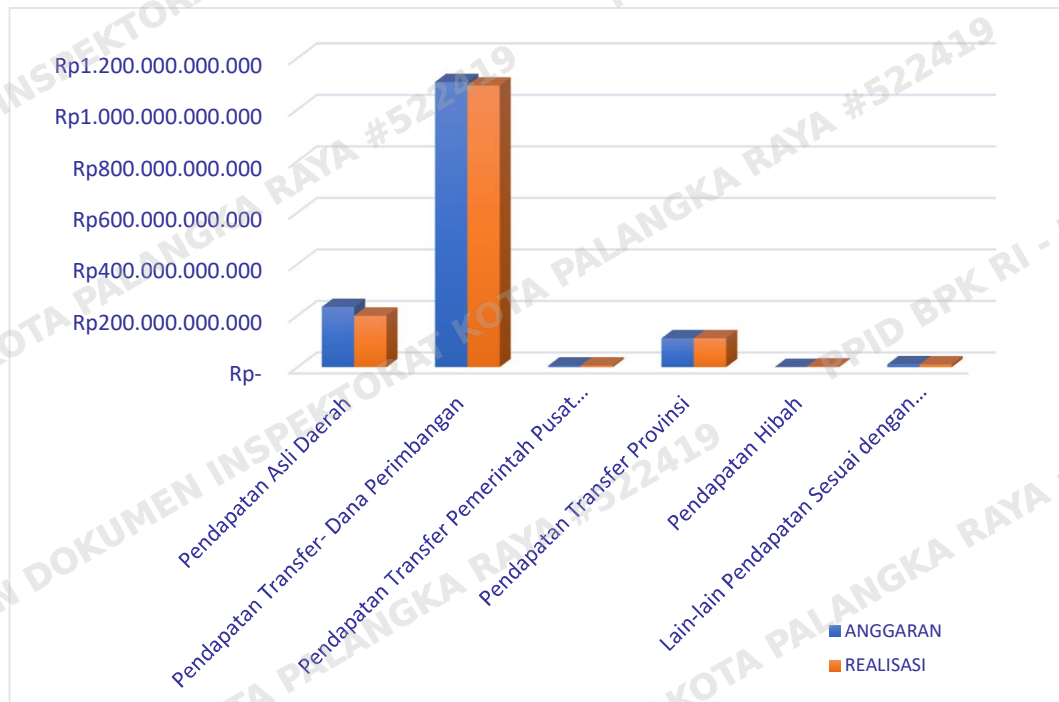
Pendapatan Hibah pada tahun 2024 senilai Rp2.754.227.295,00 tercapai 734,46% dari anggaran senilai Rp375.000.000,00. Pendapatan Hibah tahun 2023 ini meningkat senilai Rp1.001.320.631,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan Hibah tahun 2023 yang senilai Rp1.752.906.664,00.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 senilai Rp10.322.894.106,00 tercapai 93,76% dari anggaran senilai Rp11.009.667.840,00. Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2024 meningkat senilai Rp562.859.060,00 dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2023 yang senilai Rp9.760.035.046,00.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024



Gambar 3. 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan Belanja senilai Rp1.549.940.752.475,00 dan terealisasi senilai Rp1.456.074.108.872,67. Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya dapat digolongkan berdasarkan jenis yaitu Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang dianggarkan Rp609.021.000.651,00 dan terealisasi senilai Rp584.810.451.366,00. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai Rp522.915.095.415,00 dan terealisasi senilai Rp475.404.126.994,33. Belanja Bunga dianggarkan senilai Rp2.915.029.008,00 dan terealisasi senilai Rp2.529.454.558,89. Belanja Hibah dianggarkan senilai Rp68.566.771.687,00 dan direalisasikan senilai Rp61.498.073.179,00. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan senilai Rp1.732.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.595.534.000,00. Belanja Modal dianggarkan senilai Rp341.769.840.717,00 dan terealisasi senilai Rp327.997.382.474,45. Belanja Tidak Terduga dianggarkan senilai Rp2.773.825.241,00 dan terealisasi senilai Rp1.994.086.300,00. Belanja Transfer dianggarkan senilai Rp246.689.756,00 dan terealisasi senilai Rp245.000.000,00.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

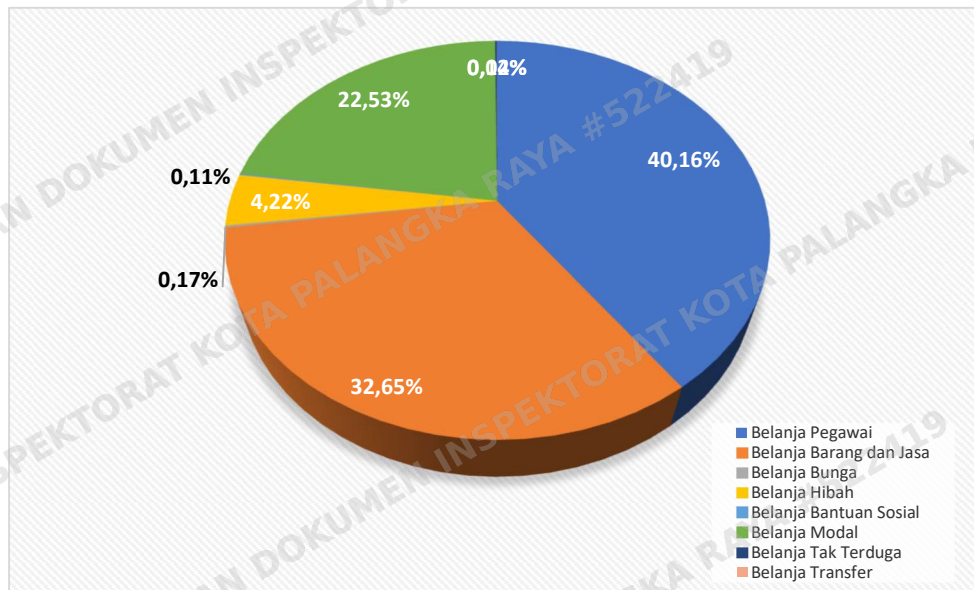
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
Belanja Pegawai	609.021.000.651,00	584.810.451.366,00	24.210.549.285,00	96,02
Belanja Barang dan Jasa	522.915.095.415,00	475.404.126.994,33	47.510.968.420,67	90,91
Belanja Bunga	2.915.029.008,00	2.529.454.558,89	385.574.449,11	86,77
Belanja Hibah	68.566.771.687,00	61.498.073.179,00	7.068.698.508,00	89,69
Belanja Bantuan Sosial	1.732.500.000,00	1.595.534.000,00	136.966.000,00	92,09



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
Belanja Modal	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	13.772.458.242,55	95,97
Belanja Tak Terduga	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	779.738.941,00	71,89
Belanja Transfer	246.689.756,00	245.000.000,00	1.689.756,00	99,32
Jumlah	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	93.866.643.602,33	93,94



Gambar 3.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Tabel 3.2. Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024

Uraian	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.417.903.755.850,09
1. Pendapatan Asli Daerah	199.606.408.643,09
2. Pendapatan Transfer	1.205.220.225.806,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.077.121.401,00
BELANJA DAERAH	1.456.074.108.872,67
1. Belanja Pegawai	584.810.451.366,00
2. Belanja Barang dan Jasa	475.404.126.994,33
3. Belanja Bunga	2.529.454.558,89
4. Belanja Hibah	61.498.073.179,00
5. Belanja Bantuan Sosial	1.595.534.000,00
6. Belanja Modal	327.997.382.474,45
7. Belanja Tidak Terduga	1.994.086.300,00
8. Belanja Transfer	245.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Realisasi (Rp)
SURPLUS/(DEFISIT)	-38.170.353.022,58
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	157.785.715.107,80
Pengeluaran Pembiayaan	66.584.738.450,66
Pembiayaan Netto	91.200.976.657,14
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	53.030.623.634,56

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pencapaian target Pendapatan sebesar 96,85% dan pencapaian target Belanja sebesar 93,94% dipengaruhi oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Proses Bisnis. Untuk mengarahkan agar segala kegiatan dari masing-masing SKPD tertuju pada pencapaian sasaran dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini diharapkan dapat mendorong proses percepatan pembentukan organisasi yang prima, optimal dan ultima;
2. Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya mencukupi dari segi jumlah, namun dari segi kualitas masih terbatas, sehingga diperlukan peningkatan kualitas aparatur daerah Kota Palangka Raya baik dari segi teknis maupun manajerial sehingga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
3. Kurangnya anggaran untuk meningkatkan kualitas Pegawai agar lebih fokus pada pencapaian hasil dengan menetapkan hubungan yang logis dan matematis antar input dan *output* suatu kegiatan, bukan hanya semata berorientasi pada selesainya kegiatan; dan
4. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana personil, pendanaan dan fasilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan.



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang valid dan relevan terkait posisi keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD-Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang meliputi aset dan ekuitas dari seluruh transaksi serta kejadian (*events*) yang dilakukan dan terjadi pada entitas SKPKD dan SKPD selama satu tahun periode pelaporan. Periode akuntansi/pelaporan adalah satu tahun anggaran, dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya sudah direviu oleh Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Tengah agar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya lebih retrospektif.

4.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan PPKD dan SKPD menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban (*mandatory*) untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- Akuntabilitas;
- Manajemen;
- Transparansi;
- Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*); dan
- Evaluasi Kinerja.

4.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

- Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik; dan
- Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan



anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

4.3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

4.3.1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada:

- Masyarakat;
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
- Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

4.3.2. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Selain Dana Alokasi Umum, pajak merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah, maka ketentuan Laporan Keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah daerah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

4.3.3. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah/pengguna barang dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- Relevan
Informasi yang relevan harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap.



- b. Andal
Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas.
- c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

4.5. Unsur Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD;
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Neraca PPKD, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan PPKD;
- c. Laporan Keuangan Gabungan sebagai entitas pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

- **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

- **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan ekuitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- **Laporan Operasional**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan yang terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan pos-pos luar biasa.

- **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

- **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

- d. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyajikan pertanggungjawaban BLUD dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana disebutkan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

4.6. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

4.6.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau



kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

4.6.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.

4.6.4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4.6.5. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah dipenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4.6.6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran



pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian.

4.7. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

4.8. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. **Asumsi Kemandirian Entitas**
Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
- b. **Asumsi Kesenambungan Entitas**
Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
- c. **Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*monetary measurement*)**
Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.9. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat senilai jumlah kas yang dibayar atau senilai nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana di praktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang



dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.10. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

a. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut.

c. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam menjelaskan LRA ini akan disajikan sesuai dengan struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.464.011.748.708,00	1.417.903.755.850,09

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Palangka Raya menganggarkan Pendapatan Daerah senilai Rp1.464.011.748.708,00 dengan realisasi senilai Rp1.417.903.755.850,09 (96,85%). Realisasi mengalami kenaikan senilai Rp158.607.710.549,24 bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp1.259.296.045.300,85 dengan persentase kenaikan sebesar 12,59 %. Realisasi pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1. Pendapatan Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Asli Daerah	233.763.792.010,00	199.606.408.643,09	188.380.645.282,85	85,39
Pendapatan Transfer	1.218.863.288.858,00	1.205.220.225.806,00	1.059.402.458.308,00	98,88
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.384.667.840,00	13.077.121.401,00	11.512.941.710,00	114,87
Jumlah	1.464.011.748.708,00	1.417.903.755.850,09	1.259.296.045.300,85	96,85

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	233.763.792.010,00	199.606.408.643,09

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp233.763.792.010,00 dan terealisasi senilai Rp199.606.408.643,09 dengan kenaikan senilai Rp11.225.763.360,24 dengan persentase kenaikan senilai 5,96% dari Tahun 2023 senilai Rp188.380.645.282,85. Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.2. Pendapatan Asli Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pajak Daerah	164.415.266.411,00	162.297.437.983,74	150.594.656.898,00	98,71
Retribusi Daerah	20.839.724.550,00	18.278.383.635,00	13.933.973.543,02	87,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.049.777.516,00	2.597.478.582,50	81.147.428,96	126,72
Lain-lain PAD yang Sah	46.459.023.533,00	16.433.108.441,85	23.770.867.412,87	35,37
Jumlah	233.763.792.010,00	199.606.408.643,09	188.380.645.282,85	85,39

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	164.415.266.411,00	162.297.437.983,74

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp164.415.266.411,00 dan terealisasi senilai Rp162.297.437.983,74 meningkat senilai Rp11.702.781.085,74 dengan persentase 7,77% dari tahun 2023 senilai Rp150.594.656.898,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 per rincian tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3. Pendapatan Pajak Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pajak Hotel	0,00	0,00	12.828.181.574,00	0,00
Pajak Losmen	0,00	0,00	439.276.791,00	0,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	285.688.000,00	0,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	18.751.880.703,00	0,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	2.656.527.761,00	0,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	4.464.224.080,00	0,00
Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	2.689.500,00	0,00
Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	268.895.588,00	0,00
Pajak Bar dan Sejenisnya	0,00	0,00	151.115.032,00	0,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	1.679.201.151,00	0,00
Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	1.722.271.937,00	0,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busa na	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke dan Klub Malam dan Sejenisnya	0,00	0,00	656.145.939,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	682.264.099,00	0,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	243.876.096,00	0,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	2.750.000.000,00	1.948.954.957,00	2.004.647.340,00	70,87
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	44.621.646.531,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	1.207.873.200,00	0,00
Pajak Air Tanah	160.500.000,00	199.947.915,00	121.229.212,00	124,58
Pajak Sarang Burung Walet	220.000.000,00	243.744.275,00	289.438.980,00	110,79
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.781.547.225,00	6.289.432.538,00	4.944.949.316,00	108,78
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	34.938.139.991,00	17.601.315.264,00	17.380.247.782,00	50,38
BPHTB - Pemindahan Hak	29.100.000.870,00	27.473.511.023,00	26.485.677.558,00	94,41
BPHTB – Pemberian Hak Baru	7.020.320.000,00	13.348.690.846,00	8.634.708.728,00	190,14
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	26.975.540.000,00	35.838.590.820,74	0,00	132,86
PBJT-Tenaga Listrik	39.863.968.325,00	39.115.615.560,00	0,00	98,12
PBJT-Jasa Perhotelan	12.676.750.000,00	14.576.131.758,00	0,00	114,98
PBJT-Jasa Parkir	1.350.000.000,00	1.011.749.679,00	0,00	74,94
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.578.500.000,00	4.649.753.348,00	0,00	129,94
Jumlah	164.415.266.411,00	162.297.437.983,74	150.594.656.898,00	98,71

Penjelasan:

1. Sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan karena potensi penerimaan dari sektor Pajak Daerah dapat terealisasi seiring dengan meningkatnya jumlah objek dan wajib pajak sebagaimana contoh adanya *event-event* Nasional yang diadakan di Kota Palangka Raya;
2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024.
3. Dengan ditetapkannya Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2024 pada tanggal 27 Februari 2024 yang merupakan implementasi Undang-Undang



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dilakukan penyesuaian akun atas beberapa jenis Pajak Daerah menggunakan akun Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) pada APBD-P TA 2024.

Pajak Daerah per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 terinci sebagai berikut.

Tabel 5.4. Pajak Daerah per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Pajak Daerah	Nilai Realisasi (Rp)
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	1.948.954.957,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.948.954.957,00
Pajak Air Tanah	199.947.915,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	199.947.915,00
Pajak Sarang Burung Walet	243.744.275,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	243.744.275,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.289.432.538,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.289.432.538,00
PBB-P2	17.601.315.264,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	17.601.315.264,00
BPHTB-Pemindahan Hak	27.473.511.023,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	27.473.511.023,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	13.348.690.846,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	13.348.690.846,00
PBJT-Restoran	34.043.605.726,74
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	34.043.605.726,74
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.794.985.094,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.794.985.094,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	39.115.615.560,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	39.115.615.560,00
PBJT-Hotel	13.837.812.993,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	13.837.812.993,00
PBJT-Losmen	584.181.965,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	584.181.965,00
PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	154.136.800,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	154.136.800,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.011.749.679,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.011.749.679,00
PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2.044.004.423,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.044.004.423,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.497.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	20.497.000,00
PBJT-Permainan Ketangkasan	607.656.080,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	607.656.080,00
PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	16.400.055,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	16.400.055,00
PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	4.428.800,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.428.800,00
PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	16.382.600,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Pajak Daerah	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	16.382.600,00
PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.940.384.390,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.940.384.390,00
Jumlah	162.297.437.983,74

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	20.839.724.550,00	18.278.383.635,00

Pendapatan Retribusi Pemerintah Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp20.839.724.550,00 dan terealisasi senilai Rp18.278.383.635,00 meningkat senilai Rp4.344.410.091,98 dengan persentase 31,18% dari tahun 2023 senilai Rp13.933.973.543,02. Pendapatan Retribusi Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.270.809.000,00	1.288.415.940,00	1.314.599.440,00	101,39
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.750.000.000,00	1.780.256.562,00	1.721.307.004,00	101,73
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.108.015.550,00	1.868.111.792,00	1.858.062.836,00	30,58
Retribusi Pelayanan Pasar	75.000.000,00	48.300.000,00	62.000.000,00	64,40
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	713.585.000,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	6.732.500,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	23.500.000,00	24.950.000,00	26.590.000,00	106,17
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	76.846.250,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	372.191.897,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	314.940.000,00	2.076.373.024,00	2.649.994.304,00	659,29
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	630.807.600,00	976.611.800,00	0,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	13.173.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	127.392.000,00	103.245.000,00	115,81
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	35.000.000,00	14.642.000,00	30.170.000,00	41,83
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	630.926.788,00	403.570.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.000.000,00	60.044.800,00	43.574.000,00	100,07



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.100.000.000,00	266.180.875,00	0,00	24,20
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.312.460.000,00	665.433.000,00	0,00	28,78
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	1.780.419.675,02	0,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	1.649.523.965,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	1.881.000,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	129.895.872,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.600.000.000,00	8.702.071.226,00	0,00	114,50
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	80.000.000,00	94.478.028,00	0,00	118,10
Jumlah	20.839.724.550,00	18.278.383.635,00	13.933.973.543,02	87,71

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Ada perubahan kenaikan tarif retribusi sehingga terjadi peningkatan PAD;
 - Adanya tambahan pelaku usaha sehingga terjadi kenaikan PAD;
 - Adanya kemarau panjang, menyebabkan terjadinya penurunan wisatawan;
 - Bertambahnya pihak yang mendirikan bangunan baru;
 - Banyak pelaku usaha yang menunggak pembayaran retribusi minuman beralkohol, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan.
- Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024.

Retribusi Daerah per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 5.6. Retribusi Daerah per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Retribusi Daerah	Nilai Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.288.415.940,00
Dinas Kesehatan	1.288.415.940,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.780.256.562,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.780.256.562,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.868.111.792,00
Dinas Perhubungan	1.868.111.792,00
Retribusi Pelataran	48.300.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	48.300.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Retribusi Daerah	Nilai Realisasi (Rp)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	24.950.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	10.950.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.492.297.424,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.204.582.319,00
Dinas Perikanan	90.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	143.765.105,00
Dinas Tenaga Kerja	53.950.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	114.449.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	108.989.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.460.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	137.230.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	15.330.000,00
Sekretariat Daerah	121.900.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	332.396.600,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.240.000,00
Dinas Perhubungan	10.782.100,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31.374.500,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	630.807.600,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	630.807.600,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	127.392.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	127.392.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.642.000,00
Dinas Perhubungan	14.642.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	630.926.788,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	630.926.788,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.044.800,00
Dinas Perikanan	60.044.800,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	266.180.875,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	266.180.875,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	665.433.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	410.923.000,00
Dinas Tenaga Kerja	3.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	19.843.000,00
Dinas Perhubungan	36.577.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.090.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.702.071.226,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.702.071.226,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	94.478.028,00
Dinas Tenaga Kerja	94.478.028,00
Jumlah	18.278.383.635,00

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.049.777.516,00	2.597.478.582,50

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

yang dianggarkan tahun 2024 senilai Rp2.049.777.516,00 dan direalisasikan pada tahun 2024 senilai Rp2.597.478.582,50 mengalami kenaikan senilai Rp2.516.331.153,54 dengan persentase 3100,94% dari tahun 2023 senilai Rp81.147.428,96. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.7. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.049.777.516,00	2.597.478.582,50	81.147.428,96	126,72
Jumlah	2.049.777.516,00	2.597.478.582,50	81.147.428,96	126,72

Penjelasan:

Sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu karena pada TA 2023 Dividen yang diterima hanya dari PT. Jamkrida Kalteng senilai Rp81.147.428,96 sedangkan pada TA 2024 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang diterima terdiri dari Dividen Bank Kalteng sejumlah Rp2.593.046.215,00 dan Dividen PT. Jamkrida Kalteng sejumlah Rp4.432.367,50.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per jenis per SKPD tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 5.8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Nilai Realisasi (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.597.478.582,50
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.597.478.582,50
- PT. Bank Kalteng	2.593.046.215,00
- PT. Jamkrida	4.432.367,50
Jumlah	2.597.478.582,50

Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada tahun 2024 dari PT. Bank Kalteng diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris sebagai berikut:

- Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Akta Notaris Win Aditya Ariwibawa, SH., M.Kn Nomor 16 tanggal 18 November 2024, bahwa pembagian Dividen untuk Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp2.593.046.215,00.
- Akta Notaris Vera Octarina, S.H., M.Kn Nomor 1 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jamkrida Kalteng Tahun Buku 2023 sebesar Rp4.432.367,50.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	46.459.023.533,00	16.433.108.441,85

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp46.459.023.533,00 dan terealisasi senilai Rp16.433.108.441,85 dengan penurunan senilai Rp7.337.758.971,02 dengan persentase 30,87% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp23.770.867.412,87. Pada tahun 2024 terdapat penurunan yang signifikan pada Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.9. Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	216.180.000,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	113.219.924,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	141.293.716,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	7.391.530.483,00	2.797.051.690,00	3.981.858.760,00	37,84
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	3.050.000.000,00	22.790.450,00	1.906.932.891,00	0,75
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	22.305.495,52	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	523.700.000,00	2.150.237.384,09	7.751.779.413,56	410,59
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	400.000.000,00	614.477.366,71	421.730.511,23	153,62
Pendapatan Denda Pajak Hotel	50.000.000,00	23.454.491,00	25.289.050,00	46,91
Pendapatan Denda Pajak Restoran	60.000.000,00	366.727.085,00	130.341.867,80	611,21
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	7.000.000,00	14.105.624,00	10.392.223,00	201,51
Pendapatan Denda Pajak Reklame	70.000.000,00	63.001.520,00	39.143.718,00	90,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	20.000.000,00	5.802.469,00	3.515.308,00	29,01
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.200.000,00	1.668.888,00	277.089,00	139,07
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	6.004.739,00	6.914.754,00	12,01
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	4.813.475,00	16.989.800,00	96,27



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.000.000.000,00	903.070.292,00	1.761.082.850,00	4,30
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	25.325.104,00	64.231.111,76	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	3.410.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	42.164.100,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	349.707.022,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	948.327.935,00	634.591.105,00	0,00	66,92
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	4.002.208,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	105.123.283,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	6.762.107.808,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	12.632.265.115,00	7.948.724.405,05	0,00	62,92
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	250.000.000,00	241.889.757,00	0,00	96,76
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	500.247.106,00	0,00	0,00
Jumlah	46.459.023.533,00	16.433.108.441,85	23.770.867.412,87	35,37

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya terjadi penurunan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

Lain-lain PAD yang Sah per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 5.10. Lain-lain PAD yang Sah per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Lain-Lain PAD Yang Sah	Nilai Realisasi (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.797.051.690,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lain-Lain PAD Yang Sah	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.797.051.690,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	22.790.450,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.790.450,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.150.237.384,09
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.150.237.384,09
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	614.477.366,71
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	614.477.366,71
Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.221.373,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.221.373,00
Pendapatan Denda Pajak Losmen	8.108.846,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.108.846,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.124.272,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.124.272,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	157.786.580,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	157.786.580,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	93.389.851,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	93.389.851,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	106.026.475,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	106.026.475,00
Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	82.800,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	82.800,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	7.588.075,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.588.075,00
Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.853.304,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.853.304,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.460.058,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	9.460.058,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.597.847,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.597.847,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.047.719,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.047.719,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	63.001.520,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	63.001.520,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.802.469,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.802.469,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.668.888,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.668.888,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	6.004.739,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.004.739,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.813.475,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.813.475,00
Pendapatan Denda PBB-P2	903.070.292,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	903.070.292,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.325.104,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.325.104,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	582.666.390,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	582.666.390,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lain-Lain PAD Yang Sah	Nilai Realisasi (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	51.924.715,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51.924.715,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	4.002.208,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.002.208,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	105.123.283,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	105.123.283,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	7.948.724.405,05
Dinas Kesehatan	7.948.724.405,05
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	241.889.757,00
Dinas Kesehatan	241.889.757,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	500.247.106,00
Dinas Kesehatan	500.247.106,00
Jumlah	16.433.108.441,85

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.218.863.288.858,00	1.205.220.225.806,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.218.863.288.858,00 dan terealisasi senilai Rp1.205.220.225.806,00 mengalami peningkatan senilai Rp145.817.767.498,00 dengan persentase 13,76% dari tahun 2023 senilai Rp1.059.402.458.308,00. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.11. Pendapatan Transfer TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.100.907.459.416,00	1.087.216.394.103,00	907.090.158.377,00	98,76
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.933.778.000,00	5.933.778.000,00	6.598.785.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	145.713.514.931,00	100,04
Jumlah	1.218.863.288.858,00	1.205.220.225.806,00	1.059.402.458.308,00	98,88

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.100.907.459.416,00	1.087.216.394.103,00

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.100.907.459.416,00 dan terealisasi senilai Rp1.087.216.394.103,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp180.126.235.726,00 dengan persentase senilai 19,86% dari tahun 2023 dengan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

realisasi dana perimbangan senilai Rp907.090.158.377,00. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.12. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	286.915.807.070,00	289.596.261.149,00	142.989.011.494,00	100,93
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	653.373.519.000,00	658.988.233.482,00	615.517.742.730,00	100,86
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28.827.376.000,00	27.974.653.026,00	36.180.579.044,00	97,04
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	131.790.757.346,00	110.657.246.446,00	112.402.825.109,00	83,96
Jumlah	1.100.907.459.416,00	1.087.216.394.103,00	907.090.158.377,00	98,76

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Transfer Dana Perimbangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.3, V.6, V.7, V.8, V.10 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024;
 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.11 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024;
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.12 Rincian DAK Fisik TA 2024; dan
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.13 Rincian DAK Non Fisik TA 2024.
- Dana Perimbangan yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp1.087.216.394.103,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

Secara terperinci dana perimbangan per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.13. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan per sub rincian objek TA 2024

Dana Perimbangan	Nilai Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.048.702.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.048.702.000,00
DBH PPh Pasal 21	19.722.384.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.722.384.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Dana Perimbangan	Nilai Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	253.393.016.149,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	253.393.016.149,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.288.317.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.288.317.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.143.842.000,00
DAU	565.344.212.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	565.344.212.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14.948.437.482,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.948.437.482,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.340.047.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50.340.047.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.649.363.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.649.363.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	14.706.174.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.706.174.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.926.818.247,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.926.818.247,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.137.203.045,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.137.203.045,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.455.582.977,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.455.582.977,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	2.915.920.373,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.915.920.373,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.368.239.491,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.368.239.491,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	415.340.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	415.340.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	600.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.080.755.680,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.080.755.680,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.074.793.213,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.074.793.213,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.094.035.243,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.094.035.243,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	997.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	997.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	67.969.188.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	67.969.188.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	650.667.750,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	650.667.750,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	216.889.250,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	216.889.250,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	200.690.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	200.690.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	242.090.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	242.090.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Dana Perimbangan	Nilai Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.248.064.895,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.248.064.895,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	339.917.100,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	339.917.100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.408.715.497,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.408.715.497,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	406.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.883.488.711,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.883.488.711,00
Jumlah	1.087.216.394.103,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.933.778.000,00	5.933.778.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp5.933.778.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.933.778.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan Rp665.007.000,00 dengan persentase senilai 10,08% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp6.598.785.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.14. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2024

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Nilai Realisasi (Rp)
Insentif Fiskal	5.933.778.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.933.778.000,00
Jumlah	5.933.778.000,00

Penjelasan:

Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 merupakan penghargaan kinerja dari kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri yang telah sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan senilai Rp5.933.778.000,00.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp112.022.051.442,00 dan terealisasi senilai Rp112.070.053.703,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp33.643.461.228,00 dengan persentase 23,09% dari realisasi pendapatan transfer



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

antar daerah tahun 2023 senilai Rp145.713.514.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15. Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Bagi Hasil	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	145.713.514.931,00	100,04
Jumlah	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	145.713.514.931,00	100,04

Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan senilai Rp112.022.051.442,00 dan terealisasi Rp112.070.053.703,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp33.643.461.228,00 dengan persentase 23,09% dari realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun 2023 senilai Rp145.713.514.931,00. Pada tahun 2024 terdapat setoran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023. Rincian pendapatan bagi hasil pajak dari Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16. Pendapatan Bagi Hasil TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	145.713.514.931,00	100,04
Jumlah	112.022.051.442,00	112.070.053.703,00	145.713.514.931,00	100,04

Penjelasan:

Sebab penurunan capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya karena menyesuaikan alokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Bagi Hasil per jenis per SKPD tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.17. Pendapatan Bagi Hasil Pajak per jenis per SKPD TA 2024

Pendapatan Bagi Hasil	Nilai Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.799.883.330,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.799.883.330,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.865.530.275,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.865.530.275,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.596.107.493,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	49.596.107.493,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	79.095.316,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	79.095.316,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.729.437.289,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.729.437.289,00
Jumlah	112.070.053.703,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	11.384.667.840,00	13.077.121.401,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 dianggarkan senilai Rp11.384.667.840,00 dan terealisasi senilai Rp13.077.121.401,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp1.564.179.691,00 dengan persentase kenaikan 13,59% dari realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 senilai Rp11.512.941.710,00. Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut:

Tabel 5.18. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per jenis per SKPD TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Hibah	375.000.000,00	2.754.227.295,00	1.752.906.664,00	734,46
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.009.667.840,00	10.322.894.106,00	9.760.035.046,00	93,76
Jumlah	11.384.667.840,00	13.077.121.401,00	11.512.941.710,00	114,87

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	375.000.000,00	2.754.227.295,00

Pendapatan Hibah tahun 2024 dianggarkan senilai Rp375.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.754.227.295,00. Realisasi ini naik senilai Rp1.001.320.631,00 dengan persentase 57,12% dari realisasi pendapatan hibah tahun 2023 senilai Rp1.752.906.664,00. Rincian pendapatan hibah TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19. Pendapatan Hibah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Hibah	375.000.000,00	2.754.227.295,00	1.752.906.664,00	734,46
Jumlah	375.000.000,00	2.754.227.295,00	1.752.906.664,00	734,46

Penjelasan:

- Sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena nilai penerimaan melebihi dari target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024;
- Latar belakang penerimaan hibah yaitu berdasarkan:
 - Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor PPH-11/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2021 tanggal 1 April 2021 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia Nomor AMA-20/PPH-11/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2023 tanggal 06 Desember 2023.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Dana hibah diberikan sebagai insentif atas peningkatan kinerja yang dicapai Pemerintah Daerah atau BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas investasi. Disebutkan bahwa Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kota Palangka Raya setinggi-tingginya sebesar Rp7.307.000.000,00 yang disalurkan berdasarkan permintaan penyaluran Dana Hibah yang diajukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Kementerian Keuangan. Untuk penyaluran Dana Hibah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.719.227.295,00 yang telah sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor AMA-8/PPH-11/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2023 tanggal 30 Januari 2023; dan

- b. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2024 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan SMP Negeri Satu Atap 4 Palangka Raya Nomor 24406/12/A2/KU.07.00/2024 Tanggal 31 Juli 2024 diberikan bantuan sebesar Rp35.000.000,00.

Pendapatan Hibah per sub rincian objek per SKPD TA 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.20. Pendapatan Hibah per jenis per SKPD TA 2024

Pendapatan Hibah	Nilai Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.754.227.295,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.754.227.295,00
Jumlah	2.754.227.295,00

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	11.009.667.840,00	10.322.894.106,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 dianggarkan senilai Rp11.009.667.840,00 dan terealisasi senilai Rp10.322.894.106,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp562.859.060,00 dengan persentase 5,77% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2023 senilai Rp9.760.035.046,00. Peningkatan realisasi ini di pengaruhi karena terdapat klaim atas pelayanan JKN pada FKTP.

Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing FKTP dapat dilihat pada mutasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada poin 5.3.1.1.6. Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan per jenis per SKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.21. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.009.667.840,00	10.322.894.106,00	9.760.035.046,00	93,76
Jumlah	11.009.667.840,00	10.322.894.106,00	9.760.035.046,00	93,76

Penjelasan:

Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2024 namun meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena bertambahnya peserta BPJS sehingga mempengaruhi nilai klaim Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Tabel 5.22. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan per rincian objek per SKPD TA 2024

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Realisasi (Rp)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.322.894.106,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.322.894.106,00
Jumlah	10.322.894.106,00

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67

Pada tahun 2024 Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dianggarkan senilai Rp1.549.940.752.475,00 dengan realisasi belanja daerah senilai Rp1.456.074.108.872,67. Realisasi belanja daerah tahun 2024 ini meningkat senilai Rp129.523.454.126,82 dengan persentase kenaikan 9,76% bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023 senilai Rp1.326.550.654.745,85. Belanja Daerah pada tahun 2024 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.23. Belanja Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Operasi	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.098,22	1.044.031.428.999,85	93,42
Belanja Modal	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	281.343.767.566,00	95,97
Belanja Tidak Terduga	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	930.458.180,00	71,89
Belanja Transfer	246.689.756,00	245.000.000,00	245.000.000,00	99,32
Jumlah Belanja Daerah	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	1.326.550.654.745,85	93,94



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.098,22

Belanja Operasi dianggarkan senilai Rp1.205.150.396.761,00 pada tahun anggaran 2024 digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp1.125.837.640.098,22 meningkat senilai Rp81.806.211.098,37 dengan persentase 7,84% dari realisasi belanja operasi tahun 2023 senilai Rp1.044.031.428.999,85. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.24. Belanja Operasi TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Pegawai	609.021.000.651,00	584.810.451.366,00	520.443.307.879,00	96,02
Belanja Barang dan Jasa	522.915.095.415,00	475.404.126.994,33	475.137.420.309,85	90,91
Belanja Bunga	2.915.029.008,00	2.529.454.558,89	5.649.396.698,00	86,77
Belanja Hibah	68.566.771.687,00	61.498.073.179,00	41.261.099.863,00	89,69
Belanja Bantuan Sosial	1.732.500.000,00	1.595.534.000,00	1.540.204.250,00	92,09
Jumlah Belanja Operasi	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.098,22	1.044.031.428.999,85	93,42

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	609.021.000.651,00	584.810.451.366,00

Belanja Pegawai tahun 2024 dianggarkan senilai Rp609.021.000.651,00 dan terealisasi senilai Rp584.810.451.366,00. Realisasi ini meningkat Rp64.367.143.487,00 dengan persentase kenaikan 12,37% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp520.443.307.879,00. Rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25. Belanja Pegawai TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	357.118.393.091,00	342.003.060.625,00	312.072.264.867,00	95,77
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	146.054.890.338,00	142.194.340.476,00	111.194.583.695,00	97,36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.719.106.564,00	83.959.813.186,00	80.384.106.346,00	94,64
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.670.680.911,00	15.513.122.032,00	15.191.012.232,00	98,99
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	480.801.747,00	190.315.047,00	562.300.739,00	39,58
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	778.528.000,00	751.200.000,00	749.720.000,00	96,49



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Pegawai BLUD	198.600.000,00	198.600.000,00	289.320.000,00	100,00
Jumlah Belanja Pegawai	609.021.000.651,00	584.810.451.366,00	520.443.307.879,00	96,02

Penjelasan:

Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja pegawai di TA 2024 diantaranya karena terdapat pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, mutasi keluar dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan meninggal dunia. Namun meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terdapat penambahan pegawai ASN yaitu PPPK.

Belanja Pegawai per sub rincian objek per SKPD tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	522.915.095.415,00	475.404.126.994,33

Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dianggarkan senilai Rp522.915.095.415,00 dan terealisasi senilai Rp475.404.126.994,33. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp266.706.684,48 dengan persentase kenaikan 0,06% dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 senilai Rp475.137.420.309,85. Perincian atas belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Barang Pakai Habis	122.867.862.739,90	117.327.856.972,14	94.002.907.959,00	95,49
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	293.810.400,00	283.985.500,00	0,00	96,66
Belanja Jasa Kantor	124.377.379.737,10	115.701.663.378,00	114.329.374.356,70	93,02
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	38.208.975.669,00	35.579.280.777,00	32.791.677.408,00	93,12
Belanja Sewa Tanah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.319.521.000,00	2.965.421.916,00	871.238.500,00	89,33
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.923.415.400,00	1.806.753.700,00	896.440.790,00	93,93
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	146.525.000,00	138.925.000,00	82.750.000,00	94,81
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.441.161.060,00	3.403.756.600,00	4.834.394.265,00	98,91
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	175.000.000,00	174.499.734,00	0,00	99,71
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	311.000.000,00	266.055.000,00	156.567.100,00	85,55
Belanja Kursus/	6.501.801.450,00	5.625.493.164,00	6.554.195.066,00	86,52



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.110.092.760,00	1.046.732.759,00	1.065.122.582,00	94,29
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	276.150.100,00	273.705.375,00	432.855.800,00	99,11
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.292.080.398,00	13.320.818.761,00	6.974.064.211,00	93,20
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.387.866.150,00	6.863.796.761,00	18.924.127.000,00	92,91
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.849.879.000,00	3.732.903.065,00	4.006.319.506,00	96,96
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	115.000.000,00	114.861.100,00	95.892.400,00	99,88
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	325.855.500,00	324.588.500,00	40.000.000,00	99,61
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.521.633.263,00	79.606.752.200,25	71.944.726.360,00	89,93
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	628.275.000,00	553.974.519,00	1.601.085.781,00	88,17
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.703.425.000,00	2.671.485.000,00	2.227.250.000,00	98,82
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.409.583.321,00	27.067.848.037,84	22.706.439.473,00	98,75
Belanja Barang dan Jasa BOS	36.016.080.000,00	27.017.727.127,00	26.722.729.553,15	75,02
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.194.760.000,00	6.939.071.498,00	0,00	84,68
Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.377.962.467,00	22.456.170.550,10	63.876.762.199,00	73,92
Jumlah	522.915.095.415,00	475.404.126.994,33	475.137.420.309,85	90,91

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Disebabkan kebutuhan belanja terutama Belanja Bahan Pakai Habis mengalami kenaikan harga dibandingkan Tahun 2023;
2. Realisasi belanja bertambah karena menyesuaikan kebutuhan operasional yang sudah di analisa sesuai dengan usulan kerja;
3. Capaian realisasi lebih tinggi karena pagu Anggaran Belanja Barang pakai Habis pada Tahun 2024 lebih besar dari Tahun 2023; dan
4. Terdapat penyesuaian terhadap anggaran operasional yang diminta untuk rasionalisasi menyesuaikan pagu anggaran tahun 2024.

Belanja Barang dan Jasa per sub rincian objek per SKPD tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.915.029.008,00	2.529.454.558,89

Belanja Bunga merupakan Belanja Bunga atas utang pinjaman tahun 2024 yang dianggarkan senilai Rp2.915.029.008,00 dan terealisasi senilai Rp2.529.454.558,89. Realisasi ini menurun senilai Rp3.119.942.139,11 dengan persentase 55,23% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp5.649.396.698,00. Perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27. Belanja Bunga TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMN – Jangka Panjang	1.227.429.000,00	878.301.295,89	985.153.243,00	71,56
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Menengah	1.687.600.008,00	1.651.153.263,00	4.664.243.455,00	97,84
Jumlah	2.915.029.008,00	2.529.454.558,89	5.649.396.698,00	86,77

Penjelasan:

- Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja bunga di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya karena bunga pinjaman tergantung dari suku bunga acuan yang sifatnya fluktuatif sehingga Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan pembayaran belanja bunga pinjaman berdasarkan surat tagihan dengan jumlah kewajiban dan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.
- Belanja Bunga dibayarkan berdasarkan:
 - Perjanjian Pinjaman Nomor: SLA-1223/DSMI/2009 Tanggal 24 Maret 2009 tentang Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atas Dana Pinjaman dari *The International Bank For Reconstruction and Development (Loan Agreement* Nomor 4786-IND Tanggal 20 Oktober 2005) dalam Rangka Pembiayaan *Urban Sector Development Reform Project* (USDRP);
 - Perjanjian Pinjaman Nomor 80 tanggal 20 September 2021 antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kota Palangka Raya.

Belanja Bunga per jenis per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.28. Belanja Bunga per jenis per SKPD TA 2024

Belanja Bunga	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	878.301.295,89
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	878.301.295,89



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Bunga	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	878.301.295,89
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	1.651.153.263,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.651.153.263,00
Jumlah	2.529.454.558,89

Pada TA 2024 belanja bunga atas pinjaman daerah yang dibayarkan adalah:

Tabel 5.29. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) – BUMN – Jangka Panjang

Tanggal Pembayaran	Uraian	Nilai Realisasi (Rp)
15/05/2024	Pembayaran Tagihan Bunga Kewajiban Jatuh Tempo Untuk Pinjaman No. SLA-1223/DSMI/2009 Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024	459.815.241,79
25/10/2024	Pembayaran Tagihan Bunga Kewajiban Jatuh Tempo Untuk Pinjaman No. SLA-1223/DSMI/2009 Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024	418.486.054,10
Jumlah		878.301.295,89

Tabel 5.30. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Menengah

Tanggal Pembayaran	Uraian	Nilai Realisasi (Rp)
	Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kota Palangka Raya untuk periode:	
30/01/2024	Januari 2024	249.616.496,00
22/02/2024	Februari 2024	228.815.116,00
20/03/2024	Maret 2024	194.593.495,00
24/04/2024	April 2024	187.212.355,00
21/05/2024	Mei 2024	161.042.877,00
15/07/2024	Juni 2024 dan Denda Keterlambatan Berdasarkan Surat PT SMI No. S384/SMI/DPPPP/DPPU-1/0624 Tanggal 21 Juni 2024	164.684.614,00
22/07/2024	Juli 2024	120.782.142,00
14/08/2024	Agustus 2024	104.006.833,00
23/09/2024	September 2024	83.205.452,00
27/09/2024	Pembayaran Biaya Pengelolaan Ke-4 Sebesar 0,185% Per Tahun dari Jumlah Baki Debet/Outstanding/Terutang untuk Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021	33.727.834,00
22/10/2024	Oktober 2024	60.391.037,00
20/11/2024	November 2024	41.602.692,00
16/12/2024	Desember 2024	21.472.320,00
Jumlah		1.651.153.263,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	68.566.771.687,00	61.498.073.179,00

Belanja Hibah tahun 2024 dianggarkan senilai Rp68.566.771.687,00 dan direalisasikan senilai Rp61.498.073.179,00. Realisasi ini meningkat senilai Rp20.236.973.316,00 dengan persentase peningkatan 49,05% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp41.261.099.863,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.31. Belanja Hibah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.840.000.000,00	32.809.792.600,00	15.831.300.000,00	99,91
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	31.398.611.687,00	24.459.291.753,00	19.066.639.863,00	77,90
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.625.000.000,00	1.564.862.160,00	2.060.000.000,00	96,30
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	1.850.000.000,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.703.160.000,00	2.664.126.666,00	2.453.160.000,00	98,56
Jumlah	68.566.771.687,00	61.498.073.179,00	41.261.099.863,00	89,69

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya meningkatnya bantuan pelaksanaan kegiatan Pilkada (KPU dan Banwaslu);
- Pemberian Hibah Uang kepada Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial didasarkan pada:
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/101/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang Kepada Instansi Vertikal, Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Sanggar Seni dan Budaya Kota Palangka Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/462/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/101/2024 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang Kepada Instansi Vertikal, Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Sanggar Seni dan Budaya Kota Palangka Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/89/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/449/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

188.45/89/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;

- e. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/374/2024 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Barisan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - f. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/479/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - g. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/152/2024 tentang Penetapan Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - h. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 166.45/262/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Kelompok Tani Makmur Sembada Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - i. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 800/1088/Disdik.Um-Peg/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Instansi Vertikal, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
 - j. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 800/3882/Disdik.Um-Peg/XI/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Instansi Vertikal, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024; dan
 - k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan pihak penerima hibah.
3. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada:
- a. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/342/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/515/2019 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 periode Tahun 2019-2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya; dan
 - b. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/332/2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 periode Tahun 2024-2029 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

Bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32. Partai Politik Penerima Hibah TA 2024

Partai Politik	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran Berdasarkan Lampiran SK Wali Kota	Realisasi	%	Realisasi
Partai PKB	181.806.666,00	181.806.666,00	100,00	169.840.000,00
Partai Gerindra	219.558.333,00	219.558.333,00	100,00	213.900.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Partai Politik	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran Berdasarkan Lampiran SK Wali Kota	Realisasi	%	Realisasi
Partai PDI-P	444.713.333,00	444.713.333,00	100,00	502.480.000,00
Partai Golkar	534.365.000,00	534.365.000,00	100,00	403.940.000,00
Partai Nasdem	281.935.000,00	281.935.000,00	100,00	239.460.000,00
Partai Perindo	150.615.000,00	150.615.000,00	100,00	119.140.000,00
Partai PSI	153.816.667,00	153.816.667,00	100,00	130.800.000,00
Partai PAN	226.538.333,00	226.538.333,00	100,00	199.980.000,00
Partai Hanura	176.933.334,00	176.933.334,00	100,00	197.600.000,00
Partai Demokrat	293.845.000,00	293.845.000,00	100,00	276.020.000,00
Jumlah	2.664.126.666,00	2.664.126.666,00	100,00	2.453.160.000,00

Belanja Hibah per jenis per SKPD tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.33. Belanja Hibah TA 2024

Belanja Hibah	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.809.792.600,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.900.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.510.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	749.792.600,00
Sekretariat Daerah	650.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.459.291.753,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	515.395.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.020.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	12.112.616.253,00
Dinas Pendidikan	1.736.280.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.564.862.160,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.364.862.160,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00
Dinas Sosial	150.000.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.664.126.666,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.664.126.666,00
Jumlah	61.498.073.179,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.732.500.000,00	1.595.534.000,00

Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 dianggarkan senilai Rp1.732.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.595.534.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp55.329.750,00 dengan persentase kenaikan 3,59% dari realisasi belanja bantuan sosial tahun 2023 senilai Rp1.540.204.250,00. Perincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.34. Belanja Bantuan Sosial TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.200.000.000,00	1.076.034.000,00	609.977.000,00	89,67
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	7.150.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	332.500.000,00	329.500.000,00	795.500.000,00	99,10
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	97.577.250,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	90,00
Jumlah	1.732.500.000,00	1.595.534.000,00	1.540.204.250,00	92,09

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja bantuan sosial di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya disebabkan karena Pemberian bantuan kepada korban bencana berupa uang seiring dengan kejadian bencana pada tahun 2024;
- Pemberian Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan:
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/422/2024 Tanggal 1 November 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Kebakaran;
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/195/2024 Tanggal 3 April 2024 dan Nomor 188.45/444/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Penerima Bansos Uang Yang Direncanakan Kepada Individu serta PKS Nomor KCU.1021/PKS-310B/V-24 Tanggal 2 Mei 2024;
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/224/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Penerima Bansos Uang Yang Direncanakan kepada lembaga Non Pemerintahan;
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/196/2024 Tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Penerima Bansos Uang Yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dan PKS Nomor KCU.1021/PKS-310A/V-24 tanggal 2 Mei 2024;
 - Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/146/2024 Tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima Bansos Uang Yang Direncanakan kepada Individu dan PKS Nomor KCU.1021/PKS-0207/III-24 tanggal 28 Maret 2024; dan
 - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor 440/143/YANKES/DINKES/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial Berobat Keluar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Bantuan Sosial per jenis per SKPD tahun 2024:

Tabel 5.35. Belanja Bantuan Sosial per jenis per SKPD TA 2024

Belanja Bantuan Sosial	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.076.034.000,00
Dinas Kesehatan	292.634.000,00
Dinas Sosial	783.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	329.500.000,00
Dinas Sosial	329.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
Dinas Sosial	100.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	90.000.000,00
Dinas Sosial	90.000.000,00
Jumlah	1.595.534.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45

Belanja Modal tahun 2024 dianggarkan senilai Rp341.769.840.717,00 dan terealisasi senilai Rp327.997.382.474,45. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp46.653.614.908,45 dengan persentase kenaikan 16,58% dari realisasi belanja modal tahun 2023 senilai Rp281.343.767.566,00. Rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.36. Belanja Modal TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Tanah	2.738.505.000,00	2.620.818.000,00	4.003.383.082,00	95,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.662.824.505,00	48.825.356.209,00	84.884.254.418,00	86,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.551.650.370,00	121.569.959.253,32	111.616.449.607,00	97,61
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.411.660.842,00	154.589.854.012,13	78.792.977.882,00	98,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.200.000,00	252.895.000,00	1.992.109.257,00	99,10
Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	138.500.000,00	54.593.320,00	92,33
Jumlah	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	281.343.767.566,00	95,97

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.738.505.000,00	2.620.818.000,00

Belanja ini merupakan belanja modal tanah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dianggarkan senilai Rp2.738.505.000,00 dan direalisasikan senilai Rp2.620.818.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp1.382.565.082,00 dengan persentase 34,53% dari realisasi tahun 2023



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

senilai Rp4.003.383.082,00. Rincian realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37. Belanja Modal Tanah TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.738.505.000,00	2.620.818.000,00	2.732.536.000,00	95,70
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	1.270.847.082,00	0,00
Jumlah	2.738.505.000,00	2.620.818.000,00	4.003.383.082,00	95,70

Penjelasan:

Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Pada TA 2024 terdapat penganggaran Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berupa Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan kantor Wali Kota Palangka Raya dan kantor DPRD Kota Palangka Raya pada Blok B Kawasan Strategis Lingkaran Dalam di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya; dan
- Pada tahun 2024 tidak terdapat penganggaran Belanja Modal Tanah Persil Lainnya. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat Belanja Modal Tanah Persil Lainnya berupa pembelian tanah untuk pembangunan Sekolah Dasar.

Belanja Modal Tanah per sub rincian objek per SKPD tahun 2024:

Tabel 5.38. Belanja Modal Tanah per sub rincian objek per SKPD TA 2023

Belanja Modal Tanah	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.620.818.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.620.818.000,00
Jumlah	2.620.818.000,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	56.662.824.505,00	48.825.356.209,00

Belanja ini merupakan belanja modal peralatan dan mesin periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dianggarkan senilai Rp56.662.824.505,00 dan direalisasikan senilai Rp48.825.356.209,00. Realisasi ini menurun senilai - Rp36.058.898.209,00 dengan persentase penurunan 42,48 % dari realisasi tahun 2023 senilai Rp84.884.254.418,00. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Alat Besar	3.986.686.000,00	2.882.352.000,00	197.449.000,00	72,30



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Alat Angkutan	7.885.699.650,00	7.367.325.000,00	13.222.371.000,00	93,43
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	77.858.100,00	65.081.200,00	17.770.000,00	83,59
Belanja Modal Alat Pertanian	29.202.000,00	28.024.000,00	1.737.600,00	95,97
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.472.839.740,00	15.842.104.045,00	12.597.907.881,00	96,17
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.009.884.340,00	3.968.675.470,00	3.004.917.000,00	98,97
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.943.363.832,00	2.515.074.554,00	3.507.000.440,00	85,45
Belanja Modal Alat Laboratorium	771.343.900,00	747.850.000,00	2.385.946.991,00	96,95
Belanja Modal Komputer	11.082.850.343,00	10.754.640.950,00	4.956.154.012,00	97,04
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	49.705.800,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	52.947.000,00	52.657.000,00	594.377.000,00	99,45
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.502.678.000,00	1.494.752.100,00	182.690.000,00	99,47
Belanja Modal Peralatan Olahraga	62.471.600,00	62.135.000,00	12.499.300,00	99,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.745.000.000,00	3.004.684.890,00	44.153.728.394,00	38,80
Jumlah	56.662.824.505,00	48.825.356.209,00	84.884.254.418,00	86,17

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja modal peralatan dan mesin di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang baru dianggarkan pada DPA Perubahan sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk melakukan pengadaan, yang mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan;
2. Realisasi belanja modal berkurang karena mempertimbangkan kebutuhan operasional yang lebih diprioritaskan selain belanja modal;
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan pagu dari tahun sebelumnya karena pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada; dan
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD mengalami penurunan yang signifikan diantaranya karena pada tahun 2024 tidak terdapat penganggaran pengadaan alat laboratorium dan alat kedokteran sebagaimana yang telah direalisasikan pada TA 2023.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per sub rincian objek per SKPD tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	124.551.650.370,00	121.569.959.253,32



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja ini merupakan belanja modal gedung dan bangunan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dianggarkan senilai Rp124.551.650.370,00 dengan realisasi senilai Rp121.569.959.253,32. Realisasi ini meningkat senilai Rp9.953.509.646,32 dengan persentase 8,92% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai Rp111.616.449.607,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.40. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Bangunan Gedung	101.993.840.370,00	100.936.087.248,32	102.374.196.182,00	98,96
Belanja Modal Monumen	395.000.000,00	386.000.000,00	380.745.500,00	97,72
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.437.400.000,00	4.352.997.705,00	4.090.513.475,00	98,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.725.410.000,00	15.894.874.300,00	4.770.994.450,00	89,67
Jumlah	124.551.650.370,00	121.569.959.253,32	111.616.449.607,00	97,61

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja modal gedung dan bangunan di TA 2024 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Terjadinya kenaikan pada Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 diantaranya karena terdapat banyak proyek pembangunan pagar untuk sekolah-sekolah di Kota Palangka Raya;
2. Kenaikan signifikan yaitu pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD berupa pembangunan pada gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya dimana pada tahun 2024 dialokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan TA 2023.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.41. Belanja Modal Gedung dan Bangunan per sub rincian objek per SKPD
TA 2024**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	29.703.638.467,97
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	449.325.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	224.526.400,00
Dinas Kesehatan	1.867.240.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	275.971.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	795.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	857.909.870,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.761.278.220,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	690.436.200,00
Dinas Pendidikan	4.090.164.804,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	131.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	836.919.840,97
Dinas Perhubungan	169.174.100,00
Dinas Perikanan	694.025.125,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	198.960.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	94.355.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	443.308.500,00
Dinas Sosial	1.922.000.000,00
Inspektorat	2.490.872.090,00
Kecamatan Bukit Batu	149.831.600,00
Kecamatan Jekan Raya	596.360.850,00
Kecamatan Pahandut	423.897.960,00
Kecamatan Rakumpit	567.600.000,00
Kecamatan Sabangau	495.700.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	493.020.908,00
Sekretariat DPRD	3.984.261.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	106.270.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.270.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	20.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.400.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	8.549.426.396,99
Dinas Pendidikan	149.600.340,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.330.326.056,99
Sekretariat DPRD	69.500.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.881.118.865,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	674.458.340,00
Dinas Pendidikan	4.033.993.525,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	172.667.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	52.060.113.877,00
Dinas Pendidikan	52.060.113.877,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	861.934.900,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	834.639.100,00
Kecamatan Sabangau	27.295.800,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	70.000.000,00
Kecamatan Sabangau	70.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	343.996.506,54
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	343.996.506,54
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	168.243.074,82
Dinas Perikanan	48.895.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	119.348.075,82
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.452.786.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.170.560.000,00
Dinas Tenaga Kerja	59.926.000,00
Kecamatan Jekan Raya	120.000.000,00
Kecamatan Sabangau	102.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	345.834.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	94.800.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	13.500.000,00
Inspektorat	79.864.500,00
Kecamatan Bukit Batu	102.870.000,00
Kecamatan Rakumpit	54.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	976.275.060,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.560.700,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	111.690.260,00
Dinas Perhubungan	148.774.100,00
Dinas Sosial	449.250.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Nilai Realisasi (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja	67.000.000,00
Belanja Modal Taman	1.154.850.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	132.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	797.600.000,00
Dinas Sosial	224.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	79.400.000,00
Dinas Kesehatan	60.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	161.799.600,00
Kecamatan Bukit Batu	161.799.600,00
Belanja Modal Tugu	376.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	376.000.000,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	10.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	76.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.500.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.500.000,00
Belanja Modal Pagar	4.276.497.705,00
Dinas Pendidikan	4.096.528.905,00
Kecamatan Bukit Batu	179.968.800,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	15.894.874.300,00
Dinas Kesehatan	15.894.874.300,00
Jumlah	121.569.959.253,32

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	157.411.660.842,00	154.589.854.012,13

Belanja ini merupakan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dianggarkan senilai Rp157.411.660.842,00 dan direalisasikan senilai Rp154.589.854.012,13. Realisasi ini naik senilai Rp75.796.876.130,13 dengan persentase kenaikan 96,20% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp78.792.977.882,00. Rincian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	120.834.829.061,00	119.885.722.794,16	58.020.890.482,00	99,21
Belanja Modal Bangunan Air	27.829.584.000,00	27.335.274.669,31	13.707.180.872,00	98,22
Belanja Modal Instalasi	4.146.334.281,00	4.127.258.203,00	3.484.962.718,00	99,54
Belanja Modal Jaringan	4.000.913.500,00	2.703.928.273,66	2.607.943.810,00	67,58
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	600.000.000,00	537.670.072,00	972.000.000,00	89,61
Jumlah	157.411.660.842,00	154.589.854.012,13	78.792.977.882,00	98,21



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada tahun 2024 dibandingkan anggaran TA 2023; dan
2. Meningkatnya anggaran Belanja Modal Bangunan Air pada tahun 2024 dibandingkan anggaran TA 2023.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.43. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan Kota	115.180.174.645,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.121.993.496,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40.058.181.149,00
Belanja Modal Jalan Desa	2.121.010.000,00
Kecamatan Bukit Batu	925.210.000,00
Kecamatan Rakumpit	1.195.800.000,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	138.510.260,16
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	138.510.260,16
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.148.746.339,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.148.746.339,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	114.040.000,00
Kecamatan Bukit Batu	74.040.000,00
Kecamatan Sabangau	40.000.000,00
Belanja Modal Jembatan Lainnya	183.241.550,00
Kecamatan Bukit Batu	49.934.550,00
Kecamatan Pahandut	133.307.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	288.990.069,31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89.647.300,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	199.342.769,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	397.000.000,00
Kecamatan Rakumpit	397.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	25.179.984.600,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.875.884.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.095.100.000,00
Kecamatan Jekan Raya	118.000.000,00
Kecamatan Sabangau	91.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.469.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.469.300.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	15.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	15.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.441.227.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.100.700.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	340.527.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	2.671.031.203,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.600.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.347.431.203,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	677.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	677.750.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.999.494.273,66
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.999.494.273,66
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	26.684.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.684.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	537.670.072,00
Dinas Kesehatan	537.670.072,00
Jumlah	154.589.854.012,13

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	255.200.000,00	252.895.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp255.200.000,00 dan terealisasi senilai Rp252.895.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp1.739.214.257,00 dengan persentase menurun 87,31% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2023 senilai Rp1.992.109.257,00. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	794.400.000,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	255.200.000,00	252.895.000,00	3.000.000,00	99,10
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	27.142.857,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	1.167.566.400,00	0,00
Jumlah	255.200.000,00	252.895.000,00	1.992.109.257,00	99,10

Penjelasan:

Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja modal aset tetap lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan, Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana yang dianggarkan pada tahun 2023.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.45. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Musik	213.995.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.995.000,00
Inspektorat	142.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	24.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	24.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	14.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan	14.000.000,00
Belanja Modal Barang Kerajinan	12.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	12.900.000,00
Dinas Pendidikan	12.900.000,00
Jumlah	252.895.000,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	150.000.000,00	138.500.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 terealisasi senilai Rp138.500.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp83.906.680,00 dengan persentase naik 153,69% dari realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2023 senilai Rp54.593.320,00. Rincian realisasi belanja modal aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.46. Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	138.500.000,00	54.593.320,00	92,33
Jumlah	150.000.000,00	138.500.000,00	54.593.320,00	92,33

Penjelasan:

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja modal aset lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 diantaranya karena terdapat pembuatan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM) dan Aplikasi Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Belanja Modal Aset Lainnya per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.47. Belanja Modal Aset Lainnya per jenis per SKPD TA 2024

Belanja Modal Aset Lainnya	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	138.500.000,00
Dinas Pendidikan	138.500.000,00
Jumlah	138.500.000,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00

Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp2.773.825.241,00 dan terealisasi senilai Rp1.994.086.300,00. Realisasi belanja tak terduga mengalami kenaikan senilai Rp1.063.628.120,00 dengan persentase naik senilai 114,31% dibandingkan dengan belanja tak terduga tahun 2023 yang terealisasi senilai Rp930.458.180,00. Adapun penjelasan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

1. Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan;
2. Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka Operasi Tanggap Darurat Bencana di Wilayah Kota Palangka Raya. Pengeluaran belanja tersebut didasarkan pada:
 - a. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/116/2024 tanggal 10 Maret 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
 - b. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/133/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024; dan
 - c. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/472/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Pembayaran atas Belanja Tidak Terduga tahun 2024 senilai Rp1.994.086.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48. Belanja Tidak Terduga TA 2024

SKPD	Tanggal	Uraian	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27 Maret 2024	Belanja Tidak Terduga Operasi Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya berdasarkan SK Wali Kota Palangka Raya 188.45/133/2024 tanggal 18 Maret 2024	860.746.800,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27 Desember 2024	Belanja Tidak Terduga Operasi Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya	1.133.339.500,00
Jumlah			Rp1.994.086.300,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	246.689.756,00	245.000.000,00

Pada tahun 2024 Belanja Transfer berupa belanja bantuan keuangan dianggarkan senilai Rp246.689.756,00 dan terealisasi senilai Rp245.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2023 senilai Rp245.000.000,00 karena dianggarkan sama seperti tahun sebelumnya. Rincian realisasi belanja transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49. Belanja Transfer TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	246.689.756,00	245.000.000,00	245.000.000,00	99,32
Jumlah	246.689.756,00	245.000.000,00	245.000.000,00	99,32



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Penjelasan:

1. Sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena menyesuaikan dengan ketentuan Belanja Bantuan Keuangan yang berlaku;
2. Transfer Bantuan Keuangan tersebut merupakan pembayaran sewa transponder satelit tahun anggaran 2024 kontribusi Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/19/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2024.

Belanja Transfer per jenis per sub rincian objek per SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.50. Belanja Transfer per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Belanja Bantuan Keuangan	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	245.000.000,00
Jumlah	245.000.000,00

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menganggarkan Pembiayaan senilai Rp85.929.003.767,00 dan terealisasi senilai Rp91.200.976.657,14. Realisasi ini menurun senilai Rp133.839.347.895,66 dengan persentase penurunan 59,47% dari realisasi pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp225.040.324.552,80. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51. Pembiayaan TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Penerimaan Pembiayaan	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	291.625.078.331,80	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66	66.584.753.779,00	92,66
Jumlah	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14	225.040.324.552,80	106,14

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80

Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 dianggarkan senilai Rp157.785.715.108,00 dan terealisasi senilai Rp157.785.715.107,80. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp133.839.363.224,00 dengan persentase penurunan senilai 45,89% dari



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 senilai Rp291.635.828.331,00.
Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.52. Penerimaan Pembiayaan TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	291.625.078.331,80	100,00
Jumlah	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	291.625.078.331,80	100,00

Penggunaan SILPA pada tahun 2024 dianggarkan senilai Rp157.785.715.108,00 dan terealisasi senilai Rp157.785.715.107,80. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp133.839.363.224,00 dengan persentase penurunan senilai 45,89% dari realisasi Penggunaan SILPA tahun 2023 senilai Rp291.625.078.331,80.

Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.53. Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	-10.750.000,00	0,00
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	291.635.828.331,80	100,00
Jumlah	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	291.625.078.331,80	100,00

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2024 dianggarkan senilai Rp71.856.711.341,00 dan terealisasi senilai Rp66.584.738.450,66. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp15.328,34 dengan persentase penurunan senilai 0,00% dari realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 senilai Rp66.584.753.779,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.54. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		Tahun 2024	Tahun 2023	
Penyertaan Modal Daerah	15.777.500.000,00	10.507.500.000,00	10.507.500.000,00	66,60
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	56.079.211.341,00	56.077.238.450,66	56.077.253.779,00	100,00
Jumlah	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66	66.584.753.779,00	92,66



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	15.777.500.000,00	10.507.500.000,00

Penyertaan Modal Daerah tahun 2024 dianggarkan senilai Rp15.777.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp10.507.500.000,00. Realisasi ini mengalami tidak mengalami perubahan dibandingkan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun 2023 yaitu senilai Rp10.507.500.000,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.55. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		2024	2023	
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	15.777.500.000,00	10.507.500.000,00	10.507.500.000,00	66,60
Jumlah	15.777.500.000,00	10.507.500.000,00	10.507.500.000,00	66,60

Penjelasan:

1. Pemerintah Kota Palangka Raya pada TA 2024 telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp10.507.500.000,00 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemko Palangka Raya kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Berdasarkan Akta Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT. Bank Kalteng diungkapkan Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan pemegang saham perseroan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00.
2. Adapun landasan hukum penyertaan modal pada BUMD lainnya yaitu:
 - a. kepada Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemko Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemko Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang; dan
 - c. kepada Jamkrida berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Akta Notaris Vera Octarina, S.H., M.Kn Nomor 1 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jamkrida Kalteng Tahun 2023 diungkapkan Pemerintah Kota Palangka Raya memegang dan memiliki 300 (tiga ratus) saham Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sebanyak 3,47% porsi kepemilikan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	56.079.211.341,00	56.077.238.450,66

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2024 dianggarkan senilai Rp56.079.211.341,00 dan terealisasi senilai Rp56.077.238.450,66. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp15.328,34 dengan persentase penurunan senilai 0,00% dari realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2023 senilai Rp56.077.253.779,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.56. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)		%
		2024	2023	
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	1.385.000.000,00	1.383.423.066,66	1.383.423.067,00	99,89
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	54.694.211.341,00	54.693.815.384,00	54.693.830.712,00	100,00
Jumlah	56.079.211.341,00	56.077.238.450,66	56.077.253.779,00	100,00

Penjelasan:

Pemerintah Kota Palangka Raya pada TA 2024 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari:

1. Pemerintah Pusat yaitu *The International Bank for Reconstruction and Development* – USDRP sebesar Rp1.383.423.066,66 dari total nilai pinjaman sebesar Rp20.751.346.000,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp5.533.692.266,74. Pembayaran Tagihan Pokok Kewajiban Jatuh Tempo Untuk Pinjaman No. SLA-1223/DSMI/2009 Pemerintah Kota Palangka Raya dibayarkan dua kali setahun dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 20 Mei dan 20 November; dan
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) - Program PEN sebesar Rp54.693.815.384,00 dari total nilai pinjaman sebesar Rp127.618.923.000,00. Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kota Palangka Raya dibayarkan setiap bulan sekali selama dua belas bulan atau setahun. Pada tahun 2024 Pinjaman Daerah dari LKBB telah lunas sehingga nilai Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah yang tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah senilai Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.57. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024

Uraian	Nilai Realisasi (Rp)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) - Program PEN	54.693.815.384,00
Pembayaran Pokok Utang	54.693.815.384,00
The International Bank for Reconstruction and Development - USDRP	1.383.423.066,66
Pembayaran Pokok Utang	1.383.423.066,66
Jumlah	56.077.238.450,66

5.1.4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA/(SiKPA)

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA/(SiKPA)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	53.030.623.634,56

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran TA 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.58. SiLPA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
SiLPA APBD	
- Tidak Tercapainya Target Penerimaan PAD	-34.157.383.366,91
- Tidak Tercapainya Penerimaan Pendapatan Transfer	-13.643.063.052,00
- Pelampauan Target Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	1.692.453.561,00
- Penghematan Belanja	93.866.643.602,33
- Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pembiayaan	-0,20
- Tidak Terealisasinya Pengeluaran Pembiayaan Berupa Penyertaan Modal Daerah	5.270.000.000,00
- Tidak Terealisasinya Pengeluaran Pembiayaan Berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.972.890,34
Jumlah	53.030.623.634,56

Adapun perhitungan SiLPA berdasarkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59. Perhitungan SiLPA TA 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Daerah	1.464.011.748.708,00	1.417.903.755.850,09	96,85	1.259.296.045.300,85
Pendapatan Asli Daerah	233.763.792.010,00	199.606.408.643,09	85,39	188.380.645.282,85
Pendapatan Transfer	1.218.863.288.858,00	1.205.220.225.806,00	98,88	1.059.402.458.308,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.384.667.840,00	13.077.121.401,00	114,87	11.512.941.710,00
Belanja Daerah	1.549.940.752.475,00	1.456.074.109.672,67	93,94	1.326.550.654.745,85
Belanja Operasi	1.205.150.396.761,00	1.125.837.640.098,22	93,42	1.044.031.428.999,85
Belanja Modal	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	95,97	281.343.767.566,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	2.773.825.241,00	1.994.086.300,00	71,89	930.458.180,00
Belanja Transfer	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32	245.000.000,00
Surplus/Defisit	-85.929.003.767,00	-38.170.353.022,58	44,42	-67.254.609.445,00
Pembiayaan Daerah	85.929.003.767,00	91.200.976.657,14	106,14	225.040.324.552,80
Penerimaan Pembiayaan	157.785.715.108,00	157.785.715.107,80	100,00	291.625.078.331,80
Pengeluaran Pembiayaan	71.856.711.341,00	66.584.738.450,66	92,66	66.584.753.779,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	53.030.623.634,56	0,00	157.785.715.107,80

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp53.030.623.634,56 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.60. Rincian SiLPA Berdasarkan Penggunaan TA 2024

No.	Uraian	Nilai
	Dana SiLPA Terikat:	33.117.498.255,05
1.	Dana pada Kas di BLUD	10.181.678.669,09
2.	Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	192.969.847,86
3.	Dana pada Kas Lainnya berupa Dana Bansos Pendidikan	217.511,00
4.	Dana pada Kas Dana BOSP	1.199.719.970,10
5.	Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	1.326.533.207,00
6.	Dana pada Kas di Kas Daerah yang didalamnya memuat dana:	
a.	Sisa Dana Transfer Pusat – Dana Bagi Hasil (DBH)	2.416.984.852,00
b.	Sisa Dana Transfer Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan	6.516.842.057,00
c.	Sisa Dana Transfer Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan	1.123.184.420,00
d.	Sisa Dana Transfer Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum	931.991.674,00
e.	Hibah Air Minum	4.472.133.959,00
f.	Sisa Dana Transfer Pusat – Insentif Fiskal	71.251.831,00
g.	Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non Fisik	2.430.964.381,00
h.	Sisa Dana Transfer Pusat – Dana Kelurahan	210.176.737,00
i.	Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik	2.042.849.139,00
	Dana SiLPA Non-Terikat	19.913.125.379,51
1.	Dana pada Kas di Kas Daerah yang di dalamnya memuat dana Pelampauan Pendapatan dan Sisa Dana Transfer Non-Terikat	19.898.897.843,75
2.	Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	13.743.035,76
3.	Dana pada Kas Lainnya berupa Kas Transitoris	484.500,00
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2024	53.030.623.634,56

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.61. Rincian SILPA Berdasarkan Keberadaan TA 2024

No.	Uraian	Nilai	SKPD Pengelola
1.	Kas di Kas Daerah	40.115.276.893,75	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	13.000.000,00	Sekretariat Daerah
		60.000,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
		125.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		230.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		328.035,76	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
3.	Kas di BLUD	57.641.131,00	Puskesmas Pahandut
		10.124.037.538,09	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya
4.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	192.969.847,86	Dinas Kesehatan
5.	Kas Lainnya	217.511,00	Dinas Pendidikan
		484.500,00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
6.	Kas Dana BOSP	1.199.719.970,10	Dinas Pendidikan
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.326.533.207,00	Dinas Kesehatan
	Jumlah	53.030.623.634,56	

Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-pos LAK pada Poin 5.5. dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-pos LPSAL pada Poin 5.2.

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan SAL	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80

Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kota Palangka Raya senilai Rp53.030.623.634,56 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.62. Perhitungan LPSAL TA 2024

	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	157.785.715.107,80	291.635.828.331,80
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	157.785.715.107,80	291.625.078.331,80
3	Sub Total (1 – 2)	0,00	10.750.000,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80
5	Sub Total (3 + 4)	53.030.623.634,56	157.796.465.107,80



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	-10.750.000,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

5.3. NERACA

Neraca disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Posisi Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 Pemerintah Kota Palangka Raya secara umum sebagai berikut:

Tabel 5.63. Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi (Rp)		Bertambah/ Kurang (Rp)	%
	2024	2023		
Aset	4.343.188.026.066,94	4.370.090.643.175,89	-26.902.617.108,95	-0,62
Kewajiban	7.498.421.031,82	62.816.461.165,93	-55.318.040.134,11	-88,06
Ekuitas	4.335.689.605.035,12	4.307.274.182.009,96	28.415.423.025,16	0,66

Dalam Neraca tahun 2024 terdapat penurunan yang cukup signifikan, dikarenakan mulai tahun 2015 diberlakukan akrual basis. Dalam akrual basis diperhitungkan nilai penyusutan aset dan penyisihan piutang, beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka.

5.3.1. Aset

Aset	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.343.188.026.066,94	4.370.090.643.175,89

Jumlah Aset mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp26.902.617.108,95 menjadi Rp4.343.188.026.066,94 pada tahun anggaran 2024 yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp208.429.986.148,53, Investasi Jangka Panjang senilai Rp99.755.448.451,41, Aset Tetap Netto senilai Rp3.883.766.735.504,45 dan Aset Lainnya Netto senilai Rp151.235.855.962,55.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	208.429.986.148,53	279.917.025.982,16

Diklasifikasikan ke dalam aset lancar yaitu aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah, Kas di Bendahara BOSP, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOK Puskesmas, piutang pajak, piutang retribusi, Piutang Lain-lain



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

PAD yang Sah, Piutang Transfer, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban dibayar dimuka, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan persediaan.

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	40.115.276.893,75	109.093.416.112,78

Nomor Rekening Kas Daerah 1000-101-170757 di Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Posisi saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp40.115.276.893,75. Pada tahun 2024 terdapat kesalahan pemindahbukuan oleh Bank Kalteng yaitu kesalahan transfer senilai Rp377.000,00 dan Rp1.000.000,00 dengan total senilai Rp1.377.000,00 ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya yang seharusnya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun sampai 31 Desember 2024 saldo senilai Rp1.377.000,00 belum dikoreksi, sehingga diakui sebagai Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dan akan disetorkan ke RKUD Provinsi melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	13.743.035,76	15.682.278,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.743.035,76 merupakan saldo kas yang berada pada rekening bank operasional penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	13.000.000,00	Penerimaan yang belum dipindahbukukan dari rekening 159-00-1139149-6 pada Bank Mandiri
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	60.000,00	Penerimaan yang belum dipindahbukukan dari rekening 1000102000912 pada Bank Kalteng
3.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	125.000,00	Kurang setor penerimaan karena terpotong biaya administrasi bank dari rekening 159-00-1137268-6 pada Bank Mandiri
4.	Dinas Lingkungan Hidup	230.000,00	Kurang setor penerimaan karena terpotong biaya administrasi bank dan penerimaan yang belum dipindahbukukan dari rekening 159-00-1137273-6 pada Bank Mandiri
5.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	328.035,76	Pengembalian atas potongan pajak dan biaya administrasi bank pada rekening operasional penerimaan TA 2024 pada Bank Mandiri
	Jumlah	13.743.035,76	

Sampai dengan 31 Desember 2024 penerimaan tersebut belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp15.682.278,00 sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2024.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di BLUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	10.181.678.669,09	43.582.817.213,14

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp10.181.678.669,09 terdiri dari saldo kas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Palangka Raya senilai Rp10.124.037.538,09 dan pada BLUD UPT. Puskesmas Pahandut senilai Rp57.641.131,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.65. Dana BLUD

No.	BLUD	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1.	Puskesmas Pahandut	34.539.892,00	2.737.747.508,00	2.714.646.269,00	57.641.131,00
2.	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya	43.548.277.321,14	5.953.113.760,05	39.377.353.543,10	10.124.037.538,09
Jumlah		43.582.817.213,14	8.690.861.268,05	42.091.999.812,10	10.181.678.669,09

Terdapat perbedaan nilai signifikan antara pendapatan dan belanja pada Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya karena penggunaan SiLPA BLUD Tahun Sebelumnya yang dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang diperlukan pada TA 2024.

5.3.1.1.4.1. Kas di BLUD Puskesmas Pahandut

Kas di BLUD Puskesmas Pahandut	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	57.641.131,00	34.539.892,00

BLUD UPT Puskesmas Pahandut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya. Saldo Kas di BLUD Puskesmas Pahandut per 31 Desember 2024 senilai Rp57.641.131,00 berupa rekening giro pada Bank Kalteng nomor rekening 1000102001006 dengan nama BLUD UPT Puskesmas Pahandut.

Adapun rincian atas pendapatan dan belanja BLUD UPT Puskesmas Pahandut 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.66. Rincian atas Saldo BLUD UPT Puskesmas Pahandut per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
I.	Saldo Awal	34.539.892,00	133.123.825,00
II.	Pendapatan	2.737.747.508,00	2.705.589.005,00
1.	Jasa Layanan	2.729.429.474,00	452.380.100,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.	Dana Kapitasi JKN	0,00	2.253.208.905,00
3.	Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	7.200.000,00	0,00
4.	Jasa Giro	1.118.034,00	0,00
III.	Belanja Operasi BLUD	2.714.646.269,00	2.804.172.938,00
1.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.746.269,00	2.722.971.438,00
2.	Belanja Modal	13.900.000,00	81.201.500,00
Saldo per 31 Desember		57.641.131,00	34.539.892,00

5.3.1.1.4.2. Kas di BLUD RSUD

Kas di BLUD RSUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	10.124.037.538,09	43.548.277.321,14

BLUD RSUD Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya. Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2024 senilai Rp10.124.037.538,09 terdiri dari saldo kas tunai pada bendahara penerimaan BLUD senilai Rp422.050,00 dan berupa rekening giro senilai Rp10.123.615.488,09. Saldo rekening giro pada masing-masing rekening adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67. Rincian Saldo Rekening Giro BLUD RSUD per 31 Desember 2024

No	Nama Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1.	BLUD RSUD Kota Palangka Raya	Bank Kalteng	1000102000752	10.123.615.425,09
2.	RSUD Palangka Raya	Bank Kalteng	1000102002421	0,00
3.	BLU Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya	Bank Mandiri	1590066662221	63,00
Jumlah				10.123.615.488,09

Kas di BLUD RSUD senilai Rp10.124.037.538,09 per 31 Desember 2024 dengan rincian atas pendapatan dan belanja BLUD RSUD Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel 5.68. Rincian Saldo BLUD RSUD Kota Palangka Raya 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
I	Saldo Awal	43.548.277.321,14	151.917.957.023,14
II	Pendapatan	5.953.113.760,05	4.056.518.803,00
1.	Jasa Layanan	5.219.294.931,05	729.739.738,00
2.	Klaim INA/CBGS	0,00	2.894.334.965,00
3.	Klaim COVID-19	0,00	32.675.500,00
4.	Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	234.689.757,00	29.865.000,00
5.	SWAB Mou	0,00	348.903.600,00
6.	Klaim Jasa Raharja	0,00	21.000.000,00
7.	Jasa Giro	499.129.072,00	0,00
III	Belanja Operasi BLUD	39.377.353.543,10	112.426.198.505,00
1.	Belanja Pegawai	198.600.000,00	289.320.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	19.755.424.281,10	61.153.790.761,00
3.	Belanja Modal	19.423.329.262,00	50.983.087.744,00
Jumlah (I+II-III)		10.124.037.538,09	43.548.277.321,14



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.1.5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	981.786.363,10

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2023 pada Dinas Pendidikan senilai Rp981.786.363,10 direklasifikasi ke akun Kas Dana BOSP karena menyesuaikan perubahan nomenklatur akun Dana BOS menjadi Dana BOSP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Sehingga saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 bersaldo Rp0,00.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	192.969.847,86	564.433.524,78

Saldo Kas di Bendahara FKTP pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 senilai Rp192.969.847,86 terdiri dari saldo kas dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp189.145.547,86 dan saldo kas dana Prolanis pada FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD senilai Rp3.824.300,00. Dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.6.1. Kas Dana JKN

Kas Dana JKN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	189.145.547,86	561.380.324,78

Kas dana JKN per 31 Desember 2024 senilai Rp189.145.547,86 adalah saldo kas Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.69. Dana JKN

NO.	PUSKESMAS	SALDO 1 Jan 2024 (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO 31 Des 2024 (Rp)
1.	Panarung	15.776.877,00	1.331.657.204,00	1.328.871.845,00	18.562.236,00
2.	Menteng	165.789.200,35	1.835.190.733,00	1.974.166.916,00	26.813.017,35
3.	Bukit Hindu	54.220.401,00	1.552.751.902,00	1.564.796.385,00	42.175.918,00
4.	Kayon	71.050,39	1.847.316.953,00	1.843.116.341,00	4.271.662,39
5.	Jekan Raya	86.480.246,00	742.307.254,00	828.787.500,00	-
6.	Tangkiling	49.208.756,99	922.701.816,00	968.876.083,92	3.034.489,07
7.	Rakumpit	35.447.908,15	184.118.176,00	182.547.057,00	37.019.027,15
8.	Kereng Bangkirai	50.451.440,00	829.594.306,00	880.045.746,00	-
9.	Kalampangan	61.939.140,90	463.420.692,00	471.520.559,00	53.839.273,90
10.	Marina Permai	41.995.304,00	559.910.070,00	598.475.450,00	3.429.924,00
Jumlah		561.380.324,78	10.268.969.106,00	10.641.203.882,92	189.145.547,86

5.3.1.1.6.2. Kas Dana Prolanis

Kas Dana Prolanis	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.824.300,00	3.053.200,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kas Dana Prolanis senilai Rp3.824.300,00 adalah saldo kas Prolanis Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD per 31 Desember 2024. Prolanis adalah program untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan, yang mengidap penyakit kronis dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.70. Dana Prolanis

NO.	PUSKESMAS	SALDO 1 JAN 2024 (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO 31 DES 2024 (Rp)
1.	Panarung	0,00	6.669.500,00	6.669.500,00	0,00
2.	Menteng	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bukit Hindu	0,00	13.102.600,00	13.102.600,00	0,00
4.	Kayon	0,00	14.005.500,00	14.005.500,00	0,00
5.	Jekan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tangkiling	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00	0,00
7.	Rakumpit	0,00	892.100,00	892.100,00	0,00
8.	Kereng Bangkirai	3.047.100,00	3.165.300,00	2.394.200,00	3.818.200,00
9.	Kalampangan	6.100,00	10.769.400,00	10.769.400,00	6.100,00
10.	Marina Permai	0,00	1.035.100,00	1.035.100,00	0,00
Jumlah		3.053.200,00	53.925.000,00	53.153.900,00	3.824.300,00

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	702.011,00	3.547.579.616,00

Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp702.011,00 merupakan saldo Kas Dana Bansos Pendidikan pada Dinas Pendidikan senilai Rp217.511,00 dan Kas Transitoris pada Bank Kalteng senilai Rp484.500,00. Pada saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 terdapat saldo Dana BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.547.362.105,00. Pada tahun 2024 saldo Kas Dana BOK Puskesmas tersebut direklasifikasi ke akun Kas Dana BOK Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Saldo Kas Lainnya berupa Dana Bansos dari Dana Bantuan Tunai yang telah ada peruntukannya (*Block Grant*) senilai Rp217.511,00. Atas hal tersebut, belum ada tindak lanjut, sehingga masih dicatat sebagai Kas Lainnya sampai dengan tahun 2024 yang terdiri dari:

1. SMAN 2 Palangka Raya digunakan untuk ruang kelas baru, jumlah dana yang tersisa senilai Rp134.000,00;
2. SMAN 6 Palangka Raya digunakan untuk laboratorium Komputer, jumlah dana yang tersisa senilai Rp280,00;
3. SMKN 2 Palangka Raya digunakan untuk ruang kelas baru, jumlah dana yang tersisa senilai Rp1.641,00; dan
4. SMKN 2 Palangka Raya digunakan untuk pengembangan *teaching factory*, jumlah dana yang tersisa senilai Rp81.590,00.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.71. Dana Bansos

No.	Penerima Dana Bansos	Saldo 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1.	SMAN 2 Palangka Raya	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
2.	SMAN 6 Palangka Raya	280,00	0,00	0,00	280,00
3.	SMKN 2 Palangka Raya	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00
4.	SMKN 2 Palangka Raya	81.590,00	0,00	0,00	81.590,00
Jumlah		217.511,00	0,00	0,00	217.511,00

Saldo Kas Lainnya berupa kas transitoris senilai Rp484.500,00 merupakan kesalahan buku oleh pihak Bank Kalteng dalam membukukan penerimaan yang seharusnya disetorkan ke RKUD sejumlah Rp483.500,00 (Rp371.000,00 dan Rp112.500,00) serta pengeluaran yang pemindahbukuannya melebihi nilai dokumen SP2D senilai Rp1.000,00. Atas kesalahan buku tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan oleh Bank Kalteng.

5.3.1.1.8. Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.199.719.970,10	0,00

Saldo kas dana BOSP per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.199.719.970,10. Saldo awal Kas Dana BOSP per 1 Januari 2024 senilai Rp981.786.363,10 merupakan reklasifikasi dari saldo akun Kas Dana BOS per 31 Desember 2023. Saldo Kas Dana BOSP terdiri dari dana BOS SDN, SMPN, SMAN, SMKN, dan SLBN. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.72. Kas Dana BOSP

No.	Penerima Dana BOS dan BOP	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1.	SDN BOS Reguler	134.238.743,00	17.239.060.038,00	17.080.426.621,00	292.872.160,00
2.	SDN BOS Kinerja	0,00	657.500.000,00	657.500.000,00	0,00
3.	SMPN BOS Reguler	11.101.512,00	8.960.098.488,00	8.958.645.506,00	12.554.494,00
4.	SMPN BOS Kinerja	0,00	340.000.000,00	321.155.000,00	18.845.000,00
5.	BOS SMAN, SMKN, dan SLBN	836.446.108,10	0,00	0,00	836.446.108,10
6.	BOP PAUD TK Negeri Reguler	0,00	204.692.208,00	200.690.000,00	4.002.208,00
7.	BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler	0,00	242.090.000,00	242.090.000,00	0,00
8.	Hibah Pembangunan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Jumlah		981.786.363,10	27.020.940.734,00	26.803.007.127,00	1.199.719.970,10

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 900/61/KEUDA/2018, tanggal 6 Januari 2018, hal: Pemberitahuan Tindak Lanjut penyelesaian P3D. Bahwa saldo awal di luar SDN, SMPN 1 Januari 2017 masih harus tetap dicatat di Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah,



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani di tahun 2016.

Rincian Dana BOSP per penerima dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.8.1. Kas Dana BOS Reguler SDN

Kas Dana BOS Reguler SDN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	292.872.160,00	134.238.743,00

Saldo kas dana BOS Reguler SDN per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp292.872.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73. Dana BOS Reguler SDN

No.	Penerima Dana BOS	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1	SDN 1 PALANGKA	14.271.639,00	0,00	147.708.361,00	161.880.000,00	100.000,00
2	SDN 2 PALANGKA	10.364,00	0,00	299.390.000,00	299.298.000,00	102.364,00
3	SDN 3 PALANGKA	10.000,00	0,00	141.040.000,00	141.050.000,00	0,00
4	SDN 4 PALANGKA	0,00	0,00	158.340.000,00	158.340.000,00	0,00
5	SDN 5 PALANGKA	0,00	0,00	101.920.000,00	101.920.000,00	0,00
6	SDN 6 PALANGKA	1.469.411,00	1.200.000,00	288.820.589,00	290.202.800,00	1.287.200,00
7	SDN 7 PALANGKA	5.900,00	0,00	134.674.100,00	134.680.000,00	0,00
8	SDN 8 PALANGKA	0,00	0,00	92.820.000,00	92.820.000,00	0,00
9	SDN 9 PALANGKA	7.039.300,00	0,00	169.500.700,00	151.401.916,00	25.138.084,00
10	SDN 10 PALANGKA	0,00	0,00	142.870.000,00	142.870.000,00	0,00
11	SDN 11 PALANGKA	583.283,00	0,00	160.486.717,00	160.703.182,00	366.818,00
12	SDN 12 PALANGKA	145.000,00	0,00	50.815.000,00	50.960.000,00	0,00
13	SDN 13 PALANGKA	0,00	0,00	162.890.000,00	162.639.800,00	250.200,00
14	SDN 1 MENTENG	0,00	0,00	291.200.000,00	291.200.000,00	0,00
15	SDN 2 MENTENG	68.985,00	0,00	296.593.270,00	296.662.255,00	0,00
16	SDN 3 MENTENG	0,00	0,00	86.450.000,00	86.450.000,00	0,00
17	SDN 4 MENTENG	440.945,00	0,00	512.799.055,00	513.214.915,00	25.085,00
18	SDN 5 MENTENG	1.020.934,00	0,00	414.849.066,00	412.156.157,00	3.713.843,00
19	SDN 6 MENTENG	0,00	0,00	309.400.000,00	309.400.000,00	0,00
20	SDN 7 MENTENG	17.000,00	0,00	250.233.000,00	250.250.000,00	0,00
21	SDN 8 MENTENG	0,00	74.462.088,00	499.590.000,00	385.506.638,00	188.545.450,00
22	SDN 9 MENTENG	0,00	0,00	277.550.000,00	277.550.000,00	0,00
23	SDN PERCOBAAN	68.584,00	6.547.195,00	615.091.416,00	615.070.200,00	6.636.995,00
24	SDN 1 BUKIT TUNGGAL	67.010,00	0,00	402.152.990,00	402.220.000,00	0,00
25	SDN 2 BUKIT TUNGGAL	0,00	0,00	197.470.000,00	197.470.000,00	0,00
26	SDN 3 BUKIT TUNGGAL	0,00	0,00	333.970.000,00	333.970.000,00	0,00
27	SDN 4 BUKIT TUNGGAL	0,00	0,00	346.710.000,00	346.710.000,00	0,00
28	SDN 5 BUKIT TUNGGAL	0,00	0,00	457.730.000,00	457.711.400,00	18.600,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Penerima Dana BOS	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
29	SDN 6 BUKIT TUNGGAL	9.117.672,00	0,00	468.511.984,00	477.236.047,00	393.609,00
30	SDN 7 BUKIT TUNGGAL	138.484,00	0,00	392.981.516,00	393.120.000,00	0,00
31	SDN 8 BUKIT TUNGGAL	699,00	0,00	196.560.000,00	196.560.699,00	0,00
32	SDN 1 PETUK KATIMPUN	0,00	0,00	44.590.000,00	44.516.774,00	73.226,00
33	SDN 2 PETUK KATIMPUN	582.041,00	0,00	155.937.959,00	156.520.000,00	0,00
34	SDN 3 PETUK KATIMPUN	170.000,00	0,00	188.310.000,00	188.480.000,00	0,00
35	SDN 1 PANARUNG	879.480,00	0,00	300.330.520,00	299.740.066,00	1.469.934,00
36	SDN 2 PANARUNG	0,00	0,00	119.210.000,00	119.210.000,00	0,00
37	SDN 3 PANARUNG	0,00	0,00	156.520.000,00	156.520.000,00	0,00
38	SDN 4 PANARUNG	0,00	0,00	190.190.000,00	190.190.000,00	0,00
39	SDN 5 PANARUNG	0,00	0,00	248.430.000,00	248.430.000,00	0,00
40	SDN 6 PANARUNG	0,00	0,00	310.310.000,00	310.310.000,00	0,00
41	SDN 7 PANARUNG	0,00	0,00	211.120.000,00	211.120.000,00	0,00
42	SDN 1 LANGKAI	0,00	0,00	199.290.000,00	199.203.300,00	86.700,00
43	SDN 3 LANGKAI	23.136,00	0,00	262.966.864,00	262.990.000,00	0,00
44	SDN 5 LANGKAI	0,00	0,00	55.510.000,00	55.510.000,00	0,00
45	SDN 6 LANGKAI	0,00	0,00	214.760.000,00	214.760.000,00	0,00
46	SDN 7 LANGKAI	0,00	0,00	106.470.000,00	106.470.000,00	0,00
47	SDN 8 LANGKAI	143.200,00	0,00	204.606.800,00	198.550.456,00	6.199.544,00
48	SDN 9 LANGKAI	249.867,00	0,00	76.190.133,00	76.292.016,00	147.984,00
49	SDN 10 LANGKAI	69.060,00	0,00	109.130.940,00	109.200.000,00	0,00
50	SDN 11 LANGKAI	4.936.519,00	0,00	477.363.481,00	452.071.271,00	30.228.729,00
51	SDN 12 LANGKAI	187.830,00	0,00	331.962.170,00	332.150.000,00	0,00
52	SDN 1 PAHANDUT	1.014.000,00	0,00	186.446.000,00	187.460.000,00	0,00
53	SDN 2 PAHANDUT	0,00	0,00	124.670.000,00	124.640.000,00	30.000,00
54	SDN 3 PAHANDUT	243.900,00	0,00	114.416.100,00	114.660.000,00	0,00
55	SDN 4 PAHANDUT	849.746,00	0,00	45.718.628,00	45.836.200,00	732.174,00
56	SDN 5 PAHANDUT	447.524,00	0,00	60.522.476,00	60.827.750,00	142.250,00
57	SDN 6 PAHANDUT	563.036,00	0,00	62.226.964,00	62.790.000,00	0,00
58	SDN 7 PAHANDUT	0,00	0,00	228.410.000,00	228.410.000,00	0,00
59	SDN 8 PAHANDUT	10.232,00	0,00	93.719.768,00	93.730.000,00	0,00
60	SDN 1 PAHANDUT SEBERANG	0,00	0,00	153.790.000,00	153.790.000,00	0,00
61	SDN 1 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00
62	SDN 3 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	135.590.000,00	135.590.000,00	0,00
63	SDN 1 TUMBANG RUNGAN	12.200,00	0,00	86.437.800,00	86.450.000,00	0,00
64	SDN 1 KERENG BANGKIRAI	0,00	9.582.000,00	296.660.000,00	296.660.000,00	9.582.000,00
65	SDN 2 KERENG BANGKIRAI	761,00	13.332.000,00	246.609.239,00	246.610.000,00	13.332.000,00
66	SDN 3 KERENG BANGKIRAI	0,00	0,00	288.470.000,00	288.191.800,00	278.200,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Penerima Dana BOS	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
67	SDN 1 KALAMPANGAN	0,00	0,00	250.250.000,00	250.250.000,00	0,00
68	SDN 1 DANAU TUNDAI	0,00	0,00	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00
69	SDN 1 BERENG BENGKEL	0,00	0,00	99.190.000,00	99.190.000,00	0,00
70	SDN 1 SABARU	79.149.351,00	0,00	410.753.799,00	488.935.439,00	967.711,00
71	SDN 1 KAMELOH BARU	0,00	0,00	58.240.000,00	58.220.000,00	20.000,00
72	SDN 1 TANGKILING	0,00	0,00	84.630.000,00	84.591.020,00	38.980,00
73	SDN 2 TANGKILING	250.889,00	0,00	130.789.111,00	131.040.000,00	0,00
74	SDN 3 TANGKILING	0,00	0,00	78.260.000,00	78.260.000,00	0,00
75	SDN 4 TANGKILING	0,00	0,00	65.520.000,00	65.520.000,00	0,00
76	SDN 1 MARANG	932.948,00	0,00	92.797.052,00	93.730.000,00	0,00
77	SDN 2 MARANG	74.228,00	0,00	63.625.772,00	63.700.000,00	0,00
78	SDN 1 BANTURUNG	60.000,00	0,00	81.840.000,00	81.900.000,00	0,00
79	SDN 2 BANTURUNG	1.777.299,00	0,00	123.802.701,00	123.756.696,00	1.823.304,00
80	SDN 1 TUMBANG TAHAI	793.536,00	0,00	132.976.464,00	133.770.000,00	0,00
81	SDN 2 TUMBANG TAHAI	193.310,00	0,00	53.496.690,00	53.690.000,00	0,00
82	SDN 3 TUMBANG TAHAI	0,00	0,00	59.150.000,00	59.150.000,00	0,00
83	SDN 1 SEI GOHONG	1.092.000,00	0,00	54.418.000,00	54.862.500,00	647.500,00
84	SDN 2 SEI GOHONG	103.590,00	0,00	64.506.410,00	64.610.000,00	0,00
85	SDN 1 KANARAKAN	0,00	0,00	41.860.000,00	41.860.000,00	0,00
86	SDN 1 HABARING HURUNG	2.167.850,00	0,00	82.903.150,00	85.071.000,00	0,00
87	SDN 1 PAGER JAYA	2.086.000,00	0,00	79.814.000,00	81.491.324,00	408.676,00
88	SDN 1 PETUK BUKIT	0,00	0,00	90.090.000,00	90.090.000,00	0,00
89	SDN 2 PETUK BUKIT	700.000,00	0,00	34.790.000,00	35.490.000,00	0,00
90	SDN 1 PETUK BARUNAI	0,00	0,00	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00
91	SDN 2 PETUK BARUNAI	0,00	0,00	115.570.000,00	115.485.000,00	85.000,00
92	SDN 1 MUNGKU BARU	0,00	0,00	80.990.000,00	80.990.000,00	0,00
93	SDN 1 BUKIT SUA	0,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Penerima Dana BOS	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
94	SDN 1 GAUNG BARU	0,00	0,00	33.670.000,00	33.670.000,00	0,00
95	SDN 1 PANJEHANG	0,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
	Jumlah	134.238.743,00	105.123.283,00	17.133.936.755,00	17.080.426.621,00	292.872.160,00

5.3.1.1.8.2. Kas Dana BOS Reguler SMPN

Kas Dana BOS Reguler SMPN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	12.554.494,00	11.101.512,00

Saldo kas dana BOS Reguler SMPN per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp12.554.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74. Dana BOS Reguler SMPN

No.	Penerima Dana BOS	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1	SMPN 1 PALANGKA RAYA	0,00	922.880.000,00	922.880.000,00	0,00
2	SMPN 2 PALANGKA RAYA	0,00	1.122.240.000,00	1.122.240.000,00	0,00
3	SMPN 3 PALANGKA RAYA	10.409.404,00	1.137.590.596,00	1.148.000.000,00	0,00
4	SMPN 4 PALANGKA RAYA	0,00	284.480.000,00	284.480.000,00	0,00
5	SMPN 5 PALANGKA RAYA	0,00	359.520.000,00	359.520.000,00	0,00
6	SMPN 6 PALANGKA RAYA	0,00	924.000.000,00	924.000.000,00	0,00
7	SMPN 7 PALANGKA RAYA	0,00	472.640.000,00	472.640.000,00	0,00
8	SMPN 8 PALANGKA RAYA	576.548,00	1.203.423.452,00	1.195.154.438,00	8.845.562,00
9	SMPN 9 PALANGKA RAYA	115.560,00	751.404.440,00	747.811.068,00	3.708.932,00
10	SMPN 10 PALANGKA RAYA	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00
11	SMPN 11 PALANGKA RAYA	0,00	318.080.000,00	318.080.000,00	0,00
12	SMPN 12 PALANGKA RAYA	0,00	236.320.000,00	236.320.000,00	0,00
13	SMPN 13 PALANGKA RAYA	0,00	137.760.000,00	137.760.000,00	0,00
14	SMPN 14 PALANGKA RAYA	0,00	306.880.000,00	306.880.000,00	0,00
15	SMPN 15 PALANGKA RAYA	0,00	59.360.000,00	59.360.000,00	0,00
16	SMPN 16 PALANGKA RAYA	0,00	219.520.000,00	219.520.000,00	0,00
17	SMPN SATU ATAP 1 PALANGKA RAYA	0,00	104.160.000,00	104.160.000,00	0,00
18	SMPN SATU ATAP 2 PALANGKA RAYA	0,00	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00
19	SMPN SATU ATAP 3 PALANGKA RAYA	0,00	38.080.000,00	38.080.000,00	0,00
20	SMPN SATU ATAP 4 PALANGKA RAYA	0,00	52.640.000,00	52.640.000,00	0,00
21	SMPN SATU ATAP 5 PALANGKA RAYA	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00
22	SMPN SATU ATAP 6 PALANGKA RAYA	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00
23	SMPN SATU ATAP 7 PALANGKA RAYA	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00
24	SMPN SATU ATAP 8 PALANGKA RAYA	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Penerima Dana BOS	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
25	SMPN SATU ATAP 9 PALANGKA RAYA	0,00	52.640.000,00	52.640.000,00	0,00
	Jumlah	11.101.512,00	8.960.098.488,00	8.958.645.506,00	12.554.494,00

5.3.1.1.8.3. Kas Dana BOS Kinerja SDN

Kas Dana BOS Kinerja SDN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas dana BOS Kinerja SDN per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75. Dana BOS Kinerja SDN

No.	Penerima Dana BOS	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1	SDN 6 PALANGKA	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
2	SDN 8 PALANGKA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
3	SDN 13 PALANGKA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4	SDN 1 MENTENG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5	SDN 4 MENTENG	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
6	SDN 9 MENTENG	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
7	SDN PERCOBAAN	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
8	SDN 3 BUKIT TUNGGAL	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
9	SDN 1 PETUK KATIMPUN	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
10	SDN 1 PANARUNG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
11	SDN 3 LANGKAI	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
12	SDN 8 LANGKAI	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
13	SDN 9 LANGKAI	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
14	SDN 11 LANGKAI	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
15	SDN 3 PAHANDUT	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
16	SDN 7 PAHANDUT	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
17	SDN 1 TANJUNG PINANG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
18	SDN 1 KALAMPANGAN	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
19	SDN 1 DANAU TUNDAI	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
20	SDN 2 PETUK BUKIT	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
21	SDN 1 PETUK BARUNAI	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
22	SDN 1 MUNGKU BARU	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
23	SDN 1 BUKIT SUA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	657.500.000,00	657.500.000,00	0,00

5.3.1.1.8.4. Kas Dana BOS Kinerja SMPN

Kas Dana BOS Kinerja SMPN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	18.845.000,00	0,00

Saldo kas dana BOS Kinerja SMPN per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp18.845.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.76. Dana BOS Kinerja SMPN

No.	Penerima Dana BOS	Saldo 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	SMPN 1 PALANGKA RAYA	0,00	25.000.000,00	6.155.000,00	18.845.000,00
2	SMPN 2 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3	SMPN 6 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4	SMPN 9 PALANGKA RAYA	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5	SMPN SATU ATAP 2 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
6	SMPN SATU ATAP 4 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7	SMPN SATU ATAP 5 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
8	SMPN SATU ATAP 6 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
9	SMPN SATU ATAP 7 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Jumlah		0,00	340.000.000,00	321.155.000,00	18.845.000,00

5.3.1.1.8.5. Kas Dana BOS SMAN, SMKN, dan SLBN

Kas Dana BOS SMAN, SMKN, dan SLBN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	836.446.108,10	836.446.108,10

Saldo kas dana BOS SMAN, SMKN, dan SLBN per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp836.446.108,10. Atas hal tersebut, belum ada tindak lanjut sehingga masih dicatat sebagai Kas Dana BOSP sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77. Dana BOS SMAN, SMKN, dan SLBN

No.	Penerima Dana BOP	Penyaluran Dana	Saldo 1 Jan 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	SMAN - 5 PALANGKA RAYA	DANA BOS PROVINSI	1.800.000,00	1.800.000,00
		DANA BOS PUSAT	21.500.000,00	21.500.000,00
2	SMAN - 6 PALANGKA RAYA	DANA BOS PROVINSI	1.399.604,00	1.399.604,00
		DANA BOS PUSAT	16.305.818,00	16.305.818,00
3	SMKN - 1 PALANGKA RAYA	DANA BOS PROVINSI	472.458,60	472.458,60
		DANA BOS PUSAT	98.580.984,00	98.580.984,00
4	SMKN - 6 PALANGKA RAYA	DANA BOS PROVINSI	802.394,00	802.394,00
		DANA BOS PUSAT	100.000,00	100.000,00
5	SMKN - 8 PALANGKA RAYA	DANA BOS PROVINSI	615.999,00	615.999,00
		DANA BOS PUSAT	7.000.000,00	7.000.000,00
6	SMAN - 1 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	122.500.000,00	122.500.000,00
7	SMAN - 2 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	94.500.000,00	94.500.000,00
8	SMAN - 3 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	98.000.000,00	98.000.000,00
9	SMAN - 4 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	87.500.000,00	87.500.000,00
10	SMAN - 7 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	200.000,00	200.000,00
11	SMAN - 10 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	7.000.000,00	7.000.000,00
12	SMKN - 2 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	231.000.020,00	231.000.020,00
13	SMKN - 3 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	31.268.915,00	31.268.915,00
14	SMKN - 4 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	14.900.000,00	14.900.000,00
15	SMKN - 5 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	191,00	191,00
16	SMKN - 7 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	100.000,00	100.000,00
17	SLBN - 1 PALANGKA RAYA	DANA BOS PROVINSI	419.662,64	419.662,64
18	SLBN - 2 PALANGKA RAYA	DANA BOS PUSAT	480.061,86	480.061,86
Jumlah			836.446.108,10	836.446.108,10



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.1.8.6. Kas Dana BOP Reguler PAUD

Kas Dana BOP Reguler PAUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.002.208,00	0,00

Saldo kas dana BOP Reguler PAUD per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp4.002.208,00 merupakan saldo kas tunai atas kelebihan belanja BOP PAUD TK Negeri Pembina Jekan Raya Tahap I dan Tahap II Tahun 2024. Adapun saldo kas dana BOP PAUD per 31 Desember 2024 dapat rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78. Dana BOP Reguler PAUD

No.	Penerima Dana BOP	Saldo Awal 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1	TK NEGERI PEMBINA PAHANDUT	0,00	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00
2	TK NEGERI PEMBINA JEKAN RAYA	0,00	99.772.208,00	95.770.000,00	4.002.208,00
3	TK NEGERI PEMBINA RAKUMPIT	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
4	TK NEGERI PEMBINA SABANGAU	0,00	35.380.000,00	35.380.000,00	0,00
5	TK NEGERI PEMBINA BUKIT BATU	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
6	TK NEGERI SATU ATAP TUMBANG RUNGAN	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
7	TK NEGERI SATU ATAP KANARAKAN	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	204.692.208,00	200.690.000,00	4.002.208,00

5.3.1.1.8.7. Kas Dana BOP Reguler Kesenjangan

Kas Dana BOP Reguler Kesenjangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas dana BOP Reguler Kesenjangan per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79. Dana BOP Reguler Kesenjangan

No.	Penerima Dana BOS	Saldo 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	SPNF SKB	0,00	242.090.000,00	242.090.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	242.090.000,00	242.090.000,00	0,00

5.3.1.1.8.8. Kas Dana Hibah Pembangunan

Kas Dana Hibah Pembangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	35.000.000,00	0,00

Saldo kas dana Hibah Pembangunan per 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp35.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.80. Dana Hibah Pembangunan

No.	Penerima Dana BOS	Saldo 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	SMPN SATU ATAP 4 PALANGKA RAYA	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
	Jumlah	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

5.3.1.1.9. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.326.533.207,00	0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.326.533.207,00 per 31 Desember 2024, merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Dana tersebut disalurkan langsung ke Rekening Operasional Dana BOK Puskesmas. Saldo awal Kas Dana BOK Puskesmas per 1 Januari 2024 senilai Rp3.547.362.105,00 merupakan reklasifikasi dari saldo akun Kas Dana BOK Puskesmas pada Kas Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.81. Dana BOK Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Saldo 1 Jan 2024 (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Rp)
1.	Pahandut	339.900.026,00	670.222.974,00	899.704.879,00	110.418.121,00
2.	Panarung	259.292.879,00	522.905.121,00	737.811.915,00	44.386.085,00
3.	Menteng	417.292.189,00	616.970.811,00	924.290.365,00	109.972.635,00
4.	Bukit Hindu	283.055.139,00	761.263.861,00	976.257.617,00	68.061.383,00
5.	Kayon	417.553.586,00	600.941.414,00	790.000.205,00	228.494.795,00
6.	Jekan Raya	149.926.229,00	355.292.771,00	501.653.151,00	3.565.849,00
7.	Tangkiling	322.460.539,00	376.415.461,00	555.644.704,00	143.231.296,00
8.	Rakumpit	300.208.586,00	248.376.414,00	401.152.231,00	147.432.769,00
9.	Kereng Bangkirai	272.391.293,00	369.283.707,00	480.502.231,00	161.172.769,00
10.	Kalampangan	354.427.000,00	212.795.000,00	476.720.500,00	90.501.500,00
11.	Marina Permai	430.854.639,00	513.597.361,00	725.155.995,00	219.296.005,00
	Jumlah	3.547.362.105,00	5.248.064.895,00	7.468.893.793,00	1.326.533.207,00

5.3.1.1.10. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023(Rp)
	129.309.499.816,37	118.634.035.987,84

Saldo Piutang Pajak Daerah pada tahun 2024 adalah senilai Rp129.309.499.816,37 sedangkan tahun 2023 senilai Rp118.634.035.987,84. Piutang Pajak Daerah



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.82. Rincian Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Piutang Pajak Hotel	179.077.734,00	36.711.934,00	142.365.800,00
2.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	955.320.635,37	168.560.036,49	786.760.598,88
3.	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	221.397.000,00	279.461.875,25	-58.064.875,25
4.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	4.565.801.955,00	4.748.214.114,10	-182.412.159,10
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	117.434.426,00	117.434.426,00	0,00
6.	Piutang Pajak Parkir	248.408,00	961.608,00	-713.200,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	379.056.552,00	367.860.137,00	11.196.415,00
8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	950.000,00	0,00	950.000,00
9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.522.799.245,00	889.656.870,00	1.633.142.375,00
10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	120.367.413.861,00	111.933.632.637,00	8.433.781.224,00
11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	91.542.350,00	-91.542.350,00
Jumlah		129.309.499.816,37	118.634.035.987,84	10.675.463.828,53

Pada tahun 2023 terdapat pemberian Stimulus PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Kota Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palangka Raya Tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 diterbitkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Denda tunggakan PBBP2 sampai dengan tahun 2022 serta diskon 55% dari NJOP ketetapan PBBP2 Tahun 2024 secara otomatis, sehingga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melakukan pembayaran PBBP2. Adapun mutasi Piutang Pajak Daerah selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.83. Mutasi Piutang Pajak Daerah

NO.	Uraian	PIUTANG 2023	MUTASI		PIUTANG 2024
		per 31 Des 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	per 31 Des 2024
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	118.634.035.987,84	39.015.308.252,87	28.339.844.424,34	129.309.499.816,37
1.	Pajak Hotel	36.711.934,00	197.512.130,00	55.146.330,00	179.077.734,00
2.	Piutang Pajak Restoran	168.560.036,49	1.717.469.856,87	930.709.257,99	955.320.635,37
3.	Pajak Hiburan	279.461.875,25	0,00	58.064.875,25	221.397.000,00
4.	Pajak Parkir	961.608,00	0,00	713.200,00	248.408,00
5.	Pajak Air Tanah	367.860.137,00	432.103.994,00	420.907.579,00	379.056.552,00
6.	Pajak Galian C	889.656.870,00	2.505.379.875,00	872.237.500,00	2.522.799.245,00
7.	PBB-P2	111.933.632.637,00	26.035.945.638,00	17.602.164.414,00	120.367.413.861,00
8.	PJU	117.434.426,00	4.257.757.647,00	4.257.757.647,00	117.434.426,00
9.	Pajak Reklame	4.748.214.114,10	3.868.189.112,00	4.050.601.271,10	4.565.801.955,00
10.	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

NO.	Uraian	PIUTANG 2023	MUTASI		PIUTANG 2024
		per 31 Des 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	per 31 Des 2024
11.	Piutang BPHTB	91.542.350,00	0,00	91.542.350,00	0,00
Jumlah		118.634.035.987,84	39.015.308.252,87	28.339.844.424,34	129.309.499.816,37

Penjelasan masing-masing rincian obyek Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

5.3.1.1.10.1. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	179.077.734,00	36.711.934,00

Piutang Pajak Hotel berada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 berjumlah Rp179.077.734,00 atau bertambah senilai Rp142.365.800,00 dengan mutasi tambah senilai Rp197.512.130,00 dan mutasi kurang senilai Rp55.146.330,00 dijelaskan pada rincian berikut ini:

Tabel 5.84. Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Hotel "BARITO SWEET SHINTA"	4.293.000,00	4.293.000,00	0,00
2.	Hotel "MELATI SERASI"	20.262.490,00	20.762.490,00	-500.000,00
3.	Hotel "MINA"	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
4.	Hotel "LAMPANG"	8.436.444,00	8.436.444,00	0,00
5.	Mess Putra Tunggal / TINE HERMANUS BARAT	0,00	1.240.000,00	-1.240.000,00
6.	Kost Matahari "Green House Asri"	0,00	820.000,00	-820.000,00
7.	Wisma AM / Jl.Sunan Kalijaga	64.300.000,00	0,00	64.300.000,00
8.	Palm Home Stay / JL. Gohong Batu (Km 34,5 Tjilik Riwut)	12.443.800,00	0,00	12.443.800,00
9.	Wisma Amanda / Jl. Beruk Angis	36.725.000,00	0,00	36.725.000,00
10.	Wisma Grand Patria / Jl. Moris Ismail IV	16.275.000,00	0,00	16.275.000,00
11.	Wisma Pangrango / Jl.Pangrango	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
12.	Wisma Tulip Guest House / Jl. Menteng IV	8.757.000,00	0,00	8.757.000,00
Jumlah		179.077.734,00	36.711.934,00	142.365.800,00

Piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2024 bertambah senilai Rp142.365.800,00 diantaranya terdapat pelunasan piutang dari debitur Mess Putra Tunggal dan Kost Matahari Green House Asri, angsuran piutang dari Hotel Melati Serasi serta tambahan piutang selama tahun 2024 oleh wisma dan home stay. Berdasarkan Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019 dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Hotel Barito Sweet Shinta beralih fungsi menjadi Rumah Sakit Siloam.

5.3.1.1.10.2. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	955.320.635,37	168.560.036,49

Piutang Pajak Restoran berada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 berjumlah Rp955.320.635,37 atau bertambah senilai



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Rp786.760.598,88 dengan mutasi tambah senilai Rp1.717.469.856,87 dan mutasi kurang senilai Rp930.709.257,99 dijelaskan pada rincian berikut ini:

Tabel 5.85. Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Piutang Pajak Restoran Tahun 2009	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00
2.	Restoran Jade Garden	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00
3.	Bakso Aphen Borneo (Pontianak)	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
4.	Rumah Makan Depot Sate Solo Mas Ratin	0,00	512.000,00	-512.000,00
5.	Warung Makan Pesus	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
6.	Kantin Dewi	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00
7.	Warung Makan Sederhana	1.312.000,00	1.512.000,00	-200.000,00
8.	Rumah Makan Resto Kayu Manis	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
9.	Pusako Banjar	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
10.	Warung Kita	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
11.	Warung Es Paradiso	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
12.	Warung Bakso Sido Mampir	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
13.	Warung Makan Martapura	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00
14.	Warung Makan Fitri	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
15.	Rumah Makan Siang Malam	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
16.	Soto Hasan I	0,00	762.000,00	-762.000,00
17.	Restaurant Hotel Barito Sweet Shinta	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
18.	Warung Makan Inur	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
19.	Rumah Makan Depot Hijau Bebek & Ayam Serani	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
20.	Depot Patria	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
21.	Warung Purwato Sari	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
22.	Rumah Makan Wong Jowo Blitar	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
23.	Catering Binyi Hasien	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00
24.	Markas Food fried Chicken	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
25.	Bakso Mutiara/ D'Best Chicken	0,00	397.000,00	-397.000,00
26.	Rumah Makan Jaya Raya	0,00	512.000,00	-512.000,00
27.	Es Teler Tirtasari	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
28.	Rumah Makan Borobudur II	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
29.	Rumah Makan Borobudur Junior	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
30.	Warung Makan Bu Sholeh	0,00	760.000,00	-760.000,00
31.	Nyata Rasa Surabaya	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
32.	Yogya Chicken	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
33.	Warung Soto dan Rawon	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
34.	Warung Makan Yogya	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
35.	Rumah Makan Spoonbob	0,00	3,00	-3,00
36.	Rumah Makan Al Mu'Minun	0,00	91,00	-91,00
37.	Rumah Makan Pondok Bambu/ Untung Prayitno	51.315.818,00	51.315.818,00	0,00
38.	PT. JCO Donuts & Coffee	9.388.819,00	9.388.819,00	0,00
39.	Rumah Makan Gadih Minang/Fitri Yeni	0,00	0,47	-0,47
40.	Warung Makan Naysila/Priyono	0,00	6.361.090,91	-6.361.090,91
41.	Tenda Biru/Ahmad Rojas	6.990.909,09	12.090.909,09	-5.100.000,00
42.	Warung Makan Citra Khas Madiun/ Budi Santoso	57.950.000,00	5.750.000,00	52.200.000,00
43.	Warung Makan Abah Dilah/H. Nurjani	781.818,18	2.381.818,18	-1.600.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
44.	Warung Makan Pecel Magetan/Suroso	0,00	1.172.727,27	-1.172.727,27
45.	Rumah Makan Banjar Nikmat/Murdiansyah	0,00	0,91	-0,91
46.	Rumah Makan Uda Denai/Julia	1.200.000,00	999.999,29	200.000,71
47.	WM. Hikmah Estu/Bambang Harjono Ismoyo	10.000.000,00	463.636,27	9.536.363,73
48.	Felicita Pizzeria Patisserie & Tea/Henny Fauziyah	2.411.304,55	2.411.304,55	0,00
49.	Rumah Makan Abang Jali/ Ramin	2.618.181,82	5.118.181,82	-2.500.000,00
50.	Resto Parahiangan (Warung Nasi Timbel)/Lilis Lisdawati	30.581.818,73	2.363.636,73	28.218.182,00
51.	Bakso Gunung Mie Ayam Bebek Shinjae Berkah Rizki / Jl. Yos Sudarso Seberang Kontainer	28.560.000,00	0,00	28.560.000,00
52.	Bara Arang / Jl Teuku Umar No 19	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
53.	Bengkel Valv Coffee / Jl Seth Adji No 25	20.651.410,00	0,00	20.651.410,00
54.	Bon Cafe / Jl.Galaxi Raya No.211	47.999.600,00	0,00	47.999.600,00
55.	Bubur Ayam Bandung / Jl. Diponegoro No. 4	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
56.	Cafe & Resto Excelso / Jl. Rta.Milono Km.2.5	10.813.330,00	0,00	10.813.330,00
57.	Cafe Taguk Ha / Jl Yos Sudarso	4.975.300,00	0,00	4.975.300,00
58.	Dapur Inces Food And Snack / Jl.G.Obos Viii Gg Bakung 3 No.99	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
59.	Dasu House Of Grill II / JL,DIPONEGORO KAV 4-5	10.764.000,00	0,00	10.764.000,00
60.	Dasu House Of Grill / Jl. Yos Sudarso Seberang Kontainer	22.040.000,00	0,00	22.040.000,00
61.	Gosteak Miefasol / Jl Kinibalu No 28	10.254.292,00	0,00	10.254.292,00
62.	Hans Coffee / Jl Lawu 74	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
63.	Platinum Café / Jl. Christopel Mihing No. 6	13.608.000,00	0,00	13.608.000,00
64.	Garis Batas Kopi / Jl.G.Obos Induk No.47.A	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
65.	Kedai Pentol Bakso Paman Rian / Jl Yos Sudarso	3.405.500,00	0,00	3.405.500,00
66.	Kedai Serabi / Jl. Kinibalu No. 29	5.272.675,00	0,00	5.272.675,00
67.	Kopi A Long / Jl G Obos	30.840.550,00	0,00	30.840.550,00
68.	Manhattan Indonesia / Jl Diponegoro No 12	24.871.000,00	0,00	24.871.000,00
69.	Mula Kophi / Jl Nyai Enat D-52	42.545.460,00	0,00	42.545.460,00
70.	Nasi Kuning Medina / Jl.Rajawali	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
71.	Neverland / Jl. Jend. Sudirman	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
72.	Nikmat Indonesia - Galaxy / Jl Galaxy Blok 3 No 3	9.735.650,00	0,00	9.735.650,00
73.	Nikmat Indonesia / Jl Rajawali Induk Km 2	10.649.750,00	0,00	10.649.750,00
74.	Opus Coffee Shop / Jl.Sisingamangaraja	1.429.000,00	0,00	1.429.000,00
75.	Pizza Buah Mas Taufik 2 / Jl Yos Sudarso No 153	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
76.	Rm Pondok Ikan Cianjur / Jl. Kahayan No. 16	1.821.435,00	0,00	1.821.435,00
77.	Rm Soto Semarang Pak Pris / Jl. Uria Jaya No. 34	8.145.454,00	0,00	8.145.454,00
78.	Rm Pak Cipto / Jl.Diponegoro	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00
79.	Rumah Makan Idola / Jl. Rajawali	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
80.	Rumah Makan Pelangi Utama / Jl. G Obos	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
81.	Rumah Makan Talago / Jl. Rta Milono	2.227.600,00	0,00	2.227.600,00
82.	Sambal Bakar Amang Jali / Jl G Obos Induk	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
83.	Saung Rindu Telaga / Jl Strawberry	63.418.200,00	0,00	63.418.200,00
84.	Searah Coffe / Jl Sisingamangaraja No 1	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
85.	Steaky Steak / Jl G Obos (Depan Komplek Perum Dpr Prov)	6.590.346,00	0,00	6.590.346,00
86.	Summer Co / Jl Sisingamangaraja (Samping Gg Samudin Aman 4)	8.297.000,00	0,00	8.297.000,00
87.	Warung Jabrik / Jl.G.Obos Induk	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
88.	Warung Makan Rifqi / Jl.Yos Sudarso	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
89.	Ayam Penyet Mutiara / Jl.Sisingamangaraja	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
90.	Rm.Pempek Ny Anggi / Jl.Seriti	251.000,00	0,00	251.000,00
91.	Wm. Sate Ayam Supri Banyuwangi	405.300,00	0,00	405.300,00
92.	Restaurant Solaria / Jl. Yos Sudarso (Metos)	70.609.672,00	0,00	70.609.672,00
93.	Cafe 21 Palma / Jl. Tjilik Riwut Km. 1	380.599,00	0,00	380.599,00
94.	Hotel Aurila Resto / Jl. Adonis Samad	362.229,00	0,00	362.229,00
95.	Roti O/Pt. Sebastian Citra Indonesia / Jl.Area Kedatangan Bandara T. Riwut	3.517.273,00	0,00	3.517.273,00
96.	Roti O/Alir Susanto/Pt.Sebastian Citra Indonesia / Jl.Rsud Doris Sylvanus/Jl.Tambun Bungai No.4	1.175.091,00	0,00	1.175.091,00
97.	Warung Makan Alan / Jl. Dr. Murjani	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
98.	Tara Coffe / Jl G Obos No 90a	6.012.900,00	0,00	6.012.900,00
99.	Bakso Solo / Jl. S. Parman	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
100.	Sobat Solo / Jl. S. Parman	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
101.	1960 Coffee & Roastery Pky / Jl Sudirman No 2a	22.123.350,00	0,00	22.123.350,00
Jumlah		955.320.635,37	168.560.036,49	786.760.598,88

Berdasarkan Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019 dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdapat beberapa wajib pajak daerah yang tutup/beralih fungsi dan tidak layak pungut. Dalam hal ini pemerintah kota Palangka Raya akan melakukan pemuktahiran data wajib pajak atau objek pajak agar mendapatkan data-data yang valid sebagai data penunjang rencana penghapusan piutang. Data Wajib Pajak Daerah yang tutup/beralih fungsi dan tidak layak pungut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.86. Wajib Pajak Daerah yang Tutup/Beralih Fungsi dan Tidak Layak Pungut

No.	Objek Piutang	Keterangan
1.	Restoran Jade Garden	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
2.	Bakso Aphen Borneo (Pontianak)	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
3.	Warung Makan Pasmus	Menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang pajak Daerah Tahun 2019, Wajib Pajak keberatan dan merasa tidak layak pungut
4.	Kantin Dewi	Menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang pajak Daerah Tahun 2019, Wajib Pajak keberatan dan merasa tidak layak pungut
5.	Warung Makan Sederhana	Menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang pajak Daerah Tahun 2019, Wajib Pajak keberatan dan merasa tidak layak pungut



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Keterangan
6.	Rumah Makan Resto Kayu Manis	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
7.	Pusako Banjar	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
8.	Warung Kita	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
9.	Warung Es Paradiso	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
10.	Warung Bakso Sido Mampir	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
11.	Warung Makan Martapura	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
12.	Warung Makan Fitri	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
13.	Restaurant Hotel Barito Sweet Shinta	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019, beralih fungsi menjadi Rumah Sakit Siloam
14.	Warung Makan Inur	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
15.	Rumah Makan Depot Hijau Bebek & Ayam Serani	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
16.	Depot Patria	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
17.	Warung Purwato Sari	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
18.	Rumah Makan Wong Jowo Blitar	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
19.	Markas Food Fried Chicken	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
20.	Es Teler Tirtasari	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
21.	Rumah Makan Borobudur II	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
22.	Rumah Makan Borobudur Junior	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
23.	Nyata Rasa Surabaya	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
24.	Yogya Chicken	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
25.	Warung Soto dan Rawon	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019
26.	Warung Makan Yogya	Tutup menurut Berita Acara Penanganan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah Tahun 2019

5.3.1.1.10.3. Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya

Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	221.397.000,00	279.461.875,25

Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya berada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan piutang sedangkan pengurangan piutang senilai Rp58.064.875,25 oleh beberapa debitur dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.87. Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya per 31 Desember 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Vino Club Aquarius. Hotel	3.193.500,00	3.193.500,00	0,00
2.	Vino Club Aquarius Hotel/Massage & Spa Aquarius Hotel/ PT. Two in one (2014)	0,00	2,25	-2,25
3.	Kalawa Water Park (Pt. Bersama Salmaka Cipta)	205.603.500,00	205.603.500,00	0,00
4.	Happy Puppy Karaoke / M. Lukmansyah Gibran / Jl.Tjilik Riwut Km.2.5	0,00	45.237.055,00	-45.237.055,00
5.	Timezone / Pt. Matahari Graha Fantasi /Jl. Yos Sudarso (Metos)	0,00	11.027.818,00	-11.027.818,00
6.	Pratik Setiawan / Platinum / Jl.Christopel Mihing	12.600.000,00	14.400.000,00	-1.800.000,00
Jumlah		221.397.000,00	279.461.875,25	-58.064.875,25

5.3.1.1.10.4. Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron

Piutang Pajak Reklame	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.565.801.955,00	4.748.214.114,10

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kota Palangka Raya Nomor: 700/53/LHP-K/2017/INSP tanggal 17 November 2017, atas potensi pajak reklame milik Apink Advertising dengan total Rp4.419.323.065,00 TMT Tahun 2012 s/d 2017 yakni seluruh tunggakan pajak reklame, denda pajak reklame sebesar Rp3.893.380.791,00 dan penyesuaian atas penerbitan SKP dan SKR atas pajak reklame tahun 2017 belum dibayar s/d 31 Desember tahun 2017 sebesar Rp525.942.274,00.

Pengelolaan Pajak Reklame diserahkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 870/1234/DPRKPP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 perihal Serah Terima Pengalihan Berkas/Dokumen Piutang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.

Piutang Pajak Reklame limpahan tersebut pada tahun 2018 bertambah sebesar Rp5.392.080,00, pada tahun 2019 bertambah sebesar Rp57.123.560,00 dan tahun 2021 sebesar Rp125.537.226,00. Pada tahun 2024 terdapat pembayaran senilai Rp106.594.726,00 atas piutang pajak reklame tahun 2021. Terhadap piutang pajak reklame tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak terdapat pengurangan piutang. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pernah melakukan upaya konfirmasi penagihan terhadap wajib pajak yang berpiutang akan tetapi berdasarkan keterangan wajib pajak tersebut telah bangkrut/usaha tersebut tidak beroperasi.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Pada tahun 2024 terdapat penambahan piutang pajak reklame sebesar Rp3.868.189.112,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp4.050.601.271,10, sehingga sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah piutang Pajak Reklame sebesar Rp4.565.801.955,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.88. Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron
per 31 Desember 2024**

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	CV. Laporee (F Hendra Cipta)	1.357.500,00	1.357.500,00	0,00
2	PT. Putera Auto Kencana (Jaya Kontesta)	2.527.200,00	2.527.200,00	0,00
3	PT. Eltech Digital Indonesia (Daniel Agus Exwan Susilo)	150.000,00	150.000,00	0,00
4	Carnival Bistro (Yuwey Wangi)	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
5	PT. Mandiri Tunas Finance (Beta Priyono)	1.501.500,00	1.501.500,00	0,00
6	Griya Sehat (Vera Kusasih Suriyanto)	0,00	2.340.000,00	-2.340.000,00
7	D'Lavan Karaoke (Bob Fiterson Brahim)	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00
8	Toko Jordan (Yukadi Prinata)	693.000,00	693.000,00	0,00
9	PT. Pendekar Bodoh/ D'Cost (Johnnie Syam)	390.000,00	390.000,00	0,00
10	Toko Bagong (Dra. Romeisi)	750.000,00	750.000,00	0,00
11	Ruqyah Learning Center (Chandra Mukti Wijaya)	150.000,00	150.000,00	0,00
12	PT. Kapuas Bara Utama (Saut Saur Tua Simatupang)	150.000,00	150.000,00	0,00
13	PT. Iqoo Vivo Kalimantan (Guslianor)	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
14	Toko Makmur Jaya Bersaudara (Asrani)	383.760,00	383.760,00	0,00
15	Warung Royan (Anwar)	150.000,00	150.000,00	0,00
16	CV. Wiratama (Yudhy Timbo Jaya Pangaribuan)	0,00	18.543.600,00	-18.543.600,00
17	PT. Yani Mega Power (Hj. Arie Purnamawati)	150.000,00	150.000,00	0,00
18	Radja Gorden (Maya Irawati)	624.000,00	624.000,00	0,00
19	CV. Bayu Mulia Lestari (Eno Mariono)	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
20	Partai Demokrat (Edy Sahbana)	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00
21	Eduka Buana	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00
22	Piutang Pajak Reklame (Temuan Inspektorat Thn. 2017)	4.419.323.065,00	4.419.323.065,00	0,00
23	PT. Astra Sedaya Finance (Amaliya Viya Kartika)	262.080,00	262.080,00	0,00
24	Apotek Madina Farma 1 (Agus Ferdian Susanto)	720.000,00	720.000,00	0,00
25	Global Express Penginapan (Benny Tanujaya)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
26	PT. CIMB Niaga Auto Finance (Nanda Taufik Cagara)	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
27	Banner – Bimbel Aku Bisa (Chandra Gupta)	196.000,00	196.000,00	0,00
28	CV. Anonk Batuah/Nanin Puspasari, S.H.	150.000,00	150.000,00	0,00
29	CV. Feny Putri Pagar Batu/Sarmauli Lumban Raja	0,00	150.000,00	-150.000,00
30	CV. Feny Putri Pagar Batu/Sarmauli Lumban Raja	0,00	150.000,00	-150.000,00
31	CV. Pelita Lestari / Heri Yuansli	0,00	150.000,00	-150.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
32	CV. Tujuh Ruang Global Mandiri/Ahmad Gazim Benasti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
33	CV. Tujuh Ruang Global Mandiri/Ahmad Gazim Benasti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
34	CV. Tujuh Ruang Global Mandiri/Ahmad Gazim Benasti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
35	CV. Tujuh Ruang Global Mandiri/Ahmad Gazim Benasti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
36	CV. Tujuh Ruang Global Mandiri/Ahmad Gazim Benasti	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
37	CV. Tujuh Ruang Global Mandiri/Ahmad Gazim Benasti	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00
38	PT. Putra Jaya Gabe / Poster Simorangkir	150.000,00	150.000,00	0,00
39	PT. Putra Jaya Gabe / Poster Simorangkir	150.000,00	150.000,00	0,00
40	CV. Elza Putri Sulung/Wadzen Lumban Tobing	0,00	150.000,00	-150.000,00
41	CV. Ardita/Asteria	150.000,00	150.000,00	0,00
42	CV. Ardita/Asteria	150.000,00	150.000,00	0,00
43	CV. Kalwira Oloindo/Yodeno Yan Raymond Sinaga	150.000,00	150.000,00	0,00
44	CV. Tampung Penyang Kontraktor / Yulian Adi Harta	150.000,00	150.000,00	0,00
45	CV. Surya Djatta / Ade Suryadi Djatta	0,00	150.000,00	-150.000,00
46	CV. Surya Djatta / Ade Suryadi Djatta	0,00	150.000,00	-150.000,00
47	CV. Surya Djatta / Ade Suryadi Djatta	0,00	150.000,00	-150.000,00
48	PT. Borneo Biomassa Energy / Kusnadi B. Halijam	310.500,00	310.500,00	0,00
49	Toko Sembako Sari Bogga / Bernardus Hariadi Dwi HA	0,00	150.000,00	-150.000,00
50	Toko Sembako Sari Bogga / Bernardus Hariadi Dwi HA	0,00	150.000,00	-150.000,00
51	Rapi'i	0,00	150.000,00	-150.000,00
52	CV. Eastern Bangun Perkasa / Oki Rahafista Nugraha	0,00	150.000,00	-150.000,00
53	CV. Protect Jasa Consultant / Muhammad Zulfikar	0,00	150.000,00	-150.000,00
54	CV. Protect Jasa Consultant / Muhammad Zulfikar	0,00	150.000,00	-150.000,00
55	CV. Protect Jasa Consultant / Muhammad Zulfikar	0,00	150.000,00	-150.000,00
56	Hj. Nunung Hidayani, S.Pd.	0,00	150.000,00	-150.000,00
57	CV. Tirta Widyautama / Ahmad Ainul Yaqien	0,00	150.000,00	-150.000,00
58	CV. Tirta Widyautama / Ahmad Ainul Yaqien	0,00	150.000,00	-150.000,00
59	CV. Bintang Baru Travel / Kasmadi, S.Hut.	0,00	571.200,00	-571.200,00
60	CV. Bintang Baru Travel / Kasmadi, S.Hut.	0,00	571.200,00	-571.200,00
61	CV. Pelangi Advertising / Samsuni	0,00	224.641,00	-224.641,00
62	Carnival Bistro / Yumey Wangi	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
63	Carnival Bistro / Yumey Wangi	0,00	1.170.000,00	-1.170.000,00
64	Simply Fresh Laundry / Shalom Agung Dwi Putra	540.000,00	540.000,00	0,00
65	Simply Fresh Laundry / Shalom Agung Dwi Putra	540.000,00	540.000,00	0,00
66	Wagga Mama Guest House / Shalom Agung Dwi Putra	330.000,00	330.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
67	Wagga Mama Guest House / Shalom Agung Dwi Putra	330.000,00	330.000,00	0,00
68	Wisma Wagga Wagga / Shalom Agung Dwi Putra	621.000,00	621.000,00	0,00
69	Wisma Wagga Wagga / Shalom Agung Dwi Putra	621.000,00	621.000,00	0,00
70	D'lavan Cafe Dan Karaoke / Bob Fiterson Brahim	0,00	858.000,00	-858.000,00
71	D'lavan Cafe Dan Karaoke / Bob Fiterson Brahim	0,00	858.000,00	-858.000,00
72	Bougenville Villa / Susie Andrianie, s.e.	0,00	2.340.000,00	-2.340.000,00
73	Bougenville Villa / Susie Andrianie, s.e.	0,00	3.510.000,00	-3.510.000,00
74	PT. Bank Mandiri Taspen / Rahardi Yogo Poerwandity	0,00	5.347.500,00	-5.347.500,00
75	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	702.000,00	-702.000,00
76	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	540.000,00	-540.000,00
77	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	702.000,00	-702.000,00
78	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	540.000,00	-540.000,00
79	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	702.000,00	-702.000,00
80	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	594.000,00	-594.000,00
81	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	4.968.000,00	-4.968.000,00
82	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	2.808.000,00	-2.808.000,00
83	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	2.808.000,00	-2.808.000,00
84	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	540.000,00	-540.000,00
85	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / Wisnu Chandra KE	0,00	540.000,00	-540.000,00
86	PT. Berkas Karunia Pratama Anugrah / Grand Globa	0,00	780.000,00	-780.000,00
87	PT. Berkas Karunia Pratama Anugrah / Grand Globa	0,00	780.000,00	-780.000,00
88	PT. Hang Bright Electronic / Gusliannor	943.920,00	943.920,00	0,00
89	PT. Hang Bright Electronic / Gusliannor	1.989.000,00	1.989.000,00	0,00
90	PT. Hang Bright Electronic / Gusliannor	0,00	1.404.000,00	-1.404.000,00
91	Susie Andrianie, S.E.	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00
92	Palm Home Stay / Susie Andrianie, S.E.	0,00	1.535.626,00	-1.535.626,00
93	Palm Home Stay / Susie Andrianie, S.E.	0,00	1.535.626,00	-1.535.626,00
94	Palm Home Stay / Susie Andrianie, S.E.	0,00	551.250,00	-551.250,00
95	Palm Home Stay / Susie Andrianie, S.E.	0,00	551.250,00	-551.250,00
96	Palm Home Stay / Susie Andrianie, S.E.	0,00	603.750,00	-603.750,00
97	Palm Home Stay / Susie Andrianie, S.E.	0,00	603.750,00	-603.750,00
98	PT. JCO Donut & Coffee / Robert Sutejo	0,00	4.116.000,00	-4.116.000,00
99	PT. JCO Donut & Coffee / Robert Sutejo	0,00	4.116.000,00	-4.116.000,00
100	PT. JCO Donut & Coffee / Robert Sutejo	0,00	4.116.000,00	-4.116.000,00
101	Supiah	0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
102	Ishaq	0,00	172.500,00	-172.500,00
103	PT. Indomarco Prismatama/Theopilos Indra Gunawan M	0,00	1.491.750,00	-1.491.750,00
104	PT. Tunggal Jaya Pamenang / Winardi Sethiono	0,00	10.080.000,00	-10.080.000,00
105	PT. Hang Bright Electronic / Gusliannor	2.055.917,00	10.920.000,00	-8.864.083,00
106	PT. Hang Bright Electronic / Gusliannor	8.487.000,00	8.487.000,00	0,00
107	PT. Hang Bright Electronic / Gusliannor	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00
108	Hj. Nurlaila Hayati	0,00	3.750.000,00	-3.750.000,00
109	CV. Betang Mas/Khanis Suyanri	0,00	150.000,00	-150.000,00
110	Muhammad As'ad	0,00	150.000,00	-150.000,00
111	CV. Sapan Sumber Sentosa / Adewinta Eliesar Kahara	0,00	150.000,00	-150.000,00
112	R. Sutikno	0,00	150.000,00	-150.000,00
113	Tiya Yuliana	0,00	600.000,00	-600.000,00
114	Lilis Tampiasih	0,00	375.000,00	-375.000,00
115	Piutang Tahun 2021	1.332.763,00	0,00	1.332.763,00
116	Piutang Tahun 2023	0,00	142.170.946,10	-142.170.946,10
117	Pangkalan LPG 3 Kg Andrian Noor (Andrian Noor)	153.000,00	0,00	153.000,00
118	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	180.000,00	0,00	180.000,00
119	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	198.000,00	0,00	198.000,00
120	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	180.000,00	0,00	180.000,00
121	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	207.000,00	0,00	207.000,00
122	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	180.000,00	0,00	180.000,00
123	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	216.000,00	0,00	216.000,00
124	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	216.000,00	0,00	216.000,00
125	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	180.000,00	0,00	180.000,00
126	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	180.000,00	0,00	180.000,00
127	PT. Trisula Banua Bakawan (GRAB) (Robertus Reno Saputra)	180.000,00	0,00	180.000,00
128	Pangkalan LPG 3 Kg Toko Oby Setiawan (Oby Setiawan)	150.000,00	0,00	150.000,00
129	CV. Cahaya Sang Timur (Irawati)	200.340,00	0,00	200.340,00
130	CV. Cahaya Sang Timur (Irawati)	162.180,00	0,00	162.180,00
131	CV. Cahaya Sang Timur (Irawati)	241.680,00	0,00	241.680,00
132	Pangkalan LPG 3 Kg Berkas Asi	150.000,00	0,00	150.000,00
133	CV. Tujuh Langit / Nuzul Fahmi, S.E.	5.772.000,00	0,00	5.772.000,00
134	CV. Jaya Mukti Abadi / Dian Resturini	4.566.900,00	0,00	4.566.900,00
135	Legends Pool & Cafe	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
136	CV. Almira	150.000,00	0,00	150.000,00
137	Xiaomi Shop (Hapeworld)	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
138	Zpool	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
139	Gmd Baru	150.000,00	0,00	150.000,00
140	Apotek Berkat Ibu	265.000,00	0,00	265.000,00
141	Pangkalan LPG 3 Kg Vellya	150.000,00	0,00	150.000,00
142	Pangkalan LPG 3 Kg 5 Saudara	150.000,00	0,00	150.000,00
143	As Accesories Titanium	330.000,00	0,00	330.000,00
144	Penjahit (Mata-Hari)	150.000,00	0,00	150.000,00
145	Toko Sri Rejeki	330.000,00	0,00	330.000,00
146	Poto Copy & Atk Aly Amrullah	300.000,00	0,00	300.000,00
147	Melasti Food Court	165.000,00	0,00	165.000,00
148	Pangkalan LPG 3 Kg Ummu Zulfa	150.000,00	0,00	150.000,00
149	Sultan Fashion	660.000,00	0,00	660.000,00
150	Twincorn	8.121.750,00	0,00	8.121.750,00
151	Plovdiv Coffeebar & Eatery	600.000,00	0,00	600.000,00
152	Indomaret	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00
153	Apotek Alkes	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
154	Pangkalan LPG 3 Kg "Marawanto"	150.000,00	0,00	150.000,00
155	PT. Jco Donut & Coffee	5.096.400,00	0,00	5.096.400,00
156	CV. Elfazza	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
157	Pangkalan LPG 3 Kg Joni Irawan	150.000,00	0,00	150.000,00
158	Pangkalan LPG 3 Kg Sonnus	150.000,00	0,00	150.000,00
159	Pangkalan LPG 3 Kg Satria Putra	150.000,00	0,00	150.000,00
160	Pangkalan LPG 3 Kg Satria Putra	150.000,00	0,00	150.000,00
161	Pangkalan LPG 3 Kg Amabelindo Putri Borneo	150.000,00	0,00	150.000,00
162	Pangkalan LPG 3 Kg "Petrus Rahail"	150.000,00	0,00	150.000,00
163	Pangkalan LPG 3 Kg Toko "Lampang" (Darsim)	150.000,00	0,00	150.000,00
164	Pangkalan LPG 3 Kg Anugrah	150.000,00	0,00	150.000,00
165	Pangkalan LPG 3 Kg Yasir	150.000,00	0,00	150.000,00
166	Pangkalan LPG 3 Kg Masmurah	150.000,00	0,00	150.000,00
167	Toko Pa Bue	300.000,00	0,00	300.000,00
168	Optik Express	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
169	Apotek As-Syifa	600.000,00	0,00	600.000,00
170	Pt. Gemilang Surya Perkasa	15.444.000,00	0,00	15.444.000,00
171	Rocket Chicken	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00
172	Guest House Raden Patah	300.000,00	0,00	300.000,00
Jumlah		4.565.801.955,00	4.748.214.114,10	-182.412.159,10



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.1.10.5. Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	117.434.426,00	117.434.426,00

Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan pada surat Nomor 660/358/DTKBP-PSPP/2014 tanggal 22 Agustus tahun 2014 dan surat dari PT. PLN Persero Nomor 0684/040/APRY/2014 tentang jawaban surat tersebut yang berisi tentang tindak lanjut temuan LHP yang menyatakan bahwa PT. PLN Persero area Palangka Raya tahun 2010 memiliki kekurangan penyeteroran Pajak Penerangan Jalan Umum senilai Rp296.060.104,00 yang terdiri atas Rp117.434.426,00 yang merupakan selisih antara DIL dan penerimaan yang telah ditransfer dan Rp178.625.678,00 merupakan pemotongan upah pungut tahun 2009 sampai dengan April tahun 2010 yang langsung dipotong dengan setoran bulan Mei tahun 2010. Untuk potongan upah pungut senilai Rp178.625.678,00 telah disetor tanggal 26 September 2014, sehingga kekurangan penyeteroran Pajak Penerangan Jalan Umum adalah senilai Rp117.434.426,00.

Pengelolaan piutang Pajak Penerangan Jalan Umum diserahkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 870/1234/DPRKPP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 perihal Serah Terima Pengalihan Berkas/ Dokumen Piutang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.

5.3.1.1.10.6. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	248.408,00	961.608,00

Pengelolaan Piutang Pajak Parkir pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp248.408,00 merupakan piutang Alat Berat dari PT. Cipaganti Citra Graha pada tahun 2015 senilai Rp204.408,00 dan Piutang Pajak Parkir pada Halaman Parkir BRI Km.7 sebesar Rp44.000,00.

5.3.1.1.10.7. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	379.056.552,00	367.860.137,00

Pada tahun 2024 terdapat penambahan atas Piutang Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp432.103.994,00 dan pengurangan sebesar Rp420.907.579,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89. Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Rumah Sakit Islam PKU. Muhammadiyah/ Dr. SURYANTO, SP.PD	752.600,00	184.476,00	568.124,00
2.	Rumah Sakit Ibu dan Anak Yasmin/ Dr. SIGIT NURFIANTO, SP.OG(K)	27.246.200,00	27.246.200,00	0,00
3.	Hotel Luwansa/ Muhamad Ikhsan	72.559.120,00	69.712.240,00	2.846.880,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4.	Hotel Aquarius Boutique/ Chendry Kusmana	101.236.020,00	101.236.020,00	0,00
5.	PT Harapan Agung Bersama/ Agus Ramli	30.507.340,00	30.842.580,00	-335.240,00
6.	PT.Lamfata Retailindo Perkasa/ Tugiyono Wiratmodjo	98.549.080,00	105.202.480,00	-6.653.400,00
7.	Swissbell Danum Hotel/ Zen Achmad Riza	0,00	10.072.662,00	-10.072.662,00
8.	Air Isi Ulang Tangkiling "Cantika"/ Misyanto	4.157.214,00	4.544.844,00	-387.630,00
9.	Penyuplai Air Minum/ Sulistiyono	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00
10.	Depot Pengisian Air Bersih / Miring	88.740,00	88.740,00	0,00
11.	Depot Pengisian Bahan Baku Air Minum "Adhitia"/ Rahmadi	1.742.400,00	2.453.100,00	-710.700,00
12.	Yosua Water King 02/ Nungki Prasetyo	361.980,00	537.540,00	-175.560,00
13.	Penyuplai Air Minum/ Herudin	0,00	52.080,00	-52.080,00
14.	Penyuplai Air Minum/ Kristiannopeni	0,00	881.460,00	-881.460,00
15.	Hotel Fovere/PT.Jakar Borneo Persada/ Stefanus A. Santyoso	53.320,00	190.660,00	-137.340,00
16.	Hotel Batu Suli Internasional/ Ir. Berty Rasad / Rommy Jl. Raden Saleh No.04	0,00	781.510,00	-781.510,00
17.	Hotel Batu Suli / Ir. Berty Rasad Jl. Raden Saleh No.04 Jl. Tumbang Tahai/ Tangkiling	0,00	110.920,00	-110.920,00
18.	Sumur Bor / Mersita Ds./ Bobby Perdana Jl. Rta. Milono	1.756.350,00	1.194.120,00	562.230,00
20.	Pt. Istana Mobil Trio Raya / Adiguna Wijaya Jl. Adonis Samad /Kel.Langkai, Kec.Pahandut	1.899.261,00	2.718.128,00	-818.867,00
21.	Santos Sns Panggabean (Metos) / Pt.Cahaya Puspita Raya Jl.Yos Sudarso No 57	0,00	2.392.977,00	-2.392.977,00
22.	Rumah Sakit "Betang Pambelum"/ Pt. Fortuna Griya Medika (Leona Agustine Karnali) Jl. Tjilik Riwut Km.6,5 Kel. Bukit Tunggal	0,00	190.640,00	-190.640,00
23.	Nascar Famili Hotel" / Yuliana Sofia, Se Jl. Nyai Undang No. 4	821.320,00	985.440,00	-164.120,00
24.	Penyuplai Air Minum Along Water " A.N.Hendi Jl. Rawung (Sidumulyo)	156.000,00	1.287.120,00	-1.131.120,00
25.	Rista Water "/ Rikky Ong Jl.Rawung (Sidumulyo)	0,00	595.500,00	-595.500,00
26.	UD. Surya Mas (Cuci Mobil) " / Sudria Primal Octavianus Bingan Jl Rta Milono Km 5,5	394.860,00	1.574.700,00	-1.179.840,00
27.	Am Ananda Motor Carwash / Alianor	1.001.880,00	0,00	1.001.880,00
28.	Intan Jaya Car Wash / I Dg Wijaya S.	1.094.580,00	0,00	1.094.580,00
29.	Victory Car Wash / Didit Chandra-Febriyanti Dwi Nugraini	286.320,00	0,00	286.320,00
30.	Cuci Mobil Manasa / Jeni Satria Kaharap - Mira Triyuli	738.000,00	0,00	738.000,00
31.	Cuci Mobil Pantai Gading / Herjon Husien	564.360,00	0,00	564.360,00
32.	Wisana 16 Carwash / Fitria Anita	2.992.500,00	0,00	2.992.500,00
33.	Cuci Mobil Zam-Zam / Muslim Junai	369.150,00	0,00	369.150,00
34.	Cuci Mobil & Motor "Wecock" / Jumandi Agan, M.Sc	135.300,00	0,00	135.300,00
35.	999 Motor 3 / Akhmad Supian Rahmadi	1.649.217,00	0,00	1.649.217,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
36.	Obi Cr Wash / Andon Td. Oemar	159.000,00	0.00	159.000,00
37.	Cha – Cha Auto Wash / Amol Husni	76.920,00	0.00	76.920,00
38.	Barasih Car Wash / Margono	94.200,00	0.00	94.200,00
39.	Classy Wash / Suhaidah Mulyanti	382.800,00	0.00	382.800,00
40.	Star Citor / Asrin / Dahlia	1.565.400,00	0.00	1.565.400,00
41.	G.Obos 60 Cara Wash / Yan Setywan Ranan	815.760,00	0.00	815.760,00
42.	Cuci Mobil Global Sport / Haris - Delpi	1.498.320,00	0.00	1.498.320,00
43.	Cuci Mobil (Abr Car Wash) / I Does Tambun Hundjun	749.160,00	0.00	749.160,00
44.	Tara Car Wash / Mering Sh	375.630,00	0.00	375.630,00
45.	Cuci Motor Simpang.3 Aliyah Call / Jumberiansyah	75.480,00	0.00	75.480,00
46.	Prima Gading Carwash / Miftah Farid	81.240,00	0.00	81.240,00
47.	"Nakaya Car Wash- Home Car Wash /	144.600,00	0.00	144.600,00
48.	Cuci Motor Buka Siang Malam /Wongso	296.400,00	0.00	296.400,00
49.	Cuci Motor Dona Primario /Dona Primario	1.148.400,00	0.00	1.148.400,00
50.	Ocean Carwash / Jamaludin	888.960,00	0.00	888.960,00
51.	Carwash "Tirto Mili" / Irine Rintis	307.320,00	0.00	307.320,00
52.	Cuci Mobil "Nascar 88" / Reno Yulius	1.085.100,00	0.00	1.085.100,00
53.	Cuci Motor Salju Berkah / Baihaki	282.600,00	0.00	282.600,00
54.	Carwash "Autoglow"/ Rezha Setyawan	204.840,00	0.00	204.840,00
55.	Kolam Renang "Khaikyilia" / Rizkidya Assidiq Putra	979.380,00	0.00	979.380,00
56.	Cuci Motor Keminting/Umuk Saleh	15.180,00	0.00	15.180,00
57.	Cuci Mobil/Motor Hasur Danum / Andi Rinag Purnama	618.600,00	0.00	618.600,00
58.	Cuci Motor Suprpto / Sri Widodo Budi Riwanto	44.520,00	0.00	44.520,00
59.	Cuci Motor Suprpto (Sebelah Mess Pln) / Marhamah	59.400,00	0.00	59.400,00
60.	Cuci Motor Steam Andri/ Andri Manullang	72.600,00	0.00	72.600,00
61.	Cuci Motor Steam Said / Said	667.680,00	0.00	667.680,00
62.	Cuci Motor Pinus 39 / H. Syamsuni	138.840,00	0.00	138.840,00
63.	Kolam Renang Soekarno / Ginanjar Septa Denny	178.680,00	0.00	178.680,00
64.	Kolam Renang Ain Dria / Setinawati	199.200,00	0.00	199.200,00
65.	Kolam Renang Menteng / Timerman Djapar Nawat	2.582.400,00	0.00	2.582.400,00
66.	Berkah Alam (Tangkiling) / Hidayat Setyo Putra	576.900,00	0.00	576.900,00
67.	Sumur Bor " CANTIKA " (Tangkiling) / CRISTIAN SUHENDI MAKUPIOLA	840.960,00	0.00	840.960,00
68.	Isi Air Minum " Satriadi " / I Gusti Komang Dion Irawan	589.680,00	0.00	589.680,00
69.	Isi Air Minum " Doa Umi " / Rusli	1.372.680,00	0.00	1.372.680,00
70.	Mandiri Air Rindo / Dedy Wahyudi	2.083.050,00	0.00	2.083.050,00
71.	Cuci Mobil "Bsg" / Gunawan Jaya Putra	215.880,00	0.00	215.880,00
72.	Cucian Mobil Rfd / Wandri Joni, S. H	1.116.960,00	0.00	1.116.960,00
73.	Pingko Pingko Carwash / Michael Putra Ramosta Sitepu	863.520,00	0.00	863.520,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
74.	Zr Car Wash (Cuci Mobil) / Karolina Apriliany	139.440,00	0.00	139.440,00
75.	Dione Car Wash / Juliandra Hendi Setiawan	998.880,00	0.00	998.880,00
76.	Safa Carwash / Norhalimah Tusa Diah	288.600,00	0.00	288.600,00
77.	Kolam Renang Rafisha / M Hakim Wibowo	267.000,00	0.00	267.000,00
78.	Kolam Renang 99 / Handayani Wijaya	17.280,00	0.00	17.280,00
Jumlah		379.056.552,00	367.860.137,00	11.196.415,00

5.3.1.1.10.8. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	950.000,00	0,00

Pada tahun 2024 terdapat penambahan atas Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	SBW Yulius Winata	550.000,00	0,00	550.000,00
2.	SBW H.Ahmad Farkan	300.000,00	0,00	300.000,00
3.	Sarang Burung Walet/H.Syahrani	100.000,00	0,00	100.000,00
Jumlah		950.000,00	0,00	950.000,00

5.3.1.1.10.9. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Galian C	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.522.799.245,00	889.656.870,00

Pengelolaan Piutang Pajak Galian C pada tahun 2015 diserahkan dari Dinas Pertambangan dan Energi ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima. Pada tahun 2024 terdapat penambahan senilai Rp2.505.379.875,00 dan pengurangan senilai Rp872.237.500,00 sehingga saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp2.522.799.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91. Piutang Pajak Galian C per 31 Desember 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	CV. BERKAT PRAKASA UTAMA	1.340.500,00	1.340.500,00	0,00
2.	CV. ARYA LAKSANA	1.340.500,00	1.340.500,00	0,00
3.	CV. DAMAI PERSADA	259.480,00	259.480,00	0,00
4.	CV. ARTHA ARVINOZA	561.275,00	561.275,00	0,00
5.	CV. DAMAI PERSADA	5.829.690,00	5.829.690,00	0,00
6.	CV. USAHA MULIA	1.408.510,00	1.408.510,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
7.	CV. USAHA MULIA	1.631.640,00	1.631.640,00	0,00
8.	CV. TRIYASA JAYA	686.235,00	686.235,00	0,00
9.	PT. YUDHA ADHI SENGGA	4.361.540,00	4.361.540,00	0,00
10.	PT. KARYA RES LISBETH MINERAL	2.328.000.000,00	872.237.500,00	1.455.762.500,00
11.	PT.ZIRCONIKA MEGA SEJATI/Ashok Hotland	94.464.375,00	0,00	94.464.375,00
12.	PT. KAHAYAN PERMAIR MUKESH	78.937.500,00	0,00	78.937.500,00
13.	WAWAN SUPARNO/ PASIR URUG/C.RIWUT KM 17	3.978.000,00	0,00	3.978.000,00
Jumlah		2.522.799.245,00	889.656.870,00	1.633.142.375,00

5.3.1.1.10.10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	120.367.413.861,00	111.933.632.637,00

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BPPRD per 31 Desember tahun 2024 berjumlah Rp120.367.413.861,00 dengan mutasi tambah senilai Rp26.035.945.638,00 dan mutasi kurang senilai Rp17.602.164.414,00 atas penyesuaian terhadap data piutang pada aplikasi V-Tax. Piutang PBB-P2 berdasarkan lokasi terdiri dari:

Tabel 5.92. Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024

No.	Lokasi	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)
1.	Kecamatan Jekan Raya	70.889.007.178,00
2.	Kecamatan Rakumpit	934.571.336,00
3.	Kecamatan Sabangau	8.767.027.953,00
4.	Kecamatan Bukit Batu	5.230.399.963,00
5.	Kecamatan Pahandut	34.546.407.431,00
Jumlah		120.367.413.861,00

5.3.1.1.10.11. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	91.542.350,00

Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada BPPRD per 31 Desember tahun 2024 senilai Rp0,00 dengan mutasi kurang senilai Rp91.542.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2024

No.	Sub Rincian Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	89.556.750,00	-89.556.750,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Sub Rincian Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
2.	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	1.985.600,00	-1.985.600,00
Jumlah		0,00	91.542.350,00	-91.542.350,00

5.3.1.1.11. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.160.623.438,00	2.285.182.734,00

Saldo Piutang Retribusi pada tahun 2024 adalah senilai Rp2.160.623.438,00 berkurang senilai Rp124.559.296,00 dibandingkan tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan	166.732.600,00	166.732.600,00	0,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	19.365.000,00	-19.365.000,00
3.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	86.269.645,00	-86.269.645,00
4.	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	662.753.565,00	673.463.341,00	-10.709.776,00
5.	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.307.816.740,00	1.316.031.615,00	-8.214.875,00
6.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23.320.533,00	23.320.533,00	0,00
Jumlah		2.160.623.438,00	2.285.182.734,00	-124.559.296,00

Adapun mutasi Piutang Retribusi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95. Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	PIUTANG 2023	MUTASI		PIUTANG 2024
		per 31 DES 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	per 31 DES 2024
1.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	582.115.338,00	0,00	0,00	582.115.338,00
	Sewa Tanah	558.794.805,00	0,00	0,00	558.794.805,00
	Retribusi IMB	23.320.533,00	0,00	0,00	23.320.533,00
2.	Dinas Perhubungan	19.365.000,00	0,00	19.365.000,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	19.365.000,00	0,00	19.365.000,00	0,00
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah/Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.430.700.151,00	519.860.125,00	538.784.776,00	1.411.775.500,00
	Sewa Blok Pasar	1.316.031.615,00	341.160.125,00	349.375.000,00	1.307.816.740,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	PIUTANG 2023	MUTASI		PIUTANG 2024
		per 31 DES 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	per 31 DES 2024
	Sewa Tanah	114.668.536,00	178.700.000,00	189.409.776,00	103.958.760,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	166.732.600,00	0,00	0,00	166.732.600,00
	Retribusi Kebersihan Pasar	166.732.600,00	0,00	0,00	166.732.600,00
5.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	86.269.645,00	0,00	86.269.645,00	0,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	86.269.645,00	0,00	86.269.645,00	0,00
Jumlah		2.285.182.734,00	519.860.125,00	644.419.421,00	2.160.623.438,00

Retribusi Sewa Tanah dan Retribusi IMB yang dikelola oleh BPPRD merupakan limpahan piutang dari Dinas Tata Kota. Dimana pada saat pelimpahan tidak dilengkapi dengan data pendukung, sehingga pihak BPPRD kesulitan untuk melakukan penagihan yang mengakibatkan tidak terdapat pengurangan atas piutang sewa tanah dan retribusi IMB pada BPPRD.

Piutang Retribusi per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.96. Piutang Retribusi per jenis per SKPD per 31 Desember 2024

Piutang Retribusi	Saldo 31 Des 2024
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	166.732.600,00
Dinas Lingkungan Hidup	166.732.600,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	662.753.565,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	103.958.760,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	558.794.805,00
Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.307.816.740,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.307.816.740,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23.320.533,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	23.320.533,00
Jumlah	2.160.623.438,00

Penjelasan masing-masing rincian obyek Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

5.3.1.1.11.1. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	166.732.600,00	166.732.600,00

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diserahkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 870/1168/DPRKPP/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 perihal Serah Terima Pengalihan Berkas/ Dokumen Piutang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada tahun 2023 senilai Rp166.732.600,00 dan pada tahun 2024 senilai Rp166.732.600,00 terdiri dari



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

piutang yang belum tertagih dari tahun 2013 senilai Rp80.663.000,00, piutang pada tahun 2018 senilai Rp41.280.000,00 dan piutang pada tahun 2019 senilai Rp44.789.600,00.

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.11.2. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	19.365.000,00

Piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Rincian Piutang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palangka Raya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97. Piutang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2024

No.	Objek Piutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Anang Marzuki	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
2.	Rusiah Oktalia	0,00	3.150.000,00	-3.150.000,00
3.	Niko Asdriadi	0,00	400.000,00	-400.000,00
4.	Ahmad Sarwani/ H. Muhyani	0,00	750.000,00	-750.000,00
5.	Dadi	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00
6.	Dion Setiady	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
7.	Anang Marzuki/ Soto Hasan	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
8.	M. Dahlan	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
9.	Zainal	0,00	875.000,00	-875.000,00
10.	Pahmai/Marhat	0,00	450.000,00	-450.000,00
11.	Marlina/ Toko Andri Afri	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
12.	LSM Senator 2000 Antang Barito/Rediansyah/Iqbal	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
13.	Abdul Gani	0,00	1.890.000,00	-1.890.000,00
14.	Khoirul Awaludin	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
	Jumlah	0,00	19.365.000,00	-19.365.000,00

Berdasarkan surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Tengah atas penanggung hutang Anang Marzuki, dkk sebanyak 14 orang, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan Surat Nomor 1137/DISHUB.I/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah perihal Permohonan Pertimbangan Penghapusan Bersyarat Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum atas nama Anang Marzuki, dkk.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah dengan surat Nomor S-179/WKN.12/2022, tanggal 12 Agustus 2022 tentang pertimbangan penghapusan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

secara bersyarat piutang daerah atas nama Anang Marzuki, dkk, terhadap penanggung hutang dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusannya secara bersyarat.

Berdasarkan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah retribusi parkir di tepi jalan umum kepada Wali Kota Palangka Raya. Penghapusan piutang daerah retribusi parkir di tepi jalan umum secara bersyarat ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/340/2022 tanggal 16 September 2022, tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah atas nama Anang Marzuki dan kawan-kawan.

Kemudian berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya dan Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Tengah tentang Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas atas nama Anang Marzuki dan kawan-kawan dengan total nilai Rp19.365.000,00, maka seluruh saldo Piutang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2024 pada Dinas Perhubungan dinyatakan Lunas.

Tabel 5.98. Daftar Piutang Daerah yang dihapuskan secara mutlak per 31 Desember 2024

No.	Identitas Penanggung Hutang	Nilai Yang Dihapuskan (Rp)	Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
1.	RUSIAH OKTALIA Jl. A. Yani Gg. Sepakat No. 52 RT/RW 003/008 Kelurahan Langkai	3.150.000,00	S-2/KNL.1201/2025	02/01/2025	Palangka Raya
2.	KHOIRUL AWALUDIN Jl. G. Obos I No. 06 RT/RW 001/001 Kelurahan Menteng	2.250.000,00	S-6/KNL.1201/2025	02/01/2025	Palangka Raya
3.	ABDUL GANI Jl. Dahlia No. 53/54 RT/RW 003/005 Kelurahan Langkai	1.890.000,00	S-1/KNL.1201/2025	02/01/2025	Palangka Raya
4.	LSM SENATOR 2000 ANTANG BARITO/ REDIANSYAH/ IQBAL Jl. S. Parman Gg. Putra No. 40 RT/RW 002/017 Kelurahan Langkai	1.800.000,00	S-3/KNL.1201/2025	02/01/2025	Palangka Raya
5.	M. DAHLAN Jl. Permata RTA Milono Km 7 Perum Karyza RT/RW 008/013 Kelurahan Pahandut	1.000.000,00	S-7/KNL.1201/2025	02/01/2025	Palangka Raya
6.	DION SETIADY Jl. Bakti II No. 17 RT/RW 001/003 Kelurahan Langkai	1.200.000,00	S-1221/KNL.1201/2024	05/12/2024	Palangka Raya
7.	ZAINAL Jl. Kalimantan No. 002 RT/RW 005/021 Kelurahan Pahandut	875.000,00	S-1215/KNL.1201/2024	06/12/2024	Palangka Raya
8.	DADI Jl. Mendawai I RT/RW 002/004 Kelurahan Palangka	1.350.000,00	S-5/KNL.1201/2025	02/01/2025	Palangka Raya



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Identitas Penanggung Hutang	Nilai Yang Dihapuskan (Rp)	Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
9.	NIKO ASDRIADI Jl. Mendawai Gg. Mandiri No. 23 RT/RW 002/004 Kelurahan Pahandut	400.000,00	S-1223/KNL.1201/2024	06/12/2024	Palangka Raya
10.	ANANG MARZUKI/SOTO HASAN Jl. Soeprapto No. 53 RT/RW 001/001 Kelurahan Palangka	1.850.000,00	S-1222/KNL.1201/2024	06/12/2024	Palangka Raya
11.	ANANG MARZUKI Jl. Soeprapto No. 53 RT/RW 001/001 Kelurahan Palangka	1.200.000,00	S-4/KNL.1201/2025	02/01/2025	Palangka Raya
12.	PAHMI/MARHAT Jl. A. Yani Gg. Sepakat No. 52 RT/RW 003/008 Kelurahan Langkai	450.000,00	S-1273/KNL.1201/2024	30/12/2024	Palangka Raya
13.	MARLINA/TOKO ANDRI AFRI Jl. Tjilik Riwut Km 4 No. 36 RT/RW 002/002 Kelurahan Bukit Tunggul	1.200.000,00	S-1275/KNL.1201/2024	31/12/2024	Palangka Raya
14.	AHMAD SARWANI/H. MUHYANI Jl. Dr Murjani Gg. Sari No. 45 RT/RW 001/010 Kelurahan Pahandut	750.000,00	S-1274/KNL.1201/2024	31/12/2024	Palangka Raya

5.3.1.1.11.3. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	86.269.645,00

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Rincian Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024

No.	Identitas Penanggung Hutang	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	PT. Tower Bersama	0,00	34.507.858,00	-34.507.858,00
2.	PT. Solusi Kreasi Pratama	0,00	46.832.093,00	-46.832.093,00
3.	PT. Prima Media Selaras	0,00	4.929.694,00	-4.929.694,00
	Jumlah	0,00	86.269.645,00	-86.269.645,00

5.3.1.1.11.4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	662.753.565,00	673.463.341,00

Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.100. Piutang Retribusi Kekayaan Daerah per 31 Desember 2024

No.	Retribusi Kekayaan Daerah atas Reklame	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Pengalihan Piutang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	407.435.000,00	407.435.000,00	0,00
2.	Sewa tanah untuk pemasangan tiang reklame	140.401.365,00	140.401.365,00	0,00
3.	Piutang atas pajak reklame sejak tahun 2019:	10.958.440,00	10.958.440,00	0,00
	- Toko Jordan (Yukadi Prinata)	54.000,00	54.000,00	0,00
	- Ruqyah Learning Center (Chandra Mukti Wijaya)	405.000,00	405.000,00	0,00
	- CV. Wiratama (Yudhy Timbojaya Pangaribuan)	7.050.240,00	7.050.240,00	0,00
	- Partai Demokrat (Edy Sahbana)	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
	- Eduka Buana	2.419.200,00	2.419.200,00	0,00
4	Sewa tanah pada DPKUKMP	103.958.760,00	114.668.536,00	-10.709.776,00
Jumlah		662.753.565,00	673.463.341,00	-10.709.776,00

Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diserahkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 870/1234/DPRKPP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 perihal Serah Terima Pengalihan Berkas/ Dokumen Piutang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke BPPRD Kota Palangka Raya senilai Rp407.435.000,00, sewa tanah untuk pemasangan tiang reklame dan penyesuaian atas penerbitan SKP dan SKR atas pajak reklame tahun 2019 belum dibayar s/d 31 Desember tahun 2024 senilai Rp140.401.365,00. Pada tahun 2019 terdapat penambahan piutang atas pajak reklame senilai Rp10.958.440,00 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum ada pembayaran.

Piutang Sewa Tanah Pemerintah Kota Palangka Raya yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp114.668.536,00 dan per tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp103.958.760,00 terdiri dari piutang tahun 2016 senilai Rp1.274.760,00, tahun 2019 senilai Rp288.000,00, tahun 2020 senilai Rp3.552.000,00, tahun 2021 senilai Rp9.036.000,00, tahun 2022 senilai Rp1.584.000,00, piutang tahun 2023 senilai Rp5.186.000,00 dan piutang tahun 2024 senilai Rp83.038.000,00.

Penambahan piutang selama tahun 2024 senilai Rp178.700.000,00 serta pengurangan piutang selama tahun 2024 senilai Rp189.409.776,00. Piutang tersebut muncul karena adanya penerapan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 126 tahun 2010 tentang Penetapan Sewa Tanah Pada Kawasan Tertentu, di mana pada Diktum kedua disebutkan bahwa tarif sewa tanah di kawasan Jalan Christopel Mihing, Jalan Jawa-Halmahera (Blauran), Jalan Yos Sudarso Ujung



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Tanaman Hias) dan Jalan Yos Sudarso Ujung (Bahu Jalan), hal itu menyebabkan munculnya tagihan piutang terhadap penyewa tanah berikut ini:

Tabel 5.101. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

No.	Retribusi Kekayaan Daerah atas Sewa Tanah	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Jln. Christopel Mihing	288.000,00	288.000,00	0,00
2.	Jln. Jawa - Halmahera (Blauran)	1.274.760,00	2.038.536,00	-763.776,00
3.	Jln. Yos. Sudarso Ujung (Tanaman Hias)	87.040.000,00	84.440.000,00	2.600.000,00
4.	Jln. Yos. Sudarso Ujung (Bahu Jalan)	14.966.000,00	26.324.000,00	-11.358.000,00
5.	Kuliner Yos. Sudarso	390.000,00	1.578.000,00	-1.188.000,00
Jumlah		103.958.760,00	114.668.536,00	-10.709.776,00

5.3.1.11.5. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Piutang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.307.816.740,00	1.316.031.615,00

Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun 2024 berupa sewa blok pasar senilai Rp1.307.816.740,00, berkurang senilai Rp8.214.875,00 dari tahun 2023 senilai Rp1.316.031.615,00. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan selama tahun 2024 bertambah senilai Rp341.160.125,00 dan berkurang senilai Rp349.375.000,00. Berkurangnya piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikarenakan pembayaran piutang oleh penyewa blok pasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

No.	Piutang Sewa Blok Pasar	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Piutang Sewa Blok Pasar tahun 2005 & 2006	149.520.000,00	149.520.000,00	0,00
2.	Pasar Datah Manuah	11.288.000,00	8.670.000,00	2.618.000,00
3.	Pasar KUDP	40.572.750,00	54.849.000,00	-14.276.250,00
4.	Pasar Kahayan Tradisional Modern	63.235.990,00	69.117.615,00	-5.881.625,00
5.	Pasar Kahayan Baru	981.857.000,00	1.028.329.000,00	-46.472.000,00
6.	Pasar Kios Mini	2.726.000,00	5.546.000,00	-2.820.000,00
7.	Pertokoan S.Parman	58.617.000,00	0,00	58.617.000,00
Jumlah		1.307.816.740,00	1.316.031.615,00	-8.214.875,00

Piutang Sewa Blok Tahun 2005 - 2006 senilai Rp149.520.000,00 tidak dapat ditelusuri karena banyak pedagang yang tidak aktif lagi setelah terjadi kebakaran Pasar Kahayan sebanyak 2 kali yaitu pada hari selasa tanggal 26 Juli 2005 dan pada hari minggu tanggal 21 Mei 2006 (Surat Keterangan Lurah Palangka). Pada tahun 2023 telah ditetapkan SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/327/2023 terkait Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah atas Sewa Blok Pasar



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kahayan yang terbakar Tahun 2005-2006 dengan nilai Rp149.520.000,00 dan Sewa Blok Pasar Tahun 2010-2019 dengan nilai Rp265.319.265,00.

5.3.1.1.11.6. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	23.320.533,00	23.320.533,00

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan penerbitan SKP dan SKR atas pajak retribusi IMB pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 yang belum dibayar s/d 31 Desember tahun 2024.

Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diserahkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 870/1234/DPRKPP/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 perihal Serah Terima Pengalihan Berkas/ Dokumen Piutang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya ke BPPRD Kota Palangka Raya.

5.3.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.780.124.093,00	4.135.514.216,82

Piutang Lain-lain PAD yang sah dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Palangka Raya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp60.000,00 dan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp800,00; dan
- Piutang Pendapatan BLUD sejumlah Rp3.780.063.293,00 berupa Piutang SWAB sebesar Rp365.382.243,00; Piutang perawatan pasien sebesar Rp28.696.850,00; Piutang Kemenkes/COVID sebesar Rp3.385.984.200,00.

Adapun Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.103. Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	PIUTANG 2023	MUTASI		PIUTANG 2024
		per 31 DES 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	per 31 DES 2024
1.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota	4.133.283.136,00	17.820.300,00	371.040.143,00	3.780.063.293,00
	Piutang SWAB dengan pihak ketiga	423.047.900,00	0,00	57.665.657,00	365.382.243,00
	Piutang perawatan pasien	14.386.550,00	17.820.300,00	3.510.000,00	28.696.850,00
	Piutang KEMENKES /COVID	3.385.984.200,00	0,00	0,00	3.385.984.200,00
	Piutang Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.864.486,00	0,00	309.864.486,00	0,00
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	800,00	0,00	800,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	PIUTANG 2023	MUTASI		PIUTANG 2024
		per 31 DES 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	per 31 DES 2024
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	800,00	0,00	800,00
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	2.231.080,82	0,00	2.231.080,82	0,00
	Pendapatan Bunga TDF	2.231.080,82	0,00	2.231.080,82	0,00
Jumlah		4.135.514.216,82	17.881.100,00	373.271.223,82	3.780.124.093,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.104. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Saldo Akhir (Rp)
Piutang Pendapatan BLUD	3.780.063.293,00
Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya	3.780.063.293,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	60.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	800,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	800,00
Jumlah	3.780.124.093,00

5.3.1.1.12.1. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	2.231.080,82

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan remunerasi saldo DBH pada Rekening TDF-TKD yang belum dilakukan penarikan dana oleh Pemda. Remunerasi TDF telah disalurkan ke rekening kas umum daerah kota Palangka Raya pada tahun 2023 namun baru dilakukan pencatatan pada tahun 2024 sehingga saldo Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 bernilai Rp0,00.

5.3.1.1.12.2. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	60.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang merupakan kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.000,00.

5.3.1.1.12.3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	800,00	0,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan kelebihan pembayaran belanja modal alat rumah tangga-mebel pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp800,00.

5.3.1.1.12.4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	309.864.486,00

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim BPK RI, diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Pelayanan RSUD Kota Palangka Raya sejumlah Rp309.864.486,00. Seluruh piutang tersebut telah dilunasi pada tahun 2024 sehingga saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2024 bernilai Rp0,00.

5.3.1.1.12.5. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.780.063.293,00	3.823.418.650,00

Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD per 31 Desember 2024 sejumlah Rp3.780.063.293,00 terdiri dari:

a. Piutang SWAB

Piutang SWAB dengan pihak ketiga merupakan piutang yang diakibatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama. Adapun saldo piutang swab per 31 Desember 2024 sebesar Rp365.382.243,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.105. Piutang SWAB dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	PT. Asmin Bara Bronang	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2.	Klinik Bersalin Barito Shinta	363.709.343,00	420.275.000,00	-56.565.657,00
3.	RSI PKU Muhammadiyah	222.900,00	442.900,00	-220.000,00
4.	Laboratorium Klinik Generik Plus	0,00	440.000,00	-440.000,00
5.	Laboratorium Mitra Sejahtera	0,00	440.000,00	-440.000,00
Jumlah		365.382.243,00	423.047.900,00	-57.665.657,00

b. Piutang Perawatan Pasien

Piutang perawatan pasien merupakan piutang pasien pada RSUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan pernyataan pelunasan akan dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo. Saldo piutang perawatan pasien per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.696.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106. Piutang Pelayanan Persalinan per 31 Desember 2024

No.	Nama Pasien	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Ny. Indah Hati	6.200.450,00	6.200.450,00	0,00
2.	Ny. Sosi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.	Alesha Shaqueena	1.458.900,00	1.458.900,00	0,00
4.	Ny. Raya Diwil	361.000,00	361.000,00	0,00
5.	Ny.Kamsiah/By Ny.Kamsiah	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00
6.	Ny.Janah	1.057.800,00	1.057.800,00	0,00
7.	Ny.Juwita	1.643.400,00	1.643.400,00	0,00
8.	Ny.Dayana / By.Dayana	6.077.500,00	0,00	6.077.500,00
9.	An.Ahmad Ghazali Rahman	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
10.	Rini Yulianti	804.600,00	0,00	804.600,00
11.	Yusri	167.000,00	0,00	167.000,00
12.	Revand	6.212.200,00	0,00	6.212.200,00
Jumlah		28.696.850,00	14.386.550,00	14.310.300,00

c. Piutang Kemenkes/COVID-19

Piutang Kemenkes/COVID-19 per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.385.984.200,00 merupakan piutang Kementerian Kesehatan atas pelayanan pasien COVID-19 pada RSUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan Pasien COVID-19 di RSUD Kota Palangka Raya.

5.3.1.1.13. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	29.995.578.751,00	14.971.812.545,00

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/100/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

IV (Empat) Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Yang Akan Disalurkan pada Tahun Anggaran 2025, piutang transfer Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 yaitu sejumlah Rp29.995.578.751,00. Seluruh Piutang Transfer Antar Daerah tersebut telah disalurkan ke RKUD pada tahun 2025 sehingga saldo pada 31 Desember 2024 sebesar Rp29.995.578.751,00.

Tabel 5.107. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024

Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.549.384.432,00	3.429.547.139,00	5.119.837.293,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.563.383.280,00	1.946.161.258,00	5.617.222.022,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.844.366.026,00	9.577.956.606,00	4.266.409.420,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.445.013,00	18.147.542,00	20.297.471,00
Jumlah	29.995.578.751,00	14.971.812.545,00	15.023.766.206,00

5.3.1.1.14. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.776.840.737,79	249.409.819,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sejumlah Rp1.527.430.918,79 terdiri dari:

Tabel 5.108. Piutang Lainnya per 31 Desember 2024

Piutang Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.716.620.737,79	155.750.000,00	1.560.870.737,79
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	60.220.000,00	93.659.819,00	-33.439.819,00
Jumlah	1.776.840.737,79	249.409.819,00	1.527.430.918,79

5.3.1.1.14.1. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.716.620.737,79	155.750.000,00

Bagian Lancar Sumber dari Kerugian Daerah (TGR) Pihak III periode 31 Desember 2024 sebesar Rp1.716.620.737,79, bertambah sebesar Rp1.563.370.737,79 berupa kelebihan pembayaran berdasarkan temuan BPK RI dan berkurang sebesar Rp2.500.000,00 yaitu pembayaran piutang tahun 2018. Bagian Lancar Sumber dari Kerugian Daerah (TGR) Pihak III periode 31 Desember 2024 merupakan bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terdiri dari:

1. Tagihan an. Sudi Hardelan No Reg. SPKMKN/D1/SPKMKD.TPKD/V/2018 tanggal ditanda tangani SPKMKD/D 28 Mei 2018 sebesar Rp146.000.000,00;
2. Tagihan an. Abdurrahman (Kepala LRKM Al-Ikhlas) No Reg SPKMKD 138/SPKMKD.TPKD/VI/2019 sebesar Rp9.750.000,00;
3. Tagihan pada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu senilai Rp18.110.000,00;
4. Tagihan pada Dinas Pendidikan senilai Rp218.358.327,50;



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5. Tagihan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp236.006.494,53;
6. Tagihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp978.311.056,08; dan
7. Tagihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya senilai Rp112.584.859,68.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi perjenis per SKPD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.109. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Saldo Akhir (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.716.620.737,79
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.716.620.737,79
Jumlah	1.716.620.737,79

5.3.1.1.14.2 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	60.220.000,00	93.659.819,00

Saldo Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per 31 Desember 2024 berupa Piutang Sapi Gaduhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp60.220.000,00.

Adapun mutasi Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.110. Mutasi Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Piutang 2023	Mutasi		Piutang 2024
		Per 31 Des 2023	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2024
1.	Dinas Perikanan	18.181.819,00	0,00	18.181.819,00	0,00
	Kelotok	18.181.819,00	0,00	18.181.819,00	0,00
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.478.000,00	0,00	15.258.000,00	60.220.000,00
	Sapi Gaduhan	75.478.000,00	0,00	15.258.000,00	60.220.000,00
	Jumlah	93.659.819,00	0,00	33.439.819,00	60.220.000,00

Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.111. Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024

Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	Saldo Akhir (Rp)
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	60.220.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60.220.000,00
Jumlah	60.220.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.1.14.2.1. Piutang Kelotok

Piutang Kelotok	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	18.181.819,00

Piutang Kelotok merupakan pinjaman berupa pemberian kelotok seharga Rp5.000.000,00 per buah sebanyak 15 buah dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp75.000.000,00. Pada awalnya, nelayan menyicil pembayaran kelotok tersebut sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 20 Bulan sehingga dengan total pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 untuk satu buah kelotok. Piutang Kelotok saat ini dikelola oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kota Palangka Raya yang sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan karena beberapa anggota kelompok telah melakukan pelunasan cicilan piutang Perahu Kelotok sebesar Rp56.818.181,00.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dengan Surat Nomor: 900/1709/Bid.II/BPKAD/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, telah menyerahkan Pengurusan Piutang Daerah (Piutang Kelotok) kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Kalimantan Tengah yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor SP3N-006/PUPNC.12/2019 tanggal 9 November 2019, menerima penyerahan pengurusan Piutang Daerah (Piutang Kelotok).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya dengan Surat Nomor: S-1058 s/d S-1072/WKN.12/KNL.01/2019 tanggal 22 November 2019, melakukan panggilan terakhir kepada beberapa anggota Kelompok Tani Usaha Bersama "Tani Sejahtera". Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya dengan Surat Nomor: S-1112 s/d S-1123/WKN.12/KNL.01/2019 tanggal 22 November 2019, melakukan panggilan terakhir kepada beberapa anggota Kelompok Tani Usaha Bersama "Tani Sejahtera" yang belum memenuhi panggilan pertama. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Nomor: PJPN-001 s/d PJPN-012/PUPNC.12/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Usaha Bersama "Tani Sejahtera".

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya dengan Surat Nomor: S-1186/WKN.12/KNL.01/2019, memberitahukan bahwa kegiatan Pelaksanaan Penyampaian Surat Paksa dan Penelitian Lapangan telah dilaksanakan sejak bulan Januari Tahun 2020 dan telah diselesaikan.

Berdasarkan surat Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Nomor 391/Diskan/Sekrt.2/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Penghapusan Bersyarat Piutang Kelotok dan Surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Tengah atas penanggung hutang terdapat delapan anggota Kelompok Tani Usaha Bersama "Tani Sejahtera" yang dipertimbangkan untuk dihapus utang secara bersyarat, dan surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor 900/651/BID.III/ BPKAD/IV/2022, tanggal



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

11 April 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Penghapusan Bersyarat Piutang Kelotok. Sehubungan dengan surat dimaksud, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah dengan surat Nomor S-99/WKN.12/2022, tanggal 22 April 2022 bahwa terhadap penanggung hutang atas nama M. Jamadi, dkk dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusannya.

Berdasarkan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah kelotok kepada Wali Kota Palangka Raya. Penghapusan piutang daerah kelotok secara bersyarat ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/296/2022 tanggal 4 Agustus 2022, tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah atas nama M. Jamadi dan kawan-kawan.

Pada tahun 2024 dilakukan usulan penghapusan secara mutlak berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor S-308/WKN.12/2024 tanggal 15 Oktober 2024, hal Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah atas nama M. Jamadi, dkk menyatakan dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti proses penghapusan secara mutlaknya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112. Piutang Daerah yang dihapuskan secara mutlak per 31 Desember 2024

No.	Identitas Penanggung Hutang	Nilai Yang Dihapuskan (Rp)	Surat Pernyataan PSBDT		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
1.	M. JAMADI Jl. Wisata II RT/RW 05/II Kelurahan Pahandut Seberang	4.250.000,00	PSBDT- 001/PUPNC.12/2019	02/10/2019	Palangka Raya
2.	SAIFUL ANSARI Jl. Pantai Cemara Labat I RT/RW 01/I Kelurahan Pahandut Seberang	3.750.000,00	PSBDT- 002/PUPNC.12/2019	02/10/2019	Palangka Raya
3.	AHMAD FAUJI Jl. Kalimantan Gg. Mandau RT/RW 03/XVI Kelurahan Pahandut	3.750.000,00	PSBDT- 003/PUPNC.12/2019	06/12/2019	Palangka Raya
4.	ARJANI Jl. Pantai Cemara Labat II RT/RW 04/II Kelurahan Pahandut Seberang	3.227.273,00	PSBDT- 005/PUPNC.12/2019	06/12/2019	Palangka Raya
5.	M. ARDANI Jl. Pantai Cemara Labat I RT/RW 03/I Kelurahan Pahandut Seberang	3.204.546,00	PSBDT- 004/PUPNC.12/2020	17/09/2020	Palangka Raya

Kemudian ditetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/469/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Atas Nama M.Jamadi dan Kawan-kawan. Sehingga saldo piutang klotok pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dengan mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.113. Rincian Piutang Kelotok per 31 Desember 2024

No.	Identitas Penanggung Utang	Diserahkan Ke PUPN	PSBDT	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)
1.	M. Jamadi	900/1709/Bid.III/BPKAD/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019	PSBDT-01/PUPNC.12/2019 tanggal 02 Oktober 2019	0,00	4.250.000,00
2.	Arjani	900/1709/Bid.III/BPKAD/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019	PSBDT-005/PUPNC.12/2019 tanggal 06 Desember 2019	0,00	3.227.273,00
3.	Ahmad Fauji	900/1709/Bid.III/BPKAD/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019	PSBDT-003/PUPNC.12/2019 tanggal 06 Desember 2019	0,00	3.750.000,00
4.	Saiful Ansari	900/1709/Bid.III/BPKAD/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019	PSBDT-002/PUPNC.12/2019 tanggal 02 Oktober 2019	0,00	3.750.000,00
5.	M. Ardani	900/1709/Bid.III/BPKAD/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019	PSBDT-004/PUPNC.12/2020 tanggal 17 September 2020	0,00	3.204.546,00
Jumlah				0,00	18.181.819,00

5.3.1.1.14.2.2. Piutang Sapi Gaduhan

Piutang Sapi Gaduhan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	60.220.000,00	75.478.000,00

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendapatkan pelimpahan sapi mulai dari pembibitan sampai penggemukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dengan pembagian hasil 60% untuk Pemerintah Kota khusus pada pembibitan sapi APBD I Tahun 2010 dan 2009 sedangkan untuk APBD II tidak dilakukan pembagian hasil. Rincian piutang sapi gaduhan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.114. Piutang Sapi Gaduhan per 31 Desember 2024

No.	Uraian Piutang	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	12.906.000,00	13.881.000,00	-975.000,00
3.	Sapi Bali Sumber APBD-II TA 2010	17.750.000,00	18.375.000,00	-625.000,00
4.	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2009	7.000.000,00	12.225.000,00	-5.225.000,00
5.	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2008	5.863.000,00	13.008.000,00	-7.145.000,00
6.	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2007	2.576.000,00	3.864.000,00	-1.288.000,00
Jumlah		50.595.000,00	65.853.000,00	-15.258.000,00

Jumlah tersebut belum termasuk piutang dengan keterangan penggadu meninggal dunia dan sapi mati, berikut rinciannya:

Tabel 5.115. Piutang dengan Keterangan Penggadu

No.	Nama	Uraian	Keterangan	Harga (Rp)	Pelunasan (Rp)	Sisa (Rp)	Saldo per 31 Des 2024
1.	Kusmedi*	Sapi Bali Sumber	Penggadu	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Nama	Uraian	Keterangan	Harga (Rp)	Pelunasan (Rp)	Sisa (Rp)	Saldo per 31 Des 2024
		APBD-I TA 2009	Meninggal Dunia				
2.	Wayan Tantre*	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	Sapi Mati	3.000.000,00	1.375.000,00	1.625.000,00	975.000,00
3.	Riadi*	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	Sapi Mati	3.000.000,00	1.125.000,00	1.875.000,00	1.125.000,00
4.	Sumadi*	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	Sapi Mati	3.000.000,00	1.375.000,00	1.625.000,00	975.000,00
5.	Daniel Ratih*	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	Sapi Mati	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00
6.	Supiran	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	Sapi Mati	3.000.000,00	1.375.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
7.	Slamet Rianto	Sapi Bali Sumber APBD-I TA 2010	Sapi Mati	3.000.000,00	1.375.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
Jumlah				21.000.000,00	7.125.000,00	13.875.000,00	9.625.000,00

* Kerjasama dengan Provinsi (60:40)

Saldo piutang sapi gaduhan di tahun 2024 sebesar Rp50.595.000,00 ditambah saldo piutang sapi gaduhan dengan keterangan penggaduh meninggal dunia dan sapi mati sebesar Rp9.625.000,00 merupakan rincian dari Piutang Sapi Gaduhan sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp60.220.000,00. Terdapat pengurangan pada tahun 2024 sejumlah Rp15.258.000,00.

5.3.1.1.15. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	-101.887.412.388,42	-75.038.978.120,00

Penyisihan piutang yang dilakukan sampai dengan tahun 2024 senilai Rp101.887.412.388,42. Penyisihan Piutang per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.116. Penyisihan Piutang per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	106.614.834,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	106.614.834,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	441.073.753,25
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	441.073.753,25
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	215.096.999,99
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	215.096.999,99
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.502.504.287,75
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.502.504.287,75
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Sumber Lain	117.434.426,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	117.434.426,00
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	248.408,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	248.408,00
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	334.064.574,33
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	334.064.574,33
Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	4.750,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.750,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	29.946.269,38
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	29.946.269,38
Penyisihan Piutang PBBP2	90.238.878.018,52
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	90.238.878.018,52
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	166.732.600,00
Dinas Lingkungan Hidup	166.732.600,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	574.671.355,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	15.876.550,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	558.794.805,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.175.339.506,25
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.175.339.506,25
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	23.320.533,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	23.320.533,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	300,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	300,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4,00
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	3.590.217.021,50
Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya	3.590.217.021,50
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	42.746.922,16
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42.746.922,16
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	37.816.916,40
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37.816.916,40
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.221.830,13
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	69.221.830,13
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	192.225,07
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	192.225,07
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat	60.220.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60.220.000,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	161.066.853,69
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	161.066.853,69
Jumlah	101.887.412.388,42



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.117. Perhitungan Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-sebelum jatuh tempo	lewat jatuh tempo s.d. 1 tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama	1-3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	> 3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	
			0,50%	10%	50%	100%	
Dinas Lingkungan Hidup		166.732.600,00	-	-	-	166.732.600,00	166.732.600,00
Retribusi Kebersihan Pasar	2013	80.663.000,00				80.663.000,00	80.663.000,00
Retribusi Kebersihan Pasar	2018	41.280.000,00				41.280.000,00	41.280.000,00
Retribusi Kebersihan Pasar	2019	44.789.600,00				44.789.600,00	44.789.600,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		129.891.615.154,37	90.354.435,35	-	15.343.100.862,50	81.134.526.361,37	96.567.981.659,22
Piutang PBB	1994 sd 2017	39.361.002.339,00				39.361.002.339,00	39.361.002.339,00
Piutang PBB	2018	7.428.007.931,00				7.428.007.931,00	7.428.007.931,00
Piutang PBB	2019	7.966.290.969,00				7.966.290.969,00	7.966.290.969,00
Piutang PBB	2020	8.557.913.627,00				8.557.913.627,00	8.557.913.627,00
Piutang PBB	2021	11.754.874.951,00				11.754.874.951,00	11.754.874.951,00
Piutang PBB	2022	12.878.643.972,00			6.439.321.986,00		6.439.321.986,00
Piutang PBB	2023	17.311.844.071,00			8.655.922.035,50		8.655.922.035,50
Piutang PBB	2024	15.108.836.001,00	75.544.180,01				75.544.180,01
Piutang Pajak Hotel	2015	24.555.490,00				24.555.490,00	24.555.490,00
Piutang Pajak Hotel	2016	9.596.444,00				9.596.444,00	9.596.444,00
Piutang Pajak Hotel	2022	64.300.000,00			32.150.000,00		32.150.000,00
Piutang Pajak Hotel	2023	80.625.800,00			40.312.900,00		40.312.900,00
Piutang Pajak Restoran	2015	65.599.000,00				65.599.000,00	65.599.000,00
Piutang Pajak Restoran	2019	251.000,00				251.000,00	251.000,00
Piutang Pajak Restoran	2020	116.417.499,00				116.417.499,00	116.417.499,00
Piutang Pajak Restoran	2021	89.382.880,37				89.382.880,37	89.382.880,37
Piutang Pajak Restoran	2022	58.172.404,00			29.086.202,00		29.086.202,00
Piutang Pajak Restoran	2023	277.191.278,00			138.595.639,00		138.595.639,00
Piutang Pajak Restoran	2024	348.306.574,00	1.741.532,87				1.741.532,87
Piutang Pajak Hiburan	2015 s.d 2016	3.193.500,00				3.193.500,00	3.193.500,00
Piutang Pajak Hiburan	2017	205.603.500,00				205.603.500,00	205.603.500,00
Piutang Pajak Hiburan	2022	12.600.000,00			6.300.000,00		6.300.000,00
Piutang Pajak Parkir	2015	204.408,00				204.408,00	204.408,00
Piutang Pajak Parkir	2021	44.000,00				44.000,00	44.000,00
Piutang Pajak Galian C	2015	17.419.370,00				17.419.370,00	17.419.370,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Tahun	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-sebelum jatuh tempo	lewat jatuh tempo s.d. 1 tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama	1-3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	> 3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	
			0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pajak Galian C	2024	2.505.379.875,00	12.526.899,38				12.526.899,38
Piutang Pajak Air Tanah	2018	325.439.780,00				325.439.780,00	325.439.780,00
Piutang Pajak Air Tanah	2019	3.194.964,00				3.194.964,00	3.194.964,00
Piutang Pajak Air Tanah	2020	3.747.900,00				3.747.900,00	3.747.900,00
Piutang Pajak Air Tanah	2021	1.455.840,00				1.455.840,00	1.455.840,00
Piutang Pajak Air Tanah	2024	45.218.068,00	226.090,34				226.090,34
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	2024	950.000,00	4.750,00				4.750,00
Pajak Reklame	2015	3.165.018.534,00				3.165.018.534,00	3.165.018.534,00
Pajak Reklame	2016	148.292.658,00				148.292.658,00	148.292.658,00
Pajak Reklame	2017	1.106.011.873,00				1.106.011.873,00	1.106.011.873,00
Pajak Reklame	2018	5.392.080,00				5.392.080,00	5.392.080,00
Pajak Reklame	2019	57.123.560,00				57.123.560,00	57.123.560,00
Pajak Reklame	2021	18.942.500,00				18.942.500,00	18.942.500,00
Pajak Reklame	2023	2.824.200,00			1.412.100,00		1.412.100,00
Pajak Reklame	2024	62.196.550,00	310.982,75				310.982,75
Pajak Penerangan Jalan	2010	117.434.426,00				117.434.426,00	117.434.426,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2015	23.320.533,00				23.320.533,00	23.320.533,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah)	2015	344.741.500,00				344.741.500,00	344.741.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah)	2016	30.626.750,00				30.626.750,00	30.626.750,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah)	2017	172.468.115,00				172.468.115,00	172.468.115,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah)	2019	10.958.440,00				10.958.440,00	10.958.440,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian		1.411.775.500,00	1.023.068,75	1.484.050,00	3.612.312,50	1.185.096.625,00	1.191.216.056,25
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2005- 2006	149.520.000,00		-		149.520.000,00	149.520.000,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2010	440.625,00				440.625,00	440.625,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2011	34.084.600,00				34.084.600,00	34.084.600,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2012	194.813.850,00				194.813.850,00	194.813.850,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Tahun	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-sebelum jatuh tempo	lewat jatuh tempo s.d. 1 tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama	1-3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	> 3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	
			0,50%	10%	50%	100%	
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2013	63.208.100,00				63.208.100,00	63.208.100,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2014	37.328.600,00				37.328.600,00	37.328.600,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2015	59.498.800,00	-	-	-	59.498.800,00	59.498.800,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2016	136.267.065,00	-	-	-	136.267.065,00	136.267.065,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2017	153.291.000,00	-	-	-	153.291.000,00	153.291.000,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2018	161.821.750,00	-	-	-	161.821.750,00	161.821.750,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2019	165.385.875,00	-	-	-	165.385.875,00	165.385.875,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2020	3.903.900,00	-	-		3.903.900,00	3.903.900,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2021	11.381.700,00	-			11.381.700,00	11.381.700,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2022	5.640.625,00			2.820.312,50	-	2.820.312,50
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2023	9.654.500,00		965.450,00			965.450,00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan	2024	121.575.750,00	607.878,75				607.878,75
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	2016	1.274.760,00	-	-	-	1.274.760,00	1.274.760,00
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	2019	288.000,00	-	-	-	288.000,00	288.000,00
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	2020	3.552.000,00	-	-		3.552.000,00	3.552.000,00
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	2021	9.036.000,00	-			9.036.000,00	9.036.000,00
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	2022	1.584.000,00			792.000,00	-	792.000,00
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	2023	5.186.000,00		518.600,00			518.600,00
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah)	2024	83.038.000,00	415.190,00				415.190,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		60.220.000,00	-	-	-	60.220.000,00	60.220.000,00
Piutang Sapi Gaduhan (APBD 2007-2010)	2010	60.220.000,00				60.220.000,00	60.220.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		31.712.259.488,79	157.795.047,45	-	-	153.250.000,00	311.045.047,45
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2018	143.500.000,00				143.500.000,00	143.500.000,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2019	9.750.000,00				9.750.000,00	9.750.000,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2024	1.563.370.737,79	7.816.853,69				7.816.853,69



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Tahun	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-sebelum jatuh tempo	lewat jatuh tempo s.d. 1 tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama	1-3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	> 3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	
			0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2024	60.000,00	300,00				300,00
Piutang Transfer antar Daerah-Bagi Hasil Provinsi-Pajak Kendaraan Bermotor	2024	8.549.384.432,00	42.746.922,16				42.746.922,16
Piutang Transfer antar Daerah-Bagi Hasil Provinsi-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2024	7.563.383.280,00	37.816.916,40				37.816.916,40
Piutang Transfer antar Daerah-Bagi Hasil Provinsi-Pajak Air Permukaan	2024	38.445.013,00	192.225,07				192.225,07
Piutang Transfer antar Daerah-Bagi Hasil Provinsi-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2024	13.844.366.026,00	69.221.830,13				69.221.830,13
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		3.780.063.293,00	-	-	189.846.271,50	3.400.370.750,00	3.590.217.021,50
Piutang SWAB dengan pihak ketiga	2021	193.437.243,00			96.718.621,50		96.718.621,50
Piutang SWAB dengan pihak ketiga	2022	171.945.000,00			85.972.500,00		85.972.500,00
Piutang perawatan pasien	2021	7.200.450,00				7.200.450,00	7.200.450,00
Piutang perawatan pasien	2022	1.819.900,00				1.819.900,00	1.819.900,00
Piutang perawatan pasien	2023	5.366.200,00				5.366.200,00	5.366.200,00
Piutang perawatan pasien	2024	14.310.300,00			7.155.150,00		7.155.150,00
Piutang KEMENKES /COVID	2020	90.595.100,00				90.595.100,00	90.595.100,00
Piutang KEMENKES /COVID	2021	3.294.602.100,00				3.294.602.100,00	3.294.602.100,00
Piutang KEMENKES /COVID	2022	787.000,00				787.000,00	787.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		800,00	4,00	-	-	-	4,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Tahun	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-sebelum jatuh tempo	lewat jatuh tempo s.d. 1 tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama	1-3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	> 3 Tahun / >1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	
			0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel	2024	800,00	4,00				4,00
Jumlah		167.022.666.836,16	249.172.555,55	1.484.050,00	15.536.559.446,50	86.100.196.336,37	101.887.412.388,42

Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya melakukan penagihan terhadap piutang dengan kategori macet. Kemudian melakukan inventarisasi piutang mana saja yang memang tidak memungkinkan lagi untuk ditagih, dan akan diusulkan untuk dihapus melalui. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya Cabang Kalimantan Tengah.

5.3.1.1.16. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	224.397.000,00	0,00

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp224.397.000,00 atau mengalami peningkatan senilai Rp224.397.000,00 dibandingkan tahun 2023 yang bersaldo Rp0,00. Peningkatan tersebut merupakan Beban Dibayar Dimuka- Sewa Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118. Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024

Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin	Saldo Akhir (Rp)
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.700.000,00
Satpol PP	17.700.000,00
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	206.697.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.400.000,00
Dinas Sosial	31.806.000,00
Sekretariat Daerah	106.991.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	59.500.000,00
Jumlah	224.397.000,00

5.3.1.1.17. Persediaan

Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	90.039.711.066,23	56.894.333.691,70

Persediaan per 31 Desember 2024 terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.119. Rincian Persediaan per Sub Rincian Objek Persediaan per 31 Desember 2024

Persediaan	Saldo Akhir (Rp)
Bahan	9.613.812.382,11
Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.500.000,00
Bahan Kimia	75.884.527,50
Bahan/Bibit Tanaman	350.337.500,00
Isi Tabung Gas	7.280.000,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	87.680.680,00
Bahan Lainnya	9.089.129.674,61
Suku Cadang	46.393.373,58
Suku Cadang Alat Kedokteran	23.722.524,58
Suku Cadang Alat Laboratorium	9.370.849,00
Suku Cadang Lainnya	13.300.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3.453.383.686,96
Alat Tulis Kantor	805.293.483,33
Kertas dan Cover	155.562.520,00
Bahan Cetak	891.322.753,85
Benda Pos	21.260.000,00
Bahan Komputer	175.700.250,00
Perabot Kantor	140.445.485,00
Alat Listrik	855.761.721,00
Suvenir/Cendera Mata	54.437.316,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	353.600.157,78
Obat-obatan	6.728.605.702,17
Obat	5.258.270.244,18
Obat-obatan Lainnya	1.470.335.457,99
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	69.952.342.821,41
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	495.495.976,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	69.456.846.845,41
Natura dan Pakan	245.173.100,00
Natura	244.205.600,00
Pakan	967.500,00
Jumlah	90.039.711.066,23

Persediaan tersebut terbagi atas SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.120. Persediaan per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024

Persediaan	Saldo Akhir (Rp)
Bahan	9.613.812.382,11
Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.500.000,00
Dinas Kesehatan	3.500.000,00
Bahan Kimia	75.884.527,50
Dinas Kesehatan	64.385.927,50
Dinas Lingkungan Hidup	11.498.600,00
Bahan/Bibit Tanaman	350.337.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	350.337.500,00
Isi Tabung Gas	7.280.000,00
Dinas Kesehatan	7.280.000,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	87.680.680,00
Dinas Perikanan	87.680.680,00
Bahan Lainnya	9.089.129.674,61



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Persediaan	Saldo Akhir (Rp)
Dinas Kesehatan	9.072.394.174,61
Dinas Perhubungan	8.935.500,00
Dinas Sosial	7.800.000,00
Suku Cadang	46.393.373,58
Suku Cadang Alat Kedokteran	23.722.524,58
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.750.000,00
Dinas Kesehatan	14.972.524,58
Suku Cadang Alat Laboratorium	9.370.849,00
Dinas Kesehatan	705.844,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.665.005,00
Suku Cadang Lainnya	13.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.300.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.453.383.686,96
Alat Tulis Kantor	805.293.483,33
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	826.800,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	26.670.100,00
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	4.640.000,00
Dinas Kesehatan	102.851.938,33
Dinas Pendidikan	9.025.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	619.146.295,00
Kecamatan Bukit Batu	356.100,00
Kecamatan Pahandut	727.100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	13.305.900,00
Satuan Polisi Pamong Praja	204.000,00
Sekretariat Daerah	13.431.750,00
Sekretariat DPRD	14.108.500,00
Kertas dan Cover	155.562.520,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	696.000,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	17.412.500,00
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	14.915.500,00
Dinas Kesehatan	50.334.600,00
Dinas Pendidikan	4.877.000,00
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	695.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	1.324.200,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian	348.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	965.000,00
Inspektorat	1.316.000,00
Kecamatan Bukit Batu	347.500,00
Kecamatan Pahandut	3.514.700,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	15.389.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.301.500,00
Sekretariat Daerah	36.314.720,00
Sekretariat DPRD	5.810.500,00
Bahan Cetak	891.322.753,85
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.603.730,00
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	128.986.500,00
Dinas Kesehatan	168.949.191,85
Dinas Perhubungan	200.225.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	390.558.332,00
Benda Pos	21.260.000,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	7.510.000,00
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	2.500.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Persediaan	Saldo Akhir (Rp)
Dinas Kesehatan	6.590.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	240.000,00
Sekretariat Daerah	4.420.000,00
Bahan Komputer	175.700.250,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	29.237.800,00
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	20.731.250,00
Dinas Kesehatan	72.082.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.826.000,00
Kecamatan Pahandut	1.816.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	7.873.300,00
Sekretariat Daerah	16.480.900,00
Sekretariat DPRD	14.653.000,00
Perabot Kantor	140.445.485,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.696.000,00
Dinas Kesehatan	90.806.785,00
Sekretariat Daerah	2.064.700,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.878.000,00
Alat Listrik	855.761.721,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	396.000,00
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	9.063.000,00
Dinas Kesehatan	41.639.950,00
Dinas Perhubungan	4.754.071,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	799.908.700,00
Suvenir/Cendera Mata	54.437.316,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.199.200,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	53.238.116,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	353.600.157,78
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	949.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.706.500,00
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	8.673.500,00
Dinas Kesehatan	95.369.057,78
Dinas Pendidikan	9.305.400,00
Dinas Sosial	11.436.000,00
Kecamatan Pahandut	555.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	7.225.000,00
Sekretariat DPRD	9.380.000,00
Obat-obatan	6.728.605.702,17
Obat	5.258.270.244,18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	365.000,00
Dinas Kesehatan	5.127.420.065,18
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	75.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat	55.485.179,00
Obat-obatan Lainnya	1.470.335.457,99
Dinas Kesehatan	1.450.335.457,99
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	20.000.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	69.952.342.821,41
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	495.495.976,00
Dinas Sosial	38.239.816,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	58.195.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.910.000,00
Kecamatan Jekan Raya	1.350.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Persediaan	Saldo Akhir (Rp)
Kecamatan Sabangau	39.993.700,00
Sekretariat Daerah	348.807.460,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	69.456.846.845,41
Dinas Pendidikan	4.294.298.740,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49.121.463.870,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	251.974.500,00
Kecamatan Jekan Raya	356.300,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	11.286.226.785,41
Sekretariat Daerah	4.502.526.650,00
Natura dan Pakan	245.173.100,00
Natura	244.205.600,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.164.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.000.000,00
Dinas Kesehatan	1.481.000,00
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	104.958.000,00
Dinas Sosial	90.720.000,00
Sekretariat Daerah	22.537.800,00
Sekretariat DPRD	6.344.400,00
Pakan	967.500,00
Dinas Perikanan	967.500,00
Jumlah	90.039.711.066,23

Pada tabel di atas, persediaan obat-obatan dibagi menjadi dua kategori:

1. Persediaan Obat-Obatan; dan
2. Persediaan Obat-Obatan Lainnya.

Persediaan obat-obatan merupakan akun pelaporan persediaan untuk menampung pengeluaran atas pembelian/pengadaan obat-obatan untuk keperluan rutin kantor/dinas, kebutuhan RSUD, Puskesmas, serta untuk pelaksanaan program/kegiatan. Sebagai contoh adalah pembelian obat-obatan ringan untuk persediaan kantor/dinas, obat-obatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya. Sedangkan Persediaan Obat-Obatan Lainnya merupakan akun pelaporan persediaan untuk menampung pengeluaran atas pembelian/pengadaan perlengkapan medis yang bersifat pakai habis untuk keperluan rutin RSUD/Dinas Kesehatan/Puskesmas, serta untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Pada Tahun 2024, terdapat Persediaan Obat-obatan Kadaluarsa yang telah dikeluarkan dari pencatatan persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121. Persediaan Obat-obatan Kadaluarsa Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
INSTALASI FARMASI KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA					
1	Griseofulvin 125 mg	Tablet	3.740.000,00	DAK	Februari 2024
2	Primaquin	Tablet	4.840,00	HIBAH	Maret 2023
3	Febrinex Syrup	Botol	22.398.600,00	DAK	Maret 2024
4	Curlysine Syrup	Botol	11.544.000,00	DAK	April 2024
5	Oil Mineral Mix	Sachet	-	HIBAH	April 2024
6	Ketokonazol 200 mg	Kapsul	1.755.000,00	DAK	April 2024



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
7	Gentamycin Sulfat Tetes Mata	Botol	6.162.540,00	DAK	Exp
8	Glimepiride 1 mg	Tablet	1.785.600,00	DAK	Exp
9	Lamivudine 3TC (150)	Tablet	4.586.400,00	HIBAH	Mei 2024
10	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	3.494.400,00	DAK	Juni 2024
11	Chlorpheniramine Maleat (CTM)	Tablet	31.806.900,00	DAK	Juni 2024
12	Karbogliserin tts Telinga 10%	Botol	3.326.400,00	DAK	Juni 2024
13	Nistatin 500.000 IU	Tablet salut selaput	765.600,00	DAK	Juni 2024
14	Sukralfat Susp 500 mg/5ml	Botol	9.768.000,00	DAK	Juni 2024
15	Hydrochlorothiazide 25 mg	Tablet	2.046.000,00	DAK	Juli 2024
16	Kotrimoxazole Dewasa Kombinasi Sulfametoksazol 400 mg+ trimetoprim 80 mg (480 mg) tab	Tablet	6.791.400,00	DAK	Juli 2024
17	Permetrin Krim 5 %	Tube	8.944.045,00	DAK	Juli 2024
18	Haloperidol Tablet 5 mg	Tablet Salut selaput	2.651.400,00	DAK	Juli 2024
19	Triheksifenidil 2 mg	Tablet	170.100,00	DAK	Juli 2024
20	Antasida Doen Tab 200 mg	Tablet Kunyah	5.178.600,00	DAK	Agustus 2024
21	Calcium Lactate Tab 500 mg	Tablet	6.336.000,00	DAK	Agustus 2024
22	Kotrimoxazole Anak Kombinasi 5 ml Suspensi:sulfametoksazol 200 mg+ trimetoprim 40 mg (susp 240 mg)	Botol	2.625.000,00	DAK	Agustus 2024
23	Salbutamol 2 mg	Tablet	1.717.200,00	DAK	Agustus 2024
24	Vaksin Hblg (Hepatitis rekombinasi Cairan)	Vial	39.875.000,00	HIBAH	Agustus 2024
25	Metronidazole Infus 5 MG/ML	Botol	103.972,00	HIBAH	Agustus 2024
26	Antasida Doen Tab 200 mg	Tablet Kunyah	6.582.600,00	DAK	September 2024
27	Phytomenadione Cairan inj 2 mg	Ampul	1.980.300,00	HIBAH	September 2024
28	Paxlovid 150 mg/100 mg	Tablet	6.502.789,50	HIBAH	September 2024
29	Kombipak Azitromicin	Paket	117.000,00	HIBAH	September 2024
30	Kombipak Azitromicin	Paket	1.873.860,00	HIBAH	September 2024
31	Rifin Tab 150 mg	Tab	397.800,00	HIBAH	September 2024
32	TDF (300)/FTC (200)	Tablet	675.000,00	HIBAH	September 2024
33	Pyrazenamida 500 mg	Tablet	930.048,00	HIBAH	September 2024
34	Rapid HBSAG	Test	3.154.400,00	HIBAH	Oktober 2024
35	Rapidan Tester Anti HIV 1/2 Test	Test	6.840.000,00	HIBAH	Oktober 2024
36	Salbutamol 4 mg	Tablet	3.215.400,00	DAK	September 2024
37	Vaksin INAVAC	Vial	22.282.800,00	HIBAH	Desember 2024
38	DBS Collection 20 tes	Kit	933.880,00	HIBAH	Desember 2024
39	Vaksin Hblg (Hepatitis rekombinasi Cairan)	Vial	15.125.000,00	HIBAH	Desember 2024
40	Euthyrox 50 Tab 50 MCG	Tablet	18.368,00	HIBAH	November 2024
41	Diazepam Tablet 2 mg	Tablet	38.500,00	DAK	Desember 2024
42	Test Hiv 1/2/0 Tri-Line Test	Test	4.462.500,00	HIBAH	November 2024
43	Asam Askorbat (Vit. C) 50 mg	Tablet	18.150.000,00	DAK	Exp
44	Metanol	btl	301.000,00	DAK	Exp



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
UPT PUSKESMAS PANARUNG KOTA PALANGKA RAYA					
1	Febrinex Syrup	Botol	8.712.000,00	DAK	Exp
2	Griseofulvin 125 mg	Tablet	51.700,00	DAK	Exp
3	Arcapec Tab kombinasi : Pektin 50 mg + Atapulgit 600 mg	Tablet	238.095,00	DAK	Exp
4	Dexamethasone 5 mg amp @ 100	Ampul	185.408,30	JKN	Exp
5	Diphenhydramine inj	Ampul	23.460,58	JKN	Exp
6	Ketokonazol 200 mg	Tablet	29.430,00	DAK	Exp
7	Glimepiride 1 mg	Tablet	76.800,00	DAK	Exp
8	Gentamycin Sulfat Tetes Mata	Botol	130.080,00	DAK	Exp
9	Lamivudine 3TC (150)	Botol	280.800,00	HIBAH	Exp
10	Masker N95	Pcs	1.492.500,00	HIBAH	Exp
11	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	64.000,00	DAK	Exp
12	Karbogliserin tts Telinga 10%	Botol	79.200,00	DAK	Exp
13	Kloramfenikol Salep kulit 2% (BUFACETIN)	Tube	286.525,00	DAK	Exp
14	Metoclopramide HCL 5 mg	Tablet	11.800,00	DAK	Exp
15	Nistatin 500.000 IU	Tablet salut selaput	191.400,00	DAK	Exp
16	Sukralfat Susp 500 mg/5ml	Botol	299.552,00	DAK	Exp
17	Kotrimoxazole Dewasa Kombinasi Sulfametoksazol 400 mg+ trimetoprim 80 mg (480 mg) tab	Tablet	42.840,00	DAK	Exp
18	Permetrin Krim 5 %	Tube	135.630,00	DAK	Exp
19	Vaksin MR	Ampul	3.052.000,00	HIBAH	Exp
20	Kloramfenikol (Chloramex) 500 mg	tABLET	424.988,00	DAK	Exp
21	Zink 20 mg	Tablet	55.000,00	HIBAH	Exp
22	Triheksifenidil 2 mg	Tablet	8.820,00	DAK	Exp
23	Scabicide Permethrin krim 5 %	Tube	3.807.300,00	DAU	Exp
24	Primaquin	Tablet	25.300,00	HIBAH	Exp
25	Rifin Tab 150 mg	Tablet	663.000,00	HIBAH	Exp
26	Paracetamol Sirup 120 mg 5 ml	Botol	25.520,00	DAK	Exp
27	Salbutamol 4 mg	Tablet	31.809,00	DAK	Exp
28	Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0.3 %	Botol	931.623,00	DAU	Exp
29	Rapid HBSAG	Test	1.971.500,00	HIBAH	Exp
30	Tenofovir Disproxil Fumirate TDF (300)	Tablet	758.160,00	HIBAH	Exp
31	Phytomenadione Cairan inj 2 mg	Ampul	48.300,00	HIBAH	Exp
32	Diazepam Injeksi	Ampul	15.450,00	DAK	Exp
33	Risperidone 2 mg	Tablet	6.760,00	DAK	Exp
UPT PUSKESMAS BUKIT HINDU KOTA PALANGKA RAYA					
1	Febrinex sirup	Botol	3.199.800,00	DAU	Januari 2024
2	Surface Desinfektan 500 ml	botol	1.097.712,00	DAK	Januari 2024
3	Lidokain inj 2%	Ampul	1.452.000,00	JKN	Januari 2024
4	Gentamycin Sulfat Tetes Mata	flask	677.500,00	DAK	April 2024
5	Griseofulvin 125 mg	tablet	110.000,00	DAK	April 2024



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
6	Glimepiride 1 mg	Tablet	19.200,00	DAK	Mei 2024
7	Natrium Diklofenac 50 mg	Tablet	164.610,00	DAK	Mei 2024
8	CTM	Tablet	117.404,00	DAK	Juni 2024
9	Pyrantel Pamoate Tab 125 mg	Tablet	146.400,00	DAK	Juni 2024
10	Pyrantel Tab	tablet	16.650,00	DAK	Juni 2024
11	Metilergometrin	Ampul	155.400,00	DAK	Juli 2024
12	Nistatin Tablet 500.000 IU	Tablet	191.400,00	DAK	Juli 2024
13	Trihexilphenidil	Tablet	6.300,00	DAK	Juli 2024
14	Kotrimoxazole Anak Kombinasi 5 ml Suspensi:sulfametoksazol 200 mg+ trimetoprim 40 mg (susp 240 mg)	Botol	163.800,00	DAK	Exp
15	salbutamol 2 mg	Tablet	37.365,00	DAK	September 2024
16	salbutamol 2 mg	Tablet	152.007,00	DAK	September 2024
17	kombipak azitromisin	tablet	156.155,00	Hibah	September 2024
18	Diazepam 2 mg	tablet	19.902,70	jkn	September 2024
19	Dextrose 5%	pcs	120.384,00	jkn	Exp
20	Rapid Hiv 1/2 &Spilis Combo	Test	3.062.066,00	hibah	Exp
21	Virocex Hiv 1/2	Test	4.195.500,00	hibah	Exp
22	Garam Oralit Serbuk (Kantong 200)	sachet	294.980,00	hibah	Exp
23	Rapid HBSAG	Test	1.971.500,00	hibah	Exp
24	Rapid Hiv 1/2 &Spilis Combo	Test	1.749.900,00	hibah	Exp
25	Rapid Hiv 1/2 &Spilis Combo	-	48.300,00	hibah	Exp
26	Phytomenadione Cairan inj 2 mg	-	928.450,00	hibah	Exp
27	Vaksin INAVAC	-	522.500,00	dak	Exp
UPT PUSKESMAS KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA					
1	Griseofulvin 125 mg	Tablet	138.380,00	DAK	ED
2	Arcapec Tab kombinasi : Pektin 50 mg + Atapulgit 600 mg	Tablet	930.402,00	DAK	ED.03.2024
3	Captopril 25mg	Tablet	152.784,63	JKN	ED.03.2024
4	Otsu MGSO4 Inj (otsu MGSO4,20)	Ampul	3.909,00	HIBAH	ED.03.2024
5	Primaquin	Tablet	4.840,00	HIBAH	ED.03.2024
6	Reco Tetes Mata 10ml	Botol	519.115,92	JKN	ED.03.2024
7	Ketokonazol 200 mg	Tablet	41.850,00	DAK	ED 04.2024
8	Oil Mineral Mix	Sachet	-	HIBAH	ED 04.2024
9	Uric Acid Test Strip	Tube	332.000,00	JKN	ED 04.2024
10	Glimepiride 1mg	Tablet	149.184,00	DAK	ED. MEI 2024
11	Gentamycin Sulfate Tetes Mata	Botol	119.240,00	DAK	ED. MEI 2024
12	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	159.360,00	DAK	ED. 06.2024
13	Albendazole Tab 400 mg	Tablet	135.720,00	HIBAH	ED. 06.2024
14	Chlorpheniramine Maleat (CTM)	Tablet	471.652,60	DAK	ED. 06.2024
15	Karbogliserin tts Telinga 10%	Botol	95.700,00	DAK	ED. 06.2024
16	Metilergometrin Inj 0,2 mg/ml	Ampul	135.975,00	DAK	ED. 06.2024
17	Nacl 0,9 % 500 ml	Botol	62.100,00	DAK	ED. 06.2024
18	Nistatin 500.000 IU	Tablet	52.635,00	DAK	ED. 06.2024
19	Pyrantel Pamoate Tab 125 mg	Tablet	90.036,00	DAK	ED. 06.2024
20	Metronidazol ovula	Ovula	215.901,92	JKN	ED. 06.2024
21	Antasida Doen Tab 200 mg	Tablet	65.340,00	DAK	ED. 07.2024



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
22	Kotrimoxazole Dewasa Kombinasi Sulfametoksazol 400 mg+ trimetoprim 80 mg (480 mg) tab	Tablet	21.924,00	DAK	ED. 07.2024
23	Hydrochlorothiazide 25 mg	Tablet	165.168,00	DAK	ED. 07.2024
24	Permetrin Krim 5 %	Tube	128.095,00	DAK	ED. 07.2024
25	Tiamin (Vitamin B1) 50 mg	Tablet	123.276,60	DAK	ED. 07.2024
26	Zinc Sulfate Tab 20 mg	Tablet	45.375,00	DAK	ED. 07.2024
27	Metronidazol ovula	Ovula	124.558,80	JKN	ED. 07.2024
28	Kloramfenikol (Chloramex) 500 mg	Tab	123.270,00	DAK	ED. 08.2024
29	Calcium Lactate Tab 500 mg	Tab	21.600,00	DAK	ED. 08.2024
30	Scabid Permenthrin krim 5 %	Tab	660.450,00	DAU	ED. 08.2024
31	Salbutamol 2 mg	Tab	23.903,00	DAK	ED. 08.2024
32	Reagen zielh neelsen	KIT	916.390,00	HIBAH	ED. 08.2024
33	Antasida Doen Tab 200 mg	Tab	30.780,00	DAK	ED. 08.2024
34	Paracetamol Sirup 120 mg 5 ml	Botol	9.280,00	DAK	ED. 08.2024
35	Salbutamol 4 mg	Tab	17.871,00	DAK	ED. 08.2024
36	Vaksin MR	Vial	915.600,00	HIBAH	ED. 08.2024
37	Scabid Permenthrin krim 5 %	Tube	854.700,00	DAU	ED. 10.2024
38	Rapid HBSAG	Pcs	788.600,00	HIBAH	ED. 10.2024
39	Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0.3 %	Botol	111.111,00	DAU	ED. 10.2024
40	Dexametasone Injeksi 5mg/ml	Ampul	93.104,00	JKN	ED. 10.2024
41	Amoxicillin sirup kering 125 mg/5 ml	Botol	807.362,32	JKN	ED. NOV.2024
42	Zinc Sulfate Tab 20 mg	Tablet	17.875,00	DAK	ED. NOV.2024
43	Virocex Hiv 1/2	Test	1.048.875,00	HIBAH	ED. OKT.2024
44	Rapid Hiv 1/2 &Spilis Combo	Test	437.438,00	HIBAH	ED. NOV 2024
45	DHP Frimal tab	Tablet	57.020,00	HIBAH	ED. 12.2024
UPT PUSKESMAS MARINA PERMAI KOTA PALANGKA RAYA					
1	Asam Mefenamat	Tablet	144.000,00	DAK	ED
2	Covid-19b Antigen Biosensor	Test	1.030.975,00	HIBAH	ED
3	CEFADROXIL	Botol	427.280,00	DAK	ED
4	Albendazole Suspensi 200 mg 5 ml	Botol	1.032.000,00	HIBAH	ED
5	DHP Frimal tab	Tablet	51.300,00	HIBAH	ED
6	Loratadine	Tablet	537.240,00	DAK	ED
7	Metilprednisone 4 mg	Tablet	345.000,00	DAK	ED
8	Salbutamol 2 mg	Tablet	102.000,00	DAK	ED
9	Sistenol	Tablet	1.926.320,00	HIBAH	ED
10	Diazepam	Injeksi	15.450,00	HIBAH	ED
UPT PUSKESMAS KALAMPANGAN KOTA PALANGKA RAYA					
1	Stimuno Syrup	Botol	3.392.832,00	DAK	Januari 1900
2	Curlysine Syrup	Botol	1.118.880,00	DAK	Januari 1900
3	Griseofulvin 125 mg	Tablet	88.000,00	DAK	Januari 1900
4	Ketokonazol 200 mg	Kapsul	108.000,00	DAK	Januari 1900
5	Dymenhidrinat	tablet	13.400,00	DAK	Januari 1900
6	Gentamycin Sulfat Tetes Mata	Botol	260.160,00	DAK	Januari 1900
7	Albendazole Suspensi 200 mg 5 ml	Botol	1.505.000,00	HIBAH	Januari 1900



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
8	IV Catheter No 20 G	pcs	399.840,00	DAK	Januari 1900
9	IV Catheter no 22 G	pcs	399.840,00	DAK	Januari 1900
10	Antasida Doen Tab 200 mg	Tablet Kunyah	59.400,00	DAK	Januari 1900
11	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	166.400,00	DAK	Januari 1900
12	Chlorpheniramine Maleat (CTM)	Tablet	59.900,00	DAK	Januari 1900
13	Kloramfenikol Salep kulit 2% (BUFACETIN)	Tube	294.375,00	DAK	Januari 1900
14	Febrinex Syrup	Botol	175.989,00	DAK	Januari 1900
15	Kotrimoxazole Dewasa Kombinasi Sulfametoksazol 400 mg+ trimetoprim 80 mg (480 mg) tab	Tablet	25.200,00	DAK	Januari 1900
16	Kloramfenikol (Chloramex) 500 mg	Tablet	939.200,00	DAK	Januari 1900
17	Salbutamol 2 mg	Tablet	21.200,00	DAK	Januari 1900
18	Scabidid Permenthrin krim 5 %	Tube	1.554.000,00	DAK	Januari 1900
19	Antasida Doen Tab 200 mg	Tablet Kunyah	43.200,00	DAK	Januari 1900
20	Kotrimoxazole Anak Kombinasi 5 ml Suspensi:sulfametoksazol 200 mg+ trimetoprim 40 mg (susp 240 mg)	Botol	168.000,00	DAK	Januari 1900
21	Salbutamol 4 mg	Tablet	27.600,00	DAK	Januari 1900
22	Alkohol Swab 2 Ply (Onemed , Baymed)	Pcs	99.528,00	HIBAH	Januari 1900
23	Virocex Hiv 1/2	Test	629.325,00	HIBAH	Januari 1900
24	Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0.3 %	Botol	324.786,00	DAU	Januari 1900
UPT PUSKESMAS RAKUMPIT RAYA KOTA PALANGKA RAYA					
1	Folic Acid 1mg	Tablet	46.033,00	JKN	Februari 2024
2	Garam oralit	pcs	14.392,00	HIBAH	Oktober 2023
3	PEHAVRAL	Tablet	895.000,00	0	Juli 2024
UPT PUSKESMAS KAYON KOTA PALANGKA RAYA					
1	Phytomenadion (Vit K) 10 mg	Tablet	1.082.466,00	JKN	Februari 2024
2	Trifluoroperazine HCl	Tablet	110.000,00	DAK Program	Februari 2024
3	Griseofulvin 125 mg	Tablet	216.040,00	DAK	Februari 2024
4	Febrinex syrup	Tablet	207.987,00	DAK	Maret 2024
5	Arcapec	Tablet	573.870,00	DAK	Maret 2024
6	Dymenhydrinate	Tablet	13.400,00	DAK	April 2024
7	Ketokonazole 200 mg	Kapsul	54.000,00	DAK	April 2024
8	Gentamycin sulfat tetes mata	Botol	119.240,00	DAK	Mei 2024
9	Natrium Diclofenac 50 mg	Tablet	281.194,00	DAK	Mei 2024
10	Kloramfenikol Salep kulit 2% (BUFACETIN)	Tube	376.800,00	DAK	JUNI 24
11	Karbogliserin tts telinga 10 %	Botol	194.700,00	DAK	JUNI 24
12	Pyrantel Pamoat Tab 125 mg	Tablet	66.246,00	DAK	JUNI 24
13	Chlorfeniramine Maleat (CTM)	Tablet	430.920,60	DAK	JUNI 24
14	Albendazol Tab 400 mg	Tablet	25.740,00	DAK	JUNI 24
15	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	244.864,00	DAK	JUNI 24
16	Nystatin 500.000 IU	Tablet	146.421,00	DAK	JUNI 24



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
17	Metronidazole Benzoate Suspensi 125mg/5 ml	Botol	46.020,00	DAK	JUNI 24
18	Domperidone 10 mg	Tablet	11.319,00	DAK	Juni 2024
19	DHP Frimal tab	Tablet	17.106,00	DAK	Juni 2024
20	Betametason Cream 1 %	Tube	50.386,35	JKN	Maret 2024
21	Haloperidol 5 mg	Tablet	2.106,00	DAK	Juli 2024
22	Betametason Cream 1 %	Tube	254.310,00	DAK	Juli 2024
23	Loratadine 10 mg	Botol	173.797,14	DAK	Juli 2024
24	Omeprazole 20 mg	Kapsul	486.557,40	DAK	Juli 2024
25	Kotrimoxazole Dewasa Kombinasi Sulfametoksazol 400 mg+ trimetoprim 80 mg (480 mg) tab	Tablet	73.080,00	DAK	Juli 2024
26	Thiamin (Vitamin B1) 50 mg	Tablet	470.329,20	DAK	Juli 2024
27	Permethrin Krim 5 %	Tube	128.095,00	DAK	Juli 2024
28	Antasida Doen Tab 200 mg	Tablet	10.800,00	DAK	Agt 24
29	Hydrochlorothiazide 25 mg	Tablet	15.996,00	DAK	Agt 24
30	Kloramfenikol (Chloramex) 500 mg	Kapsul	1.685.864,00	DAK	Agt 24
31	Kotrimoxazole Anak Kombinasi 5 ml Suspensi:sulfametoksazol 200 mg+ trimetoprim 40 mg (susp 240 mg)	Botol	44.100,00	DAK	Agt 24
32	Salbutamol 2 mg	Tablet	66.356,00	DAK	Agt 24
33	Diclofenac Potassium	Tablet	952.380,00	JKN	Agt 24
34	Amitriptilin 25 mg tab	Tablet	8.183,00	HIBAH	Agt 24
35	Salbutamol 4 mg	Tablet	74.520,00	DAK	September 2024
36	Kombipak Azitromicin	Paket	468.465,00	HIBAH	September 2024
37	Betadine Kumur	Botol	594.960,00	DAK	September 2024
38	Dexametason Injeksi	Ampul	226.342,60	JKN	September 2024
39	Detecto Anti HBs Hepatitis B Rapi Anti HBs	Strip	313.709,50	Program	Oktober 2024
40	Rapid Sifilis : Trefocek Sifilis	Strip	52.632,00	Program	Oktober 2024
41	Scabidid Permethrin krim 5 %	Tube	543.900,00	DAK	Oktober 2024
42	Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0.3 %	Tube	512.820,00	DAK	Oktober 2024
43	Cetirizin 10 mg	Tablet	695.875,00	JKN	November 2024
44	Virus Transport Media (VTM) Kit	Test	2.460.000,00	Program	November 2024
45	Diazepam 2 mg	Tablet	8.624,00	DAK	Desember 2025
46	Ephineprin 0.1% Injeksi	Ampul	35.164,80	JKN	Desember 2025
47	Dexamethason Injeksi	Ampul	168.720,00	JKN	Desember 2025
DINAS KESEHATAN RSUD KOTA PALANGKA RAYA					
1	Trepopcheck Syphilis Test - Box 25 Test	Test	665.250,00	FROG MALARIA	Maret 2023
2	Viroteck Hiv	Test	372.870,00	FROG MALARIA	Agustus 2023
3	Primaquin	Tablet	9.680,00	FROG MALARIA	Maret 2024
4	Calcium Lactate Tab 500 mg	Tablet	26.880,00	FROG MALARIA	Agustus 2024
RSUD KOTA PALANGKA RAYA					
1	FUTROLIT	softbag	871.258,01	DAU	JAN 2024



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
2	Otsu Water Inj 25 ml (Aquades)	Botol	13.568.947,20	DAU	JAN 2024
3	Levemir Flexpen	Pen	24.386.000,00	DAU	JAN 2024
4	Fargoxin Tab	tab	233.453,99	BTT	JAN 2024
5	Ceftazidime Inj	Vial	828.000,00	DAU	Maret 2024
6	FUTROLIT	softbag	3.128.608,30	DAU	April 2024
7	Dimenhidrinat tablet/kapsul/kaplet 50 mg	tablet	124.352,00	DAU	JUNI 2024
8	Chlorpeniramine Maleat 4 mg	tab	1.526.679,79	DAU	JULI 2024
9	Minosep Obat Kumur 2 %	Botol	885.500,00	DAU	JULI 2024
10	Ceftazidime Inj	VIAL	17.139.600,00	DAU	JULI 2024
11	Alprazolam 0,5 mg	tab	262.500,00	DID	JULI 2024
12	Zink Tablet	Tab	686.125,00	HIBAH PROVINSI	JULI 2024
13	MULTIVITAMIN MEGAZING	tablet	130.625,00	DAU	AGUSTUS 2024
14	Methylprednisolone 125 mg serbuk injeksi	Vial	499.200,00	DAU	AGUSTUS 2024
15	Mecobalamin Inj	Vial	4.884.880,00	DAU	AGUSTUS 2024
16	ACETYLCISTEINE 200 mg	VIAL	19.372.650,00	DAU	September 2024
17	MULTIVITAMIN MEGAZING	TAB	235.125,00	DAU	September 2024
18	Dexamethasone Inj	AMPUL	5.234.402,47	DAU	September 2024
19	ACETYLCISTEINE	VIAL	164.175.000,00	DAU	September 2024
20	Dexamethasone Inj	AMPUL	1.998.557,00	DAU	OKTOBER 2024
RSUD KOTA PALANGKA RAYA (BLUD)					
1	METFORMIN 850 MG	TAB	18.876,00	BLUD	JANUARI 2024
2	RANITIDINE HCL 25MG/ML INJ@20 AMP 1 BOX@25 Ampul	ampul	311.850,00	BLUD	JANUARI 2024
3	FARGOXIN INJEKSI 2 ML (PPG)	AMPUL	1.138.860,00	BLUD	JANUARI 2024
4	AMIODARONE INJEKSI 50 mg/ml	Ampul	507.400,00	BLUD	JANUARI 2024
5	Lexatrans 500mg KPL @50 MOL	Kapsul	163.300,00	BLUD	JANUARI 2024
6	MGSO 40 %	Pcs	79.254,00	BLUD	JANUARI 2024
7	AMIKACIN SULFATE INJ 250 MG/ML	TAB	2.434.707,00	BLUD	FEBRUARI 2024
8	GLIMEPIRIDE TAB 3 MG	tablet	3.668.343,00	BLUD	FEBRUARI 2025
9	DARYAZINC DROP 15ML(KFTD)	Botol	38.295,00	BLUD	FEBRUARI 2026
10	DONPERIDONE TAB 10 MG (NOVA)	Tablet	616,92	BLUD	MARET 2024
11	GLIMEPIRIDE TAB 4 MG	tablet	910.800,00	BLUD	MARET 2024
12	GLIMEPIRIDE TAB 3 MG	tablet	2.456.307,00	BLUD	MARET 2024
13	MORFINA 10 MG/ML INJ. (IMPOR)	ampul	2.145.150,00	BLUD	MARET 2024
14	ROCURONIUM BROMIDE 1 BOX@ 12 VIAL (AMS)	Vial	907.200,00	BLUD	MARET 2024
15	PETHIDINA 50 MG/ML INJ	ampul	389.620,00	BLUD	MARET 2024
16	KETOROLAC INJ 30 MG (PPG)	AMPUL	8.072,00	BLUD	MARET 2024
17	HERBESSER CD 100 JKN	tablet	835.296,00	BLUD	April 2024
18	DUMIN RECTAL TUBE 125 MG/2.5 ML	tube	107.400,00	BLUD	April 2024
19	BIOPLACENTON GEL (PPG)	TUBE	290.598,00	BLUD	April 2024



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
20	RECOFOL/PROANES 1% INJEKSI	Ampul	632.700,00	BLUD	April 2024
21	Ketamine Injeksi 100 mg/ml	Vial	660.000,00	BLUD	April 2024
22	CALCIUM LACTATE 500 MG TAB (RNI)	Tablet	724.838,40	BLUD	MEI 2024
23	OTSU KCL 7,46 (MUP)	BOTOL	190.973,75	BLUD	MEI 2024
24	PIROXICAM 10MG	tablet	31.325,32	BLUD	JUNI 2024
25	AMIKACIN SULFATE INJEKSI 250 MG/ML (PEHA)	vial	2.583.000,00	BLUD	JUNI 2024
26	Scopma Kapl 10 x 10	Tablet	5.247.422,40	BLUD	JUNI 2024
27	LISIHNOPRIL TAB 10MG (BOX/100)	tablet	270.692,00	BLUD	JUNI 2024
28	LISIHNOPRIL TAB 5MG (BOX/100)	tablet	91.649,59	BLUD	JUNI 2024
29	OTSU - MGSO4 20 (MUP)	BOTOL	404.294,00	BLUD	JUNI 2024
30	MEYLON 8,4% 25 ML (MUP)	BOTOL	459.017,00	BLUD	JUNI 2024
31	KETOCONAZOLE 2% CR 10 GR (TSJ)	TUBE	39.960,00	BLUD	JUNI 2024
32	KETOCONAZOLE 200 MG (TSJ)	TABLET	175.256,64	BLUD	JUNI 2024
33	Norephneprine Bitartrate	Ampul	419.588,61	BLUD	JUNI 2024
34	DEXTROKETOPROFEN	Tablet	1.068.530,40	BLUD	JUNI 2024
35	ENOXAPARIN SODIUM 40 MG INJ (BIOFARMA)	VIAL	4.342.320,00	BLUD	JUNI 2024
36	BETAMETASON KRIM 0,1%	Tube	8.313,00	BLUD	JULI 2024
37	FLUNARIZIN HCL 5 MG	Tablet	3.896.100,00	BLUD	JULI 2024
38	METHYLPREDNISOLON 16 MG	Tablet	129.420,00	BLUD	JULI 2024
39	ONDANSETRON 4 MG TAB	Tablet	2.464,20	BLUD	JULI 2024
40	METHYLPREDNISOLON 4 MG TAB	Tablet	24.969,00	BLUD	JULI 2024
41	ATRACURIUM INJEKSI 25 MG/2,5ML	AMPUL	119.880,00	BLUD	JULI 2024
42	PROPYLTHIOURACIL 100 @1000 (DX)	tab	8.299,52	BLUD	AGUSTUS 2024
43	VITAMIN B12 50 MCG	tablet	283.773,56	BLUD	AGUSTUS 2024
44	LISINOPRIL TAB 5 MG	tablet	196.680,00	BLUD	AGUSTUS 2024
45	ALLOPURINOL 300 mg tab@ 100	tablet	820.160,00	BLUD	AGUSTUS 2024
46	PANTOPRAZOLE 40 MG INJ GPH	vial	336.600,00	BLUD	AGUSTUS 2024
47	ROCURONIUM BROMIDE 1 BOX@ 12 VIAL (AMS)	Vial	504.000,00	BLUD	AGUSTUS 2024
48	NYSTATIN DROP BRN (PPG)	BOTOL	153.846,00	BLUD	AGUSTUS 2024
49	Dextrose 5% INFUS 500ml (WIDATRA)	Botol	2.259.684,00	BLUD	AGUSTUS 2024
50	HEPARIN INJEKSI	VIAL	2.347.650,00	BLUD	AGUSTUS 2024
51	LORATADIN 10 MG	TABLET	27.000,00	BLUD	AGUSTUS 2024
52	COLCHICINE 0.5MG	TABLET	31.710,00	BLUD	AGUSTUS 2024
53	CIPROFLOXACIN INFUS	Botol	449.088,00	BLUD	September 2024
54	THROMECON GEL 20 GR	Tube	221.445,00	BLUD	September 2024
55	MISOPROSTOL 200 MCG	Tablet	1.076.676,69	BLUD	September 2024
56	REBAMIPIDE 100 MG TAB	Tablet	360.354,84	BLUD	September 2024
57	MOMETASONE KRIM 0,1%	Tube	73.150,00	BLUD	September 2024



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
58	ONDANSETRON HYDROCHLORIDE TAB 8 MG	TABLET	194.444,25	BLUD	September 2024
59	WIDAHES 130	Botol	637.140,00	BLUD	September 2024
60	Extralac syr	Botol	77.922,00	BLUD	September 2024
61	NIFUDIAR SUSPENSI (MPI)	Botol	657.305,00	BLUD	Oktober
62	LOPERAMIDE HCL TABLET 2MG 1 Box@100Tab (IGM)	Tablet	23.904,00	BLUD	Oktober
63	DIAZEPAM INJ 5MG/ML (MEPRO)	Ampul	9.269,40	BLUD	Oktober
64	Spironolactone 25 mg	Tablet	33.825,00	BLUD	Oktober
65	LORATADINE 10 MG	Tablet	53.932,00	BLUD	Oktober
66	PIRACETAM 1200 MG	Tablet	182.972,40	BLUD	Oktober
67	METHYLPREDNISOLONE 16MG	tablet	422.383,50	BLUD	November
68	NIFEDIPIN 10 MG @100 (DX)	tablet	106.236,69	BLUD	November
69	ZING TAB DISPERSIBLE 20 M (RNI)	Tablet	2.642.475,00	BLUD	November
70	OBH 60 ML 1 BOX@100 BTL (KFTD)	Botol	217.313,25	BLUD	November
71	Noza @4 Tab	Tablet	3.018.880,80	BLUD	November
72	Cetirizine 10mg Tab @100 (NOVA)	Tablet	270.465,00	BLUD	November
73	TRAMADOL 100MG/ 2ML INJEKSI	Ampul	305.250,00	BLUD	November
74	Phytomenadione 2mg Inj	Ampul	2.273.502,00	BLUD	November
75	MST CONTINOUS 15 MG / MORPHINE 15 MG	Tablet	3.242.643,00	BLUD	November
76	METRONIDAZOLE 500 MG TAB	Tablet	49.932,00	BLUD	November
77	PIRACETAM 1200 MG TAB	Kaplet	392.400,00	BLUD	November
78	ASAM TRANEKSAMAT	Tablet	3.615.417,36	BLUD	November
79	GLIQUIDONE 30 MG	Tablet	271.700,00	BLUD	November
80	NASALIN	BOTOL	488.400,00	BLUD	November
81	AMOXICILLIN SYRUP 125MG/5ML	BOTOL	48.720,00	BLUD	November
82	IBUPROFEN 400 MG INJ	VIAL	333.000,00	BLUD	November
83	PROPYLTHIOURACIL 100 @ 100 (DX)	tablet	245.322,00	BLUD	Desember
84	TRIAMCINOLONE IA/ID 10 MG/ML BOX@ 1 VIAL (AMS)	Vial	2.494.902,69	BLUD	Desember
85	NITROKAF RETARD KAPSUL (DUS 100 KPS)	Kapsul	1.333.665,00	BLUD	Desember
86	Bisoprolol 2,5 mg	Tablet	134.547,00	BLUD	Desember
87	Spironolactone 100 mg	Tablet	75.294,00	BLUD	Desember
88	BUPIVACAINE 5 mg/ml INJEKSI	Ampul	856.000,00	BLUD	Desember
89	NACL 500 ML	Botol	53.713,80	BLUD	Desember
90	KETOROLAC INJEKSI 30 MG	Ampul	13.139,00	BLUD	Desember
91	NYSTATIN 100.000 IU DROP	Botol	539.340,00	BLUD	Desember
92	Cefotaxime 1 Gram Inj	Vial	2.930.400,00	BLUD	Desember
93	PREDNISON 5 MG	Tablet	45.200,00	BLUD	Desember
94	KA-EN 3B	Botol	178.787,70	BLUD	Desember
95	ACARBOSE 50 MG	Tablet	14.850,00	BLUD	Desember
96	IRBESARTAN 300 MG	Tablet	692.400,00	BLUD	Desember



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
97	METFORMIN 500 MG	TABLET	22.943,92	BLUD	Desember
98	METHYLERGOMETRINE INJEKSI 0,2 MG/ ML	AMPUL	103.730,00	BLUD	Desember
99	DEXTROKETOPROFEN INJEKSI 25MG/ML	Ampul	957.264,00	BLUD	Desember
100	Dextrose 10 % INFUS	Botol	167.010,00	BLUD	Desember
101	MST CONTINUS 15 MG	TABLET	7.425.900,00	BLUD	Desember
102	Sedacum 1mg/ml Injeksi	Ampul	36.000,00	BLUD	Desember
Jumlah			706.970.145,82		

Selain terdapat Persediaan Obat-obatan Kadaluausa yang telah dikeluarkan dari pencatatan persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan RSUD Kota Palangka Raya di Tahun 2024, juga terdapat Persediaan Bahan Lainnya (Bahan Medis Habis Pakai) yang kadaluausa dan telah di dikeluarkan dari pencatatan persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122. Persediaan Bahan Lainnya Kadaluausa pada Dinas Kesehatan

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
INSTALASI FARMASI KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA					
1	IV Catheter no 22 G	Pcs	11.407.200,00	DAK	Maret 2023
2	Infusion Set/ Intravenous Administration	Pcs	20.851.440,00	DAK	April 2024
3	IV Catheter No 20 G	Pcs	24.460.800,00	DAK	April 2024
UPT PUSKESMAS KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA					
1	Infusion Set/ Intravenous Administration	Set	283.000,00	DAK	ED 04.2024
2	IV Catheter No 20 G	Pcs	223.440,00	DAK	ED 04.2024
3	IV Catheter no 22 G	Tube	564.480,00	DAK	ED 04.2024
4	Skifa Infusion Set Dewasa	Pcs	175.630,00	DAK	ED 04.2024
5	Urine bag with hanger	Pcs	176.000,00	JKN	ED. MEI 2024
6	Foley Cateter No. 18	Pcs	26.640,00	JKN	ED. 12.2024
7	Hemoglobin Test Strip MHS-2	Pcs	494.600,00	JKN	ED. 12.2024
UPT PUSKESMAS KAYON KOTA PALANGKA RAYA					
1	IV Cateter No 22	Pcs	552.720,00	DAK	Maret 2024
2	Ringer Laktat	Botol	192.575,00	DAK	Oktober 2024
UPT PUSKESMAS BUKIT HINDU KOTA PALANGKA RAYA					
1	Skifa Infusion Set Dewasa	pcs	40.144,00	DAK	April 2024
2	Gutta Perca Dan Paper Point 1	-	160.000,00	DAU	rusak
3	Hb sahli super ior	-	345.000,00	DAU	rusak
4	kamar hitung improved	-	1.063.127,00	DAU	rusak
5	lactose broth	-	74.250,00	DAU	rusak
6	larutan eter alkohol	-	37.125,00	DAU	rusak
7	larutan metil alkohol	-	88.000,00	DAU	rusak
RSUD KOTA PALANGKA RAYA					
1	Masker O2 Anak @50 PCS	BOX	687.166,00	APBD	JULI 2024
2	Masker O2 Anak @50 PCS	BOX	687.168,00	APBD	JULI 2024
3	AESULAP 24; B BRAUN @100 PCS	PCS	218.790,00	BPJS	DESEMBER 2024



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Nama Barang	Satuan	Total Harga (Rp)	Sumber Dana	Expired
4	AESCLAP 11; B BRAUN @100 PCS	PCS	326.040,00	BPJS	APRIL 2024
5	MICROPORE DISPENSER 1,25 CM X 9,1 M; 3M @BOX 24 PCS	PCS	227.036,00	BPJS	FEBRUARI 2024
6	Masker Oksigen Anak	PCS	1.609.300,00	APBD	JULI 2024
RSUD KOTA PALANGKA RAYA (BLUD)					
1	INSULIN PEN NEEDLE 32G GIDCARE	BOX	2.466.200,00	BLUD	ED
2	Masker NRM Dewasa _Delvi-Care	PCS	10.620.000,00	BLUD	ED
3	Water One 1 Liter	BOTOL	1.430.000,00	BLUD	ED
4	ETT (NON King- King) NO 4	Pcs	1.731.600,00	BLUD	ED
Jumlah			81.219.471,00		

Sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat persediaan yang telah kadaluarsa namun belum dimusnahkan karena pagu dana untuk kegiatan pemusnahan terbatas. Pemusnahan dilakukan dengan cara memilah dan menimbang menyesuaikan jumlah pagu dana kegiatan pemusnahan yang tersedia.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	99.755.448.451,41	89.247.948.451,41

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Adapun Investasi Jangka Panjang pemerintah kota Palangka Raya terdiri dari Investasi Permanen pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.123. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen

No.	Badan Usaha Milik Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	29.205.257.156,60	29.205.257.156,60
2.	Perusahaan Daerah Isen Mulang (PDIM)	4.550.191.294,81	4.550.191.294,81
3.	Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	63.000.000.000,00	52.492.500.000,00
4.	PT Jamkrida	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah		99.755.448.451,41	89.247.948.451,41

Investasi pada PDAM dan PDIM menggunakan metode ekuitas dan pada Bank Kalimantan Tengah dan PT. Jamkrida menggunakan metode biaya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.2.1. Perusahaan Daerah Air Minum

Saldo Awal Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2023 (Rp)	29.205.257.156,60
Penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2024 (Rp)	0,00
Jumlah (Rp)	29.205.257.156,60

Tabel 5.124. Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum

Tahun Penyertaan Modal	Nilai (Rp)
2010	1.500.000.000,00
2011	500.000.000,00
2012	2.000.000.000,00
2013	2.000.000.000,00
2014	4.000.000.000,00
2015	4.500.000.000,00
2016	3.000.000.000,00
2017	1.998.000.000,00
2018	2.000.000.000,00
2019	2.500.000.000,00
2020	3.000.000.000,00
2021	4.500.000.000,00
2022	13.000.000.000,00
Jumlah	44.498.000.000,00

5.3.1.2.2. Perusahaan Daerah Isen Mulang

Saldo Awal Penyertaan Modal pada PDIM per 31 Desember 2023 (Rp)	4.550.191.294,81
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Isen Mulang (PDIM) Tahun 2024 (Rp)	0,00
Jumlah	4.550.191.294,81

Tabel 5.125. Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Isen Mulang

Tahun Penyertaan Modal	Nilai (Rp)
2011	1.000.000.000,00
2012	1.500.000.000,00
2013	1.000.000.000,00
2013	1.000.000.000,00
2014	1.000.000.000,00
2016	2.000.000.000,00
2017	1.000.000.000,00
2018	3.000.000.000,00
2019	400.000.000,00
2020	1.200.000.000,00
Jumlah	13.100.000.000,00

Sebagaimana diungkapkan dalam temuan pemeriksaan nomor 4 pada bagian Aset pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 25.B/LHP/XIX.PAL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya yang disajikan senilai Rp4.550.191.294,81 merupakan nilai ekuitas PDIM berdasarkan Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

PDIM Tahun 2020 *Unaudited*. Saldo ekuitas PDIM berdasarkan LK PDIM Tahun 2020 *Audited* senilai Rp4.662.982.548,00. Untuk tahun 2021 dan 2022, PDIM tidak menyusun Laporan Keuangan. Pada tahun 2023, PDIM yang telah berubah bentuk menjadi PT Isen Mulang (Persero) menyampaikan saldo ekuitasnya ke Pemerintah Kota Palangka Raya senilai Rp3.048.637.040,00.

5.3.1.2.3. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Saldo Awal Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 (Rp)	52.492.500.000,00
Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Rp)	10.507.500.000,00
Jumlah (Rp)	63.000.000.000,00

Tabel 5.126. Penyertaan Modal Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Tahun Penyertaan Modal	Nilai (Rp)
Akm. s/d 2010	1.813.606.690,00
2011	500.000.000,00
2012	1.062.000.000,00
2013	1.200.000.000,00
2014	1.500.000.000,00
2015	5.000.000.000,00
2016	5.324.393.310,00
2017	5.300.000.000,00
2018	5.300.000.000,00
2020	4.995.000.000,00
2021	4.995.000.000,00
2022	4.995.000.000,00
2023	10.507.500.000,00
2024	10.507.500.000,00
Jumlah	63.000.000.000,00

5.3.1.2.4. Penyertaan Modal PT Jamkrida

Tabel 5.127. Penyertaan Modal PT Jamkrida

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyertaan Modal Tahun 2014	1.500.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2017	1.500.000.000,00
	Jumlah	3.000.000.000,00

Penyertaan modal pada PT Jamkrida dilakukan pada tahun 2014 dan tahun 2017, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 tidak ada Penyertaan Modal ke PT Jamkrida.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.883.766.735.504,45	3.729.474.872.381,85

Aset Tetap milik Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 senilai Rp3.729.474.872.381,85 dan per 31 Desember 2024 Rp3.883.766.735.504,45 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.128. Aset tetap milik Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024

Kode Akun	Jenis Aset Tetap	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
01.03.01	Tanah	1.416.757.739.636,08	5.170.811.000,00	0,00	1.421.928.550.636,08
01.03.02	Peralatan dan Mesin	617.257.645.621,25	57.954.379.409,51	15.892.411.970,40	659.319.613.060,36
01.03.03	Gedung dan Bangunan	1.059.715.646.932,70	130.151.784.487,58	34.264.003.932,30	1.155.603.427.487,98
01.03.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.930.307.138.639,71	162.247.618.744,13	9.053.607.398,42	2.083.501.149.985,42
01.03.05	Aset Tetap lainnya	150.465.159.196,22	9.657.830.456,00	301.348.400,00	159.821.641.252,22
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	325.429.839.534,50	16.340.051.279,00	9.119.544.536,80	332.650.346.276,70
01.03.07	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.770.458.297.178,61	10.112.468.948,96	168.712.164.964,66	-1.929.057.993.194,31
Jumlah		3.729.474.872.381,85	391.634.944.325,18	237.343.081.202,58	3.883.766.735.504,45

Untuk diketahui bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap milik Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan akumulasi Belanja Modal dari tahun 2006 sampai dengan Tahun 2023 ditambah dengan hasil penilaian aset tahun 2006 untuk menilai aset tetap tahun 2005 ke bawah. Aset tetap Pemerintah Kota Palangka Raya yang tersaji di Neraca diawali dengan pijakan yang sama yaitu hasil penilaian aset tahun 2006. Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan beberapa langkah guna menertibkan Aset Tetap, yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi aset;
- Melakukan Reklasifikasi Aset atas kondisi Rusak Berat, Tidak Berwujud, Dihilangkan dan Aset yang nilainya berada dibawah Kapitalisasi Standar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Melakukan koreksi atas belanja modal TA 2024;
- Melakukan Koreksi terhadap kesalahan akibat kelebihan ataupun kurang catat dalam melakukan pencatatan di Neraca dengan menggunakan daftar Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai acuan utama;

Rekonsiliasi aset tetap antara Bidang Aset dan Bidang Akuntansi BPKAD dengan setiap SKPD. Juga dilakukan rekonsiliasi atas realisasi belanja modal untuk memastikan penambahan aset tetap yang bersumber dari belanja modal TA 2024.

Dari penyajian aset tetap di atas, dapat disajikan Aset Tetap per SKPD pada **Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7**. Sedangkan Aset Tetap per masing-masing KIB sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.3.1. Tanah

Tanah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.421.928.550.636,08	1.416.757.739.636,08

Tanah Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 Rp1.421.928.550.636,08 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.416.757.739.636,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129. Rekapitulasi Pencatatan Tanah di masing-masing SKPD

I	Saldo Per 1 Januari 2024	1.416.757.739.636,08
II	MUTASI TAMBAH	
1	BELANJA MODAL TAHUN 2024	2.620.818.000,00
2	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	-
3	HIBAH	2.549.993.000,00
4	MUTASI ANTAR SKPD	-
5	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	-
6	BELANJA BARANG YANG MENJADI UTANG	-
7	MUTASI DARI PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-
8	KAPITALISASI DARI EKSTRAKOMTABEL	-
9	MUTASI DARI ASET RUSAK BERAT	-
10	INVENTARISASI BARANG BERLEBIH	-
11	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-
12	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	-
13	MUTASI DARI ASET LAIN-LAIN	-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	5.170.811.000,00
III	MUTASI KURANG	
1	PENGHAPUSAN ASET	-
2	HIBAH	-
3	MUTASI ANTAR SKPD	-
4	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	-
5	KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL	-
6	KDP YANG SELESAI	-
7	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD	-
8	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	-
9	MUTASI KE PEMELIHARAAN	-
10	REKLAS KE RUSAK BERAT	-
11	MUTASI KE EKSTRAKOMTABEL	-
12	UTANG PEKERJAAN DI TAHUN SEBELUMNYA	-
13	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	-
14	KELEBIHAN MEMBAYAR/ PENGEMBALIAN	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 (I+II-III)	1.421.928.550.636,08



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Aset tetap tanah dikuasai oleh pihak ketiga tanpa dokumen yang sah. antara lain

- a. Tanah Pertokoan flamboyan Atas (Jalan Akhmad Yani)
 1. Status tanah pada Pertokoan/Ruko Jalan Ahmad Yani (Flamboyan Atas) adalah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan alas Hak Pengelolaan Nomor 15.01.01.03.5.00001 seluas 7.410 m² tanggal 25 Oktober 2002 tercatat pada KIB A Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha kecil. Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan Hak Pengelolaan Nomor 15.01.01.03.5.00001 seluas 2.253 m² 25 Oktober 2002 tercatat pada KIB A Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya;
 2. Pada Tahun 1988. Pemerintah Kota Palangka Raya mengadakan perjanjian penyerahan tanah di atas Hak Pengelolaan Tanah tersebut yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: AK.86.593.01.I.1988 tanggal 28 Januari 1988;
 3. Berdasarkan perjanjian tersebut. diberikan Hak Guna Bangunan selama 20 (dua puluh) tahun. sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 (dua) dalam perjanjian tersebut dengan menyebutkan bahwa “Penyerahan bidang tanah di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah tersebut kepada Pihak Kedua (II) untuk diberikan **Hak Guna Bangunan selama 20 (dua puluh) tahun.** kemudian dapat diperpanjang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan persetujuan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya”. Berdasarkan perjanjian tersebut pemegang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kota Palangka Raya telah **berakhir** sejak Tahun **2008**;
 4. Berdasarkan temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil kebijakan pemanfaatan barang milik daerah melalui sewa-menyewa. Sebagaimana telah ditetapkannya pemanfaatan tanah tersebut dengan bentuk pemanfaatan sewa senilai 8.602/meter per bulannya sebagaimana pada Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/571/2020;
 5. Pada tanggal 16-17 Maret 2021, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui instansi terkait (Inspektorat Kota Palangka Raya, Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha kecil. Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Kota Palangka Raya) telah melaksanakan Sosialisasi terhadap Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/571/2020 di Pertokoan/Ruko Flamboyan Atas Jalan Ahmad Yani dan dari hasil sosialisasi tersebut, namun tidak ada satupun pemilik Pertokoan/Ruko Flamboyan Atas Jalan Ahmad Yani yang bersedia menandatangani Perjanjian Sewa;
 6. Eks pemegang HGB melalui Pengurus Pasar Besar Flamboyan menolak sistem sewa menyewa, mereka menginginkan HGB tetap diperpanjang



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

dengan harapan setelah HGB berakhir, tanah tersebut akan menjadi milik mereka dengan peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik;

7. Arahan Dari KPK Pada Saat Monitoring Terkait Aset Bermasalah Tanggal 7 April 2021, Agar Dibuatkan Surat Kuasa Khusus Kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya Untuk Menindaklanjuti Permasalahan Tersebut;
8. Persatuan Pedagang Flamboyan Atas mengirim surat ke Kementerian PUPR dan ke Presiden terkait dengan permasalahan berikut; dan
9. Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Palangka Raya:
 - a) Telah Dilakukan Rapat Bersama Terkait Aset Bermasalah Tanggal 15 April 2021, Salah Satunya Flamboyan Atas;
 - b) Draft Surat Kuasa Khusus Telah Diajukan Kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;
 - c) Tanggal 27 Mei 2021 Telah Dilaksanakan Ekspose Antara Pemerintah Kota Palangka Raya Dengan Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Bahwa Pemko Diminta Untuk Memastikan Batas-Batas Tanah Hak Pengelolaan Tersebut, Karena Berdasarkan Hasil Paparan Dari Kepala Disperindag, Koperasi Dan UKM Kota Palangka Raya, Terdapat Indikasi HGB Yang Telah Berubah Menjadi SHM Yang Masuk Di Dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Pemko Tersebut;
 - d) Surat Kuasa Khusus dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan menyarankan agar permasalahan ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, sembari Pemko diminta untuk mengumpulkan bukti asli perjanjian dimaksud dan memastikan kembali terkait batas-batas hak pengelolaan milik Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut;
 - e) BPKAD Kota Palangka Raya telah melayangkan Nota Dinas ke Pimpinan (Wali Kota Palangka Raya dan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya) pada tanggal 25 Oktober 2021 bahwa permasalahan Flamboyan Atas dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum dengan melakukan gugatan pengaduan ke Polresta dan Pengadilan Negeri menggunakan Pasal 358 KUHP tentang Penyerobotan Tanah;
 - f) Berdasarkan notulen rapat tanggal 13 Januari 2022 terkait penyusunan bahan kebijakan Ruko Flamboyant atas, ruko S. Parman, dan Pasar Kameloh bahwa bentuk ketegasan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah melanjutkan proses sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu system sewa menyewa ataupun dengan tarif retribusi daerah, terlampir draft surat pemberitahuan dan rencana aksi;
 - g) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tanggal 25 Februari 2022 perihal Percepatan Pemungutan Retribusi dan Sewa untuk melaporkan pelaksanaan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

- percepatan perjanjian sewa menyewa paling lambat tanggal 22 Maret 2022;
- h) Bahwa permasalahan Ruko Flamboyan Atas telah menjadi perhatian oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana surat dari Kementerian Sekretariat Negara tanggal 1 Februari 2022 kepada Wali Kota Palangka Raya atas laporan surat dari Pengurus Persatuan Pedagang Flamboyan Atas kepada Bapak Presiden RI pada tanggal 2 Desember 2021. Sehingga pada tanggal 30 Juni 2022, Tim dari Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan monitoring ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dilakukan ekspose terkait permasalahan tersebut dengan difasilitasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - i) Pada tanggal 25 Agustus 2022 telah dilakukan pemasangan plang tanda kepemilikan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya di lokasi dimaksud.
 - b. Tanah Pertokoan/RUKO Jalan S. Parman (Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah)
 - 1. Status tanah pada Pertokoan/Ruko Jalan S.Parman (depan Dinas PU Provinsi Kalteng) adalah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kota Palangka Raya. Nomor 15.01.01.03.5.00004 seluas 2.778 m² tanggal 25 Oktober 2002;
 - 2. Pada Tahun 1995, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengadakan perjanjian pengelolaan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dalam bentuk kerjasama sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelola Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor: 500/243/Bag.Ek/1995 tanggal 21 Februari 1995. dimana disebutkan dalam pasal 2 (dua) pada perjanjian tersebut bahwa “Penyerahan bagian bidang tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah tersebut kepada Pihak Kedua (II) untuk dapat diberikan Hak Guna Bangunan selama **20 (dua puluh) tahun** oleh pejabat yang berwenang sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. kemudian dapat diperpanjang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan persetujuan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya” dan pada Pasal 2 Adendum tanggal Agustus 1995 terhadap Perjanjian Nomor: 500/243/Bag.Ek/1995 tanggal 21 Februari 1995 berbunyi “Setelah berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana Pasal 2 maka bidang tanah dari Hak Guna Bangunan yang kembali menjadi Hak Pengelolaan tersebut diartikan bahwa tanah dan bangunan di atasnya **kembali menjadi milik Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya** sebagai dasar untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan serta pembayaran kompensasinya sebagaimana disebut dalam Pasal 2 terdahulu perlu suatu perjanjian baru kedua pihak”;



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

3. Pemegang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kota Palangka Raya telah **berakhir** sejak **25 September 2017** dan sampai saat ini tidak ada permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut dari pemilik bangunan pertokoan tersebut;
4. Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan permohonan pengukuran ulang tapal batas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Palangka Raya agar dapat mengetahui lokasi bangunan yang menjadi objek Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan jumlah ruko yang dilakukan pengukuran sebanyak 60 pintu;
5. Arahan dari KPK pada saat monitoring terkait aset bermasalah tanggal 7 April 2021, agar dibuatkan surat kuasa khusus kepada kejaksaan negeri palangka raya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut;
6. Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Palangka Raya:
 - a) Telah dilakukan rapat bersama terkait aset bermasalah tanggal 15 April 2021, salah satunya ruko Jl. S.Parman;
 - b) Draft Surat Kuasa Khusus (SKK) telah diajukan kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan pada tanggal 27 Mei 2021 telah dilaksanakan ekspose dengan Kejaksaan Negeri Palangka Raya. Dari hasil ekspose diperoleh informasi bahwa Pihak Disperindag, Koperasi Dan UKM Kota Palangka Raya kesulitan berkomunikasi dengan pemilik HGB karena tidak adanya persatuan pengurus pasar, sehingga SKK perlu direvisi kembali terkait nama pihak perorangan yang menguasai per bangunan hak pengelolaan Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut;
 - c) Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengajukan permohonan pengukuran ulang tapal batas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Palangka Raya, menunggu penjadwalan dari Kantor Pertanahan Palangka Raya;
 - d) Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengedarkan surat ke penghuni ruko bahwa HGB tidak diperpanjang dan akan dikenakan tarif sewa atas pemanfaatan kekayaan barang milik daerah pada tanggal 10 Agustus 2021. Bagi yang berminat untuk menyewa ruko tersebut harus membuat Surat Permohonan ke Wali Kota Palangka Raya u.p. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
 - e) Sampai dengan laporan ini disusun, telah ada 22 (dua puluh dua) orang yang menyampaikan permohonan sewa untuk menempati 30 (tiga puluh) pintu ruko;
 - f) Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyurati penghuni Ruko pada tanggal 16 September 2021 bahwa perhitungan Tarif sewa akan diambil dari Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
 - g) Pada tanggal 27 September 2021, telah dilakukan sosialisasi tarif sewa kepada penghuni ruko berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, diperoleh hasil bahwa penghuni ruko



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

menginginkan keringanan tarif sewa sebagaimana Surat dari Perwakilan penghuni tertanggal 27 September 2021;

- h) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah melayangkan Nota Dinas ke Pimpinan (Wali Kota Palangka Raya dan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya) pada tanggal 26 Oktober 2021 berupa surat balasan ke penghuni tersebut, Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Tanah dan Simulasi Tarif Sewa pada Ruko S. Parman berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
- i) Berdasarkan notulen rapat tanggal 13 Januari 2022 terkait penyusunan bahan kebijakan Ruko Flamboyant Atas, Ruko S. Parman, dan Pasar Kameloh bahwa bentuk ketegasan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah melanjutkan proses sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sistem sewa menyewa ataupun dengan tarif retribusi daerah sebagaimana disebutkan pada draft surat pemberitahuan dan rencana aksi yang telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
- j) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tanggal 25 Februari 2022 perihal Percepatan Pemungutan Retribusi dan Sewa untuk melaporkan pelaksanaan percepatan perjanjian sewa menyewa paling lambat tanggal 22 Maret 2022; dan
- k) Pada tanggal 25 Agustus 2022 telah dilakukan pemasangan plang tanda kepemilikan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya di lokasi dimaksud.

c. Tanah Pasar Kameloh

1. Status tanah pada Pertokoan Pasar Kameloh adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 15.01.01.02.5.00003 Kelurahan Langkai seluas 8.078 m² yang terbit pada 25 Oktober 2002 atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Pada Tahun 1997. Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengadakan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Penataan dan Pembangunan Kembali Pasar Kameloh di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Tahun 1996 s/d 1997 antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya (Pihak Pertama) dengan PT.Borneo Betang Mandiri (Pihak Kedua);
3. Diatas Sertifikat Hak Pengelolaan pada angka 2 huruf a berdiri Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15.01.01.02.3.00776 Kelurahan Langkai seluas 7.924 m² yang terbit pada 5 Juli 1997 atas nama PT.Borneo Betang Mandiri yang **berakhir pada 5 Juli 2017**;



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

4. PT. Borneo Betang Mandiri kemudian memindahkan hak atas sebagian HGB menjadi persil-persil kecil kepada pedagang Pasar Kameloh dalam bentuk HGB;
5. Kondisi saat ini bahwa **HGB Pasar Kameloh diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Palangka Raya telah berakhir**, dan pedagang melalui Pengurus Pasar Kameloh memohon perpanjangan/pembaharuan HGB;
6. Pasal 13 ayat (1) pada Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan PT.Borneo Betang Mandiri menyebutkan bahwa “Setelah lewat masa 20 (dua puluh) tahun yaitu dengan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan. maka tanah dan bangunan yang diserahkan atau dikelola PIHAK KEDUA atau penggantinya. **langsung beralih menjadi milik dan dikuasai kembali oleh PIHAK PERTAMA**. tanpa adanya proses tertentu ataupun persyaratan lain yang menjadi beban PIHAK PERTAMA”;
7. Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Kota Palangka Raya telah melakukan Koordinasi awal ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 15.01.01.02.5.00003 Kelurahan Langkai telah tervalidasi di sistem BPN RI, selanjutnya menyerahkan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya apakah akan memberikan perpanjangan HGB atau kebijakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya:
 - a) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya telah mengajukan Nota Dinas ke Wali Kota Palangka Raya dan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya tanggal 19 Mei 2021 perihal Tindak Lanjut Pertokoan Pasar Kameloh, apakah akan diberlakukan Pemanfaatan BMD berupa Sewa seperti halnya Ruko Flamboyan Atas, atau kebijakan lain sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Hasil keputusan Pemko Palangka Raya HGB tidak diperpanjang dan akan dikenakan tarif sewa pemanfaatan BMD;
 - c) Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyurati penghuni Ruko tanggal 16 September 2021 bahwa Tarif sewa akan diambil dari Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
 - d) Pada tanggal 28 September 2021, telah dilakukan sosialisasi tarif sewa kepada penghuni ruko berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, diperoleh hasil bahwa penghuni ruko menginginkan keringanan tarif sewa bahkan opsi untuk memperpanjang HGB sebagaimana Surat dari Pengurus Pedagang Pasar Kameloh tanggal 5 Oktober 2021;
 - e) Berdasarkan notulen rapat tanggal 13 Januari 2022 terkait penyusunan bahan kebijakan Ruko Flamboyant Atas, ruko S. Parman, dan Pasar Kameloh bahwa bentuk ketegasan Pemerintah



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kota Palangka Raya adalah melanjutkan proses sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu system sewa menyewa ataupun dengan tarif retribusi daerah, terlampir draft surat pemberitahuan dan rencana aksi;

- f) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tanggal 25 Februari 2022 perihal Percepatan Pemungutan Retribusi dan Sewa untuk melaporkan pelaksanaan percepatan perjanjian sewa menyewa paling lambat tanggal 22 Maret 2022; dan
- g) Pada tanggal 25 Agustus 2022 telah dilakukan pemasangan plang tanda kepemilikan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya di lokasi dimaksud.

d. Barata *Department Store*

- 1. Alas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 15.01.01.02.4.00008 Kelurahan Langkai a.n. Pemerintah Kota Palangka Raya (tercatat di Disperindag, UKM, Koperasi Kota Palangka Raya);
- 2. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan PT. Barataguna Indoganessa Nomor 188.5.55/08/Huk tentang Sewa/Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 3. Permasalahan: Perjanjian Kerja Sama telah berakhir, dan HGB akan berakhir pada Tahun 2024;
- 4. Informasi Umum:
 - a) PT. Barataguna Indoganessa diberikan hak pengelolaan atas tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya seluas 494 m² selama 20 (dua puluh) tahun mulai dari 26 Mei 2001 sampai dengan 26 Mei 2021;
 - b) Berdasarkan Pasal 4 dalam Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan PT. Barataguna Indoganessa disebutkan bahwa “Setelah masa Hak Pengelolaan/sewa berakhir, maka sebidang tanah seluas 494 m² yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada PT. Barataguna Indoganessa langsung beralih menjadi milik dan dikuasai Kembali oleh Pemerintah Kota Palangka Raya termasuk bangunan di atasnya tanpa adanya proses tertentu ataupun persyaratan lain yang menjadi beban Pemerintah Kota Palangka Raya”;
 - c) Berdasarkan Pasal 6 dalam Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan PT. Barataguna Indoganessa disebutkan bahwa “Penggunaan tanah/sewa sebagaimana Pasal 1 diatas, kepada Pihak Kedua dengan Pertimbangan *Public Service* oleh Pihak Kesatu maka dikenakan sewa tanah selama dua puluh tahun sebesar Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)”;
 - d) Untuk diketahui bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut tidak terdapat klausul perpanjangan sewa/penggunaan tanah sehingga bangunan di atasnya menjadi barang milik daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5. Upaya Tindak Lanjut:

- a) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya kepada Direktur/Pengelola PT. Barataguna Indoganesha Nomor 900/835.a/Bid.IV/BPKAD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Surat Pemberitahuan;
- b) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya kepada Direktur/Pengelola PT. Barataguna Indoganesha Nomor 900/1151/Bid.IV/BPKAD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Penegasan Pemberitahuan ke-2;
- c) Surat Pimpinan Barata Departemen Store kepada Walikota Palangka Raya Nomor Lepas, tanggal 7 Mei 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Barata Departemen Store Palangka Raya dan Permohonan Keringanan Sewa HGB;
- d) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya kepada Pimpinan Barata Departemen Store Nomor 900/1502/Bid.IV/BPKAD/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Keringanan Sewa;
- e) Surat Permohonan Sewa Bangunan dan Tanah dari Pimpinan Barata Departemen Store, Nomor Lepas, tanggal 20 Agustus 2021 tentang pengajuan permohonan sewa barang milik daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;
- f) Laporan Penilaian Properti Tujuan Penilaian Sewa Pasar Tanah dan Bangunan Departemen Store PT. Barataguna Indoganesha dari Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy dan Rekan Kantor Cabang Pontianak, Nomor: 00270/2.0017-03/PI/11/0529/1/XII/2021, Tanggal 09 Desember 2021;
- g) Bersama ini disampaikan bahwa pada halaman 41 Bab 3.5 Kesimpulan pada Laporan Penilaian Properti Tujuan Penilaian Sewa Pasar Tanah dan Bangunan *Department Store* PT. Barataguna Indoganesha dari Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy dan Rekan Kantor Cabang Pontianak diperoleh luas tanah 1.879 m² dan luas bangunan ±1.790 m² dengan indikasi nilai sewa pasar/m²/tahun sebesar Rp239.665 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau nilai sewa pasar/tahun Rp429.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- h) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 900/112/Bid.IV/BPKAD/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Barata *Department Store*;
- i) Surat dari PT Barataguna Indoganesha tanggal 24 Januari 2022 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Nilai sewa Tanah dan Bangunan Barata *Department Store*;
- j) Bahwa PT Barataguna Indoganesha mengajukan harga Rp35.800.000 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk perpanjangan sewa tanah seluas 1.879 m²;



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

- k) Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 900/240/Bid.IV/BPKAD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pemberitahuan ke-2 Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Barata *Department Store*;
- l) Surat dari PT Barataguna Indoganesha tanggal 14 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Barata *Department Store*;
- m) Bahwa PT Barataguna Indoganesha menaikkan penawaran dari Rp35.800.000 (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk perpanjangan sewa tanah seluas 1.879 m²;
- n) Pemerintah Kota Palangka Raya tetap berpatokan pada nilai sewa yang telah dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy dan Rekan Cabang Pontianak yang tertuang pada Laporan Penilaian Properti Tujuan Penilaian Sewa Pasar Tanah dan Bangunan *Department Store* PT. Barataguna Indoganesha yaitu Rp429.000.000/tahun untuk nilai sewa tanah dan bangunan seluas 1.879 m²;
- o) Surat Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Nomor:870/50/Bid.I/BPPRD/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Penilaian Sewa Barang Milik Pemerintah Kota Palangka Raya bahwa diperoleh Opsi Nilai terendah menggunakan metode *Capitalization Rate* adalah sebesar Rp196.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) per tahun; dan
- p) Pada tanggal 25 Agustus 2022 telah dilakukan pemasangan plang tanda kepemilikan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya di lokasi dimaksud.

Aset tetap tanah yang digugat oleh pihak lain adalah sebagai berikut:

a. Puskesmas Pahandut

1. Dokumen Pendukung

- a) Alas Sertifikat hak pakai (Nomor 15.01.01.01.4.00140 Kelurahan Pahandut a.n. Pemerintah Kota Palangka Raya) tercatat di Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya;
- b) Alas Sertifikat hak pakai (Nomor 15.01.01.01.4.00142 Kelurahan Pahandut a.n. Pemerintah Kota Palangka Raya) tercatat di Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya;
- c) Alas Sertifikat hak pakai (Nomor 15.01.01.01.4.00143 Kelurahan Pahandut a.n. Pemerintah Kota Palangka Raya) tercatat di Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya; dan
- d) Alas Sertifikat hak pakai (Nomor 145 Kelurahan Pahandut a.n. Pemerintah Kota Palangka Raya) tercatat di Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya.

2. Permasalahan: Digugat oleh SAHIDAR NGABE SOEKAH.

3. Informasi Umum:

Status tanah pada Puskesmas Pahandut adalah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.4.00140 seluas 1.010 m², Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.01.4.00142 seluas



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

232 m², Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.01.4.00143 seluas 282 m² yang merupakan Penggantian Sertifikat karena terbakar terbit tanggal 3 Agustus 2002 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 145 seluas 3.210 m² dari Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat keputusan GUB KDH TK.I.KAL.TENG tanggal 15 Maret 1987. Nomor AP.03.593.3.32/kON/III/1987 Nomor Urut : 28.

4. Upaya Tindak Lanjut:

- a) Telah dilakukan pengukuran untuk proses pergantian sertifikat yang merupakan penggantian sertifikat karena terbakar;
- b) Adanya relaas pemberitahuan putusan peninjauan kembali nomor 61/Pdt.G/2022/PN Plk;
- c) Telah terbit Putusan Nomor 1166 PK/Pdt/2024 yang isinya untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat atau ahli waris Buntit Soekah yang dikalkulasikan secara materiil kerugian bernilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahunnya terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan didaftarkan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu selama 32 (tiga puluh dua) tahun, sehingga total kerugian materiil yang Penggugat ajukan senilai Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah); dan
- d) Terjadinya kerugian dimaksud merupakan kelalaian dari Pengguna Barang yaitu Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya yang membawahi Kuasa Pengguna Barang yaitu Puskesmas Pahandut sehingga lalai dalam memperoleh maupun menyimpan dokumen dan tidak diungkapkan sekian lama sampai akhirnya digugat oleh ahli waris si Peminjam tanah (Surat Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Palangka Raya, sesuai surat Nomor 282/35/Pem/86, tanggal 18 Agustus 1986 perihal mohon pengembalian pinjam pakai tanah yang mana tanah yang didirikan Puskesmas Pahandut merupakan tanah pinjam pakai dari Buntit Ngabe Soekah).

b. Kecamatan Pahandut

1. Dokumen Pendukung:

Alas Sertifikat hak pakai (Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Kelurahan Panarung a.n. Pemerintah Kota Palangka Raya) tercatat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

2. Permasalahan digugat oleh:

- a) Hj. NOOR HADIJAH Binti H.FIRDAUS;
- b) FIRHAN Bin H.FIRDAUS; dan
- c) M. RAMADHANI Bin H.FIRDAUS.

3. Informasi Umum:

Status tanah pada Kecamatan Pahandut adalah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 seluas 6.168 m.

4. Upaya Tindak Lanjut:

- a) Telah diterbitkan sertifikat yang merupakan penggantian sertifikat karena terbakar terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan surat ukur nomor 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dengan luas 10.225 m²;
- b) Sertifikat hak pakai nomor 15.01.01.10.4.000.60 merupakan pengganti dari sertifikat hak pakai Nomor 410/Kelurahan Pahandut



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

terbit tanggal 31 Maret 1993 dan surat ukur nomor 3674/1992 tanggal 11 September 1992 luas 10.225 m² yang terbakar;

- c) Pada tahun 2014 pernah dilakukan pemasangan plang tanda kepemilikan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya di lokasi dimaksud sebagai bentuk pengamanan barang milik daerah; dan
- d) Telah terbit Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Plk yang isinya gugatan dari penggugat ditolak sehingga tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 seluas 6.168 m masih merupakan milik Pengguna Barang yaitu Kecamatan Pahandut.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	659.319.613.060,36	617.257.645.621,25

Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp659.319.613.060,36 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp617.257.645.621,25. Pada Puskesmas Pahandut terdapat kendaraan berupa mobil ambulance yang digunakan untuk kegiatan operasional namun belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Puskesmas Pahandut. Diketahui ambulance tersebut diterima dari Kementerian Kesehatan namun tidak disertai dokumen hibah. Untuk mendapatkan kepastian status kendaraan tersebut, Puskesmas Pahandut bersama dengan Dinas Kesehatan sedang dalam proses penelusuran dokumen ke Kementerian Kesehatan. Apabila dokumen yang ditemukan berupa hibah, maka akan segera ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah pada Puskesmas Pahandut oleh Kepala Daerah. Namun apabila statusnya hanya berupa pinjam pakai, maka Puskesmas Pahandut melalui Dinas Kesehatan akan bersurat kepada Kementerian Kesehatan untuk memohon hibah atas kendaraan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya agar biaya operasional atas penggunaan kendaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5.130. Rekapitulasi Pencatatan Peralatan dan Mesin

I		Saldo per 1 Januari 2024	617.257.645.621,25
II		Mutasi Tambah	
	1	BELANJA MODAL TAHUN 2024	48.825.356.209,00
	2	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	3.415.772.524,00
	3	HIBAH	2.859.531.800,00
	4	MUTASI ANTAR SKPD	-
	5	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	2.853.718.876,51
	6	BELANJA BARANG YANG MENJADI UTANG	-
	7	MUTASI DARI PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-
	8	KAPITALISASI DARI EKSTRAKOMTABEL	-
	9	MUTASI DARI ASET RUSAK BERAT	-
	10	INVENTARISASI BARANG BERLEBIH	-
	11	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-
	12	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	-
	13	MUTASI DARI ASET LAIN-LAIN	-
		JUMLAH MUTASI TAMBAH	57.954.379.409,51



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

III	Mutasi Kurang	
1	PENGHAPUSAN ASET	-
2	HIBAH	-
3	MUTASI ANTAR SKPD	-
4	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	834.000.000,00
5	KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL	9.978.948,08
6	KDP YANG SELESAI	-
7	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD	27.750.000,00
8	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	880.418.835,00
9	MUTASI KE PEMELIHARAAN	-
10	REKLAS KE RUSAK BERAT	10.771.930.159,15
11	MUTASI KE EKSTRAKOMTABEL	3.368.334.028,17
12	UTANG PEKERJAAN DI TAHUN SEBELUMNYA	-
13	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	-
14	KELEBIHAN MEMBAYAR/ PENGEMBALIAN	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	15.892.411.970,40
IV	Saldo per 31 Desember 2024 (I+II-III)	659.319.613.060,36

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.155.603.427.487,98	1.059.715.646.932,70

Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.155.603.427.487,98 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.059.715.646.932,70.

Tabel 5.131. Rekapitulasi Pencatatan Gedung dan Bangunan

I	Saldo per 1 Januari 2024	1.059.715.646.932,70
II	Mutasi Tambah	
1	BELANJA MODAL TAHUN 2024	121.569.959.253,32
2	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	1.862.209.940,10
3	HIBAH	-
4	MUTASI ANTAR SKPD	-
5	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	6.719.615.294,16
6	BELANJA BARANG YANG MENJADI UTANG	-
7	MUTASI DARI PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-
8	KAPITALISASI DARI EKSTRAKOMTABEL	-
9	MUTASI DARI ASET RUSAK BERAT	-
10	INVENTARISASI BARANG BERLEBIH	-
11	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-
12	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	-
13	MUTASI DARI ASET LAIN-LAIN	-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	130.151.784.487,58



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

III	Mutasi Kurang	
1	PENGHAPUSAN ASET	-
2	HIBAH	-
3	MUTASI ANTAR SKPD	-
4	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	28.600.119.245,51
5	KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL	305.427.706,79
6	KDP YANG SELESAI	-
7	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD	-
8	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	4.401.245.580,00
9	MUTASI KE PEMELIHARAAN	20.400.000,00
10	REKLAS KE RUSAK BERAT	821.811.400,00
11	MUTASI KE EKSTRAKOMTABEL	-
12	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANAN DINAS)	64.400.000,00
13	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	50.600.000,00
14	KELEBIHAN MEMBAYAR/ PENGEMBALIAN	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	34.264.003.932,30
IV	Saldo per 31 Desember 2024 (I+II-III)	1.155.603.427.487,98

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.083.501.149.985,42	1.930.307.138.639,71

Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.083.501.149.985,42 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.930.307.138.639,71.

Tabel 5.132. Rekapitulasi Pencatatan Jalan, Jaringan dan Irigasi

I	Saldo per 1 Januari 2024	1.930.307.138.639,71
II	Mutasi Tambah	
1	BELANJA MODAL TAHUN 2024	154.589.854.012,13
2	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	614.900.000,00
3	HIBAH	43.956.000,00
4	MUTASI ANTAR SKPD	-
5	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	6.998.908.732,00
6	BELANJA BARANG YANG MENJADI UTANG	-
7	MUTASI DARI PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-
8	KAPITALISASI DARI EKSTRAKOMTABEL	-
9	MUTASI DARI ASET RUSAK BERAT	-
10	INVENTARISASI BARANG BERLEBIH	-
11	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-
12	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	-
13	MUTASI DARI ASET LAIN-LAIN	-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	162.247.618.744,13



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

III	Mutasi Kurang	
1	PENGHAPUSAN ASET	-
2	HIBAH	-
3	MUTASI ANTAR SKPD	-
4	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	3.470.248.964,16
5	KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL	1.124.802.911,60
6	KDP YANG SELESAI	-
7	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD	-
8	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	3.109.476.016,42
9	MUTASI KE PEMELIHARAAN	450.000.000,00
10	REKLAS KE RUSAK BERAT	-
11	MUTASI KE EKSTRAKOMTABEL	289.139.000,00
12	UTANG PEKERJAAN DI TAHUN SEBELUMNYA	-
13	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	609.940.506,24
14	KELEBIHAN MEMBAYAR/ PENGEMBALIAN	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	9.053.607.398,42
IV	Saldo per 31 Desember 2024 (I+II-III)	2.083.501.149.985,42

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	159.821.641.252,22	150.465.159.196,22

Aset tetap lainnya pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp159.821.641.252,22 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp150.465.159.196,22.

Tabel 5.133. Rekapitulasi Pencatatan Aset Tetap Lainnya

I	Saldo per 1 Januari 2024	150.465.159.196,22
II	Mutasi Tambah	
1	BELANJA MODAL TAHUN 2024	252.895.000,00
2	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	4.659.266,00
3	HIBAH	30.343.400,00
4	MUTASI ANTAR SKPD	-
5	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	9.369.932.790,00
6	BELANJA BARANG YANG MENJADI UTANG	-
7	MUTASI DARI PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-
8	KAPITALISASI DARI EKSTRAKOMTABEL	-
9	MUTASI DARI ASET RUSAK BERAT	-
10	INVENTARISASI BARANG BERLEBIH	-
11	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-
12	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	-
13	MUTASI DARI ASET LAIN-LAIN	-
	Jumlah Mutasi Tambah	9.657.830.456,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

III	Mutasi Kurang	
1	PENGHAPUSAN ASET	-
2	HIBAH	-
3	MUTASI ANTAR SKPD	-
4	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	213.995.000,00
5	KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL	18.110.000,00
6	KDP YANG SELESAI	-
7	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD	-
8	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	38.900.000,00
9	MUTASI KE PEMELIHARAAN	-
10	REKLAS KE RUSAK BERAT	-
11	MUTASI KE EKSTRAKOMTABEL	30.343.400,00
12	UTANG PEKERJAAN DI TAHUN SEBELUMNYA	-
13	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	-
14	KELEBIHAN MEMBAYAR/ PENGEMBALIAN	-
	Jumlah Mutasi Kurang	301.348.400,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024 (I+II-III)	159.821.641.252,22

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	332.650.346.276,70	325.429.839.534,50

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp332.650.346.276,70 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp325.429.839.534,50.

Tabel 5.134. Rekapitulasi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan

I	Saldo per 1 Januari 2024	325.429.839.534,50
II	Mutasi Tambah	
1	BELANJA MODAL TAHUN 2024	-
2	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	-
3	HIBAH	-
4	MUTASI ANTAR SKPD	-
5	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	16.142.151.279,00
6	BELANJA BARANG YANG MENJADI UTANG	-
7	MUTASI DARI PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-
8	KAPITALISASI DARI EKSTRAKOMTABEL	-
9	MUTASI DARI ASET RUSAK BERAT	-
10	INVENTARISASI BARANG BERLEBIH	-
11	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-
12	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	197.900.000,00
13	MUTASI DARI ASET LAIN-LAIN	-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	16.340.051.279,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

III	Mutasi Kurang	
1	PENGHAPUSAN ASET	-
2	HIBAH	-
3	MUTASI ANTAR SKPD	-
4	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	1.530.665.670,00
5	KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL	153.580.774,80
6	KDP YANG SELESAI	7.435.298.092,00
7	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD	-
8	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	-
9	MUTASI KE PEMELIHARAAN	-
10	REKLAS KE RUSAK BERAT	-
11	MUTASI KE EKSTRAKOMTABEL	-
12	UTANG PEKERJAAN DI TAHUN SEBELUMNYA	-
13	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	-
14	KELEBIHAN MEMBAYAR/ PENGEMBALIAN	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	9.119.544.536,80
IV	Saldo per 31 Desember 2024 (I+II-III)	332.650.346.276,70

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	-1.929.057.993.194,31	- 1.770.458.297.178,61

Adanya perubahan basis akuntansi dari *Cash Toward Accrual* (CTA) yang masih diterapkan pada TA 2015 menjadi basis akuntansi akrual di TA 2016, mengharuskan Pemerintah Kota Palangka Raya menyajikan penyusutan aset tetap. Metode perhitungan penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Palangka Raya menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat suatu aset tetap telah diatur di dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya. Adapun perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai berikut:

Saldo Akhir 31 Desember 2023 -1.770.458.297.178,61

Mutasi Tambah:

- i. Koreksi Ekuitas Lainnya 2,00
- ii. Koreksi Akumulasi Penyusutan 10.004.770.358,96

Mutasi Kurang:

- i. Koreksi Ekuitas Lainnya 2,00
- ii. Koreksi Akumulasi Penyusutan 382.347.375,41 +

Saldo Awal 1 Januari 2024 -1.760.835.874.195,06

Mutasi Kurang :

- i. Beban Penyusutan 2024 168.222.118.999,25 -

Saldo Akhir 31 Desember 2024 -1.929.057.993.194,31

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.929.057.993.194,31 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.135. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Satuan Kerja	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2024
1	Sekretariat Daerah	-69.422.761.333,30	1.266.015.995,43	4.142.292.075,50	-72.299.037.413,37
2	Sekretariat DPRD	-22.395.695.339,00	1.402.029.675,00	2.865.091.291,00	-23.858.756.955,00
3	Inspektorat	-3.968.723.450,02	22.800.000,00	553.531.481,00	-4.499.454.931,02
4	Dinas Pendidikan	-116.796.513.941,04	0,00	17.134.175.797,00	-133.930.689.738,04
5	Dinas Kesehatan	-59.611.881.913,14	3.850.000,00	6.774.524.718,96	-66.382.556.632,10
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-1.068.734.274.530,36	5.611.526,00	67.201.350.149,97	-1.135.930.013.154,33
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	-143.285.535.714,09	302.491.718,58	19.290.903.175,22	-162.273.947.170,73
8	Dinas Sosial	-2.397.245.292,00	0,00	487.155.072,00	-2.884.400.364,00
9	Dinas Tenaga Kerja	-5.075.481.390,89	0,00	452.108.723,00	-5.527.590.113,89
10	Dinas Perhubungan	-33.385.016.207,11	3.227.188.627,38	4.201.407.399,00	-34.359.234.978,73
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-5.539.921.357,00	0,00	739.486.636,00	-6.279.407.993,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	-33.047.610.216,09	0,00	4.181.104.541,00	-37.228.714.757,09
13	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	-6.610.958.943,56	78.163.509,00	1.114.463.860,00	-7.647.259.294,56
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-3.672.640.027,02	6.201.973,00	846.136.400,00	-4.512.574.454,02
15	Dinas Perikanan	-11.460.445.018,38	102.245.500,00	693.191.072,00	-12.051.390.590,38
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	-9.981.847.668,00	0,00	1.127.688.691,00	-11.109.536.359,00
17	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-30.292.614.109,63	0,00	1.729.326.216,00	-32.021.940.325,63
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	-14.946.514.620,00	211.317.024,00	1.689.907.846,00	-16.425.105.442,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-3.361.645.021,00	670.093.614,00	438.245.923,00	-3.129.797.330,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	-5.258.195.448,63	0,00	410.959.433,00	-5.669.154.881,63



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Satuan Kerja	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2024
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-8.846.666.085,00	0,00	810.464.497,00	-9.657.130.582,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	-3.905.714.284,00	173.428.574,00	890.147.813,00	-4.622.433.523,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-7.404.151.929,36	0,00	594.387.747,00	-7.998.539.676,36
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-7.295.939.855,11	225.450.000,00	1.122.232.604,00	-8.192.722.459,11
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-8.366.283.457,33	1.588.118.050,00	727.005.757,00	-7.505.171.164,33
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-3.855.182.536,00	0,00	506.104.302,00	-4.361.286.838,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-2.522.284.513,00	1.226.666,00	261.247.863,00	-2.782.305.710,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-6.067.208.805,00	0,00	1.436.018.003,00	-7.503.226.808,00
29	Kecamatan Jekan Raya	-4.423.953.834,00	0,00	638.632.965,00	-5.062.586.799,00
30	Kecamatan Pahandut	-5.668.997.281,00	0,00	935.031.221,00	-6.604.028.502,00
31	Kecamatan Bukit Batu	-5.233.535.672,00	0,00	953.318.807,00	-6.186.854.479,00
32	Kecamatan Sabangau	-4.194.168.191,00	0,00	784.022.869,00	-4.978.191.060,00
33	Kecamatan Rakumpit	-5.705.609.379,04	0,10	985.073.245,10	-6.690.682.624,04
34	Rumah Sakit Umum Kelas D (BLUD)	-41.991.743.790,00	682.577.908,47	21.299.397.946,91	-62.608.563.828,44
35	Puskesmas Pahandut (BLUD)	-5.731.336.026,51	35.960.000,00	588.330.236,00	-6.283.706.262,51
	Jumlah	-1.770.458.297.178,61	10.004.770.360,96	168.604.466.376,66	-1.929.057.993.194,31

Penambahan dan pengurangan terjadi karena adanya reklasifikasi akun aset tetap, reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dan beban penyusutan tahun 2024 sehingga mempengaruhi nilai penyusutan aset.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	151.235.855.962,55	271.450.796.360,47

Aset Lainnya Pemerintah Kota Palangka Raya di Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp151.235.855.962,55 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.136. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024

Jenis Aset	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2024
Tagihan Penjualan Angsuran	162.356.112,00	0,00	0,00	162.356.112,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	18.539.400.144,75	0,00	4.477.710,00	18.534.922.434,75
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.574.580.000,00	0,00	0,00	8.574.580.000,00
Aset Tidak Berwujud	9.460.473.151,00	240.250.000,00	0,00	9.700.723.151,00
Aset Lain-lain	60.562.445.859,72	11.642.270.362,63	0,00	72.204.716.222,35
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-6.325.138.906,00	0,00	937.310.997,00	-7.262.449.903,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-501.722.001,00	0,00	9.622.422.983,55	-10.124.144.984,55
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	180.978.402.000,00	4.141.468.000,00	125.674.717.070,00	59.445.152.930,00
Jumlah	271.450.796.360,47	16.023.988.362,63	136.238.928.760,55	151.235.855.962,55

Penjelasan:

- Mutasi tambah dengan total Rp16.023.988.362,63 terdiri dari:
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2024 senilai Rp138.500.000,00;
 - Di luar Belanja Modal (Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tidak Berwujud) senilai Rp74.000.000,00;
 - Reklasifikasi antar KIB (ke Aset Lain-lain) dengan kondisi Rusak Berat senilai Rp11.593.741.559,15;
 - Reklasifikasi antar KIB (ke Aset Tidak Berwujud) senilai Rp27.750.000,00;
 - Kelebihan pembayaran Jalan Khusus (koreksi temuan BPK) yang dicatat sebagai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional senilai Rp48.528.803,48; dan
 - Dana TDF yang belum disalurkan ke RKUD senilai Rp4.141.468.000,00.
- Mutasi kurang dengan total Rp136.238.928.760,55 terdiri dari:
 - Penerimaan Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp4.477.710,00;
 - Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 senilai Rp934.373.497,00;
 - Koreksi saldo awal Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp2.937.500,00;
 - Reklasifikasi antar KIB (ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya) dengan kondisi Rusak Berat senilai Rp9.622.422.983,55; dan
 - Penerimaan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Bank Indonesia ke RKUD Kota Palangka Raya senilai Rp125.674.717.070,00.

5.3.1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	162.356.112,00	162.356.112,00

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 senilai Rp162.356.112,00 berupa Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas. Pada tahun 2024 tidak terdapat mutasi penambahan atau pengurangan.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	18.534.922.434,75	18.539.400.144,75

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp18.534.922.434,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024

Kode Akun	Jenis Aset Tetap	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Tahun 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.3.1.	TGR Bendahara	11.662.421.991,67	0,00	0,00	11.662.421.991,67
1.3.2.	TGR Bukan Bendahara	6.069.544.525,04	0,00	4.477.710,00	6.065.066.815,04
1.3.3.	TGR Pihak III	807.433.628,04	0,00	0,00	807.433.628,04
Jumlah		18.539.400.144,75	0,00	4.477.710,00	18.534.922.434,75

Penanggung Jawab dan status Tuntutan Ganti Rugi Bendahara yang berjumlah Rp11.662.421.991,67 adalah sebagai berikut:

1. Sudah Penetapan dengan Nomor Register Perkara 03.TP.02-2018 a.n. Deser Limin senilai Rp1.148.216.179,67;
2. Proses Penetapan berjumlah Rp2.974.466.361,00 terdiri dari a.n Siti Djubaidah senilai Rp49.609.691,00; Apriliyantoni senilai Rp1.668.221.555,00 dan Fried Asahel senilai Rp1.256.635.115,00; dan
3. Informasi senilai Rp7.539.739.451,00.

Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara sejumlah Rp6.065.066.815,04 terdiri dari tagihan berstatus Sudah Penetapan senilai Rp2.080.518.610,00 dan Informasi senilai Rp3.984.548.205,04.

Tuntutan Ganti Rugi Pihak Ketiga sejumlah Rp807.433.628,04 terdiri dari tagihan berstatus Sudah Penetapan senilai Rp563.770.367,50; Proses Penetapan senilai Rp243.666.190,00 dan kelebihan bayar tahun 2019 senilai Rp2.929,46.

5.3.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	8.574.580.000,00	8.574.580.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp8.574.580.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

No.	Sewa Guna Usaha	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Tahun 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.	Tanah Kosong Pada Bangunan CITRA	3.592.900.000,00	0,00	0,00	3.592.900.000,00
2.	Tanah Bangunan Pada BARATA	2.084.030.000,00	0,00	0,00	2.084.030.000,00
3.	Tanah Bangunan Pada PALMA (Hotel & Hiburan)	2.897.650.000,00	0,00	0,00	2.897.650.000,00
Jumlah		8.574.580.000,00	0,00	0,00	8.574.580.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

- Tanah kosong pada bangunan Citra beralamat di Jalan A. Yani/Jalan Darmosugondo yang dibeli pada Desember 2003 senilai Rp3.592.900.000,00 dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Tanah bangunan pertokoan Barata beralamat di Jalan A. Yani yang dibeli pada Desember 1998 senilai Rp2.084.030.000,00 dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian; dan
- Tanah bangunan Hotel Palma beralamat Kinibalu yang dibeli pada Desember 1992 senilai Rp2.897.650.000,00 dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

5.3.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	9.700.723.151,00	9.460.473.151,00

Pada Neraca Per 31 Desember 2023 Aset Tidak Berwujud adalah senilai Rp9.460.473.151,00 dan Saldo Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp9.700.723.151,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.139. Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	184.484.000,00	0,00	0,00	184.484.000,00
2	Inspektorat	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
3	Dinas Pendidikan	221.254.380,00	138.500.000,00	0,00	221.254.380,00
4	Dinas Kesehatan	222.321.800,00	0,00	0,00	222.321.800,00
5	Dinas Tenaga Kerja	24.700.000,00	0,00	0,00	24.700.000,00
6	Dinas Perhubungan	697.328.551,00	0,00	0,00	697.328.551,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	221.574.000,00	0,00	0,00	221.574.000,00
8	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	692.553.550,00	0,00	0,00	692.553.550,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	348.053.250,00	0,00	0,00	348.053.250,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	654.858.000,00	27.750.000,00	0,00	682.608.000,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	98.780.000,00	0,00	0,00	98.780.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.445.421.000,00	0,00	0,00	1.445.421.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	257.797.000,00	74.000.000,00	0,00	331.797.000,00
16	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.047.479.000,00	0,00	0,00	2.047.479.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.552.220,00	0,00	0,00	944.552.220,00
18	Kecamatan Pahandut	29.950.000,00	0,00	0,00	29.950.000,00
19	Kecamatan Bukit Batu	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
20	Kecamatan Sabangau	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21	RSUD Kelas D (BLUD)	1.180.866.400,00	0,00	0,00	1.180.866.400,00
	Jumlah	9.460.473.151,00	240.250.000,00	0,00	9.700.723.151,00

5.3.1.4.5. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	72.204.716.222,35	60.562.445.859,72

Aset Lain-lain pada Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 Rp60.562.445.859,72 dan per 31 Desember 2024 Rp72.204.716.222,35. Aset Lain-lain berdasarkan hasil inventarisasi adalah Barang Milik Daerah yaitu barang dengan kondisi rusak berat dan lainnya, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, atau dikuasai pihak lain yang akan dihibahkan, ekstrakomptabel/Reklasifikasi antar KIB/Mutasi lain-lain dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional.

Tabel 5.140. Rekapitulasi Pencatatan Aset Lain-lain

I		Saldo per 31 Desember 2023	60.562.445.859,72
II		Mutasi Tambah	
	1	BELANJA MODAL TAHUN 2024	-
	2	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	-
	3	HIBAH	-
	4	MUTASI ANTAR SKPD	-
	5	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	11.642.270.362,63
	6	BELANJA BARANG YANG MENJADI UTANG	-
	7	MUTASI DARI PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-
	8	KAPITALISASI DARI EKSTRAKOMTABEL	-
	9	MUTASI DARI ASET RUSAK BERAT	-
	10	INVENTARISASI BARANG BERLEBIH	-
	11	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-
	12	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	-
	13	MUTASI DARI ASET LAIN-LAIN	-
		JUMLAH MUTASI TAMBAH	11.642.270.362,63



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

III	Mutasi Kurang	
1	PENGHAPUSAN ASET	-
2	HIBAH	-
3	MUTASI ANTAR SKPD	-
4	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	-
5	KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL	-
6	KDP YANG SELESAI	-
7	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD	-
8	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	-
9	MUTASI KE PEMELIHARAAN	-
10	REKLAS KE RUSAK BERAT	-
11	MUTASI KE EKSTRAKOMTABEL	-
12	UTANG PEKERJAAN DI TAHUN SEBELUMNYA	-
13	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	-
14	KELEBIHAN MEMBAYAR/ PENGEMBALIAN	-
	JUMLAH MUTASI KURANG	-
IV	Saldo per 31 Desember 2024 (I+II-III)	72.204.716.222,35

5.3.1.4.6. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	-7.262.449.903,00	-6.325.138.906,00

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 sejumlah -Rp7.262.449.903,00 dan per 31 Desember 2023 adalah -Rp6.325.138.906,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.141. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Satuan Kerja	Saldo Akumulasi Amortisasi Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	-3.843.417,00	0,00	46.121.000,00	-49.964.417,00
2	Inspektorat	-100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
3	Dinas Pendidikan	-158.882.203,00	0,00	39.734.960,00	-198.617.163,00
4	Dinas Kesehatan	-102.603.133,00	0,00	44.894.500,00	-147.497.633,00
5	Dinas Tenaga Kerja	-15.437.500,00	0,00	6.175.000,00	-21.612.500,00
6	Dinas Perhubungan	-644.951.051,00	0,00	22.930.000,00	-667.881.051,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-151.574.000,00	0,00	0,00	-151.574.000,00
8	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-141.555.550,00	0,00	0,00	-141.555.550,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-332.474.786,00	0,00	15.578.464,00	-348.053.250,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	-13.333.333,00	0,00	10.000.000,00	-23.333.333,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Satuan Kerja	Saldo Akumulasi Amortisasi Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 (Rp)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	-363.691.960,00	0,00	168.339.500,00	-532.031.460,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-94.664.167,00	0,00	4.115.833,00	-98.780.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-967.325.916,00	0,00	123.705.167,00	-1.091.031.083,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-257.797.000,00	0,00	1.541.667,00	-259.338.667,00
15	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	-1.951.288.583,00	0,00	71.398.750,00	-2.022.687.333,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-696.780.257,00	0,00	77.497.056,00	-774.277.313,00
17	Kecamatan Pahandut	-29.950.000,00	0,00	0,00	-29.950.000,00
18	Kecamatan Bukit Batu	-10.937.500,00	0,00	3.750.000,00	-14.687.500,00
19	Kecamatan Sabangau	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
20	RSUD Kelas D (BLUD)	-278.048.550,00	0,00	292.716.600,00	-570.765.150,00
	Jumlah	-6.325.138.906,00	0,00	937.310.997,00	-7.262.449.903,00

5.3.1.4.7. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	-10.124.144.984,55	-501.722.001,00

Saldo Akumulasi Pemyusutan Aset Lainnya Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 sejumlah -Rp10.124.144.984,55 dan per 31 Desember 2023 -Rp501.722.001,00. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.142. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	Satuan Kerja	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-350.112.334,00	0,00	6.201.973,00	-356.314.307,00
2	Kecamatan Sabangau	-151.609.667,00	0,00	0,00	-151.609.667,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	225.450.000,00	-225.450.000,00
4	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	1.588.118.050,00	-1.588.118.050,00
5	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	78.163.509,00	-78.163.509,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	3.361.524,00	-3.361.524,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Satuan Kerja	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 (Rp)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	670.093.614,00	-670.093.614,00
8	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	211.317.024,00	-211.317.024,009
9	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	3.050.901.283,38	-3.050.901.283,38
10	Dinas Perikanan	0,00	0,00	102.245.500,00	-102.245.500,00
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	302.491.718,58	-302.491.718,58
12	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.266.015.995,43	-1.266.015.995,43
13	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	1.401.710.092,00	-1.401.710.092,00
14	Puskesmas Pahandut (BLUD)	0,00	0,00	35.960.000,00	-35.960.000,00
15	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya (BLUD)	0,00	0,00	680.392.700,16	-680.392.700,16
	Jumlah	-501.722.001,00	0,00	9.622.422.983,55	-10.124.144.984,55

5.3.1.4.8. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	59.445.152.930,00	180.978.402.000,00

Dana *Treasury Deposit Facility* merupakan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang disalurkan melalui fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah, yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-113/PK/PK.2/2024 tanggal 19 September 2024 Hal Pemberitahuan dan Himbauan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*, diketahui sisa Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kota Palangka Raya yang belum ditarik senilai Rp55.303.684.930,00. Kemudian diketahui terdapat transfer dari RKUN ke rekening TDF Pemerintah Kota Palangka Raya dengan SP2D nomor 249991304002417 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp4.141.468.000,00 yang merupakan pembayaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Adapun saldo TDF per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sisa Dana TDF Tahun 2023 senilai Rp55.303.684.930,00; dan
2. DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty senilai Rp4.141.468.000,00.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	7.498.421.031,82	62.816.461.165,93

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri dari:

- Utang Bunga;
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- Utang Belanja diantaranya utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa diantaranya berupa pembayaran listrik, air, telepon bulan Desember 2024 dan utang belanja modal; dan
- Pinjaman IBRD tahun 2009 yang dipergunakan untuk pembangunan Pasar Kahayan dengan surat perjanjian nomor SLA-1223/DSMI/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Kewajiban Pemerintah Kota Palangka Raya diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan tempo pembayarannya, yaitu kewajiban jangka pendek senilai Rp3.348.151.831,74 dan kewajiban jangka panjang senilai Rp4.150.269.200,08.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.348.151.831,74	2.588.953.515,19

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang jatuh temponya kurang dari satu tahun anggaran. Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri atas:

- Utang bunga senilai Rp691.296.506,42;
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp1.383.423.066,66; dan
- Utang belanja senilai Rp1.273.432.258,66.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing kewajiban jangka pendek:

5.3.2.1.1. Utang Bunga

Utang Bunga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	691.296.506,42	460.562.674,53

Utang bunga per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp691.296.506,42 yaitu utang bunga jatuh tempo atas Pinjaman berdasarkan Tagihan Perjanjian Pinjaman Nomor: SLA-1223/DSMI/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank For Reconstruction and Development (Loan Agreement Nomor 4786-IND Tanggal 20 Oktober 2005) Dalam Rangka Pembiayaan Urban Sector Development Reform Project (USDRP)*.

5.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.383.423.066,66	1.383.423.066,66



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp1.383.423.066,66 merupakan rencana pembayaran tagihan pokok pinjaman pada tahun anggaran 2025 berdasarkan perjanjian nomor SLA-1223/DSMI/2009.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.273.432.258,66	744.967.774,00

Utang belanja merupakan kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun anggaran 2025. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.143. Utang Belanja pada Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Utang Belanja Pegawai	429.163.884,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	646.368.374,66
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.900.000,00
Jumlah	1.273.432.258,66

Utang Belanja per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.144. Utang Belanja per sub rincian objek per SKPD per 31 Desember 2024

Utang Belanja	Saldo Akhir (Rp)
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	47.661.058,00
Dinas Pendidikan	26.258,00
Dinas Kesehatan	47.634.800,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	492.520,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	492.520,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	38.720.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.240.000,00
Inspektorat	2.900.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22.050.000,00
Dinas Kesehatan	530.000,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	370.000,00
Dinas Kesehatan	370.000,00
Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	289.680,00
Dinas Kesehatan	289.680,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	252,00
Dinas Kesehatan	252,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.551.512,00
Dinas Sosial	3.579.130,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.869.207,00
Inspektorat	18.231.373,00
Kecamatan Rakumpit	28.158.126,00
Dinas Kesehatan	1.713.676,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	32.724,00
Dinas Kesehatan	32.724,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	98.172,00
Dinas Kesehatan	98.172,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Utang Belanja	Saldo Akhir (Rp)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	242.327.966,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.754.840,00
Dinas Kesehatan	108.423.126,00
Kecamatan Rakumpit	33.150.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.720.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18.720.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.900.000,00
Kecamatan Rakumpit	1.900.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	65.627.962,40
Dinas Kesehatan	65.627.962,40
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2.875.972,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.857,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	40.850,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	40.207,00
Dinas Perikanan	34.857,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36.857,00
Dinas Tenaga Kerja	495.489,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	632.530,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	113.500,00
Inspektorat	34.857,00
Kecamatan Bukit Batu	284.418,00
Kecamatan Pahandut	180.100,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	619.950,00
Sekretariat DPRD	327.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.730.970,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	555.100,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	312.620,00
Dinas Kesehatan	778.530,00
Dinas Pendidikan	217.040,00
Dinas Perikanan	121.260,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	271.960,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	140.270,00
Kecamatan Bukit Batu	761.550,00
Kecamatan Pahandut	277.300,00
Sekretariat DPRD	295.340,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	435.740.338,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.030.363,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.750.931,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.072.848,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.865.869,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.223.794,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	17.506.431,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.913.681,00
Dinas Kesehatan	77.042.004,00
Dinas Pendidikan	15.684.766,00
Dinas Perhubungan	12.474.378,00
Dinas Perikanan	7.311.766,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.977.149,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.686.092,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Utang Belanja	Saldo Akhir (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.114.604,00
Dinas Tenaga Kerja	8.863.144,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	6.748.228,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.594.097,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	14.838.426,00
Dinas Lingkungan Hidup	23.514.602,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.519.435,00
Inspektorat	6.014.588,00
Kecamatan Bukit Batu	2.392.810,00
Kecamatan Jekan Raya	2.528.002,00
Kecamatan Pahandut	3.096.261,00
Kecamatan Sabangau	2.093.784,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	10.948.978,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.638.912,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.494.331,00
Sekretariat Daerah	49.971.868,00
Sekretariat DPRD	30.828.196,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	66.847.214,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.751.150,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.321.800,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	977.751,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	17.205.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.420.257,00
Dinas Kesehatan	6.907.723,00
Dinas Pendidikan	5.788.864,00
Dinas Perhubungan	457.600,00
Dinas Perikanan	1.680.657,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	352.150,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	775.900,00
Dinas Tenaga Kerja	2.755.537,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	571.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.479.198,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.554.450,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.756.914,00
Inspektorat	276.850,00
Kecamatan Bukit Batu	1.352.541,00
Kecamatan Jekan Raya	746.200,00
Kecamatan Pahandut	1.054.394,00
Kecamatan Sabangau	1.992.457,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.681.050,00
Sekretariat Daerah	455.064,00
Sekretariat DPRD	6.532.607,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	38.040.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	38.040.000,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	27.025.918,26
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.867.200,00
Kecamatan Rakumpit	1.158.718,26
Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	6.480.000,00
Kecamatan Sabangau	6.480.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Utang Belanja	Saldo Akhir (Rp)
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	197.900.000,00
Dinas Pendidikan	197.900.000,00
Jumlah	1.273.432.258,66

5.3.2.1.3.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	429.163.884,00	74.207.602,00

Per 31 Desember 2024 terdapat utang belanja pegawai senilai Rp429.163.884,00 karena pagu dana Belanja Pegawai yang tidak mencukupi di tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.145. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	47.661.058,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	492.520,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	38.720.000,00
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	370.000,00
Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	289.680,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	252,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.551.512,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	32.724,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	98.172,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	242.327.966,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.720.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.900.000,00
Jumlah	429.163.884,00

5.3.2.1.3.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	646.368.374,66	670.760.172,00

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp646.368.374,66 diantaranya adalah utang atas jasa kantor berupa jasa tenaga kesehatan, pembayaran listrik, air, telepon dan internet SKPD periode Desember 2024 yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2025, utang belanja iuran jaminan/asuransi berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Non ASN serta utang belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat berupa insentif Mantir Adat Kelurahan yang belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2024 karena pagu dana tidak mencukupi. Utang belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.146. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	65.627.962,40
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2.875.972,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.730.970,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	435.740.338,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	66.847.214,00
Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	38.040.000,00
Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	27.025.918,26
Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	6.480.000,00
Jumlah	646.368.374,66

5.3.2.1.3.3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	197.900.000,00	0,00

Utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp197.900.000,00 yaitu Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Dinas Pendidikan berupa kekurangan pembayaran atas jaminan pemeliharaan pekerjaan pembangunan aula di tahun 2024 sebesar 5% yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2025.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.150.269.200,08	60.227.507.650,74

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp4.150.269.200,08 merupakan Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang kepada *The International Bank For Reconstruction and Development* berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor: SLA-1223/DSMI/2009 Tanggal 24 Maret 2009 Tentang Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dana Pinjaman dari *The International Bank For Reconstruction and Development (Loan Agreement* Nomor 4786-IND Tanggal 20 Oktober 2005) Dalam Rangka Pembiayaan *Urban Sector Development Reform Project* (USDRP) senilai Rp5.533.692.266,74.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.335.689.605.035,12	4.307.274.182.009,96

Saldo ekuitas tahun 2024 Rp4.335.689.605.035,12 mengalami kenaikan senilai Rp28.415.423.025,16 dengan persentase kenaikan 0,66% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp4.307.274.182.009,96. Rincian mutasi Ekuitas dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.147. Mutasi Ekuitas per 31 Desember 2024

Uraian	Surplus/(Defisit)-LO	Koreksi Ekuitas	Ekuitas
Saldo Awal Per 31 Desember 2023			4.307.274.182.009,96
Surplus/(Defisit) LO per 31 Desember 2024	27.339.833.475,58		
Koreksi Nilai Persediaan-Bahan/Bibit Tanaman atas pertambahan nilai persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup		350.337.500,00	
Koreksi Nilai Persediaan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan atas pertambahan nilai persediaan pada Dinas Perikanan		73.430.000,00	
Koreksi Nilai Persediaan-Bahan Lainnya atas kesalahan perhitungan akhir tahun 2023 pada RSUD Kota Palangka Raya		744.366,33	
Koreksi Nilai Persediaan-Obat atas kesalahan perhitungan akhir tahun pada Dinas Kesehatan		1.575.275,50	
Koreksi Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) karena telah diterima pada tahun 2023 pada BPKAD		-2.231.080,82	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya atas pelunasan piutang pada BPPRD		880.096,53	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron atas pelunasan piutang pada BPPRD		42.147.503,48	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Parkir atas pelunasan piutang pada BPPRD		90.380,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah atas pelunasan piutang pada BPPRD		4.499.761,65	
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya atas pelunasan piutang pada BPPRD		423.591.850,62	
Koreksi Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak atas pelunasan piutang pada BPPRD		447.783,75	



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Surplus/(Defisit)-LO	Koreksi Ekuitas	Ekuitas
Koreksi Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru atas pelunasan piutang pada BPPRD		9.928,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi atas pelunasan piutang pada Diskominfo, Statistik dan Persandian		431.348,23	
Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan atas pelunasan piutang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian		763.776,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan atas pelunasan piutang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian		83.585.000,00	
Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas pelunasan piutang pada BPKAD		1.115.540,41	
Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Barang dan Jasa BLUD atas pelunasan piutang pada RSUD Kota Palangka Raya		1.549.322,43	



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Surplus/(Defisit)-LO	Koreksi Ekuitas	Ekuitas
Koreksi Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor atas pelunasan piutang pada BPKAD		17.147.735,70	
Koreksi Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas pelunasan piutang pada BPKAD		9.730.806,29	
Koreksi Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas pelunasan piutang pada BPKAD		47.889.783,03	
Koreksi Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan atas pelunasan piutang pada BPKAD		90.737,71	
Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi TA 2023 pada Dinas PUPR		-1,00	
Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku TA 2023 pada Dinas PUPR		-1,00	
Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku TA 2023 pada Dinas PUPR		2,00	
Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software TA 2023 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian		-2.937.500,00	
Koreksi saldo Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang TA 2023 pada BPKAD		747.432,74	
Koreksi saldo Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK TA 2023 pada Dinas Damkar dan Penyelamatan		61.560,00	
Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS TA 2023 pada Dinas Damkar dan Penyelamatan		2.595.027,00	
Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK TA		47.910,00	



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Surplus/(Defisit)-LO	Koreksi Ekuitas	Ekuitas
2023 pada Dinas Damkar dan Penyelamatan			
Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK TA 2023 pada Dinas Damkar dan Penyelamatan		37.550,00	
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan TA 2023 pada Dinas Kesehatan		2.655,00	
Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang telah dilunasi pada TA 2023 pada BPPRD		17.207.500,00	
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	27.339.833.475,58	1.075.589.549,58	4.335.689.605.035,12

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN LO

PENDAPATAN -LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.336.833.711.402,98	1.454.151.309.258,86

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian realisasi tahun 2024 sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	209.818.980.622,62	205.669.700.391,59

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang direalisasikan senilai Rp209.818.980.622,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Pajak Daerah – LO	172.972.901.812,27	165.400.226.024,10
Retribusi Daerah – LO	18.259.458.984,00	13.821.534.233,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.597.478.582,50	81.147.428,96



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah – LO	15.989.141.243,85	26.366.792.705,51
Jumlah	209.818.980.622,62	205.669.700.391,59

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	172.972.901.812,27	165.400.226.024,10

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah–LO tahun 2023 senilai Rp172.972.901.812,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Nilai (Rp)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron - LO	1.766.542.797,90	1.948.954.957,00	-182.412.159,10	Total Perbedaan	182.412.159,10
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	4.050.601.271,10
				Mutasi Tambah Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	-3.868.189.112,00
Pajak Air Tanah - LO	211.144.330,00	199.947.915,00	11.196.415,00	Total Perbedaan	11.196.415,00
				Mutasi Tambah Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	432.103.994,00
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	420.907.579,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	244.694.275,00	243.744.275,00	950.000,00	Total Perbedaan	950.000,00
				Mutasi Tambah Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	950.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Nilai (Rp)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	7.922.574.913,00	6.289.432.538,00	1.633.142.375,00	Total Perbedaan	1.633.142.375,00
				Mutasi Tambah Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	2.505.379.875,00
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	872.237.500,00
PBBP2 - LO	26.035.096.488,00	17.601.315.264,00	8.433.781.224,00	Total Perbedaan	8.433.781.224,00
				Mutasi Tambah Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	26.035.945.638,00
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	17.602.164.414,00
BPHTB- Pemindahan Hak - LO	27.383.954.273,00	27.473.511.023,00	-89.556.750,00	Total Perbedaan	89.556.750,00
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	89.556.750,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru - LO	13.346.705.246,00	13.348.690.846,00	-1.985.600,00	Total Perbedaan	1.985.600,00
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	1.985.600,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	36.625.351.419,62	35.838.590.820,74	-786.760.598,88	Total Perbedaan	-786.760.598,88
				Mutasi Tambah Piutang Pajak dan Retribusi	1.717.469.856,87



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Nilai (Rp)
				Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	930.709.257,99
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari	39.115.615.560,00	39.115.615.560,00	0,00		0,00
PBJT-Jasa Perhotelan	14.718.497.558,00	14.576.131.758,00	-142.365.800,00	Total Perbedaan	-142.365.800,00
				Mutasi Tambah Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	197.512.130,00
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	55.146.330,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir LO	1.011.036.479,00	1.011.749.679,00	-713.200,00	Total Perbedaan	-713.200,00
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	-713.200,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	4.591.688.472,75	4.649.753.348,00	-58.064.875,25	Total Perbedaan	-58.064.875,25
				Mutasi Kurang Piutang Pajak dan Retribusi Periode Januari - Desember 2024 BPPRD	58.064.875,25
Jumlah	172.972.901.812,27	162.297.437.983,74			10.675.463.828,53

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp10.675.463.828,53 (Rp172.972.901.812,27 - Rp162.297.437.983,74). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	18.259.458.984,00	13.821.534.233,02

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2024 senilai Rp18.259.458.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.288.415.940,00	1.288.415.940,00	0,00		
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.780.256.562,00	1.780.256.562,00	0,00		
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.868.111.792,00	1.868.111.792,00	0,00		
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00		
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.065.663.248,00	2.076.373.024,00	-10.709.776,00	Total Perbedaan	-10.709.776,00
				Mutasi Tambah Piutang Retribusi Daerah Periode Januari s/d Juni 2024 Disperindagkop	84.980.000,00
				Mutasi Kurang Piutang Retribusi Semester I TA 2024 Disperindagkop	87.925.776,00
				Mutasi Tambah Retribusi Daerah Periode Juli s/d Desember 2024 Disperindagkop	93.720.000,00
				Mutasi Kurang Retribusi Daerah	101.484.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				Periode Juli s/d Desember 2024 Disperindagkop	
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	622.592.725,00	630.807.600,00	-8.214.875,00	Total Perbedaan	-8.214.875,00
				Mutasi Tambah Piutang Retribusi Daerah Periode Januari s/d Juni 2024	107.949.875,00
				Mutasi Kurang Piutang Retribusi Semester I TA 2024	54.030.375,00
				Mutasi Tambah Retribusi Daerah Periode Juli s/d Desember 2024	233.210.250,00
				Mutasi Kurang Retribusi Daerah Periode Juli s/d Desember 2024	295.344.625,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	127.392.000,00	127.392.000,00	0,00		
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	14.642.000,00	14.642.000,00	0,00		
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	630.926.788,00	630.926.788,00	0,00		
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	60.044.800,00	60.044.800,00	0,00		
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	266.180.875,00	266.180.875,00	0,00		
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	665.433.000,00	665.433.000,00	0,00		
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	8.702.071.226,00	8.702.071.226,00	0,00		



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	94.478.028,00	94.478.028,00	0,00		
Jumlah	18.259.458.984,00	18.278.383.635,00	-18.924.651,00		-18.924.651,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp18.924.651,00 (Rp18.259.458.984,00 - Rp18.278.383.635,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.597.478.582,50	81.147.428,96

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2024 senilai Rp2.597.478.582,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)		
	LO	LRA	Perbedaan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	2.597.478.582,50	2.597.478.582,50	0,00
Jumlah	2.597.478.582,50	2.597.478.582,50	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini **sama** dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2024 dengan perbedaan sebesar Rp0,00 (Rp2.597.478.582,50 - Rp2.597.478.582,50).

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	15.989.141.243,85	26.366.792.705,51

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO tahun 2024 senilai Rp15.989.141.243,85 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.152. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Saldo tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	2.797.051.690,00	2.797.051.690,00	0,00		
Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	22.790.450,00	22.790.450,00	0,00		
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	2.059.490.029,09	2.150.237.384,09	-90.747.355,00	Total Perbedaan	-90.747.355,00
				Mutasi penerimaan Pembayaran Piutang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-86.269.645,00
				Pembayaran Piutang TGR Semester II (Upah Pungut 2006) BPKAD	-4.477.710,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	614.477.366,71	614.477.366,71	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	23.454.491,00	23.454.491,00	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	366.727.085,00	366.727.085,00	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	14.105.624,00	14.105.624,00	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	63.001.520,00	63.001.520,00	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	5.802.469,00	5.802.469,00	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	1.668.888,00	1.668.888,00	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	6.004.739,00	6.004.739,00	0,00		



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	4.813.475,00	4.813.475,00	0,00		
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	903.070.292,00	903.070.292,00	0,00		
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO	25.325.104,00	25.325.104,00	0,00		
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN- LO	634.591.105,00	634.591.105,00	0,00		
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-LO	4.002.208,00	4.002.208,00	0,00		
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	105.123.283,00	105.123.283,00	0,00		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	7.595.504.562,05	7.948.724.405,05	-353.219.843,00	Total Perbedaan	-353.219.843,00
				Pembayaran Piutang Semester I RSUD Palangka Raya	-223.008.321,00
				Pembayaran Piutang Semester	-148.031.822,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				II RSUD Palangka Raya	
				Mutasi Penambahan Piutang Semester II RSUD Palangka Raya	6.379.200,00
				Mutasi Penambahan Piutang Semester I RSUD Palangka Raya	11.441.100,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	241.889.757,00	241.889.757,00	0,00		
Pendapatan BLUD dari Lain- Lain Pendapatan BLUD yang Sah	500.247.106,00	500.247.106,00	0,00		
Jumlah	15.989.141.243,85	16.433.108.441,85	-443.967.198,00		-443.967.198,00

Penjelasan:

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp443.967.198,00 (Rp15.989.141.243,85 - Rp16.433.108.441,85). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan pada tabel diatas.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.098.710.742.942,00	1.216.750.238.017,97

Pendapatan Transfer-LO merupakan Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang direalisasikan senilai Rp1.098.710.742.942,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153. Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	971.616.923.033,00	1.093.150.172.103,00	-121.533.249.070,00	Total Perbedaan	-121.533.249.070,00
				Penarikan Dana TDF ke RKUD	-35.218.883.647,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				Penarikan Dana TDF ke RKUD	-35.152.148.493,00
				Penarikan dana TDF ke RKUD	-55.303.684.930,00
				Penerimaan TDF sumber dana Kurang Bayar DBH Tahun 2023	4.141.468.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	127.093.819.909,00	112.070.053.703,00	15.023.766.206,00	Total Perbedaan	15.023.766.206,00
				Pembayaran Piutang DBH Pajak Kendaraan Bermotor BPKAD	-3.429.547.139,00
				Pembayaran Piutang DBH Pajak BPKB BPKAD	-1.946.161.258,00
				Pembayaran Piutang DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-9.577.956.606,00
				Pembayaran Piutang DBH Pajak Air Permukaan BPKAD	-18.147.542,00
				Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.549.384.432,00
				Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.563.383.280,00
				Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.844.366.026,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.445.013,00
Jumlah	1.098.710.742.942,00	1.205.220.225.806,00	-106.509.482.864,00		-106.509.482.864,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2024 sebesar Rp106.509.482.864,00 (Rp1.098.710.742.942,00 - Rp1.205.220.225.806,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan pada tabel diatas.

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	971.616.923.033,00	1.085.468.165.691,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2024 senilai Rp971.616.923.033,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154. Pendapatan Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Saldo tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	168.063.012.079,00	314.768.233.808,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) -LO	658.988.233.482,00	615.517.742.730,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	27.974.653.026,00	36.180.579.044,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	110.657.246.446,00	112.402.825.109,00
DID - LO	0,00	6.598.785.000,00
Insentif Fiskal-LO	5.933.778.000,00	0,00
Jumlah	971.616.923.033,00	1.085.468.165.691,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO TA 2023 sebesar Rp113.851.242.658,00 (Rp971.616.923.033,00 - Rp1.085.468.165.691,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan pada tabel diatas.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	127.093.819.909,00	131.282.072.326,97



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO tahun 2024 senilai Rp127.093.819.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	31.919.720.623,00	34.166.722.956,82
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	26.482.752.297,00	25.459.122.533,30
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	53.862.516.913,00	57.474.523.589,66
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	99.392.787,00	128.218.762,19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	14.729.437.289,00	14.053.484.485,00
Jumlah	127.093.819.909,00	131.282.072.326,97

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO TA 2023 sebesar Rp4.188.252.417,97 (Rp127.093.819.909,00 - Rp131.282.072.326,97). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan pada tabel diatas.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	28.303.987.838,36	31.731.370.849,30

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 senilai Rp28.303.987.838,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.156. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Pendapatan Hibah	17.981.093.732,36	2.754.227.295,00	15.226.866.437,36	Total Perbedaan	15.226.866.437,36
				Reklasifikasi Mutasi + Dari Hibah Perpunas Ke Electric Genereting Set	10.500.000,00
				Reklasifikasi Mutasi + Dari Hibah Perpunas Ke Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	331.086.800,00
				Reklasifikasi Mutasi + Dari Hibah Perpunas Ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00
				Reklasifikasi Mutasi + Dari Hibah Perpunas Ke Peralatan Studio Audio	1.500.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				Reklasifikasi Mutasi + Dari Hibah Perpunas Ke Personal Komputer	75.012.000,00
				Hibah dari BNPB RI Tahun 2024 BPBD	1.991.780.036,00
				Hibah atau Bantuan dari BKKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 berupa Obat-Obatan DISDALDUKKB	621.658.079,00
				Hibah Kemenkes Tahun 2022 Ke Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinkes	604.110.791,20
				Hibah Kementerian Kesehatan RI BAST No.KN.01.04/VI.2/Alkes/ PPK-KESMAS/129/2022 Tanggal 16 November 2022	140.287.304,00
				Hibah Kementerian Kesehatan RI BAST No. BJ.01.04/PPK4.1/1034/2 023 Tanggal 11 Desember 2023	46.750.000,00
				Hibah Kementerian Kesehatan RI BAST No.BJ.01.04/PPK4.1/376 /2023 Tanggal 12 Oktober 2023	480.684.000,00
				HIBAH DARI KEMENKES RI TAHUN 2024 PENGADAAN PENYEDIAAN TABURIA NOMOR : BJ.01.04/PPK4.2/BASTP /16.10/2024	17.452.800,00
				HIBAH DARI KEMENKES TA 2023. NOMOR : BM.02.03/BIIL.I/1426/202 3 untuk Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Pada Klasifikasi Persediaan Bahan- Bahan Lainnya	29.322.975,00
				HIBAH DARI KEMENKES RI TAHUN 2023 NOMOR. BJ.01.04/PPK4.2/686/20 23 Pada Klasifikasi	4.800.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	
				HIBAH DARI KEMENKES RI TAHUN 2024 NOMOR. BJ.01.04/PPK4.2/BASTP /20.10/2024 Pada Klasifikasi Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	4.265.625,00
				HIBAH BMHP DARI BKKBN KOTA PALANGKA RAYA Pada Klasifikasi Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	146.897.187,00
				HIBAH KEMENKES RI Pada Klasifikasi Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	93.258.664,30
				Bantuan Hibah berupa persediaan Natura dari Disperindagkop Kota Palangka Raya Kecamatan Bukit Batu	272.500.000,00
				Hibah dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya berupa Natura Kecamatan Rakumpit	78.650.000,00
				Bantuan hibah dari Dikes Provinsi Kalteng pada Tahun 2023 DINKES	10.684.000,00
				Bantuan Hibah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Pada Klasifikasi Persediaan Obat-obatan DINKES	7.361.159.447,86
				HIBAH DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI Pada Klasifikasi Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak DINKES	101.475,00
				Pendapatan Hibah dari CRS PT. Indomarco Prismatama Disparbudpora	3.625.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				HIBAH DARI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. SARDJITO TAHUN 2023 NOMOR. KN.02.02/1.24/065/2023 Pada Klasifikasi Persediaan Bahan- Bahan Lainnya DINKES	8.590.000,00
				HIBAH DARI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. SARDJITO TAHUN 2023 BASTP NO. KN.01.02/1.24/915/2023 Pada Klasifikasi Persediaan Bahan- Bahan Lainnya DINKES	9.160.400,00
				Kapitalisasi Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ke Tanah Kering DISPERKIMTAN	2.549.993.000,00
				Bantuan Hibah CSR berupa Bak Sampah Kecamatan Bukit Batu	20.650.000,00
				Bantuan CSR PT. Palmino Gemilang Kencana pada Kelurahan Kameloh Baru Tahun 2024 Kecamatan Sabangau	4.578.000,00
				Bantuan CSR berupa sapi dan kambing yang masuk ke Persediaan Bahan Ternak atau Bibit Ikan SETDA	285.006.853,00
				Pendapatan Hibah dari PT Palmino Gemilang DLH	3.315.000,00
				Pendapatan Hibah dari PT. Calang Sejati Indah DLH	1.000.000,00
				Hibah dari PT. Kahayan Mega Utama untuk Dinas Kesehatan Kota	834.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				Palangka Raya berupaNatura dan Pakan-Natura DINKES	
				Hibah dari PT. SARI MEKAR CAHAYA PERSADA untuk Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berupaNatura dan Pakan-Natura DINKES	275.000,00
				Penerimaan Hibah Perabot Kantor (Hibah bantuan PT. PLN (Persero) UP3 PALANGKA RAYA Nomor: 0594.BA/STH.01.01/F 13050000/2025 berupa tong sampah berlogo PLN) untuk DLH	10.878.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	10.322.894.106,00	10.322.894.106,00	0,00		
Jumlah	28.303.987.838,36	13.077.121.401,00	15.226.866.437,36		15.226.866.437,36

Penjelasan:

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp15.226.866.437,36 (Rp28.303.987.838,36 - Rp13.077.121.401,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan di tabel di atas.

5.4.2. PENJELASAN POS-POS BEBAN LO

BEBAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.309.493.877.927,40	1.204.287.634.557,01

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Realisasi beban tahun 2024 senilai Rp1.309.493.877.927,40 dan dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	585.168.149.695,00	520.465.573.159,00

Beban Pegawai pada tahun 2024 senilai Rp585.168.149.695,00. Rincian atas beban pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.157. Beban Pegawai

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	259.913.323.388,00	259.865.688.588,00	47.634.800,00	Total Perbedaan	47.634.800,00
				Utang Kekurangan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ub. Desember 2024 Dinas Kesehatan	47.634.800,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	20.775.819.651,00	20.775.327.131,00	492.520,00	Total Perbedaan	492.520,00
				Jurnal Penyesuaian Utang Belanja Tunjangan Keluarga PPPK ub. November Tahun Anggaran 2024 - BPBD Kota Palangka Raya	44.016,00
				Jurnal Penyesuaian Utang Belanja Tunjangan Keluarga PPPK ub. Desember Tahun Anggaran 2024 - BPBD Kota Palangka Raya	448.504,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.613.860.222,00	5.613.860.222,00	0,00		
Beban Tunjangan Fungsional ASN	18.523.693.250,00	18.487.873.250,00	35.820.000,00	Total Perbedaan	35.820.000,00
				Pembayaran Kekurangan Tunjangan Fungsional PNS Ub. September s/d Oktober Tahun 2024 KESBANGPOL	13.240.000,00
				Utang Belanja Kekurangan Belanja Tunjangan Fungsional PNS TA. 2024 Disperkimtan	22.050.000,00
				Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS TA 2024 Dinas Kesehatan	530.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.598.281.200,00	2.597.911.200,00	370.000,00	Total Perbedaan	370.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS TA 2024 Dinas Kesehatan	370.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	12.134.552.696,00	12.140.201.456,00	-5.648.760,00	Total Perbedaan	-5.648.760,00
				Utang Belanja Tunjangan Beras PNS TA 2024 Dinas Kesehatan	289.680,00
				Pembayaran Utang Belanja Tunjangan Beras PPPK Dinas Damkar dan Penyelamatan	-5.938.440,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.136.842.004,00	1.136.842.004,00	0,00		
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.495.814,00	3.495.562,00	252,00	Total Perbedaan	252,00
				Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS Dinas Kesehatan	252,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.317.506.481,00	19.244.811.286,00	72.695.195,00	Total Perbedaan	72.695.195,00
				Utang Belanja iuran jaminan Kesehatan PNS DPMPPTSP Ub. Nopember 2024 dan Desember 2024 atas Pembayaran gaji PNS	15.214.474,00
				Utang Belanja iuran jaminan Kesehatan PNS DPMPPTSP Ub. Nopember 2024 dan Desember 2024 atas Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS	10.772.678,00
				Susulan Utang Belanja Jaminan Kesehatan berdasarkan hasil Rekonsiliasi iuran Jaminan Kesehatan antara DPMPPTSP dan BPJS Kesehatan Nomor 926/BA/VIII-06/20225 dan Nomor 900/08/DPMPPTSP-I.3/II/2025 tanggal 26 Februari 2025	882.055,00
				Utang Belanja PNS Tahun 2024 Kecamatan Rakumpit	28.158.126,00
				utang belanja iuran jaminann kesehatan PNS TA.2024 Inspektorat	18.231.373,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Dinas Sosial	3.579.130,00
				utang belanja gaji dan tunjangan ASN Damkar	-3.904.973,00
				Pembayaran Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS ub. Desember 2023 Dinas Tenaga Kerja	-1.951.344,00
				Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS atas Gaji PNS Dinas Kesehatan	581.392,00
				Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS atas TPP PNS Dinas Kesehatan	1.132.284,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	534.190.693,00	534.260.059,00	-69.366,00	Total Perbedaan	-69.366,00
				Pembayaran Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Dinas Damkar dan Penyelamatan	-102.090,00
				Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Dinas Kesehatan	32.724,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN	1.602.575.589,00	1.602.789.867,00	-214.278,00	Total Perbedaan	-214.278,00
				Utang belanja gaji dan tunjangan ASN DAMKAR	-312.450,00
				Utang Belanja luran Jaminan Kematian PNS Dinas Kesehatan	98.172,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	132.620.508.692,00	132.415.790.726,00	204.717.966,00	Total Perbedaan	204.717.966,00
				Utang Kekurangan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ub. Desember 2024 Dinas Kesehatan	84.196.126,00
				Utang Belanja PNS Tahun 2024 Kec Rakumpit	33.150.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang Belanja Tagihan TPP ub.Desember 2024 KESBANGPOL	100.754.840,00
				Utang Belanja Kekurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK TA. 2024 Disperkintan DISPERKINTAN	18.720.000,00
				Pembayaran utang belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya berdasarkan beban kerja bulan Desember 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) orang	-56.330.000,00
				Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Dinas Kesehatan	24.227.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.379.899.750,00	7.377.999.750,00	0,00		
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.400.550.000,00	2.400.550.000,00	0,00		
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.520.828.375,00	3.520.828.375,00	0,00		
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.098.482.071,00	1.098.482.071,00	0,00		
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	68.789.333.092,00	68.789.333.092,00	0,00		
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	921.840.000,00	921.840.000,00	0,00		
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	529.364.648,00	529.364.648,00	0,00		



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Honorarium	9.099.965.000,00	9.099.965.000,00	0,00		
Beban Uang Representasi DPRD	669.585.000,00	669.585.000,00	0,00		
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	65.494.800,00	65.494.800,00	0,00		
Beban Tunjangan Beras DPRD	76.982.460,00	76.982.460,00	0,00		
Beban Uang Paket DPRD	43.186.500,00	43.186.500,00	0,00		
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	970.898.250,00	970.898.250,00	0,00		
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	78.796.991,00	78.796.991,00	0,00		
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00		
Beban Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00		
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	37.611.647,00	37.611.647,00	0,00		
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.776.466.384,00	3.776.466.384,00	0,00		
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.161.500.000,00	5.161.500.000,00	0,00		
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.600.000,00	222.600.000,00	0,00		
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00		
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	190.315.047,00	190.315.047,00	0,00		
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00		
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00		
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00		
Beban Pegawai BLUD	198.600.000,00	198.600.000,00	0,00		
Jumlah	585.168.149.695,00	584.810.451.366,00	357.698.329,00		357.698.329,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp357.698.329,00 (Rp585.168.149.695,00 - Rp584.810.451.366,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	459.536.375.742,38	460.492.834.168,76

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2024 senilai Rp459.536.375.742,38 dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.4.2.2.1. Beban Barang

Beban Barang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	116.507.994.709,49	101.058.255.915,48

Beban Barang pada tahun 2024 senilai Rp116.507.994.709,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158. Beban Barang

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Barang	116.507.994.709,49	117.611.842.472,14	-1.103.847.762,65	Penyesuaian Beban Persediaan, Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dan kapitalisasi aset tetap	-1.103.847.762,65
Jumlah	116.507.994.709,49	117.611.842.472,14	-1.103.847.762,65		-1.103.847.762,65

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Barang dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.103.847.762,65 (Rp116.507.994.709,49 - Rp117.611.842.472,14). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.2.2. Beban Jasa

Beban Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	166.503.783.841,90	159.224.931.551,70

Beban Jasa pada tahun 2024 senilai Rp166.503.783.841,90 **lebih kecil** dari saldo Belanja Jasa dalam LRA TA 2024 senilai Rp344.798.186,10 (Rp166.503.783.841,90 - Rp166.848.582.028,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan dalam tabel pada Lampiran 8.

5.4.2.2.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	24.193.752.012,00	17.056.472.029,21

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 senilai Rp24.193.752.012,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159. Beban Pemeliharaan

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Pemeliharaan Tanah	273.705.375,00	273.705.375,00	0,0		



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.320.818.761,00	13.320.818.761,00	0,00		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.372.778.461,00	6.863.796.761,00	-491.018.300,00	Total Perbedaan	-491.018.300,00
				Mutasi Barang Dan Jasa Bangunan Kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.000.000,00
				Reklasifikasi dari Pemeliharaan Gedung ke Bangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-67.425.000,00
				Kapitalisasi Dari Beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke Flat/Rumah Susun Disperkintan	-36.052.500,00
				Kapitalisasi Dari Beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke Flat/Rumah Susun Disperkintan	-20.000.000,00
				Kapitalisasi Dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangun Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Kantor Disperkintan	-199.000.000,00
				Mutasi Barang Dan Jasa Bangunan Kesehatan ke Pemeliharaan	10.400.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
				Bangunan dan Gedung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				Kapitalisasi Dari Beban pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat kantor ke Flat/Rumah Susun Disperkimtan	-39.940.800,00
				Reklasifikasi Dari Beban pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor ke Alat Kantor Lainnya Disperkimtan	-149.000.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.786.999.815,00	3.732.903.065,00	54.096.750,00	Total Perbedaan	54.096.750,00
				Reklas Dari Jalan Kota Ke Belanja Jasa DPUPR	54.096.750,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	114.861.100,00	114.861.100,00	0,00		
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	324.588.500,00	324.588.500,00	0,00		
Jumlah	24.193.752.012,00	24.630.673.562,00	-436.921.550,00		-436.921.550,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2024 *lebih kecil* dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp436.921.550,00 (Rp24.193.752.012,00 - Rp24.630.673.562,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	80.225.426.719,25	73.545.812.141,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 senilai Rp80.225.426.719,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.160. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Saldo tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.225.426.719,25	80.160.726.719,25	64.700.000,00	Total Perbedaan	64.700.000,00
				Reklas Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas ke Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Dinkes	300.000,00
				Reklas kurang Bangunan Gedung Kantor ke Perjalanan Dinas Pendidikan	32.000.000,00
				Reklas kurang Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Dinas Pendidikan	32.400.000,00
Jumlah	80.225.426.719,25	80.160.726.719,25	64.700.000,00		64.700.000,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO Tahun 2024 **lebih besar** dari saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2024 sebesar Rp64.700.000,00 (Rp80.225.426.719,25 - Rp80.160.726.719,25). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	29.597.413.037,84	23.830.030.473,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2024 senilai Rp29.597.413.037,84 dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.161. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.671.485.000,00	2.671.485.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.925.928.037,84	27.067.848.037,84	-141.920.000,00	Total Perbedaan	-141.920.000,00
				Kapitalisasi Aset Tetap Akun Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke Tugu/Tanda Batas Lainnya DISPERKIMTAN	-199.000.000,00
				Reklas Bangunan Gedung Kantor ke Mutasi ke Jasa Pihak Ketiga BPPRD	50.600.000,00
				Hutang Belanja Insentif Mantir Kelurahan di Kecamatan Sabangau Tahun 2024 Kec Sabangau	6.480.000,00
Jumlah	29.597.413.037,84	29.739.333.037,84	-141.920.000,00	0,00	-141.920.000,00

Penjelasan:

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2024 senilai Rp29.597.413.037,84 **lebih kecil** dari saldo Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam LRA TA 2024 senilai Rp141.920.000,00 (Rp29.597.413.037,84 – Rp29.739.333.037,84). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam LO yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	14.103.926.206,00	24.267.526.803,15

Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2024 senilai Rp14.103.926.206,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.162. Beban Barang dan Jasa BOS

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOS	14.103.926.206,00	27.017.727.127,00	-12.913.800.921,00	Penyesuaian Beban Persediaan dan kapitalisasi aset tetap sumber dana BOS	-12.913.800.921,00
Jumlah	14.103.926.206,00	27.017.727.127,00	-12.913.800.921,00		-12.913.800.921,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BOS dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa BOS dalam LRA TA 2024 sebesar Rp12.913.800.921,00 (Rp14.103.926.206,00 - Rp27.017.727.127,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa BOS dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.2.7. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	6.939.071.498,00	0,00

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada tahun 2024 senilai Rp6.939.071.498,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.163. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.939.071.498,00	6.939.071.498,00	0,00		
Jumlah	6.939.071.498,00	6.939.071.498,00	0,00		

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dalam LO Tahun 2024 ini *sama dengan* saldo Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dalam LRA TA 2024 yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	21.465.007.717,90	61.509.805.255,22

Beban Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2024 senilai Rp21.465.007.717,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164. Beban Barang dan Jasa BLUD

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Barang dan Jasa BLUD	21.465.007.717,90	22.456.170.550,10	-991.162.832,20	Penyesuaian Beban Persediaan dan kapitalisasi aset tetap sumber dana BLUD	-991.162.832,20
Jumlah	21.465.007.717,90	22.456.170.550,10	-991.162.832,20		-991.162.832,20



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BLUD dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam LRA TA 2024 sebesar Rp991.162.832,20 (Rp21.465.007.717,90 - Rp22.456.170.550,10). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD dalam LO, yang dijelaskan pada tabel di atas.

5.4.2.3. Beban Bunga

Beban Bunga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	2.760.935.823,52	5.264.225.969,20

Beban Bunga pada tahun 2024 senilai Rp2.760.935.823,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.165. Beban Bunga

Uraian	Saldo tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	691.296.506,42	0,00	691.296.506,42	Total Perbedaan	691.296.506,42
Beban Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	418.486.054,10	878.301.295,89	-459.815.241,79	Total Perbedaan	-459.815.241,79
				Pembayaran Tagihan Bunga Pinjaman No. SLA-1223/DSMI/2009 Pemerintah Kota Palangka Raya 2024 BPKAD	459.815.241,79
Beban Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	1.651.153.263,00	1.651.153.263,00	0,00		0,00
Jumlah	2.760.935.823,52	2.529.454.558,89	231.481.264,63		231.481.264,63

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2024 sebesar Rp231.481.264,63 (Rp2.760.935.823,52 - Rp2.529.454.558,89). Hal tersebut disebabkan perbedaan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bunga dalam LO, yang dijelaskan pada tabel diatas.

5.4.2.4. Beban Hibah

Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	61.402.016.179,00	46.836.184.648,00

Beban Hibah tahun 2024 senilai Rp61.402.016.179,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.166. Beban Hibah

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.809.792.600,00	32.809.792.600,00	0,00		
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.363.234.753,00	24.459.291.753,00	-96.057.000,00	Mutasi Persediaan dari Dana Bantuan Operasional Pendidikan	96.057.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.564.862.160,00	1.564.862.160,00	0,00		
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00		
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.664.126.666,00	2.664.126.666,00	0,00		
Jumlah	61.402.016.179,00	61.498.073.179,00	-96.057.000,00		-96.057.000,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp96.057.000,00 (Rp61.402.016.179,00 - Rp61.498.073.179,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan pada tabel diatas.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.693.111.250,00	1.509.203.000,00

Beban bunga pada tahun 2024 senilai Rp1.693.111.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167. Beban Bantuan Sosial

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.076.034.000,00	1.076.034.000,00	0,00		
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00		
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	329.500.000,00	329.500.000,00	0,00		
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	97.577.250,00	0,00	97.577.250,00	Mutasi Persediaan pada Dinas Sosial	97.577.250,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00		
Jumlah	1.693.111.250,00	1.595.534.000,00	97.577.250,00		97.577.250,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 Rp97.577.250,00 (Rp1.693.111.250,00 - Rp1.595.534.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan pada tabel diatas.

5.4.2.6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	27.537.710.441,25	14.054.688.662,11



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp27.537.710.441,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	69.902.900,00	0,00
Beban Penyisihan Pajak Restoran	321.243.535,00	0,00
Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	7.180.094,27
Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	710.854,73
Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	134.380,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	4.750,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	436.118.750,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.342.895.530,18	11.748.469.582,96
Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	447.783,75
Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	9.928,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	431.348,23
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	3.843.160,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	1.104.385,01
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.339.770,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	7.084.278,12	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	300,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Mebe	4,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD- Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	1.549.322,43
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.635.444.626,50	1.779.830.010,00
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	149.977.893,76	74.859.062,73
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.816.853,69	0,00
Jumlah	27.537.710.441,25	14.054.688.662,11



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp689.276.172,83 [-Rp101.887.412.388,42 - (-Rp75.038.978.120,00 + Rp27.537.710.441,25)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca. Terdapat selisih kenaikan yang signifikan senilai Rp13.483.021.779,14 bila dibandingkan dengan saldo tahun 2023 yang bernilai Rp14.054.688.662,11 karena terdapat penambahan signifikan pada saldo Piutang yang masuk ke dalam kategori Macet.

5.4.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	169.156.492.496,25	154.627.813.949,94

Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang direalisasikan senilai Rp169.156.492.496,25 merupakan hasil penjumlahan dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.169. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Besar	3.535.221.400,00	3.189.581.589,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	10.835.465.445,00	10.480.113.416,22
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.038.901.467,00	933.342.915,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	75.966.146,00	76.713.236,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.985.180.727,00	10.437.777.953,20
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.558.862.795,00	1.063.324.868,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.767.134.330,36	11.583.313.819,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.246.944.628,70	3.445.063.972,00
Beban Penyusutan	96.169.125,00	95.872.250,00
Beban Penyusutan Komputer	13.912.670.319,00	13.216.278.431,00
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	35.333.946,00	4.258.946,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	403.025.034,00	103.263.268,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	13.731.950,00	5.650.990,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	298.606.786,00	290.448.852,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	87.456.085,00	87.569.302,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	20.049.143.256,00	18.510.310.962,00
Beban Penyusutan Monumen	347.880.373,00	347.237.039,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara	3.632.431,00	3.632.431,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	911.641.642,00	524.959.888,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	64.300.812.869,19	61.357.071.210,28
Beban Penyusutan Bangunan Air	12.366.454.140,00	11.890.441.866,00
Beban Penyusutan Instalasi	3.559.966.336,00	3.286.630.091,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.396.873.284,00	1.396.873.284,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	1.395.044.484,00	1.200.944.896,24
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	934.373.497,00	1.097.138.475,00
Jumlah	169.156.492.496,25	154.627.813.949,94

5.4.2.8. Beban Transfer

Beban Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	245.000.000,00	245.000.000,00

Beban Transfer Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang direalisasikan senilai Rp245.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.170. Beban Transfer

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)		
	LO	LRA	Perbedaan
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
Jumlah	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00

5.4.2.9. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.994.086.300,00	792.111.000,00

Beban Tidak Terduga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.994.086.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171. Beban Tidak Terduga

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan
	LO	LRA	Perbedaan	
Beban Tidak Terduga	1.994.086.300,00	1.994.086.300,00	0,00	
Jumlah	1.994.086.300,00	1.994.086.300,00	0,00	

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	-12.061.845.764,92

Surplus/Defisit dari Kegiatan non operasional pada tahun 2024 senilai Rp0,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.172. Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	216.180.000,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	-12.278.025.764,92
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	-12.061.845.764,92



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari:

Tabel 5.173. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	216.180.000,00
Jumlah	0,00	216.180.000,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari:

Tabel 5.174. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
Defisit Penjualan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	-1.873.644.627,00
Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	-3.450.466.957,00
Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0,00	-6.894.330.180,92
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	-59.584.000,00
Jumlah	0,00	-12.278.025.764,92

5.4.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Pos luar biasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi. Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi nonkeuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	289.827.029.451,87	213.618.464.481,00

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Arus kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing surplus senilai Rp289.827.029.451,87 dan Rp213.618.464.481,00. Jumlah tersebut merupakan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.175. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	162.297.437.983,74	150.594.656.898,00
Penerimaan Retribusi Daerah	18.278.383.635,00	13.933.973.543,02
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.597.478.582,50	81.147.428,96
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	16.433.108.441,85	23.300.173.772,87
Penerimaan Dana Bagi Hasil	289.596.261.149,00	142.989.011.494,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	658.988.233.482,00	615.517.742.730,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	27.974.653.026,00	36.180.579.044,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	110.657.246.446,00	112.402.825.109,00
Penerimaan Dana Insentif	0	6.598.785.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.933.778.000,00	
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	112.070.053.703,00	145.713.514.931,00
Penerimaan Hibah	2.754.227.295,00	1.752.906.664,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	10.322.894.106,00	9.760.035.046,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.417.903.755.850,09	1.258.825.351.660,85
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	584.810.451.366,00	520.443.307.879,00
Pembayaran Barang dan Jasa	475.404.126.994,33	475.137.420.309,85
Pembayaran Bunga	2.529.454.558,89	5.649.396.698,00
Pembayaran Belanja Hibah	61.498.073.179,00	41.261.099.863,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.595.534.000,00	1.540.204.250,00
Pembayaran Tak Terduga	1.994.086.300,00	930.458.180,00
Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	245.000.000,00	245.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.128.076.726.398,22	1.045.206.887.179,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	289.827.029.451,87	213.618.464.481,00

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.417.903.755.850,09	1.258.825.351.660,85

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.176. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah		
Pajak Hotel	0,00	13.553.146.365,00
Pajak Restoran	0,00	27.974.533.815,00
Pajak Hiburan	0,00	3.376.558.071,00
Pajak Reklame	1.948.954.957,00	2.004.647.340,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Penerangan Jalan	0,00	44.621.646.531,00
Pajak Parkir	0,00	1.207.873.200,00
Pajak Air Tanah	199.947.915,00	121.229.212,00
Pajak Sarang Burung Walet	243.744.275,00	289.438.980,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.289.432.538,00	4.944.949.316,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	17.601.315.264,00	17.380.247.782,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.822.201.869,00	35.120.386.286,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	95.191.841.165,74	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah		
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.288.415.940,00	1.314.599.440,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.780.256.562,00	1.721.307.004,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.868.111.792,00	1.858.062.836,00
Retribusi Pelayanan Pasar	48.300.000,00	62.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	713.585.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	6.732.500,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	24.950.000,00	26.590.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	76.846.250,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	372.191.897,00
Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.076.373.024,00	2.649.994.304,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	630.807.600,00	976.611.800,00
Retribusi Terminal	0,00	13.173.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	127.392.000,00	103.245.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.642.000,00	30.170.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	630.926.788,00	403.570.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.044.800,00	43.574.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	266.180.875,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	665.433.000,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.780.419.675,02
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	1.649.523.965,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	1.881.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	129.895.872,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.702.071.226,00	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	94.478.028,00	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.597.478.582,50	81.147.428,96
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		
Jasa Giro	2.819.842.140,00	5.888.791.651,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	22.305.495,52



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.150.237.384,09	7.751.779.413,56
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	614.477.366,71	421.730.511,23
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.388.648.583,00	1.993.946.659,80
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	25.325.104,00	109.805.211,76
Pendapatan dari Pengembalian	743.716.596,00	349.707.022,00
Pendapatan BLUD	8.690.861.268,05	6.762.107.808,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Penerimaan Dana Bagi Hasil	289.596.261.149,00	142.989.011.494,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	658.988.233.482,00	615.517.742.730,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	27.974.653.026,00	36.180.579.044,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	110.657.246.446,00	112.402.825.109,00
Penerimaan Dana Insentif		
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	6.598.785.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal		
Insentif Fiskal	5.933.778.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		
Pendapatan Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.799.883.330,00	38.406.500.522,25
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.865.530.275,00	31.008.964.557,87
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.596.107.493,00	62.112.239.955,70
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	79.095.316,00	132.325.410,18
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.729.437.289,00	14.053.484.485,00
Penerimaan Hibah		
Pendapatan Hibah		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.754.227.295,00	1.752.906.664,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.322.894.106,00	9.760.035.046,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.417.903.755.850,09	1.285.825.351.660,85

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.128.076.726.398,22	1.045.206.887.179,85

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.177. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	342.003.060.625,00	312.072.264.867,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	142.194.340.476,00	111.194.583.695,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.959.813.186,00	80.384.106.346,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.513.122.032,00	15.191.012.232,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	190.315.047,00	562.300.739,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	751.200.000,00	749.720.000,00
Belanja Pegawai BLUD	198.600.000,00	289.320.000,00
Pembayaran Barang dan Jasa		
Belanja Barang	117.611.842.472,14	94.002.907.959,00
Belanja Jasa	166.848.582.028,00	161.582.260.067,70
Belanja Pemeliharaan	24.630.673.562,00	30.473.258.917,00
Belanja Perjalanan Dinas	80.160.726.719,25	73.545.812.141,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.739.333.037,84	24.933.689.473,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	27.017.727.127,00	26.722.729.553,15
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.939.071.498,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.456.170.550,10	63.876.762.199,00
Pembayaran Bunga		
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	878.301.295,89	985.153.243,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.651.153.263,00	4.664.243.455,00
Pembayaran Hibah		
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	58.833.946.513,00	38.807.939.863,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.664.126.666,00	2.453.160.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.076.034.000,00	617.127.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	329.500.000,00	893.077.250,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	90.000.000,00	30.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	1.994.086.300,00	930.458.180,00
Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.128.076.726.398,22	1.045.206.887.179,85

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	-338.504.882.474,45	-291.380.573.926,00

Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan diperoleh dari pembelian aset tetap atau belanja modal. Arus kas dari



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

aktivitas investasi tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing defisit senilai Rp338.504.882.474,45 dan Rp291.380.573.926,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus kas keluar kas investasi. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.178. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	216.180.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	113.219.924,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	141.293.716,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	470.693.640,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	2.620.818.000,00	4.003.383.082,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	48.825.356.209,00	84.884.254.418,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	121.569.959.253,32	111.616.449.607,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.589.854.012,13	78.792.977.882,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	252.895.000,00	1.992.109.257,00
Perolehan Aset Lainnya	138.500.000,00	54.593.320,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.507.500.000,00	10.507.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	338.504.882.474,45	291.851.267.566,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-338.504.882.474,45	-291.380.573.926,00

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	470.693.640,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.179. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	216.180.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	113.219.924,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	141.293.716,00
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	0,00	470.693.640,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	338.504.882.474,45	291.851.267.566,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.180. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Perolehan Tanah		
Belanja Modal Tanah Persil	2.620.818.000,00	4.003.383.082,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal Alat Besar	2.882.352.000,00	197.449.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.367.325.000,00	13.222.371.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	65.081.200,00	17.770.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	28.024.000,00	1.737.600,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.842.104.045,00	12.597.907.881,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.968.675.470,00	3.004.917.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.515.074.554,00	3.507.000.440,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	747.850.000,00	2.385.946.991,00
Belanja Modal Komputer	10.754.640.950,00	4.956.154.012,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	49.705.800,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	40.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	52.657.000,00	594.377.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.494.752.100,00	182.690.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	62.135.000,00	12.499.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.004.684.890,00	44.153.728.394,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Bangunan Gedung	100.936.087.248,32	102.374.196.182,00
Belanja Modal Monumen	386.000.000,00	380.745.500,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.352.997.705,00	4.090.513.475,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	15.894.874.300,00	4.770.994.450,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	119.885.722.794,16	58.020.890.482,00
Belanja Modal Bangunan Air	27.335.274.669,31	13.707.180.872,00
Belanja Modal Instalasi	4.127.258.203,00	3.484.962.718,00
Belanja Modal Jaringan	2.703.928.273,66	2.607.943.810,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	537.670.072,00	972.000.000,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	794.400.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	252.895.000,00	3.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	27.142.857,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	1.167.566.400,00
Perolehan Aset Lainnya		
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	138.500.000,00	54.593.320,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.507.500.000,00	10.507.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	338.504.882.474,45	291.851.267.566,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	-56.077.238.450,66	-56.077.253.779,00

Aktivitas pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2024 mengalami defisit senilai Rp56.077.238.450,66 dan tahun 2023 defisit senilai Rp56.077.253.779,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus masuk kas pendanaan yaitu arus masuk kas pendanaan dikurangi dengan arus keluar kas pendanaan.

Tabel 5.181. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	1.383.423.066,66	1.383.423.067,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	54.693.815.384,00	54.693.830.712,00
Jumlah Arus Kas Keluar	56.077.238.450,66	56.077.253.779,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-56.077.238.450,66	-56.077.253.779,00

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.182. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00

5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	56.077.238.450,66	56.077.253.779,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.183. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	1.383.423.066,66	1.383.423.067,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	54.693.815.384,00	54.693.830.712,00
Jumlah Arus Kas Keluar	56.077.238.450,66	56.077.253.779,00

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	-23.230.304,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang menyajikan arus kas masuk ke Kas Daerah dan arus keluar kas dari Kas Daerah yang bukan merupakan transaksi APBD. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan kas untuk Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Demikian pula arus kas keluar kas di sini untuk menyajikan pengeluaran kas untuk penyetoran PFK kepada pihak yang berhak. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi transitoris berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Arus kas dari aktivitas transitoris tahun 2024 dan tahun 2023 senilai Rp0,00 dan -Rp23.230.304,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas transitoris.

Rincian arus kas dari aktivitas transitoris tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.184. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.868.631.887,00	93.596.579.910,00
Jumlah Arus Kas Masuk	111.868.631.887,00	93.596.579.910,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.868.631.887,00	93.619.810.214,00
Jumlah Arus Kas Keluar	111.868.631.887,00	93.619.810.214,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	-23.230.304,00

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	111.868.631.887,00	93.596.579.910,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.185. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Iuran Wajib Pegawai	22.787.784.419,00	21.360.401.620,00
Pajak Penghasilan	27.602.875.569,00	23.081.162.147,00
Pajak Pertambahan Nilai	36.951.931.431,00	27.721.061.468,00
Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen)	2.317.226.506,00	1.948.105.051,00
Asuransi Kesehatan	22.208.813.962,00	19.485.849.624,00
Jumlah Arus Kas Masuk	111.868.631.887,00	93.596.579.910,00

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	111.868.631.887,00	93.619.810.214,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.186. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Iuran Wajib Pegawai	22.787.784.419,00	21.360.401.620,00
Pajak Penghasilan	27.602.875.569,00	23.090.917.766,00
Pajak Pertambahan Nilai	36.951.931.431,00	27.734.536.153,00
Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen)	2.317.226.506,00	1.948.105.051,00
Asuransi Kesehatan	22.208.813.962,00	19.485.849.624,00
Jumlah Arus Kas Keluar	111.868.631.887,00	93.619.810.214,00

5.5.5. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	157.785.715.107,80	291.659.058.635,80

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.187. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	109.093.416.112,78	138.549.911.495,93
Kas di Bendahara Penerimaan	15.682.278,00	256.404,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	60.240,00
Kas di BLUD	43.582.817.213,14	152.051.080.848,14
Kas Dana BOS	981.786.363,10	905.774.431,25
Kas Kas Dana Kapitasi pada FKTP	564.433.524,78	128.527.401,48
Kas Lainnya	3.547.579.616,00	23.447.815,00
Jumlah	157.785.715.107,80	291.659.058.635,80



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

5.5.6. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Koreksi SiLPA	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	-10.750.000,00

Saldo dibawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.188. Koreksi SiLPA per 31 Desember 2024

Uraian	2023 (Rp)	2023 (Rp)
Koreksi salah pembukuan tahun lalu	0,00	-10.750.000,00
Jumlah	0,00	-10.750.000,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPSAL pada Poin 5.2. di atas.

5.5.7. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80

Berdasarkan arus kas bersih dari keempat komponen laporan arus kas yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas transitoris bila keempat komponen tersebut dijumlahkan maka diperoleh Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.189. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	40.115.276.893,75	109.093.416.112,78
Kas di Bendahara Penerimaan	13.743.035,76	15.682.278,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	10.181.678.669,09	43.582.817.213,14
Kas Dana BOS	0,00	981.786.363,10
Kas Kas Dana Kapitasi pada FKTP	192.969.847,86	564.433.524,78
Kas Lainnya	702.011,00	3.547.579.616,00
Kas Dana BOSP	1.199.719.970,10	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.326.533.207,00	0,00
Saldo Akhir Kas	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.5 di atas.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Berikut disajikan laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Tabel 5.190. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Ekuitas Awal	4.307.274.182.009,96	4.067.612.145.272,43
Surplus/Defisit – LO	27.339.833.475,58	237.801.828.936,93
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	426.087.141,83	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	649.502.407,75	1.860.207.800,60
Ekuitas Akhir	4.335.689.605.035,12	4.307.274.182.009,96

Koreksi ekuitas pada tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.191. Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Nilai Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	350.337.500,00
2.	Koreksi Nilai Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	73.430.000,00
3.	Koreksi Nilai Persediaan Bahan Lainnya	744.366,33
4.	Koreksi Nilai Persediaan Obat	1.575.275,50
5.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	-2.231.080,82
6.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	880.096,53
7.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	42.147.503,48
8.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	90.380,00
9.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	4.499.761,65
10.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	423.591.850,62
11.	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	447.783,75
12.	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	9.928,00
13.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	431.348,23
14.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	763.776,00
15.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	83.585.000,00
16.	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.115.540,41
17.	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.549.322,43
18.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	17.147.735,70
19.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.730.806,29
20.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.889.783,03
21.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	90.737,71
22.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	-1,00
23.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	-1,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
24.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2,00
25.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	-2.937.500,00
26.	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang	747.432,74
27.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	61.560,00
28.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.595.027,00
29.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	47.910,00
30.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	37.550,00
31.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	2.655,00
32.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.207.500,00
	Jumlah	1.075.589.549,58



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Penggunaan Alokasi *Mandatory Spending* pada Kota Palangka Raya Tahun 2024

Penggunaan *mandatory spending* merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Sejak tahun 2024 alokasi Anggaran untuk Kesehatan tidak termasuk dalam *mandatory spending* karena menyesuaikan amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah mencabut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain:

1. Anggaran pendidikan minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, yang merupakan mandat dari UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1);
2. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, yang merupakan mandat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 147 ayat (1);
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi merupakan mandat dari UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Pasal 11 ayat (15); dan
4. Anggaran pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat bagi Pemerintah Daerah kota yang memiliki besaran total Belanja Daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang merupakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Alokasi *mandatory spending* Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan terdapat pada Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

**Tabel 6.1. Mandatory Spending Bidang Pendidikan Dalam Perubahan APBD
Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	409.325.259.260,00	377.488.977.984,00	92,22
	1) Belanja Operasi:	337.302.869.739,00	306.367.117.333,00	90,83
	a. Belanja Pegawai	273.902.326.515,00	261.137.788.356,00	95,34
	b. Belanja Barang dan Jasa	54.790.553.224,00	43.493.048.977,00	79,38
	c. Belanja Hibah	8.609.990.000,00	1.736.280.000,00	20,17
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	2) Belanja Modal	72.022.389.521,00	71.121.860.651,00	98,75
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	8.005.000.000,00	7.899.166.191,00	98,68
	1) Belanja Operasi:	6.960.000.000,00	6.887.906.191,00	98,96
	a. Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.835.000.000,00	1.792.906.191,00	97,71
	c. Belanja Hibah	5.125.000.000,00	5.095.000.000,00	99,41
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	1.045.000.000,00	1.011.260.000,00	96,77
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	6.341.480.491,00	5.747.505.479,00	90,63
	1) Belanja Operasi:	5.978.587.491,00	5.385.499.479,00	90,08
	a. Belanja Pegawai	4.476.136.152,00	3.990.975.542,00	89,16
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.502.451.339,00	1.394.523.937,00	92,82
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	362.893.000,00	362.006.000,00	99,76
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	9.284.180.000,00	9.187.790.662,00	98,96
	1) Belanja Operasi:	9.024.686.900,00	8.929.082.562,00	98,94
	a. Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.454.686.900,00	1.384.082.562,00	95,15
	c. Belanja Hibah	7.570.000.000,00	7.545.000.000,00	99,67
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	259.493.100,00	258.708.100,00	99,70
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain :	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32
	1) Belanja Transfer:	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32
	Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	433.202.609.507,00	400.568.440.316,00	92,47
3.	Total Belanja Daerah	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	93,94
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	28%	27,51%	98,43

2. Alokasi anggaran untuk pengawasan pada Inspektorat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.2. Mandatory Spending Untuk Pengawasan Dalam Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Total Belanja APIP	20.725.236.701,00	19.385.979.792,00	93,54
2.	Gaji Dan Tunjangan ASN	7.604.606.822,00	7.421.956.919,00	97,60
3.	Total Belanja APIP Di Luar Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	13.120.629.879,00	11.964.022.873,00	91,18
4.	Total Belanja Daerah	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	93,94
5.	Rasio Fungsi Pengawasan	0,85%	0,82%	97,06

3. Alokasi anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.3. Mandatory Spending Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Total Belanja Daerah	1.549.940.752.475,00	1.456.074.108.872,67	93,94
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32
	a. Belanja bagi hasil	0,00	0,00	0,00
	b. Bantuan keuangan	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32
3.	Selisih (1-2)	1.549.694.062.719,00	1.455.829.108.872,67	93,94
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	619.877.625.087,60	582.331.643.549,07	93,94

4. Alokasi Infrastruktur Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.4. Mandatory Spending Infrastruktur Daerah Dalam Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal :	341.769.840.717,00	327.997.382.474,45	95,97
	1) Tanah	2.738.505.000,00	2.620.818.000,00	95,70



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	2) Peralatan dan Mesin	56.662.824.505,00	48.825.356.209,00	86,17
	3) Gedung dan Bangunan	124.551.650.370,00	121.569.959.253,32	97,61
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.411.660.842,00	154.589.854.012,13	98,21
	5) Aset Tetap Lainnya	255.200.000,00	252.895.000,00	99,10
	6) Aset Lainnya	150.000.000,00	138.500.000,00	92,33
	b) Belanja Pemeliharaan	26.246.831.148,00	24.630.673.562,00	93,84
	Jumlah 1 (a+b)	368.016.671.865,00	352.628.056.036,45	95,82
2.	a) Belanja Hibah	68.566.771.687,00	61.498.073.179,00	89,69
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.732.500.000,00	1.595.534.000,00	92,09
	c) Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756,00	245.000.000,00	99,32
	Jumlah 2 (a+b+c)	70.545.961.443,00	63.338.607.179,00	89,78
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	438.562.633.308,00	415.966.663.215,45	94,85
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	35,98%	34,51%	95,92

6.2. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas Tempat Entitas

Pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, secara administratif terbagi ke dalam lima kecamatan dan 26 kelurahan. Secara geografis terletak pada 113° 30' - 114° 07' Bujur Timur dan 1° 35' - 2° 24' Lintang Selatan, yang berbatasan dengan kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, kabupaten Pulang Pisau di sebelah timur, kabupaten Pulang Pisau sebelah selatan dan Katingan sebelah barat.

Luas wilayah kota Palangka Raya 2.678,51 km² (267.851 Hektare) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.

6.3. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

- b. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7);
- d. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);
- e. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 5); dan
- f. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 35).

6.4. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Dalam tahun 2024 terjadi mutasi dan penggantian beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pada Tanggal 2 Januari 2024 dilakukan pelantikan satu orang dengan latar belakang pelantikan Promosi berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 870/02/BKPSDM.PK2PA.03/I/2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Peteng Karuhei II;
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pada Tanggal 22 April 2024 dilakukan pelantikan satu orang dengan latar belakang pelantikan Promosi berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 870/134/BKPSDM.PK2PA.03/IV/2024 yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya;
- c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pada Tanggal 7 Juni 2024 dilakukan pelantikan dua orang dengan latar belakang pelantikan Rotasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 870/176/BKPSDM.PK2PA.03/VI/2024 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya;
- d. Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pada Tanggal 5 Juli 2024 dilakukan pelantikan dua orang dengan latar belakang pelantikan Promosi berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 870/240/BKPSDM.PK2PA.03/VII/2024 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya; dan



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

- e. Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pada Tanggal 4 November 2024 dilakukan pelantikan satu orang dengan latar belakang pelantikan Promosi berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 870/417/BKPSDM.PK2PA.03/XI/2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Peteng Karuhei II.

6.5. Upaya Penanganan Bencana di Wilayah Kota Palangka Raya Pada Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan upaya penanganan bencana berdasarkan penetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir yang terdiri dari:

1. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/116/2024 tanggal 10 Maret 2024 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir
 - a. Total warga terdampak sebanyak 32.877 jiwa, dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi sebanyak 232 jiwa tersebar di 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan Posko lapangan pada 17 Kelurahan yang terdampak banjir;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mendirikan Tenda Pengungsi sebanyak 4 unit dan dapur umum sebanyak 4 unit;
 - d. Logistik yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, mie, gula dan sarden;
 - e. Total personel sebanyak 195 orang terdiri dari TRC BPBD, TNI, POLRI, TRC Multisektor, Camat, Lurah dan Relawan; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi, edukasi dan mitigasi kepada warga yang terdampak bencana.
2. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/472/2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Banjir
 - a. Total warga terdampak sebanyak 26.025 jiwa, tersebar di 4 Kecamatan dan 14 Kelurahan;
 - b. Posko Komando Banjir di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dan Posko Lapangan Banjir berada di 14 Kelurahan yang terdampak;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyediakan dapur umum di jalan Poncowati yang dikoordinir oleh Tim TAGANA;
 - d. Logistik yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, mie dan sarden;
 - e. Total personel sebanyak 167 orang terdiri dari TRC BPBD, TNI, POLRI, TRC Multisektor, Camat, Lurah dan Relawan; dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi, edukasi dan mitigasi kepada warga yang terdampak bencana.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang penjelasan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kota Palangka Raya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dan berbasis akrual;
3. Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi terkait dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan daerah yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya, maupun pihak internal Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri dalam pengambilan keputusan; dan
5. Atas jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2024, dalam penyusunannya sampai kepada penetapan jumlahnya yang tercantum dalam Neraca adalah kompilasi dari saldo awal Aset Daerah per 31 Desember 2023 ditambah/dikurangi mutasi Belanja Modal dan hal-hal lainnya dalam Tahun Anggaran 2024.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Belanja Pegawai per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	238.530.761.440,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.037.398.143,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.293.863.123,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.529.671.868,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.999.571.876,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.963.924.581,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.477.441.955,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.988.196.864,00
Dinas Kesehatan	39.499.051.154,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2.245.782.334,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.816.849.686,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	2.660.791.285,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.370.378.906,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.894.237.009,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.346.112.412,00
Dinas Pendidikan	114.290.151.623,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2.032.331.818,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2.828.116.530,00
Dinas Perhubungan	2.433.497.988,00
Dinas Perikanan	2.301.056.563,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.429.594.184,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.700.333.816,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.404.814.600,00
Dinas Sosial	1.955.680.600,00
Dinas Tenaga Kerja	2.598.858.814,00
Inspektorat	2.321.902.326,00
Kecamatan Bukit Batu	2.360.852.588,00
Kecamatan Jekan Raya	3.270.257.951,00
Kecamatan Pahandut	3.540.596.156,00
Kecamatan Rakumpit	2.623.174.547,00
Kecamatan Sabangau	3.221.453.829,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.415.028.272,00
Sekretariat Daerah	5.826.347.194,00
Sekretariat DPRD	1.853.440.845,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	21.334.927.148,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	341.161.476,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.850.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	134.551.186,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	491.399.186,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	70.579.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	166.587.094,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89.700.700,00
Dinas Kesehatan	2.437.609.400,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	291.483.734,00
Dinas Lingkungan Hidup	384.432.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	89.700.786,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.175.200,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.054.829.172,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	181.872.000,00
Dinas Pendidikan	13.190.017.010,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	237.066.386,00
Dinas Perhubungan	135.889.600,00
Dinas Perikanan	76.886.386,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	470.196.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	84.873.572,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	166.587.186,00
Dinas Sosial	32.036.000,00
Sekretariat Daerah	544.611.858,00
Sekretariat DPRD	422.831.216,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.244.434.579,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	144.130.604,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.513.256,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	145.372.228,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	148.501.160,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	219.949.468,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	249.373.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	164.937.892,00
Dinas Kesehatan	2.732.518.308,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	184.769.922,00
Dinas Lingkungan Hidup	669.676.405,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	215.273.280,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.877.502,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	199.079.230,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	196.849.294,00
Dinas Pendidikan	8.950.167.920,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	166.825.880,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	204.348.136,00
Dinas Perhubungan	235.778.200,00
Dinas Perikanan	178.206.906,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.612.394,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	418.481.274,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	244.294.492,00
Dinas Sosial	141.947.540,00
Dinas Tenaga Kerja	248.669.026,00
Inspektorat	199.626.242,00
Kecamatan Bukit Batu	214.123.086,00
Kecamatan Jekan Raya	268.200.366,00
Kecamatan Pahandut	318.922.284,00
Kecamatan Rakumpit	265.845.484,00
Kecamatan Sabangau	323.027.394,00
Satuan Polisi Pamong Praja	317.638.542,00
Sekretariat Daerah	514.737.514,00
Sekretariat DPRD	213.160.250,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.530.892.552,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.267.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.786.536,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.203.776,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.883.240,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.123.376,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.970.080,00
Dinas Kesehatan	157.033.602,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	23.669.808,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.532.960,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	6.279.056,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.187.448,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	96.341.140,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.774.400,00
Dinas Pendidikan	961.926.986,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	22.937.776,00
Dinas Perhubungan	8.457.504,00
Dinas Perikanan	10.123.376,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.762.360,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.279.056,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	21.528.192,00
Dinas Sosial	4.485.040,00
Sekretariat Daerah	44.722.256,00
Sekretariat DPRD	17.617.184,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.613.860.222,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	92.145.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.450.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	104.160.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	161.350.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	159.730.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	104.650.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.400.000,00
Dinas Kesehatan	259.960.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	150.010.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	202.040.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	152.810.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	238.985.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	168.690.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.885.000,00
Dinas Pendidikan	178.410.222,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	128.250.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	158.870.000,00
Dinas Perhubungan	182.685.000,00
Dinas Perikanan	135.960.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	87.470.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	197.130.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	146.770.000,00
Dinas Sosial	181.870.000,00
Dinas Tenaga Kerja	123.170.000,00
Inspektorat	102.690.000,00
Kecamatan Bukit Batu	208.020.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Kecamatan Jekan Raya	214.550.000,00
Kecamatan Pahandut	272.680.000,00
Kecamatan Rakumpit	266.170.000,00
Kecamatan Sabangau	274.960.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	184.030.000,00
Sekretariat Daerah	279.770.000,00
Sekretariat DPRD	112.140.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.234.800.970,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	72.252.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.880.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.400.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.640.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	143.800.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	209.880.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.805.000,00
Dinas Kesehatan	4.060.785.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	109.256.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	93.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	103.787.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.042.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.560.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.960.000,00
Dinas Pendidikan	8.919.966.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	88.834.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	173.080.000,00
Dinas Perhubungan	36.660.000,00
Dinas Perikanan	97.770.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77.604.470,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	367.650.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	56.880.000,00
Dinas Sosial	27.860.000,00
Dinas Tenaga Kerja	277.520.000,00
Inspektorat	326.190.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	317.280.000,00
Sekretariat Daerah	311.895.000,00
Sekretariat DPRD	20.064.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.253.072.280,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	55.200.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.140.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71.980.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32.600.000,00
Dinas Kesehatan	214.630.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	45.720.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	3.670.000,00
Dinas Pendidikan	1.335.251.280,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	126.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.100.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	38.820.000,00
Dinas Perhubungan	19.875.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.100.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.970.000,00
Dinas Sosial	5.400.000,00
Sekretariat Daerah	97.960.000,00
Sekretariat DPRD	64.656.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.533.341.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63.735.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.375.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.475.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	55.245.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	62.210.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.570.000,00
Dinas Kesehatan	237.570.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	58.245.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	287.725.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	60.910.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.635.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	36.560.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.420.000,00
Dinas Pendidikan	351.441.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	52.725.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	62.935.000,00
Dinas Perhubungan	62.320.000,00
Dinas Perikanan	47.665.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.155.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	85.585.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	76.815.000,00
Dinas Sosial	31.010.000,00
Dinas Tenaga Kerja	39.525.000,00
Inspektorat	13.690.000,00
Kecamatan Bukit Batu	38.555.000,00
Kecamatan Jekan Raya	81.345.000,00
Kecamatan Pahandut	76.470.000,00
Kecamatan Rakumpit	35.220.000,00
Kecamatan Sabangau	54.680.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	33.855.000,00
Sekretariat Daerah	181.660.000,00
Sekretariat DPRD	54.015.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	64.570.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.215.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	9.910.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.810.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	22.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.250.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	185.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	10.988.506.196,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	94.503.058,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.056.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.330.680,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.173.760,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	133.470.060,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	138.539.460,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97.767.000,00
Dinas Kesehatan	1.834.108.920,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	113.554.560,00
Dinas Lingkungan Hidup	422.063.760,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	125.069.340,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.170.100,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	101.605.260,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.899.760,00
Dinas Pendidikan	4.753.221.658,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	94.652.940,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	118.189.440,00
Dinas Perhubungan	137.815.260,00
Dinas Perikanan	102.836.400,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.413.960,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	228.485.100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	140.422.380,00
Dinas Sosial	81.762.180,00
Dinas Tenaga Kerja	142.088.040,00
Inspektorat	116.523.780,00
Kecamatan Bukit Batu	124.996.920,00
Kecamatan Jekan Raya	163.162.260,00
Kecamatan Pahandut	193.651.080,00
Kecamatan Rakumpit	148.678.260,00
Kecamatan Sabangau	182.860.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	187.857.480,00
Sekretariat Daerah	304.960.620,00
Sekretariat DPRD	107.616.120,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.151.695.260,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.467.100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.013.880,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.083.280,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.926.360,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.317.440,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.255.880,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.055.520,00
Dinas Kesehatan	126.372.900,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	15.932.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	13.035.600,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	5.069.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.762.820,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	89.511.120,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.980.080,00
Dinas Pendidikan	699.722.040,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	15.642.720,00
Dinas Perhubungan	6.372.960,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perikanan	6.228.120,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.246.820,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.069.400,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.035.600,00
Dinas Sosial	2.896.800,00
Sekretariat Daerah	30.416.400,00
Sekretariat DPRD	15.280.620,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.136.842.004,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.599.048,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.991.432,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.393.652,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	181.145.878,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.488.951,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	204.313.210,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.297.531,00
Dinas Kesehatan	60.088.609,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	7.049.044,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.894.239,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.428.042,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.104.984,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.387.178,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.781.310,00
Dinas Pendidikan	513.070.076,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	5.366.329,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	6.787.000,00
Dinas Perhubungan	4.765.005,00
Dinas Perikanan	6.366.777,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.144.858,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.428.060,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.579.260,00
Dinas Sosial	7.701.961,00
Dinas Tenaga Kerja	7.484.449,00
Inspektorat	14.315.439,00
Kecamatan Bukit Batu	2.139.371,00
Kecamatan Jekan Raya	2.191.890,00
Kecamatan Pahandut	1.034.111,00
Kecamatan Rakumpit	2.676.560,00
Kecamatan Sabangau	3.403.745,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.642.400,00
Sekretariat Daerah	13.373.912,00
Sekretariat DPRD	4.407.693,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.323.797,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.528,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.549,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.141,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.850,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	39.506,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	33.664,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.383,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan	591.687,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	28.210,00
Dinas Lingkungan Hidup	103.851,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	34.287,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.917,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24.078,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.985,00
Dinas Pendidikan	1.549.971,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	28.432,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	36.956,00
Dinas Perhubungan	35.206,00
Dinas Perikanan	34.159,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.229,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	59.452,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	38.394,00
Dinas Sosial	27.634,00
Dinas Tenaga Kerja	34.194,00
Inspektorat	30.750,00
Kecamatan Bukit Batu	32.588,00
Kecamatan Jekan Raya	41.440,00
Kecamatan Pahandut	54.348,00
Kecamatan Rakumpit	36.267,00
Kecamatan Sabangau	44.982,00
Satuan Polisi Pamong Praja	52.720,00
Sekretariat Daerah	83.506,00
Sekretariat DPRD	23.933,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	171.765,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.876,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	706,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.318,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.664,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.446,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.509,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	556,00
Dinas Kesehatan	54.833,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	5.438,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.799,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1.999,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.929,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.044,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.167,00
Dinas Pendidikan	12.591,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	3.580,00
Dinas Perhubungan	2.976,00
Dinas Perikanan	1.455,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.956,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.528,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.850,00
Dinas Sosial	286,00
Sekretariat Daerah	10.002,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat DPRD	7.257,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.188.023.316,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	171.568.948,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	94.290.864,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	109.003.112,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	167.042.609,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	199.133.123,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	201.699.610,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	143.996.144,00
Dinas Kesehatan	4.040.404.501,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	159.332.454,00
Dinas Lingkungan Hidup	440.171.804,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	185.055.009,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	228.981.797,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	136.102.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	134.639.557,00
Dinas Pendidikan	8.186.257.898,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	149.176.778,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	201.023.369,00
Dinas Perhubungan	153.363.679,00
Dinas Perikanan	159.133.009,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	101.987.664,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	328.426.397,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	166.706.321,00
Dinas Sosial	135.866.986,00
Dinas Tenaga Kerja	199.723.314,00
Inspektorat	191.402.380,00
Kecamatan Bukit Batu	160.891.858,00
Kecamatan Jekan Raya	209.177.428,00
Kecamatan Pahandut	239.350.135,00
Kecamatan Rakumpit	159.002.232,00
Kecamatan Sabangau	221.193.023,00
Satuan Polisi Pamong Praja	246.123.370,00
Sekretariat Daerah	440.418.311,00
Sekretariat DPRD	127.377.620,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.056.787.970,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.602.431,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.754.328,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.218.064,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.132.019,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.124.992,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.016.153,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.306.646,00
Dinas Kesehatan	107.403.486,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	14.007.671,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.053.931,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	3.757.364,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.612.446,00
Dinas Pendidikan	689.181.815,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	51.028.668,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.126.042,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	10.973.916,00
Dinas Perhubungan	6.014.580,00
Dinas Perikanan	3.475.097,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.487.373,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.434.432,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.201.468,00
Dinas Sosial	1.509.156,00
Sekretariat Daerah	25.235.595,00
Sekretariat DPRD	19.130.297,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	489.330.706,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.181.867,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.662.183,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.145.405,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.113.032,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.092.046,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.088.316,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.069.242,00
Dinas Kesehatan	81.111.657,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4.606.226,00
Dinas Lingkungan Hidup	13.951.080,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.442.627,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.921.190,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.831.692,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.816.917,00
Dinas Pendidikan	234.512.062,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	4.191.349,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	5.805.824,00
Dinas Perhubungan	4.970.637,00
Dinas Perikanan	4.722.107,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.928.845,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.633.667,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.896.070,00
Dinas Sosial	4.015.539,00
Dinas Tenaga Kerja	5.325.919,00
Inspektorat	4.768.898,00
Kecamatan Bukit Batu	4.794.901,00
Kecamatan Jekan Raya	6.705.534,00
Kecamatan Pahandut	7.244.790,00
Kecamatan Rakumpit	5.387.765,00
Kecamatan Sabangau	6.555.482,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.029.372,00
Sekretariat Daerah	12.003.388,00
Sekretariat DPRD	3.805.077,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	44.929.353,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	728.208,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92.268,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	276.804,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.047.600,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	147.156,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	346.005,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.536,00
Dinas Kesehatan	5.194.836,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	602.937,00
Dinas Lingkungan Hidup	830.412,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	184.536,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	407.754,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.272.170,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	392.850,00
Dinas Pendidikan	27.648.038,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	507.474,00
Dinas Perhubungan	296.500,00
Dinas Perikanan	161.469,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.015.659,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	174.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	346.005,00
Dinas Sosial	69.201,00
Sekretariat Daerah	1.153.350,00
Sekretariat DPRD	848.985,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.468.000.771,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.545.573,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.986.615,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.436.316,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.339.168,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	18.276.275,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	15.265.097,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.207.755,00
Dinas Kesehatan	243.337.794,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	13.818.931,00
Dinas Lingkungan Hidup	41.853.385,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	16.327.986,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.763.673,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.495.109,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.450.889,00
Dinas Pendidikan	703.539.360,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	12.574.138,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	17.417.464,00
Dinas Perhubungan	14.912.039,00
Dinas Perikanan	14.166.332,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.786.571,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.900.917,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.688.162,00
Dinas Sosial	12.046.739,00
Dinas Tenaga Kerja	15.977.817,00
Inspektorat	14.306.884,00
Kecamatan Bukit Batu	14.384.813,00
Kecamatan Jekan Raya	20.116.712,00
Kecamatan Pahandut	21.734.454,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Kecamatan Rakumpit	16.163.384,00
Kecamatan Sabangau	19.666.560,00
Satuan Polisi Pamong Praja	21.088.352,00
Sekretariat Daerah	36.010.241,00
Sekretariat DPRD	11.415.266,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	134.789.096,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.184.540,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	276.792,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	830.376,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.142.728,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	441.456,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.037.970,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	553.584,00
Dinas Kesehatan	15.584.376,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.808.754,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.491.128,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	553.584,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.223.217,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.822.330,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.178.523,00
Dinas Pendidikan	82.940.549,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.522.356,00
Dinas Perhubungan	889.460,00
Dinas Perikanan	484.386,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.046.869,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	523.788,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.037.970,00
Dinas Sosial	207.594,00
Sekretariat Daerah	3.459.900,00
Sekretariat DPRD	2.546.866,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	131.122.569.145,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.031.885.010,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.147.077.046,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.404.610.020,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.834.775.640,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.371.363.710,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.181.013.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.766.913.870,00
Dinas Kesehatan	32.762.289.863,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.989.033.690,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.807.411.460,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.270.639.670,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.722.625.140,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.603.873.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.825.610.380,00
Dinas Pendidikan	26.258.382.425,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.811.167.930,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2.443.031.678,00
Dinas Perhubungan	2.125.947.860,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perikanan	1.995.113.840,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.244.495.330,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.870.584.060,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.992.779.690,00
Dinas Sosial	1.790.433.500,00
Dinas Tenaga Kerja	2.495.995.260,00
Inspektorat	2.632.260.220,00
Kecamatan Bukit Batu	1.825.826.462,00
Kecamatan Jekan Raya	2.260.765.990,00
Kecamatan Pahandut	2.716.583.940,00
Kecamatan Rakumpit	2.216.035.421,00
Kecamatan Sabangau	2.553.546.960,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.129.111.090,00
Sekretariat Daerah	5.504.000.150,00
Sekretariat DPRD	1.537.385.240,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.293.221.581,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.253.250,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.680.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.073.760,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.977.600,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.680.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.983.840,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.613.920,00
Dinas Kesehatan	149.225.780,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	32.113.470,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	15.581.280,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.031.080,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	180.900.000,00
Dinas Pendidikan	702.384.040,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	7.790.640,00
Dinas Perikanan	7.800.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16.286.440,00
Sekretariat Daerah	23.396.880,00
Sekretariat DPRD	43.449.601,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.336.399.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	638.820.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.500.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.020.800.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	49.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	836.050.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.600.000,00
Dinas Kesehatan	404.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	28.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.200.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	760.200.000,00
Dinas Pendidikan	42.800.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	42.900.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	23.200.000,00
Dinas Perhubungan	36.000.000,00
Dinas Perikanan	40.600.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.600.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	47.600.000,00
Dinas Sosial	32.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja	46.200.000,00
Inspektorat	1.484.250.000,00
Kecamatan Bukit Batu	9.900.000,00
Kecamatan Jekan Raya	56.100.000,00
Kecamatan Pahandut	52.400.000,00
Kecamatan Rakumpit	65.300.000,00
Kecamatan Sabangau	38.559.750,00
Satuan Polisi Pamong Praja	47.600.000,00
Sekretariat Daerah	1.172.820.000,00
Sekretariat DPRD	30.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	41.600.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.500.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	7.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.100.000,00
Sekretariat DPRD	10.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.400.550.000,00
Dinas Kesehatan	2.235.550.000,00
Sekretariat Daerah	165.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	351.779.813,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	351.779.813,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	620.777.074,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	620.777.074,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	83.250.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	83.250.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	40.700.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	40.700.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.181.602.838,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.181.602.838,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	22.940.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	22.940.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.713.580,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.713.580,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.810.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.810.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	168.726.951,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	168.726.951,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.042.528.119,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.042.528.119,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	521.089.416,00
Dinas Kesehatan	521.089.416,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	71.487.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	71.487.500,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	61.080.155,00
Dinas Perhubungan	61.080.155,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	750.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	750.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	475.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	475.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	84.700.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	66.100.000,00
Dinas Perikanan	3.600.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	40.400.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	40.400.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	350.000,00
Dinas Perhubungan	350.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.150.000,00
Dinas Perikanan	3.150.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	315.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.000.000,00
Belanja TPG PNSD	68.789.333.092,00
Dinas Pendidikan	68.789.333.092,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Tamsil Guru PNSD	921.840.000,00
Dinas Pendidikan	921.840.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	529.364.648,00
Dinas Kesehatan	529.364.648,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.781.345.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	155.100.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	213.120.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.160.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	277.800.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	198.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	189.645.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	159.060.000,00
Dinas Kesehatan	591.060.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	175.870.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	328.680.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	250.430.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	751.390.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	183.120.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	175.110.000,00
Dinas Pendidikan	345.900.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	176.890.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	203.940.000,00
Dinas Perhubungan	288.600.000,00
Dinas Perikanan	169.920.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	113.640.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	232.110.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	471.340.000,00
Dinas Sosial	170.520.000,00
Dinas Tenaga Kerja	130.500.000,00
Inspektorat	129.480.000,00
Kecamatan Bukit Batu	262.930.000,00
Kecamatan Jekan Raya	167.010.000,00
Kecamatan Pahandut	184.440.000,00
Kecamatan Rakumpit	287.040.000,00
Kecamatan Sabangau	236.360.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	220.080.000,00
Sekretariat Daerah	807.780.000,00
Sekretariat DPRD	361.320.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	318.620.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.120.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.160.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.160.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.080.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.080.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.760.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.160.000,00
Dinas Kesehatan	20.400.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4.080.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.160.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.160.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.160.000,00
Dinas Pendidikan	8.160.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8.160.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	8.160.000,00
Dinas Perhubungan	8.160.000,00
Dinas Perikanan	8.160.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.160.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.160.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.160.000,00
Dinas Sosial	7.480.000,00
Dinas Tenaga Kerja	8.160.000,00
Inspektorat	8.160.000,00
Kecamatan Bukit Batu	8.160.000,00
Kecamatan Jekan Raya	8.160.000,00
Kecamatan Pahandut	3.400.000,00
Kecamatan Rakumpit	8.160.000,00
Kecamatan Sabangau	8.160.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.160.000,00
Sekretariat Daerah	92.860.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	669.585.000,00
Sekretariat DPRD	669.585.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	65.494.800,00
Sekretariat DPRD	65.494.800,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	76.982.460,00
Sekretariat DPRD	76.982.460,00
Belanja Uang Paket DPRD	43.186.500,00
Sekretariat DPRD	43.186.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	970.898.250,00
Sekretariat DPRD	970.898.250,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	78.796.991,00
Sekretariat DPRD	78.796.991,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
Sekretariat DPRD	3.780.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
Sekretariat DPRD	630.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	37.611.647,00
Sekretariat DPRD	37.611.647,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	56.408.184,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat DPRD	56.408.184,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.360.800,00
Sekretariat DPRD	1.360.800,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.082.400,00
Sekretariat DPRD	4.082.400,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.714.615.000,00
Sekretariat DPRD	3.714.615.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.161.500.000,00
Sekretariat DPRD	5.161.500.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.600.000,00
Sekretariat DPRD	222.600.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	19.015.125,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	19.015.125,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	33.555.518,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	33.555.518,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.500.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.500.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.200.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.200.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	63.870.424,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	63.870.424,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.240.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.240.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	200.734,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	200.734,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	260.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	260.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.120.375,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	9.120.375,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.352.871,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	56.352.871,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	151.200.000,00
Sekretariat DPRD	151.200.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Pegawai	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
Sekretariat Daerah	600.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	198.600.000,00
Dinas Kesehatan	198.600.000,00
Jumlah	584.810.451.366,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lampiran 2. Belanja Barang dan Jasa per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	709.779.700,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.020.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.120.000,00
Dinas Kesehatan	131.709.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	457.009.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	5.928.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.748.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.725.000,00
Inspektorat	9.300.000,00
Kecamatan Jekan Raya	7.024.200,00
Sekretariat DPRD	66.196.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	436.979.300,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	480.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.289.600,00
Dinas Kesehatan	72.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	71.967.200,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.440.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.200.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	348.530.500,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.530.473.668,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	427.831.050,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.750.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.240.000,00
Dinas Kesehatan	379.966.460,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	96.498.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.652.640.527,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	18.130.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.251.662,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	468.283.160,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	173.147.400,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	62.866.800,00
Dinas Perhubungan	18.189.450,00
Dinas Perikanan	27.549.800,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	455.056.259,00
Dinas Sosial	15.183.000,00
Dinas Tenaga Kerja	4.738.500,00
Kecamatan Bukit Batu	1.296.000,00
Kecamatan Jekan Raya	36.957.800,00
Kecamatan Pahandut	71.299.600,00
Kecamatan Rakumpit	141.396.500,00
Kecamatan Sabangau	11.291.200,00
Sekretariat Daerah	12.000.000,00
Sekretariat DPRD	124.110.500,00
Kecamatan Bukit Batu	1.296.000,00
Kecamatan Jekan Raya	36.957.800,00
Kecamatan Pahandut	71.299.600,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Kecamatan Rakumpit	141.396.500,00
Kecamatan Sabangau	11.291.200,00
Sekretariat Daerah	12.000.000,00
Sekretariat DPRD	124.110.500,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	76.710.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	22.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.800.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47.010.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	731.672.577,22
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.676.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	634.477.777,22
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	89.258.000,00
Kecamatan Bukit Batu	4.260.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.890.000,00
Dinas Kesehatan	1.890.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	81.268.200,00
Dinas Kesehatan	48.256.200,00
Dinas Perikanan	27.549.800,00
Sekretariat Daerah	1.296.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	407.332.500,00
Dinas Perikanan	39.235.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	368.097.500,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.981.957.171,92
Dinas Kesehatan	3.476.187.671,92
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	56.355.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	315.304.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	13.400.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.700.000,00
Dinas Pendidikan	21.800.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	14.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	53.010.000,00
Dinas Sosial	18.150.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.400.000,00
Sekretariat DPRD	3.250.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	846.818.000,00
Dinas Kesehatan	4.996.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	812.982.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.840.000,00
Kecamatan Pahandut	1.000.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	54.070.755,00
Dinas Kesehatan	27.598.955,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	324.800,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.065.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.082.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.155.844,00
Dinas Kesehatan	1.255.844,00
Inspektorat	2.900.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	9.045.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2.445.000,00
Dinas Perhubungan	600.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	190.800,00
Kecamatan Jekan Raya	190.800,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	24.993.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	24.993.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.654.574.883,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.356.461,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.871.900,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.186.800,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	624.622.900,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	104.906.700,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	147.084.150,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.713.900,00
Dinas Kesehatan	250.207.900,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	18.841.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	154.180.600,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	62.606.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.325.450,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	28.635.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.103.350,00
Dinas Pendidikan	344.192.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	119.849.710,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	54.621.700,00
Dinas Perhubungan	54.284.600,00
Dinas Perikanan	57.662.350,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.765.900,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	140.626.250,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	134.323.000,00
Dinas Sosial	57.930.300,00
Dinas Tenaga Kerja	34.685.150,00
Inspektorat	177.593.900,00
Kecamatan Bukit Batu	42.949.100,00
Kecamatan Jekan Raya	55.356.100,00
Kecamatan Pahandut	72.594.100,00
Kecamatan Rakumpit	29.256.300,00
Kecamatan Sabangau	68.347.306,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja	64.790.950,00
Sekretariat Daerah	237.915.606,00
Sekretariat DPRD	101.185.650,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.198.214.650,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.955.800,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.214.600,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.318.200,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	667.920.900,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	172.423.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	162.855.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.051.600,00
Dinas Kesehatan	347.937.700,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	25.999.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	163.602.300,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	74.170.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109.098.300,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	36.534.100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78.288.000,00
Dinas Pendidikan	695.117.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	50.744.300,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	47.355.200,00
Dinas Perhubungan	146.549.500,00
Dinas Perikanan	46.168.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.120.300,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.278.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	145.244.100,00
Dinas Sosial	69.701.450,00
Dinas Tenaga Kerja	28.660.200,00
Inspektorat	175.930.400,00
Kecamatan Bukit Batu	23.262.200,00
Kecamatan Jekan Raya	36.525.300,00
Kecamatan Pahandut	105.817.000,00
Kecamatan Rakumpit	15.638.600,00
Kecamatan Sabangau	27.918.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja	45.047.700,00
Sekretariat Daerah	331.067.200,00
Sekretariat DPRD	64.698.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.297.786.526,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	121.098.188,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.254.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.222.025,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.421.001.295,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	939.214.450,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	928.207.130,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	217.057.249,00
Dinas Kesehatan	1.129.892.705,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	182.908.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	524.182.800,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	268.133.870,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.712.100,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	133.314.911,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.190.800,00
Dinas Pendidikan	623.481.670,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	242.108.195,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	302.926.269,00
Dinas Perhubungan	365.791.000,00
Dinas Perikanan	97.085.481,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54.424.300,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	294.971.850,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	217.051.200,00
Dinas Sosial	169.241.900,00
Dinas Tenaga Kerja	160.123.094,00
Inspektorat	283.601.550,00
Kecamatan Bukit Batu	57.233.640,00
Kecamatan Jekan Raya	52.811.000,00
Kecamatan Pahandut	113.719.660,00
Kecamatan Rakumpit	12.913.100,00
Kecamatan Sabangau	45.451.350,00
Satuan Polisi Pamong Praja	94.097.243,00
Sekretariat Daerah	520.586.236,00
Sekretariat DPRD	347.778.265,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	626.394.050,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.270.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.700.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.850.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.540.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	30.590.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14.680.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.000.000,00
Dinas Kesehatan	68.590.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4.850.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	36.280.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.050.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.450.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.240.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.630.000,00
Dinas Pendidikan	50.201.050,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	10.770.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	10.280.000,00
Dinas Perhubungan	5.995.000,00
Dinas Perikanan	4.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.450.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	43.290.000,00
Dinas Sosial	11.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2.836.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Inspektorat	20.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	1.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	3.760.000,00
Kecamatan Pahandut	15.710.000,00
Kecamatan Rakumpit	3.564.000,00
Kecamatan Sabangau	16.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.240.000,00
Sekretariat Daerah	89.078.000,00
Sekretariat DPRD	12.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.420.771.925,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.368.400,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.745.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.402.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	593.678.500,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	133.458.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	130.173.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	959.621.575,00
Dinas Kesehatan	243.093.900,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	36.683.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	220.932.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	47.825.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.957.300,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.782.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.607.000,00
Dinas Pendidikan	585.793.700,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	51.423.850,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	36.512.300,00
Dinas Perhubungan	44.859.000,00
Dinas Perikanan	25.557.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.713.900,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	80.418.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	156.738.900,00
Dinas Sosial	99.708.000,00
Dinas Tenaga Kerja	20.294.500,00
Inspektorat	165.735.800,00
Kecamatan Jekan Raya	38.610.800,00
Kecamatan Pahandut	86.855.500,00
Kecamatan Rakumpit	2.818.000,00
Kecamatan Sabangau	73.223.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	58.047.800,00
Sekretariat Daerah	179.160.900,00
Sekretariat DPRD	75.970.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	210.734.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.254.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.758.000,00
Dinas Kesehatan	7.500.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.509.000,00
Dinas Pendidikan	1.100.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perikanan	5.000.000,00
Inspektorat	924.000,00
Kecamatan Jekan Raya	33.627.500,00
Kecamatan Sabangau	16.166.000,00
Sekretariat Daerah	119.896.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	828.509.550,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.547.600,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.987.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.703.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	53.445.800,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	31.182.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	23.621.800,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.200.000,00
Dinas Kesehatan	32.137.500,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6.992.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	23.864.900,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	27.487.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.990.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.771.000,00
Dinas Pendidikan	109.266.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	11.421.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	17.518.100,00
Dinas Perhubungan	13.940.000,00
Dinas Perikanan	11.724.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.290.600,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.296.300,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39.078.800,00
Dinas Sosial	15.013.500,00
Dinas Tenaga Kerja	6.017.750,00
Inspektorat	33.545.800,00
Kecamatan Bukit Batu	3.400.600,00
Kecamatan Jekan Raya	10.353.800,00
Kecamatan Pahandut	15.551.200,00
Kecamatan Sabangau	8.878.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	14.894.500,00
Sekretariat Daerah	59.609.000,00
Sekretariat DPRD	94.780.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	322.447.122,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.370.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	13.487.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	21.825.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	14.850.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.732.122,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	41.292.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	16.686.000,00
Dinas Perhubungan	31.860.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Inspektorat	53.180.000,00
Kecamatan Jekan Raya	672.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	21.802.500,00
Sekretariat DPRD	21.690.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	1.020.182.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.515.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	225.480.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.470.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.200.000,00
Dinas Kesehatan	15.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	22.000.000,00
Dinas Pendidikan	82.234.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	147.875.000,00
Dinas Perhubungan	141.600.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.250.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.875.000,00
Inspektorat	41.973.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	249.710.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	535.613.703,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.500.000,00
Dinas Kesehatan	8.236.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	179.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.527.703,00
Dinas Pendidikan	56.250.000,00
Dinas Perikanan	25.750.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	180.000.000,00
Inspektorat	13.750.000,00
Kecamatan Bukit Batu	6.000.000,00
Kecamatan Sabangau	9.600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.420.274.250,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.634.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.160.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36.540.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	143.043.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	85.240.000,00
Dinas Kesehatan	11.940.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	8.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	58.450.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	17.095.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.186.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15.120.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.989.500,00
Dinas Pendidikan	37.800.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	14.520.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	20.750.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	7.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.664.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.800.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	57.535.000,00
Dinas Sosial	25.200.000,00
Inspektorat	257.090.000,00
Kecamatan Pahandut	200.000,00
Sekretariat Daerah	374.117.250,00
Sekretariat DPRD	117.800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.933.445.775,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.718.275,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.583.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.912.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	68.139.900,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	98.829.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	41.931.800,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.640.400,00
Dinas Kesehatan	216.896.200,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	12.868.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	530.390.080,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	417.814.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.923.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	249.301.750,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78.312.000,00
Dinas Pendidikan	196.009.850,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	373.263.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	156.220.970,00
Dinas Perhubungan	60.198.500,00
Dinas Perikanan	37.223.400,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.714.300,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	309.717.450,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	73.796.100,00
Dinas Sosial	138.381.200,00
Dinas Tenaga Kerja	16.061.900,00
Inspektorat	348.790.800,00
Kecamatan Bukit Batu	39.532.650,00
Kecamatan Jekan Raya	19.260.000,00
Kecamatan Pahandut	4.744.500,00
Kecamatan Rakumpit	15.317.300,00
Kecamatan Sabangau	49.079.800,00
Satuan Polisi Pamong Praja	18.852.950,00
Sekretariat Daerah	96.596.700,00
Sekretariat DPRD	100.423.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	849.613.203,00
Dinas Kesehatan	793.613.203,00
Dinas Perhubungan	56.000.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.961.452.990,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan	1.669.876.890,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.815.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	216.761.100,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.578.450.210,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.001.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.375.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	24.605.000,00
Dinas Pendidikan	5.900.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	216.205.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	446.132.000,00
Dinas Perhubungan	9.550.000,00
Dinas Perikanan	1.365.676.650,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	836.000.000,00
Dinas Sosial	190.314.500,00
Sekretariat Daerah	382.240.460,00
Sekretariat DPRD	9.450.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	32.368.873.085,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	377.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.342.846.435,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	42.000.000,00
Sekretariat Daerah	1.606.226.650,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.053.458.300,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.815.800,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	810.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.397.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	22.686.000,00
Dinas Kesehatan	13.618.700,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2.592.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.980.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	14.963.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.395.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.825.000,00
Dinas Pendidikan	53.700.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	870.922.400,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.927.395.000,00
Dinas Perikanan	89.047.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.876.200,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.689.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	213.298.250,00
Dinas Sosial	2.397.248.400,00
Inspektorat	48.590.600,00
Kecamatan Bukit Batu	54.290.500,00
Kecamatan Jekan Raya	23.454.600,00
Kecamatan Pahandut	44.412.800,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Kecamatan Sabangau	100.257.300,00
Satuan Polisi Pamong Praja	990.000,00
Sekretariat Daerah	88.209.500,00
Sekretariat DPRD	798.992.050,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	178.274.100,00
Dinas Perikanan	152.631.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.643.100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.999.244.391,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	418.211.600,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	446.063.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.538.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	610.780.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	222.555.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	793.602.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.309.000,00
Dinas Kesehatan	332.277.500,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	322.625.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	234.600.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	190.619.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.095.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	48.550.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.304.000,00
Dinas Pendidikan	2.188.585.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.036.720.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	106.885.000,00
Dinas Perhubungan	80.970.000,00
Dinas Perikanan	35.965.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	143.358.831,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	274.860.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	179.706.000,00
Dinas Sosial	322.907.500,00
Dinas Tenaga Kerja	76.904.730,00
Inspektorat	132.965.000,00
Kecamatan Bukit Batu	208.655.000,00
Kecamatan Jekan Raya	62.800.000,00
Kecamatan Pahandut	186.923.500,00
Kecamatan Rakumpit	42.550.000,00
Kecamatan Sabangau	205.594.150,00
Satuan Polisi Pamong Praja	129.816.200,00
Sekretariat Daerah	1.469.053.380,00
Sekretariat DPRD	1.255.895.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.010.969.793,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.323.049,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.039.160,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.875.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	48.400.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.685.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3.470.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	20.948.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000,00
Dinas Perhubungan	7.545.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.879.984,00
Dinas Sosial	62.345.000,00
Inspektorat	18.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	23.016.000,00
Kecamatan Jekan Raya	5.000.000,00
Kecamatan Sabangau	800.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.880.000,00
Sekretariat Daerah	1.627.763.600,00
Sekretariat DPRD	34.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	12.500.000,00
Kecamatan Rakumpit	12.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.255.888.700,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.200.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.065.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	348.930.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.000.000,00
Dinas Kesehatan	163.746.100,00
Dinas Lingkungan Hidup	199.355.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	106.935.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	382.800.000,00
Dinas Pendidikan	3.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	81.765.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	50.500.000,00
Dinas Perhubungan	199.942.400,00
Dinas Perikanan	64.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	56.150.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.000.000,00
Inspektorat	6.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	3.000.000,00
Kecamatan Rakumpit	60.375.000,00
Kecamatan Sebangau	9.685.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	427.940.200,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	474.350.000,00
Sekretariat DPRD	474.350.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	80.220.000,00
Dinas Perikanan	43.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	36.720.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	86.650.000,00
Sekretariat Daerah	64.650.000,00
Sekretariat DPRD	22.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	600.940.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.800.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.440.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	67.575.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.600.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.345.000,00
Dinas Pendidikan	67.200.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	96.000.000,00
Inspektorat	40.800.000,00
Kecamatan Sebangau	48.240.000,00
Sekretariat Daerah	118.340.000,00
Sekretariat DPRD	69.600.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.240.560.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.280.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	31.750.000,00
Dinas Kesehatan	33.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	442.904.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	71.615.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.200.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.260.000,00
Dinas Pendidikan	40.150.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	29.250.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	24.630.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	75.931.000,00
Dinas Sosial	74.280.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.020.000,00
Dinas Tenaga Kerja	3.600.000,00
Kecamatan Pahandut	50.660.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	239.850.000,00
Sekretariat Daerah	10.180.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	80.720.000,00
Sekretariat Daerah	15.200.000,00
Sekretariat DPRD	65.520.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.700.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	11.700.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	35.910.000,00
Kecamatan Rakumpit	34.020.000,00
Sekretariat Daerah	1.890.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	454.685.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.770.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	22.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	87.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	18.500.000,00
Dinas Perikanan	7.500.000,00
Dinas Sosial	3.500.000,00
Kecamatan Jekan Raya	7.000.000,00
Sekretariat Daerah	251.915.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.916.053.250,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.230.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.625.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.080.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.300.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	99.762.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	62.067.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	120.380.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.850.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	492.750.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	21.770.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32.875.000,00
Dinas Sosial	64.358.750,00
Kecamatan Jekan Raya	65.250.000,00
Kecamatan Bukit Batu	26.500.000,00
Kecamatan Pahandut	102.632.000,00
Kecamatan Sabangau	32.750.000,00
Sekretariat Daerah	494.682.500,00
Sekretariat DPRD	128.190.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	711.058.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.300.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.800.000,00
Dinas Kesehatan	24.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	223.526.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45.000.000,00
Dinas Pendidikan	66.150.000,00
Dinas Perhubungan	50.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	23.985.000,00
Dinas Sosial	68.952.000,00
Kecamatan Bukit Batu	22.140.000,00
Kecamatan Pahandut	50.000.000,00
Kecamatan Rakumpit	15.000.000,00
Kecamatan Sebangau	25.875.000,00
Sekretariat DPRD	33.930.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	88.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	10.000.000,00
Dinas Perikanan	10.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.285.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.120.000,00
Dinas Kesehatan	168.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.497.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.500.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	15.700.000,00
Dinas Kesehatan	1.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.250.000,00
Dinas Pendidikan	11.450.000,00
Dinas Perhubungan	1.000.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	15.000.000,00
Kecamatan Sabangau	15.000.000,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	50.000.000,00
Kecamatan Sabangau	50.000.000,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	75.000.000,00
Inspektorat	75.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.870.777.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	336.100.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	156.850.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.800.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50.350.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.800.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	442.650.000,00
Dinas Kesehatan	447.830.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	229.250.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	64.800.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	41.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.600.000,00
Dinas Pendidikan	78.300.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	286.300.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	111.150.000,00
Dinas Perhubungan	6.800.000,00
Dinas Perikanan	46.250.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.600.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.900.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	45.400.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Sosial	26.997.500,00
Dinas Tenaga Kerja	5.000.000,00
Inspektorat	66.300.000,00
Kecamatan Jekan Raya	1.800.000,00
Kecamatan Bukit Batu	400.000,00
Kecamatan Pahandut	13.300.000,00
Kecamatan Sabangau	14.950.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	23.250.000,00
Sekretariat Daerah	141.850.000,00
Sekretariat DPRD	1.200.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.918.210.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.500.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.620.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	60.700.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	279.600.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	366.410.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.900.000,00
Dinas Kesehatan	9.450.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	144.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	22.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	93.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.140.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	22.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	323.300.000,00
Dinas Pendidikan	40.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	75.700.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	27.000.000,00
Dinas Perhubungan	31.500.000,00
Dinas Perikanan	18.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	224.100.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	193.400.000,00
Dinas Sosial	27.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja	62.320.000,00
Inspektorat	573.880.000,00
Kecamatan Bukit Batu	18.000.000,00
Kecamatan Rakumpit	45.600.000,00
Kecamatan Sabangau	18.000.000,0
Satuan Polisi Pamong Praja	46.640.000,00
Sekretariat Daerah	135.000.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	273.600.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.600.000,00
Sekretariat Daerah	270.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	271.400.000,00
Kecamatan Bukit Batu	61.400.000,00
Kecamatan Rakumpit	147.000.000,00
Kecamatan Sebangau	63.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Honorarium Rohaniwan	64.950.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.500.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	8.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	400.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	750.000,00
Dinas Perikanan	600.000,00
Kecamatan Bukit Batu	200.000,00
Sekretariat Daerah	45.750.000,00
Sekretariat DPRD	2.750.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	205.980.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.400.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.580.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	33.400.000,00
Dinas Kesehatan	8.400.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	8.400.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23.700.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.500.000,00
Dinas Pendidikan	25.200.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	8.400.000,00
Dinas Perhubungan	25.200.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.400.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.400.000,00
Inspektorat	24.000.000,00
Kecamatan Rakumpit	12.000.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	960.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	960.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.200.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.200.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	439.600.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	439.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	75.000.000,00
Dinas Pendidikan	75.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.236.971.903,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.000,00
Dinas Kesehatan	8.150.551.903,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	55.720.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	87.204.000,00
Dinas Kesehatan	44.744.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	32.660.000,00
Dinas Perikanan	9.800.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	48.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	48.000.000,00
Inspektorat	500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	147.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	135.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.000.000,00
Sekretariat Daerah	3.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.575.299.462,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	103.178.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.100.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	680.052.500,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.338.110.790,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	543.111.995,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	859.701.070,00
Dinas Kesehatan	1.298.421.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	218.592.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	724.355.947,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	388.884.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.239.462.640,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	215.004.000,00
Dinas Pendidikan	854.082.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	242.604.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	487.416.000,00
Dinas Perhubungan	825.562.000,00
Dinas Perikanan	52.992.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	205.758.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	235.290.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.078.323.720,00
Dinas Sosial	53.492.880,00
Dinas Tenaga Kerja	190.716.000,00
Inspektorat	171.396.000,00
Kecamatan Bukit Batu	212.865.000,00
Kecamatan Jekan Raya	271.308.000,00
Kecamatan Pahandut	70.449.000,00
Kecamatan Rakumpit	26.496.000,00
Kecamatan Sabangau	117.645.000,00
Sekretariat Daerah	1.732.462.120,00
Sekretariat DPRD	1.006.467.800,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.357.834.038,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.054.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.420.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	459.301.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	54.696.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77.001.000,00
Dinas Kesehatan	130.805.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	106.950.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	10.540.578.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	301.850.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	281.148.785,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.037.416.500,00
Dinas Pendidikan	251.917.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	43.950.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2.700.000,00
Dinas Perhubungan	2.588.913.500,00
Dinas Perikanan	230.216.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	135.237.500,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	198.294.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	377.405.000,00
Dinas Sosial	185.257.000,00
Inspektorat	177.233.303,00
Kecamatan Pahandut	29.760.000,00
Kecamatan Rakumpit	92.457.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.078.870.950,00
Sekretariat Daerah	762.401.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.453.264.600,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	544.920.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	265.880.000,00
Dinas Kesehatan	53.650.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	221.760.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	340.100.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	140.700.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.630.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.925.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	286.040.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	108.614.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	72.483.000,00
Dinas Sosial	104.100.000,00
Inspektorat	7.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	10.000.000,00
Sekretariat DPRD	1.087.462.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.465.891.445,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.800.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.495.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	133.046.500,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	42.263.075,00
Dinas Kesehatan	380.253.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	300.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	51.889.540,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	331.637.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.032.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	112.078.500,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.244.650.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	21.390.000,00
Dinas Perikanan	5.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	140.670.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	309.959.400,00
Dinas Tenaga Kerja	117.976.000,00
Kecamatan Bukit Batu	102.250.000,00
Kecamatan Jekan Raya	41.538.000,00
Kecamatan Rakumpit	26.640.000,00
Kecamatan Sabangau	20.700.000,00
Sekretariat Daerah	1.108.322.430,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.144.989.054,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.900.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.722.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	60.585.500,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	27.225.750,00
Dinas Kesehatan	265.773.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	125.522.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.630.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	111.786.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	27.900.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	249.221.304,00
Dinas Tenaga Kerja	62.586.000,00
Kecamatan Jekan Raya	26.718.000,00
Kecamatan Sabangau	26.718.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	325.200.000,00
Sekrtariatan	670.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.450.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.450.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	24.840.000,00
Dinas Kesehatan	3.840.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00
Inspektorat	15.000.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	37.550.000,00
Dinas Perikanan	1.550.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	36.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	26.425.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	17.425.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	330.664.550,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.450.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	39.950.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	213.459.550,00
Dinas Perhubungan	10.000.000,00
Dinas Perikanan	7.820.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.985.000,00
Dinas Sosial	10.000.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	685.593.499,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.800.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	74.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	139.750.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.500.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	46.195.500,00
Dinas Pendidikan	48.647.999,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	85.300.000,00
Dinas Sosial	99.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja	74.400.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.794.903.700,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.200.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.015.151.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.114.700,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	76.500.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.200.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	77.020.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.000.000,00
Dinas Kesehatan	40.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	25.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	95.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	825.085.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.912.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	119.574.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.000.000,00
Dinas Pendidikan	110.800.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	163.500.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	211.795.000,00
Dinas Perikanan	41.035.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36.150.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	63.010.000,00
Dinas Sosial	119.810.000,00
Dinas Tenaga Kerja	52.000.000,00
Inspektorat	75.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	31.810.000,00
Kecamatan Jekan Raya	2.450.000,00
Kecamatan Pahandut	53.275.000,00
Kecamatan Rakumpit	20.000.000,00
Kecamatan Sebangau	7.941.100,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat Daerah	850.370.000,00
Sekretariat DPRD	214.200.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	156.000.000,00
Sekretariat Daerah	135.000.000,00
Sekretariat DPRD	21.000.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	125.723.000,00
Dinas Kesehatan	78.723.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00
Dinas Perhubungan	17.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	55.400.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.200.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.200.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.200.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.200.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.200.000,00
Dinas Kesehatan	1.200.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.200.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.200.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.200.000,00
Dinas Perikanan	1.200.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.200.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.200.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.200.000,00
Dinas Sosial	1.200.000,00
Dinas Tenaga Kerja	1.200.000,00
Inspektorat	1.200.000,00
Kecamatan Bukit Batu	6.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	5.400.000,00
Kecamatan Pahandut	8.400.000,00
Kecamatan Sabangau	3.600.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.200.000,00
Sekretariat DPRD	1.200.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	209.756.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	34.900.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	154.856.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.991.334.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	63.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.450.500,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6.312.619.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	281.738.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.280.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.980.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.250.000,00
Dinas Pendidikan	268.200.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	77.790.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	72.300.000,00
Dinas Perhubungan	19.500.000,00
Dinas Perikanan	18.096.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.950.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.000.000,00
Dinas Sosial	3.850.000,00
Dinas Tenaga Kerja	5.000.000,00
Kecamatan Pahandut	18.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	220.830.000,00
Sekretariat Daerah	29.400.000,00
Sekretariat DPRD	5.342.600.000,00
Belanja Tagihan Telepon	464.785.707,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.978.684,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.521.267,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	510.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.033.000,00
Dinas Kesehatan	11.481.995,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6.811.525,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.653.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.117.744,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	198.053.207,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.209.179,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	6.010.084,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	7.645.305,00
Dinas Perhubungan	10.609.910,00
Dinas Perikanan	418.284,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.658.056,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.316.000,00
Dinas Sosial	2.706.100,00
Dinas Tenaga Kerja	6.205.767,00
Inspektorat	423.284,00
Kecamatan Bukit Batu	4.877.407,00
Kecamatan Pahandut	26.465.592,00
Sekretariat Daerah	79.991.661,00
Sekretariat DPRD	3.088.156,00
Belanja Tagihan Air	254.465.770,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	669.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.229.200,00
Dinas Kesehatan	13.048.430,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.122.980,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.217.300,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.212.420,00
Dinas Pendidikan	2.600.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	548.500,00
Dinas Perikanan	1.343.220,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.826.620,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.270.860,00
Dinas Sosial	541.600,00
Kecamatan Bukit Batu	6.297.100,00
Kecamatan Pahandut	2.109.290,00
Sekretariat Daerah	167.614.610,00
Sekretariat DPRD	14.814.540,00
Belanja Tagihan Listrik	26.578.556.169,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	129.739.440,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.585.328,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	101.150.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	231.568.977,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	204.115.752,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	148.694.427,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	151.949.521,00
Dinas Kesehatan	956.162.774,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	125.090.609,00
Dinas Lingkungan Hidup	334.233.167,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	125.694.932,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	172.931.563,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	111.280.246,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.353.877,00
Dinas Pendidikan	207.517.864,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	79.835.930,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	157.442.246,00
Dinas Perhubungan	129.485.039,00
Dinas Perikanan	95.657.485,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86.933.598,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120.014.329,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	21.196.339.453,00
Dinas Sosial	95.215.026,00
Dinas Tenaga Kerja	118.778.209,00
Inspektorat	84.271.436,00
Kecamatan Bukit Batu	32.936.867,00
Kecamatan Jekan Raya	59.781.977,00
Kecamatan Pahandut	87.143.900,00
Kecamatan Rakumpit	3.986.900,00
Kecamatan Sabangau	30.212.962,00
Satuan Polisi Pamong Praja	88.447.983,00
Sekretariat Daerah	541.104.494,00
Sekretariat DPRD	392.899.858,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	594.952.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.340.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.200.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.880.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.640.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	22.396.000,00
Dinas Kesehatan	15.780.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	10.080.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.480.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.680.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.960.000,00
Dinas Pendidikan	15.840.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	10.560.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	14.400.000,00
Dinas Perhubungan	19.080.000,00
Dinas Perikanan	10.080.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.051.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.640.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.080.000,00
Dinas Sosial	10.580.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2.880.000,00
Inspektorat	13.320.000,00
Kecamatan Bukit Batu	13.200.000,00
Kecamatan Jekan Raya	10.320.000,00
Kecamatan Pahandut	21.600.000,00
Kecamatan Rakumpit	10.800.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	38.100.000,00
Sekretariat Daerah	73.200.000,00
Sekretariat DPRD	137.285.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.952.097.698,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.001.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.556.053,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.734.676,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	189.255.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.945.830,00
Dinas Kesehatan	139.121.631,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.154.415.008,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.774.920,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42.828.685,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.142.968,00
Dinas Pendidikan	80.405.827,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	528.599.200,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	18.592.350,00
Dinas Perhubungan	6.036.050,00
Dinas Perikanan	20.167.884,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.868.651,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.961.066,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	43.106.789,00
Dinas Tenaga Kerja	42.200.934,00
Inspektorat	3.717.792,00
Kecamatan Bukit Batu	16.230.492,00
Kecamatan Jekan Raya	26.918.268,00
Kecamatan Pahandut	5.400.000,00
Kecamatan Rakumpit	2.144.061,00
Kecamatan Sabangau	25.453.061,00
Satuan Polisi Pamong Praja	58.177.073,00
Sekretariat Daerah	111.461.844,00
Sekretariat DPRD	73.879.785,00
Belanja Paket/Pengiriman	33.025.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.625.500,00
Dinas Kesehatan	20.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.400.000,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.595.135,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.595.135,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	443.713.648,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.838.400,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.984.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.567.800,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.294.900,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.309.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.101.100,00
Dinas Kesehatan	12.911.900,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	5.651.100,00
Dinas Lingkungan Hidup	22.692.900,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.569.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.702.200,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.200.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.923.100,00
Dinas Pendidikan	10.938.700,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9.554.600,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.610.400,00
Dinas Perhubungan	21.009.000,00
Dinas Perikanan	6.071.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.128.600,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.520.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.317.000,00
Dinas Sosial	8.564.550,00
Dinas Tenaga Kerja	7.557.400,00
Inspektorat	13.145.500,00
Kecamatan Bukit Batu	2.401.500,00
Kecamatan Jekan Raya	8.846.500,00
Kecamatan Pahandut	4.300.600,00
Kecamatan Rakumpit	6.007.100,00
Kecamatan Sabangau	5.373.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja	26.500.000,00
Sekretariat Daerah	101.624.198,00
Sekretariat DPRD	32.497.200,00
Belanja Medical Check Up	277.200.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00
Sekretariat DPRD	257.200.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	29.319.387.000,00
Dinas Kesehatan	29.319.387.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	3.106.714.900,00
Dinas Kesehatan	3.106.714.900,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.172.271.243,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.972.120,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.939.560,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.995.600,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.069.294,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	55.343.200,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	35.623.320,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56.790.800,00
Dinas Kesehatan	122.358.360,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	21.051.672,00
Dinas Lingkungan Hidup	614.760.410,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	33.629.643,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.345.200,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	55.475.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.246.400,00
Dinas Pendidikan	75.505.950,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	21.316.400,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	59.630.340,00
Dinas Perhubungan	95.253.660,00
Dinas Perikanan	16.004.680,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.975.368,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.392.800,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	76.262.400,00
Dinas Sosial	8.021.442,00
Dinas Tenaga Kerja	24.576.474,00
Inspektorat	13.829.250,00
Kecamatan Bukit Batu	11.518.800,00
Kecamatan Jekan Raya	16.262.820,00
Kecamatan Pahandut	6.324.430,00
Kecamatan Rakumpit	7.811.600,00
Kecamatan Sabangau	10.327.200,00
Satuan Polisi Pamong Praja	164.440.800,00
Sekretariat Daerah	242.651.600,00
Sekretariat DPRD	53.564.050,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	420.131.303,85



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	898.325,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92.477.303,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.630.001,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.182.859,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.120.588,85
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.137.395,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.806.152,00
Dinas Kesehatan	18.539.629,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.231.326,00
Dinas Lingkungan Hidup	36.978.598,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.935.024,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.914.992,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.244.820,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.494.625,00
Dinas Pendidikan	39.122.908,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	69.174.556,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	5.796.072,00
Dinas Perhubungan	11.035.488,00
Dinas Perikanan	960.280,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.308.766,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.077.308,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.454.670,00
Dinas Sosial	387.210,00
Dinas Tenaga Kerja	1.198.704,00
Inspektorat	975.768,00
Kecamatan Bukit Batu	621.681,00
Kecamatan Jekan Raya	953.622,00
Kecamatan Pahandut	292.601,00
Kecamatan Sebangau	619.632,00
Satuan Polisi Pamong Praja	12.437.198,00
Sekretariat Daerah	66.233.733,00
Sekretariat DPRD	5.889.469,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	440.690.430,15
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.122.905,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	115.593.457,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.063.983,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.978.579,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.400.745,15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.671.752,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.539.159,00
Dinas Lingkungan Hidup	46.223.240,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.419.630,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.104.217,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.056.029,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.868.290,00
Dinas Pendidikan	37.164.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	47.753.798,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	12.797.760,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	13.794.364,00
Dinas Perikanan	1.200.344,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.635.959,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.700.000,00
Dinas Sosial	580.812,00
Dinas Tenaga Kerja	1.498.284,00
Inspektorat	1.219.707,00
Kecamatan Bukit Batu	951.635,00
Kecamatan Jekan Raya	1.213.695,00
Kecamatan Pahandut	365.761,00
Kecamatan Sebangau	774.540,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.546.488,00
Sekretariat Daerah	82.792.162,00
Sekretariat DPRD	3.659.135,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	106.047.484,00
Dinas Pendidikan	9.922.500,00
Sekretariat DPRD	94.732.646,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.392.338,00
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	9.112.656,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.112.656,00
Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	4.925.760,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.925.760,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	140.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	140.000.000,00
Belanja Sewa Excavator	3.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.500.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	18.900.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	16.500.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	571.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	53.100.000,00
Dinas Pendidikan	518.400.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.645.184.632,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.650.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.400.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	105.600.000,00
Dinas Kesehatan	49.800.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	122.640.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	30.181.632,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	49.600.000,00
Dinas Perikanan	41.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.640.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Sosial	194.700.000,00
Sekretariat Daerah	1.002.573.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	259.640.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.040.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	229.600.000,00
Inspektorat	9.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.750.000,00
Dinas Kesehatan	5.250.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	26.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	17.000.000,00
Dinas Perikanan	7.500.000,00
Kecamatan Rakumpit	2.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	61.009.450,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.320.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.550.000,00
Dinas Kesehatan	6.285.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	13.944.450,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	15.570.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	13.050.000,00
Dinas Perikanan	300.000,00
Dinas Tenaga Kerja	290.000,00
Sekretariat DPRD	1.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	8.300.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.100.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.200.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.630.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.480.000,00
Dinas Perhubungan	39.900.000,00
Sekretariat DPRD	11.250.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	85.150.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	78.650.000,00
Dinas Pendidikan	6.500.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	52.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	52.000.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	169.747.834,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat Daerah	169.747.834,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	35.435.000,00
Dinas Kesehatan	13.950.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	700.000,00
Dinas Pendidikan	4.000.000,00
Dinas Perikanan	9.605.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.980.000,00
Sekretariat Daerah	5.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.668.721.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.440.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	20.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
Dinas Kesehatan	1.157.731.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	40.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	40.000.000,00
Dinas Pendidikan	33.550.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	180.000.000,00
Dinas Perikanan	8.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja	30.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	20.000.000,00
Kecamatan Sabangau	20.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	14.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.380.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.380.000,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	50.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	50.000.000,00
Belanja Sewa Taman	14.500.000,00
Sekretariat Daerah	14.000.000,00
Kecamatan Sabangau	500.000,00
Belanja Sewa Hotel	24.217.700,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.580.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	637.500,00
Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	12.500.000,00
Dinas Kesehatan	12.500.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	130.125.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.100.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	30.100.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	6.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	7.500.000,00
Kecamatan Bukit Batu	4.500.000,00
Kecamatan Pahandut	6.200.000,00
Sekretariat Daerah	56.225.000,00
Sekretariat DPRD	3.000.000,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.800.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	8.800.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	553.690.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	152.169.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.768.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	34.753.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	623.330.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	623.330.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	680.922.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	680.922.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	10.494.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.494.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	79.183.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	79.183.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	998.936.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	974.965.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	23.971.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	79.700.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	79.700.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	377.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	377.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	99.499.734,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99.499.734,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	75.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	75.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	70.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	196.055.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	196.055.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	492.632.350,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.825.000,00
Dinas Kesehatan	56.260.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	49.939.150,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	3.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.400.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	7.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	103.395.000,00
Kecamatan Jekan Raya	108.913.200,00
Kecamatan Sabangau	28.000.000,00
Belanja Sosialisasi	59.177.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	59.177.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	4.176.062.839,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95.680.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.124.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	166.133.550,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	69.279.150,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	90.554.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.925.000,00
Dinas Kesehatan	7.520.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	46.979.150,00
Dinas Lingkungan Hidup	123.200.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	41.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.603.900,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.200.000,00
Dinas Pendidikan	1.180.047.203,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	32.560.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	5.500.000,00
Dinas Perhubungan	75.715.225,00
Dinas Perikanan	59.031.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja	6.180.000,00
Inspektorat	751.624.111,00
Kecamatan Pahandut	17.700.000,00
Kecamatan Rakumpit	12.718.725,00
Kecamatan Sabangau	25.218.725,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.980.000,00
Sekretariat Daerah	348.649.950,00
Sekretariat DPRD	787.439.150,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	896.990.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	856.990.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	40.000.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	104.583.188,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	104.583.188,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	184.555.346,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	184.555.346,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	24.750.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.750.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.100.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12.100.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	351.287.330,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	351.287.330,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.820.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.820.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.104.037,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.104.037,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.430.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.430.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.162.066,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	50.162.066,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	309.940.792,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	309.940.792,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	273.705.375,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	273.705.375,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	34.435.360,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.435.360,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	329.648.139,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	329.648.139,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	31.264.414,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.264.414,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	25.238.894,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.238.894,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	29.818.018,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.818.018,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	27.626.000,00
Sekretariat Daerah	27.626.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	26.825.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	600.000,00
Dinas Kesehatan	10.000.000,00
Sekretariat DPRD	16.225.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	194.850.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.850.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	160.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.118.863.423,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125.648.951,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.990.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	249.938.958,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	160.445.094,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	253.250.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	175.683.400,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.148.000,00
Dinas Kesehatan	47.999.975,00
Dinas Lingkungan Hidup	287.940.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	217.532.939,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	201.431.870,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	74.329.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.994.965,00
Dinas Pendidikan	359.494.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	110.400.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	216.434.150,00
Dinas Perhubungan	255.376.132,00
Dinas Perikanan	179.178.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.155.403,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	181.058.925,00
Dinas Sosial	162.598.500,00
Dinas Tenaga Kerja	74.619.500,00
Inspektorat	324.661.535,00
Kecamatan Bukit Batu	71.970.670,00
Kecamatan Jekan Raya	35.709.500,00
Kecamatan Pahandut	35.585.000,00
Kecamatan Rakumpit	71.396.000,00
Kecamatan Sabangau	34.844.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja	467.510.000,00
Sekretariat Daerah	1.225.961.451,00
Sekretariat DPRD	222.577.105,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	948.031.541,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.358.673,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.582.700,00
Dinas Kesehatan	67.497.005,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	56.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	52.950.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	473.319.237,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	239.323.926,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	509.074.826,00
Dinas Lingkungan Hidup	154.900.000,00
Dinas Perhubungan	242.970.826,00
Satuan Polisi Pamong Praja	74.220.000,00
Sekretariat Daerah	36.984.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.118.560.152,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.429.218,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.315.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.350.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	91.435.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.895.649,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	43.095.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.182.600,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	12.275.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.200.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	37.141.950,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.144.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.031.000,00
Dinas Pendidikan	62.198.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	12.450.000,00
Dinas Perhubungan	41.257.935,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.147.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	46.551.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.897.500,00
Dinas Sosial	14.689.000,00
Dinas Tenaga Kerja	29.032.300,00
Inspektorat	29.050.000,00
Kecamatan Bukit Batu	61.606.000,00
Kecamatan Jekan Raya	9.788.300,00
Kecamatan Pahandut	8.300.000,00
Kecamatan Rakumpit	26.212.500,00
Kecamatan Sabangau	56.382.300,00
Satuan Polisi Pamong Praja	66.398.800,00
Sekretariat Daerah	211.650.000,00
Sekretariat DPRD	15.454.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	65.210.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.610.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat Daerah	9.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	133.247.232,00
Dinas Kesehatan	65.037.580,00
Dinas Perhubungan	19.491.052,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48.718.600,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	33.967.800,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	3.998.000,00
Kecamatan Sabangau	19.969.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	20.171.000,00
Kecamatan Rakumpit	20.171.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	30.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	30.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	177.233.700,00
Dinas Perhubungan	177.233.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.694.562.600,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.658.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.984.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.240.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.500.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	277.310.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	46.666.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66.640.000,00
Dinas Kesehatan	79.796.400,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	46.295.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	104.645.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	31.935.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.200.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	44.635.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.032.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	53.250.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	33.660.000,00
Dinas Perhubungan	12.200.000,00
Dinas Perikanan	29.840.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.187.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	255.472.500,00
Dinas Sosial	77.277.000,00
Dinas Tenaga Kerja	7.830.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Inspektorat	29.600.000,00
Kecamatan Jekan Raya	5.480.000,00
Kecamatan Pahandut	42.510.000,00
Kecamatan Sabangau	6.710.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	72.732.500,00
Sekretariat Daerah	69.377.000,00
Sekretariat DPRD	103.499.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	53.700.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14.750.000,00
Sekretariat Daerah	9.950.000,00
Sekretariat DPRD	29.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	360.166.200,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.400.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	35.500.000,00
Dinas Kesehatan	43.601.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.100.000,00
Dinas Pendidikan	140.300.000,00
Dinas Tenaga Kerja	6.100.000,00
Kecamatan Bukit Batu	5.200.000,00
Sekretariat Daerah	39.950.000,00
Sekretariat DPRD	51.015.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	200.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	59.047.032,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.047.032,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	31.300.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	31.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	245.913.630,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	30.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	215.913.630,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	426.926.959,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.685.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.265.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.690.000,00
Dinas Kesehatan	32.459.959,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.680.000,00
Dinas Pendidikan	177.600.000,00
Dinas Perhubungan	20.440.000,00
Kecamatan Bukit Batu	10.130.000,00
Kecamatan Jekan Raya	5.475.000,00
Kecamatan Rakumpit	4.343.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Kecamatan Sabangau	15.379.000,00
Sekretariat Daerah	50.010.000,00
Sekretariat DPRD	34.770.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	102.350.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29.230.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.380.000,00
Dinas Kesehatan	12.900.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.225.000,00
Dinas Perhubungan	8.970.000,00
Kecamatan Bukit Batu	9.530.000,00
Kecamatan Jekan Raya	690.000,00
Kecamatan Rakumpit	1.900.000,00
Sekretariat DPRD	20.525.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	47.600.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.850.000,00
Dinas Kesehatan	9.540.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	13.800.000,00
Kecamatan Jekan Raya	3.450.000,00
Sekretariat Daerah	17.960.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	224.886.341,00
Dinas Perhubungan	224.886.341,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	20.300.000,00
Dinas Perhubungan	20.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.403.189.535,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	234.125.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.805.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	179.942.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84.980.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	199.894.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	229.539.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	298.479.626,00
Dinas Kesehatan	332.658.837,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	37.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.240.970.848,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.927.242,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.890.000,00
Dinas Pendidikan	63.383.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	84.944.000,00
Dinas Perhubungan	18.735.600,00
Dinas Perikanan	6.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	41.265.400,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	856.052.325,00
Dinas Sosial	77.958.300,00
Dinas Tenaga Kerja	40.197.375,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Kecamatan Bukit Batu	84.321.500,00
Kecamatan Sabangau	14.880.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	99.819.000,00
Sekretariat Daerah	1.993.021.482,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	29.880.250,00
Dinas Kesehatan	29.880.250,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	69.500.000,00
Kecamatan Jekan Raya	29.500.000,00
Kecamatan Rakumpit	40.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	199.684.471,00
Dinas Pendidikan	199.684.471,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	9.541.600,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.541.600,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	19.989.280,00
Dinas Perhubungan	19.989.280,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	19.200.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	68.836.625,00
Dinas Perhubungan	43.901.625,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.935.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	24.600.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	19.375.000,00
Kecamatan Bukit Batu	19.375.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	85.320.000,00
Kecamatan Sabangau	85.320.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	52.000.000,00
Kecamatan Sabangau	52.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	470.343.185,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	333.193.185,00
Kecamatan Sabangau	137.150.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	1.296.809.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.296.809.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	100.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	100.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	873.252.580,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	485.706.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	337.546.580,00
Kecamatan Jekan Raya	50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	398.900.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	346.928.300,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	119.150.000,00
Dinas Kesehatan	168.278.300,00
Sekretariat Daerah	59.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	109.350.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.850.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	114.861.100,00
Dinas Lingkungan Hidup	114.861.100,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	324.588.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94.500.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	24.900.000,00
Dinas Perhubungan	96.688.500,00
Inspektorat	10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.753.720.574,25
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.212.901.352,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.109.100.751,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	461.403.855,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.794.958.438,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.786.291.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.779.660.909,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	689.331.680,00
Dinas Kesehatan	1.458.669.413,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.428.431.242,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.382.952.395,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.590.780.587,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.952.593.355,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	501.685.895,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	582.150.976,00
Dinas Pendidikan	1.968.708.858,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.398.784.592,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	801.506.230,00
Dinas Perhubungan	829.391.184,00
Dinas Perikanan	342.966.146,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	395.108.365,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.227.583.972,25
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.402.184.997,00
Dinas Sosial	643.571.840,00
Dinas Tenaga Kerja	483.201.027,00
Inspektorat	2.295.687.747,00
Kecamatan Bukit Batu	178.083.180,00
Kecamatan Jekan Raya	119.484.730,00
Kecamatan Pahandut	64.656.921,00
Kecamatan Rakumpit	53.887.420,00
Kecamatan Sabangau	184.268.471,00
Satuan Polisi Pamong Praja	607.533.420,00
Sekretariat Daerah	7.492.993.230,00
Sekretariat DPRD	17.533.205.706,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.710.727.020,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.800.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	260.020.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	713.180.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	309.080.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	757.605.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	76.170.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	203.860.000,00
Dinas Kesehatan	2.262.672.320,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	241.130.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	616.960.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	407.812.420,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	787.980.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	633.998.880,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.840.000,00
Dinas Pendidikan	2.457.140.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	779.320.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	367.715.000,00
Dinas Perhubungan	1.238.765.000,00
Dinas Perikanan	209.845.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164.810.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	798.696.400,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	581.200.000,00
Dinas Sosial	367.390.000,00
Dinas Tenaga Kerja	133.260.000,00
Inspektorat	926.250.000,00
Kecamatan Bukit Batu	126.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	165.900.000,00
Kecamatan Pahandut	253.200.000,00
Kecamatan Rakumpit	256.980.000,00
Kecamatan Sabangau	81.800.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.030.380.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat Daerah	389.187.000,00
Sekretariat DPRD	83.780.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.749.434.896,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	935.087.520,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.270.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.968.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	396.497.800,00
Dinas Kesehatan	112.860.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	60.297.080,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.400.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	850.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.241.300.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	111.740.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.000.000,00
Dinas Sosial	154.634.746,00
Dinas Tenaga Kerja	39.480.000,00
Inspektorat	503.760.000,00
Kecamatan Jekan Raya	34.500.000,00
Sekretariat Daerah	85.789.750,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	392.869.710,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	159.450.790,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	233.418.920,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa€Luar Negeri	553.974.519,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	133.430.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	146.623.280,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.835.839,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	97.210.000,00
Sekretariat Daerah	31.875.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	898.900.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.750.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	5.250.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	84.900.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	280.100.000,00
Dinas Pendidikan	375.250.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	130.650.000,00
Dinas Perikanan	7.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	4.500.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	197.650.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00
Dinas Pendidikan	177.650.000,00
Belanja Beasiswa	1.504.935.000,00
Dinas Pendidikan	1.060.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	444.935.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	70.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	70.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.172.964.903,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	600.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	205.800.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	234.750.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	785.651.370,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.479.282.375,00
Dinas Kesehatan	163.214.290,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	78.361.157,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	205.700.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000.000,00
Dinas Pendidikan	204.800.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	720.610.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	38.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	290.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.091.850.000,00
Dinas Tenaga Kerja	102.700.000,00
Kecamatan Rakumpit	8.000.000,00
Kecamatan Sabangau	24.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00
Sekretariat Daerah	1.467.145.711,00
Sekretariat DPRD	1.854.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.894.883.134,84
Dinas Perikanan	221.502.409,84
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	225.480.725,00
Dinas Sosial	407.460.000,00
Kecamatan Bukit Batu	406.730.000,00
Kecamatan Jekan Raya	1.680.810.000,00
Kecamatan Pahandut	1.459.440.000,00
Kecamatan Rakumpit	197.760.000,00
Kecamatan Sabangau	503.520.000,00
Sekretariat Daerah	5.792.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	27.017.727.127,00
Dinas Pendidikan	27.017.727.127,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.939.071.498,00
Dinas Kesehatan	6.939.071.498,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.456.170.550,10
Dinas Kesehatan	22.456.170.550,10



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Barang dan Jasa	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	878.301.295,89
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	878.301.295,89
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	1.651.153.263,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.651.153.263,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.809.792.600,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.900.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	5.510.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	749.792.600,00
Sekretariat Daerah	650.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.459.291.753,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	515.395.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	10.020.000.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	75.000.000,00
Dinas Pendidikan	1.736.280.000,00
Sekretariat Daerah	12.112.616.253,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.564.862.160,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.364.862.160,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00
Dinas Sosial	150.000.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.664.126.666,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.664.126.666,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.076.034.000,00
Dinas Kesehatan	292.634.000,00
Dinas Sosial	783.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	329.500.000,00
Dinas Sosial	329.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
Dinas Sosial	100.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	90.000.000,00
Dinas Sosial	90.000.000,00
Jumlah	475.404.126.994,33



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lampiran 3. Belanja Modal per sub rincian objek per SKPD TA 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.620.818.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.620.818.000,00
Belanja Modal Excavator	2.694.500.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.276.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.418.000.000,00
Belanja Modal Pompa	187.852.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.600.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.050.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.400.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.700.000,00
Kecamatan Jekan Raya	702.000,00
Kecamatan Sebangau	16.800.000,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.860.220.000,00
Dinas Kesehatan	49.420.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	555.300.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	783.500.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	185.000.000,00
Kecamatan Sebangau	287.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	546.700.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	262.100.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	284.600.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	720.000.000,00
Kecamatan Pahandut	720.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.241.605.000,00
Dinas Kesehatan	333.340.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.350.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.850.000,00
Dinas Pendidikan	77.120.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	84.600.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77.136.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	140.820.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41.990.000,00
Kecamatan Jekan Raya	56.400.000,00
Kecamatan Pahandut	60.600.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	246.399.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.422.750.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574.750.000,00
Dinas Kesehatan	1.848.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	480.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat Daerah	480.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	950.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	950.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	57.300.000,00
Dinas Pendidikan	19.200.000,00
Kecamatan Bukit Batu	18.900.000,00
Kecamatan Sebangau	19.200.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	37.800.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.800.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	5.350.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.350.000,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	687.200,00
Dinas Perhubungan	324.000,00
Kecamatan Jekan Raya	363.200,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	46.545.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.140.000,00
Inspektorat	20.205.000,00
Kecamatan Bukit Batu	7.200.000,00
Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	699.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	699.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	11.800.000,00
Inspektorat	11.800.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	23.800.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.800.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.360.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.800.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.560.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	864.000,00
Dinas Perhubungan	864.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	764.906.600,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.140.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.900.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.900.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30.000.000,00
Dinas Kesehatan	6.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	19.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	8.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	24.829.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.970.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	192.544.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan	52.200.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	3.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	48.736.000,00
Dinas Perhubungan	30.444.600,00
Dinas Perikanan	8.900.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	71.565.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.380.000,00
Dinas Sosial	27.060.000,00
Inspektorat	61.470.000,00
Kecamatan Jekan Raya	4.968.000,00
Kecamatan Pahandut	23.300.000,00
Kecamatan Sebangau	11.450.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	16.200.000,00
Sekretariat DPRD	5.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.729.919.485,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.750.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.750.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	130.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.725.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	157.850.000,00
Dinas Kesehatan	1.305.028.150,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	24.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	147.650.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	80.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	232.788.835,00
Dinas Pendidikan	244.610.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	94.980.000,00
Dinas Perhubungan	14.426.000,00
Dinas Perikanan	7.780.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.250.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.420.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.906.500,00
Dinas Tenaga Kerja	10.400.000,00
Inspektorat	67.250.000,00
Kecamatan Bukit Batu	30.015.000,00
Kecamatan Jekan Raya	16.500.000,00
Kecamatan Pahandut	10.500.000,00
Kecamatan Rakumpit	11.800.000,00
Kecamatan Sebangau	10.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.040.000,00
Sekretariat DPRD	57.250.000,00
Belanja Modal Mebel	6.130.727.600,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.900.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.980.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.830.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	46.950.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.500.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.500.000,00
Dinas Kesehatan	276.940.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	27.920.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	126.845.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	124.295.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.130.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	952.682.600,00
Dinas Pendidikan	3.203.533.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	202.100.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	63.173.000,00
Dinas Perhubungan	71.345.400,00
Dinas Perikanan	22.115.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	106.295.000,00
Dinas Tenaga Kerja	36.862.500,00
Inspektorat	122.860.000,00
Kecamatan Bukit Batu	3.600.000,00
Kecamatan Pahandut	72.620.000,00
Kecamatan Rakumpit	34.400.000,00
Kecamatan Sabangau	52.900.300,00
Satuan Polisi Pamong Praja	66.500.000,00
Sekretariat Daerah	99.200.000,00
Sekretariat DPRD	143.750.000,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.143.500,00
Dinas Pendidikan	373.500,00
Dinas Tenaga Kerja	770.000,00
Belanja Modal Alat Pembersih	34.952.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.322.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.680.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	4.680.000,00
Dinas Tenaga Kerja	7.120.000,00
Inspektorat	3.250.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	2.326.291.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.385.876,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.300.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.700.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00
Dinas Kesehatan	176.265.224,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	18.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	65.650.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	79.289.800,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	15.229.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	822.500.000,00
Dinas Pendidikan	44.548.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	85.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	14.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan	64.560.000,00
Dinas Perikanan	24.630.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.500.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.500.000,00
Dinas Sosial	6.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja	35.120.000,00
Inspektorat	255.460.000,00
Kecamatan Bukit Batu	12.600.000,00
Kecamatan Jekan Raya	4.078.000,00
Kecamatan Rakumpit	25.200.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	46.550.000,00
Sekretariat Daerah	266.225.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	17.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.500.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.750.461.760,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.275.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.412.600,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.860.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.300.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	11.075.000,00
Dinas Kesehatan	25.730.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	59.640.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	500.305.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	23.540.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.590.000,00
Dinas Pendidikan	35.600.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	175.520.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	9.396.000,00
Dinas Perhubungan	225.842.350,00
Dinas Perikanan	22.399.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21.919.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.750.000,00
Dinas Tenaga Kerja	11.000.000,00
Inspektorat	230.380.000,00
Kecamatan Bukit Batu	10.750.000,00
Kecamatan Jekan Raya	3.720.000,00
Kecamatan Pahandut	4.400.000,00
Kecamatan Sebangau	25.920.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	31.650.000,00
Sekretariat Daerah	567.995.510,00
Sekretariat DPRD	1.537.491.800,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	8.022.000,00
Dinas Kesehatan	1.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	798.000,00
Dinas Pendidikan	3.432.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	900.000,00
Kecamatan Sebangau	1.392.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	78.180.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.080.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.600.000,00
Dinas Kesehatan	13.200.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.700.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	3.500.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	9.500.000,00
Inspektorat	9.600.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	210.665.000,00
Dinas Kesehatan	15.680.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.215.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.900.000,00
Dinas Pendidikan	12.900.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	17.200.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	10.780.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.907.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	103.853.000,00
Inspektorat	6.680.000,00
Kecamatan Bukit Batu	3.300.000,00
Kecamatan Jekan Raya	2.850.000,00
Kecamatan Pahandut	3.300.000,00
Kecamatan Rakumpit	14.100.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.857.708.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.350.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	9.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	69.600.000,00
Dinas Pendidikan	28.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	94.600.000,00
Dinas Perikanan	10.900.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	141.258.000,00
Inspektorat	132.000.000,00
Sekretariat Daerah	2.347.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	369.593.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.300.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	24.400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	83.000.000,00
Dinas Pendidikan	187.750.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	798.000,00
Dinas Perhubungan	4.495.000,00
Dinas Sosial	24.500.000,00
Inspektorat	8.500.000,00
Kecamatan Jekan Raya	19.300.000,00
Sekretariat DPRD	8.550.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	502.719.470,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	54.575.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	88.368.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	19.990.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	14.822.400,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39.224.070,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.450.000,00
Dinas Pendidikan	74.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	29.500.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	4.200.000,00
Dinas Perhubungan	11.300.000,00
Dinas Perikanan	14.970.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	103.700.000,00
Inspektorat	14.820.000,00
Sekretariat DPRD	14.800.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	19.000.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	19.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	8.990.000,00
Sekretariat DPRD	8.990.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	99.260.000,00
Dinas Kesehatan	86.260.000,00
Dinas Sosial	13.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	566.000.000,00
Dinas Kesehatan	566.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	587.900.000,00
Dinas Kesehatan	518.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	69.900.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.760.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3.760.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	7.490.000,00
Dinas Kesehatan	7.490.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.250.664.554,00
Dinas Kesehatan	1.250.664.554,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	960.000,00
Dinas Kesehatan	960.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	504.300.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	504.300.000,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	202.840.000,00
Dinas Pendidikan	202.840.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	39.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	39.750.000,00
Belanja Modal Personal Computer	7.190.052.850,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60.740.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	127.788.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	405.000.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	144.125.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	139.610.000,00
Dinas Kesehatan	607.470.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	478.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	347.050.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	162.464.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	371.105.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42.496.350,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	768.520.000,00
Dinas Pendidikan	1.424.243.900,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	210.850.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	151.218.800,00
Dinas Perhubungan	69.950.000,00
Dinas Perikanan	11.300.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.660.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	400.280.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	264.000.000,00
Dinas Sosial	108.000.000,00
Inspektorat	101.080.000,00
Kecamatan Bukit Batu	78.600.000,00
Kecamatan Jekan Raya	95.951.400,00
Kecamatan Pahandut	116.550.000,00
Kecamatan Rakumpit	193.100.000,00
Kecamatan Sabangau	104.200.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	16.750.000,00
Sekretariat DPRD	86.200.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	748.739.500,00
Dinas Kesehatan	149.999.500,00
Sekretariat Daerah	598.740.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.612.161.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.100.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.849.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.060.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.900.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	114.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	81.677.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.800.000,00
Dinas Kesehatan	169.965.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	50.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	87.125.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	65.566.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	187.847.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.894.100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63.600.000,00
Dinas Pendidikan	787.516.400,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	54.670.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	159.890.000,00
Dinas Perhubungan	32.550.000,00
Dinas Perikanan	28.155.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	62.103.200,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	113.300.000,00
Dinas Sosial	65.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja	25.035.000,00
Inspektorat	31.900.000,00
Kecamatan Bukit Batu	14.031.000,00
Kecamatan Jekan Raya	39.731.200,00
Kecamatan Pahandut	31.955.000,00
Kecamatan Rakumpit	44.200.000,00
Kecamatan Sabangau	30.590.000,00
Sekretariat DPRD	90.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	130.587.600,00
Dinas Kesehatan	1.230.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	78.550.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.570.000,00
Dinas Pendidikan	46.960.000,00
Dinas Sosial	2.277.600,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	73.100.000,00
Dinas Kesehatan	5.400.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	14.250.000,00
Dinas Pendidikan	30.950.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	22.500.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	40.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.000.000,00
Belanja Modal Topi Kerja	8.645.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.200.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.445.000,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	30.870.000,00
Dinas Kesehatan	6.180.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.540.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	6.150.000,00
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	13.142.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.710.000,00
Kecamatan Sebangau	9.432.000,00
Belanja Modal Rambu Bersuar	1.323.144.500,00
Dinas Perhubungan	1.323.144.500,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	171.607.600,00
Dinas Perhubungan	171.607.600,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	49.782.400,00
Dinas Pendidikan	49.782.400,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	12.352.600,00
Inspektorat	8.675.000,00
Kecamatan Bukit Batu	2.780.000,00
Kecamatan Jekan Raya	897.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.004.684.890,00
Dinas Kesehatan	3.004.684.890,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	29.703.638.467,97
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	449.325.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	224.526.400,00
Dinas Kesehatan	1.867.240.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	275.971.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	795.500.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	857.909.870,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.761.278.220,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	690.436.200,00
Dinas Pendidikan	4.090.164.804,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	131.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	836.919.840,97
Dinas Perhubungan	169.174.100,00
Dinas Perikanan	694.025.125,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	198.960.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	94.355.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	443.308.500,00
Dinas Sosial	1.922.000.000,00
Inspektorat	2.490.872.090,00
Kecamatan Bukit Batu	149.831.600,00
Kecamatan Jekan Raya	596.360.850,00
Kecamatan Pahandut	423.897.960,00
Kecamatan Rakumpit	567.600.000,00
Kecamatan Sebangau	495.700.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	493.020.908,00
Sekretariat DPRD	3.984.261.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	106.270.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.270.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	20.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.400.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	8.549.426.396,99
Dinas Pendidikan	149.600.340,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.330.326.056,99



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Sekretariat DPRD	69.500.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.881.118.865,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	674.458.340,00
Dinas Pendidikan	4.033.993.525,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	172.667.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	52.060.113.877,00
Dinas Pendidikan	52.060.113.877,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	861.934.900,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	834.639.100,00
Kecamatan Sebangau	27.295.800,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	70.000.000,00
Kecamatan Sebangau	70.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	343.996.506,54
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	343.996.506,54
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	168.243.072,82
Dinas Perikanan	119.348.072,82
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48.895.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.452.786.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.170.560.000,00
Dinas Tenaga Kerja	59.926.000,00
Kecamatan Sebangau	102.300.000,00
Kecamatan Jekan Raya	120.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	345.834.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	94.800.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	13.500.000,00
Inspektorat	79.864.500,00
Kecamatan Bukit Batu	102.870.000,00
Kecamatan Rakumpit	54.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	976.275.060,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.560.700,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	111.690.260,00
Dinas Perhubungan	148.774.100,00
Dinas Sosial	449.250.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	67.000.000,00
Belanja Modal Taman	1.154.850.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	132.450.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	797.600.000,00
Dinas Sosial	224.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	79.400.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.000.000,00
Dinas Kesehatan	60.400.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	161.799.600,00
Kecamatan Bukit Batu	161.799.600,00
Belanja Modal Tugu	376.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	376.000.000,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	10.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	76.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.500.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.500.000,00
Belanja Modal Pagar	4.276.497.705,00
Dinas Pendidikan	4.096.528.905,00
Kecamatan Bukit Batu	179.968.800,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	15.894.874.300,00
Dinas Kesehatan	15.894.874.300,00
Belanja Modal Jalan Kota	115.180.174.645,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.121.993.496,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40.058.181.149,00
Belanja Modal Jalan Desa	2.121.010.000,00
Kecamatan Bukit Batu	925.210.000,00
Kecamatan Rakumpit	1.195.800.000,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	138.510.260,16
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	138.510.260,16
Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kota	2.148.746.339,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.148.746.339,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	114.040.000,00
Kecamatan Bukit Batu	74.040.000,00
Kecamatan Sebangau	40.000.000,00
Belanja Modal Jembatan Lainnya	183.241.550,00
Kecamatan Bukit Batu	49.934.550,00
Kecamatan Pahandut	133.307.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	288.990.069,31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89.647.300,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	199.342.769,31
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	397.000.000,00
Kecamatan Rakumpit	397.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Belanja Modal	Nilai Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	25.179.984.600,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.875.884.600,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.095.100.000,00
Kecamatan Jekan Raya	118.000.000,00
Kecamatan Sebangau	91.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.469.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.469.300.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	15.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	15.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.441.227.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.100.700.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	340.527.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	2.671.031.203,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.600.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.347.431.203,00
Belanja Modal Air Minum Lainnya	677.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	677.750.000,00
Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.999.494.273,66
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.999.494.273,66
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	26.684.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.684.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	537.670.072,00
Dinas Kesehatan	537.670.072,00
Belanja Modal Alat Musik	213.995.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.995.000,00
Inspektorat	142.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	24.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	24.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	14.000.000,00
Dinas Pendidikan	14.000.000,00
Belanja Modal Barang Kerajinan	12.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	12.900.000,00
Dinas Pendidikan	12.900.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	138.500.000,00
Dinas Pendidikan	138.500.000,00
Jumlah	327.997.382.474,45



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lampiran 4. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2024

No.	Uraian Piutang Retribusi Kebersihan Pasar	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Radiane	22.725.000,00	22.725.000,00	0,00
2.	H. Harun Effendi (Alm)	9.338.000,00	9.338.000,00	0,00
3.	M. Yani (Alm)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
4.	H. Muchran	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.	Amaliya Viya Kartika/ PT. Astra Sedaya Finance	960.000,00	960.000,00	0,00
6.	Praditya Chandra K./ CV. Perdana Cipta Vhernanda	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
7.	Jaya Kontesa/ PT. Putra Auto Kencana	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00
8.	Raden Yulius Winata, S.H./ Pangkalan LPG Hayatullah	960.000,00	960.000,00	0,00
9.	Andhi Karyadi, S.H./ CV. Siring Lingga Surya	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
10.	Wawan Ruswanda/ CV. Adi Cipta	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
11.	Enny Triastuti/ CV. Lestari Jaya	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
12.	Bambang Sugeng Riadi/ PT. Bella Ekspedisi	960.000,00	960.000,00	0,00
13.	Agus Ferdian Susanto/ Apotek Madina Farma I	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
14.	Emma Estheana/ CV. Petra Construction	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
15.	Endra/ CV. Taruna Utama	960.000,00	960.000,00	0,00
16.	Benny Tanujaya/ Global Express Penginapan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
17.	Nanda Taufik Cagara/ PT. CIMB Niaga Auto Finance	960.000,00	960.000,00	0,00
18.	Pebri Agung/ CV. Penyang Perkasa	960.000,00	960.000,00	0,00
19.	Agus Suryanto/ CV. Indo Rhama	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
20.	Yessaya Silo, S.T./ CV. Betang Harati Education	960.000,00	960.000,00	0,00
21.	Daniel Agus Exwan Susilo/ PT. Eltec Digital Indonesia	960.000,00	960.000,00	0,00
22.	Marsono/ CV. Haris Atatama	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00
23.	Amelia Genial/ CV. Kafetaria Borneo	960.000,00	960.000,00	0,00
24.	Heru Kurniawan/ PT. Rizki Alam Borneo	960.000,00	960.000,00	0,00
25.	Eka Saputra/ CV. Berkas Kajuei Jaya	900.000,00	900.000,00	0,00
26.	Sujaka Lays/ PT. Andalan Usaha Jaya S.	960.000,00	960.000,00	0,00
27.	Purno Imam Tauchid/ PT. Cahaya Hidayah Makmur	960.000,00	960.000,00	0,00
28.	Johnnie Syam/ PT. Pendekar Bodoh (D'Cost)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
29.	Somitro Total Oswald Akar/ CV. Delta Utama Elektrik	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00
30.	Aulia Rahman/ CV. Mitra Jaya Bersama	960.000,00	960.000,00	0,00
31.	Soetajo/ CV. Laksamana Muda Niaga	2.188.000,00	2.188.000,00	0,00
32.	Bayu Setiawan/ CV. Setya Mandiri	960.000,00	960.000,00	0,00
33.	Richard/ CV. Koinonia	3.321.600,00	3.321.600,00	0,00
34.	Yuli Alpa Marentina/ PT. Famili Persada Energi	960.000,00	960.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian Piutang Retribusi Kebersihan Pasar	Saldo Piutang Tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
35.	Merang Hugo Siram/ CV. Kalingga Graha Tama Persada	960.000,00	960.000,00	0,00
36.	Asrani/ Toko Makmur Jaya Bersaudara	1.465.600,00	1.465.600,00	0,00
37.	Ibranus Manjin, S.E./ CV. Karya Bersama	998.400,00	998.400,00	0,00
38.	Hj. Arie Purnamawati/ PT. Yani Mega Power	2.131.200,00	2.131.200,00	0,00
39.	Rogas Usup, S.T./ PT. Tingang Inter Nusa	3.244.800,00	3.244.800,00	0,00
40.	Suryanto Martinus/ Pangkalan Surya Mandiri	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00
41.	Albert Oktaviano Toeweh/ CV. Darna Nusantara	968.000,00	968.000,00	0,00
42.	Anjungs Theophilus Lui Suan/ CV. Anton Bersaudara	1.940.800,00	1.940.800,00	0,00
43.	Ernawati/ Toko Cahaya Sablon I	600.000,00	600.000,00	0,00
Jumlah		166.732.600,00	166.732.600,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lampiran 5. Saldo Awal dan Mutasi Tambah Aset Tetap per SKPD per 31 Desember 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
Dinas Pendidikan	Aset Tetap	516.484.449.990,80						
	Tanah	68.368.306.082,00						-
	Peralatan dan Mesin	82.637.261.279,10	6.526.059.200,00	2.855.455.024,00			713.963.876,51	10.095.478.100,51
	Gedung dan Bangunan	353.409.851.522,79	64.430.401.451,00				1.530.665.670,00	65.961.067.121,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	559.036.772,00		7.200.000,00				7.200.000,00
	Aset Tetap Lainnya	9.837.539.927,41	26.900.000,00	4.659.266,00				31.559.266,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.672.454.407,50				197.900.000,00	6.657.871.379,00	6.855.771.379,00
	Aset Lainnya	40.023.867.831,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	39.802.613.451,00						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
Dinas Kesehatan	Aset Tidak Berwujud	221.254.380,00	138.500.000,00					-
	Aset Tetap	350.274.244.670,74						
	Tanah	13.271.351.500,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	176.535.632.418,90	10.425.407.318,00		1.287.334.000,00		694.450.000,00	12.407.191.318,00
	Gedung dan Bangunan	151.220.306.865,84	17.822.514.300,00	741.062.140,10			827.866.500,00	19.391.442.940,10
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.851.385.386,00	537.670.072,00				1.998.747.200,00	2.536.417.272,00
	Aset Tetap Lainnya	5.800.000,00						
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.389.768.500,00	-				232.445.000,00	232.445.000,00
	Aset Lainnya	2.667.278.851,33						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.264.090.651,33	-	-	-	-	1.235.597.627,76	1.235.597.627,76
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					TOTAL
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	
	Aset Tidak Berwujud	1.403.188.200,00	-	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Tetap	2.789.339.480.231,46						116.131.709.487,00
	Tanah	1.066.435.237.061,20						-
	Peralatan dan Mesin	39.085.743.691,00					111.245.000,00	1.026.787.500,00
	Gedung dan Bangunan	36.622.945.638,00	915.542.500,00				706.035.000,00	7.467.313.220,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.604.750.119.896,26	6.761.278.220,00				4.244.672.432,00	106.202.473.867,00
	Aset Tetap Lainnya	25.024.227.047,00	101.957.801.435,00				486.500.000,00	486.500.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.421.206.898,00					948.634.900,00	948.634.900,00
	Aset Lainnya	195.213.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	195.213.000,00						35.296.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	-						-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Aset Tetap	914.933.511.774,07						74.804.168.186,65
	Tanah	127.950.110.771,00	2.620.818.000,00		2.549.993.000,00			5.170.811.000,00
	Peralatan dan Mesin	27.347.333.281,74	2.047.379.500,00	186.000.000,00			38.600.000,00	2.271.979.500,00
	Gedung dan Bangunan	115.081.204.335,81	8.773.634.556,99	1.053.722.800,00			1.242.313.704,00	11.069.671.060,99
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	245.369.849.772,61	47.500.206.625,66	607.700.000,00				48.107.906.625,66
	Aset Tetap Lainnya	96.848.679.690,91					-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	302.336.333.922,00		-	-	-	8.183.800.000,00	8.183.800.000,00
	Aset Lainnya	6.269.540.744,77		-	-	-	-	-

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	2.676.640.744,77	-	-	-	-	302.491.718,58	302.491.718,58
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-					48.528.803,48	48.528.803,48
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	3.592.900.000,00						-
	Aset Tidak Berwujud	-						-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Tetap	7.991.471.487,93						-
	Tanah	-						-
	Peralatan dan Mesin	2.086.353.758,00	280.315.476,00	2.000.000,00				282.315.476,00
	Gedung dan Bangunan	5.768.767.729,93						-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	136.350.000,00						-
	Aset Tetap Lainnya	-						-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	75.330.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	75.330.000,00						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Tidak Berwujud	-						-
	Aset Tetap	13.296.649.539,86						1.057.609.908,00
	Tanah	604.529.524,32						-
	Peralatan dan Mesin	4.949.431.881,02	449.589.000,00	-			24.000.000,00	473.589.000,00
	Gedung dan Bangunan	7.742.688.134,52	560.020.908,00					560.020.908,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-						-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Aset Tetap Lainnya	-	24.000.000,00					24.000.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	23.000.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	23.000.000,00						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	-						-
Dinas Sosial	Aset Tetap	9.951.206.046,00						4.654.637.600,00
	Tanah	632.181.000,00						-
	Peralatan dan Mesin	2.435.344.246,00	245.837.600,00					245.837.600,00
	Gedung dan Bangunan	6.668.400.000,00	2.596.050.000,00					2.596.050.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	211.175.000,00						-
	Aset Tetap Lainnya	-					1.812.750.000,00	1.812.750.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.105.800,00						-
	Aset Lainnya	211.079.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	211.079.000,00						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
Dinas Tenaga Kerja	Aset Tidak Berwujud	-						-
	Aset Tetap	13.722.879.464,89						228.353.500,00
	Tanah	633.050.000,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.644.305.264,89	126.307.500,00	-	-	-	42.120.000,00	168.427.500,00
	Gedung dan Bangunan	10.445.524.200,00	59.926.000,00	-	-	-	-	59.926.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	686.439.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	661.739.000,00	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	24.700.000,00	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	Aset Tetap	55.885.506.285,89						7.579.378.000,00
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	32.879.653.659,09	2.497.478.000,00	8.400.000,00				2.505.878.000,00
	Gedung dan Bangunan	8.743.086.585,80	2.063.900.000,00			418.500.000,00		2.482.400.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.236.516.041,00	1.100.700.000,00			692.800.000,00		1.793.500.000,00
	Aset Tetap Lainnya	1.250.000,00				797.600.000,00		797.600.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.000.000,00						-
	Aset Lainnya	352.737.136,77						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	352.737.136,77	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Tetap	15.404.837.900,00						903.884.400,00
	Tanah	1.864.347.100,00						-
	Peralatan dan Mesin	5.714.575.130,00	291.150.000,00			49.500.000,00		340.650.000,00
	Gedung dan Bangunan	7.825.915.670,00	473.587.100,00					473.587.100,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	89.647.300,00					89.647.300,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Aset Tetap Lainnya	-						-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	1.275.827.429,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.054.253.429,00						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	221.574.000,00						-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Aset Tetap	9.418.376.105,63						1.335.490.000,00
	Tanah	236.855.000,00						-
	Peralatan dan Mesin	5.607.159.755,63	1.031.490.000,00	42.000.000,00			-	1.073.490.000,00
	Gedung dan Bangunan	3.359.701.750,00	131.000.000,00					131.000.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-						-
	Aset Tetap Lainnya	214.659.600,00					131.000.000,00	131.000.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	1.220.989.166,70						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.220.989.166,70						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
Aset Tidak Berwujud	-						-	
Dinas Perhubungan	Aset Tetap	90.230.682.813,22						2.338.801.650,00
	Tanah	1.821.425.963,56						-
	Peralatan dan Mesin	36.673.903.260,56	2.020.853.450,00					2.020.853.450,00
	Gedung dan Bangunan	49.698.778.589,10	317.948.200,00					317.948.200,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.023.962.000,00						-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					TOTAL
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	
	Aset Tetap Lainnya	-						-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.613.000,00						-
	Aset Lainnya	3.235.237.701,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	2.537.909.150,00					3.725.797.483,38	3.725.797.483,38
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-					-	-
	Aset Tidak Berwujud	697.328.551,00						-
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Aset Tetap	10.900.939.614,56						1.193.059.000,00
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	8.296.776.614,56	917.088.000,00	-	-	-	-	917.088.000,00
	Gedung dan Bangunan	2.576.052.000,00	275.971.000,00	-	-	-	-	275.971.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.111.000,00	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	1.687.518.367,66						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	994.964.817,66	-	-	-	-	78.163.509,00	78.163.509,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Tidak Berwujud	692.553.550,00	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap	6.801.102.956,00						-
	Tanah	91.002.000,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	3.769.506.056,00	3.198.775.435,00	-	-	-	115.770.000,00	3.314.545.435,00
	Gedung dan Bangunan	2.800.804.900,00	806.206.200,00	-	-	-	-	806.206.200,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123.790.000,00	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	-	-	-	-	690.436.200,00	690.436.200,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	684.280.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	29.422.000,00	-	-	-	-	1.316.891.474,00	1.316.891.474,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	654.858.000,00	-	-	-	-	27.750.000,00	27.750.000,00
	Aset Tetap	16.717.293.369,12						786.604.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tanah	5.501.000.000,00						
	Peralatan dan Mesin	3.514.566.751,22	163.046.000,00		424.598.800,00			587.644.800,00
	Gedung dan Bangunan	7.421.052.837,00	198.960.000,00					198.960.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-						-
	Aset Tetap Lainnya	280.673.780,90			30.343.400,00			30.343.400,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	747.609.458,99						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	399.556.208,99					7.192.150,00	7.192.150,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	348.053.250,00						-
Dinas Perikanan	Aset Tetap	33.040.020.342,77						1.011.472.199,82
	Tanah	365.845.000,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.819.269.950,72	151.149.000,00	46.950.000,00	-	-	36.950.000,00	198.099.000,00
	Gedung dan Bangunan	19.599.316.845,09	813.373.199,82		-	-	-	813.373.199,82



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.850.588.546,96	-	-	-	-		-
	Aset Tetap Lainnya	405.000.000,00		-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	260.636.386,81						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	260.636.386,81	-	-	-	-	102.245.500,00	102.245.500,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Aset Tetap	53.562.858.330,81						5.298.453.370,00
	Tanah	11.583.400.000,00						-
	Peralatan dan Mesin	5.333.095.657,00	1.463.574.900,00				13.500.000,00	1.477.074.900,00
	Gedung dan Bangunan	34.081.348.176,81	2.838.118.470,00					2.838.118.470,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.482.375.400,00						-
	Aset Tetap Lainnya	590.939.000,00	12.000.000,00				971.260.000,00	983.260.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	491.700.097,00						-
	Aset Lainnya	1.818.276.543,85						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.778.276.543,85						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00						-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aset Tetap	68.294.556.270,02						2.547.941.226,86
	Tanah	3.517.962.734,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	9.507.177.970,63	1.473.617.200,00			-	26.495.000,00	1.500.112.200,00
	Gedung dan Bangunan	35.059.873.683,38	701.813.506,54			-	138.510.260,16	840.323.766,70



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.998.309.882,01	138.510.260,16			-	45.000.000,00	183.510.260,16
	Aset Tetap Lainnya	988.952.000,00	23.995.000,00	-	-	-	-	23.995.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	222.280.000,00	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	47.669.997,66						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	47.669.997,66	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap	94.652.120.966,19						2.901.934.409,59
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Tanah	34.651.849.000,00						-
	Peralatan dan Mesin	5.890.639.989,00	764.100.800,00					764.100.800,00
	Gedung dan Bangunan	49.740.518.237,19	1.671.558.940,97					1.671.558.940,97
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.658.360.990,00	199.342.769,31				17.689.100,00	217.031.869,31
	Aset Tetap Lainnya	552.600.000,00						-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	158.152.750,00					49.900.000,00	49.900.000,00
	Aset Lainnya	6.343.501.828,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.338.321.828,00					215.020.000,00	215.020.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	4.981.680.000,00						-
	Aset Tidak Berwujud	23.500.000,00						23.500.000,00
Sekretariat Daerah	Aset Tetap	136.712.824.531,41						4.359.160.510,00
	Tanah	22.407.205.000,00	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Peralatan dan Mesin	63.715.544.186,44	4.359.160.510,00		-	-	-	4.359.160.510,00
	Gedung dan Bangunan	47.705.693.362,97	-	-	-	-	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.426.623.982,00	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	457.758.000,00	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	1.001.546.706,67						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.001.546.706,67	-	-	-	-	1.337.094.392,43	1.337.094.392,43
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap	59.291.474.531,71						-
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tanah	2.863.618.200,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	22.838.158.829,00	1.952.931.800,00					1.952.931.800,00
	Gedung dan Bangunan	20.233.435.142,71	4.053.761.000,00				1.656.724.160,00	5.710.485.160,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.104.703.000,00						-
	Aset Tetap Lainnya	10.594.835.200,00					1.852.850.000,00	1.852.850.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.656.724.160,00					69.500.000,00	69.500.000,00
	Aset Lainnya	1.897.208.300,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.712.724.300,00	-	-	-	-	1.424.383.654,00	1.424.383.654,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	184.484.000,00	-					-
Kecamatan Pahandut	Aset Tetap	40.307.868.469,00						1.999.389.960,00
	Tanah	22.360.234.000,00	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
	Peralatan dan Mesin	4.261.061.721,00	1.043.225.000,00		-	-	398.960.000,00	1.442.185.000,00
	Gedung dan Bangunan	10.743.320.548,00	423.897.960,00	-	-	-	-	423.897.960,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.592.922.200,00	133.307.000,00	-	-	-	-	133.307.000,00
	Aset Tetap Lainnya	350.330.000,00	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	241.629.600,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	211.679.600,00	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	29.950.000,00	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Bukit Batu	Aset Tetap	21.649.150.763,86						-
	Tanah	2.783.034.000,00						-
	Peralatan dan Mesin	3.450.063.000,34	181.776.000,00					181.776.000,00
	Gedung dan Bangunan	10.072.095.485,74	594.470.000,00					594.470.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.225.112.077,78	1.049.184.550,00					1.049.184.550,00
	Aset Tetap Lainnya	1.118.846.200,00						-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	370.576.600,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	355.576.600,00						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00						-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
Kecamatan Jekan Raya	Aset Tetap	17.580.826.818,00						-
	Tanah	3.082.424.900,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	3.777.959.266,00	245.461.400,00	28.830.000,00	-	-	30.490.000,00	304.781.400,00
	Gedung dan Bangunan	7.881.612.880,00	716.360.850,00	-	-	-	-	716.360.850,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.331.669.772,00	133.000.000,00	-	-	-	-	133.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya	507.160.000,00	24.000.000,00	-	-	-	2.500.000,00	26.500.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	398.450.589,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	398.450.589,00	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap	37.689.141.695,00						-
Kecamatan Sebangau	Tanah	17.676.914.000,00						
	Peralatan dan Mesin	2.398.563.381,00	569.384.300,00					569.384.300,00
	Gedung dan Bangunan	14.423.330.280,00	695.295.800,00					695.295.800,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.714.068.784,00	131.000.000,00					131.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya	476.265.250,00					54.300.000,00	54.300.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						
	Aset Lainnya	878.968.833,00						
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	868.968.833,00						
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-		-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap	37.689.141.695,00						-
	Tanah	17.676.914.000,00						

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
Kecamatan Rakumpit	Aset Tetap	25.838.158.307,04						-
	Tanah	1.679.537.200,00						-
	Peralatan dan Mesin	2.230.208.342,04	322.800.000,00			42.000.000,00	364.800.000,00	
	Gedung dan Bangunan	14.547.727.016,40	622.400.000,00			199.000.000,00	821.400.000,00	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.495.213.748,60	1.592.800.000,00				1.592.800.000,00	
	Aset Tetap Lainnya	1.845.972.000,00					-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.500.000,00					-	
	Aset Lainnya	64.853.000,00					-	
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	64.853.000,00					-	
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-					-	
	Aset Tidak Berwujud	-					-	
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset Tetap	13.722.608.246,45					-	
	Tanah	354.041.000,00					-	
	Peralatan dan Mesin	11.126.868.136,45	102.843.720,00	140.137.500,00		-	242.981.220,00	
	Gedung dan Bangunan	1.904.515.210,00						
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	337.183.900,00						
	Aset Tetap Lainnya	-						
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-					-	
	Aset Lainnya	98.780.000,00					-	
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-					-	
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-					-	
	Aset Tidak Berwujud	98.780.000,00						



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					TOTAL
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap	12.003.362.362,69						-
	Tanah	254.600.000,00						
	Peralatan dan Mesin	9.597.868.747,20	2.079.660.000,00	88.000.000,00	1.147.599.000,00			3.315.259.000,00
	Gedung dan Bangunan	1.318.480.127,00						
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	832.413.488,49	26.684.000,00		43.956.000,00			70.640.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-						
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						
	Aset Lainnya	167.660.511,51						
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	167.660.511,51						
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						
	Aset Tidak Berwujud	-						
Inspektorat Kota	Aset Tetap	8.506.284.683,02						-
	Tanah	503.556.000,00						
	Peralatan dan Mesin	3.082.672.683,02	1.085.930.000,00	18.000.000,00			142.000.000,00	1.245.930.000,00
	Gedung dan Bangunan	4.244.541.000,00	2.570.736.590,00					2.570.736.590,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-						
	Aset Tetap Lainnya	-	142.000.000,00				2.570.736.590,00	2.712.736.590,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	289.396.207,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	189.396.207,00	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	TOTAL
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Tetap	11.328.655.255,36						271.787.600,00
	Tanah	1.052.769.600,00						-
	Peralatan dan Mesin	8.634.194.329,36	271.787.600,00					271.787.600,00
	Gedung dan Bangunan	1.198.454.826,00						-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	149.975.000,00						-
	Aset Tetap Lainnya	293.261.500,00						-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	1.480.421.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	35.000.000,00						-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	1.445.421.000,00						-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tetap	17.073.681.718,01						-
	Tanah	2.368.047.000,00						-
	Peralatan dan Mesin	8.444.850.118,01	759.050.000,00					759.050.000,00
	Gedung dan Bangunan	6.150.184.600,00						-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	75.700.000,00						-
	Aset Tetap Lainnya	34.900.000,00						-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-						-
	Aset Lainnya	886.564.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	628.767.000,00	-	-	-		225.450.000,00	225.450.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-						-
	Aset Tidak Berwujud	257.797.000,00		74.000.000,00				74.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)					TOTAL
			BELANJA MODAL TAHUN 2024	DILUAR BELANJA MODAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	HIBAH	PENGAKUAN ATAS ASET TERHUTANG	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Aset Tetap	18.046.557.636,95						-
	Tanah	1.843.306.000,00	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	8.131.875.537,33	645.100.000,00				395.625.000,00	1.040.725.000,00
	Gedung dan Bangunan	7.320.244.099,62	449.325.000,00					449.325.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	731.622.000,00						
	Aset Tetap Lainnya	19.510.000,00						
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	2.047.479.000,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	1.588.118.050,00	1.588.118.050,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	2.047.479.000,00	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap	9.280.386.382,00						447.360.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	5.164.511.729,00	217.485.000,00				15.000.000,00	232.485.000,00
	Gedung dan Bangunan	4.105.874.653,00	147.450.000,00	67.425.000,00		-		214.875.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.000.000,00						
	Aset Tetap Lainnya	-		-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya	947.932.220,00						-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	3.380.000,00	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-		-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	944.552.220,00						
	Aset Tetap	9.280.386.382,00						447.360.000,00
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lampiran 6. Mutasi Kurang Aset Tetap per SKPD per 31 Desember 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
Dinas Pendidikan	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin							239.504.900,00			3.017.171.970,60			3.256.676.870,60
	Gedung dan Bangunan			193.635.16 9,69	7.371.835.255,51			4.379.539.580,00				64.400.000,00		12.009.410.005,2 0
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
	Aset Tetap Lainnya							26.900.000,00						26.900.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan			24.723.157, 81	1.530.665.670,00									1.555.388.827,81
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Dinas Kesehatan	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Peralatan dan Mesin	-	-	9.978.148,08	834.000.000,00	-		10.610.000,00		1.235.597.627,76	22.284.904,80		-	2.112.470.680,64
	Gedung dan Bangunan	-	-	102.606.711,60	2.091.642.200,00	-							-	2.194.248.911,60
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	827.866.500,00		-	-	-	-		-	827.866.500,00
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin							168.140.000,00		35.296.000,00				203.436.000,00
	Gedung dan Bangunan			9.185.825,50	99.444.900,00									108.630.725,50



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			969.125.23 0,58	1.446.935.000,00			451.250.000,00	450.000.00 0,00		289.139.000,00		133.360.750, 00	3.739.809.980,58
	Aset Tetap Lainnya													
	Konstruksi Dalam Pengerjaan				-	4.950.707.432,00								4.950.707.432,00
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin							4.669.800,00		302.491.718,5 8				307.161.518,58
	Gedung dan Bangunan				8.222.400.000,00			800.000,00						8.223.200.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			155.677.68 1,02	1.242.313.704,00			2.644.932.016,42					459.679.756, 24	4.502.603.157,68
	Aset Tetap Lainnya													
	Konstruksi Dalam Pengerjaan			128.857.61 6,99										128.857.616,99
Aset Lainnya														



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain				-									-
	Aset Tidak Berwujud				-									-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin				250.000,00									250.000,00
	Gedung dan Bangunan													-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin							-			27.831.000,00			27.831.000,00
	Gedung dan Bangunan													
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
	Aset Tetap Lainnya				24.000.000,00									24.000.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
Dinas Sosial	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin													-
	Gedung dan Bangunan							1.812.750.000,00						1.812.750.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Dinas Tenaga Kerja	Aset Tetap												-	



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.035.000,00	-	-	25.035.000,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	42.120.000,00	-	-	17.806.000,00	-	-	-	-	-	59.926.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	-									9.750.000,00			9.750.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Gedung dan Bangunan	-			1.490.400.000,00									1.490.400.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	418.500.000,00	-		-	-	-	-	-	-	418.500.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin													
	Gedung dan Bangunan				49.500.000,00									49.500.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
	Aset Tetap Lainnya													

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaa n Masyarakat	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin										5.520.000,00			5.520.000,00
	Gedung dan Bangunan				131.000.000,00									131.000.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Dinas Perhubungan	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin				15.614.000,00				3.632.191.483,38	141.077.852,77				3.788.883.336,15
	Gedung dan Bangunan								93.606.000,00					93.606.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin								78.163.509,00	2.040.000,00				80.203.509,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan	Aset Tetap												-	



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tanah	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-		27.750.000,00	156.058.835,00		588.686.074,00				772.494.909,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	806.206.200,00	-		-		728.205.400,00	-		-	- 1.534.411.600,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	18.110.000,00	-	-		-	-	-	-		-	18.110.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin									7.192.150,00	355.000,00			7.547.150,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Gedung dan Bangunan													-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya										30.343.400,00			30.343.400,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Dinas Perikanan	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-	-						102.245.500,00				102.245.500,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-										
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-										

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-										
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-										
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		-	-										
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-										
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-		-		-		-		-		-
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Aset Tetap													-
	Tanah	-												
	Peralatan dan Mesin			800,00				1.445.000,00			16.200.000,00			17.645.800,00
	Gedung dan Bangunan			-	984.760.000,00									984.760.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya							12.000.000,00						12.000.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	47.500.000,00	-	-	20.400.000,00	-	-	-	-	-	67.900.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	138.510.260,16	-	-	-	-	-	-	-	-	138.510.260,16
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	23.995.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.995.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-								
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-								
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin				-		7.546.000,00		215.020.000,00	1.599.000,00				224.165.000,00
	Gedung dan Bangunan				67.589.100,00	-								67.589.100,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				-									
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													
	Aset Tetap													

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
Sekretariat Daerah	Tanah													
	Peralatan dan Mesin							72.100.000,00		1.337.094.392,43	11.520.000,00			1.420.714.392,43
	Gedung dan Bangunan													
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin				-			175.269.500,00		1.424.383.654,00				1.599.653.154,00
	Gedung dan Bangunan				1.922.350.000,00	-			-					1.922.350.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
	Aset Tetap Lainnya													
	Konstruksi Dalam Pengerjaan					1.656.724.160,00								1.656.724.160,00
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Kecamatan Pahandut	Aset Tetap													-
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin													
	Gedung dan Bangunan				398.960.000,00									398.960.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
	Aset Tetap Lainnya													
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													
	Aset Lainnya													



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Bukit Batu	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin										600.000,00			600.000,00
	Gedung dan Bangunan													-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Kecamatan Jekan Raya	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-			-	-	-	-		-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-					1.260.800,00			28.830.000,00			30.090.800,00
	Gedung dan Bangunan	-	-											
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	8.990.000,00	-		3.510.000,00	-	-	-		-	12.500.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	24.000.000,00	-		-	-	-	-		-	24.000.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sebangau	Aset Tetap													-
	Tanah	-												
	Peralatan dan Mesin	-												
	Gedung dan Bangunan	-												
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-									28.830.000,00			23.280.300,00
	Aset Tetap Lainnya	-			54.300.000,00									54.300.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-												
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-			-	-	-	-		-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Kecamatan Rakumpit	Aset Tetap												-	



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin													
	Gedung dan Bangunan				26.000.000,00									26.000.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				215.000.000,00									215.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset Tetap													-
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin										15.429.000,00			15.429.000,00
	Gedung dan Bangunan													

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-		7.200.000,00	-	-	18.860.000,00			26.060.000,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-		9.784.000,00	-	-	-		16.900.000,00	26.684.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-			-	-	-	-		-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Inspektorat Kota	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	2.570.736.590,00	-		-	-	-	-		-	2.570.736.590,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	142.000.000,00	-		-	-	-	-		-	142.000.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengembang an	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin													-
	Gedung dan Bangunan													-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													-
	Aset Tidak Berwujud													-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tetap													-
	Tanah													-
	Peralatan dan Mesin				17.500.000,00				225.450.000,00					242.950.000,00
	Gedung dan Bangunan													
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan													-
	Aset Tetap Lainnya													-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan													-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain													
	Aset Tidak Berwujud													
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Aset Tetap													
	Tanah													
	Peralatan dan Mesin							3.250.000,00		1.588.118.050,00	950.000,00			1.592.318.050,00
	Gedung dan Bangunan				395.625.000,00			3.100.000,00				50.600.000,00		449.325.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lainnya													-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	URAIAN	PENGURANGAN												
		PENGHA PUSAN ASET	HIBAH	KELEBIHA N PEMBAYA RAN BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ANTAR KIB	KDP YANG SELESAI	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJU D	MUTASI KE PERSEDIAAN PAKAI HABIS	MUTASI KE PEMELIHA RAAN	REKLAS KE RUSAK BERAT	MUTASI KE EKSTRA KOMTABEL	BUKAN ASET TETAP (BIAYA PERJALANA N DINAS)	MUTASI KE JASA PIHAK KETIGA	TOTAL
Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	Aset Tetap													-
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gedung dan Bangunan	-			15.000.000,00									15.000.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-												
	Aset Tetap Lainnya	-												
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-												
	Aset Lainnya													
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya													
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lampiran 7. Saldo Akhir Aset Tetap per SKPD per 31 Desember 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan	Aset Tetap	582.587.150.153,70
	Tanah	68.368.306.082,00
	Peralatan dan Mesin	89.476.062.509,01
	Gedung dan Bangunan	407.361.508.638,59
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	566.236.772,00
	Aset Tetap Lainnya	9.842.199.193,41
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.972.836.958,69
	Aset Lainnya	40.162.367.831,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	39.802.613.451,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	359.754.380,00
Dinas Kesehatan	Aset Tetap	379.707.155.108,60
	Tanah	13.271.351.500,00
	Peralatan dan Mesin	186.830.353.056,26
	Gedung dan Bangunan	168.417.500.894,34
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.387.802.658,00
	Aset Tetap Lainnya	5.800.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	794.347.000,00
	Aset Lainnya	3.902.876.479,09
	Aset Tidak Berwujud	1.403.188.200,00
	Aset Lain-lain	2.499.688.279,09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset Tetap	2.896.468.605.580,38
	Tanah	1.066.435.237.061,20
	Peralatan dan Mesin	39.909.095.191,00
	Gedung dan Bangunan	43.981.628.132,50
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.707.212.783.782,68
	Aset Tetap Lainnya	25.510.727.047,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.419.134.366,00
	Aset Lainnya	230.509.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	230.509.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Aset Tetap	976.575.857.667,47
	Tanah	133.120.921.771,00
	Peralatan dan Mesin	29.312.151.263,16
	Gedung dan Bangunan	117.927.675.396,80
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	288.975.153.240,59
	Aset Tetap Lainnya	96.848.679.690,91
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	310.391.276.305,01
	Aset Lainnya	6.620.561.266,83



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.592.900.000,00
	Aset Lain-lain	3.027.661.266,83
	Aset Tidak Berwujud	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aset Tetap	8.273.536.963,93
	Tanah	-
	Peralatan dan Mesin	2.368.419.234,00
	Gedung dan Bangunan	5.768.767.729,93
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	136.350.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	75.330.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	75.330.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Tetap	14.302.428.447,86
	Tanah	604.529.524,32
	Peralatan dan Mesin	5.395.189.881,02
	Gedung dan Bangunan	8.302.709.042,52
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	23.000.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	23.000.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Dinas Sosial	Aset Tetap	12.793.093.646,00
	Tanah	632.181.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.681.181.846,00
	Gedung dan Bangunan	7.451.700.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	211.175.000,00
	Aset Tetap Lainnya	1.812.750.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.105.800,00
	Aset Lainnya	211.079.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	211.079.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Dinas Tenaga Kerja	Aset Tetap	13.866.271.964,89
	Tanah	633.050.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.787.697.764,89
	Gedung dan Bangunan	10.445.524.200,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	-



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	686.439.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	661.739.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	24.700.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Aset Tetap	61.546.234.285,89
	Tanah	-
	Peralatan dan Mesin	35.375.781.659,09
	Gedung dan Bangunan	9.735.086.585,80
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.611.516.041,00
	Aset Tetap Lainnya	798.850.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.000.000,00
	Aset Lainnya	352.737.136,77
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	352.737.136,77
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Tetap	16.259.222.300,00
	Tanah	1.864.347.100,00
	Peralatan dan Mesin	6.055.225.130,00
	Gedung dan Bangunan	8.250.002.770,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	89.647.300,00
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	1.275.827.429,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.054.253.429,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Aset Tetap	10.617.346.105,63
	Tanah	236.855.000,00
	Peralatan dan Mesin	6.675.129.755,63
	Gedung dan Bangunan	3.359.701.750,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	345.659.600,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	1.220.989.166,70
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.220.989.166,70
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
Dinas Perhubungan	Aset Tetap	88.686.995.127,07
	Tanah	1.821.425.963,56
	Peralatan dan Mesin	34.905.873.374,41
	Gedung dan Bangunan	49.923.120.789,10



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.023.962.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.613.000,00
	Aset Lainnya	6.961.035.184,38
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	6.263.706.633,38
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	697.328.551,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Aset Tetap	12.013.795.105,56
	Tanah	-
	Peralatan dan Mesin	9.133.661.105,56
	Gedung dan Bangunan	2.852.023.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.111.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	1.765.681.876,66
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.073.128.326,66
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	692.553.550,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Tetap	9.287.274.282,00
	Tanah	91.002.000,00
	Peralatan dan Mesin	6.311.556.582,00
	Gedung dan Bangunan	2.072.599.500,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123.790.000,00
	Aset Tetap Lainnya	688.326.200,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	2.028.921.474,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.346.313.474,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	682.608.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aset Tetap	17.496.351.019,12
	Tanah	5.501.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	4.094.664.401,22
	Gedung dan Bangunan	7.620.012.837,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	280.673.780,90
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	754.801.608,99
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	406.748.358,99
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	348.053.250,00
Dinas Perikanan	Aset Tetap	33.949.247.042,59
	Tanah	365.845.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	4.915.123.450,72
	Gedung dan Bangunan	20.412.690.044,91
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.850.588.546,96
	Aset Tetap Lainnya	405.000.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	362.881.886,81
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	362.881.886,81
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Aset Tetap	57.846.905.900,81
	Tanah	11.583.400.000,00
	Peralatan dan Mesin	6.792.524.757,00
	Gedung dan Bangunan	35.934.706.646,81
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.482.375.400,00
	Aset Tetap Lainnya	1.562.199.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	491.700.097,00
	Aset Lainnya	1.818.276.543,85
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.778.276.543,85
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Aset Tetap	70.612.092.236,72
	Tanah	3.517.962.734,00
	Peralatan dan Mesin	11.007.290.170,63
	Gedung dan Bangunan	35.832.297.450,08
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.043.309.882,01
	Aset Tetap Lainnya	988.952.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	222.280.000,00
	Aset Lainnya	47.669.997,66
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	47.669.997,66
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Aset Tetap	97.062.958.476,47
	Tanah	34.651.849.000,00
	Peralatan dan Mesin	6.430.575.789,00
	Gedung dan Bangunan	51.344.488.078,16
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.875.392.859,31
	Aset Tetap Lainnya	552.600.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	208.052.750,00
	Aset Lainnya	6.558.521.828,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.553.341.828,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	4.981.680.000,00
	Aset Tidak Berwujud	23.500.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Sekretariat Daerah	Aset Tetap	139.651.270.648,98
	Tanah	22.407.205.000,00
	Peralatan dan Mesin	66.653.990.304,01
	Gedung dan Bangunan	47.705.693.362,97
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.426.623.982,00
	Aset Tetap Lainnya	457.758.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	2.338.641.099,10
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	2.338.641.099,10
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Aset Tetap	63.698.514.177,71
	Tanah	2.863.618.200,00
	Peralatan dan Mesin	23.191.437.475,00
	Gedung dan Bangunan	24.021.570.302,71
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.104.703.000,00
	Aset Tetap Lainnya	12.447.685.200,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.500.000,00
	Aset Lainnya	3.321.591.954,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	3.137.107.954,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	184.484.000,00
Kecamatan Pahandut	Aset Tetap	41.908.298.429,00
	Tanah	22.360.234.000,00
	Peralatan dan Mesin	5.703.246.721,00
	Gedung dan Bangunan	10.768.258.508,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.726.229.200,00
	Aset Tetap Lainnya	350.330.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	241.629.600,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	211.679.600,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	29.950.000,00
Kecamatan Bukit Batu	Aset Tetap	23.473.981.313,86
	Tanah	2.783.034.000,00
	Peralatan dan Mesin	3.631.239.000,34
	Gedung dan Bangunan	10.666.565.485,74
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.274.296.627,78
	Aset Tetap Lainnya	1.118.846.200,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	370.576.600,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	355.576.600,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00
Kecamatan Jekan Raya	Aset Tetap	18.694.878.268,00
	Tanah	3.082.424.900,00
	Peralatan dan Mesin	4.052.649.866,00
	Gedung dan Bangunan	8.597.973.730,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.452.169.772,00
	Aset Tetap Lainnya	509.660.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	398.450.589,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	398.450.589,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Kecamatan Sebangau	Aset Tetap	39.061.541.495,00
	Tanah	17.676.914.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.944.667.381,00
	Gedung dan Bangunan	15.064.326.080,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.845.068.784,00
	Aset Tetap Lainnya	530.565.250,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	878.968.833,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	868.968.833,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00
Kecamatan Rakumpit	Aset Tetap	28.376.158.307,04
	Tanah	1.679.537.200,00
	Peralatan dan Mesin	2.595.008.342,04
	Gedung dan Bangunan	15.343.127.016,40
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.873.013.748,60
	Aset Tetap Lainnya	1.845.972.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.500.000,00
	Aset Lainnya	64.853.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	64.853.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset Tetap	13.950.160.466,45
	Tanah	354.041.000,00
	Peralatan dan Mesin	11.354.420.356,45
	Gedung dan Bangunan	1.904.515.210,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	337.183.900,00
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	98.780.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	98.780.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Tetap	15.336.517.362,69
	Tanah	254.600.000,00
	Peralatan dan Mesin	12.887.067.747,20
	Gedung dan Bangunan	1.318.480.127,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	876.369.488,49
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	167.660.511,51
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	167.660.511,51
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	-
Inspektorat Kota	Aset Tetap	12.322.951.273,02
	Tanah	503.556.000,00
	Peralatan dan Mesin	5.004.117.683,02
	Gedung dan Bangunan	4.244.541.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	2.570.736.590,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	289.396.207,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	189.396.207,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aset Tetap	11.600.442.855,36
	Tanah	1.052.769.600,00
	Peralatan dan Mesin	8.905.981.929,36
	Gedung dan Bangunan	1.198.454.826,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	149.975.000,00
	Aset Tetap Lainnya	293.261.500,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	1.480.421.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	35.000.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	1.445.421.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Aset Tetap	17.589.781.718,01
	Tanah	2.368.047.000,00
	Peralatan dan Mesin	8.960.950.118,01
	Gedung dan Bangunan	6.150.184.600,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	75.700.000,00
	Aset Tetap Lainnya	34.900.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

SOPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	1.186.014.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	854.217.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	331.797.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Aset Tetap	17.494.964.586,95
	Tanah	1.843.306.000,00
	Peralatan dan Mesin	7.580.282.487,33
	Gedung dan Bangunan	7.320.244.099,62
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	731.622.000,00
	Aset Tetap Lainnya	19.510.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	3.635.597.050,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1.588.118.050,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Tidak Berwujud	2.047.479.000,00
	Aset Tetap	9.712.746.382,00
	Tanah	-
	Peralatan dan Mesin	5.396.996.729,00
	Gedung dan Bangunan	4.305.749.653,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Aset Lainnya	947.932.220,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	3.380.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Aset Tidak Berwujud	944.552.220,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Lampiran 8. Beban Jasa Tahun 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.870.777.500,00	2.870.777.500,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.896.610.000,00	3.918.210.000,00	-21.600.000,00	Total Perbedaan	-21.600.000,00
				Pembayaran utang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan Rakumpit.	-21.600.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	271.400.000,00	271.400.000,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Rohaniwan	64.950.000,00	64.950.000,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	205.980.000,00	205.980.000,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	960.000,00	960.000,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00		0,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	439.600.000,00	439.600.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8.219.506.951,40	8.236.971.903,00	-17.464.951,60	Total Perbedaan	-17.464.951,60
				Pembayaran Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Jaspel JKN) Puskesmas Kalampangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023	-30.511.233,00
				Pembayaran Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Jaspel JKN) Puskesmas	-20.063.400,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Tangkiling Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023	
				Pembayaran Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Jaspel JKN) Puskesmas Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023	-32.518.281,00
				Utang Kekurangan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ub. Desember 2024 UPT. Jekan Raya	4.761.233,00
				Utang Kekurangan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ub. Desember 2024 UPT. Kalampangan	8.014.658,40
				Utang Kekurangan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ub. Desember 2024 UPT. MENTENG	3.476.153,00
				Utang Kekurangan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ub. Desember 2024 UPT. Bukit Hindu	7.200.000,00
				Utang Kekurangan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ub. Desember 2024 UPT. Bukit Hindu	42.175.918,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	87.204.000,00	87.204.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	15.575.299.462,00	15.575.299.462,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.357.834.038,00	22.357.834.038,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	3.453.264.600,00	3.453.264.600,00	0,00		0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.995.155.445,00	4.465.891.445,00	529.264.000,00	Total Perbedaan	529.264.000,00
				Reklas kurang dari Bangunan Pembuang Air Kotor ke Belanja Jasa Pihak ketiga (Jasa Kebersihan dan Operator Alat Berat) DPUPR	450.000.000,00
				Reklas kurang Jembatan pada Jalan Kota ke Beban Jasa Tenaga Kebersihan DPUPR	79.264.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.144.989.054,00	2.144.989.054,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	41.740.000,00	24.840.000,00	16.900.000,00	Total Perbedaan	16.900.000,00
				Reklas jaringan listrik lainnya ke pemeliharaan beban jasa teknisi BPBD	16.900.000,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Tata Rias	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	790.344.306,24	330.664.550,00	459.679.756,24	Total Perbedaan	459.679.756,24
				Reklasifikasi Kesalahan Penganggaran dari Jaringan Distribusi ke Persediaan Jasa Pihak Ketiga Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik DISPERKIMTAN	459.679.756,24
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	611.593.499,00	685.593.499,00	-74.000.000,00	Total Perbedaan	-74.000.000,00
				Reklasifikasi atas kesalahan penempatan akun belanja barang dan jasa ke aset tidak berwujud TA. 2024 BPKAD	-74.000.000,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.794.903.700,00	4.794.903.700,00	0,00		0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	156.000.000,0	156.000.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Kalibrasi	125.723.000,00	125.723.000,00	0,00		0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Jasa Pengolahan Sampah	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	174.756.000,00	209.756.000,00	-35.000.000,00	Total Perbedaan	-35.000.000,00
				Reklasifikasi Aset Tetap Akun Beban Jasa Pengukuran Tanah ke Alat Kantor Lainnya DISPERKIMTAN	-35.000.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.991.334.000,00	12.991.334.000,00	0,00		0
Beban Tagihan Telepon	453.950.802,00	464.785.707,00	-10.834.905,00	Total Perbedaan	-10.834.905,00
				Pembayaran utang tagihan Listrik, Internet dan Telepon Ub. Desember 2023 Dinas Tenaga Kerja	-531.449,00
				Pembayaran Utang Belanja Berlangganan Telepon Seluler Kadis Ub. Desember 2023 DPMP TSP Kota Palangka Raya	-692.820,00
				Pembayaran Utang Belanja Berlangganan Telepon Selular SMS Gateway Ub. Desember 2023 DPMP TSP Kota Palangka Raya	-113.500,00
				pembayaran utang tagihan telepon Sekretariat DPRD	-9.058.008,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Telepon ub. Desember 2023 Dinas Perikanan	-34.857,00
				Pembayaran Utang Telepon pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	-40.350,00
				Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon Ub. Desember 2023 Inspektorat	-34.857,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Telpn ub Desember 2023 Disparbudpora	-613.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Pembayaran utang belanja Telepon Desember 2023 Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandia	-471.700,00
				Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Telepon HP Camat Pahandut (08115222411) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Ub. Januari TA. 2024 dengan nota terlampir, Kecamatan Pahandut	-1.223.944,00
				Pembayaran utang tagihan internet dan telpon Ub. Desember 2023 DAMKAR	-34.857,00
				Pembayaran Tagihan telpon DPKP	-36.857,00
				Pembayaran utang tagihan telepon Kecamatan Bukit Batu	-307.051,00
				Penyesuaian Utang Beban 2023 BKPSDM	-160.757,00
				PEMBAYARAN UTANG BELANJA TELEPHONE UB DESEMBER TA.2023 DINSOS	-113.500,00
				Pembayaran Utang Telepon ub Desember 2023 DISDALDUKKB	-243.370,00
				Utang Belanja tagihan Telepon Desember 2024 DPMPSTSP Kota Palangka Raya	113.500,00
				Utang Telepon Ub. Desember 2024 DPKP	36.857,00
				Utang tagihan Telepon UB Desember 2024 Dinas Tenaga Kerja	495.489,00
				Utang Beban Belanja per 31 Desember 2024 BKPSDM	34.857,00
				utang belanja tagihan telpon ub.Desember 2024 INSPEKTORAT	34.857,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang Belanja Tagihan Telepon ub. Desember 2024 Dinas Perikanan	34.857,00
				Utang Belanja Telepon TA 2023 DAMKAR	40.207,00
				Utang Belanja Tagihan Telpon ub. Desember 2024 Kecamatan Bukit Batu	284.418,00
				Utang Belanja Telepon TA 2024 DISPERINDAGKOP	632.530,00
				Utang Belanja Tagihan Telepon TA. 2024 Set.DPRD	327.500,00
				Utang Telepon ub. Desember 2024 KecamatanPahandut	180.100,00
				Utang Belanja Telepon ub. Desember 2024 BPPRD	40.850,00
				Utang Belanja Tagihan Telepon TA. 2024 DKISP	619.950,00
Beban Tagihan Air	249.159.570,00	254.465.770,00	-5.306.200,00	Total Perbedaan	-5.306.200,00
				Pembayaran Utang beban tagihan Air Desember 2023 DPMPTSP	-257.900,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Air TA. 2023 Set.DPRD	-1.187.200,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Air ub. Desember 2023 Dinas Perikanan	-185.560,00
				Pembayaran Utang Belanja Air TA 2023 Kecamatan Pahandut	-152.810,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Air PDAM TA.2023 Sekretariat Daerah	-3.940.900,00
				Pembayaran Utang Belanja Air ub. Desember 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-405.020,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Air ub. Desember 2023 -	-133.800,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				BPBD Kota Palangka Raya	
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Air TA. 2023 Kec. Bukit Batu	-475.780,00
				Pembayaran Tagihan Air ub. Desember 2023 PKM Panarung	-142.900,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan PDAM Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	-70.700,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan PDAM/Air Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	-264.100,00
				Pembayaran Tagihan Air Puskesmas Kayon ub. Desember 2023	-151.600,00
				Pembayaran tagihan air PKM. Tangkiling ub. Desember 2023	-35.000,00
				Pembayaran Tagihan Air ub. Desember PKM Menteng	-106.700,00
				Pembayaran Tagihan Air PKM. Marina Permai ub. Desember 2023	-132.300,00
				Pembayaran Tagihan Air Puskemas Kayon ub. Desember 2023	-195.600,00
				Pembayaran Utang PDAM / Air pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	-1.199.300,00
				Utang Belanja tagihan Air Desember 2024 DPMPSTP Kota Palangka Raya	140.270,00
				Utang Belanja Tagihan Air ub. Desember 2024 Dinas Perikanan	121.260,00
				Utang Belanja Tagihan Air DAMKAR	312.620,00
				Utang Belanja Tagihan Air Dinas Kesehatan ub. Desember 2024	778.530,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang Beban Tagihan Air Ub. Desember 2024 DPK	271.960,00
				Utang Belanja Tagihan Air ub. Desember 2024 Kecamatan Bukit Batu	761.550,00
				Utang tagihan Air ub Desember 2024 Setr. DPRG	295.340,00
				Utang Belanja Tagihan Air Kecamatan Pahandut ub Desember 2024	277.300,00
				Utang Belanja Tagihan air ub. Desember 2024 BPPRD	555.100,00
				Utang Belanja Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Tagihan Internet ub. Desemnre 2024 pada Dinas Pendidikan	217.040,00
Beban Tagihan Listrik	26.698.420.546,00	26.578.556.169,00	119.864.377,00	Total Perbedaan	119.864.377,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik TA 2023 Disnaker	-7.413.068,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik ub. Desember 2023 Sat Pol PP	-7.691.477,00
				Pembayaran Utang Beban Tagihan Listrik Desember 2023 DPMTSP	-11.906.811,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik Ub. Desember 2023 BAPPEDALITBANG	-12.001.085,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Listrik TA. 2023 Sekt. DPRD	-29.711.469,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Listrik ub. Desember 2023 DINAS PERIKANAN	-7.750.523,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik ub. desember 2023 BPPRD	-16.229.014,00
				Pembayaran Utang Listrik ub. Desember 2023 Kec. Sabangau	-2.692.607,00
				Pembayaran Utang Listrik ub. Desember 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-12.105.156,00
				Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik Ub. Desember 2023 Inspektorat	-7.392.004,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Pembayaran Utang Belanja Listrik ub. Desember 2023 Disparbudpora	-11.081.241,00
				Pembayaran Utang belanja listrik ub.desember 2023 disperindagkop	-10.458.271,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik TA 2023 Diskominfo	-11.948.400,00
				Pembayaran Utang Listrik Ub Desember TA. 2023 Dinas Sosial	-6.546.000,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik TA 2023 Kecamatan Pahandut	-2.386.369,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik TA.2023 SETDA	-9.934.519,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik ub. Desember 2023 KESBANGPOL	-2.477.915,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik ub. Desember 2023 Dinas Damkar	-8.715.572,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Listrik ub. Desember 2023 Disperkimtan	-11.096.435,00
				Pembayaran Utang Belanja tagihan listrik bulan Desember 2023 BPKAD	-17.918.554,00
				Pembayaran Utang Belanja listrik ub Desember 2023 Dinas Perhubungan	-6.387.786,00
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik ub. Desember 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-9.320.048,00
				Pembayaran Utang Listrik Desember 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik TA. 2024 DLH	-15.647.134,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Bukit Hindu	-3.449.446,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Listrik ub. Desember 2023 - BPBD	-3.319.283,00
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik Kecamatan Bukit Batu	-2.464.258,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM Menteng	-3.537.673,00
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM Panarung	-2.953.388,00
				Pembayaran Utang Tagihan Belanja Listrik Tahun 2023 Dinas Pendidikan	- 1.685.285,00
				Pembayaran Utang tagihan Listrik Tahun 2023 Dinas Pendidikan	- 1.309.550,00
				Pembayaran Utang Belanja tagihan Listrik Tahun 2023 Dinas Pendidikan	- 844.182,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Listrik Tahun 2023 Dinas Pendidikan	- 57.298,00
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik Tahun 2023 Dinas Pendidikan	- 9.752.756,00
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik Tahun 2023 Dinas Pendidikan	- 282.510,00
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik Tahun 2023 Dinas Pendidikan	- 5.971.302,00
				Pembayaran Tagihan Listrik Dinas Kesehatan ub. Desember 2023	- 8.656.021,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 Puskesmas Tangkiling	- 1.249.698,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Jekan Raya	- 565.910,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Kayon	- 968.469,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 Puskesmas Kereng Bangkirai	- 1.396.000,00
				Penyesuaian Utang Beban 2023 BKPSDM	- 5.974.451,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Marina	- 15.221,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Marina	- 59.039,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Marina	- 1.903.523,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Listrik Tahun 2023 Kecamatan Jekan Raya	- 2.961.382,00
				Pembayaran Utang Belanja Listrik Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	- 4.715.797,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember	- 1.730.550,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				2023 PKM. Kalampangan	
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Bukit Hindu	- 4.001.198,00
				Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2023 PKM. Kayon	- 4.961.100,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik - ID Pelanggan 224010159659 ub. Desember 2024 - BPBD Kota Palangka Raya	13.865.869,00
				Utang Belanja Listrik TA.2022 SETDA Biaya tagihan Listrik Bappedalitbang Ub. Desember 2024	10.750.931,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik BPKAD	19.223.794,00
				Utang Belanja tagihan Listrik Desember 2024 DPMTSP	16.519.435,00
				Utang Listrik Ub. Desember 2024 DPKP	9.686.092,00
				Utang Tagihan Listrik Dinas Tenaga Kerja UB Desember 2024	8.863.144,00
				Utang Beban Belanja per 31 Desember 2024 BKPSDM	7.072.848,00
				Utang Belanja listrik ub Desember 2024 Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	12.474.378,00
				utang belanja tagihan listrik ub. Desember 2024 INSPEKTORAT	6.014.588,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik ub. Desember 2024 Dinas Perikanan	7.311.766,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik Ub. Desember 2024 DAMKAR	9.913.681,00
				Utang Belanja Listrik Ub. Desember 2024 DISPERINDAGKOP	14.838.426,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik Dinas Kesehatan ub. Desember 2024	77.042.004,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik ub. Desember 2024 Disperkimtan	12.638.912,00
				Utang tagihan Listrik Ub. Desember 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.977.149,00
				Utang Tagihan Listrik Satpol PP ub. Desember 2024	7.494.331,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik ub. desember 2024 Kecamatan Bukit Batu	2.392.810,00
				Pembayaran Utang Tagihan Listrik Pemakaian Bulan Desember Tahun 2024 SETDA	49.971.868,00
				Hutang Belanja Tagihan Listrik Kecamatan Sabangau Tahun 2024	2.093.784,00
				utang belanja tagihan listrik ub desember 2024 Sekr. DPRD	30.828.196,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang Tagihan Listrik Ub. Desember 2024 DISDUKCAPIL	11.594.097,00
				Utang belanja listrik ub. Desember 2024 Kec. Pahandut	3.096.261,00
				Utang Belanja Listrik ub. Desember 2024 BPPRD	17.506.431,00
				Utang Belanja Listrik ub. desember 2024 DPUPR	14.114.604,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik dan Telpn 2024 DKISP	10.948.978,00
				Utang Tagihan Listrik ub. Desember 2024 Dinas Lingkungan Hidup	23.514.602,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik t ub. Desemner 2024 pada Dinas Pendidikan	15.684.766,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik dan Internet ub. Desember 2024 pada DISDALDUKKB	6.748.228,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik, ub.Desember 2024 KESBANGPOL	2.751.150,00
				Utang Belanja Kecamatan jekan Raya Ub. Desember	2.528.002,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	594.669.650,00	594.952.000,00	-282.350,00	Total Perbedaan	-282.350,00
				Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Interne t/TV Berlangganan Ub. Desember 2023 Inspektorat	-282.350,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.974.776.417,00	2.952.097.698,00	22.678.719,00	Total Perbedaan	22.678.719,00
				Utang Belanja Kawat/Faksimili/Interne t/TV Berlangganan - Nomor Pelanggan 162401323033, 162401323034, 162401323035 dan 162401323030 ub. Desember 2024 - BPBD Kota Palangka Raya	1.321.800,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Internet BPKAD	977.751,00
				Utang Belanja tagihan Internet Desember 2024 DPMPTSP Kota Palangka Raya	1.756.914,00
				Utang Belanja Internet Ub. Desember 2024 DPKP	775.900,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang tagihan Internet Dinas Tenaga Kerja UB. Desember 2024	2.755.537,00
				Utang belanja tagihan internet berlangganan (indihome) dengan IDPEL : 161401216669 ub Desember 2024 Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	457.600,00
				utang belanja tagihan tv berlangganan ub.Desember 2024 INSPEKTORAT	276.850,00
				Utang Belanja Tagihan Internet ub. Desember 2024 Dinas Perikanan	1.680.657,00
				Utang Belanja Internet DAMKAR	3.420.257,00
				Utang Belanja Wifi Ub. Desember 2024 DISPERINDAGKOP	1.554.450,00
				Utang Belanja Tagihan Interner Dinas Kesehatan ub. Desember 2024	6.907.723,00
				Utang Belanja Tagihan Internet Ub. Desember 2024 Disperkimtan	3.681.050,00
				Pembayaran Utang Tagihan Internet Pemakaian Bulan Desember Tahun 2024 SETDA	455.064,00
				Utang Belanja Kawat/Faksimili/Interne t/TV Berlangganan Ub. Desember 2024 DPK	352.150,00
				Pembayaran Utang Belanja Internet TA.2022 SEKR. Utang Belanja Tagihan Internet ub. desember 2024 Kecamatan Bukit Batu	1.352.541,00
				Hutang Tagihan Internet Kecamatan Sabangau Tahun 2024	1.992.457,00
				tagihan internet ub desember 2024 Sekr. DPRD	6.532.607,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Utang Belanja Tagihan Internet Dukcapil Ub. Desember 2024	2.479.198,00
				Utang Belanja Kawat/Internet ub. Desember 2024 Kec Pahandut	1.054.394,00
				Utang belanja Internet ub. Desember 2024 BPPRD	17.205.000,00
				Utang Belanja Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Tagihan Internet ub. Desemner 2024 pada Dinas Pendidikan	5.788.864,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik dan Internet ub. Desember 2024 pada DISDALDUKKB	571.100,00
				Utang Belanja Tagihan Listrik, Internet , dan TPP ub.Desember 2024 KESBANGPOL	5.030.363,00
				Utang Belanja Internet Kantor Kecamatan Jekan Raya	746.200,00
				Pembayaran Utang Tagihan Internet Desember 2023 DPMTSP	-1.756.914,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Internet ub. Desember 2023 Dinas Perikanan	-1.680.657,00
				Pembayaran Utang belanja tagihan internet berlangganan (indihome) dengan IDPEL : 161401216669 ub Desember 2023 Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	-463.150,00
				Pembayaran Utang Belanja tagihan Telepon/ Internet bulan Desember 2023 BPKAD	-970.251,00
				Pembayaran Utang belanja tagihan internet berlangganan (indihome) dengan IDPEL 162401904865	-569.100,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				ub. Desember 2023 DPPKBP3APM	
				Pembayaran utang belanja internet ub. desember 2023 DISPERINDAGKOP	-1.548.900,00
				Pembayaran Utang Belanja Internet TA 2023 Disnaker	-1.647.357,00
				Pembayaran Utang Belanja Internet ub. Desember 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-3.421.257,00
				Pembayaran Utang Belanja Internet TA.2023 SETDA	-8.394.264,00
				Pembayaran Utang Belanja Kawat/Faksimili/Interne t/TV Berlangganan ub. Desember 2023 - BPBD Kota Palangka Raya	-391.500,00
				Pembayaran Utang Belanja Internet ub. Desember 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-2.497.395,00
				Pembayaran Belanja Utang Internet Ub. Desember 2023 Kec Sabangau	-1.544.907,00
				Pembayaran Utang Belanja Internet ub Desember 2023 KESBANGPOL	-2.736.150,00
				Pembayaran Utang Internet u.b. Desember 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-775.900,00
				Pembayaran Utang Belanja Tagihan Internet Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023	-6.546.601,00
				Pembayaran Utang Belanja Internet u.b. Desember 2023 DISPERKIMTAN	-3.657.450,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				U Pembayaran tang Jasa Internet Kecamatan Jekan Raya ub. Desember 2023	-746.200,00
				Utang Belanja Internet ub. Desember 2023 Dinas Pendidikan	-5.747.214,00
				Utang Belanja Tagihan Internet TA. 2023 Kec. Bukit Batu	-1.352.541,00
Beban Paket/Pengiriman	33.025.500,00	33.025.500,00	0,00		0,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	1.595.135,00	1.595.135,00	0,00		
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	443.713.648,00	443.713.648,00	0,00		0,00
Beban Medical Check Up	277.200.000,00	277.200.000,00	0,00		0,00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	29.319.387.000,00	29.319.387.000,00			
Beban Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.106.714.900,00	3.106.714.900,00	0,00		0,00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.170.335.193,00	2.172.271.243,00	-1.936.050,00	Total Perbedaan	-1.936.050,00
				Pembayaran Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Ub. Desember 2023 Dinas Tenaga Kerja	-1.936.050,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	458.171.303,85	420.131.303,85	38.040.000,00	Total Perbedaan	38.040.000,00
				Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Relawan Pemadam Kebakaran	38.040.000,00
Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	467.716.348,41	440.690.430,15	27.025.918,26	Total Perbedaan	27.025.918,26
				Utang Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Relawan Pemadam Kebakaran	25.867.200,00
				Utang Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Kec Rakumpit	1.158.718,26
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	106.047.484,00	106.047.484,00	0,00		0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	9.112.656,00	9.112.656,00	0,00		
Beban Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	4.925.760,00	4.925.760,00	0,00		
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Excavator	3.500.000,00	3.500.000,00			
Beban Sewa Electric Generating Set	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	553.800.000,00	571.500.000,00	-17.700.000,00	Total Perbedaan	-17.700.000,00
				Beban Dibayar Dimuka atas sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sat Pol PP	-17.700.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.438.487.632,00	1.645.184.632,00	-206.697.000,00	Total Perbedaan	-206.697.000,00
				Beban sewa dibayar dimuka atas beban sewa kendaraan bermotor penumpang BAPPEALITBANG	-59.500.000,00
				Beban Dibayar Dimuka Atas Sewa Mobil Sembilan (9) Unit Tahun 2024 SETDA	-75.600.000,00
				Beban Dibayar Dimuka Atas Sewa Mobil Dua (2) Unit Tahun 2024 SETDA	-31.391.000,00
				Beban Dibayar Dimuka atas sewa Kendaraan Kendaraan Bermotor Penumpang DLH	-8.400.000,00
				Beban Dibayar Dimuka atas sewa Kendaraan Bermotor Penumpang DINSOS	-31.806.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	259.640.000,00	259.640.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Mebel	61.009.450,00	61.009.450,00	0,00		0,00
Beban Sewa Alat Pendingin	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00		0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.990.000,00	53.990.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	85.150.000,00	85.150.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	169.747.834,00	169.747.834,00	0,00		0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	35.435.000,00	35.435.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.668.721.000,00	1.668.721.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Taman	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Hotel	24.217.700,00	24.217.700,00	0,00		0,00
Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	12.500.000,00	12.500.000,00			
Beban Sewa Alat Musik	130.125.000,00	130.125.000,00	0,00		0,00
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian Lainnya	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	429.760.000,00	553.690.000,00	-123.930.000,00	Total Perbedaan	-123.930.000,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya ke Akun Flat/Rumah Susun DISPERKIMTAN	-24.130.000,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan arsitektur-Jasa arsitektur lainnya ke Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah DISPERKIMTAN	-99.800.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa	623.330.000,00	623.330.000,00	0,00		0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	412.022.600,00	680.922.600,00	-268.900.000,00	Total Perbedaan	-268.900.000,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi DISPERKIMTAN	-69.800.000,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi ke Jembatan Pada Jalan Khusus DISPERKIMTAN	-99.500.000,00
				Kapitalisasi jasa konsultansi perencanaan Rekayasa-Jasa Desain untuk pekerjaan teknik sipil transportasi ke Akun Jalan Khusus DISPERKIMTAN	-99.600.000,00
4Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	10.494.500,00	10.494.500,00	0,00		
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	79.183.000,00	79.183.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	304.037.000,00	998.936.500,00	-694.899.500,00	Total Perbedaan	-694.899.500,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung ke Akun Bangunan Gedung Tempat Ibadah DISPERKIMTAN	-74.700.000,00
				Kapitalisasi jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas	-49.900.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				pekerjaan konstruksi bangunan gedung ke Jalan Khusus DISPERKIMTAN	
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Akun Bangunan Pembuang Pengaman Sungai DISPERKIMTAN	-59.900.000,00
				Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Jalan Khusus DISPERKIMTAN	-49.900.000,00
				Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Jalan Khusus DISPERKIMTAN	-99.400.000,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah DISPERKIMTAN	-344.000.000,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Akun Flat/Rumah Susun DISPERKIMTAN	-17.099.500,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	79.700.000,00	-79.700.000,00	Total Perbedaan	- 79.700.000,00
				Kapitalisasi Jasa Konsultansi Pengawasan	-79.700.000,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
				Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Teknik Sipil Transportasi ke Jalan Khusus DISPERKIMTAN	
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	377.500.000,00	377.500.000,00	0,00		0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaa	99.499.734,00	99.499.734,00	0,00		0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	196.055.000,00	196.055.000,00	0,00		0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	492.632.350,00	492.632.350,00	0,00		0,00
Beban Sosialisasi	59.177.000,00	59.177.000,00	0,00		0,00
Beban Bimbingan Teknis	4.176.693.814,00	4.176.693.814,00	0,00		0,00
Beban Diklat Kepemimpinan	896.990.000,00	896.990.000,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	104.583.188,00	104.583.188,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	184.555.346,00	184.555.346,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	351.287.330,00	351.287.330,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.104.037,00	1.104.037,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00		0,00
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.162.066,00	50.162.066,00	0,00		0,00



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

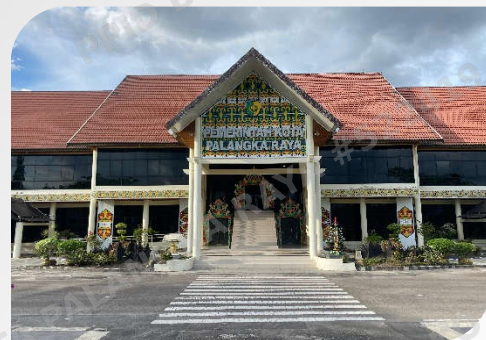
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Akun	Saldo Tahun 2024 (Rp)			Keterangan	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	309.940.792,00	309.940.792,00	0,00		0,00
Jumlah	166.503.783.841,90	166.848.582.028,00	-344.798.186,10	0,00	-344.798.186,10



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024
DI PALANGKA RAYA**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

Nomor : 43.B/LHP/XIX.PAL/06/2025

Tanggal : 20 JUNI 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BFFC.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
DI PALANGKA RAYA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	3
A. Pendapatan	3
1. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Belum Memadai	3
2. Potensi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	6
3. Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha BDS di Jalan Ahmad Yani	8
B. Belanja.....	12
1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara pada 13 SKPD Tidak sesuai Ketentuan	12
2. Realisasi Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan	18
3. Pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	24
4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	27
5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Kontrak	33
6. Pengelolaan Belanja Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	35
7. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kontrak	39
8. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dua SKPD Tidak Sesuai Kontrak	41
C. Aset	45
1. Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	45

2. Pengelolaan Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	50
3. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai	53
4. Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.....	59

BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA 62

LAMPIRAN

RENCANA AKSI



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Selisih Perhitungan Pajak.....	4
Tabel 2	Daftar HGB dengan PT BI.....	9
Tabel 3	Opsi Nilai Sewa BDS.....	9
Tabel 4	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024.....	12
Tabel 5	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Suami/Istri Pegawai yang Telah Bercerai.....	13
Tabel 6	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum/Fungsional atas Pegawai yang Sedang Tugas Belajar	14
Tabel 7	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras.....	15
Tabel 8	Kelebihan Pembayaran atas Honorarium Narasumber atau Pembahas	19
Tabel 9	Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.....	20
Tabel 10	Kelebihan Pembayaran Honorarium ASN Eselon II	21
Tabel 11	Kelebihan Pembayaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan....	21
Tabel 12	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan	24
Tabel 13	Kelebihan Pembayaran Uang Penginapan	29
Tabel 14	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas Penugasan Ganda Telah Ditindaklanjuti	29
Tabel 15	Kelebihan Bayar atas Pembayaran yang Tidak Termasuk dalam Komponen yang Seharusnya Dibiayai.....	29
Tabel 16	Rincian Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024	33
Tabel 17	Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Kontrak	33
Tabel 18	Data Realisasi Belanja Hibah.....	35
Tabel 19	Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya	36
Tabel 20	Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Usulan Hibah	36
Tabel 21	Rincian Realisasi Dana Hibah yang Tidak Ada dalam Usulan Hibah	37
Tabel 22	Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Kontrak.....	39
Tabel 23	Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tidak Sesuai Kontrak.....	42
Tabel 24	Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2024	45

Tabel 25	Rincian Transaksi Salah Posting Bank di Sisi Debet Hingga Lewat Tahun Anggaran 2024.....	46
Tabel 26	Rincian Rekening Milik Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.....	47
Tabel 27	Rincian Pengenaan Biaya Administrasi Bank pada Rekening Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	48
Tabel 28	Rincian Saldo Kas Dana BOSP SD Negeri 8 Menteng	50
Tabel 29	Aset Tetap Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024	53
Tabel 30	Daftar Kepemilikan Tanah per 31 Desember 2024.....	55
Tabel 31	Kendaraan Dinas yang dikuasai oleh Pegawai Pensiun	55
Tabel 32	Daftar Aset yang Dapat Disajikan Sebagai Properti Investasi.....	60
Tabel 33	Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2020-2024 ...	62

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras atas Pegawai yang Memiliki Anak berusia >21 tahun |
| Lampiran 2 | Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras atas Pegawai yang Memiliki Anak berusia >25 tahun |
| Lampiran 3 | Perhitungan Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| Lampiran 4 | Rincian Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Darat Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil |
| Lampiran 5 | Rincian Pertanggungjawaban Biaya Taksi Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil |
| Lampiran 6 | Rincian Kelebihan Bayar atas Pembayaran yang Tidak Termasuk dalam Komponen yang Seharusnya Dibiayai |
| Lampiran 7 | Rincian Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Melebihi Standar Harga yang Berlaku pada Dewan Kesenian Palangka Raya (DKPR) |
| Lampiran 8 | Rincian Pembayaran Honorarium Panitia, Moderator dan Pembawa Acara Melebihi Standar Harga yang Berlaku pada Dewan Kesenian Palangka Raya (DKPR) |
| Lampiran 9 | Rekap Perhitungan Tidak Sesuai Kontrak Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl Jatayu Menuju Mahir Mahar II, Jl Bondol XVI, Jl Bondol, Jl Bondol XIV, Jl Bondol XV, Jl Bondol XIII, Jl Bondol XI, Jl Mahir Mahar II A, Jl Bondol VI, Jl Bondol Raya, Jl Mahir Mahar IV |
| Lampiran 10 | Tindak Lanjut Rekomendasi Aset Tetap Belum Sesuai |
| Lampiran 11 | Rincian PSU Kota Palangka Raya |
| Lampiran 12 | Rekapitulasi Bukti Kepemilikan Tanah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 13 | Rincian Aset Peralatan dan Mesin Tidak Ditemukan |
| Lampiran 14 | Rincian Aset Rusak Berat Dimusnahkan Tanpa BA Penghapusan |
| Lampiran 15 | Rincian Aset Gedung dan Bangunan yang Telah Dibongkar Belum Dilakukan Proses Penghapusan |
| Lampiran 16 | Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Sama Dengan Lebih dari Rp20.000.000 Belum Dikapitalisasikan ke Aset Induk |



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 43.A/LHP/XIX.PAL/06/2025 tanggal 20 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan di antaranya sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan belum memadai sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan PBJT atas Kesenian dan Hiburan senilai Rp475.164.783,25;
2. Realisasi pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan senilai Rp285.899.250,00 dan telah dilakukan penyetoran senilai Rp121.088.750,00 sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti senilai Rp164.810.500,00; dan
3. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada dua SKPD tidak sesuai kontrak senilai Rp1.124.802.911,60 dan telah dilakukan penyetoran senilai Rp1.076.274.108,12 sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti senilai Rp48.528.803,48.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPPRD untuk melakukan langkah-langkah penerbitan SKPDKB sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada masing-masing SKPD dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing senilai Rp41.225.000,00, Rp1.250.000,00, Rp4.968.000,00, dan Rp117.367.500,00; dan
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp48.528.803,48 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palangka Raya, 20 Juni 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 15 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Pendapatan

1. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Belum Memadai

Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2024 menganggarkan Pajak Barang dan Jasa atas Kesenian dan Hiburan senilai Rp3.578.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp4.649.753.348,00 atau 129,94% dari nilai anggarannya.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT terdiri atas tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, makanan dan/atau minuman, serta jasa kesenian dan hiburan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PBJT atas Kesenian dan Hiburan ditemukan kelemahan sebagai berikut.

a. Kenaikan Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan terlambat diterapkan

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi perubahan tarif pajak atas PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu tarif pajak untuk usaha mandi uap/spa yang semula sebesar 20% menjadi 40%, serta tarif pajak untuk diskotek, karaoke, klub malam, dan bar yang semula sebesar 25% juga menjadi 40%. Peraturan Daerah tersebut berlaku pada saat diundangkan yaitu pada tanggal 27 Februari 2024.

Berdasarkan analisis data dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditemukan bahwa perubahan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan menjadi 40% mulai diberlakukan sejak masa pajak Juni 2024.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pelayanan Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) diketahui bahwa tarif pajak PBJT atas Jasa Hiburan sebesar 40% terlambat diterapkan pada pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan. Seharusnya tarif mulai diberlakukan sejak masa pajak bulan Maret 2024 sesuai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterlambatan dikarenakan atas penyesuaian tarif tersebut diperlukan penyesuaian pada Aplikasi SIMPATDA V-tax untuk seluruh Jenis Pajak Daerah Lainnya dari regulasi yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini ternyata membutuhkan waktu lebih lama diluar perkiraan karena pihak vendor Aplikasi SIMPATDA V-tax telah memiliki antrian daftar tunggu untuk pelaksanaan proses migrasi data dan penyesuaian Aplikasi SIMPATDA V-tax. Selain itu, terdapat cuti bersama hari raya idul fitri pada tanggal 8 s.d. 15 April 2024 sehingga penerapan tarif 40% baru bisa dilaksanakan pada masa pajak Juni 2024.

Berdasarkan hasil analisis data pada Aplikasi SIMPATDA V-tax, terdapat 13 Wajib Pajak aktif yang masih menggunakan tarif pajak sebesar 25% saat melaporkan pendapatan hiburan untuk masa pajak Maret, April, dan Mei 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya kehilangan potensi pendapatan dari perubahan tarif atas 13 Wajib Pajak tersebut selama tiga bulan senilai Rp156.268.364,40.

b. Pelaporan SPTPD PBJT atas Kesenian dan Hiburan Tidak Sesuai dengan Omzet Riil

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghasilan yang dilaporkan wajib pajak tersebut dijadikan sebagai dasar pemungutan PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SPTPD secara uji petik terhadap Wajib Pajak SC ditemukan bahwa Wajib Pajak dalam mengisi form SPTPD tidak mencantumkan rincian omzet per hari sesuai format isian. Wajib Pajak mengisi nilai omzet secara total per bulan. Kemudian total omzet satu bulan tersebut dikalikan dengan tarif pajak.

Berdasarkan konfirmasi kepada pihak SC, omzet yang disampaikan pada dokumen SPTPD kepada BPPRD tidak sesuai dengan omzet yang sebenarnya. Lebih lanjut Wajib Pajak tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan jumlah pajak yang disetor ke Kas Daerah, karena besaran pajak tersebut hanya didasarkan pada kemampuan dan kesediaan SC untuk membayar, bukan berdasarkan data omzet atau penjualan. Berikut rekapitan laporan omzet riil Wajib Pajak bulan Januari s.d. Mei berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan selisih perhitungan pajak.

Tabel 1 Selisih Perhitungan Pajak

(dalam rupiah)

No	Masa Pajak	Omzet SPTPD	Omzet Riil	Pajak Seharusnya (25%)	Pajak yang Telah Disetor	Selisih
a	b	c	d	e	f	g = e - f
1	Januari	84.863.320,00	745.620.239,00	186.405.059,75	21.215.830,00	165.189.229,75
2	Februari	99.395.340,00	779.966.250,00	194.991.562,50	22.098.835,00	172.892.727,50
3	Maret	33.236.188,00	380.746.750,00	95.186.687,50	8.309.047,00	86.877.640,50
4	April	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mei	129.130.508,00	329.951.250,00	82.487.812,50	32.282.627,00	50.205.185,50
Jumlah		346.625.356,00	2.236.284.489,00	559.071.122,25	83.906.339,00	475.164.783,25

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

1) Pasal 2:

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu pada huruf c, PBJT terdiri atas:

(1) Makanan dan/atau minuman;

- (2) Tenaga Listrik;
 - (3) Jasa Perhotelan;
 - (4) Jasa Parkir; dan
 - (5) Jasa Kesenian dan Hiburan.
- b) ayat (3) yang menyatakan bahwa jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib pajak;
 - c) ayat (4) yang menyatakan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang;
 - d) ayat (5) yang menyatakan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah;
 - e) ayat (6) yang menyatakan bahwa dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- b. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah pada pasal 27 yang menyatakan bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut diantaranya pada huruf e, diskotek, karaoke dan klub malam sebesar 25%.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kehilangan potensi kenaikan penerimaan PBJT atas Kesenian dan Hiburan masa pajak Maret s.d. Mei 2024 senilai Rp156.268.364,40; dan
- b. Potensi kekurangan penerimaan PBJT atas Kesenian dan Hiburan senilai Rp475.164.783,25.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala BPPRD belum optimal dalam merespon perubahan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan; dan
- b. Kepala Bidang Pelayanan belum melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan berkas SPTPD yang dilaporkan oleh WP dalam rangka penghitungan dan penetapan PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala BPPRD menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Atas kondisi ini, Kepala BPPRD mengakui telah terjadi kehilangan potensi penerimaan daerah dan akan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Selain itu, BPPRD mengakui bahwa dalam pengawasan pelaporan SPTPD belum optimal serta akan meningkatkan verifikasi dan pengawasan atas pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak secara lebih ketat. BPPRD akan

melakukan penagihan atas kekurangan tersebut setelah melakukan konfirmasi kesanggupan Wajib Pajak.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala BPPRD untuk:

- a. Menyusun mekanisme (SOP) terkait langkah-langkah responsif dalam implementasi perubahan tarif pajak;
- b. Melakukan langkah-langkah penerbitan SKPKDB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan berkas SPTPD yang dilaporkan oleh WP termasuk pemeriksaan silang dengan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum melakukan penetapan PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

2. Potensi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2024 menganggarkan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah senilai Rp2.312.460.000,00 dengan realisasi senilai Rp665.433.000,00 atau 28,78% dari nilai anggarannya.

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan salah satu jenis dari Retribusi Jasa Usaha. Penyediaan atau pelayanan dalam retribusi jasa usaha disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan. Objek retribusi pemanfaatan aset daerah merupakan aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Struktur dan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai sejak tanggal diundangkannya yakni tanggal 27 Februari 2024. Salah satu objek retribusi pemanfaatan aset daerah adalah Pemakaian Tanah dan Bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan dengan tarif Rp35.000.000,00 unit /tahun.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Kepala UPTD Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) diketahui bahwa terdapat satu bangunan ATM yang berisi dua unit mesin ATM Bank Kalteng yang sudah beroperasi pada saat Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 berlaku dan belum terdapat realisasi retribusi pemanfaatan aset daerah atas objek tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan terkait perhitungan objek retribusi, yakni apakah objek tersebut dihitung sebagai satu unit atau dua unit untuk keperluan penetapan total retribusi. Menurut UPTD Pasar, bangunan ATM yang terdapat di pasar kahayan terhitung sebagai dua unit karena terdapat dua unit mesin ATM dalam satu bangunan. UPTD Pasar menafsirkan tarif retribusi atas bangunan ATM tersebut yang seharusnya dibayarkan Bank Kalteng adalah senilai Rp70.000.000,00 per tahun.

Berdasarkan Surat Bank Kalteng Nomor CP.KHY/SB-0421/IV-25 tanggal 23 April 2025 perihal Usulan Biaya Sewa Tanah dan Bangunan ATM menyatakan bahwa Bank Kalteng menegosiasi harga dari Rp35.000.000,00 per unit mesin ATM menjadi Rp35.000.000,00 secara keseluruhan bangunan dan mesin ATM sudah termasuk pajak

dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Sewa Tanah dan Bangunan ATM.

Berdasarkan pemeriksaan fisik diketahui bahwa terdapat satu bangunan ATM yang terdiri atas dua mesin ATM. Merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi pemanfaatan aset daerah yang dikelola oleh DPKUKMP adalah Pemakaian Tanah dan Bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan, bukan jumlah mesin ATM. Dengan demikian, atas pemanfaatan aset daerah tersebut dapat dikenakan tarif senilai Rp35.000.000,00 per Tanah dan Bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

- a. Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa Retribusi Jasa Usaha terdiri atas 10 (sepuluh) jenis antara lain huruf j. Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf j merupakan aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Lampiran B.10. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah antara lain:

4	OPD yang membidangi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian			
a	Pemakaian Tanah dan Bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan	35.000.000,00	Unit/Tahun	

Permasalahan tersebut mengakibatkan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya senilai Rp35.000.000,00 per tahun.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara DPKUKMP dan Bank Kalteng, sehingga belum adanya kesepakatan mengenai tarif retribusi tersebut.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya akan membuat PKS dengan Bank Kalteng untuk penerimaan retribusi pemakaian tanah dan bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan dengan nilai Rp35.000.000,00 per tanah dan bangunan diluar pajak terhitung mulai tahun 2025.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan Bank Kalteng atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa satu bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan yang mengatur antara lain terkait dengan tarif sewa dan jangka waktu.

3. Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha BDS di Jalan Ahmad Yani

Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2024 menganggarkan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha senilai Rp1.100.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp266.180.875,00 atau 24,20% dari nilai anggarannya.

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Objek retribusi jasa usaha yang diberikan adalah berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Salah satu objek retribusi ini adalah penyediaan tempat kegiatan usaha Pasar Kameloh di kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut. Namun demikian saat ini penerimaan retribusi jasa usaha dari Bangunan rumah toko, blok toko, dan plaza pujasera di area Pasar Kameloh tidak optimal.

Diawali dari perjanjian tanggal 8 April 1996 yang mengacu kepada Surat Keputusan Persetujuan DPRD Kota Palangka Raya No. 188.4.43/07/DPRD tanggal 31 Oktober 1995, Surat Keputusan Walikota Kota Palangka Raya No. 600/07/Bag P.P tanggal 1 April 1996 dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 644.142-142 terkait persetujuan, keputusan dan pengesahan penataan dan pembangunan kembali Pasar Kameloh, Pemerintah Kota Palangka Raya bersepakat dengan PT BBM untuk melakukan kerjasama penataan dan pembangunan kembali Pasar Kameloh di atas lahan seluas 9.508 m2 dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut:

- a. Bangunan Pasar Kameloh dengan fasilitas penunjangnya yang telah selesai dibangun di atas lahan seluas 1.584 m2 diserahkan kembali dan menjadi milik/dikuasai Pemda untuk selanjutnya ditempati para Pedagang Pasar Kameloh yang lama, dan
- b. Bangunan rumah toko, blok toko, dan plaza pujasera beserta fasilitas lingkungannya di atas lahan seluas 7.924 m2 dikelola oleh PT BBM dengan masa kontrak pengelolaan lahan selama 20 Tahun yang berlaku sejak terbitnya Surat Keputusan Pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 644.142-142 yaitu tanggal 24 Februari 1997 dan berakhir di tanggal 24 Februari 2017. Atas pengelolaan tersebut diberikan kuasa Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 Tahun yang berlaku sejak 5 Juli 1997 dan berakhir di tanggal 5 Juli 2017. Bangunan/HGB tersebut bisa dijual/dialihkan kepada pihak lain dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Palangka Raya dan hanya dapat dilakukan selama dan tidak melebihi 20 tahun masa HGB. Setelah 20 Tahun masa HGB berakhir, tanah dan bangunan yang dikelola PT BBM dan penggantinya langsung beralih dan menjadi milik dan dikuasai kembali oleh Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa ada proses tertentu dan persyaratan lain yang menjadi beban Pemda.
- c. Pada tanggal 24 Februari 2017 dan 5 Juli 2017, kontrak pengelolaan lahan seluas 7.924 m2 dan HGB-nya berakhir dan tidak ada permohonan perpanjangan HGB

sehingga Bangunan rumah toko, blok toko, dan plaza pujasera beserta fasilitas lingkungannya di atasnya langsung beralih dan menjadi milik dan dikuasai kembali oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa PT BI merupakan salah satu pihak yang membeli/menguasai bangunan/HGB delapan bidang seluas 1.850,50 m² dari lahan 7.924 m² dari PT BBM/pihak lain yang Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah berakhir dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2 Daftar HGB dengan PT BI

No	Sertifikat Tanah	Luasan (m ²)	Jangka Waktu Pengelolaan/HGB
1	HGB Nomor 2707 Kelurahan Langkai	494,00	Telah Berakhir 24 September 2024
2	HGB Nomor 2723 Kelurahan Langkai	40,00	Telah Berakhir 5 Juli 2017
3	HGB Nomor 2724 Kelurahan Langkai	10,50	Telah Berakhir 5 Juli 2017
4	HGB Nomor 2725 Kelurahan Langkai	10,50	Telah Berakhir 5 Juli 2017
5	HGB Nomor 2726 Kelurahan Langkai	10,50	Telah Berakhir 5 Juli 2017
6	HGB Nomor 2727 Kelurahan Langkai	10,50	Telah Berakhir 5 Juli 2017
7	HGB Nomor 2799 Kelurahan Langkai	10,50	Telah Berakhir 5 Juli 2017
8	HGB Nomor 2811 Kelurahan Langkai	1.264,00	Telah Berakhir 5 Juli 2017
Total Luasan		1.850,50	

Sejak berakhirnya HGB/pengelolaan lahan, PT BI tetap mengoperasikan delapan bidang tanah beserta bangunan di atasnya untuk BDS tanpa adanya kesepakatan sewa-menyewa atas pemanfaatan aset BMD tersebut.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya tanggal 27 April 2022 mengenai Penilaian Sewa Tanah dan Bangunan BDS diketahui bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan beberapa upaya untuk optimalisasi aset tersebut melalui mekanisme sewa dengan BDS. Upaya tersebut antara lain dengan menugaskan Kantor Jasa Penilai Publik RD dan Rekan untuk melakukan penilaian terhadap indikasi nilai sewa. Berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai diperoleh tanah dan bangunan masing-masing seluas 1.879 m² dan 1.790 m² yang digunakan PT BI di atas tanah Pemerintah Kota Palangka Raya. Sebagai unit kerja pengelola pajak dan retribusi daerah, BPPRD juga melakukan penilaian mandiri atas nilai sewa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. Adapun hasil penilaian sewa oleh Kantor Jasa Penilai dan Penilaian mandiri BPPRD sebagai berikut.

Tabel 3 Opsi Nilai Sewa BDS

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Opsi Nilai Sewa per Tahun
1	Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik	429.000.000,00
2	Penilaian BPPRD sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007	425.000.000,00
3	Penilaian BPPRD berdasarkan <i>Capitalization Rate</i> metode perhitungan ke-1	481.000.000,00
4	Penilaian BPPRD berdasarkan <i>Capitalization Rate</i> metode perhitungan ke-2	227.500.000,00
5	Penilaian BPPRD berdasarkan <i>Capitalization Rate</i> metode perhitungan ke-3	196.000.000,00

Sekretaris Daerah dan DPKUKMP juga telah melakukan berbagai upaya sejak tanggal 3 Februari 2021 hingga tahun 2024 dalam rangka penyelesaian penetapan nilai sewa. Salah satu upaya pada tahun 2024 adalah dengan pengiriman surat oleh Kepala DPKUKMP dengan Nomor 500.2/18/DPKKMP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Pemberitahuan dan Tagihan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masih mengacu kepada opsi penetapan sewa sesuai dengan penilaian BPPRD dengan nilai sewa paling rendah adalah Rp196.000.000,00 per tahun. Hanya saja nilai sewa per tahun ini belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun SK Wali Kota tentang Penetapan Besaran Nilai Sewa Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Subbagian Tata Usaha DPKUKMP yang menyatakan bahwa pada tahun 2024, PT BI masih memohon nilai sewa senilai Rp50.000.000,00 per tahun melalui surat Nomor 001/ACCT-BARATA/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian.

Berdasarkan hasil analisis dokumen persuratan antara Pemerintah Kota Palangkaraya dengan PT BI diperoleh informasi bahwa PT BI telah melakukan permohonan keringanan sebagai berikut.

- a. Tanggal 28 April 2021 mengirim surat kepada Wali Kota Palangka Raya perihal permohonan keringanan sewa senilai seperti tarif perjanjian Hak Pengelolaan yang sebelumnya yaitu Rp5.500.000,00 per tahun;
- b. Tanggal 24 Januari 2022 mengirim surat kepada Wali Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa meminta keringanan sewa senilai Rp35.800.000,00 per tahun;
- c. Tanggal 14 Februari 2022 mengirim surat kepada Wali Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa memohon keringanan sewa senilai Rp50.000.000,00 per tahun; dan
- d. Tanggal 26 Mei 2023 mengirim surat kepada Wali Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa memohon keringanan sewa senilai Rp50.000.000,00 per tahun.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada perwakilan dari PT BI di Palangka Raya, PT BI menyatakan bahwa bersedia membayar sewa Rp50.000.000,00 per tahun dimulai di tahun 2025 serta meminta kontrak sewa langsung dibuat lima tahun ke depan dan sewa dibayar pertahun. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Pemerintah Kota Palangka Raya belum bersepakat dengan Pemilik BDS Palangka Raya dan belum membuat keputusan penetapan atas nilai sewa untuk delapan objek/lahan tersebut sejak berakhirnya tujuh HGB pada tanggal 5 Juli 2017 dan satu HGB pada tanggal 24 September 2024 untuk pemerolehan penerimaan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan/pelayanan tempat kegiatan usaha.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;

b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

- 1) Pasal 76 yang menyatakan bahwa penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Pasal 77 yang menyatakan bahwa tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 3) Pasal 126:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya;
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - (1) kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - (2) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - (3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - (4) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - (5) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
 - c) ayat (4) yang menyatakan bahwa pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha belum diterima dan berisiko tidak tertagih minimal senilai Rp1.372.000.000,00 (Rp196.000.000,00 x 7) selama tujuh tahun sejak tahun 2017 s.d. 31 Desember 2024.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah Kota Palangka Raya belum optimal dalam upaya menemukan jalan tengah agar pendapatan retribusi jasa usaha dari PT BI tidak hilang ; dan

- b. Pemerintah Kota Palangka Raya belum mengatur tarif Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh PT BI pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun peraturan turunannya.

Atas Permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala DPKUKMP menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya akan memanggil pihak PT BI untuk mengkomunikasikan dan mencari jalan tengah terkait nilai sewa tanah bangunan BDS Cabang Palangka Raya.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar menyepakati dan kemudian menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh PT BI.

B. Belanja

1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara pada 13 SKPD Tidak sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 menganggarkan Belanja Pegawai pada LRA senilai Rp609.021.000.651,00 dengan realisasi senilai Rp584.810.451.366,00 atau 96,02% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	357.118.393.091,00	342.003.060.625,00	95,77
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	146.054.890.338,00	142.194.340.476,00	97,36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.719.106.564,00	83.959.813.186,00	94,64
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.670.680.911,00	15.513.122.032,00	98,99
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	480.801.747,00	190.315.047,00	39,58
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	778.528.000,00	751.200.000,00	96,49
Belanja Pegawai BLUD	198.600.000,00	198.600.000,00	100,00
Jumlah	609.021.000.651,00	584.810.451.366,00	96,02

Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN diketahui terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada 13 SKPD senilai Rp105.515.072,00 yang terdiri dari kelebihan pembayaran tunjangan suami/istri, tunjangan fungsional/umum, tunjangan anak dan beras senilai Rp87.810.800,00 (Rp13.435.820,00+Rp24.667.000,00+Rp49.707.980,00), serta kelebihan pembayaran gaji atas pegawai yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan pegawai yang sedang diberhentikan sementara senilai Rp17.704.272,00 (Rp8.381.600,00+Rp9.322.672,00). Atas kelebihan pembayaran tersebut, terdapat PNS yang telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp42.216.366,00 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran gaji yang belum selesai ditindaklanjuti senilai Rp63.298.706,00 dengan penjelasan lebih rinci sebagai berikut.

a. Pembayaran Tunjangan Suami/Istri kepada pegawai yang telah bercerai pada empat SKPD

Tunjangan Suami/Istri adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang telah berkeluarga. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan suami/istri adalah:

- 1) Diberikan untuk 1 (satu) suami/istri pegawai negeri yang sah;
- 2) Besarnya tunjangan suami/istri adalah 10% dari gaji pokok;
- 3) Tunjangan suami/istri diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia; dan
- 4) Untuk memperoleh tunjangan suami/istri harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Hasil pemeriksaan atas data pegawai yang telah bercerai pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), dan Sekretariat Daerah diketahui terdapat kelebihan pembayaran tunjangan suami/istri senilai Rp13.435.820,00 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp4.863.660,00, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran senilai Rp8.572.160,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 Kelebihan Pembayaran Tunjangan Suami/Istri Pegawai yang Telah Bercerai

(dalam rupiah)

No	Nama Pegawai	Nama SKPD	Dibayarkan	Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	f = d - e	g	h = f - g
1	R	Dinas Pendidikan	6.601.740	1.738.080	4.863.660,00	4.863.660,00	0,00
2	IS	Dinas Kesehatan	2.132.790	651.780	1.481.010,00	0,00	1.481.010,00
3	TI	Bappedalitbang	1.494.640	434.520	1.060.120,00	0,00	1.060.120,00
4	BR	Sekretariat Daerah	1.194.400	289.680	904.720,00	0,00	904.720,00
5	MA	Sekretariat Daerah	7.081.650	1.955.340	5.126.310,00	0,00	5.126.310,00
Jumlah			18.505.220	5.069.400	13.435.820,00	4.863.660,00	8.572.160,00

Hasil permintaan keterangan kepada Pengelola Gaji pada masing-masing SKPD menyatakan bahwa kelebihan pembayaran terjadi karena pegawai yang bersangkutan belum melaporkan bukti berupa akta cerai atau akta kematian sebagai dasar dalam penghentian pembayaran tunjangan.

b. Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional lebih dari enam bulan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar pada dua SKPD

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pegawai negeri untuk dapat melanjutkan perkuliahan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai PNS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS, disebutkan Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi:

- 1) Gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau Lembaga Pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut yang membahas mengenai tunjangan umum dan tunjangan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa bagi PNS dengan jangka waktu tugas belajar lebih dari enam bulan, maka tunjangan umum dan fungsional dihentikan terhitung bulan ketujuh.

Hasil pemeriksaan atas pembayaran gaji dan tunjangan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diketahui terdapat pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional yang masih dibayarkan kepada pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari enam bulan senilai Rp24.667.000,00 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp3.597.000,00, sehingga yang masih belum ditindaklanjuti senilai Rp21.070.000,00 dengan rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum/Fungsional atas Pegawai yang Sedang Tugas Belajar

(dalam rupiah)

No	Nama Pegawai	Dibayarkan	Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e = c - d	f	g = e - f
A Dinas Kesehatan						
1	N	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2	YT	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
3	YLA	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
4	A	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
5	M	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
6	SW	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7	SA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
8	H	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
9	IK	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
10	SR	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
11	H	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
Subtotal A		21.070.000,00	0,00	21.070.000,00	0,00	21.070.000,00
B Dinas Pendidikan						
1	KS	3.597.000,00	0,00	3.597.000,00	3.597.000,00	0,00
Subtotal B		3.597.000,00	0,00	3.597.000,00	3.597.000,00	0,00
Total (A + B)		24.667.000,00	0,00	24.667.000,00	3.597.000,00	21.070.000,00

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pengelola gaji SKPD terkait menyatakan bahwa kelebihan pembayaran tunjangan terjadi karena belum adanya surat keputusan penghentian jabatan fungsional yang menjadi dasar dalam penghentian pembayaran tunjangan pegawai.

c. Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras atas anak yang berusia di atas 21 tahun tanpa Surat Keterangan Sekolah/Kuliah dan anak yang berusia di atas 25 tahun pada 13 SKPD

Tunjangan Anak diberikan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak senilai 2% dari gaji pokok masing-masing pegawai. Batas Umur anak tersebut dapat diperpanjang dari 21 tahun sampai dengan umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah dengan menunjukkan Surat Keterangan Aktif Sekolah/Kuliah (SKAS/K) dari sekolah/kampus anak Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan atas data Surat Mahasiswa Aktif dengan data pencairan tunjangan keluarga dan tunjangan beras diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas tunjangan anak dan beras senilai Rp27.054.518,00 atas pegawai yang memiliki anak berusia lebih dari 21 tahun dan tidak dapat menunjukkan surat aktif mahasiswa/sekolah, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 1**.

Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras atas pegawai yang memiliki anak berusia lebih dari 25 tahun senilai Rp22.653.462,00 dengan rincian disajikan pada **Lampiran 2**. Rekapitulasi kelebihan pembayaran tunjangan anak yang berusia lebih dari 21 tahun dan lebih dari 25 tahun sebagai berikut.

Tabel 7 Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah SKPD	Jml Pegawai (Orang)	Kelebihan Tunjangan Anak	Kelebihan Tunjangan Beras	Total Kelebihan Bayar
1	Pegawai yang memiliki anak berumur > 21 tahun tidak memiliki Surat Mahasiswa Aktif	12	19	14.598.278,00	12.456.240,00	27.054.518,00
2	Pegawai yang memiliki anak berumur > 25 tahun	6	19	12.514.662,00	10.138.800,00	22.653.462,00
Jumlah						49.707.980,00

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Petugas Subbidang Umum dan Kepegawaian SKPD diketahui bahwa kelebihan pembayaran tunjangan anak terjadi karena pegawai yang bersangkutan tidak menyampaikan *update* data KP4. Subbidang Umum dan kepegawaian SKPD terkait juga tidak melakukan pengecekan secara berkala mengenai data keluarga masing-masing pegawai.

Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp25.374.106,00, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan nilai Rp24.333.874,00.

d. Pembayaran Gaji atas pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara

Cuti di Luar Tanggungan Negara merupakan cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat lima tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak. Cuti di Luar Tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Selama menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Hasil pemeriksaan atas data pegawai pada Dinas Pendidikan diketahui terdapat pegawai atas nama Sdr. ASR yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan yang bersangkutan masih menerima gaji dan tunjangan. Adapun kelebihan pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat tersebut senilai Rp8.381.600,00. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Sdr. ASR senilai Rp8.381.600,00.

e. Pembayaran Gaji atas pegawai yang diberhentikan sementara pada Dinas Kesehatan

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan dan tidak diberikan penghasilan. Namun, mendapatkan uang pemberhentian sementara senilai 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 863/12/BKPSDM.PK2PA.02/I/2025 menetapkan pegawai atas nama Sdr. RK pada Dinas Kesehatan diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai bulan Agustus 2024.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran gaji dan permintaan keterangan kepada pengelola gaji pada Dinas Kesehatan diketahui Sdr. RK masih menerima 100% gaji dan tunjangan yang melekat di bulan September s.d. Desember 2024 senilai Rp9.322.672,00.

Berdasarkan keterangan Pengelola Gaji pada Dinas Pendidikan, kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena surat keputusan mengenai pemberhentian sementara yang menjadi dasar pemotongan pembayaran gaji baru diterbitkan pada tahun 2025. Hal tersebut menyebabkan pengelola gaji tidak menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan melekat.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada:
 - 1) Pasal 276 huruf (c) yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

- 2) Pasal 281:
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;
 - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan senilai 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) ayat (4) yang menyatakan bahwa uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan pemberhentian sementara;
- 3) Pasal 335 ayat (1) yang menyatakan bahwa cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
- 4) Pasal 337 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS pada Pasal 16:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kepada PNS yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami senilai 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak senilai 2% dari gaji pokok tiap-tiap anak;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah;
- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional pada Pasal 9:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 dihentikan Tunjangan Fungsionalnya terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh);
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan Fungsional bagi PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam JF oleh Pejabat yang Berwenang dan telah melaksanakan tugas kembali.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp63.298.706,00 yang terdiri dari:

- a. Kelebihan pembayaran tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan suami/istri serta tunjangan anak dan tunjangan beras senilai Rp53.976.034,00 (Rp8.572.160,00 + Rp21.070.000,00 + Rp24.333.874,00); dan
- b. Kelebihan pembayaran gaji senilai Rp9.322.672,00 atas pegawai yang diberhentikan sementara.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada SKPD terkait belum optimal dalam monitoring data kepegawaian dan berkoordinasi dengan Pembuat daftar gaji untuk melaporkan perubahan status pegawai (perceraian, tanggungan anak, cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar) kepada BPKAD untuk penyesuaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; dan
- b. BPKAD belum memiliki mekanisme untuk dapat melakukan monitoring atas anak ASN yang berusia 21 s.d. 25 tahun serta diatas 25 tahun sebagai bahan untuk melakukan pemutakhiran data KP4 pegawai pada masing-masing SKPD.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk:

- a. Memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp63.298.706,00; dan
- b. Menginstruksikan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melakukan monitoring data kepegawaian dan berkoordinasi dengan Pembuat Daftar Gaji untuk melaporkan perubahan status pegawai antara lain perceraian, tanggungan anak, cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar kepada BPKAD untuk penyesuaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

2. Realisasi Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa pada LRA senilai Rp522.915.095.415,00 dengan realisasi senilai Rp475.404.126.994,33 atau 90,91%. Realisasi tersebut diantaranya diperuntukkan Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia senilai Rp2.870.777.500,00 dan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp3.918.210.000,00. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran honorarium yang tidak sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 senilai Rp285.899.250,00 dan telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp121.088.750,00 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp164.810.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas tidak sesuai ketentuan

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual dan dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. Hasil pemeriksaan atas pembayaran honorarium Narasumber atau Pembahas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium narasumber atau pembahas yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sdr. BY dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8 Kelebihan Pembayaran atas Honorarium Narasumber atau Pembahas

(dalam rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Honorarium Dibayarkan	Honorarium Seharusnya	Potongan Pajak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	$f = c - d - e$	g	$h = f - g$
1	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat di Kec. Jekan Raya Melalui Edukasi dan Sosialisasi (ASI) oleh BKBP Kota Palangkaraya	1.000.000,00	250.000,00	112.500,00	637.500,00	637.500,00	0,00
2	Sosialisasi Tahapan Pilkada di Kota Palangka Raya	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
3	Diskusi dan Doa Lintas Agama Menuju Pilkada Damai Menolak Intoleransi Tahun 2024	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
4	Sosialisasi "Partisipasi Pemilih Pemula, Ketentraman Menyampaikan Pendapat, Serta Konsekuensi Pelanggaran Hukum".	1.000.000,00	375.000,00	93.750,00	531.250,00	531.250,00	0,00
		4.000.000,00	625.000,00	506.250,00	2.868.750,00	2.868.750,00	0,00

b. Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan melebihi standar biaya yang berlaku dan tidak sesuai Perwali

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan guna melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan dengan ketentuan bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang

ditandatangani oleh kepala daerah dan antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Hasil pemeriksaan atas pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada 26 SKPD diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah dan telah dilakukan pembayaran honorarium kepada tim tersebut sesuai standar SK yang ditandatangani oleh Walikota senilai Rp232.187.500,00 dan telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp114.820.000,00, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp117.367.500,00, serta terdapat kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang hanya melibatkan internal SKPD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp41.225.000,00, rincian disajikan pada **Lampiran 3**.

Selain itu, diketahui terdapat pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada Badan Kesbangpol yang seharusnya merupakan panitia penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Atas ketidaksesuaian tersebut diketahui terdapat kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp1.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9 Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

(dalam rupiah)

No	Nama	Honorarium Dibayarkan	Honorarium Seharusnya	Selisih	Potongan Pajak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e = c - d	f	g = e - f	h	i = g - h
1	HN	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
2	BY	850.000,00	800.000,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
3	NN	750.000,00	600.000,00	150.000,00	22.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00
4	MJ	750.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00
5	ET	750.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00
6	LS	750.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00
7	BT	750.000,00	600.000,00	150.000,00	7.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00
Jumlah		6.100.000,00	4.700.000,00	1.400.000,00	150.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

c. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan melebihi batasan jumlah honorarium yang dapat diterima

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat ASN eselon II pada Badan Kesbangpol yang mendapatkan lebih dari dua kali pembayaran honorarium dalam Tim Pelaksana Kegiatan. Atas kelebihan pembayaran senilai Rp3.400.000,00 telah dilakukan tindak lanjut dengan menyetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp3.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10 Kelebihan Pembayaran Honorarium ASN Eselon II

(dalam rupiah)

No	Jumlah SK	Honorarium Dibayarkan	Honorarium Seharusnya	Selisih	Potongan Pajak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e = c - d	f	g = e - f	h	i = g - h
1	3	29.250.000,00	25.250.000,00	4.000.000,00	600.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Jumlah						3.400.000,00	3.400.000,00	0,00

d. **Pembayaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan melebihi standar biaya yang berlaku**

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan dan dapat dibentuk untuk menunjang tugas Tim Pelaksana Kegiatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pembayaran honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium kepada Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang melebihi standar biaya yang berlaku pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Kelebihan Pembayaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam rupiah)

No	Nama	Honorarium Dibayarkan	Honorarium Seharusnya	Selisih	Potongan Pajak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e = c - d	f	g = e - f	h	i = g - h
1	OT	1.950.000,00	750.000,00	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
2	NK	1.500.000,00	660.000,00	840.000,00	126.000,00	714.000,00	0,00	714.000,00
3	TAW	1.500.000,00	660.000,00	840.000,00	42.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00
4	DRA	1.500.000,00	660.000,00	840.000,00	42.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00
5	WV	1.500.000,00	660.000,00	840.000,00	42.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00
6	ASR	1.500.000,00	660.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Jumlah		9.450.000,00	4.050.000,00	5.400.000,00	432.000,00	4.968.000,00	0,00	4.968.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 pada:

- Lampiran 1.3 Honorarium Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan melampirkan materi paparan dengan

ketentuan diantaranya apabila narasumber atau pembahas berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka honorarium diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas;

- b. Lampiran 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa:

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan diantaranya ASN eselon II maksimal mendapatkan 2 (dua) honorarium dalam tim pelaksana kegiatan.

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium diantaranya bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; dan/atau
- Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Uraian		Satuan	Harga (Rp)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
1	Pengarah	OB	750.000
2	Penanggung Jawab	OB	700.000
3	Ketua	OB	650.000
4	Wakil Ketua	OB	600.000
5	Sekretaris	OB	500.000
6	Anggota	OB	500.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana			
Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2	Anggota	OB	220.000

- c. Lampiran 1.11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan huruf e yang menyatakan bahwa Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan

pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 2) Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 3) Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- 4) Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- 5) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp164.810.500,00 (Rp117.367.500,00 + Rp41.225.000,00 + Rp1.250.000,00 + Rp4.968.000,00).

Permasalahan tersebut disebabkan karena Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait dalam merealisasikan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan belum mempedomani ketentuan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai hasil temuan. Atas temuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan – Aplikasi Pajak, BPPRD belum sependapat dengan hasil temuan dengan penjelasan bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta perluasan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah juga untuk pelaksanaan rekonsiliasi secara *online* antara BPPRD dengan mitra kanal pembayaran pajak daerah (Bank BRI, Bank Kalteng, Bank SNI, Kantor Pos), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Instansi lain yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (BPN), PPAT dan Notaris se-Kota Palangka Raya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya perlu didukung dengan adanya aplikasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada masing-masing SKPD dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing senilai Rp41.225.000,00, Rp1.250.000,00, Rp4.968.000,00, dan Rp117.367.500,00.

3. Pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing senilai Rp522.915.095.415,00 dan Rp341.769.840.717,00 dengan realisasi masing-masing senilai Rp475.404.126.994,33 dan Rp327.997.382.474,45 atau 90,91% dan 95,97%. Dari jumlah realisasi tersebut, diantaranya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hasil pemeriksaan uji petik terhadap dokumen keuangan SPJ, SP2D, dan Kontrak antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan penyedia jasa konsultansi pengawasan diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- Tumpang tindih penggunaan personel jasa konsultansi konstruksi pada tiga SKPD senilai Rp123.663.648,00 (Rp62.562.528,00+Rp34.500.000,00+Rp26.601.120,00);
- Personel tidak terlibat dalam pekerjaan pada satu SKPD senilai Rp11.500.000,00;
- Personel tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak pada satu SKPD senilai Rp24.356.266,67; dan
- Pertanggungjawaban Biaya Langsung Non Personel (BLNP) pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan senilai Rp47.940.324,32 (Rp3.495.000,00+Rp4.360.505,00+Rp40.084.819,32).

Atas permasalahan tersebut terdapat kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan senilai Rp207.460.238,99. Lebih lanjut kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan senilai Rp172.960.238,99. Sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti senilai Rp34.500.00,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan

(dalam rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Nilai Sisa
a	b	c	d	e = c – d
A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Kelebihan pembayaran tumpang tindih personel	62.562.528,00	62.562.528,00	0,00
2	Kelebihan pembayaran personel tidak melaksanakan pekerjaan	24.356.266,67	24.356.266,67	0,00
3	Kelebihan pembayaran BNLP	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00
	Subtotal A	90.413.794,67	90.413.794,67	0,00
B	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan			
1	Kelebihan pembayaran tumpang tindih personel	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
2	Kelebihan pembayaran BNLP	4.360.505,00	4.360.505,00	0,00
	Subtotal B	38.860.505,00	4.360.505,00	34.500.000,00
C	Dinas Sosial			

No.	Perangkat Daerah	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Nilai Sisa
a	b	c	d	e = c - d
1	Kelebihan pembayaran tumpang tindih personel	26.601.120,00	26.601.120,00	0,00
	Subtotal C	26.601.120,00	26.601.120,00	0,00
D	Dinas Pendidikan			
1	Kelebihan pembayaran personel tidak terlibat dalam pekerjaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2	Kelebihan pembayaran BNLP	40.084.819,32	40.084.819,32	0,00
	Subtotal D	51.584.819,32	51.584.819,32	0,00
	Total (A + B + C + D)	207.460.238,99	172.960.238,99	34.500.000,00

Sisa kelebihan pembayaran tersebut dikarenakan tumpang tindih penggunaan personel jasa konsultansi pengawasan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan atas Paket Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket I) yang dilaksanakan oleh CV GPM atas satu personel dengan nilai kelebihan pembayaran senilai Rp34.500.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
 - 2) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya menyusun perencanaan pengadaan dan mengendalikan kontrak;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada:
 - 1) Lampiran V Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pada angka 2. Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha pada Bab. III, Huruf F angka 10.3 Evaluasi teknis pada huruf e. (3) yang menyatakan bahwa Kualifikasi tenaga ahli memenuhi persyaratan dan kompetensi yang dipersyaratkan, dan:
 - a) Dalam hal kontrak lumpsum, Pejabat Pengadaan memastikan apabila Pelaku Usaha menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket Pekerjaan lain/ yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditunjuk sebagai penyedia, apabila setelah dilakukan klarifikasi, Tenaga Ahli tersebut melaksanakan paling banyak 3 (tiga) paket pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dengan kontrak lumpsum termasuk yang sedang ditawarkan secara bersamaan; dan
 - b) Dalam hal kontrak waktu penugasan, Pejabat Pengadaan memastikan apabila Pelaku Usaha menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket

pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditunjuk sebagai penyedia, apabila setelah dilakukan klarifikasi, Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket pekerjaan tersebut;

- 2) Lampiran V Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pada Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha pada Bab. III, Huruf F. Penetapan yang menyatakan bahwa dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi lain/yang sedang berjalan, maka:
 - a) Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi;
 - b) Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan Tenaga Ahli tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada Tenaga Ahlinya dan dinyatakan gugur; dan
 - c) Ketentuan pada huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan: 1) apabila Tenaga Ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan/paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan, 2) apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, 3) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumpsom (paling banyak tiga paket), atau 4) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (*overlap*);
- 3) Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Non konstruksi Bagian 2.2.2 Proses poin b dan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Bab II Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi Bagian 2.2.2 Proses yang menyebutkan bahwa Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian. Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran jasa konsultansi pengawasan senilai Rp34.500.000,00; dan
- b. Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa khususnya dalam pengawasan personel jasa konsultansi pengawasan belum sepenuhnya tertib dan berpotensi berulang pada tahun berikutnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Pengadaan belum melakukan klarifikasi personel secara memadai kepada penyedia jasa untuk dapat memastikan ketidakterlibatan personel yang bersangkutan pada paket pekerjaan konsultansi lainnya; dan
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kurang cermat dalam verifikasi dan evaluasi atas bukti pembayaran dari penyedia serta kelengkapan dokumennya.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perkintan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala DPKUKMP menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk memproses kelebihan pembayaran jasa konsultansi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp34.500.000,00 yang dilaksanakan oleh CV GPM;
- b. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan supaya di masa yang akan datang memastikan keberadaan dan keterlibatan personel yang akan diajukan oleh penyedia jasa; dan
 - 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya melakukan verifikasi dan validasi secara memadai atas kelengkapan dan keabsahan bukti pembayaran dari penyedia.

4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa pada LRA senilai Rp522.915.095.415,00 dengan realisasi senilai Rp475.404.126.994,33 atau 90,91%. Realisasi tersebut diantaranya diperuntukkan Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp80.160.726.719,25.

Pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Biaya perjalanan dinas tersebut terdiri atas komponen uang harian (uang saku, uang makan dan uang transport lokal), biaya transportasi yang meliputi darat, udara, laut dan sungai, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan luar daerah.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas diketahui terdapat realisasi pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil tanpa didukung bukti

Hasil pemeriksaan atas surat pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah, DPKUKMP dan BPKAD diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban biaya transportasi darat pada DPKUKMP dan Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp368.579.800,00. Hal ini dikarenakan biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dibayar secara lumpsum dan bukti pertanggungjawaban hanya berupa lampiran Daftar Pengeluaran Riil (DPR) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 4**. Dari nilai tersebut, terdapat pertanggungjawaban biaya transport menggunakan DPR dengan tarif sebesar pagu satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri dari Kota Palangka Raya ke kota tujuan senilai Rp152.620.000,00 dan bukan sebesar biaya *at cost*.
- 2) Pertanggungjawaban biaya taksi pada BPKAD dan Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp121.862.000,00. Hal ini dikarenakan biaya taksi dibayar secara lumpsum dan bukti pertanggungjawaban hanya berupa lampiran Daftar Pengeluaran Riil (DPR) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 5**. Dari nilai tersebut, terdapat pertanggungjawaban biaya transport menggunakan DPR dengan tarif sebesar pagu satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri senilai Rp65.886.000,00 dan bukan sebesar biaya *at cost*.

Hasil telaah dokumen berupa Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diketahui bahwa diatur dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil. Peraturan Wali Kota tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai dokumentasi persyaratan akibat bukti rusak, hilang, dan/atau tidak diperoleh seperti surat pernyataan rusak/hilang dari kepolisian serta bukti eksistensi/foto dokumentasi pelaksanaan perjalanan dinas.

b. Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai Peraturan Wali Kota

Hasil pengujian atas bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas secara uji petik terhadap enam SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Kelebihan pembayaran uang penginapan pada Sekretariat Daerah dan DPKUKMP senilai Rp2.800.300,00, dikarenakan pembayaran uang penginapan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang terkonfirmasi tidak menginap. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp1.363.600,00 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran senilai Rp1.436.700,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13 Kelebihan Pembayaran Uang Penginapan

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Nama	Dibayarkan	Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	f = d - e	g	h = f - g
1	Sekretariat Daerah	BR	688.000,00	209.100,00	478.900,00	0,00	478.900,00
2	Sekretariat Daerah	RQ	688.000,00	209.100,00	478.900,00	0,00	478.900,00
3	Sekretariat Daerah	SEL	688.000,00	209.100,00	478.900,00	0,00	478.900,00
4	DPKUKMP	DEN	1.100.000,00	418.200,00	681.800,00	681.800,00	0,00
5	DPKUKMP	RAM	1.100.000,00	418.200,00	681.800,00	681.800,00	0,00
Jumlah			4.264.000,00	1.463.700,00	2.800.300,00	1.363.600,00	1.436.700,00

- 2) Kelebihan pembayaran senilai Rp280.000,00 atas penugasan lebih dari satu kali atas personel yang sama dan pada waktu yang bersamaan namun dibayarkan sesuai penugasan pada Dinas PUPR. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp280.000,00.

Tabel 14 Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas Penugasan Ganda Telah Ditindaklanjuti

(dalam rupiah)

No	Nama Pelaksana	Dibayarkan	Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e = c - d	f	g = e - f
1	C	2.680.000,00	2.540.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2	AP	2.680.000,00	2.540.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Jumlah		5.360.000,00	5.080.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00

- 3) Pembayaran dilakukan atas komponen yang seharusnya tidak dapat dibebankan diantaranya asuransi, kursi, jaminan pengembalian dana pada BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD senilai Rp19.957.420,00 dan telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp9.798.112,00 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran senilai Rp10.159.308,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 15 Kelebihan Bayar atas Pembayaran yang Tidak Termasuk dalam Komponen yang Seharusnya Dibiayai

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e = c - d
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	982.501,00	982.501,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	414.300,00	414.300,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	625.138,00	0,00	625.138,00
4	Sekretariat Daerah	9.534.170,00	0,00	9.534.170,00
5	Sekretariat DPRD	8.401.311,00	8.401.311,00	0,00
Jumlah		19.957.420,00	9.798.112,00	10.159.308,00

Atas sisa kelebihan pembayaran yang belum dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah disajikan pada **Lampiran 6**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada:
 - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban;
 - 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah angka 3 Kebijakan Belanja Daerah dimaksud meliputi huruf a. Belanja Operasi pada angka 2) Belanja Barang dan Jasa huruf c) yang menyatakan bahwa kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan diantaranya belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan, meliputi penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) atau lumpsum,
 - 1) Uang harian sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), terdiri atas:
 - a) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan;
 - b) Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan

- dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri;
- c) Biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama;
 - d) Biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (1) Biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - (2) Biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal;
 - (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya;
 - e) Biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2023 Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya pada:
- 1) Pasal 23 yang menyatakan bahwa tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan 2 (dua) atau lebih SPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama;
 - 2) Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a) Format laporan hasil perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - c) SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksana perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e) Surat tugas mendampingi bagi pendamping dan/atau ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;

- f) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan luar daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
- g) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan luar daerah yang tempat tujuannya sulit/tidak terdapat angkutan umum berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
- h) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- i) Surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi pendamping dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tertib administrasi dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum sepenuhnya tercapai; dan
- b. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp11.596.008,00 (Rp1.436.700,00 + Rp10.159.308,00).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 belum mengatur secara rinci persyaratan penggunaan Daftar Pengeluaran Riil dalam rangka pertanggungjawaban secara *at cost* sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran tiap SKPD belum optimal dalam melakukan verifikasi, validasi kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; dan
- c. Pelaksana perjalanan dinas tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang valid kepada Bendahara Pengeluaran.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPKUKMP, Sekretaris Daerah, serta Sekretaris DPRD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing senilai Rp10.970.870,00 dan Rp625.138,00; dan
- b. Mengevaluasi dan menyelaraskan Peraturan Wali Kota tentang perjalanan dinas dengan ketentuan yang berlaku dan menguraikan teknis penggunaan dokumen Daftar Pengeluaran Riil pada pertanggungjawaban perjalanan dinas.



5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Kontrak

Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp522.915.095.415,00 dengan realisasi senilai Rp475.404.126.994,33 atau 90,91%. Realisasi tersebut diantaranya sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	122.867.862.739,90	117.327.856.972,14	95,49
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.409.583.321,00	27.067.848.037,84	98,75

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) diketahui volume dan spesifikasi teknis pekerjaan terpasang tidak sesuai kontrak pada empat paket senilai Rp41.634.687,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah oleh penyedia senilai Rp41.634.687,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17 Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Kontrak

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nilai Kontrak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	f = d - e
A	Dinas PUPR				
1	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Gudang Barang Bukti serta Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Palangka Raya	6.636.336.882,72	27.224.905,00	27.224.905,00	0,00
2	Pembangunan Fasilitas Kantor Kejari Palangka Raya (Lanjutan)	1.897.340.000,00	8.903.830,00	8.903.830,00	0,00
3	Pembangunan Gedung Rumah Tahanan dan Gedung Satnarkoba Polresta Palangka Raya	4.654.035.594,00	4.385.952,00	4.385.952,00	0,00
	Subtotal A	13.187.712.476,72	40.514.687,00	40.514.687,00	0,00
B	Dinas Perkimtan				
1	Pembangunan Gereja Yudea Jalan Strawberry	1.348.000.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	Subtotal B	1.348.000.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	Total (A + B)	14.535.712.476,72	41.634.687,00	41.634.687,00	0,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf i PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan Kontrak; dan
 - 2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran III Bagian V. Pelaksanaan Kontrak Nomor 5.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada huruf a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada masing-masing kontrak bagian prestasi pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa:
 - 1) Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh KPA/PPK; dan
 - 2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi, dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya;

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkimtan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal

melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.

6. Pengelolaan Belanja Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 menganggarkan Belanja Hibah pada LRA senilai Rp68.566.771.687,00 dengan realisasi senilai Rp61.498.073.179,00 atau 89,69%.

Pengelolaan Belanja Hibah Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Palangka Raya dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan dan realisasi Belanja Hibah secara uji petik pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga diketahui data realisasi belanja hibah sebagai berikut.

Tabel 18 Data Realisasi Belanja Hibah

No	SKPD	Penerima Hibah	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Dewan Kesenian Daerah Kota Palangka Raya (DKPR)	4.445.000.000,00
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Palangka Raya	1.700.000.000,00
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Kwartir Cabang 1511 Gerakan Pramuka Kota Palangka Raya	450.000.000,00
Jumlah			6.595.000.000,00

Atas realisasi tersebut diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Realisasi belanja perjalanan dinas, honorarium panitia, moderator dan pembawa acara belum menggunakan standar biaya umum yang berlaku

Realisasi pencairan dana hibah pada Dewan Kesenian Daerah Kota Palangka Raya (DKPR) adalah senilai Rp4.445.000.000,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dan pengujian atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dewan Kesenian Daerah Kota Palangka Raya (DKPR) diketahui terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas dan honorarium panitia, moderator dan pembawa acara yang melebihi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 masing-masing senilai Rp16.120.000,00 dan Rp56.800.000,00, rincian disajikan pada **Lampiran 7 dan Lampiran 8**.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada penerima hibah diketahui bahwa penerima hibah tidak mengetahui adanya Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan realisasi dana hibah.

b. Realisasi belanja hibah tidak sesuai kondisi senyatanya senilai Rp11.500.000,00

Pengujian atas penggunaan dana hibah pada Dewan Kesenian Daerah Kota Palangka Raya (DKPR) dilakukan dengan konfirmasi kepada penerima akhir dana hibah, dalam hal ini *talent* yang diundang untuk mengisi kegiatan atau *event* yang diadakan oleh DKPR. Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa terdapat pembayaran jasa *talent* yang tidak sesuai kondisi senyatanya senilai Rp11.500.000,00 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp11.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19 Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya (dalam rupiah)

No	Nama	Kegiatan/Event	Selisih Nilai di SPJ dan Diterima Senyatanya	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
1	ZN	CFD Olah Raga Olah Seni Ceria #1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2	ZN	CFD Olah Raga Olah Seni Ceria #2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3	AE	Support Panggung Hiburan pada ISSI Criterium Sabaru Palangka Raya 2024	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4	DN	Pagelaran Tari Panamuei 2024	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5	DN	Kegiatan Hasupa Hasundau Pemkot Palangka Raya dengan Damang Kepala Adat dan Mantir Adat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Jumlah			11.500.000,00	11.500.000,00	0,00

c. Terdapat realisasi belanja hibah yang tidak sesuai usulan hibah

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada Dewan Kesenian Daerah Kota Palangka Raya (DKPR), Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Palangka Raya, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Palangka Raya diketahui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan dana hibah tidak sesuai usulan hibah pada Dewan Kesenian Palangka Raya (DKPR) senilai Rp71.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20 Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Usulan Hibah

No	Uraian Kegiatan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Gaji Tenaga Administrasi	66.000.000,00	Usulan hibah untuk 2 orang, realisasi untuk 4 orang.
2	Insentif Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah	5.000.000,00	Tidak ada dalam usulan hibah
Jumlah		71.000.000,00	

- 2) Terdapat perubahan kegiatan yang belum ada dalam NPHD pada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Palangka Raya dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Palangka Raya, hal terjadi dengan ringkasan masalah sebagai berikut.

Tabel 21 Rincian Realisasi Dana Hibah yang Tidak Ada dalam Usulan Hibah

No	Penerima Hibah	Uraian Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Palangka Raya	Ekspedisi Tunas Muda Borneo	30.620.000,00
		Pelatihan Pemadam Kebakaran dan P3K	69.405.000,00
		PAW Dewan Kerja Cabang	10.000.000,00
		Kegiatan Kemah Budaya Cabang se-Kabupaten Pulang Pisau	16.245.000,00
		Pemeriksaan Kesehatan	36.315.000,00
		Jota Joti 2024	29.392.000,00
		Kunjungan Menghadiri Undangan Giat Prestasi Penegak Legenda si Karana DKC Banjar Baru	17.245.000,00
2	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Palangka Raya	Kegiatan Hari Batik 2024	118.420.000,00
		Kegiatan Gelar Kriya dan Wastra	55.412.500,00
Jumlah			383.054.500,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi pada Pasal 16 pada:
 - 1) ayat (5) yang menyatakan bahwa tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kompensasi berupa gaji yang bersumber yang bersumber dari pendanaan organisasi diluar dari bantuan pemerintah anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 2) ayat (6) yang menyatakan bahwa ketua pengurus beserta perangkat Organisasi Olahraga lingkup Olahraga Prestasi tidak mendapatkan gaji yang bersumber dari bantuan pemerintah anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya pada:
 - 1) Pasal 8 huruf a yang menyatakan bahwa pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pasal 23:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - (1) huruf a. laporan penggunaan hibah;

- (2) huruf b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- (3) huruf c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa.

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) masing-masing penerima hibah pada:

1) Pasal 3:

- a) ayat (2) yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) ayat (3) yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak kedua diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 disertai bukti-bukti transaksi penggunaan dana hibah dimaksud.

3) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila pihak kedua tidak memenuhi persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi belanja perjalanan dinas, honorarium panitia, moderator dan pembawa acara berisiko membebani keuangan daerah; dan
- b. Realisasi belanja hibah yang tidak sesuai usulan hibah senilai Rp454.054.500,00 (Rp71.000.000,00+Rp383.054.500,00) berisiko tidak dipergunakan sesuai tujuan hibah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah; dan
- b. Penerima hibah tidak menjalankan kewajibannya terkait penggunaan dana hibah sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dewan Kesenian Palangka Raya bersedia melakukan pengembalian dana tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga untuk menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

7. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kontrak

Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 menganggarkan Belanja Modal senilai Rp341.769.840.717,00 dengan realisasi senilai Rp327.997.382.474,45 atau 95,97%. Realisasi tersebut diantaranya diperuntukkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp121.569.959.253,32.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Palangka Raya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Perkintan diketahui volume dan spesifikasi pekerjaan terpasang tidak sesuai kontrak pada 12 (dua belas) paket pekerjaan senilai Rp487.096.629,67. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah oleh penyedia senilai Rp487.096.629,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22 Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Kontrak

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nilai Kontrak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	f = d - e
A	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya				
1	Pembuatan Videotron (RSUD)	575.000.000,00	9.978.148,08	9.978.148,08	0,00
2	Pembangunan Gedung Perawatan VIP (RSUD)	3.421.000.000,00	37.295.662,57	37.295.662,57	0,00
3	Pembangunan Gedung Hemodialisis (RSUD)	5.990.000.000,00	65.311.049,03	65.311.049,03	0,00
	Subtotal A	9.986.000.000,00	112.584.859,68	112.584.859,68	0,00
B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor DPMPTSP Kota Palangka Raya	647.288.200,00	18.110.000,00	18.110.000,00	0,00
	Subtotal B	647.288.200,00	18.110.000,00	18.110.000,00	0,00
C	Dinas Pendidikan				
1	Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN 8 Panarung	4.897.000.000,00	57.661.319,90	57.661.319,90	0,00
2	Pembangunan RKB Bertingkat SDN 3 Kereng Bangkirai	2.188.210.150,00	17.579.643,35	17.579.643,35	0,00
3	Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN 14 Palangka	3.172.000.000,00	36.919.600,44	36.919.600,44	0,00
4	Pembangunan Gedung Aula dan Ruang Pengawas Dinas Pendidikan	3.958.000.000,00	24.723.157,81	24.723.157,81	0,00

No	Perangkat Daerah	Nilai Kontrak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	f = d - e
5	Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Palangka Raya	6.557.000.000,00	40.698.641,56	40.698.641,56	0,00
6	Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Lamtorogung	5.937.780.047,00	40.775.964,44	40.775.964,44	0,00
	Subtotal C	26.709.990.197,00	218.358.327,50	218.358.327,50	0,00
D	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palangka Raya (Lanjutan)	4.813.468.000,00	9.185.825,50	9.185.825,50	0,00
	Subtotal D	4.813.468.000,00	9.185.825,50	9.185.825,50	0,00
E	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1	Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan X)	7.740.000.000,00	128.857.616,99	128.857.616,99	0,00
	Subtotal E	7.740.000.000,00	128.857.616,99	128.857.616,99	0,00
Total (A + B + C + D + E)		49.896.746.397,00	487.096.629,67	487.096.629,67	0,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf i PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan Kontrak; dan
 - 2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran III Bagian V. Pelaksanaan Kontrak Nomor 5.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada huruf a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam

Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;

- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada masing-masing kontrak bagian prestasi pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa:
- 1) Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh KPA/PPK; dan
 - 2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- b. Pemerintah Kota Palangka Raya berisiko menerima Aset Gedung dan Bangunan dengan volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana;

Permasalahan tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi, dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Direktur RSUD Kota Palangka Raya, DPMPTSP, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.

8. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dua SKPD Tidak Sesuai Kontrak

Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024 mengalokasikan Belanja Modal senilai Rp341.769.840.717,00 dengan realisasi senilai Rp327.997.382.474,45 atau 95,97%. Realisasi tersebut diantaranya diperuntukkan untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp154.589.854.012,13.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PUPR, dan Dinas Perkimtan diketahui volume dan spesifikasi pekerjaan terpasang tidak sesuai kontrak pada 22 (dua puluh dua) paket pekerjaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp1.124.802.911,60. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah oleh penyedia senilai Rp1.076.274.108,12, sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti senilai Rp48.528.803,48, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 23 Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Tidak Sesuai Kontrak**

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nilai Kontrak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	f = d - e
A	Dinas Perkimtan				
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kencana I, Jl. Kencana III, Jl. Kencana IV, Jl. Kencana V, Jl. Komplek Kehutanan, Jl. Rajawali V, Jl. Rajawali VI, Jl. Badak XIII, Gg. Dewi Sinta	3.966.906.872,00	6.381.146,67	6.381.146,67	0,00
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl. Jatayu menuju Mahir Mahar II, Jl. Bondol XVI, Jl. Bondol, Jl. Bondol XIV, Jl. Bondol XV, Jl. Bondol XIII, Jl. Bondol XI, Jl. Mahir Mahar II A, Jl. Bondol VI, Jl. Bondol Raya, Jl. Mahir Mahar IV	2.998.570.430,00	48.528.803,48	0,00	48.528.803,48
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. W. Soetedjo, Jl. Haka 28 Blok N-K, Jl. Candra Buana, Jl. Buncis, Perum Borneo Sejahtera, Kompl Green Borneo, Jl. Lewu Tatau III, Jl. Lewu Tatau VII	4.496.577.413,00	60.621.800,00	60.621.800,00	0,00
4	Peningkatan Jembatan Titian Jl. Arut Bawah	1.393.000.000,00	20.259.487,48	20.259.487,48	0,00
5	Pembangunan Jembatan Titian Jalan Basarah Kelurahan Pahandut Seberang	1.196.194.015,29	19.886.443,39	19.886.443,39	0,00
	Subtotal A	14.051.248.730,29	155.677.681,02	107.148.877,54	48.528.803,48
B	Dinas PUPR				
1	Pembangunan Drainase Kawasan Prioritas Rajawali dan Sekitarnya	4.383.280.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2	Pembangunan Drainase Jl. G. Obos V	1.380.999.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3	Pembangunan Drainase Kawasan Prioritas Temanggung Tilung dan Sekitarnya	5.947.884.000,00	28.201.001,95	28.201.001,95	0,00
4	Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Takaras Kamp Km. 70	6.356.000.000,00	42.194.118,00	42.194.118,00	0,00
5	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Trans Habaring Hurung	5.650.830.000,00	42.254.982,27	42.254.982,27	0,00
6	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jalan Ea Toewak	8.164.550.000,00	168.678.922,07	168.678.922,07	0,00
7	Peningkatan Jalan G. Obos XXV, Krisna, G. Obos XIXA, G. Obos XVI, Mawar, Borneo, G. Obos XVIIE, dan Jalan Tmg. Amay Rawang, Jalan Strawberry I, Strawberry IC, dan Jalan Pandohop	8.365.000.000,00	43.063.953,00	43.063.953,00	0,00
8	Peningkatan Jalan Temanggung Tilung V, Temanggung Tilung II, Temanggung Tilung XIX, Temanggung Tilung XXII, Jalan Menteng IX dan Jalan Menteng XX	7.980.921.516,00	62.131.393,50	62.131.393,50	0,00

No	Perangkat Daerah	Nilai Kontrak	Kelebihan Pembayaran	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
a	b	c	d	e	f = d - e
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Sangga Buana II, Sangga Buana II Selatan, Lawu, Bromo, dan Jalan Raden Saleh	4.334.000.000,00	7.718.985,00	7.718.985,00	0,00
10	Peningkatan Jalan Bukit Pararawen, Pararawen I, Tingang VIIIB, Bukit Raya XVI, Bukit Keminting X, Sarang Walet, Temanggung Jungkir Dan Jalan Sarang Pungau	2.883.000.000,00	5.977.505,02	5.977.505,02	0,00
11	Peningkatan Jalan Rawa Belut, Banteng XII, Banteng X, Banteng IX, dan Jalan Sapan Ujung	2.180.250.100,00	17.880.333,61	17.880.333,61	0,00
12	Peningkatan Jalan UPT 38 Tjilik Riwt Menuju Daerah Wisata Danum Bahandang	1.187.133.200,00	26.020.351,50	26.020.351,50	0,00
13	Peningkatan Jalan Veteran dan Kapur Naga I	1.288.970.000,00	1.659.707,74	1.659.707,74	0,00
14	Rehabilitasi Jalan Kiwi, Jalan Cucak Rowo, Jalan Sabaru, Jalan Garuda II, Jalan Garuda III, Jalan Garuda XI dan Jalan Bukit Raya XV	2.946.120.000,00	11.853.812,09	11.853.812,09	0,00
15	Peningkatan Jalan Badak Lurus, Jalan Badak XIII, Jalan Piranha IV dan Jalan Piranha I	1.386.600.000,00	7.514.278,29	7.514.278,29	0,00
16	Peningkatan Jalan Embang, Embang II, Menteng X, Menteng XII, Menteng V, dan Jalan Temanggung Tilung XV	1.985.000.000,00	23.749.536,65	23.749.536,65	0,00
17	Peningkatan Jalan Kalibata I, Kalibata V, Jalan Jogjakarta, Jalan Kalibata Induk dan Jalan Tampung Penyang	3.521.700.000,00	471.976.349,89	471.976.349,89	0,00
	Subtotal B	69.942.237.816,00	969.125.230,58	969.125.230,58	0,00
	Total (A + B)	83.993.486.546,29	1.124.802.911,60	1.076.274.108,12	48.528.803,48

Lebih lanjut sisa kelebihan pembayaran tersebut atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl Jatayu menuju Mahir Mahar II, Jl Bondol XVI, Jl Bondol, Jl Bondol XIV, Jl Bondol XV, Jl Bondol XIII, Jl Bondol XI, Jl Mahir Mahar II A, Jl Bondol VI, Jl Bondol Raya, Jl Mahir Mahar IV dilaksanakan oleh CV GP berdasarkan Kontrak Nomor 604/205.13/DPRKPP-PSU/KTRK/XI/2024 tanggal 11 November 2024 senilai Rp2.998.570.430,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 11 November 2024 sampai dengan 25 Desember 2024.

Kontrak mengalami satu kali perubahan, yaitu berdasarkan Addendum Nomor 604/210.31/DPRKPP-PSU/ADD.KTRK.I/XI/2024 tanggal 18 November 2024 tentang adanya perubahan-perubahan volume tanpa mengubah nilai kontrak.

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 20.1/CV.GP-PLK/BAST/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024. Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% dengan SP2D terakhir Nomor 62.71/04.0/000391/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.

Perhitungan atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi senilai Rp48.528.803,48 disajikan pada **Lampiran 9**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf i PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan Kontrak; dan
 - 2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran III Bagian V. Pelaksanaan Kontrak Nomor 5.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada huruf a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada masing-masing kontrak bagian prestasi pekerjaan yang diantaranya menyatakan bahwa:
 - 1) Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh KPA/PPK; dan
 - 2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- b. Pemerintah Kota Palangka Raya berisiko menerima Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana; dan
- c. Kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp48.528.803,48.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi, dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan

Pengawas belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya; dan

- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp48.528.803,48 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl Jatayu menuju Mahir Mahar II, Jl Bondol XVI, Jl Bondol, Jl Bondol XIV, Jl Bondol XV, Jl Bondol XIII, Jl Bondol XI, Jl Mahir Mahar II A, Jl Bondol VI, Jl Bondol Raya, Jl Mahir Mahar IV yang dilaksanakan oleh CV GP; dan
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.

C. Aset

1. Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Palangka Raya menyajikan saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp53.030.623.634,56 dan 157.785.715.107,80.

Tabel 24 Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	40.115.276.893,75	109.093.416.112,78
2	Kas di Bendahara Penerimaan	13.743.035,76	15.682.278,00
3	Kas di BLUD	10.181.678.669,09	43.582.817.213,14
4	Kas Dana BOS	0,00	981.786.363,10
5	Kas dana Kapitasi pada FKTP	192.969.847,86	564.433.524,78
6	Kas Lainnya	702.011,00	3.547.579.616,00
7	Kas Dana BOSP	1.199.719.970,10	0,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	1.326.533.207,00	0,00
	Jumlah	53.030.623.634,56	157.785.715.107,80

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas Daerah Kota Palangka Raya diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Pengelolaan Kas Daerah oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah belum tertib

- 1) Bendahara Umum Daerah (BUD) terlambat melakukan rekonsiliasi dengan Bank atas saldo Rekening Kas Umum Daerah

Berdasarkan keterangan Kepala Subbidang Kas Daerah BPKAD diketahui bahwa terjadi keterlambatan rekonsiliasi antara BPKAD dengan Bank Kalteng untuk bulan Oktober s.d. Desember 2024. BPKAD baru melakukan rekonsiliasi dengan Bank Kalteng pada Bulan Maret 2025, meskipun secara tertulis tanggal pada Berita Acara (BA) Rekonsiliasi telah disesuaikan. Kepala Subbidang Kas Daerah menyatakan bahwa hal ini terjadi karena menunggu seluruh Bendahara Penerimaan SKPD selesai melakukan penginputan penerimaan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- 2) Terdapat kesalahan posting transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah dilakukan koreksi setelah tahun anggaran 2024 senilai Rp483.500,00.
- 3) Berdasarkan pemeriksaan Kas Daerah diketahui bahwa terdapat dua transaksi salah *posting* oleh bank yang belum dikoreksi hingga lewat tahun anggaran 2024 masing-masing senilai Rp371.000,00 dan Rp112.500,00. Adapun dua transaksi tersebut merupakan transaksi yang seharusnya dicatat di sisi kredit Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pajak penyedia jasa boga atau katering namun tercatat di sisi debit Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran. Rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 25 Rincian Transaksi Salah *Posting* Bank di Sisi Debet Hingga Lewat Tahun Anggaran 2024

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	13/03/2024	Set Pby Pajak Daerah Makan & Minum Keg Verval Data Usulan Bansos UEP & KUBE APBD Kota PRaya TA 2024 Kel B.Bengkel Tgl 1/3/24	371.000,00	Dikoreksi tanggal 19/05/2025
2	23/12/2024	Penarikan Tunai	112.500,00	Dikoreksi tanggal 9/05/2025
Jumlah			483.500,00	

Berdasarkan penelusuran pada dokumen BA rekonsiliasi antara Bank Kalteng dengan Kuasa BUD dan dokumen bukti pendukung atas koreksi diketahui bahwa transaksi salah posting tanggal 13 Maret 2024 senilai Rp371.000,00 di atas telah muncul sebagai selisih pencatatan antara Bank dengan Kuasa BUD. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan koreksi pada laporan keuangan.

b. Terdapat rekening yang belum ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota

Kepala Daerah menetapkan seluruh rekening yang menampung penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank sesuai dengan ketentuan berlaku.

Wali Kota dapat memberi izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening melalui BUD yang ditetapkan oleh Wali Kota pada bank umum. Rekening milik Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/482/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Bank atas Nama Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Mengelola Keuangan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.

SK tersebut mencakup rekening milik Kota Palangka Raya yang dikuasai oleh BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran, bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bendahara prolanis, dan bendahara dana Bantuan Operasional Satuan (BOS) pada masing-masing sekolah.

Berdasarkan pemeriksaan kas dan konfirmasi bank diketahui terdapat sebanyak lima rekening belum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan telah memperoleh konfirmasi bank merupakan milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang aktif sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26 Rincian Rekening Milik Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota

No	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Nama Bank
1	1123410761	Pemerintah Rekening Penampungan PBB Kota Palangka Raya	0,00	BNI
2	024301003970307	Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian	0,00	BRI
3	159-00-1139149-6	Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya	13.001.788,50	Bank Mandiri
4	159-00-2185555-5	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	51,00	Bank Mandiri
5	159-00-1136567-2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	27,00	Bank Mandiri
6	159-00-1137268-6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	Bank Mandiri
Jumlah			13.001.866,50	

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut pada enam rekening di atas, diketahui bahwa pada rekening Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Bank Mandiri yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk menampung penerimaan retribusi dikenakan biaya administrasi bank senilai Rp25.000,00. Pengenaan biaya tersebut sebanyak lima kali selama tahun anggaran 2024 sehingga total biaya administrasi bank yang dikenakan senilai Rp125.000,00. Berdasarkan rekening koran, pemotongan biaya administrasi bank pada rekening tersebut dilakukan setelah transaksi pertama sejak pembukaan rekening tanggal 30 Juli 2024. Adapun rincian transaksi pengenaan biaya administrasi bank dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 27 Rincian Pengenaan Biaya Administrasi Bank pada Rekening
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Nilai (Rp)
1	14/08/2024	Biaya Administrasi	25.000,00
2	31/08/2024	Biaya Administrasi	25.000,00
3	30/09/2024	Baya Saldo Minimal	25.000,00
4	30/09/2024	Biaya Administrasi	25.000,00
5	31/10/2024	Biaya Administrasi	25.000,00
Jumlah			125.000,00

Tidak ditetapkannya rekening melalui Keputusan Wali Kota berdampak diantaranya Pemerintah Kota Palangka Raya dibebani pajak dan biaya administrasi bank senilai Rp125.000,00 serta pelimpahan dana ke Rekening Kas Umum Daerah yang tidak dilakukan secara berkala.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah:
 - 1) Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan;
 - 2) Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah;
 - 3) Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Negara/Daerah;
 - 4) Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota;
 - 5) Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - 6) Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b. Perjanjian Kerjasama antara BPKAD Kota Palangka Raya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 Nomor

1/PKS-KSD/PLK/2024 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengeluaran/ Penarikan Dana dari Rekening kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dari Rekening Pihak Pertama oleh Pihak Kedua hanya dapat dilakukan dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dan BPKAD Kota Palangka Raya dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangka Raya Nomor 20/PKS-KSD/PLK/2024 tanggal 22 Juli 2024 pada:

- 1) Pasal 4 ayat (3) poin a yang menyatakan bahwa Pihak Ketiga berkewajiban untuk melakukan pelimpahan saldo Rekening Operasional Penerimaan Pihak Pertama ke Rekening Kas Umum Daerah Pihak Kedua setiap hari kerja maksimal pukul 13.00 WIB;
- 2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa biaya layanan jasa perbankan yang ditimbulkan akibat pembayaran *Payer* kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp0/transaksi EDC dan Rp0/transaksi QRIS;
- 3) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa biaya pelimpahan saldo penerimaan dari Pihak Ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah Pihak Kedua menjadi beban Pihak Ketiga.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Kas di Kas Daerah tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir tahun anggaran dan menyebabkan proses penguncian saldo kas terlambat dilakukan sehingga mengganggu proses penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan andal; dan
- b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kas, khususnya tidak terpantaunya aktivitas penerimaan dan pengeluaran pada rekening yang tidak ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah oleh BUD.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala SKPD terkait belum sepenuhnya melaporkan aktivitas pembukaan dan penutupan rekening kepada Wali Kota melalui BUD dengan tertib; dan
- b. BUD belum melakukan rekonsiliasi antara Bank dengan BUD secara berkala dan segera melakukan koreksi atas jika terdapat kesalahan dalam proses posting oleh bank

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan:

- a. Kepala SKPD terkait melaporkan aktivitas pembukaan dan penutupan rekening kepada Wali Kota melalui BUD dengan tertib; dan

- b. Kepala BPKAD selaku BUD melakukan rekonsiliasi antara Bank dengan BUD secara berkala dan segera melakukan koreksi jika terdapat perbedaan dan atau kesalahan dalam proses *posting* oleh bank.

2. Pengelolaan Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Palangka Raya menyajikan saldo Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.199.719.970,10 dan Rp0,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas Dana BOSP Kota Palangka Raya diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Terdapat Ketekoran Kas Dana BOSP pada SD Negeri 8 Menteng

Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan membuat Laporan Rekapitulasi Dana BOSP Reguler SD Tahun Anggaran 2024 yang berisi rekapitan saldo awal, pendapatan, belanja, dan saldo akhir tahun 2024 atas Dana BOSP di SD Negeri. Berdasarkan laporan rekapitan ini diketahui bahwa terdapat saldo Kas Dana BOSP SD Negeri 8 Menteng per 31 Desember 2024 yakni senilai Rp188.545.450,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28 Rincian Saldo Kas Dana BOSP SD Negeri 8 Menteng

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Kas Tunai	20.583.362,00
2	Saldo di Bank	93.500.000,00
3	Saldo Pengembalian Dana Hasil Audit Inspektorat	74.462.088,00
Jumlah		188.545.450,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan *cash opname* atas Kas Dana BOSP di SD Negeri 8 Menteng, bendahara maupun kepala sekolah tidak dapat menunjukkan saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 tersebut. Hasil penelusuran lebih lanjut pada dokumen rekening koran sekolah tahun 2024 diketahui bahwa saldo bank per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

Hasil permintaan keterangan kepala sekolah diketahui bahwa saldo Kas Dana BOSP tahun 2024 senilai Rp107.640.450,00 digunakan sendiri oleh kepala sekolah. Sedangkan sisanya senilai Rp80.905.000,00 merupakan belanja buku di tahun 2024 yang tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) sekolah. Pembelanjaan buku siswa dan guru di tahun 2024 didukung dengan bukti berupa kuitansi nomor KP-SIPLAH-241016155839675931 senilai Rp31.075.000,00 dan kuitansi nomor KP-SIPLAH-240928200533664169 senilai Rp49.831.000,00.

Berdasarkan keterangan bendahara sekolah diketahui bahwa selama tahun 2024, bendahara tidak pernah menyimpan dan melakukan pembayaran belanja dari Dana BOSP. Saat uang telah ditarik tunai, uang tersebut disimpan oleh kepala sekolah. Selanjutnya setiap kali adanya pembelanjaan langsung dilakukan kepala sekolah sendiri. Dengan kondisi ini, akhirnya bendahara mengundurkan diri menjadi bendahara sejak 20 Agustus 2024. Sejak saat itu, kepala sekolah merangkap menjadi bendahara. Di tahun 2025, sesuai Surat Keterangan Dinas Pendidikan

Nomor 400.3.5/65/DISDIK.SD/2025, kepala sekolah merangkap menjadi bendahara dikarenakan tidak adanya guru atau PNS di SD Negeri 8 Menteng yang bersedia ditunjuk untuk menjadi bendahara.

Atas permasalahan ini Kepala Sekolah telah mengembalikan Dana BOSP senilai Rp107.640.450,00 dengan menyetorkan ke Rekening SD Negeri 8 Menteng sesuai Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 3 Juni 2025.

b. Pengelolaan Kas Dana BOSP pada TK Negeri Pembina Jekan Raya dan SPNF-SKB belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kas secara uji petik pada TK Negeri Pembina Jekan Raya dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) diketahui bahwa kedua sekolah tersebut melakukan penarikan tunai seluruh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) setiap kali ada penerimaan Dana BOP di rekening sekolah. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Hasil pemeriksaan fisik dan keterangan Bendahara tanggal 2 Mei 2025 pada TK Negeri Pembina Jekan Raya bahwa Bendahara menyatakan sisa saldo kas tunai senilai Rp14.322.300,00 disimpan oleh bendahara di rumahnya dengan alasan keamanan karena brankas yang dimiliki sekolah kuncinya telah rusak. Berdasarkan pengurangan nilai penerimaan BOP PAUD tahun 2025 yang diterima sekolah tersebut senilai Rp45.750.000,00 dengan bukti-bukti belanja tahun 2025 yang ditunjukkan oleh bendahara senilai Rp31.658.330,00, diketahui seharusnya terdapat sisa saldo kas tunai BOP PAUD tahun 2025 senilai Rp14.091.670,00 sehingga terdapat selisih lebih antara sisa kas tunai dengan seharusnya senilai Rp230.630,00. Bendahara menjelaskan bahwa selisih lebih tersebut merupakan uang pribadi bendahara.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut pada laporan pertanggungjawaban BOP PAUD tahap I dan tahap II tahun 2024 pada TK Negeri Pembina Jekan Raya diketahui bahwa bendahara tidak dapat menunjukkan BKU saat diminta dan BKU juga tidak dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban. Bendahara menyatakan bahwa semua belanja yang dilakukan pada tahap I dan tahap II tahun 2024 sesuai dengan RKAS per tahap yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban. Adapun bukti pertanggungjawaban disusun dan dikelompokkan sesuai RKAS bukan per tanggal dan bulan transaksi. Selain itu, masih terdapat bukti pertanggungjawaban belanja yang tidak lengkap, antara lain kuitansi toko yang tidak dilengkapi tanggal, bulan dan tahun transaksi atau cap toko. Demikian pula kuitansi internal yang tidak dilengkapi tanggal dan bulan transaksi (hanya ada tahun transaksi) atau tidak dilengkapi dengan kuitansi dari toko.

- 2) Hasil pemeriksaan fisik dan keterangan Bendahara SPNF SKB tanggal 2 Mei 2025 bahwa tahun 2024 dan 2025 kas tunai Dana BOP Kesetaraan disimpan oleh kepala sekolah di rumahnya dengan alasan keamanan karena sekolah tidak memiliki brankas. Lebih lanjut, kepala sekolah dan bendahara menyatakan bahwa kas tunai tersebut tidak dipegang dan disimpan oleh bendahara karena tidak berani memegang saldo kas tunai senilai itu dan merasa lebih aman jika disimpan oleh kepala sekolah. Terdapat sisa saldo kas

tunai senilai Rp47.342.000,00 untuk dana BOP Kesetaraan tahun 2025. Hasil ini didapat dari mengurangi nilai penerimaan BOP Kesetaraan tahun 2025 yang diterima sekolah tersebut senilai Rp135.770.000,00 dengan bukti-bukti belanja tahun 2025 yang transaksinya tercatat dalam BKU tahun 2025 senilai Rp88.428.000,00.

Atas permasalahan pada kedua satuan pendidikan di atas, pihak TK Negeri Pembina Jekan Raya dan SPNF SKB menyatakan bahwa penarikan tunai sekaligus atas saldo penerimaan BOP sesuai arahan dari Bidang Pembinaan PAUD dan Kesetaraan. Hal ini dilakukan agar saldo di rekening menjadi Rp0,00. Sedangkan menurut pernyataan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Kesetaraan tidak ada arahan untuk segera menjadikan saldo kas di bank Rp0,00. Lebih lanjut, beliau menyatakan hanya ada arahan untuk merealisasikan dana BOP PAUD dan Kesetaraan sampai habis sesuai dengan RKAS dan tidak boleh dengan sengaja mengendapkan saldo di bank jika masih ada kegiatan yang harus dibayarkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - 1) Pasal 121:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 2) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah pada:
 - 1) Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara Dana BOS, Bendahara Dana BOP PAUD dan Bendahara Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) huruf a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - b) huruf c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri pada buku kas umum dan buku pembantu;

- c) huruf d. membayar belanja dari Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- d) huruf f. menyampaikan buku kas umum dan buku pembantu Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap bulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Risiko penyalahgunaan dan kehilangan Kas Dana BOP PAUD dan Kesetaraan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Sekolah SD Negeri 8 Menteng melakukan tugas dan wewenang bendahara yang menerima dan menyimpan serta membayar belanja Dana BOS serta menyalahgunakan penggunaan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi;
- b. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Kesetaraan kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- c. Bendahara TK Negeri Pembina Jekan Raya dan SPNF SKB kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kurang mengoptimalkan penggunaan rekening bank milik sekolah sebagai tempat penyimpanan Dana BOP.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar:

- a. Menunjuk dan menetapkan Bendahara Dana BOSP pada SD Negeri 8 Menteng; dan
- b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Kesetaraan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada bendahara Dana BOSP pada Satdikpaud dan Satdikkesetaraan.

3. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai

Pemerintah Kota Palangka Raya menyajikan saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.883.766.735.504,45 dan Rp3.729.474.872.381,85. Pemerintah Kota Palangka Raya menyajikan rincian Aset Tetap yang terdiri atas Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29 Aset Tetap Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
1	Tanah	1.416.757.739.636,08	5.170.811.000,00	0,00	1.421.928.550.636,08
2	Peralatan dan Mesin	617.257.645.621,25	57.954.379.409,51	15.892.411.970,40	659.319.613.060,36
3	Gedung dan Bangunan	1.059.715.646.932,70	130.151.784.487,58	34.264.003.932,30	1.155.603.427.487,98

No	Aset Tetap	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.930.307.138.639,71	162.247.618.744,13	9.053.607.398,42	2.083.501.149.985,42
5	Aset Tetap Lainnya	150.465.159.196,22	9.657.830.456,00	301.348.400,00	159.821.641.252,22
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	325.429.839.534,50	16.340.051.279,00	9.119.544.536,80	332.650.346.276,70
7	Akumulasi Penyusutan	(1.770.458.297.178,61)	10.112.468.948,96	168.712.164.964,66	(1.929.057.993.194,31)
Jumlah		3.729.474.872.381,85	391.634.944.325,18	237.343.081.202,58	3.883.766.735.504,45

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2024, diketahui bahwa LHP LKPD Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 s.d. 2023 telah mengungkapkan kelemahan dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi dari BPK, dengan rincian tersaji pada **Lampiran 10**.

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 yaitu dengan membandingkan atas penyajian aset sebagaimana yang disajikan dalam Neraca dan *database* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) serta keterangan dari pihak perangkat daerah terkait, diketahui terdapat kelemahan atas pengelolaan dan penatausahaan aset sebagai berikut.

a. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum sepenuhnya memadai

Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2024 dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perkimtan terdapat sebanyak 151 perumahan di wilayah Kota Palangka Raya. Dari 151 perumahan tersebut, sebanyak 61 perumahan telah melakukan serah terima, sebanyak 42 perumahan masih dalam proses serah terima, dan sebanyak 48 perumahan belum melakukan proses serah terima. Lebih lanjut atas penelusuran pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dikelola oleh Dinas Perkimtan dan keterangan oleh Kepala Bidang Pertanahan bahwa dari 61 PSU yang telah diserahterimakan tersebut terdapat 16 PSU yang telah tercatat sebagai Aset Tetap – Tanah. Sedangkan untuk 45 PSU yang masih belum tercatat pada KIB Dinas Perkimtan dikarenakan belum adanya penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Wali Kota Palangka Raya. Atas rincian PSU tersebut disajikan pada **Lampiran 11**.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan lamanya proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut.

- 1) Sertifikat induk belum memisahkan antara PSU dengan kapling;
- 2) Terkendala Roya di Bank; dan

3) Terdapat beberapa perumahan yang sudah tidak diketahui keberadaan pengembangnya.

b. Terdapat 1.232 persil tanah yang belum diketahui bukti kepemilikan

Hasil penelusuran pencatatan KIB A Aset Tetap Tanah pada SIMDA BMD dan permintaan keterangan pada Plt. Kasubbid Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan dan Kepala Bidang Aset BPKAD diketahui Kota Palangka Raya memiliki 1.697 persil tanah. Dari jumlah tersebut sebanyak 465 persil tanah yang telah tercatat di SIMDA BMD (termasuk aset PSU didalamnya) memiliki bukti kepemilikan baik sertifikat ataupun masih berupa SKT/Segel, sehingga terdapat 1.232 persil tanah yang belum diketahui bukti kepemilikan (kekurangan data inventarisasi) berdasarkan pencatatan di SIMDA BMD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30 Daftar Kepemilikan Tanah per 31 Desember 2024

No	Bukti Kepemilikan Tanah	Persil Tanah		Nilai (Rp)
		Jumlah	Persentase	
a	b	c	d	e
1	Sertifikat	369	21,74%	228.760.822.000,00
2	SKT/Segel	96	5,66%	43.376.070.775,32
3	Belum diketahui bukti kepemilikan	1.232	72,60%	1.052.040.623.875,20
Jumlah		1.697	100,00%	1.324.177.516.650,52

Sumber dari Laporan BMD Tahun 2024 dan permintaan keterangan Bidang Aset BPKAD

Lebih lanjut tanah yang belum diketahui kepemilikan tersebut tersebar pada 14 perangkat daerah, dengan rincian yang disajikan pada **Lampiran 12**.

c. Terdapat kendaraan dinas yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun

Hasil uji petik atas pemeriksaan pemegang kendaraan dinas dan keterangan Pengurus Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan diketahui bahwa terdapat kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor yang masih dipakai oleh pensiunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Kendaraan Dinas yang Dikuasai oleh Pegawai Pensiun

No	Nama	Jenis Kendaraan	Nomor Polis	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Mobil	Isuzu Panther/ Mobil Penumpang	KH 966 AU/KH 8020 AW	1993	63.000.000,00

d. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin Tidak Ditemukan

Hasil pengecekan fisik aset peralatan dan mesin pada KIB B pada Sekretariat DPRD dan Dinas Pendidikan terdapat aset peralatan dan mesin yang tidak ditemukan senilai Rp320.470.500,00 yang tidak ditemukan. Rincian tersaji pada **Lampiran 13**.

e. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin rusak berat yang telah dimusnahkan belum dilakukan proses penghapusan

Hasil pengecekan fisik aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat pada SDN 1 Sabaru diketahui bahwa aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat

senilai Rp26.750.000,00 telah dimusnahkan tanpa proses penghapusan hal ini tidak sesuai dengan mekanisme penghapusan aset. Rincian tersaji pada **Lampiran 14**.

f. Terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang telah dibongkar belum dilakukan proses penghapusan

Hasil pengecekan fisik aset gedung dan bangunan pada Puskesmas Pahandut diketahui bahwa terdapat aset Gedung dan bangunan yang telah dibongkar belum dilakukan proses penghapusan senilai Rp204.600.000,00 hal ini tidak sesuai dengan mekanisme penghapusan aset. Rincian tersaji pada **Lampiran 15**.

g. Terdapat Belanja Pemeliharaan yang belum dikapitalisasikan ke Aset Gedung dan Bangunan

Berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kota Palangka Raya diketahui bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00.

Lebih lanjut hasil penelusuran atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung diketahui bahwa terdapat realisasi belanja pemeliharaan yang nilainya sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 namun belum dikapitalisasikan ke aset induknya senilai Rp3.428.170.897,00. Rincian tersaji pada **Lampiran 16**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.08 PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada:
 - 1) Paragraf 15 menyatakan bahwa Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: di antaranya (e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 2) Paragraf 18 menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
 - 3) Paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan;
 - 4) Paragraf 28 menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah pada:
 - 1) Pasal 11:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang;

- b) ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan;
- 2) Pasal 14 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan: a. umum; b. teknis; dan c. administrasi.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
- 1) Pasal 10 huruf c yang menyatakan bahwa Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- 2) Pasal 11:
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang; dan
- b) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- (1) huruf f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; dan
- (2) huruf i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- 3) Pasal 12:
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
- b) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
- (1) huruf e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- (2) huruf i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- 4) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
- a) huruf c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; dan
- b) huruf d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- 5) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan status penggunaan barang milik daerah;

6) Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan barang milik daerah meliputi:

- a) huruf a. penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- b) huruf b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c) huruf c. penggunaan sementara barang milik daerah; dan
- d) huruf d. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

7) Pasal 327 ayat (1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota atau menggunakan Penilai.

8) Pasal 422 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

9) Pasal 474:

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang; dan
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya risiko kehilangan, penyalahgunaan, dan tidak terpeliharanya barang milik daerah yang tidak disertai dokumentasi dan/atau administrasi yang memadai maupun yang tidak diketahui keberadaannya; dan
- b. Saldo Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp3.428.170.897,00 berpotensi tidak menunjukkan nilai senyatanya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; dan
- b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barang kurang optimal dalam memedomani ketentuan yang berlaku terkait penatausahaan, penggunaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala BPKAD dan SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan meindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan masing-masing Kepala SKPD terkait

untuk melakukan antara lain inventarisasi barang milik daerah, memutakhirkan data status pengelolaan dan kepemilikan, pengatribusian ke aset induk dalam daftar Barang Milik Daerah serta memutakhirkan Kartu Inventaris Barang untuk kemudian melakukan koreksi sesuai dengan kondisi masing-masing aset tetap yang dimiliki.

4. Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menerbitkan Kebijakan Akuntansi melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi ini meliputi pemutakhiran pengungkapan mengenai Format Laporan yang disesuaikan dengan Permendagri 77 tahun 2020 dan Kebijakan Aset Tetap.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 17 – Properti Investasi, setiap entitas pelaporan berkewajiban melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual. PSAP Nomor 17 ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 1 Juli 2021 dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2022.

Berdasarkan definisi dalam PSAP Nomor 17, Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu kepada definisi tersebut di atas, properti pemerintah/pemerintah daerah seperti tanah atau gedung dan bangunan yang menghasilkan pendapatan asli daerah berupa pendapatan sewa harus disajikan dalam Neraca sebagai Properti Investasi yang diklasifikasikan dalam aset non lancar dan tidak lagi disajikan sebagai Aset Tetap. Penyajian Properti Investasi tersebut seharusnya telah dimulai dari Tahun 2022. PSAP Nomor 17 juga menyebutkan bahwa tidak semua aset/properti yang menghasilkan pendapatan sewa dapat disajikan sebagai Properti Investasi, seperti aset yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan atau aset yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Selain itu, properti yang sebagian menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian yang lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah yang tidak dapat dijual secara terpisah hanya dapat dikatakan sebagai properti investasi, jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Hasil analisis terhadap kebijakan akuntansi sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi tersebut belum mengatur secara khusus kebijakan akuntansi mengenai Properti Investasi baik terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pemerintah Kota Palangka

Raya belum melakukan penyesuaian atas kebijakan akuntansinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang PSAP Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi. Belum adanya kebijakan akuntansi tentang Properti Investasi ini menjadikan Pemerintah Kota Palangka Raya belum dapat menyajikan dan mengungkapkan aset/properti yang menghasilkan pendapatan sewa sebagai properti investasi yang diklasifikasikan dalam aset non lancar dalam Neraca.

Hasil penelusuran dokumen diketahui bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki aset properti berupa gedung dan bangunan untuk disewakan dan menghasilkan Pendapatan Retribusi Daerah berupa penyewaan bangunan. Pemakaian gedung dan bangunan tersebut bukan dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah. Pada Tahun 2024, diketahui terdapat Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dapat diklasifikasikan sebagai Aset Properti Investasi dan mampu menghasilkan pendapatan sewa sebagaimana tabel berikut.

Tabel 32 Daftar Aset yang Dapat Disajikan Sebagai Properti Investasi

No	SKPD	Uraian	Harga Perolehan (Rp)
1	Dinas Perkimtan	Tanah Kosong pada Bangunan Citra	3.592.900.000,00
2	DPKUKMP	Tanah Bangunan pada Barata	2.084.030.000,00
3	DPKUKMP	Tanah Bangunan pada Palma (Hotel & Hiburan)	2.897.650.000,00
Jumlah			8.574.580.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya seharusnya dapat menyajikan Properti Investasi dalam Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp8.574.580.000,00, sebelum dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Namun karena belum ada Kebijakan Akuntansi yang memasukkan Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam PSAP Nomor 17 maka dalam Neraca per 31 Desember 2024 belum dapat menyajikan Properti Investasi. Properti tersebut masih tercatat dalam Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi:

- Pasal 2 yang menyatakan bahwa proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi;
- Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022;
- Paragraf 15 yang menyatakan bahwa Properti Investasi dapat diakui sebagai aset jika dan hanya jika: a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
- Paragraf 57 yang menyatakan bahwa sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar; dan

- e. Paragraf 58 yang menyatakan bahwa Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Neraca per 31 Desember 2024 kurang informatif dalam menyajikan dan mengungkapkan Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum menyusun rancangan pemutakhiran kebijakan akuntansi yang memasukkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi; dan
- b. Wali Kota Palangka Raya belum menerbitkan Kebijakan Akuntansi yang mengakomodir PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Aset Properti Investasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.

BAB II

IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Kota Palangka Raya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Kota Palangka Raya terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 33 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2020-2024

No.	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2024	18	21	16	-	-
2	2023	18	21	23	-	-
3	2022	11	14	12	-	-
4	2021	9	10	3	-	-
5	2020	15	19	8	-	-
Jumlah		71	85	62	-	-

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

1. Pengendalian Retribusi Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memadai. Atas permasalahan ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti dengan Surat Instruksi kepada Kepala UPTD Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Dinas PUPR Kota Palangka Raya untuk membuat surat perjanjian sewa alat berat kepada pihak penyewa, SOP Retribusi Sewa Alat-Alat Berat pada UPTD Peralatan dan Pemeliharaan Rutin, SOP Penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Alat Berat, serta SOP Penggunaan Alat untuk Swakelola Alat Berat Kontruksi;
2. Terdapat kesalahan klasifikasi anggaran belanja dan pengisian sumber dana belanja belum selaras dengan anggaran pendapatan. Atas permasalahan ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti dengan pedoman teknis terkait mekanisme pengisian klasifikasi akun dan sumber dana pada RKPD agar sesuai dengan pedoman penyusunan APBD;
3. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan. Atas permasalahan ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti dengan Surat Instruksi Wali Kota Palangka Raya yang menginstruksikan kepada Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran agar melakukan verifikasi kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, serta surat masing-masing Kepala SKPD yang menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara

Pengeluaran agar melakukan verifikasi kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas;

4. Pelaksanaan delapan paket pekerjaan Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan pada Dinas PUPR tidak sesuai kontrak. Atas permasalahan ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti dengan Keputusan Kepala DPUPR Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PUPR; dan
5. Pelaksanaan lima paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas PUPR tidak sesuai kontrak. Atas permasalahan ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti dengan Keputusan Kepala DPUPR Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PUPR.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan, dengan rekomendasi BPK kepada Wali Kota Palangka Raya agar menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengusulkan tata cara pemungutan Pajak Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, penggunaan nilai dasar pengenaan Pajak MBLB sesuai Keputusan Gubernur, dan penetapan harga satuan listrik PPJ Dihasilkan Sendiri kepada Wali Kota, serta memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk melakukan penelitian dan menghitung kekurangan penerimaan Pajak MBLB minimal senilai Rp2.501.401.875,00 dan Pajak BPHTB minimal senilai Rp16.751.222,00 untuk kemudian diterbitkan SKPKDB, dan memperbaiki sistem informasi pajak dan retribusi daerah diantaranya melakukan *clear cache* pada saat perbaikan aplikasi V-Tax;
2. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara pada 20 SKPD tidak sesuai ketentuan, dengan rekomendasi BPK kepada Wali Kota Palangka Raya agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp192.711.683,00, serta menginstruksikan Kepala BPKAD membuat sistem antara lain untuk dapat mengetahui pemberian tunjangan anak dengan usia di atas 21 s.d. 25 tahun, melakukan memutakhirkan data KP4 Pegawai pada masing-masing SKPD berkenaan; dan
3. Pelaksanaan tiga paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR mengalami keterlambatan, dengan rekomendasi BPK kepada Wali Kota Palangka Raya agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memperhitungkan denda keterlambatan senilai Rp154.832.882,89 pada saat pembayaran sisa kontrak.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras atas Pegawai yang Memiliki Anak berusia >21 tahun

(dalam rupiah)

No.	Nama	SKPD	Jmlh Bulan Lebih Bayar	Dibayarkan		Seharusnya		Selisih		Total	Setor ke RKUD	Sisa
				Anak	Beras	Anak	Beras	Anak	Beras			
1	MA	SDN 4 Panarung	1	188.820,00	289.680,00	94.410,00	217.260,00	94.410,00	72.420,00	166.830,00	166.830,00	-
2	L	SDN 8 Pahandut	4	397.736,00	579.360,00	-	289.680,00	397.736,00	289.680,00	687.416,00	687.416,00	-
3	NA	SDN 1 Kalamangan	9	1.339.596,00	2.607.120,00	669.798,00	1.955.340,00	669.798,00	651.780,00	1.321.578,00	1.321.578,00	-
4	IM	DLH	14	2.062.200,00	4.055.520,00	1.031.100,00	3.041.640,00	1.031.100,00	1.013.880,00	2.044.980,00	2.044.980,00	-
5	LS	Dinas Sosial	3	304.512,00	651.780,00	-	434.520,00	304.512,00	217.260,00	521.772,00	521.772,00	-
6	LS	BPBD	10	1.504.040,00	2.896.800,00	752.020,00	2.172.600,00	752.020,00	724.200,00	1.476.220,00	-	1.476.220,00
7	IA	BPBD	8	1.590.944,00	1.738.080,00	795.472,00	1.158.720,00	795.472,00	579.360,00	1.374.832,00	1.374.832,00	-
8	TE	DPKP	1	200.900,00	289.680,00	100.450,00	217.260,00	100.450,00	72.420,00	172.870,00	172.870,00	-
9	HS	Dinkes	7	1.131.620,00	1.520.820,00	565.810,00	1.013.880,00	565.810,00	506.940,00	1.072.750,00	-	1.072.750,00
10	N	Dinkes	7	847.168,00	2.027.760,00	423.584,00	1.520.820,00	423.584,00	506.940,00	930.524,00	-	930.524,00
11	I	Bappedalitbang	3	470.172,00	869.040,00	235.086,00	651.780,00	235.086,00	217.260,00	452.346,00	-	452.346,00
12	N	Disnaker	14	2.888.004,00	4.055.520,00	-	2.027.760,00	2.888.004,00	2.027.760,00	4.915.764,00	-	4.915.764,00
13	RV	DKUKMP	7	1.321.740,00	2.027.760,00	660.870,00	1.520.820,00	660.870,00	506.940,00	1.167.810,00	1.167.810,00	-
14	EA	BPPRD	14	3.087.616,00	3.041.640,00	1.543.808,00	2.027.760,00	1.543.808,00	1.013.880,00	2.557.688,00	2.557.688,00	-
15	DM	BPPRD	8	1.558.144,00	2.317.440,00	779.072,00	1.738.080,00	779.072,00	579.360,00	1.358.432,00	1.358.432,00	-
16	B	BPPRD	7	1.406.300,00	4.055.520,00	703.150,00	3.041.640,00	703.150,00	1.013.880,00	1.717.030,00	-	1.717.030,00
17	NW	Setda	10	1.328.240,00	2.896.800,00	664.120,00	2.172.600,00	664.120,00	724.200,00	1.388.320,00	-	1.388.320,00
18	SY	Setda	10	1.519.760,00	2.172.600,00	759.880,00	1.448.400,00	759.880,00	724.200,00	1.484.080,00	-	1.484.080,00
19	TR	Disparbudpora	14	2.458.792,00	4.055.520,00	1.229.396,00	3.041.640,00	1.229.396,00	1.013.880,00	2.243.276,00	2.243.276,00	-
Jumlah				25.606.304,00	42.148.440,00	11.008.026,00	29.692.200,00	14.598.278,00	12.456.240,00	27.054.518,00	13.617.484,00	13.437.034,00

Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras atas Pegawai yang Memiliki Anak berusia >25 tahun

(dalam rupiah)

No.	Nama	SKPD	Jmlh Bulan Lebih Bayar	Dibayarkan		Seharusnya		Selisih		Total	Setor ke RKUD	Sisa
				Anak	Beras	Anak	Beras	Anak	Beras			
1	W	SDN 1 Kereng Bangkirai	1	195.924,00	289.680,00	97.962,00	217.260,00	97.962,00	72.420,00	170.382,00	170.382,00	-
2	S	TK Bukit Raya Indah	7	1.527.792,00	2.027.760,00	-	1.013.880,00	1.527.792,00	1.013.880,00	2.541.672,00	2.541.672,00	-
3	A	SDN 1 Tumbang Rungan	8	1.479.776,00	2.317.440,00	739.888,00	1.738.080,00	739.888,00	579.360,00	1.319.248,00	1.319.248,00	-
4	L	SMPN 7 Palangka Raya	8	1.801.056,00	2.317.440,00	900.528,00	1.738.080,00	900.528,00	579.360,00	1.479.888,00	1.479.888,00	-
5	F	SDN 1 Banturung	8	1.166.464,00	1.738.080,00	583.232,00	1.158.720,00	583.232,00	579.360,00	1.162.592,00	1.162.592,00	-
6	NA	SDN 1 Kalampangan	9	1.339.596,00	2.607.120,00	669.798,00	1.955.340,00	669.798,00	651.780,00	1.321.578,00	1.321.578,00	-
7	I	SMPN 11 Palangka Raya	10	2.051.320,00	2.172.600,00	1.025.660,00	1.448.400,00	1.025.660,00	724.200,00	1.749.860,00	1.749.860,00	-
8	K	SMPN 13 Palangka Raya	12	2.022.000,00	3.476.160,00	-	1.738.080,00	2.022.000,00	1.738.080,00	3.760.080,00	-	3.760.080,00
9	F	Dinas Lingkungan Hidup	3	382.296,00	869.040,00	191.148,00	651.780,00	191.148,00	217.260,00	408.408,00	408.408,00	-
10	S	Dinas Lingkungan Hidup	10	1.149.080,00	2.896.800,00	574.540,00	2.172.600,00	574.540,00	724.200,00	1.298.740,00	1.298.740,00	-
11	LS	BPBD	4	601.616,00	1.158.720,00	300.808,00	869.040,00	300.808,00	289.680,00	590.488,00	-	590.488,00
12	IS	Dinkes	5	842.500,00	1.448.400,00	421.250,00	1.086.300,00	421.250,00	362.100,00	783.350,00	-	783.350,00
13	ES	Dinkes	7	1.191.848,00	2.027.760,00	595.924,00	1.520.820,00	595.924,00	506.940,00	1.102.864,00	-	1.102.864,00
14	SWT	Dinkes	7	763.896,00	1.520.820,00	-	1.013.880,00	763.896,00	506.940,00	1.270.836,00	-	1.270.836,00
15	TA	Dinkes	6	590.424,00	1.303.560,00	-	869.040,00	590.424,00	434.520,00	1.024.944,00	-	1.024.944,00
16	S	Dinkes	7	703.150,00	1.013.880,00	-	506.940,00	703.150,00	506.940,00	1.210.090,00	-	1.210.090,00
17	RG	Satpol PP	1	93.986,00	217.260,00	-	144.840,00	93.986,00	72.420,00	166.406,00	166.406,00	-
18	S	Satpol PP	1	65.428,00	217.260,00	-	144.840,00	65.428,00	72.420,00	137.848,00	137.848,00	-
19	M	BPPRD	7	1.294.496,00	2.027.760,00	647.248,00	1.520.820,00	647.248,00	506.940,00	1.154.188,00	-	1.154.188,00
Jumlah				19.262.648,00	31.647.540,00	6.747.986,00	21.508.740,00	12.514.662,00	10.138.800,00	22.653.462,00	11.756.622,00	10.896.840,00

Perhitungan Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Nama	No.SK	Judul SK	Jumlah Dibayarkan (Rp)	Sesuai Ketentuan (Rp)	Selisih (Rp)	Potongan (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa		
Kelebihan Pembayaran Honorarium atas Ketidaksesuaian Penetapan SK												
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		188.45/247/2024	Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Palangka Raya									
1	NNA			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	A			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
3	DIS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
4	NSW			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
5	Y			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
6	KEB			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
7	FWS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
8	H			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
9	HF			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												
1	S			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	BL			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
3	N			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00		1.275.000,00	-	
4	YR			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
5	EH			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00		1.425.000,00	-	
6	DDNA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
7	FS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-		
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian												
1	N			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	ACMS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
3	R			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
4	SD			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
5	RAH			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
6	AA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
7	MS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	37.500,00	1.462.500,00	1.462.500,00	-		
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga												
1	HTS			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	BIB			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
3	HF			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
4	FR			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
5	R			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
6	BW			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan												
1	RR			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	DB			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
3	BN			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
4	AN			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
1	R			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	ES			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
3	MAB			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
4	MIM			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
5	AB			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
6	PM			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
7	SF			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	FA			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	-	510.000,00	-	
2	C			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
3	Y			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
4	DS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
5	HET			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
Inspektorat												
1	MSH			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	AZ			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
3	N			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
4	NH			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
5	N			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
6	RH			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
7	IF			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
Dinas Perhubungan												
1	AS			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	BSKK			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
3	KYW			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
4	SA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
5	FB			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
6	P			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
7	NBP			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
Dinas Tenaga Kerja												
1	LH			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	-	510.000,00	-	
2	S			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
3	MM			3.750.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	-	1.187.500,00	-	
4	H			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
5	FAM			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian												
1	H			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	-	510.000,00	-	
2	A			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
3	S			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
4	AM			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
5	IWS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
6	JS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
Dinas Lingkungan Hidup												
1	Y			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-		
2	TR			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-		
3	K			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
4	MR			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
5	MR			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-		
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat												
1	EU			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	-	510.000,00	-	
2	ES			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
3	FH			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
4	YA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
5	EO			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	
6	HN	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-			
Sekretariat Daerah												
1	LE	4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	-	510.000,00	-			
2	SH	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	-	1.275.000,00	-			
3	KE	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-			
4	SA	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-			
5	SE	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-			
6	F	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-			
7												

No.	Nama	No.SK	Judul SK	Jumlah Dibayarkan (Rp)	Sesuai Ketentuan (Rp)	Selisih (Rp)	Potongan (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)	Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah	Sisa
Kecamatan Bukit Batu										
1	DW			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00
2	N			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	N			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4	YN			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja										
1	BP			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-
2	KS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
3	RJ			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
4	FM			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
5	ART			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
6	MNF			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
Dinas Sosial										
1	HN			9.000.000,00	3.900.000,00	5.100.000,00	765.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	-
2	MS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
3	S			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
4	AHS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
5	RA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
1	HR			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	-	510.000,00
2	NS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
3	EA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
4	TE			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
5	DR			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
6	NH			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah										
1	CKS			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-
2	AVP			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-
3	PAS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-
4	ES			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-
5	MI			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-
6	I			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
7	DYA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan										
1	MS			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	-	510.000,00
2	GIP			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
3	EDS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
4	RJF			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
5	K			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	E			3.750.000,00	3.250.000,00	500.000,00	75.000,00	425.000,00	425.000,00	-
2	EFS			3.750.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	187.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	-
3	MA			3.750.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	-
4	AK			3.750.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	62.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	-
5	DA			3.750.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-
Dinas Pendidikan										
1	AVR			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	-
2	IP			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
3	A			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
4	R			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
5	DRA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
Kecamatan Rakumpit										
1	Y			6.000.000,00	3.900.000,00	2.100.000,00	315.000,00	1.785.000,00	-	1.785.000,00
2	ZA			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
3	JPS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
4	NAS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
5	AS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Kecamatan Sabangau										
1	AD			4.500.000,00	3.900.000,00	600.000,00	30.000,00	570.000,00	-	570.000,00
2	AS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	-	1.275.000,00
3	MR			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
4	INAB			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
Dinas Perikanan										
1	SU			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	-	1.275.000,00
2	WS			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	-	1.275.000,00
3	IL			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
4	SEC			4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga										
1	HN	188.45/320/2024	Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-41 Kota Palangka Raya Tahun 2024	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	112.500,00	637.500,00	637.500,00	-
2	HIHI			1.250.000,00	700.000,00	550.000,00	82.500,00	467.500,00	467.500,00	-
3	HTS			1.000.000,00	650.000,00	350.000,00	52.500,00	297.500,00	297.500,00	-
4	DR			850.000,00	600.000,00	250.000,00	37.500,00	212.500,00	212.500,00	-
5	IF			750.000,00	500.000,00	250.000,00	12.500,00	237.500,00	237.500,00	-
6	ES			750.000,00	500.000,00	250.000,00	12.500,00	237.500,00	237.500,00	-
7	DP			750.000,00	500.000,00	250.000,00	37.500,00	212.500,00	212.500,00	-
8	SH			750.000,00	500.000,00	250.000,00	37.500,00	212.500,00	212.500,00	-
10	ES			750.000,00	500.000,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
11	H			750.000,00	500.000,00	250.000,00	12.500,00	237.500,00	237.500,00	-
12	BW			750.000,00	500.000,00	250.000,00	12.500,00	237.500,00	237.500,00	-
13	EMHS			750.000,00	500.000,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
14	DE			750.000,00	500.000,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
15	DN			750.000,00	500.000,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
16	YHG			750.000,00	500.000,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
17	BR			750.000,00	500.000,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah										
1	EA	188.45/188/2024 dan 100.3.4.4/04.235/IV/2024	Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Pajak dan Retribusi daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Pajak dan Retribusi daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024	12.000.000,00	7.800.000,00	4.200.000,00	630.000,00	3.570.000,00	-	3.570.000,00
2	EB			3.400.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	-	850.000,00
3	CKS			6.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00
4	AVP			10.200.000,00	7.200.000,00	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	-	2.550.000,00
5	MW			9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00
6	SS			9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00
7	YAM			9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00
8	EHS			9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00
9	BP			9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00
10	EFH			9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00
11	YEH			6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00
12	CKS			3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	-	850

Rincian Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Darat Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
1	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
2	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
3	DPKUKMP	FF	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
4	DPKUKMP	F	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
5	DPKUKMP	M	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
6	DPKUKMP	CKL	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
7	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
8	DPKUKMP	NRKD	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
9	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
10	DPKUKMP	HMS	Palangka Raya	Martapura	1.040.000,00
11	DPKUKMP	YI	Palangka Raya	Banjarbaru	1.000.000,00
12	DPKUKMP	AL	Palangka Raya	Banjarbaru	1.000.000,00
13	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Tabalong	1.100.000,00
14	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Tabalong	1.100.000,00
15	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Tabalong	1.100.000,00
16	DPKUKMP	ALP	Palangka Raya	Tabalong	1.100.000,00
17	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Tabalong	1.100.000,00
18	DPKUKMP	RKB	Palangka Raya	Tabalong	1.100.000,00
19	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
20	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
21	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
22	DPKUKMP	NRK	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
23	DPKUKMP	IWS	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
24	DPKUKMP	HMS	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
25	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
26	DPKUKMP	FF	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
27	DPKUKMP	F	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
28	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
29	DPKUKMP	M	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
30	DPKUKMP	WS	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
31	DPKUKMP	ALP	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
32	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
33	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
34	DPKUKMP	FA	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
35	DPKUKMP	Y	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
36	DPKUKMP	JS	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
37	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Banjarmasin	700.000,00
38	DPKUKMP	SR	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
39	DPKUKMP	IS	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	600.000,00
40	DPKUKMP	YI	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	600.000,00
41	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	600.000,00
42	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
43	DPKUKMP	RKB	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
44	DPKUKMP	MI	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
45	DPKUKMP	EW	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
46	DPKUKMP	HR	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
47	DPKUKMP	CKL	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
48	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
49	DPKUKMP	HY	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
50	DPKUKMP	EY	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
51	DPKUKMP	SR	Palangka Raya	Barabai	1.168.000,00
52	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Barabai	1.168.000,00
53	DPKUKMP	RKB	Palangka Raya	Barabai	1.168.000,00
54	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
55	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
56	DPKUKMP	FF	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
57	DPKUKMP	F	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
58	DPKUKMP	M	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
59	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
60	DPKUKMP	ALP	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
61	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
62	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
63	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P151RPPC.

Hal 1 dari 8

BE

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
64	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
65	DPKUKMP	NRD	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
66	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
67	DPKUKMP	HMS	Palangka Raya	Kab Banjar	1.040.000,00
68	DPKUKMP	FB	Palangka Raya	Barabai, Kandangan, Tabalong	1.346.000,00
69	DPKUKMP	MH	Palangka Raya	Barabai, Kandangan, Tabalong	1.346.000,00
70	DPKUKMP	RK	Palangka Raya	Barabai, Kandangan, Tabalong	1.346.000,00
71	DPKUKMP	Y	Palangka Raya	Barabai, Kandangan, Tabalong	1.346.000,00
72	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Barabai, Kandangan, Tabalong	1.346.000,00
73	DPKUKMP	SR	Palangka Raya	Banjarbaru	1.040.000,00
74	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Banjarbaru	1.040.000,00
75	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Banjarbaru	1.040.000,00
76	DPKUKMP	RKB	Palangka Raya	Banjarbaru	1.040.000,00
77	DPKUKMP	AM	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
78	DPKUKMP	IWS	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
79	DPKUKMP	RKB	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
80	DPKUKMP	MI	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
81	DPKUKMP	SR	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
82	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
83	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
84	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
85	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
86	DPKUKMP	IWS	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
87	DPKUKMP	JS	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
88	DPKUKMP	Y	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
89	DPKUKMP	JS	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
90	DPKUKMP	F	Palangka Raya	Kotawaringin Barat	850.000,00
91	DPKUKMP	M	Palangka Raya	Banjarbaru	500.000,00
92	DPKUKMP	WS	Palangka Raya	Banjarbaru	500.000,00
93	DPKUKMP	JA	Palangka Raya	Banjarbaru	500.000,00
94	DPKUKMP	IS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.000.000,00
95	DPKUKMP	WS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.000.000,00
96	DPKUKMP	RF	Palangka Raya	Banjarbaru	1.000.000,00
97	DPKUKMP	ALP	Palangka Raya	Banjarbaru	1.000.000,00
98	DPKUKMP	WS	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
99	DPKUKMP	YI	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
100	DPKUKMP	ALP	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
101	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
102	DPKUKMP	SR	Palangka Raya	Banjarbaru	500.000,00
103	DPKUKMP	YA	Palangka Raya	Banjarmasin	610.800,00
104	DPKUKMP	RF	Palangka Raya	Katingan	240.000,00
105	DPKUKMP	ALP	Palangka Raya	Katingan	240.000,00
106	DPKUKMP	YP	Palangka Raya	Katingan	240.000,00
107	DPKUKMP	SR	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
108	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Pulang Pisau	500.000,00
109	DPKUKMP	HY	Palangka Raya	Pulang Pisau	500.000,00
110	DPKUKMP	EY	Palangka Raya	Pulang Pisau	500.000,00
111	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Pulang Pisau	500.000,00
112	DPKUKMP	FF	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
113	DPKUKMP	F	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
114	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
115	DPKUKMP	M	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
116	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
117	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
118	DPKUKMP	NRD	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
119	DPKUKMP	HMS	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
120	DPKUKMP	YI	Palangka Raya	Kab Banjar	300.000,00
121	DPKUKMP	ALP	Palangka Raya	Kab Banjar	300.000,00
122	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
123	DPKUKMP	IWS	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
124	DPKUKMP	RKB	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
125	DPKUKMP	MI	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
126	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
127	DPKUKMP	Y	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
128	DPKUKMP	JS	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
129	DPKUKMP	FA	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI51BPPC.

1/1

BE

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
130	DPKUKMP	SR	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
131	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
132	DPKUKMP	YA	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
133	DPKUKMP	F	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
134	DPKUKMP	S	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
135	DPKUKMP	A	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
136	DPKUKMP	Z	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
137	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Kab Banjar	600.000,00
138	DPKUKMP	R	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
139	DPKUKMP	E	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
140	DPKUKMP	HR	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
141	DPKUKMP	H	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
142	DPKUKMP	Y	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
143	Sekretariat Daerah	MP	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
144	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
145	Sekretariat Daerah	RI	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
146	Sekretariat Daerah	AS	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
147	Sekretariat Daerah	MP	Palangka Raya	Sampit	500.000,00
148	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Sampit	500.000,00
149	Sekretariat Daerah	RI	Palangka Raya	Sampit	500.000,00
150	Sekretariat Daerah	AS	Palangka Raya	Sampit	500.000,00
151	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
152	Sekretariat Daerah	MP	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
153	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
154	Sekretariat Daerah	RI	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
155	Sekretariat Daerah	AS	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
156	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Pulang Pisau	280.000,00
157	Sekretariat Daerah	RI	Palangka Raya	Pulang Pisau	280.000,00
158	Sekretariat Daerah	AS	Palangka Raya	Pulang Pisau	280.000,00
159	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Banjarbaru	600.000,00
160	Sekretariat Daerah	E	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
161	Sekretariat Daerah	RA	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
162	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
163	Sekretariat Daerah	N	Palangka Raya	Banjarmasin	600.000,00
164	Sekretariat Daerah	N	Palangka Raya	Lamandau	1.000.000,00
165	Sekretariat Daerah	E	Palangka Raya	Lamandau	1.000.000,00
166	Sekretariat Daerah	FSSS	Palangka Raya	Lamandau	1.000.000,00
167	Sekretariat Daerah	RA	Palangka Raya	Lamandau	1.000.000,00
168	Sekretariat Daerah	A	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
169	Sekretariat Daerah	BSHM	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
170	Sekretariat Daerah	YM	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
171	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
172	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Kabupaten Lamandau	800.000,00
173	Sekretariat Daerah	BSHM	Palangka Raya	Banjarmasin	300.000,00
174	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Banjarmasin	300.000,00
175	Sekretariat Daerah	YM	Palangka Raya	Banjarmasin	300.000,00
176	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Banjarmasin	300.000,00
177	Sekretariat Daerah	BSHM	Palangka Raya	Kota Waringin Timur	250.000,00
178	Sekretariat Daerah	EY	Palangka Raya	Kota Waringin Timur	250.000,00
179	Sekretariat Daerah	YM	Palangka Raya	Kota Waringin Timur	250.000,00
180	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Kota Waringin Timur	250.000,00
181	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Kota Waringin Timur	250.000,00
182	Sekretariat Daerah	SA	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
183	Sekretariat Daerah	AK	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
184	Sekretariat Daerah	MA	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
185	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
186	Sekretariat Daerah	GT	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
187	Sekretariat Daerah	D	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
188	Sekretariat Daerah	EP	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
189	Sekretariat Daerah	MA	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
190	Sekretariat Daerah	MI	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
191	Sekretariat Daerah	BB	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
192	Sekretariat Daerah	MK	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
193	Sekretariat Daerah	SES	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
194	Sekretariat Daerah	N	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
195	Sekretariat Daerah	C	Palangka Raya	Pulang Pisau	400.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P1511PFC.

13 dari 8

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
196	Sekretariat Daerah	MA	Palangka Raya	Pulang Pisau	400.000,00
197	Sekretariat Daerah	N	Palangka Raya	Pulang Pisau	400.000,00
198	Sekretariat Daerah	MA	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
199	Sekretariat Daerah	N	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
200	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Banjarbaru	800.000,00
201	Sekretariat Daerah	A	Palangka Raya	Banjar	800.000,00
202	Sekretariat Daerah	TVS	Palangka Raya	Banjar	800.000,00
203	Sekretariat Daerah	AI	Palangka Raya	Banjar	800.000,00
204	Sekretariat Daerah	AK	Palangka Raya	Banjar	800.000,00
205	Sekretariat Daerah	MK	Palangka Raya	Katingan	500.000,00
206	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Katingan	500.000,00
207	Sekretariat Daerah	MK	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
208	Sekretariat Daerah	FK	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
209	Sekretariat Daerah	N	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
210	Sekretariat Daerah	N	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
211	Sekretariat Daerah	SES	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
212	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
213	Sekretariat Daerah	PB	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
214	Sekretariat Daerah	LE	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
215	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
216	Sekretariat Daerah	ADF	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
217	Sekretariat Daerah	EBB	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
218	Sekretariat Daerah	ARI	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
219	Sekretariat Daerah	LE	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
220	Sekretariat Daerah	JP	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
221	Sekretariat Daerah	ADF	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
222	Sekretariat Daerah	K	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
223	Sekretariat Daerah	JP	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
224	Sekretariat Daerah	EBB	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
225	Sekretariat Daerah	JP	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
226	Sekretariat Daerah	ES	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
227	Sekretariat Daerah	JP	Palangka Raya	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	800.000,00
228	Sekretariat Daerah	ADF	Palangka Raya	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	800.000,00
229	Sekretariat Daerah	EBB	Palangka Raya	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	800.000,00
230	Sekretariat Daerah	HS	Palangka Raya	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	800.000,00
231	Sekretariat Daerah	ESY	Palangka Raya	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	800.000,00
232	Sekretariat Daerah	SE	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
233	Sekretariat Daerah	JP	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
234	Sekretariat Daerah	ADF	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
235	Sekretariat Daerah	EBB	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
236	Sekretariat Daerah	ESY	Palangka Raya	Martapura	400.000,00
237	Sekretariat Daerah	JP	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
238	Sekretariat Daerah	ADF	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
239	Sekretariat Daerah	EBB	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
240	Sekretariat Daerah	AK	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
241	Sekretariat Daerah	HS	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
242	Sekretariat Daerah	MS	Palangka Raya	Gunung Mas	600.000,00
243	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Gunung Mas	600.000,00
244	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Gunung Mas	600.000,00
245	Sekretariat Daerah	MS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
246	Sekretariat Daerah	AR	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
247	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
248	Sekretariat Daerah	AS	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
249	Sekretariat Daerah	YA	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
250	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
251	Sekretariat Daerah	JA	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
252	Sekretariat Daerah	YA	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
253	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
254	Sekretariat Daerah	DH	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
255	Sekretariat Daerah	AS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
256	Sekretariat Daerah	JA	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
257	Sekretariat Daerah	YA	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
258	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
259	Sekretariat Daerah	DE	Palangka Raya	Banjarmasin	300.000,00
260	Sekretariat Daerah	PML	Palangka Raya	Banjarmasin	300.000,00
261	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Banjarmasin	300.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P-151-PPC.

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
262	Sekretariat Daerah	VB	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
263	Sekretariat Daerah	DE	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
264	Sekretariat Daerah	PML	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
265	Sekretariat Daerah	DR	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
266	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
267	Sekretariat Daerah	DE	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	900.000,00
268	Sekretariat Daerah	PML	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	900.000,00
269	Sekretariat Daerah	DR	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	900.000,00
270	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	900.000,00
271	Sekretariat Daerah	LE	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
272	Sekretariat Daerah	VB	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
273	Sekretariat Daerah	DE	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
274	Sekretariat Daerah	PML	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
275	Sekretariat Daerah	DR	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
276	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
277	Sekretariat Daerah	DE	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
278	Sekretariat Daerah	DR	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
279	Sekretariat Daerah	PML	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
280	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
281	Sekretariat Daerah	VB	Palangka Raya	Tanah Laut	900.000,00
282	Sekretariat Daerah	DE	Palangka Raya	Tanah Laut	900.000,00
283	Sekretariat Daerah	DR	Palangka Raya	Tanah Laut	900.000,00
284	Sekretariat Daerah	PML	Palangka Raya	Tanah Laut	900.000,00
285	Sekretariat Daerah	EA	Palangka Raya	Tanah Laut	900.000,00
286	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Kabupaten Gunung Mas	550.000,00
287	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
288	Sekretariat Daerah	VE	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
289	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
290	Sekretariat Daerah	TAW	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
291	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	500.000,00
292	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Kabupaten Pulang Pisau	500.000,00
293	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	1.150.000,00
294	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
295	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
296	Sekretariat Daerah	VE	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
297	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
298	Sekretariat Daerah	TAW	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
299	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Pulang Pisau	450.000,00
300	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Pulang Pisau	450.000,00
301	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Pulang Pisau	450.000,00
302	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Katingan	500.000,00
303	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Katingan	500.000,00
304	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Katingan	500.000,00
305	Sekretariat Daerah	VE	Palangka Raya	Katingan	500.000,00
306	Sekretariat Daerah	TAW	Palangka Raya	Katingan	500.000,00
307	Sekretariat Daerah	VE	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	600.000,00
308	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	600.000,00
309	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	600.000,00
310	Sekretariat Daerah	TAW	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	600.000,00
311	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
312	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
313	Sekretariat Daerah	VE	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
314	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
315	Sekretariat Daerah	TAW	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
316	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
317	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
318	Sekretariat Daerah	VE	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
319	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
320	Sekretariat Daerah	TAW	Palangka Raya	Kapuas	550.000,00
321	Sekretariat Daerah	DW	Palangka Raya	Pulang pisau	500.000,00
322	Sekretariat Daerah	VE	Palangka Raya	Pulang pisau	500.000,00
323	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Pulang pisau	500.000,00
324	Sekretariat Daerah	TAW	Palangka Raya	Pulang pisau	500.000,00
325	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kabupaten Gunung Mas	550.000,00
326	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kabupaten Gunung Mas	550.000,00
327	Sekretariat Daerah	JDC	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	500.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P151RPPC.

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
328	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
329	Sekretariat Daerah	JDC	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
330	Sekretariat Daerah	P	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
331	Sekretariat Daerah	NAS	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
332	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kabupaten Pulang Pisau	500.000,00
333	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kabupaten Katingan	500.000,00
334	Sekretariat Daerah	M	Palangka Raya	Kabupaten Katingan	500.000,00
335	Sekretariat Daerah	P	Palangka Raya	Kabupaten Katingan	500.000,00
336	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kabupaten Katingan	500.000,00
337	Sekretariat Daerah	NAS	Palangka Raya	Kabupaten Katingan	500.000,00
338	Sekretariat Daerah	JDC	Palangka Raya	Kabupaten Katingan	500.000,00
339	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
340	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
341	Sekretariat Daerah	NAS	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
342	Sekretariat Daerah	JDC	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
343	Sekretariat Daerah	P	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
344	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	980.000,00
345	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	980.000,00
346	Sekretariat Daerah	JDC	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	980.000,00
347	Sekretariat Daerah	NAS	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	980.000,00
348	Sekretariat Daerah	P	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	980.000,00
349	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	1.150.000,00
350	Sekretariat Daerah	GPR	Palangka Raya	Kabupaten Pulang Pisau	500.000,00
351	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kabupaten Pulang Pisau	500.000,00
352	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kabupaten Kapuas	550.000,00
353	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kabupaten Kapuas	550.000,00
354	Sekretariat Daerah	JDC	Palangka Raya	Kabupaten Kapuas	550.000,00
355	Sekretariat Daerah	P	Palangka Raya	Kabupaten Kapuas	550.000,00
356	Sekretariat Daerah	JDC	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
357	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
358	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
359	Sekretariat Daerah	P	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	750.000,00
360	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Barito Selatan	500.000,00
361	Sekretariat Daerah	AIEAI	Palangka Raya	Barito Selatan	500.000,00
362	Sekretariat Daerah	DAS	Palangka Raya	Barito Selatan	500.000,00
363	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
364	Sekretariat Daerah	AIEAI	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
365	Sekretariat Daerah	VES	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
366	Sekretariat Daerah	Y	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
367	Sekretariat Daerah	GPR	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
368	Sekretariat Daerah	KM	Palangka Raya	Katingan	440.000,00
369	Sekretariat Daerah	AIEAI	Palangka Raya	Katingan	440.000,00
370	Sekretariat Daerah	VES	Palangka Raya	Katingan	440.000,00
371	Sekretariat Daerah	Y	Palangka Raya	Katingan	440.000,00
372	Sekretariat Daerah	JV	Palangka Raya	Katingan	440.000,00
373	Sekretariat Daerah	HIS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
374	Sekretariat Daerah	MPI	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
375	Sekretariat Daerah	AA	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
376	Sekretariat Daerah	ES	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
377	Sekretariat Daerah	L	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
378	Sekretariat Daerah	MPI	Palangka Raya	Banjarbaru dan Kab. Hulu Sungai	1.325.000,00
379	Sekretariat Daerah	AA	Palangka Raya	Banjarbaru dan Kab. Hulu Sungai	1.325.000,00
380	Sekretariat Daerah	ES	Palangka Raya	Banjarbaru dan Kab. Hulu Sungai	1.325.000,00
381	Sekretariat Daerah	HIS	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
382	Sekretariat Daerah	MPI	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
383	Sekretariat Daerah	AA	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
384	Sekretariat Daerah	ES	Palangka Raya	Banjarbaru	1.150.000,00
385	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit	600.000,00
386	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit	600.000,00
387	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit	600.000,00
388	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit	600.000,00
389	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit	600.000,00
390	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Kabupaten Tanah Laut	1.000.000,00
391	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Kabupaten Tanah Laut	1.000.000,00
392	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Kabupaten Tanah Laut	1.000.000,00
393	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kabupaten Tanah Laut	1.000.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P151PFC.

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
394	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kabupaten Tanah Laut	1.000.000,00
395	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	600.000,00
396	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	600.000,00
397	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	600.000,00
398	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	600.000,00
399	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	600.000,00
400	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
401	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
402	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
403	Sekretariat Daerah	YE	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
404	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
405	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
406	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
407	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
408	Sekretariat Daerah	YE	Palangka Raya	Kota Banjarmasin	700.000,00
409	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
410	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
411	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
412	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
413	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
414	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
415	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
416	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kabupaten Banjar	800.000,00
417	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
418	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
419	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
420	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
421	Sekretariat Daerah	YE	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
422	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
423	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
424	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
425	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
426	Sekretariat Daerah	YE	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
427	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
428	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
429	Sekretariat Daerah	YI	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
430	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
431	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
432	Sekretariat Daerah	YE	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
433	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Banjarbaru dan Kab Hulu Sungai Selatan	1.100.000,00
434	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Banjarbaru dan Kab Hulu Sungai Selatan	1.100.000,00
435	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Banjarbaru dan Kab Hulu Sungai Selatan	1.100.000,00
436	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Banjarbaru dan Kab Hulu Sungai Selatan	1.100.000,00
437	Sekretariat Daerah	IS	Palangka Raya	Kab Tanah Laut	1.000.000,00
438	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Kab Tanah Laut	1.000.000,00
439	Sekretariat Daerah	EL	Palangka Raya	Kab Tanah Laut	1.000.000,00
440	Sekretariat Daerah	T	Palangka Raya	Kab Tanah Laut	1.000.000,00
441	Sekretariat Daerah	F	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
442	Sekretariat Daerah	YE	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
443	Sekretariat Daerah	DJ	Palangka Raya	Sampit	600.000,00
444	Sekretariat Daerah	R	Palangka Raya	Sampit	500.000,00
445	Sekretariat Daerah	WSI	Palangka Raya	Sampit	500.000,00
446	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Kab. Gunung Mas	400.000,00
447	Sekretariat Daerah	FA	Palangka Raya	Kab. Gunung Mas	400.000,00
448	Sekretariat Daerah	YYB	Palangka Raya	Kab. Gunung Mas	400.000,00
449	Sekretariat Daerah	WPW	Palangka Raya	Banjarbaru	500.000,00
450	Sekretariat Daerah	ADL	Palangka Raya	Banjarbaru	500.000,00
451	Sekretariat Daerah	YYB	Palangka Raya	Banjarbaru	500.000,00
452	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Kabupaten Katingan	400.000,00
453	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	500.000,00
454	Sekretariat Daerah	ADL	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	500.000,00
455	Sekretariat Daerah	YYB	Palangka Raya	Kota Banjarbaru	500.000,00
456	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Kalimantan Selatan	500.000,00
457	Sekretariat Daerah	ADL	Palangka Raya	Kalimantan Selatan	500.000,00
458	Sekretariat Daerah	YYB	Palangka Raya	Kalimantan Selatan	500.000,00
459	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Gunung Mas	400.000,00

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: P151PFC.

No	Nama SKPD	Nama	Kota Asal	Kota Tujuan	Biaya Transport Pergi-Pulang (Rp)
460	Sekretariat Daerah	DK	Palangka Raya	Gunung Mas	400.000,00
461	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Gunung Mas	400.000,00
462	Sekretariat Daerah	SB	Palangka Raya	Gunung Mas	400.000,00
463	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Gunung Mas	400.000,00
464	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	280.000,00
465	Sekretariat Daerah	DK	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	280.000,00
466	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	280.000,00
467	Sekretariat Daerah	SB	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	280.000,00
468	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Kotawaringin Timur	280.000,00
469	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
470	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
471	Sekretariat Daerah	FL	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
472	Sekretariat Daerah	SB	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
473	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Banjarmasin	500.000,00
474	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
475	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
476	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
477	Sekretariat Daerah	SB	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
478	Sekretariat Daerah	FA	Palangka Raya	Balikpapan	1.600.000,00
479	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
480	Sekretariat Daerah	SB	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
481	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Singawang	2.300.000,00
482	Sekretariat Daerah	FA	Palangka Raya	Singawang	2.300.000,00
483	Sekretariat Daerah	SA	Palangka Raya	Singawang	2.300.000,00
484	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Singawang	2.300.000,00
485	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
486	Sekretariat Daerah	HRR	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
487	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
488	Sekretariat Daerah	SB	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
489	Sekretariat Daerah	EP	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
490	Sekretariat Daerah	H	Palangka Raya	Banjarbaru	750.000,00
491	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Kalimantan Selatan	500.000,00
492	Sekretariat Daerah	WSI	Palangka Raya	Kalimantan Selatan	500.000,00
493	Sekretariat Daerah	YYB	Palangka Raya	Kalimantan Selatan	500.000,00
494	Sekretariat Daerah	ADL	Palangka Raya	Kalimantan Selatan	500.000,00
495	Sekretariat Daerah	UN	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	960.000,00
496	Sekretariat Daerah	WSI	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	960.000,00
497	Sekretariat Daerah	YYB	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	960.000,00
498	Sekretariat Daerah	WPW	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
499	Sekretariat Daerah	S	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
500	Sekretariat Daerah	RNB	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
501	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Banjarmasin	750.000,00
502	Sekretariat Daerah	EP	Palangka Raya	Banjarbaru	700.000,00
503	Sekretariat Daerah	WPW	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
504	Sekretariat Daerah	AA	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
505	Sekretariat Daerah	CNB	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
506	Sekretariat Daerah	AM	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
507	Sekretariat Daerah	SB	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
508	Sekretariat Daerah	KN	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
509	Sekretariat Daerah	NA	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
510	Sekretariat Daerah	MAR	Palangka Raya	Kab. Tanah Laut	900.000,00
JUMLAH					368.579.800,00

Rincian Pertanggungjawaban Biaya Taksi Menggunakan Daftar Pengeluaran Riil

No.	SKPD	Nama	Biaya Taksi
1	BPKAD	AP	780.000,00
2	BPKAD	N	780.000,00
3	BPKAD	AKN	780.000,00
4	BPKAD	HA	780.000,00
5	BPKAD	DIS	524.000,00
6	BPKAD	NSW	524.000,00
7	BPKAD	AP	524.000,00
8	BPKAD	TN	268.000,00
9	BPKAD	H	610.000,00
10	BPKAD	A	222.000,00
11	BPKAD	P	222.000,00
12	BPKAD	MO	222.000,00
13	BPKAD	DM	554.000,00
14	BPKAD	L	554.000,00
15	BPKAD	AI	554.000,00
16	BPKAD	FT	554.000,00
17	BPKAD	NW	554.000,00
18	BPKAD	PD	554.000,00
19	BPKAD	NNA	668.000,00
20	BPKAD	FWS	534.000,00
21	BPKAD	H	668.000,00
22	BPKAD	HF	668.000,00
23	BPKAD	TN	554.000,00
24	BPKAD	Y	554.000,00
25	BPKAD	CMM	554.000,00
26	BPKAD	IWT	654.000,00
27	BPKAD	HI	554.000,00
28	BPKAD	S	554.000,00
29	BPKAD	ONS	554.000,00
30	BPKAD	N	780.000,00
31	BPKAD	AKN	780.000,00
32	BPKAD	HA	780.000,00
33	BPKAD	L	268.000,00
34	BPKAD	DIS	268.000,00
35	BPKAD	AP	537.000,00
36	BPKAD	A	537.000,00
37	BPKAD	KE	537.000,00
38	BPKAD	K	100.000,00
39	BPKAD	KII	100.000,00
40	BPKAD	DAH	100.000,00
41	BPKAD	DILSB	100.000,00
42	BPKAD	MR	100.000,00
43	BPKAD	DIS	134.000,00
44	BPKAD	SHR	768.000,00
45	BPKAD	MPS	134.000,00
46	BPKAD	SN	134.000,00
47	BPKAD	JE	468.000,00

No.	SKPD	Nama	Biaya Taxi
48	BPKAD	J	134.000,00
49	BPKAD	DPS	722.000,00
50	BPKAD	H	722.000,00
51	BPKAD	KE	500.000,00
52	BPKAD	MW	500.000,00
53	BPKAD	AP	476.000,00
54	BPKAD	AFE	500.000,00
55	BPKAD	N	802.000,00
56	BPKAD	AKN	802.000,00
57	BPKAD	HA	802.000,00
58	BPKAD	DIS	268.000,00
59	BPKAD	CAA	268.000,00
60	BPKAD	W	268.000,00
61	BPKAD	MPS	268.000,00
62	BPKAD	SN	268.000,00
63	BPKAD	H	780.000,00
64	BPKAD	WA	780.000,00
65	BPKAD	NNA	880.000,00
66	BPKAD	DPS	930.000,00
67	BPKAD	DM	700.000,00
68	BPKAD	Y	815.000,00
69	BPKAD	AI	880.000,00
70	BPKAD	HI	880.000,00
71	BPKAD	TN	626.000,00
72	BPKAD	IWT	626.000,00
73	BPKAD	AP	524.000,00
74	BPKAD	TN	535.000,00
75	BPKAD	WN	535.000,00
76	BPKAD	AZ	500.000,00
77	BPKAD	K	500.000,00
78	BPKAD	KE	500.000,00
79	BPKAD	FWS	742.000,00
80	BPKAD	H	512.000,00
81	BPKAD	HF	602.000,00
82	BPKAD	NNA	602.000,00
83	BPKAD	DPS	627.000,00
84	BPKAD	DM	512.000,00
85	BPKAD	L	512.000,00
86	BPKAD	IWT	780.000,00
87	BPKAD	AP	780.000,00
88	BPKAD	AKN	712.000,00
89	BPKAD	N	712.000,00
90	BPKAD	DIS	268.000,00
91	BPKAD	AP	501.000,00
92	BPKAD	Y	501.000,00
93	BPKAD	R	501.000,00
94	BPKAD	DIS	268.000,00
95	BPKAD	WN	466.000,00
96	BPKAD	O	466.000,00

No.	SKPD	Nama	Biaya Taxi
97	BPKAD	HA	734.000,00
98	BPKAD	Y	780.000,00
99	BPKAD	NSW	780.000,00
100	BPKAD	AFE	780.000,00
101	BPKAD	DIS	268.000,00
102	BPKAD	CAA	180.000,00
103	BPKAD	AI	200.000,00
104	BPKAD	PD	200.000,00
105	BPKAD	DPS	780.000,00
106	BPKAD	H	780.000,00
107	BPKAD	WA	780.000,00
108	BPKAD	TN	200.000,00
109	BPKAD	Y	200.000,00
110	BPKAD	HI	200.000,00
111	BPKAD	F	200.000,00
112	BPKAD	S	200.000,00
113	BPKAD	HA	712.000,00
114	BPKAD	N	734.000,00
115	BPKAD	M	734.000,00
116	BPKAD	Y	734.000,00
117	BPKAD	AKN	734.000,00
118	BPKAD	N	734.000,00
119	BPKAD	SB	734.000,00
120	BPKAD	AP	734.000,00
121	BPKAD	TN	200.000,00
122	BPKAD	Y	200.000,00
123	BPKAD	RW	500.000,00
124	BPKAD	AMP	500.000,00
125	BPKAD	A	500.000,00
126	BPKAD	H	500.000,00
127	BPKAD	MH	500.000,00
128	BPKAD	S	500.000,00
129	BPKAD	Y	540.000,00
130	BPKAD	AKN	540.000,00
131	BPKAD	M	540.000,00
132	BPKAD	AP	540.000,00
133	BPKAD	MPS	355.000,00
134	BPKAD	SN	822.000,00
135	BPKAD	DIS	697.000,00
136	BPKAD	S	647.000,00
137	BPKAD	J	397.000,00
138	BPKAD	A	340.000,00
139	BPKAD	TS	222.000,00
140	BPKAD	ARI	222.000,00
141	BPKAD	S	340.000,00
142	BPKAD	KII	222.000,00
143	BPKAD	DAH	222.000,00
144	BPKAD	MR	222.000,00
145	BPKAD	DILSB	222.000,00

No.	SKPD	Nama	Biaya Taxi
146	BPKAD	Y	236.000,00
147	BPKAD	MO	236.000,00
148	BPKAD	MH	236.000,00
149	BPKAD	KE	222.000,00
150	BPKAD	H	222.000,00
151	BPKAD	RW	222.000,00
152	BPKAD	AMP	222.000,00
153	BPKAD	K	222.000,00
154	BPKAD	TN	200.000,00
155	BPKAD	H	200.000,00
156	BPKAD	AP	222.000,00
157	BPKAD	AKN	318.000,00
158	BPKAD	HR	540.000,00
159	BPKAD	SB	540.000,00
160	BPKAD	Y	540.000,00
161	BPKAD	FE	540.000,00
162	BPKAD	LC	540.000,00
163	BPKAD	LK	544.000,00
164	BPKAD	HA	540.000,00
165	BPKAD	M	540.000,00
166	BPKAD	IFH	540.000,00
167	BPKAD	N	540.000,00
168	BPKAD	N	540.000,00
169	BPKAD	UW	540.000,00
170	BPKAD	Y	540.000,00
171	BPKAD	DIS	222.000,00
172	BPKAD	AP	662.000,00
173	BPKAD	NSW	610.000,00
174	BPKAD	FWS	610.000,00
175	BPKAD	ON	610.000,00
176	Sekretariat Daerah	APP	780.000,00
177	Sekretariat Daerah	UN	868.000,00
178	Sekretariat Daerah	MP	868.000,00
179	Sekretariat Daerah	S	868.000,00
180	Sekretariat Daerah	RI	868.000,00
181	Sekretariat Daerah	AS	868.000,00
182	Sekretariat Daerah	MP	780.000,00
183	Sekretariat Daerah	MP	960.000,00
184	Sekretariat Daerah	S	960.000,00
185	Sekretariat Daerah	RI	960.000,00
186	Sekretariat Daerah	AS	960.000,00
187	Sekretariat Daerah	UN	734.000,00
188	Sekretariat Daerah	MP	734.000,00
190	Sekretariat Daerah	UN	390.000,00
191	Sekretariat Daerah	MP	780.000,00
192	Sekretariat Daerah	S	780.000,00
193	Sekretariat Daerah	RI	780.000,00
194	Sekretariat Daerah	AS	780.000,00
195	Sekretariat Daerah	APP	390.000,00

No.	SKPD	Nama	Biaya Taxi
196	Sekretariat Daerah	UN	780.000,00
197	Sekretariat Daerah	MP	780.000,00
198	Sekretariat Daerah	S	780.000,00
199	Sekretariat Daerah	RI	780.000,00
200	Sekretariat Daerah	AS	780.000,00
201	Sekretariat Daerah	UN	780.000,00
202	Sekretariat Daerah	MP	780.000,00
206	Sekretariat Daerah	RA	770.000,00
207	Sekretariat Daerah	E	722.000,00
208	Sekretariat Daerah	RA	722.000,00
209	Sekretariat Daerah	UN	722.000,00
210	Sekretariat Daerah	UN	390.000,00
211	Sekretariat Daerah	RA	780.000,00
212	Sekretariat Daerah	RA	780.000,00
213	Sekretariat Daerah	FSSS	778.000,00
214	Sekretariat Daerah	E	778.000,00
218	Sekretariat Daerah	LE	780.000,00
219	Sekretariat Daerah	F	734.000,00
220	Sekretariat Daerah	K	734.000,00
221	Sekretariat Daerah	NAFS	734.000,00
222	Sekretariat Daerah	LE	734.000,00
223	Sekretariat Daerah	F	290.000,00
224	Sekretariat Daerah	A	874.000,00
225	Sekretariat Daerah	A	170.000,00
231	Sekretariat Daerah	LE	712.000,000
232	Sekretariat Daerah	VB	712.000,000
233	Sekretariat Daerah	IH	512.000,000
234	Sekretariat Daerah	ESY	712.000,000
JUMLAH			121.862.000,00

Rincian Kelebihan Bayar atas Pembayaran yang Tidak Termasuk dalam Komponen yang Seharusnya Dibiayai

No.	SKPD	Nama	Biaya Lain-lain dalam tiket pesawat (Asuransi, kursi, dll) (Rp)
1	DPUPR	DF	188.038,00
2	DPUPR	RL	176.600,00
3	DPUPR	AP	146.900,00
4	DPUPR	ES	113.600,00
5	Sekretariat Daerah	VB	233.800,00
6	Sekretariat Daerah	VB	179.300,00
7	Sekretariat Daerah	UNL	111.200,00
8	Sekretariat Daerah	UNL	92.600,00
9	Sekretariat Daerah	BSHM	120.000,00
10	Sekretariat Daerah	KM	257.000,00
11	Sekretariat Daerah	MK	167.600,00
12	Sekretariat Daerah	DAP	166.900,00
13	Sekretariat Daerah	SES	179.800,00
14	Sekretariat Daerah	K	181.900,00
15	Sekretariat Daerah	MA	72.700,00
16	Sekretariat Daerah	GT	290.600,00
17	Sekretariat Daerah	BB	164.100,00
18	Sekretariat Daerah	MNG	60.000,00
19	Sekretariat Daerah	AK	153.200,00
20	Sekretariat Daerah	K	153.200,00
21	Sekretariat Daerah	VB	113.100,00
22	Sekretariat Daerah	CV	203.300,00
23	Sekretariat Daerah	Y	203.300,00
24	Sekretariat Daerah	RA	95.000,00
25	Sekretariat Daerah	ABD	80.100,00
26	Sekretariat Daerah	HRR	80.100,00
27	Sekretariat Daerah	LE	66.300,00
28	Sekretariat Daerah	SH	165.000,00
29	Sekretariat Daerah	SA	299.200,00
30	Sekretariat Daerah	SH	50.700,00
31	Sekretariat Daerah	MA	186.400,00
32	Sekretariat Daerah	SH	186.400,00
33	Sekretariat Daerah	MI	186.400,00
34	Sekretariat Daerah	SA	186.400,00
35	Sekretariat Daerah	SR	186.400,00
36	Sekretariat Daerah	KSP	186.400,00
37	Sekretariat Daerah	TDN	186.400,00
38	Sekretariat Daerah	AK	186.400,00
39	Sekretariat Daerah	ESY	186.400,00
40	Sekretariat Daerah	MK	186.400,00
41	Sekretariat Daerah	SCC	186.400,00
42	Sekretariat Daerah	F	186.400,00
43	Sekretariat Daerah	KF	60.000,00

No.	SKPD	Nama	Biaya Lain-lain dalam tiket pesawat (Asuransi, kursi, dll) (Rp)
44	Sekretariat Daerah	M	60.000,00
45	Sekretariat Daerah	YH	60.000,00
46	Sekretariat Daerah	DE	60.000,00
47	Sekretariat Daerah	M	60.000,00
48	Sekretariat Daerah	AT	76.400,00
49	Sekretariat Daerah	SA	355.164,00
50	Sekretariat Daerah	UNL	60.000,00
51	Sekretariat Daerah	ADL	60.000,00
52	Sekretariat Daerah	YYB	60.000,00
53	Sekretariat Daerah	A	207.700,00
54	Sekretariat Daerah	SH	55.561,00
55	Sekretariat Daerah	YH	20.000,00
56	Sekretariat Daerah	DE	20.000,00
57	Sekretariat Daerah	AL	20.000,00
58	Sekretariat Daerah	KN	20.000,00
59	Sekretariat Daerah	NA	20.000,00
60	Sekretariat Daerah	APP	20.000,00
61	Sekretariat Daerah	ADL	60.000,00
62	Sekretariat Daerah	SH	129.900,00
63	Sekretariat Daerah	APP	151.500,00
64	Sekretariat Daerah	A	66.600,00
65	Sekretariat Daerah	SA	194.701,00
66	Sekretariat Daerah	AT	33.700,00
67	Sekretariat Daerah	SA	198.100,00
68	Sekretariat Daerah	ZPS	198.100,00
69	Sekretariat Daerah	SA	180.922,00
70	Sekretariat Daerah	ZPS	180.922,00
71	Sekretariat Daerah	SH	215.000,00
72	Sekretariat Daerah	A	156.900,00
73	Sekretariat Daerah	SH	89.900,00
74	Sekretariat Daerah	A	206.300,00
JUMLAH			10.159.308,00

Rincian Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Melebihi Standar Harga yang Berlaku pada Dewan Kesenian Palangka Raya (DKPR)

No.	Nama	Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	HS	500.000,00	100.000,00	400.000,00
2	OPAK	500.000,00	100.000,00	400.000,00
3	JPC	500.000,00	100.000,00	400.000,00
4	SMBR	500.000,00	100.000,00	400.000,00
5	O	500.000,00	100.000,00	400.000,00
6	YA	500.000,00	100.000,00	400.000,00
7	CSN	500.000,00	100.000,00	400.000,00
8	A	500.000,00	100.000,00	400.000,00
9	OPAK	500.000,00	100.000,00	400.000,00
10	MD	500.000,00	100.000,00	400.000,00
11	H	500.000,00	100.000,00	400.000,00
12	AL	500.000,00	100.000,00	400.000,00
13	YA	500.000,00	100.000,00	400.000,00
14	M	500.000,00	100.000,00	400.000,00
15	DP	500.000,00	100.000,00	400.000,00
16	SMBR	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
17	AS	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
18	KBG	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
19	NKS	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
20	TBRS	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
21	AIPP	2.000.000,00	1.720.000,00	280.000,00
22	MAF	2.000.000,00	1.720.000,00	280.000,00
23	EV	2.000.000,00	1.720.000,00	280.000,00
24	ACS	2.000.000,00	1.720.000,00	280.000,00
25	SMBR	500.000,00	100.000,00	400.000,00
26	KS	500.000,00	100.000,00	400.000,00
27	JPC	500.000,00	100.000,00	400.000,00
28	DNA	500.000,00	100.000,00	400.000,00
29	PAA	500.000,00	100.000,00	400.000,00
Total		25.500.000,00	9.380.000,00	16.120.000,00

Rincian Pembayaran Honorarium Panitia, Moderator dan Pembawa Acara Melebihi Standar Harga yang Berlaku pada Dewan Kesenian Palangka Raya (DKPR)

No.	Nama	Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	M	1.500.000,00	400.000,00	1.100.000,00	Koordinator Tim
2	TSW	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	Anggota
3	HS	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	Anggota
4	H	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	Anggota
5	BMT	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
6	AL	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
7	AIT	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
8	SMBR	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
9	OPAK	750.000,00	300.000,00	450.000,00	Anggota
10	IPC	750.000,00	300.000,00	450.000,00	Anggota
11	DP	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Anggota
12	MR	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Anggota
13	J	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Anggota
14	AKA	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Anggota
15	Y	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Anggota
16	DNA	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Anggota
17	PAA	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Anggota
18	MAS	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
19	ABL	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
20	HS	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	Koordinator Tim
21	TSW	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
22	AL	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
23	M	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
24	H	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
25	BMT	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
26	YA	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
27	SMBR	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
28	A	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
29	A	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
30	M	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
31	Y	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
32	D	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
33	O	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
34	DA	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
35	RD	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
36	D	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
37	J	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
38	DP	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
39	MR	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
40	KGI	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
41	FA	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
42	ACR	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
43	EDC	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
44	DWS	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
45	AN	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota

No.	Nama	Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
46	MFR	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
47	NKT	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
48	MSN	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
49	RHH	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
50	D	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
51	F	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
52	H	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
53	M	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
54	H	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	Koordinator Tim
55	TSW	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
56	HS	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
57	M	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
58	Y	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
59	JPC	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
60	OPAK	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
61	AKA	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
62	MD	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
63	DNA	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
64	PAA	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
65	SMBR	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
66	A	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
67	FMP	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
68	M	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
69	V	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
70	F	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
71	DP	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
72	MR	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
73	AL	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Anggota
74	K	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	Publikasi Media
75	MAS	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Petugas Kebersihan
76	PAA	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	Ketua
77	GOV	750.000,00	300.000,00	450.000,00	Bendahara
78	M	700.000,00	300.000,00	400.000,00	Sekretaris
79	MD	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
80	AKA	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Sie.Acara
81	TG	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
82	MAS	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Sie.Transportasi
83	DRA	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
84	DA	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Sie. Konsumsi
85	NG	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
86	A	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Sie. Perlengkapan
87	FMP	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
88	JAFS	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
89	NNTA	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Sie. Humas
90	DNK	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
91	EAS	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
92	RA	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
93	A	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Sie. Keamanan
94	PAA	650.000,00	400.000,00	250.000,00	Ketua Panitia

No.	Nama	Dibayarkan (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
95	GOV	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Bendahara
96	M	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Sekretaris
97	MD	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
98	MAS	400.000,00	300.000,00	100.000,00	Sie. Transportasi
99	DRA	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
100	DA	400.000,00	300.000,00	100.000,00	Sie. Konsumsi
101	NG	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
102	A	400.000,00	300.000,00	100.000,00	Sie. Perlengkapan
103	FMP	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
104	NNTA	400.000,00	300.000,00	100.000,00	Sie. Humas
105	DNK	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Anggota
106	M	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	Moderator
107	H	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	Moderator
108	GOV	500.000,00	400.000,00	100.000,00	MC
109	PC	500.000,00	400.000,00	100.000,00	MC
110	AA	1.500.000,00	400.000,00	1.100.000,00	MC
111	TBR5	1.500.000,00	400.000,00	1.100.000,00	MC
JUMLAH		91.800.000,00	35.000.000,00	56.800.000,00	

Rekap Perhitungan Tidak Sesuai Kontrak
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl. Jatayu Menuju Mahir Mahar II, Jl. Bondol XVI,
Jl. Bondol, Jl. Bondol XIV, Jl. Bondol XV, Jl. Bondol XIII, Jl. Bondol XI, Jl. Mahir Mahar II A,
Jl. Bondol VI, Jl. Bondol Raya, Jl. Mahir Mahar IV

Dinas Terkait	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl. Jatayu menuju Mahir Mahar II, Jl. Bondol XVI, Jl. Bondol, Jl. Bondol XIV, Jl. Bondol XV, Jl. Bondol XIII, Jl. Bondol XI, Jl. Mahir Mahar II A, Jl. Bondol VI, Jl. Bondol Raya, Jl. Mahir Mahar IV
Pelaksana Pekerjaan	: CV GP
Kontrak No.	: 604/205.13/DPKPP-PSU/KTRK/XI/2024 tanggal 11 November 2024
Nilai Kontrak (Rp)	: 2.998.570.430,00
Masa Pelaksanaan	: 45 hari kalender (11 November 2024 s.d. 25 Desember 2024)
Kontrak ADD. Terakhir No.	: 604/210.31/DPKPP-PSU/ADD.KTRK.I/XI/2024 tanggal 18 November 2024
Nilai Addendum (Rp)	: 2.998.570.430,00
Berita Acara Salah Terima	: 20.1/CV.GP-PLK/BAST/XI/2024 tanggal 20 Desember 2024

I. VOLUME TERPASANG TIDAK SESUAI KONTRAK

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
			DIBAYAR	TERPASANG	SELISIH		
a	b	c	d	e	f = d - e	g	h = f x g
A	PEKERJAAN BIAYA PENERAPAN SMK						
1	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri						
-	Pembatas Area (Restricted Area)	Rol	7,00	3,00	4,00	27.750,00	111.000,00
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	12,00	10,00	2,00	61.050,00	122.100,00
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	12,00	10,00	2,00	6.660,00	13.320,00
-	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	12,00	10,00	2,00	166.500,00	333.000,00
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	12,00	10,00	2,00	111.000,00	222.000,00
2	Personel Keselamatan Konstruksi :						
-	Petugas pengatur lalu lintas (Flagman)	Org	1,00	-	1,00	222.000,00	222.000,00
3	Rambu-rambu yang diperlukan						
-	Rambu petunjuk	Bh	6,00	-	6,00	111.000,00	666.000,00
-	Rambu larangan	Bh	6,00	3,00	3,00	111.000,00	333.000,00
-	Rambu peringatan	Bh	6,00	1,00	5,00	111.000,00	555.000,00
-	Rambu kewajiban	Bh	6,00	-	6,00	111.000,00	666.000,00
-	Rambu informasi	Bh	6,00	2,00	4,00	111.000,00	444.000,00
-	Rambu pekerjaan sementara	Bh	6,00	-	6,00	111.000,00	666.000,00
B	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
DAN PERKERASAN BETON SEMEN							
1	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m ³	498,60	465,88	32,72	1.085.000,00	35.501.200,00
TOTAL (I)							39.854.620,00

II. KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)			JUMLAH (Rp)
			DIBAYAR	TERPASANG	DIBAYAR	TERPASANG	SELISIH	
a	b	c	d	e	f	g	h = f - g	i = (dxf) - (exg)
A	PEKERJAAN MOBILISASI							
1	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan							
-	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban)	Set	1,00	1,00	1.665.000,00	400.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
B	PEKERJAAN BETON							
1	Pekerjaan Beton Cor Readymix Mutu Fc 16,9 Mpa (K200)	m ³	30,69	30,69	2.125.000,00	1.883.579,88	241.420,12	7.409.183,48
TOTAL (II)								8.674.183,48

Total kelebihan pembayaran akibat volume terpasang dan spesifikasi yang tidak sesuai kontrak senilai SUB TOTAL (I) + SUB TOTAL (II)

Rp **48.528.803,48**

Tindak Lanjut Rekomendasi Aset Tetap Belum Sesuai

Nomor	Judul Temuan	Rekomendasi	Sumber LHP BPK	Progress Tindak Lanjut
a	b	c	d	e
1	Pengelolaan Dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Walikota Palangka Raya agar: a. Melakukan telaahan atas perbedaan luas tanah di bawah jalan pada KIB A dengan luas dan ruas jalan pada KIB D. Dalam hal terjadi perbedaan, dilakukan inventarisasi, dan penilaian tanah di bawah jalan untuk selanjutnya dicatat dalam KIB A. b. Menelusuri keberadaan kendaraan bermotor yang belum dapat ditemukan sampai dengan pemeriksaan berakhir dan membuat surat perjanjian pinjam pakai atas pemanfaatan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga.	LHP atas LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor: 44/LHP/XIX.PAL/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020	Belum Sesuai Belum Sesuai
2	Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan: b. Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD untuk segera melakukan penyelesaian atas aset-aset yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan sesegera mungkin menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016.	LHP atas LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor: 44/LHP/XIX.PAL/05/2021 Tanggal 28 Mei 2021	Belum Sesuai
3	Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengurus Barang untuk: a. Memerintahkan seluruh Kepala OPD supaya melakukan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dikelolanya. b. untuk Menetapkan target penyelesaian permasalahan aset tetap kepada masing-masing Kepala OPD, yaitu dengan melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam Kartu inventaris Barang yang membutuhkan koordinasi dan rekonsiliasi antara bagian pengadaan dengan bendahara barang di masing-masing OPD. c. Memerintahkan Kepala BPKAD supaya Bidang Aset melakukan verifikasi atas pencatatan aset yang dinyatakan rusak berat dan pencatatannya direklas ke Aset Lain-Lain.	LHP atas LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor: 45/LHP/XIX.PAL/05/2022 Tanggal 10 Mei 2022	Belum Sesuai Belum Sesuai Belum Sesuai
4	Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Palangka Raya TA 2022 Belum Tertib	BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang agar: a. melaksanakan inventarisasi atas keseluruhan BMD dan memutakhirkan KIB sesuai dengan kondisi terkini, termasuk aset tanah di bawah jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tanah di bawah gedung dan bangunan. b. membentuk Tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat untuk menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan terkait BMD. c. melakukan perjanjian sewa menyewa atas aset-aset yang dipinjampakaikan kepada lembaga nonpemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	LHP atas LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor: 47/LHP/XIX.PAL/05/2023 Tanggal 08 Mei 2023	Belum Sesuai Belum Sesuai Belum Sesuai
5	Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar: a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah untuk: 1) menyesuaikan kendaraan dinas pada unsur pimpinan dan pejabat sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang berlaku; 2) memproses penghapusan aset kendaraan yang telah dilelang, dan dihibahkan yang masih tercatat di KIB Peralatan dan Mesin SKPD; 3) memproses mutasi aset kendaraan yang digunakan oleh SKPD lain; 4) memproses status pinjam pakai kendaraan pada instansi vertikal; 5) menetapkan status tujuh kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah yang dimanfaatkan pihak di luar Pemerintah Kota Palangka Raya; 6) meminta pertanggungjawaban Kepala SKPD terkait, atas aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya; 7) menarik aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun dan pihak lain; 8) memperbarui sertifikat tanah hibah dengan sertifikat hak milik atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya.	LHP atas LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor: 25/LHP/XIX.PAL/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024	Belum Sesuai
		c. Memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan pencatatan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat.		Belum Sesuai

Rincian PSU Kota Palangka Raya

No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi/Alamat	Luas Perumahan (m ²)	Telah Serah Terima	Proses Serah Terima	Belum Serah Terima	Jenis PSU	PSU		KIB Dinas Perkintan
									Luas	Nilai	KIB A - Tanah
									(m ²)	(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	THS		Jl. Kalibata	6.237,00	√			tanah kosong	272,00	66.096.000,00	66.096.000,00
2	IS	PT KM	Jl. G. Obos XXIV	14.441,00	√			jalan	457,00	91.400.000,00	91.400.000,00
3	IS	PT KM	Jl. G. Obos XXIV	14.441,00	√			tanah kosong dan jalan	2018,00	403.600.000,00	403.600.000,00
4	IS	PT KM	Jl. G. Obos XXIV	14.441,00	√			jalan	754,00	96.512.000,00	96.512.000,00
5	THSST		Jl. Menteng II/III	2.573,00	√			jalan	632,00	180.120.000,00	180.120.000,00
6	THSST		Jl. Bukit Keminting	5.968,00	√			tanah kosong	128,00	36.480.000,00	36.480.000,00
7	YD		Jl. Tingang XXVI		√			tanah kosong	420,00	119.700.000,00	119.700.000,00
8	B	PT TRP	Jl. veteran 10	1.602,00	√			jalan	388,00	110.580.000,00	110.580.000,00
9	B	PT TRP	Jl. veteran 10	1.602,00	√			tanah kosong	434,00	123.690.000,00	123.690.000,00
10	B	PT TRP	Jl. veteran 10	1.602,00	√			jalan	381,00	108.585.000,00	108.585.000,00
11	B	PT TRP	Jl. veteran 10	1.602,00	√			jalan	374,00	106.590.000,00	106.590.000,00
12	YP	PT TB	Jl. Kecipir	4.403,00	√			tanah kosong dan jalan	784,00	223.440.000,00	223.440.000,00
13	B	PT TRP	Jl. Raflesia	2.381,00	√			tanah kosong	128,00	25.600.000,00	25.600.000,00
14	B	PT TRP	Jl. Raflesia	2.381,00	√			jalan	631,00	126.200.000,00	126.200.000,00
15	M	PT GAP	Jl. Tampung Penyang	1.236,00	√			tanah kosong	606,00	203.010.000,00	203.010.000,00
16	HA		Jl. Haka 14		√			jalan	756,60	121.056.000,00	121.056.000,00
17	HA		Jl. Haka 15		√			jalan	760,98	121.756.800,00	
18	HA		Jl. Haka 16		√			jalan	757,68	121.228.800,00	
19	HA		Jl. Haka 17		√			jalan	753,96	120.633.600,00	
20	HA		Jl. Haka 18		√			jalan	766,20	122.592.000,00	
21	HA		Jl. Haka 19		√			jalan	766,02	122.563.200,00	
22	HA		Jl. Haka 29		√			jalan	570,00	91.200.000,00	
23	HA		Jl. Haka 30		√			jalan	510,00	81.600.000,00	
24	HA		Jl. Haka 31		√			jalan	420,00	67.200.000,00	
25	HA		Jl. Haka 31 (sambungan)		√			jalan	1500,00	240.000.000,00	
26	CLM	PT RM	Jl. Kecipir (Cluster Ibrahim)			√		tanah kosong	1854,00	296.640.000,00	
27	JYV		Jl. Isakar Udang/Jl. Amdi XVIII			√		tanah kosong	207,00	16.974.000,00	
28	R		Jl. Mahir Mahar/Jl. KR. Muchtar			√		tanah kosong	600,00	201.000.000,00	
29	AJB		Jl. Buntu VIII		√			tanah kosong	418,00	66.880.000,00	
30	ML		Jl. Maduhara I				√	tanah kosong	200,00	20.600.000,00	
31	ML		Jl. Maduhara I				√	tanah kosong	200,00	20.600.000,00	
32	S		Jl. Sawang		√			tanah kosong	200,00	25.600.000,00	
33	K		Jl. Banteng XV/III/Jl. Dorang			√		tanah kosong	277,00	55.400.000,00	
34	SH		Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar)		√			tanah kosong	347,00	55.520.000,00	
35	B		Jl. Raflesia	7.929,00	√			tanah kosong	1037,00	106.811.000,00	
36	B		Jl. Raflesia		√			jalan	660,00	67.980.000,00	
37	B		Jl. Raflesia		√			jalan	641,00	66.023.000,00	
38	HS	PT RCM	Jl. Tampang		√			jalan	983,00	63.104.000,00	
39	HS	PT RCM	Jl. Tampang		√			jalan	788,00	50.560.000,00	
40	HS	PT RCM	Jl. Tampang	9.976,00	√			tanah kosong	200,00	12.800.000,00	
41	A		Jl. Hiu Putih	7.228,00	√			jalan	877,00	213.354.000,00	
42	A		Jl. Hiu Putih	7.228,00	√			jalan	943,00	229.149.000,00	
43	A		Jl. Hiu Putih	7.228,00	√			jalan	2186,00	531.198.000,00	
44	LLM	Perum Pemda	Jl. Merdeka	6.033,00	√			tanah kosong	204,00	26.112.000,00	
45	B		Jl. Raflesia VB	5.669,00	√			tanah kosong	448,00	89.600.000,00	
46	B		Jl. Raflesia VB	5.669,00	√			jalan	613,00	122.600.000,00	
47	B		Jl. Raflesia VB	5.669,00	√			jalan	290,00	58.000.000,00	
48	B		Jl. Raflesia VB	5.669,00	√			jalan	327,00	65.400.000,00	

No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi/Alamat	Luas Perumahan (m ²)	Telah Serah Terima	Proses Serah Terima	Belum Serah Terima	Jenis PSU	PSU		KIB Dinas Perkimtan
									Luas	Nilai	KIB A - Tanah
									(m ²)	(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
49	B		Jl. Raflesia VB	998,00	√			jalan	179,00	36.000.000,00	
50	B		Jl. Veteran 10		√			jalan	565,00	161.025.000,00	
51	B		Jl. Veteran 10		√			jalan	607,00	172.995.000,00	
52	B		Jl. Veteran 10		√			jalan	788,00	218.880.000,00	
53	B		Jl. Veteran 10		√			jalan	596,00	170.145.000,00	
54	B		Jl. Veteran 10		√			tanah kosong	2010,00	572.850.000,00	
55	SW		Jl. Nagasari		√			jalan	930,00	186.000.000,00	
56	PS	PT PJG	Jl. Pasendeng Induk	8.898,00	√			tanah kosong	200,00	40.000.000,00	
57	PS	PT PJG	Jl. Pasendeng	9.242,00	√			tanah kosong	200,00	40.000.000,00	
58	PS	PT PJG	Jl. Pasendeng	6.498,00	√			tanah kosong	269,00	53.800.000,00	
59	HMSH	S	Jl. G. Obos XIV		√			jalan	840,00	239.400.000,00	
60	HMSH	S	Jl. G. obos XIV		√			jalan	780,00	222.300.000,00	
61	HMSH	S	Jl. G. obos XIV		√			jalan	780,00	222.300.000,00	
62	HMSH	S	Jl. G. obos XIV		√			jalan	780,00	222.300.000,00	
63	HMSH	S	Jl. G. obos XIV		√			jalan	135,00	38.475.000,00	
64		PT GKM	Jl. Haka 38/Haka 34			√		jalan	1484,00	422.940.000,00	
65		PT GKM	Jl. Haka 37/Haka 34			√		jalan	1486,00	423.510.000,00	
66		PT GKM	Jl. Lamtoro Gung			√		jalan	205,00	58.425.000,00	
67		PT GKM	Jl. Lamtoro Gung			√		jalan	130,00	37.050.000,00	
68		PT GKM	Jl. Haka 33/Rindu			√		tanah kosong	443,00	126.255.000,00	
69		PT GKM	Jl. Haka 30/Rindu			√		tanah kosong	2004,00	571.140.000,00	
70	RK		Jl. GS Rubay Gg Buntu VIII			√		tanah kosong	647,00	129.400.000,00	
71	AJB		Jl. GS Rubay Gg Buntu VIII			√		jalan	319,00	63.800.000,00	
72	DWM		Jl. Piranha			√		tanah kosong	536,00	85.760.000,00	
73	MNF		Jl. Karanggan			√		tanah kosong	2178,00	620.730.000,00	
74	HMZ		Jl. Raflesia III (Tjilik Riwt)			√		tanah kosong	210,00	42.000.000,00	
75	LH		Jl. Adonis Samad		√			tanah kosong	200,00	57.000.000,00	
76	YK		Jl. Adonis Samad		√			tanah kosong	200,00	57.000.000,00	
77	HLM		Jl. G. Obos XVII/XVIII	8.574,00	√			Tanah Kosong	209,00	59.565.000,00	
78	WH		Jl. Tjilik Riwt Km. 8		√			Tanah Kosong	260,00	52.000.000,00	
79	AJB	PT BPM	Jl. Matal			√		Tanah Kosong	628,00	64.684.000,00	
80	AJB	PT BPP	Jl. Matal			√		Jalan Lingkungan	1.932,00	198.996.000,00	
81	HEW		Jl. Anggrek			√		Tanah Kosong	248,00	25.544.000,00	
82	HEW		Jl. Anggrek			√		Jalan Lingkungan	1.174,00	120.922.000,00	
83	HEWB		Jl. Anggrek			√		Jalan Lingkungan	197,00	20.291.000,00	
84	IB		Jl. Kecipir Ujung			√		Tanah Kosong	352,00	56.320.000,00	
85	YP	PT TB	Jl. Bandar Utama			√		Jalan Lingkungan dan Tanah Kosong	1.389,00	395.865.000,00	
86	YP	PT TB	Jl. Bandar Utama			√		Tanah Kosong	200,00	57.000.000,00	
87	YP	PT TB	Jl. Bandar Utama			√		Jalan Lingkungan	628,00	183.255.000,00	
88	YP	PT TB	Jl. Bandar Utama			√		Jalan Lingkungan	1.932,00	35.055.000,00	
89	PS	PT PJB	Jl. Teratai			√		tanah kosong dan jalan lingkungan	2.100,00	216.300.000,00	
90	PS	PT PJB	Jl. Teratai			√		tanah kosong	96,00	9.888.000,00	
91	PS	PT PJB	Jl. Teratai			√		tanah kosong	57,00	5.871.000,00	
92	PS	PT PJB	Jl. Teratai			√		tanah kosong	214,00	22.042.000,00	

No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi/Alamat	Luas Perumahan (m ²)	Telah Serah Terima	Proses Serah Terima	Belum Serah Terima	Jenis PSU	PSU		KIB Dinas Perkimtan
									Luas	Nilai	KIB A - Tanah
									(m ²)	(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
93	PS	PT PJB	Jl. Teratai			√		tanah kosong	92,00	9.476.000,00	
94	DSH	PT SPS	Jl. Kapakat				√	Jalan Lingkungan	744,00	76.632.000,00	
95	DSH	PT SPS	Jl. Kapakat				√	Jalan Lingkungan	831,00	85.593.000,00	
96	DSH	PT SPS	Jl. Kapakat				√	Tanah kosong	800,00	82.400.000,00	
97	DSH	PT SPS	Jl. Kapakat				√	Tanah kosong	400,00	41.200.000,00	
98	IS	PT KBM	Jl. Letkol E.A Toewak / Jl. Mahir Mahar				√		200,00		
99	IS	PT KBM	Jl. Letkol E.A Toewak / Jl. Mahir Mahar				√		200,00		
100	IS	PT KBM	Jl. Casadova Blok B				√		1.600,00		
101	IS	PT KBM	Jl. Casadova Blok C				√		1.600,00		
102	IS	PT KBM	Jl. Casadova Blok D				√		1.600,00		
103	AMSP	PT MJB	Jl. Hiu Putih XIII				√		148,00		
104	AMSP	PT MJB	Jl. Hiu Putih XIII				√		148,00		
105	AMSP	PT MJB	Jl. Hiu Putih XIII				√		140,00		
106	AMSP	PT MJB	Jl. Hiu Putih XIII				√		140,00		
107	AS	-	Jl. Letkol E.A Toewak / Jl. Mahir Mahar				√		200,00		
108	AS	-	Jl. Letkol E.A Toewak / Jl. Mahir Mahar				√		200,00		
109	DS	-	Jl. Telaga Sari				√		187,00		
110	DIMG	PT FM	Jl. Sapan XiX				√		737,00		
111	EH	-	Jl. Letkol E.A Toewak / Jl. Mahir Mahar				√		200,00		
112	FES	-	Jl. Tampung Penyang				√		230,00		
113	FES	-	Jl. Tampung Penyang				√		267,00		
114	JSH	-	Jl. Letkol E.A Toewak / Jl. Mahir Mahar				√		200,00		
115	J	-	Jl. Lingkar Dalam				√		431,00		
116	J	-	Jl. RTA Milono km. 8				√		150,00		
117	J	-	Jl. RTA Milono km. 9				√		150,00		
118	JL	-	Jl. Merdeka				√		480,00		
119	KT	-	Jl. Matal				√		600,00		
120	KT	-	Jl. Matal				√		1.728,00		
121	LVHS	-	Jl. Kalibata Blok C1				√		433,00		
122	MB	-	Jl. Siti Bakar				√		604,00		
123	MB	-	Jl. Siti Bakar				√		2.621,00		
124	MJZA	-	Jl. Raflesia Va				√		392,00		
125	M	-	Jl. Taheta				√		1.275,00		
126	PS	-	Jl. Banteng XXIII/ Jl. Dorang				√		195,00		
127	PS	-	Jl. Banteng XXIII/ Jl. Dorang				√		150,00		
128	PT BHS	-	Jl. Tampung Penyang IV				√		200,00		
129	PT BHS	-	Jl. Tampung Penyang IV				√		200,00		
130	PT EUM		Jl. Nagasari			√			174,00		
131	PT EUM		Jl. Nagasari (masuk kedalam)			√			317,00		
132	PT EUM		Jl. Nagasari (masuk kedalam)			√			158,00		
133	PT GKM		Jl. Haka 30/ Jl. Rindu			√			2.004,00		
134	PT GKM		Jl. Haka 34/ Haka 38			√			1.484,00		
135	PT GKM		Jl. Lamtoro Gung			√			205,00		
136	PT GKM		Jl. Lamtoro Gung			√			130,00		
137	PT GKM		Jl. Haka 30/ Jl. Rindu			√			443,00		
138	PT GKM		Jl. Haka 34/ Haka 37			√			1.486,00		
139	PT NMR	-	Jl. Barito Raya				√		200,00		
140	PT PBM		Jl. Matal				√		628,00		
141	PT PBM		Jl. Matal				√		1.932,00		
142	PT RBKU	-	Jl. RTA Milono				√		1.879,00		
143	PT SIP	-	Jl. Panglima Batur/ Jl. Asabri III				√				

No.	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi/Alamat	Luas Perumahan (m ²)	Telah Serah Terima	Proses Serah Terima	Belum Serah Terima	Jenis PSU	PSU		KIB Dinas Perkimtan
									Luas	Nilai	KIB A - Tanah
									(m ²)	(Rp)	(Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
144	RPI		Jl. Sengon				√		95,00		
145	R		Jl. Pasir Putih			√			300,00		
146	R	-	Jl. Manduhara I				√		145,00		
147	SB	-	Jl. Letkol E.A Toewak / Jl. Mahir Mahar				√		200,00		
148	SAF		Jl. Manduhara I			√			316,00		
149	SAF		Jl. Manduhara I			√			251,00		
150	SH	-	Jl. RTA Milono km. 5,7				√		178,00		
151	SH	-	Jl. RTA Milono km. 5,8				√		249,00		

Rekapitulasi Bukti Kepemilikan Tanah
Kota Palangka Raya per 31 Desember 2024

No.	SOPD	Bukti Kepemilikan Tanah									JUMLAH TOTAL		
		Sertifikat			SKT/Segel			Belum Diketahui			Jumlah Bidang	Luas Bidang (m2)	Nilai (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l = c + f + i	m = d + g + j	n = e + h + k
1	Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	15,00	19.557,00	22.237.505.000,00	2,00	11.636,00	169.700.000,00	-	-	-	17,00	31.193,00	22.407.205.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya	4,00	4.665,00	2.153.192.000,00	1,00	1,45	185.331.000,00	1,00	-	525.095.200,00	6,00	4.666,45	2.863.618.200,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya	13,00	10.028,00	1.052.769.600,00	-	-	-	-	-	-	13,00	10.028,00	1.052.769.600,00
4	Inspektorat Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	8,00	5.788,00	503.556.000,00	8,00	5.788,00	503.556.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	1,00	1.365,00	180.383.000,00	1,00	1.365,00	180.383.000,00
6	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	1,00	5.000,00	224.490.000,00	3,00	9.800,00	805.884.500,00	-	-	-	4,00	14.800,00	1.030.374.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	1,00	2.680,00	254.600.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.680,00	254.600.000,00
8	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	1,00	8.630,00	1.078.750.000,00	2,00	6.645,00	764.556.000,00	-	-	-	3,00	15.275,00	1.843.306.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	2,00	1.046,00	91.002.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.046,00	91.002.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	-	-	-	5,00	2.722,00	236.855.000,00	-	-	-	5,00	2.722,00	236.855.000,00
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	9,00	105.477,00	38.575.574.000,00	-	-	-	3,00	3.601,00	1.057.955.000,00	12,00	109.078,00	39.633.529.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	2,00	103.213,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	103.213,00	-
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	1,00	1.030,00	36.050.000,00	1,00	3.293,00	317.991.000,00	-	-	-	2,00	4.323,00	354.041.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	1,00	2.000,00	5.429.000.000,00	-	-	-	1,00	13.860,00	72.000.000,00	2,00	15.860,00	5.501.000.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1,00	64.315,00	466.880.000,00	3,00	63.087,24	517.960.000,00	8,00	634.250,00	2.533.122.734,00	12,00	761.652,24	3.517.962.734,00
16	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	-	-	-	1,00	1.519,00	38.000.000,00	6,00	57.400,00	265.595.000,00	7,00	58.919,00	303.595.000,00
17	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	56,00	47.576,00	15.888.123.000,00	1,00	267,00	23.763.000,00	1,00	6.059,00	319.640.000,00	58,00	53.902,00	16.231.526.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	-	-	-	6,00	10.134,00	470.829.344,32	3,00	3.004,00	133.340.180,00	9,00	13.138,00	604.169.524,32
19	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	2,00	7.199,00	632.181.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	7.199,00	632.181.000,00
20	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	1,00	18.087,00	633.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	18.087,00	633.050.000,00
21	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	1,00	120,00	62.250.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	120,00	62.250.000,00
22	Disperkintan Kota Palangka Raya	218,00	1.535.743,00	96.943.259.840,00	70,00	2.137.032,66	32.645.200.931,00	3,00	22.396,00	883.900.000,00	291,00	3.695.171,66	130.472.360.771,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	28,00	194.311,00	21.239.445.560,00	-	-	-	1.189,00	12.276.214,50	1.044.917.291.861,20	1.217,00	12.470.525,50	1.066.156.737.421,20
24	Dinas Pariwisata	3,00	36.324,00	11.583.400.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	36.324,00	11.583.400.000,00
25	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya	1,00	12.760,00	191.400.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	12.760,00	191.400.000,00
26	Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya	2,00	4.734,00	8.127.960.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.734,00	8.127.960.000,00
27	Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya	3,00	8.975,00	157.900.000,00	-	-	-	2,00	1.046,00	39.500.000,00	5,00	10.021,00	197.400.000,00
28	Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	1,00	4.096,00	64.000.000,00	-	-	-	4,00	4.396,00	562.064.900,00	5,00	8.492,00	626.064.900,00
29	Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya	1,00	17.380,00	479.800.000,00	1,00	20.000,00	7.200.000.000,00	-	-	-	2,00	37.380,00	7.679.800.000,00
30	Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya	1,00	4.046,00	1.158.240.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	4.046,00	1.158.240.000,00
31	Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	2,00	9.435,00	47.180.000,00	2,00	9.435,00	47.180.000,00
JUMLAH		369,00	2.218.992,00	228.760.822.000,00	96,00	2.266.137,35	43.376.070.775,32	1.232,00	13.038.814,50	1.052.040.623.875,20	1.697,00	17.523.943,85	1.324.177.516.650,52

Rincian Aset Peralatan dan Mesin Tidak Ditemukan

Nomor	Kode Barang	Jenis/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	000030	-	2019	-	2.196.000,00	Tempat Tidur Anak (WK I)
2	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	000031	olimpic vincent	2019	-	5.445.000,00	Tempat Tidur Dewasa (WK I)
3	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	000011	-	2019	-	3.770.000,00	Meja Makan 6 Kursi (WK II)
4	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000019	siantano	2019	-	5.612.000,00	(WK I)
5	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	000022	LG / GNB	2019	-	7.875.000,00	(WK II)
6	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	000121	LG	2019	-	5.000.000,00	(WK II)
7	1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	000009	Panasonic	2019	-	610.000,00	(WK I)
8	1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	000010 s/d 000011	CRG / 6306	2019	-	875.000,00	(WK II)
9	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000026	-	2019	-	4.000.000,00	(WK II)
10	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000027	Modena	2019	-	1.747.500,00	(WK I)
11	1.3.2.05.003.002.011	Meja Tamu Biasa	000002	bianca melody	2019	-	610.000,00	(WK I)
12	1.3.2.05.001.004.029	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	000004	Rak/Meja TV Melody	2020	-	3.375.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua I
13	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000001	Seprey + Bed Cover Sutra / kain sutra	2020	-	3.350.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua I
14	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000001	Olimpic / Meja Belajar/Baca	2020	-	1.800.000,00	Meja Belajar/Baca Olympic 1 Buah (Rujab Ketua DPRD)
15	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000001 s/d 000003	Taplak meja makan / kain	2020	-	2.250.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan (taplak meja makan) Wakil Ketua I
16	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000003	-	2020	-	1.020.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan (bed cover) Wakil Ketua II
17	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000004 s/d 000006	Taplak meja Tamu / kain	2020	-	1.125.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan (taplak meja tamu) Wakil Ketua I
18	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000008	Lemari Plywood,HPL, lampu, kaca geser / pintu geser,aluminium kaca	2020	-	11.250.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan (lemari hias helm) Wakil Ketua I
19	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000022	Lemari Pakaain Anak Merk Melody Bianca	2020	-	1.600.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua I
20	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000023	olympos / plastik	2020	-	2.000.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua I
21	1.3.2.05.002.005.004	Teko Listrik	000001 s/d 000002	Krisbow 10 liter	2020	-	4.500.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua II
22	1.3.2.05.002.005.007	Rice Warmer	000002	cosmos	2020	-	480.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan (tempat beras Cosmos) Wakil Ketua I
23	1.3.2.05.002.005.007	Rice Warmer	000003	Set Panci / stainless	2020	-	2.500.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan(panci stainless) Wakil Ketua I
24	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000007	Rak Piring	2020	-	2.150.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua I
25	1.3.2.05.002.006.034	Seterika	000006	Setrika Philip	2020	-	430.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua I
26	1.3.2.05.002.006.062	Alat Pemanas Ruangan	000006	Sharp	2020	-	5.500.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua II
27	1.3.2.08.001.018.043	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	000001	Megicom Merk Yong Ma / plastik/Besi Stanles	2020	-	800.000,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Wakil Ketua II

Nomor	Kode Barang	Jenis/ Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	Harga (Rp)	Keterangan
28	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	000035	Comporta Comfot 2 in 1 Full Set / Spring Bed	2023	-	13.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Palangka Raya
29	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	000036	Bed Set Kingkoil Fairmont / spring bed	2023	-	42.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Palangka Raya
30	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	000037	Spring Bed Kingkoil Hotel Grand Diamond / spring bed	2023	-	17.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Palangka Raya
31	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000015 s/d 000016	Subwofer Behringer VP18008 / Subwofer Behringer VP18008	2023	-	20.900.000,00	Pengadaan Sound System Subwoofer Rujab Waket II DPRD Kota Palangka Raya
32	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000017 s/d 000018	Speaker System Behringer PK115 / Speaker System Behringer PK115	2023	-	11.000.000,00	Pengadaan Speaker System Rujab Ketua II DPRD Kota Palangka Raya
33	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000019	Subwoofer active Witzon 18"	2023	-	19.050.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Audio Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya
34	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000020 s/d 000021	Speaker active witzon 12" active	2023	-	16.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Audio Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya
35	1.3.2.06.001.001.005	Audio Amplifier	000002	Ampifier Behringer NX4-600 / Ampifier Behringer NX4-600	2023	-	16.000.000,00	Pengadaan Amplifier Rujab Waket II DPRD Kota Palangka Raya
36	1.3.2.06.001.002.133	LCD Monitor	000001	Monitor touchscreen	2023	-	8.450.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Audio Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya
37	1.3.2.02.002.001.002	Gerobak Dorong	000001	ARTCO	2023	-	1.000.000,00	BOS Reguler SDN 13 Palangka Tahun 2023
38	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000001	YAMAHA	1993	KH5683AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
39	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000002	Yamaha	1993	KH5705AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
40	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	Yamaha	1993	KH5382AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
41	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000004	Yamaha	1993	KH5292AJ	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
42	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000005	Yamaha	1993	KH5347AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
43	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	Yamaha	1993	KH5742AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
44	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000008	Suzuki A.100	1993	KH5713AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
45	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000009	SUZUKI A.100 / SUZUKI A.100	1995	KH621AI	6.000.000,00	Dinas Pendidikan
46	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000010	Suzuki A.100	1993	KH5757AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
47	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000011	SUZUKI RC.100 / SUZUKI RC.100	1996	KH5709AI	6.500.000,00	Dinas Pendidikan
48	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000012	Suzuki A.100	1995	KH5152AJ	6.000.000,00	Dinas Pendidikan
49	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000013	Suzuki/A.100K	1993	KH5457AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
50	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000014	SUZUKI A100 X / SUZUKI A100 X	1993	KH8780AI	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
51	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000015	Honda C.100 / Honda C.100	1994	KH5553AI	5.000.000,00	Dinas Pendidikan
52	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000016	Suzuki 100x / Suzuki 100x	1993	KH5298AJ	4.500.000,00	Dinas Pendidikan
						Jumlah	320.470.500,00	

Rincian Aset Rusak Berat Dimusnahkan Tanpa BA Penghapusan

No	Nama Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi
1	Lemari Kayu	1.3.2.05.001.004.002	3	2002	1.410.000,00	Rusak Berat
2	Lemari Kayu	1.3.2.05.001.004.002	4	2004	300.000,00	Rusak Berat
3	Meja Sekolah	1.3.2.05.002.001.023	3	2002	610.000,00	Rusak Berat
4	Meja Sekolah	1.3.2.05.002.001.023	4	2002	5.830.000,00	Rusak Berat
5	Meja Sekolah	1.3.2.05.002.001.023	5	2004	280.000,00	Rusak Berat
6	Meja Sekolah	1.3.2.05.002.001.023	6	2004	2.330.000,00	Rusak Berat
7	Bangku Sekolah	1.3.2.05.002.001.034	1	2002	8.330.000,00	Rusak Berat
8	Bangku Sekolah	1.3.2.05.002.001.034	2	2002	460.000,00	Rusak Berat
9	Bangku Sekolah	1.3.2.05.002.001.034	3	2004	210.000,00	Rusak Berat
10	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.3.2.05.002.006.029	2	2002	420.000,00	Rusak Berat
11	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1.3.2.08.003.004.066	3	2004	2.920.000,00	Rusak Berat
12	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1.3.2.08.003.004.066	4	2004	3.650.000,00	Rusak Berat
Jumlah					26.750.000,00	

Rincian Aset Gedung dan Bangunan yang Telah Dibongkar Belum Dilakukan Proses Penghapusan

No	Nama Barang	Kode Barang	Reg	Tanggal Dokumen Gedung	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.01.002.003.001	000001	31/12/1997	32.550.000,00	Bangunan Rumdin Medis Komp Pusk.Pahandut
2	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.01.002.003.001	000002	31/12/1997	32.550.000,00	Bangunan Rumdin Medis Komp Pusk.Pahandut
3	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.01.002.003.001	000003	31/12/1997	69.750.000,00	Bangunan Rumdin Paramedis Komp Pusk.Phd
4	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1.3.3.01.002.003.001	000004	31/12/1997	69.750.000,00	Bangunan Rumdin Paramedis Komp Pusk.Phd
Jumlah					204.600.000,00	

Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Sama Dengan Lebih dari Rp20.000.000 Belum Dikapitalisasikan ke Aset Induk

Nomor	SKPD	Keterangan	Nilai
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor - Biaya Upah Tukang dan Bahan Bangunan (Semen, Cat, Batako, Pasir, dll) untuk Perbaikan Gedung Kantor BPBD pada bulan Jan - Feb 2024 kepada ALIL ALIANSYAH (Toko "USAHA MANDIRI")	30.000.000,00
2	Dinas Sosial	PEMBAYARAN PERBAIKAN TANDON AIR	30.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota P.raya Untuk Keperluan Dinkes Kota P.raya TA 2024	23.478.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Byr. Bel. Pemeliharaan Ged. Kantor DLH # Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Kantor sub keg. Pemeliharaan / rehab. Sarpras pendukung ged. Kantor	42.700.000,00
5	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Taman Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TA 2024 (SPMK No. 011/2200/Bag.Um/VI/2024) yang dilaksanakan Oleh CV. SAHABAT TANI BERKAH.	49.945.000,00
6	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Pembayaran Sekaligus (100%) atas pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Triwulan I pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024	49.394.000,00
7	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Pembayaran Sekaligus (100%) atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Triwulan II pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024	45.484.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Byr. Pemel. Atap & Lantai Ged. Bangunan UPTD Lab LH Sub keg. Pengelolaan Lab LH	35.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	Byr. Pemel. Halaman Kantor DLH Sub keg. Pemel./ Rehabilitasi Sarpras Pendukung Ged. Kantor	50.000.000,00
10	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Pembayaran 100 % atas Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. SPMK No. 480/1009/DKISP-SET/VIII/2024 (2.16.01.2.09.0009-5.1.02.03.03.0001)	22.500.000,00
11	Puskesmas Bukit Hindu	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sumber Dana Kapitasi Triwulan II UPTD Puskesmas Bukit Hindu TA 2024	29.880.250,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pmbyrn Blnja Pmlharaan Bngnan Gdng Kntor Spesifikasi : Rhab Aula di TPA Sub Keg. Pnydiaan Srna & Prsrna Pngllaan Prsmphan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota. Brdsrkan SPK No.660.1/887/DLH/II.2/SPK/VI/2024 Tgl 8 Juli 2024	30.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	Pmbyrn Blnja Pmlharaan Bngnan Gdng Kntor Spesifikasi : Rhab Aula di TPA Sub Keg. Pnydiaan Srna & Prsrna Pngllaan Prsmphan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota. Brdsrkan SPK No.660.1/887/DLH/II.2/SPK/VI/2024 Tgl 8 Juli 2024	119.700.000,00
14	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor : Pemeliharaan Ruang Arsiparis Setda Kota P. Raya Pd Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TA 2024 (SPK No.917/4286/Bag.UmIX/2024) dilaksanakan Oleh CV.EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	179.531.522,00
15	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Lantai dan Plafond Ruang Lobby Kantor Walikota Palangka Raya TA 2024 (SP No. 917/4432/Bag.Um/IX/2024) yang dilaksanakan oleh CV. ASANA KARYA	198.906.023,00
16	Dinas Perhubungan	Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (pekerjaan pemasangan dinding sekat) pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	25.000.000,00
17	Dinas Kesehatan	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Pemasangan Paving) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Untuk Keperluan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024	29.620.000,00
18	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor : Pemeliharaan Interior Lobby Kantor Walikota Kota P. Raya Pd Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya TA 2024 (SPK No.917/4751/Bag.UmIX/2024) dilaksanakan Oleh CV.NADIRA BERKAH JAYA	178.432.456,00
19	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Berupa Pemeliharaan Fasad Gedung Kantor Walikota pd Bag. Umum Setda Kota P. Raya TA 2024 (SPK No. 917/5237/Bag.Um/X/2024) yang Dilaksanakan Oleh CV. CINERE JAYA PERKASA	195.778.391,00
20	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Command Center Kantor Walikota P. Raya pd Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ktr dan Bangunan Lainnya T.A. 2024 (Berdasarkan No. SPK 917/5276/Bag.Um/X/2024) yg Dilaksanakan CV. AT THAIBA	199.691.847,00
21	Sekretariat Daerah	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor- Pemeliharaan Gedung Kantor : Pemeliharaan Taman Kantor pd Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya T.A. 2024	49.945.000,00
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pembayaran atas belanja perbaikan toilet Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya TA. 2024	20.000.000,00
23	Dinas Kesehatan	dibayar belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor (bahan pemasangan paving) dinas kesehatan kota palangkaraya untu keperluan dinas kesehatan kota palangkaraya tahun anggaran 2024	29.925.000,00
24	Dinas Kesehatan	dibayar belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor (bahan pemasangan paving) dinas kesehatan kota palangkaraya untu keperluan dinas kesehatan kota palangkaraya tahun anggaran 2024	23.906.693,00
25	Kelurahan Petuk Katimpun	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Pekerjaan Pemasangan Kanopi dan Cor Lantai Aula Basara Kelurahan Petuk Ketimpun berdasarkan SPK No: 140.800/125.a/KI-Ptk/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tahun Anggaran 2024.	29.500.000,00
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor (Penyekatan Ruang) Dinas Dukcapil. Biaya dibebankan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.512.400,00
27	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pembayaran atas belanja Pengecatan dan Pengecoran Parit Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TA. 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sesuai dengan Surat Keputusan Tentang Pekerja Harian Lepas (PHL) Nomor : 870/111/DPKUKMP-Sekt.3/IX/2024 Tanggal 6 September 2024	45.000.000,00

Nomor	SKPD	Keterangan	Nilai
28	Dinas Lingkungan Hidup	Byr Bel. Pemeliharaan Gedung kantor DLH #pekerjaan Rehap Atap, KM.WC, Pasang Pintu & Pengecatan DLH Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung kantor	32.600.000,00
29	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Berupa Pemeliharaan Pintu Bagian Pengadaan Barang/ Jasa SETDA Kota Palangka Raya TA 2024 (SPK No. 917/5866/Bag.Um/XI/2024) yang dilaksanakan oleh CV. AT THAIBA	49.478.250,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	Byr Pemeliharaan Drainase Halaman Kantor DLH Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor dan Bangunan Lainnya 1 Paket	50.000.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pembayaran Sekaligus 100% atas pekerjaan perencanaan Interior Kantor Bappedalitbang (Lingkar Dalam) TA 2024 berdasarkan Surat Perjanjian No.027/2861/Set/Bapplitbang/XI/2024 pada Bappedalitbang Kota Palangka Raya	91.575.000,00
32	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Pintu dan Interior Kantor Wali Kota P. Raya pd Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ktr dan Bangunan Lainnya (Berdasarkan SPMK : 011/6339/Bag.Um/XI/2024) dilaksanakan oleh CV. PRIMAJAYA	49.952.220,00
33	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Toilet Kantor Wali Kota P. Raya pd Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya T.A. 2024 (Berdasarkan SPK : 917/6412/Bag.Um/XI/2024) dilaksanakan Oleh CV. Dua Putra Jaya	199.643.820,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran 100 % (seratus persen) atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 934/229/Sat.Pol PP/XI/2024 tgl. 15 November 2024 oleh CV. PRIMA SAMBELUM WIJAYA Palangka Raya	99.819.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pembayaran Sekaligus 100% atas pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bappedalitbang Kota P.Raya (Lingkar Dalam) berdasarkan Surat Perjanjian No.027/3113/Set/Bapplitbang/XI/2024 tanggal 20 November 2024	99.500.000,00
36	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Walikota P. Raya pd Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya T.A. 2024 (Berdasarkan SPMK : 011/6521/Bag.Um/XI/2024) Dilaksanakan Oleh CV. MAHAKARYA UTAMA	49.998.562,00
37	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Ruang Tunggu Kantor Walikota P. Raya pd Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya T.A. 2024 (Berdasarkan SPK : 917/6112/Bag.Um/XI/2024) Dilaksanakan oleh CV. MAHER KONSTRUKSI	199.286.992,00
38	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Pembayaran Sekaligus (100%) atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Triwulan III dan IV pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.Nomor.SP.000.2.3.1/1213/BPPRD/VIII/2024 No.0303/BAST/DJP-PLK/XII/2024	50.164.000,00
39	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Pembayaran Sekaligus (100%) atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Triwulan III dan IV pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.Nomor.SP.000.2.3.1/1213/BPPRD/VIII/2024 No.0303/BAST/DJP-PLK/XII/2024	49.910.000,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kwitansi Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (upah tenaga kerja)	23.200.000,00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kwitansi Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (upah tenaga kerja)	43.950.000,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Rekonstruksi Pemeliharaan Gedung Kantor BPBD berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2266/SPK/BPBD.SET.III/XII/2024 tgl 06 Des 2024 kepada CV. BERINGIN PERKASA ABADI (ISA JAMARRUL KHAHAR)	127.400.000,00
43	Dinas Lingkungan Hidup	Pemby B.Pemeliharaan bgn gdg - bgn gdg tmpt Kerja-Bgnn gdg ktr-b. Rehab tmpt Penyimpanan sementara smph B3 pd sub keg Sapras Pengel Persmphn di TPA/TPST/SPA Kab/Kota ,berdsrkan SPK no : 660.1/1775/DLH/II.2/SPK/XI/2024 tgl 19 nov 24	99.500.000,00
44	Sekretariat Daerah	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Gedung Tempat Kerja di Lingkungan SETDA Kota Palangka Raya TA 2024 (SPK No. 917/6724/Bag.Um/2024) Yang dilaksanakan Oleh CV. VINCENT XAVIER JORDAN	99.678.000,00
45	Dinas Pendidikan	Pembayaran sekaligus 100% Penimbunan Halaman SMPN 6 Palangka Berdasarkan SPK No. 400.3.6.6/6189/Disdik.SMP/XI/2024, Tgl. 22/11/2024. Sumber Dana DAU Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya TA. 2024	199.684.471,00
Jumlah			3.428.170.897,00

RENCANA AKSI



RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
PADA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Nomor LHP : 43.B/LHP/XIX.PAL/06/2025
Tanggal : 20 Juni 2025
Dirjen/BPK Perwakilan : Dirjen Keuangan Negara VI/ BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
1	Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala BPPRD untuk: a. Menyusun mekanisme (SOP) terkait langkah-langkah responsif dalam implementasi perubahan tarif pajak; b. Melakukan langkah-langkah penerbitan SKPDKB sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan berkas SPTPD yang dilaporkan oleh WP termasuk	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Kepala BPPRD untuk: a. Menyusun mekanisme (SOP) terkait langkah-langkah responsif dalam implementasi perubahan tarif pajak; b. Melakukan langkah-langkah penerbitan SKPDKB sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan berkas SPTPD yang dilaporkan oleh WP termasuk pemeriksaan silang dengan	1. Minggu ke-1 Bulan Juli 2025; 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; 3. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; dan 4. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025.	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala BPPRD; 2. Mekanisme/SOP terkait langkah-langkah responsif dalam implementasi perubahan tarif pajak; 3. SKPDKB atas PBJT – Kesenian dan Hiburan; dan 4. Surat Perintah Kepala BPPRD kepada Kepala Bidang Pelayanan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan berkas SPTPD yang dilaporkan oleh WP.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		pemeriksaan silang dengan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum melakukan penetapan PBJT atas Kesenian dan Hiburan.	laporan keuangan Wajib Pajak sebelum melakukan penetapan PBJT atas Kesenian dan Hiburan.		
2	Potensi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan Bank Kalteng atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa satu bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan yang mengatur antara lain terkait dengan tarif sewa dan jangka waktu.	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan Bank Kalteng atas Pemanfaatan Aset Daerah berupa satu bangunan ATM di Halaman Pasar Kahayan yang mengatur antara lain terkait dengan tarif sewa dan jangka waktu.	1. Minggu ke-1 Bulan Juli 2025; dan 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025;	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian; dan 2. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bank Kalteng atas Pemanfaatan Aset Daerah.
3	Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha BDS di Jalan Ahmad Yani	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar menyepakati dan kemudian menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh PT BI.	Wali Kota Palangka Raya akan menyepakati dan kemudian menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh PT BI.	1. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; dan 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025;	1. Surat Kesepakatan antara Wali Kota dengan PT BI mengenai tarif Retribusi Pelayanan Tempat Kegiatan Usaha atas tanah dan bangunan; dan 2. Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan yang mencantumkan tarif sewa kepada PT BI.
BELANJA					
1	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara pada 13 SKPD Tidak sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk: a. Memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp63.298.706,00; dan b. Menginstruksikan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melakukan monitoring data kepegawaian dan berkoordinasi dengan Pembuat Daftar Gaji untuk melaporkan	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk: a. Memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp63.298.706,00; dan b. Menginstruksikan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melakukan monitoring data kepegawaian dan berkoordinasi dengan Pembuat Daftar Gaji untuk melaporkan	1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; dan 3. Minggu ke-1 Bulan Agustus 2025;	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala SKPD terkait; 2. Surat Tanda Setoran dan Rekening Koran; dan 3. Surat Perintah Kepala SKPD terkait kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		perubahan status pegawai antara lain perceraian, tanggungan anak, cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar kepada BPKAD untuk penyesuaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.	perubahan status pegawai antara lain perceraian, tanggungan anak, cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar kepada BPKAD untuk penyesuaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.		
2	Realisasi Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada masing-masing SKPD dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing senilai Rp41.225.000,00, Rp1.250.000,00, Rp4.968.000,00, dan Rp117.367.500,00.	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada masing-masing SKPD dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing senilai Rp41.225.000,00, Rp1.250.000,00, Rp4.968.000,00, dan Rp117.367.500,00.	1. Minggu ke-1 Bulan Juli 2025; dan 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; dan	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala SKPD terkait; dan 2. Surat Tanda Setoran dan Rekening Koran.
3	Pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan: a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk memproses kelebihan pembayaran jasa konsultansi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp34.500.000,00 yang dilaksanakan oleh CV GPM; b. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan: 1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan supaya di masa yang akan	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan: a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk memproses kelebihan pembayaran jasa konsultansi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp34.500.000,00 yang dilaksanakan oleh CV GPM; b. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan: 1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan supaya di masa yang akan datang memastikan	1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; 3. Minggu ke-3 Bulan Juli 2025; dan 4. Minggu ke-3 Bulan Juli 2025;	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dan Kepala SKPD Terkait; 2. Surat Tanda Setoran dan Rekening Koran; 3. Surat Perintah Kepala SKPD terkait kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan; dan 4. Surat Perintah Kepala SKPD terkait kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		<p>datang memastikan keberadaan dan keterlibatan personel yang akan diajukan oleh penyedia jasa; dan</p> <p>2) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya melakukan verifikasi dan validasi secara memadai atas kelengkapan dan keabsahan bukti pembayaran dari penyedia.</p>	<p>keberadaan dan keterlibatan personel yang akan diajukan oleh penyedia jasa; dan</p> <p>2) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya melakukan verifikasi dan validasi secara memadai atas kelengkapan dan keabsahan bukti pembayaran dari penyedia.</p>		
4	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	<p>BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar:</p> <p>a. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing senilai Rp10.970.870,00 dan Rp625.138,00; dan</p> <p>b. Mengevaluasi dan menyelaraskan Peraturan Wali Kota tentang perjalanan dinas dengan ketentuan yang berlaku dan menguraikan teknis penggunaan dokumen Daftar Pengeluaran Riil pada pertanggungjawaban perjalanan dinas.</p>	<p>Wali Kota Palangka Raya akan:</p> <p>a. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing senilai Rp10.970.870,00 dan Rp625.138,00; dan</p> <p>b. Mengevaluasi dan menyelaraskan Peraturan Wali Kota tentang perjalanan dinas dengan ketentuan yang berlaku dan menguraikan teknis penggunaan dokumen Daftar Pengeluaran Riil pada pertanggungjawaban perjalanan dinas.</p>	<p>1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025;</p> <p>2. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; dan</p> <p>3. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025</p>	<p>1. Surat Perintah Wali Kota kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>2. Surat Tanda Setoran dan Rekening Koran; dan</p> <p>3. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku dan menguraikan teknis penggunaan dokumen Daftar Pengeluaran Riil pada pertanggungjawaban perjalanan dinas.</p>
5	Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan	<p>BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal</p>	<p>Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal melaksanakan tugas pokok</p>	<p>1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; dan</p> <p>2. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025.</p>	<p>1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan</p> <p>2. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
	Penataan Ruang Tidak Sesuai Kontrak	melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.	dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.		Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing SKPD.
6	Pengelolaan Belanja Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga untuk menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga untuk menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.	1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; dan 2. Minggu ke-2 Bulan Agustus 2025.	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga; dan 2. Mekanisme monitoring dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
7	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Tidak Sesuai Kontrak	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.	1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; dan 2. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; dan 3. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025.	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 2. Surat Perintah Sekretaris Daerah kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pembuat Komitmen; dan 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing SKPD.
8	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan:	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan:	1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025;	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat,

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
	pada Dua SKPD Tidak Sesuai Kontrak	<p>a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp48.528.803,48 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl Jatayu menuju Mahir Mahar II, Jl Bondol XVI, Jl Bondol, Jl Bondol XIV, Jl Bondol XV, Jl Bondol XIII, Jl Bondol XI, Jl Mahir Mahar II A, Jl Bondol VI, Jl Bondol Raya, Jl Mahir Mahar IV yang dilaksanakan oleh CV GP; dan</p> <p>b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.</p>	<p>a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp48.528.803,48 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jatayu Raya, Jl Jatayu menuju Mahir Mahar II, Jl Bondol XVI, Jl Bondol, Jl Bondol XIV, Jl Bondol XV, Jl Bondol XIII, Jl Bondol XI, Jl Mahir Mahar II A, Jl Bondol VI, Jl Bondol Raya, Jl Mahir Mahar IV yang dilaksanakan oleh CV GP; dan</p> <p>b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen pada paket pekerjaan terkait untuk lebih optimal melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam melakukan pengendalian kontrak.</p>	<p>2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; dan</p> <p>3. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025.</p>	<p>Kawasan Permukiman dan Pertanahan;</p> <p>2. Surat Tanda Setoran dan Rekening Koran; dan</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing SKPD.</p>
ASET					
1	Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	<p>BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan:</p> <p>a. Kepala SKPD terkait melaporkan aktivitas pembukaan dan penutupan rekening kepada Wali</p>	<p>Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan:</p> <p>a. Kepala SKPD terkait melaporkan aktivitas pembukaan dan penutupan rekening kepada Wali Kota melalui BUD dengan tertib; dan</p>	<p>1. Minggu ke-1 Bulan Juli 2025; dan</p> <p>2. Minggu ke-4 Bulan Juli 2025.</p>	<p>1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala SKPD terkait dan Kepala BPKAD; dan</p> <p>2. BA Rekonsiliasi Bank dengan BUD secara berkala.</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
		Kota melalui BUD dengan tertib; dan b. Kepala BPKAD selaku BUD melakukan rekonsiliasi antara Bank dengan BUD secara berkala dan segera melakukan koreksi jika terdapat perbedaan dan atau kesalahan dalam proses <i>posting</i> oleh bank.	b. Kepala BPKAD selaku BUD melakukan rekonsiliasi antara Bank dengan BUD secara berkala dan segera melakukan koreksi jika terdapat perbedaan dan atau kesalahan dalam proses <i>posting</i> oleh bank.		
2	Pengelolaan Kas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk: a. Menunjuk dan menetapkan Bendahara Dana BOSP pada SD Negeri 8 Menteng; dan b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Kesetaraan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada bendahara Dana BOSP pada Satdikpaud dan Satdikkesetaraan.	Wali Kota Palangka Raya akan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar: a. Menunjuk dan menetapkan Bendahara Dana BOSP pada SD Negeri 8 Menteng; dan b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Kesetaraan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada bendahara Dana BOSP pada Satdikpaud dan Satdikkesetaraan.	1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025; dan 3. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025.	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala Dinas Pendidikan; 2. SK Penetapan Bendahara Dana BOSP pada SD Negeri 8 Menteng; dan 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Kesetaraan.
3	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan masing-masing Kepala SKPD terkait untuk melakukan antara lain inventarisasi barang milik daerah, memutakhirkan data status pengelolaan dan kepemilikan, pengatribusian ke aset induk dalam daftar Barang Milik Daerah serta memutakhirkan Kartu Inventaris Barang untuk kemudian melakukan koreksi sesuai dengan kondisi masing-masing aset tetap yang dimiliki.	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan masing-masing Kepala SKPD terkait untuk melakukan antara lain inventarisasi barang milik daerah, memutakhirkan data status pengelolaan dan kepemilikan, pengatribusian ke aset induk dalam daftar Barang Milik Daerah serta memutakhirkan Kartu Inventaris Barang untuk kemudian melakukan koreksi sesuai dengan kondisi masing-masing aset tetap yang dimiliki.	1. Minggu ke-1 Bulan Juli 2025; 2. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; dan 3. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025.	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Sekretaris Daerah; dan 2. Surat Perintah Sekretaris Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan masing-masing Kepala SKPD; dan 3. Hasil inventarisasi barang milik daerah, memutakhirkan data status pengelolaan dan kepemilikan, pengatribusian ke aset induk dalam daftar Barang Milik Daerah serta memutakhirkan Kartu Inventaris Barang untuk kemudian melakukan koreksi sesuai dengan kondisi masing-masing aset tetap yang dimiliki.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan (Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6
4	Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi	BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya agar menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Aset Properti Investasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.	Wali Kota Palangka Raya akan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Aset Properti Investasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.	1. Minggu ke-2 Bulan Juli 2025; dan 2. Minggu ke-3 Bulan Agustus 2025.	1. Surat Perintah Wali Kota kepada Kepala BPKAD; dan 2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya terkait dengan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Aset Properti Investasi.

Palangka Raya, 20 Juni 2025

Pemerintah Kota Palangka Raya
Wali Kota Palangka Raya



Fairid Naparin, S.E.